

PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL

Without a global revolution in the sphere of human consciousness, nothing will change for the better... and the catastrophe toward which this world is headed, whether it be ecological, social, demographic or a general breakdown of civilization, will be unavoidable" (Václav Havel)

Kurang lebih empat dekade pembangunan sebagaimana yang dipraktikkan hingga sekarang tidak menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan maupun standart hidup rakyat miskin di dunia. Angka kemiskinan di dunia menunjukkan kondisi yang konstan bahkan cenderung meningkat, demikian pula kualitas hidup penduduk miskin. Model pembangunan ortodox tidak mampu mengikis kondisi-kondisi buruk kehidupan rakyat miskin seperti kekurangan gizi, keterbatasan pendidikan, serangan penyakit, dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak konflik politik dan peperangan. Model pembangunan ortodox bahkan ikut andil dalam semakin memburuknya kondisi penduduk miskin di dunia.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa. Buku ini merupakan buku yang merefleksikan hasil kajian empirik dalam bentuk penelitian strategis nasional yang bertujuan untuk merumuskan strategi ataupun model pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi dalam kerangka pembangunan ekonomi, khususnya yang berada dalam perspektif kerangka kekuatan ekonomi lokal.

PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

STRATEGI PEMBANGUNAN
MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL

PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT:

STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL



EDISI KEDUA

Muhammad Hasan
Muhammad Azis

Penerbit :



**PEMBANGUNAN
EKONOMI &
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**
*Strategi Pembangunan Manusia
dalam
Perspektif Ekonomi Lokal*

EDISI KEDUA

**Muhammad Hasan
Muhammad Azis**

2018

**PEMBANGUNAN EKONOMI
& PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT**
*Strategi Pembangunan Manusia dalam
Perspektif Ekonomi Lokal*

Pengarang:

Muhammad Hasan, S.Pd.,M.Pd.

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi FE UNM

Dr. H. Muhammad Azis, M.Si.

Dosen Tetap Program Studi Pendidikan Akuntansi FE UNM

Layout dan Sampul : Zaiful

Diterbitkan oleh :

CV. Nur Lina

ISBN : 978-602-51907-6-6

Bekerjasama

Pustaka Taman Ilmu

Cetakan I Mei 2018

Hak cipta ada pada penulis

All right reserved

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2002

Tentang Hak Cipta

Mimpi dan cita-cita merupakan kunci untuk meraih kesuksesan, oleh karena itu milikilah mimpi dan cita-cita. Namun yakinlah untuk meraih mimpi dan cita-cita itu akan penuh dengan rintangan dan jalan berliku. Berusaha dan berdoalah, niscaya rintangan dan jalan berliku itu akan mampu engkau lalui.

Kupersembahkan karya ini kepada semua orang yang telah berjasa untuk mewujudkan mimpi dan cita-citaku

(Muhammad Hasan)

Mohammad Hatta (Daulat Ra'jat, 20 September 1931)

“Bagi kita, ra’jat itoe jang oetama, ra’jat oemoem jang mempoenjai kedaulatan, kekuasaan (Souvereiniteit). Karena ra’jat itoe jantoeng-hati Bangsa. Dan ra’jat itoelah jang mendjadi oekoeran tinggi rendah deradja kita. Dengan ra’jat itoe kita akan naik dan dengan ra’jat kita akan toeroen. Hidoep atau matinya Indonesia Merdeka, semoeanja itoe bergantoeng kepada semangat ra’jat. Pengandjoer-pengandjoer dan golongan kaoem terpeladjar baroe ada berarti, kalau dibelakangnja ada ra’jat jang sadar dan insjaf akan kedaulatan dirinja”.

Mohammad Hatta (Ke Arah Indonesia Merdeka, 1932)

“...Asas Kerakyatan mengandung arti, bahwa kedaulatan ada pada rakyat. Segala Hukum (Recht, peraturan-peraturan negeri) haruslah bersandar pada perasaan Keadilan dan Kebenaran yang hidup dalam hati rakyat yang banyak, dan aturan penghidupan haruslah sempurna dan berbahagia bagi rakyat kalau ia beralasan kedaulatan rakyat. Asas kedaulatan rakyat inilah yang menjadi sendi pengakuan oleh segala jenis manusia yang beradap, bahwa tiap-tiap bangsa mempunyai hak untuk menentukan nasib sendiri...”.

Joan Robinson (1962)

“... Suatu sebab yang dapat menjelaskan mengapa kehidupan modern telah menjadi demikian tidak nyamannya adalah karena kita telah menjadi sadar-diri tentang hal-hal yang sebelumnya telah dianggap sebagai semestinya. Semula orang mempercayai apa yang dipercayainya karena mereka mengira hal tersebut memang demikian halnya, ataupun karena dianggap benar oleh mereka yang dianggap dapat berpikir secara benar ... kita mulai mempertanyakan: mengapa saya mempercayai apa yang saya percayai sebagai benar.... Kebenaran tidak lagi menjadi benar. Kejahatan tidak lagi menjadi sesuatu yang jahat 'Semua tergantung pada apa sebenarnya yang dimaksudkan'. Tetapi kalau demikian halnya maka kehidupan akan menjadi mustahil — untuk itu kita harus menemukan suatu jalan keluar ...”.

M. Teresa Lunati (1997)

“... ‘*Homo economicus*’ atau ‘manusia ekonomi’ adalah agen individual yang berada di pusat teori ekonomi neoklasik (teori utilitarian, hedonis dan menitikpusatkan pada diri-sendiri, yang rasionalis dan beretika individualis). Ia egois, rasional, berupaya untuk mencapai utilitas secara maksimum. Ia bertindak secara independen dan nonkooperatif, sebagai atom sosial yang terisolasi tanpa mempunyai naluri akan masyarakat sekitarnya, dan perilakunya dimotivasi semata-mata oleh kepentingan-diri pribadi secara sempit. *Economic man* atau manusia ekonomi bersifat materialistik tanpa emosi samasekali dan merupakan manusia yang membuat perhitungan dengan kepala dingin: ia seorang ‘egois yang rasional’ ... ‘*Homo economicus*’ modern secara bengis bersikap rasional, ia tamak dan oportunistik; ia tak dapat dipercaya dan ia tidak mempercayai orang lain, ia tidak mampu memberi komitmen dan akan selalu berupaya untuk mendapat manfaat secara gratis; ia menganggap keegoisannya serta segala sifat dan perilakunya sebagai wajar...”. Sebaliknya: “... ‘*Homo ethicus*’ samasekali berbeda dan bahkan merupakan kebalikan dari *homo economicus*. Ia seorang altruistik dan individu yang kooperatif, jujur dan cenderung berbicara tentang kebenaran, ia dapat dipercaya dan mempercayai orang lain. Ia memperoleh kepuasan moral dan emosional dari menghormati kewajibannya kepada orang lain, ia mempunyai kesadaran yang tinggi akan kewajiban dan mempunyai komitmen yang kuat atas tercapainya tujuan-tujuan sosial. Ia merupakan seorang ‘*team-player*’ alamiah, ia dapat secara efektif mengkoordinasi tindakannya dengan tindakan orang lain dan bekerja demi manfaat bersama dengan orang lain. Ia menganggap resiprositas merupakan sesuatu yang wajar, meskipun bukan sebagai alasan penting agar ia bisa mendapat manfaat secara gratis atau berperilaku dalam suatu kepentingan kolektif ...”.

Amartya Sen (1990)

“... seberapa tepatkah asumsi maksimisasi kepentingan-pribadi merupakan penggambaran dari perilaku manusia yang sebenarnya? Apakah yang dinamakan ‘*economic man*’, yang mengejar kepentingan diri-pribadinya, memberikan suatu perkiraan yang paling mendekati perilaku manusia, paling tidak di

bidang ekonomi? Hal ini memang merupakan asumsi standar dalam ilmu ekonomi ... pernyataan bahwa teori kepentingan diri-pribadi 'akan menang' biasanya didasarkan pada suatu pemikiran teoretis secara khusus dari pada atas dasar pembuktian empiris ... permasalahan yang paling mendasar sebenarnya adalah apakah ada berbagai pluralitas motivasi yang beragam, atau apakah hanya terdapat kepentingan diri-pribadi semata yang mendorong manusia dalam berperilaku...".

Joan Robinson (1962)

"... Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan ... Para penganut mazhab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia...".

Leah Greenfeld (2001)

"... Meskipun ada yang mengatakan bahwa dewasa ini kita berada pada masa kapitalisme tahap lanjut, dan bahkan mungkin telah mencapai tahap pascaindustrialisasi, tidak dapat dipungkiri bahwa nasionalisme ... tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menghilang... Nasionalisme pertama kali muncul di Inggris dan telah sangat mempengaruhi pandangan masyarakatnya ... ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekonomian modern ternyata tidak berlangsung secara berkesinambungan; pertumbuhan hanya akan berkesinambungan justru jika di dorong dan di topang oleh nasionalisme...".

Umer Chapra (2002)

"... Keterkutukan ilmu ekonomi konvensional (yang dimaksudkan adalah aliran neoklasik: *penulis*) atas pertimbangan nilai serta diberikannya tekanan yang berlebihan pada peningkatan harta dan pencapaian kepuasan atas kebutuhan secara maksimal serta pengabdian pada kepentingan diri-pribadi, merupakan suatu penyimpangan yang jelas dari filsafat dasar sebagian besar agama ... Agama-agama ini umumnya berpendirian bahwa kemakmuran

materiil, meskipun perlu, tidaklah mencukupi untuk mencapai kesejahteraan manusia ... selain itu, meskipun persaingan sangat perlu, persaingan tidak cukup memadai untuk dapat mengendalikan kepentingan individu dan dapat menjamin terpeliharanya kepentingan sosial, ataupun dapat menghindari setiap bentuk perbuatan salah dan ketidakadilan...”.

George Soros (1998)

“... tetapi fundamentalisme pasar telah menjadi demikian kuatnya sehingga kekuatan politik manapun yang berani menentangnya akan dicap sebagai sentimental, tidak logis dan naif Namun sebenarnya fundamentalisme pasar itu sendirilah yang naif dan tidak logis. Andaikata kita mengenyampingkan masalah-masalah yang lebih luas yang menyangkut moralitas dan etika serta memfokuskan diri hanya pada bidang ekonomi, maka ideologi fundamentalisme pasar pun masih mengandung kelemahan yang sangat mendalam dan yang tak dapat diperbaiki lagi. Pendek kata, apabila kekuatan pasar dibiarkan bebas secara penuh, meskipun di bidang murni ekonomi dan keuangan murni, maka kekuatan pasar ini akan menghasilkan kekacauan dan pada akhirnya menuju pada hancurnya tatanan kapitalisme global. Hal ini merupakan implikasi yang paling jelas dari argumentasi saya di dalam buku ini...”.

Robert Heilbroner dan Lester C. Thurow (1994)

“... mekanisme pasar adalah suatu instrumen yang tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bahkan untuk masyarakat yang telah makmur ... mekanisme pasar merupakan pelayan yang rajin bagi yang kaya, tetapi tak peduli pada yang miskin ... mekanisme pasar mendorong perbuatan yang tidak bermoral, hal mana tidak hanya merupakan suatu kegagalan ekonomi tetapi juga merupakan suatu kegagalan moral ...”.

Lester C. Thurow (1983)

“... ilmu ekonomi sedang berada dalam keadaan yang kacau ... ilmu ekonominya buku teks dan yang diajarkan di berbagai sekolah pascasarjana tidak saja masih mengajarkan model harga-lelangan tetapi telah menuju pada penafsiran yang semakin sempit ... kecanggihan pendekatan matematis semakin meninggi

tatkala pemahaman tentang dunia realita menurun ... ilmu ekonomi memang tak akan ada tanpa adanya penyederhanaan asumsi, namun triknya yang penting adalah dapat menggunakan asumsi yang tepat pada waktu yang tepat, dan kemampuan menilai ketepatan ini harus timbul dari analisis-analisis empirik termasuk yang dipergunakan oleh para ahli sejarah, para psikolog, ahli ilmu sosial dan para ilmu politik...”.

Lester C. Thurow (2000)

“... Perlu dijaga keseimbangan antara persaingan dan kerja-sama ... Di lain pihak, dalam sistem kapitalisme para pihak yang menang tidak perlu bermusyawarah dengan para pihak yang kalah di dalam aparat perencanaan. Pihak yang menang dengan bengis akan meminggirkan para pihak yang kalah di dalam pasar ... Sejarah telah memberi suatu pelajaran yang jelas. Pendulum dapat mengayun terlalu jauh ke salah satu arah ...”.

George Soros (1998)

“...Terdapat suatu anggapan yang telah meluas bahwa demokrasi dan kapitalisme berjalan bersamaan. Dalam kenyataan, hubungannya sangat kompleks. Kapitalisme membutuhkan demokrasi sebagai kekuatan pengimbang karena sistem kapitalisme itu sendiri tidak mempunyai kecenderungan untuk mencapai ekuilibrium. Para pemilik modal berupaya untuk memaksimalkan laba mereka. Apabila cara-cara mereka dibiarkan secara lepas, maka mereka akan terus berupaya untuk mengakumulasi modal sampai suatu tingkat ketika tercapai ketidakseimbangan. Marx dan Engels, 150 tahun yang lalu, telah membuat suatu kajian yang sangat baik tentang sistem kapitalis, yang menurut pendapat saya, dalam beberapa segi lebih baik daripada teori ekuilibrium yang dikemukakan kaum ekonom klasik. Pemecahan yang mereka usulkan, yaitu komunisme, ternyata lebih buruk daripada penyakitnya sendiri. Tetapi sebab utama mengapa ramalan mereka yang suram tidak menjadi kenyataan adalah karena adanya langkah-langkah intervensionis politik sebagai penyeimbang di berbagai negara demokratis. Sayangnya, kita sekali lagi berada dalam bahaya untuk mengambil kesimpulan yang salah dari pelajaran yang dapat dipetik dari sejarah. Kali ini bahayanya bukan datang dari komunisme tetapi dari fundavi| Pembangunan Ekonomi

mentalisme pasar. Komunisme telah menghapuskan mekanisme pasar dan memberlakukan pengendalian kolektif atas semua aktivitas ekonomi. Fundamentalisme pasar berupaya menghapuskan keputusan kolektif dan memaksakan supremasi nilai-nilai pasar terhadap seluruh nilai-nilai politik dan sosial. Kedua ekstrem ini keliru, yang kita perlukan adalah suatu keseimbangan yang tepat antara politik dan pasar, antara membuat aturan dan berperilaku menurut aturan...”.

George W. Bush (2002)

“... Konsep ‘pasar-bebas’ muncul sebagai suatu prinsip moral bahkan sejak sebelum menjadi sebuah tiang ilmu ekonomi. Apabila anda bisa membuat sesuatu yang pihak-pihak lain menghargainya, anda harus dapat menjualnya kepada mereka. Apabila pihak-pihak lain membuat sesuatu yang anda menghargainya, maka anda harus dapat pula membelinya. Ini adalah kebebasan yang sebenarnya, untuk seseorang—atau suatu negara—dalam mencari penghidupan...”. (Bagian dari American Defence and Security Strategy).

James Petras dan Henry Veltmeyer (2001)

“... dinamika globalisasi di Asia, negara-negara bekas Uni Soviet, Afrika dan Amerika Latin sedang menimbulkan banyak kesengsaraan hidup, tetapi juga telah menciptakan suatu kesempatan historis untuk dapat mencapai sesuatu yang melebihi kapitalisme. Akan merupakan suatu kegagalan keberanian yang besar berpuas dengan mencapai sesuatu yang lebih rendah daripada suatu masyarakat sosialis ‘baru’, yaitu suatu bangsa baru sebagai suatu bagian dari keseluruhan yang integral, suatu budaya barunya kaum partisipan dan bukan kaum penonton, suatu internasionalisme baru dari semua pihak yang berkedudukan setara ...”.

Lester C. Thurow (2000)

“... belajar untuk mengetahui bagaimana caranya membuat perekonomian global baru ini beroperasi akan memerlukan waktu yang tidak sedikit, disertai hal-hal tak terduga dan berbagai kekeliruan sepanjang jalannya. Namun transisi dari lingkup nasional ke lingkup global akan jauh lebih bergejolak daripada

transisi dari lokal ke nasional. Ketika dunia beralih dari ekonomi lokal ke ekonomi nasional, telah ada pemerintah-pemerintahan nasional yang siap belajar bagaimana caranya untuk mengelola prosesnya. Di lain pihak, tidak ada pemerintah global dapat belajar bagaimana caranya untuk mengelola perekonomian global ... Parlemen Amerika sangat tidak menyukai istilah '*super national*': tak ada pihak manapun yang akan mendirikan suatu pemerintah global dalam waktu dekat ini – terlepas apakah keberadaan pemerintahan global itu memang dibutuhkan atau tidak. Karenanya, dunia akan mempunyai suatu perekonomian global tanpa suatu pemerintahan global. Implikasinya adalah akan adanya suatu perekonomian global tanpa adanya aturan dan peraturan yang dapat ditegakkan, yang telah disepakati bersama, dan juga tak ada aparat penegak hukum yang dapat dimintai bantuannya apabila ada pihak yang merasa telah diberlakukan secara tidak adil...".

Jan Tinbergen (1978)

"... kesederhanaan gaya hidup merupakan tujuan pokok dari pembangunan individu dan masyarakat ... sedangkan persyaratan pokok lainnya adalah adanya solidaritas...".

Albert Tévoédjrè (1978)

Singa yang tidak membunuh adalah singa yang tidak mengaum. Ia bagaikan uang, yang mencekik kita tanpa bersuara (peribahasa Tswana).

Gunnar Myrdal (1957)

"... Suatu teori keterbelakangan dan pembangunan yang berguna, itupun kalau pada suatu waktu akan ada teori yang demikian, seharusnya didasarkan pada pemikiran yang dirumuskan dari pengetahuan empirik yang sangat luas tentang perubahan sosial yang menyangkut semua aspeknya yang beragam, yang diperoleh dalam suasana kebebasan yang paling besar dari berbagai nilai tradisional...".

Joseph E. Stiglitz (1994)

"...Di sini kita menemui salah satu dari berbagai ambivalensi yang mencerminkan pandangan kita tentang ekonomi pasar.

Persaingan adalah baik, tetapi kita menyangsikan tentang persaingan yang berlebih-lebihan. Kita mendorong adanya kerjasama di dalam tim, tetapi kita menganggap perlu persaingan antar mereka di dalamnya. Kita mencela dengan kerutan dahi terhadap mereka yang bersaing secara berlebihan Saya telah memberi tekanan akan pentingnya kerjasama, kejujuran dan kepercayaan, sifat-sifat yang baik yang membuat hubungan ekonomi menjadi lebih lancar, tetapi yang pada dirinya sendiri semuanya sering (dan untungnya telah) menuntun ke arah perilaku yang berjalan dengan baik melebihi yang diperlukan oleh kepentingan diri-sendiri...”.

Lester C. Thurow (2000)

“... Dalam hal kegiatan investasi, maka kapitalisme sangat terarah dan sangat memberi batasan. Hanya kegiatan investasi, yang teruji dapat menciptakan *net present value* positif sajalah yang dapat dilaksanakan, sedangkan segala kegiatan investasi yang menciptakan *net present value* negatif harus dihentikan. Pasar-bebas diadakan untuk dapat menegakkan pelaksanaan prinsip-prinsip yang diharuskan oleh teori ekonomi ... Kapitalisme muncul dengan berbagai penyakit genetik yang telah tertanam di dalamnya — yaitu kecenderungannya untuk menabung dan berinvestasi dalam jumlah yang terlalu kecil. Untuk dapat mengimbangi kecenderungan genetik ini, suatu bangunan harus dilihat bukan hanya sebagai suatu investasi yang untuk meningkatkan konsumsi di masa depan tetapi sebagai suatu tujuan akhir tersendiri...”.

J.W. Smith (2001)

“... Rasa kasih sayang antar sesama manusia, pertimbangan arif manusia dan bahkan mungkin kelangsungan hidup umat manusia, mengharuskan tatanan perdagangan dunia direstruktur, dari suatu bentuk ‘imperialisme korporasi’ saat ini, yang penuh dengan kekerasan, kemiskinan serta kehancuran lingkungan hidup, menjadi suatu bentuk ‘kapitalisme kooperatif’ yang memperdulikan nasib sesama manusia, dengan kekerasan dan kemiskinan pada tingkat yang minimum dan pembangunan kembali sistem ekologi yang demikian pentingnya bagi kelangsungan hidup di dunia ini. Mengutip kata-kata John Maynard

Keynes, 'Pada akhirnya, umat manusia akan terbebaskan dari kecintaannya yang berlebihan dan tidak wajar akan uang untuk dapat menjawab suatu pertanyaan yang menyangkut eksistensi manusia — yaitu bagaimana manusia dapat hidup secara bijaksana, rukun dan baik.'

Manfred B. Steger (2002)

"... dalam globalisasi ... masyarakat di berbagai belahan dunia terkena pengaruh besar dari perubahan transformasi struktur sosial dan lingkungan kultur. Globalisasi kiranya telah memberikan kekayaan dan kesempatan besar bagi sekelompok kecil masyarakat, sementara itu memerosokkan sangat banyak orang ke dalam keterhinaan sebagai orang miskin dan tanpa harapan apa-apa..."

KATA PENGANTAR

“Without a global revolution in the sphere of human consciousness, nothing will change for the better. . . and the catastrophe toward which this world is headed, whether it be ecological, social, demographic or a general breakdown of civilization, will be unavoidable” (Václav Havel)

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat petunjuk dan kehendak-Nya jualah sehingga buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal” dapat terwujud sebagaimana adanya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada para Nabi, para Rasul, beserta keluarganya dan orang-orang yang saleh, dan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW, Rasul Allah yang telah mencururkan keringat jihad dalam menda’wahkan kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Jihad dalam hal ini mengandung arti yang luas, tidak hanya berperang secara fisik melawan kejahatan, tetapi juga segala upaya yang telah dilakukan manusia demi kemaslahatan umat yang dilandasi keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah SWT, termasuk menulis dan menyebarkan ilmu yang bermanfaat melalui buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal”.

Kurang lebih empat dekade pembangunan sebagaimana terus dipraktekkan hingga sekarang tidak menunjukkan keberhasilannya dalam meningkatkan pendapatan maupun standart hidup rakyat miskin di dunia. Angka kemiskinan didunia menunjukkan kondisi yang konstan bahkan cenderung meningkat, demikian pula kualitas hidup penduduk miskin. Model pembangunan ortodox tidak mampu mengikis kondisi-kondisi buruk kehidupan rakyat miskin seperti kekurangan gizi, keterbatasan pendidikan, serangan penyakit, dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak konflik politik dan peperangan. Model pembangunan ortodox bahkan ikut andil dalam semakin memburuknya kondisi penduduk miskin didunia.

Fenomena tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk menerbitkan buku yang berjudul “Pembangunan Ekonomi

dan Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal”. Dalam penulisannya, penulis membuat buku ini ke dalam 8 (delapan) bagian, yang meliputi pembangunan ekonomi, pembangunan ekonomi dalam perspektif ekonomi regional, pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi dan sumberdaya berbasis kekuatan lokal, pembangunan sektor pertanian, model dan strategi pemberdayaan ekonomi rakyat, pemberdayaan koperasi dan UMKM, serta pembangunan manusia dan modal manusia. Penerbitan buku ini dimaksudkan untuk dapat menyajikan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa, pengetahuan tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam perspektif ekonomi lokal.

Tujuan utama penulisan buku ini adalah untuk melengkapi literatur-literatur buku ajar di tingkat perguruan tinggi, khususnya yang menyangkut tentang pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai buku ajar (*text book*), buku ini sangat relevan untuk digunakan dalam mata kuliah ekonomi pembangunan, ekonomi sumberdaya, ekonomi Indonesia, ekonomi koperasi, dan kewirausahaan yang kesemuanya merupakan mata kuliah wajib di jenjang Strata 1 (S1), khususnya pada program studi yang terdapat di Fakultas Ekonomi.

Sebagai buku ajar (*text book*), buku ini tergolong unik dan langka. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, bahan kajian buku ini merupakan hasil penelitian kedua penulis dalam beberapa tahun terakhir, khususnya yang menyangkut tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal. Kedua, buku ini menitikberatkan pembahasannya pada keterkaitan antara pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan ekonomi riil masyarakat. Ketiga, buku itu turut serta membahas peran serta koperasi dan manusia dalam pembangunan ekonomi, yang oleh sebagian besar buku ajar telah banyak ditinggalkan.

Namun, terlepas dari tujuan utamanya sebagai buku ajar, buku ini juga sengaja disusun untuk menjadi referensi dalam penulisan skripsi dan tesis, khususnya yang menyangkut tentang pembangunan ekonomi, pemberdayaan masyarakat dan ekonomi kerakyatan dalam perspektif ekonomi lokal. Sebagian besar bahan

atau referensi yang dijadikan rujukan dalam buku ini bersumber dari hasil-hasil penelitian penulis. Selain itu, buku ini juga dapat dimanfaatkan oleh praktisi-praktisi dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perlu dijelaskan bahwa misi utama penulisan buku ini adalah untuk menyebarkan ilmu dan membuat penulisnya belajar dan belajar lagi. Kesempurnaan isi dan penyajian buku ini tidak akan pernah tercapai. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan buku ini selanjutnya. Melalui bagian ini juga, kami ingin menyampaikan bahwa untuk memudahkan mahasiswa dan pembaca dalam memahami setiap materi, buku ini dilengkapi dengan alat bantu belajar dalam bentuk *power point* yang berupa ringkasan materi, sehingga segala saran, kritik dan permintaan untuk mendapatkan alat bantu belajar tersebut dapat ditujukan ke alamat e-mail: m.hasan@unm.ac.id.

Akhirnya, penulis menyatakan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya buku ini, khususnya kepada DP2M Dikti yang telah memberikan bantuan biaya dalam pelaksanaan penelitian strategis nasional, sehingga bahan-bahan kajian buku ini yang berupa hasil penelitian empirik di lapangan dapat kami peroleh. Selain itu juga ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Penerbit Kedai Aksara yang telah bersedia untuk menerbitkan buku ini hingga sampai ke tangan pembaca. Semoga buku ini dapat bermanfaat dalam upaya penyebaran ilmu dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amin!

Makassar, 20 Januari 2018
Penulis,

Muhammad Hasan
Muhammad Azis

DAFTAR ISI

BAGIAN I. PEMBANGUNAN EKONOMI ___ 1

1. PENDAHULUAN ___ 2
2. URGENSI PEMBANGUNAN EKONOMI ___ 11
3. TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI ___ 23
4. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI ___ 49
5. MASALAH UTAMA DALAM PEMBANGUNAN ___ 62
6. PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM _
__ 85
7. KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA
ALAM DAN LINGKUNGAN ___ 92

BAGIAN II. PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI REGIONAL ___ 107

8. PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL _
__ 108
9. PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH ___ 115
10. STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM
MENINGKATKAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI _ _ _
126

BAGIAN III. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ___ 136

11. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SUATU PENGANTAR _ _ _
137
12. PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT ___ 155
13. PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT _ _ _
165
14. *SOCIAL CAPITAL* DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT _ _ _
180

BAGIAN IV. PENGEMBANGAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA BERBASIS KEKUATAN LOKAL ___ 187

15. PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL ___ 188
16. PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL ___ 208

BAGIAN V. PEMBANGUNAN SEKTOR PERTANIAN ___ 214

- 17. SEKTOR PERTANIAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI
___ 215
- 18. PEMBANGUNAN PERTANIAN ___ 223
- 19. PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM KONTEKS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR ___ 228
- 20. PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF
PEMBANGUNAN PERTANIAN ___ 233

**BAGIAN VI. MODEL DAN STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI
RAKYAT ___ 251**

- 21. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN NELAYAN
KECIL ___ 252
- 22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASISKAN
MASYARAKAT TERPENCIL ___ 264
- 23. PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL ___ 273
- 24. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL ___ 283

BAGIAN VII. PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN UMKM ___ 292

- 25. KOPERASI DAN ILMU EKONOMI ___ 293
- 26. KOPERASI DAN EKONOMI KERAKYATAN ___ 308
- 27. KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG
PEMBERDAYAAN UMKM ___ 334
- 28. STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI ___ 348
- 29. KOPERASI INDONESIA, GLOBALISASI EKONOMI, DAN
LIBERALISASI PERDAGANGAN DUNIA ___ 355
- 30. KEWIRAUSAHAAN KOPERASI DAN PERAN KEWIRAUSAHAAN
DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ___ 401

**BAGIAN VIII. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MODAL MANUSIA __
_ 412**

- 31. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI __
_ 413
- 32. PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA ___ 436
- 33. INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA _ _ _
439
- 34. PENDIDIKAN DAN BONUS DEMOGRAFI ___ 454
- 35. PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MODAL MANUSIA ___ 457

DAFTAR PUSTAKA ___ 468

BIODATA PENULIS

BAGIAN I

PEMBANGUNAN EKONOMI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konsep Pembangunan

Problem mendasar bagi suatu bangsa atau negara adalah mencari wujud kondisi masyarakat secara ideal dan baga imana cara merealisasikannya. Penelusuran formula ideal dan strategi perubahan masyarakat ini dapat disebut sebagai pembangunan. Beban ini secara formal diamanatkan kepada negara melalui pemerintahan yang ada didalamnya, sehingga dalam kurun masa tertentu, pemerintahan suatu negara bertugas me lakukan pembangunan pada seluruh warga negara tersebut menuju kondisi yang lebih baik.

Secara terminologis, di Indonesia pembangunan identik dengan istilah *development*, *modernization*, *westernization*, *empowering*, *industrialization*, *economic growth*, *europanization*, bahkan istilah tersebut juga sering disamakan dengan *term political change*. Identifikasi pembangunan dengan beberapa term tersebut lahir karena pembangunan memiliki makna yang *multi-interpretable*, sehingga kerap kali istilah tersebut disamakan dengan beberapa term lain yang berlainan arti. Makna dasar dari *development* adalah pembangunan. Artinya, serangkaian upaya atau langkah untuk memajukan kondisi masyarakat sebuah kawasan atau negara dengan konsep pembangunan tertentu.

Di Indonesia, makna developmentalisme mengalami perkembangan dari konsep ideal tentang sebuah tatanan kesejahteraan masyarakat yang diformulasikan oleh negara-negara barat. Format kesejahteraan ini kemudian mengalami perdebatan ketika developmentalisme sedikit banyak dipraktekkan ketika zaman orde baru berkuasa. Perdebatan ini terjadi karena pada dasarnya makna developmentalisme dan kesejahteraan sangat tergantung dari konteks dimana istilah tersebut digunakan dalam melihat keadaan.

Modernization bermakna melakukan formulasi ulang atas sesuatu yang asalnya primitif atau tradisional, menuju kondisi

2 | Pembangunan Ekonomi

yang lebih baik secara fisik. Pengertian ini menekankan adanya perubahan atau pertambahan bentuk fisik dari kondisi asalnya. *Empowering* bermakna upaya memberdayakan sesuatu untuk lebih berdaya lagi dari kondisi sebelumnya. Titik tekan istilah ini ada terletak pada penambahan kemampuan yang dimiliki oleh obyek proses *empowering*. Jika ada seorang manusia yang asalnya hanya mampu membaca dan memahami sepuluh lembar tulisan dalam satu jam, lalu melalui proses tertentu kemampuan tersebut bertambah menjadi seratus lembar tulisan dalam satu jam, maka ilustrasi tersebut dapat dikategorikan sebagai akibat *empowering*.

Industrialization identik dengan istilah industrialisasi. Term ini bermakna perubahan atau peralihan orientasi mata pencaharian dari yang bersifat agraris atau bercocok tanam menuju bentuk pekerjaan industri. Manusia tidak lagi memposisikan dirinya untuk tergantung penuh pada produk jadi alam dalam memenuhi kebutuhannya, namun lebih pada pemanfaatan sumberdaya alam untuk mendapatkan kebahagiaan dengan kemampuan teknologi yang dimiliki manusia.

Economic growth dapat diartikan dengan pertumbuhan ekonomi. Artinya, ketika berbicara tentang pembangunan, maka tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kemampuan ekonomi dari manusia yang menjadi pelaku pembangunan itu sendiri. Muara dari *economic growth* adalah kemakmuran yang juga dapat menjadi tanda bahwa pembangunan telah berhasil dilakukan.

Term *europanization* muncul sebagai dampak konsep pembangunan yang diterapkan di Indonesia, bahwa kiblat kemajuan adalah negara-negara Eropa. Jika Indonesia ingin mencapai kemajuan atau kemakmuran yang diinginkan, maka Indonesia harus meniru negara-negara Eropa, karena disanalah letak kemajuan tersebut. Jadilah upaya imitasi gaya hidup tersebut menjadi bagian dari terminologi *europanization* di Indonesia. Istilah ini juga dekat dengan *westernization* atau kebarat-baratan.

Political change adalah perubahan politik. Artinya, perubahan kondisi politik sebuah negara akan membawa dampak pada arah pembangunan yang dilakukan di negara tersebut, sehingga sekecil apapun pengaruhnya, perubahan politik akan

ikut mewarnai orientasi, langkah dan model pembangunan yang sedang berjalan di sebuah negara tertentu.

Dari beberapa penelusuran makna pembangunan secara kebahasaan tersebut, dapat ditentukan beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan. Pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Daur proses itupun dapat dimulai melalui satu titik dan berakhir pada titik lain, lalu dimulai lagi dari titik awal dimana sebelumnya telah dimulai.

Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada penambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

Dimensi pembangunan adalah *subject matter* yang menjadi kawasan garapan dari pembangunan. Sebagai sebuah upaya menambah nilai dan guna sesuatu menjadi lebih baik, pembangunan memiliki sekian banyak bidang garapan yang saling terkait, namun tidak dapat disatukan dalam sebuah kawasan kajian secara makro semata-mata. Ada perspektif mikro yang sangat tergantung pada *locus spehre*-nya masih-masing.

Dimensi-dimensi inilah yang menjadi rel dan bidang garapan dari sekian banyak upaya peningkatan kemakmuran masyarakat sebuah negara yang menerapkan pembangunan. Ada *grand goal* yang dicanangkan tiap pelaku pembangunan dalam melakukan aktifitasnya, namun ada juga *spesific goal* dalam pembangunan yang berada dalam dimensi atau kawasan tertentu. Kesemuanya memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, namun keterkaitan tersebut tidak secara langsung menafikan spesifikasi orientasi masing-masing dimensi.

Pelaku pembangunan seringkali menentukan standar keberhasilan dari aktifitas yang mereka lakukan untuk mencapai *goal of development*. Standar tersebut akan dapat di-*breakdown*

dari sekian banyak indikator pertambahan kemajuan dari dimensi-dimensi pembangunan yang telah dicanangkan sebagai sasaran. Keberhasilan sebuah pembangunan akan dapat dilihat dan diukur dari indikator-indikator tersebut, sehingga pembangunan memiliki kejelasan orientasi dan target yang dapat dinilai secara riil. Adapun dimensi pembangunan dapat dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumberdaya manusia, hukum, politik, sarana, dan keadilan masyarakat secara umum.

Musuh utama yang dihadapi oleh pembangunan adalah keterbelakangan, ketidakberdayaan, ketergantungan, kebodohan, rendahnya kesehatan yang semuanya bermuara pada kemiskinan. Semua negara pernah atau bahkan sedang berjuang menghadapi sekian banyak problem tersebut, di samping masih banyak lagi problem turunan lagi yang terdapat pada tiap kawasan negara tertentu.

“What does poverty happen”, adalah pertanyaan dasar ketika membicarakan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah dari pembangunan. Minimal ada dua penjelasan/pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat asal mula munculnya kemiskinan di beberapa negara, terutama di negara dunia ketiga. Pendekatan pertama menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena ditentukan oleh faktor yang ada didalam sebuah negara itu sendiri. Cara berpikir seperti ini lebih banyak dikenal dengan pendekatan internal dalam menjelaskan problem kemiskinan dalam pembangunan. Kesalahan utama atas terjadinya kemiskinan adalah karena yang menyangkut kemiskinan itu sendiri dan menafikan keberpengaruhannya pihak luar yang menyebabkan kemiskinan terjadi. Pendekatan ini melahirkan teori modernisasi.

Pendekatan kedua menjelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena faktor eksternal yang memasuki atau mempengaruhi sebuah negara. Ada upaya-upaya dari luar negara atau masyarakat tertentu yang secara sengaja menyebabkan terjadinya kemiskinan, sehingga pendekatan ini lebih dikenal dengan pendekatan eksternal. Latar belakang inilah yang kemudian memunculkan teori pembangunan struktural.

B. Konsep Pembangunan Ekonomi

Dewasa ini para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu, para pejabat pemerintahan negara-negara yang sudah maju, dan beberapa badan internasional, memberikan perhatian yang sangat besar terhadap berbagai aspek mengenai pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Berbeda dengan perhatian yang diberikan oleh mereka pada saat sebelumnya.

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan di negara-negara berkembang dibanding pada sebelumnya antara lain:

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, Negara-negara Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negara-negara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapat dukungan politik, seperti perhatian yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

Sejalan dengan bertambah besarnya perhatian yang diberikan dalam membangun negara-negara berkembang maka makin meluas pula kesadaran bahwa tugas membangun negara-negara itu bukanlah tugas yang sederhana dan mudah. Masalah pembangunan ekonomi negara-negara berkembang merupakan

suatu persoalan yang sangat kompleks dan sangat berlainan sifatnya dengan masalah pembangunan yang pernah dihadapi oleh negara-negara maju. Sangat kompleksnya masalah pembangunan dan banyaknya faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut; menyebabkan topik yang dianalisa dalam ekonomi pembangunan meliputi bidang yang sangat luas sekali. Faktor lainnya adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi. Ahli-ahli ekonomi sampai saat sekarang belum mencapai konsensus mengenai faktor-faktor yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan bagaimana proses pembangunan ekonomi berlaku.

Dengan adanya kelemahan tersebut tidaklah berarti bahwa corak analisa ekonomi pembangunan sifat-sifatnya tidak dapat ditentukan sama sekali. Kalau disimak lebih lanjut sebenarnya pembahasan dalam ekonomi pembangunan dapat dimasukkan ke dalam dua golongan. Sebagian pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik yang bersifat diskriptif maupun yang bersifat analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian dan masyarakat di negara-negara berkembang dan implikasi sifat-sifatnya ini kepada kemungkinan untuk membangun ekonomi kawasan tersebut. Pembahasan yang selebihnya bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan yang dapat dilaksanakan dalam usaha untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Berdasarkan kedua sifat dasar ini, maka ekonomi pembangunan dapat didefinisikan sebagai: suatu cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dan mendapatkan cara-cara untuk mengatasi masalah-masalah itu supaya negara-negara tersebut dapat membangun ekonominya dengan lebih cepat lagi.

Walaupun kebijaksanaan-kebijaksanaan pembangunan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam arti yang seluas-luasnya, kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai bagian dari keseluruhan usaha pembangunan yang dijalankan oleh suatu masyarakat. Pembangunan ekonomi hanya meliputi usaha sesuatu masyarakat untuk mengembangkan

kegiatan ekonomi dan meningkatkan pendapatan masyarakatnya, sedangkan keseluruhan usaha-usaha pembangunan meliputi juga usaha-usaha pembangunan sosial, politik, dan kebudayaan. Dengan adanya pembatasan tersebut, maka pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan terjadinya kenaikan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat dalam jangka panjang.

Dari definisi ini bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting yaitu suatu proses yang berarti merupakan perubahan yang terjadi terus-menerus; usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per kapita; dan kenaikan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.

Menurut Todaro (1997), pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan. Sedangkan pembangunan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap-sikap mental yang sudah terbiasa, dan lembaga-lembaga nasional termasuk pula percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.

Pandangan-pandangan para ekonom mengenai aspek yang berkaitan dengan masalah pembangunan di negara-negara sedang berkembang itulah yang disebut sebagai ekonomi pembangunan. Pola pembahasan dalam analisis teori ekonomi mikro dan ekonomi makro yang mempunyai bentuk seragam tidak akan ditemukan dalam analisis ekonomi pembangunan. Cabang ilmu ekonomi ini belum memiliki suatu pola analisis tertentu yang dapat diterima oleh kebanyakan ekonom.

Belum adanya pola analisis yang dapat diterima tersebut disebabkan oleh beberapa faktor. Kompleksitas masalah pembangunan dan banyaknya faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan merupakan faktor penyebab terpenting dari keadaan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan masalah yang dianalisis di dalam ekonomi pembangunan mencakup bidang yang sangat luas. Beberapa bidang penting yang dianalisis dalam ekonomi pembangunan antara lain: masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kemiskinan, masalah

pembentukan modal, masalah pengerahan tabungan, masalah bantuan luar negeri. Faktor penting lainnya yang menyebabkan keadaan tersebut adalah ketiadaan teori-teori pembangunan yang dapat menciptakan suatu kerangka dasar dalam memberikan gambaran mengenai proses pembangunan ekonomi.

Dengan adanya pembangunan ekonomi maka output atau kekayaan suatu masyarakat atau perekonomian akan bertambah. Di samping itu kesejahteraan masyarakat juga akan bertambah karena pembangunan ekonomi telah dapat menambah kesempatan bagi masyarakat mengadakan pilihan yang lebih luas.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Di dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan istirahat yang lama. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Selanjutnya, dengan pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang sudah maju.

Tidak semua pembangunan ekonomi memberikan manfaat bagi semua orang. Ada orang yang menganggap bahwa tingkah laku dan lembaga-lembaga yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan ekonomi adalah kurang baik dan malahan tidak diinginkan. Mereka ini hanya tetap menghendaki lembaga-lembaga yang statis. Pertama-tama mereka tidak menyukai adanya semangat ekonomis, semangat penghematan. Justru semangat inilah yang sebenarnya merupakan salah satu syarat untuk dapat dilaksanakannya pembangunan ekonomi. Orang harus berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekonomis, baik dalam produksi maupun dalam konsumsi. Ia harus selalu berusaha untuk menggunakan kesempatan dan faktor-faktor produksi yang dimiliki seefisien mungkin.

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan dalam Produk Domestik Bruto (PDB)/Produk Nasional Bruto (PNB) tanpa melihat apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari

tingkat pertumbuhan/pertambahan penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi dalam negara tersebut terjadi atau tidak.

Namun beberapa ahli ekonomi pada umumnya memberikan pengertian yang sama untuk kedua istilah tersebut. Mereka mengartikan pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi sebagai kenaikan dalam PDB/PNB. Dalam penggunaan yang lebih umum, istilah pertumbuhan ekonomi sering digunakan untuk mencerminkan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara yang sudah maju, sedangkan pembangunan ekonomi untuk menyatakan perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang.

Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

BAB II

URGENSI PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Kebutuhan Akan Pembangunan Ekonomi

Kesadaran akan pentingnya pembangunan ekonomi, terjadi pada saat setelah perang Dunia ke II. Kebutuhan ini sangat mendesak mengingat hancurnya berbagai macam sarana dan prasarana yang dimiliki akibat perang. Tuntutan untuk segera dapat keluar dari kondisi yang hancur ini, mengakibatkan para pembuat kebijakan dan juga para ahli ekonomi mulai tertarik untuk mempelajari ekonomi pembangunan secara lebih mendalam. Mereka juga mulai menyadari akan arti pentingnya pembangunan ekonomi bagi negaranya. Kondisi ini semakin didukung dengan munculnya negara-negara dengan tingkat kemajuan yang sangat tinggi seperti negara-negara di Eropa dan sebaliknya ada juga negara yang gagal dan terpuruk dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Perbedaan ini menimbulkan suatu pemikiran ada apa dibalik itu semuanya. Sebab kenyataan menunjukkan bahwa, tidak semua negara berhasil dalam proses pembangunannya.

Pembangunan pada awalnya diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi, sehingga persepsi ini melahirkan pemahaman akan perlunya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu suatu negara dikatakan berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi, maka yang diukur adalah tingkat produktivitas negara tersebut setiap tahunnya. Secara ekonomi ukuran produktivitas ini menggunakan Produk Nasional Bruto atau *Gross National Product* (GNP) dan Produk Domestik Bruto atau *Gross Domestic Product* (GDP).

Untuk membandingkan produktivitas antara negara satu dengan negara lain, digunakan ukuran pendapatan perkapita atau *income* perkapita penduduk, yaitu dengan cara membagi Produk Nasional Bruto dengan jumlah penduduk. Suatu negara

yang mempunyai PNB perkapita pertahun US \$ 1000 maka dapat dikatakan berhasil dibandingkan dengan negara yang mempunyai PNB perkapita pertahun US \$ 500. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat pendapatan perkapita suatu negara maka, dikatakan semakin berhasil negara tersebut dalam menjalankan pembangunannya. Dengan demikian, pembangunan disini diartikan sebagai jumlah kekayaan keseluruhan dari suatu Negara (Arief, 1995).

Berhasil tidaknya proses pembangunan ekonomi, banyak ditentukan oleh beberapa faktor, salah satu faktor tersebut adalah pemakaian sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem ekonomi kapitalis tentu akan berbeda dengan sistem ekonomi sosialis dalam pengelolaannya. Di samping itu ada beberapa faktor pendukung yang tidak kalah penting akan perlunya mengadakan pembangunan ekonomi. Faktor tersebut:

1. Adanya kenyataan bahwa banyak negara mengalami perkembangan di dalam pendapatan nasionalnya tetapi, hanya cukup untuk mengimbangi penambahan penduduk.
2. Adanya perbedaan tingkat hidup antara negara-negara yang satu dengan dengan negara lain dan perbedaan itu semakin melebar.
3. 67 persen penduduk dunia hanya menerima kurang dari 17 persen pendapatan nasional.
4. Adanya kesadaran untuk selalu meningkatkan tingkat pendapatan nasional dari negara-negara sedang berkembang. Usaha-usaha mereka ternyata menimbulkan masalah seperti, masalah ekonomi, politik, sosial dan budaya.
5. Apakah perkembangan itu dinyatakan dalam tingkat kemakmuran ekonomi atau tingkat kesejahteraan, pada umumnya yang penting adalah mereka menghendaki adanya tingkat hidup yang lebih baik. (Sukirno, 2006).

Dari latar belakang tersebut, maka jelaslah bahwa, pembangunan ekonomi sangat diperlukan dalam usaha mengejar kemakmuran dan ketertinggalan dengan negara-negara lain. Bagaimanapun juga pembangunan akan

memberikan harapan-harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang.

B. Syarat-syarat Pembangunan Ekonomi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi dimana sistem Pemerintahannya adalah diktator. Model pembangunan diktator hanya akan melahirkan penderitaan dan kesengsaraan rakyatnya, oleh karena itu model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh rakyat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya Pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting.

Penduduk merupakan aset dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu *agent of development*, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses pembangunan berlangsung.

1. Modernisasi Pembangunan

Perkembangan ekonomi yang ditandai dengan munculnya modernisasi dan kemajuan yang sangat pesat di segala bidang, pada awalnya ditemui pada kawasan negara Eropa dan Amerika. Namun pada saat ini mulai terjadi pergeseran ke

Asia, yaitu dimulai dari Jepang, Korea dan Cina. Negara-negara tersebut terkenal memiliki informasi dan teknologi yang cukup tinggi. Pada umumnya sebagian besar negara di Asia dan Amerika Latin, masih berkebutakan dengan kemiskinan dan ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pembangunan.

Masalah globalisasi, hak asasi manusia, hak paten dan lingkungan merupakan isu-isu yang sangat luas dikenal di negara maju, sebaliknya menjadi sangat asing untuk negara-negara sedang berkembang. Kemajuan ekonomi dalam ekonomi global telah mempertajam ketimpangan internasional diberbagai bidang, seperti bidang sosial, budaya dan politik. Pada akhirnya ketimpangan ini semakin melebarkan jurang perbedaan antara negara kaya dengan negara miskin. Di kawasan Asia sendiri, jurang perbedaan ini dapat dilihat dari tingkat pendapatan perkapita yang sangat jauh berbeda.

2. Pendekatan Sosial Budaya dalam Pembangunan Ekonomi

Faktor sosial budaya masyarakat dalam proses pembangunan adalah sangat penting. Kebiasaan atau adat istiadat yang ada di dalam masyarakat pada umumnya sudah terjadi ratusan tahun dan turun temurun, oleh karena itu sangat sulit untuk mengadakan perubahan begitu saja. Nilai-nilai yang terkandung dan diyakini betul sebagai suatu kebenaran, sangatlah sulit untuk menerima perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat modern.

Menurut Hagen (dalam Kompas, 2000), berpendapat bahwa faktor kekuatan yang paling penting untuk menggerakkan masyarakat negara sedang berkembang dari kemandekan ekonomi atau stagnasi ekonomi ke arah proses pembangunan adalah perubahan pada nilai sosial budayanya. Hagen telah mencoba untuk menyusun teori umum mengenai pembangunan yang didasarkan pada serangkaian faktor sosiologis, antropologis dan psikologis.

Dari hasil penelitian tersebut, Hagen membuat suatu model, bahwa kemajuaun ekonomi dan pembangunan ekonomi dijadikan fungsi dari (tergantung dari) perubahan pada kombinasi bidang sosiologis, antropologi dan psikologi dalam kehidupan masyarakat. Menurut Hagen, sebab utama bagi perubahan masyarakat terlihat secara internal pada faktor-faktor

14| Pembangunan Ekonomi

yang melekat pada tata susunan masyarakat dan dalam tubuh masyarakat itu sendiri bukan pada sejumlah faktor eksternal. Perkembangan ekonomi terjadi ditandai dengan akumulasi modal dan kemajaun teknologi hanya bila ada perubahan nilai-nilai budaya dan perilaku warga masyarakat.

Dalam pendekatan sosial budaya juga juga ditonjolkan segi kelembagaan dan peranan lembaga-lembaga pergaulan hidup (*social institutional*), termasuk kebiasaan hidup dalam masyarakat (*social habits*). Faktor budaya yang melekat pada segi kelembagaan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan produksi, distribusi, konsumsi, tabungan dan investasi.

3. Pembangunan Ekonomi dan Demokrasi

Proses demokratisasi yang terjadi di dunia ini, pada umumnya melanda negara-negara yang sedang mengalami transisi Pemerintahan yang bersifat diktator, otoriter dan koruptor yang pada umumnya menggunakan sistem pemerintahan yang sentralistik pada semua bidang terutama pada bidang-bidang yang dianggap sangat vital. Masa transisi merupakan masa yang paling berat, sebab nilai-nilai atau konsep demokratisasi sendiri belum dipahami sepenuhnya oleh , masyarakat sehingga banyak negara-negara sedang berkembang yang mengalami kegagalan.

Menurut Francis Fukuyama (dalam Kompas, 2000), umat manusia sekarang sedang memasuki periode akhir dari sejarah. Menurutnya masyarakat manusia bergerak dari periode hanya satu orang yang berkuasa (monarki) menuju kepada beberapa orang yang berkuasa (oligarki) dan berakhir pada semua orang berkuasa (demokrasi).

Sebaliknya menurut termiloginya, Samuel Hungtinton, manusia sedang mengalami gelombang ketiga proses demokratrisasi. Masing-masing gelombang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Gelombang pertama terjadi pada tahun 1828 – 1926 ketika Amerika Serikat, Eropa Barat dan negara-negara jajahan Inggris menjadi demokratis.
2. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1943 – 1962 terjadi di negara-negara yang kalah perang (Jerman,

Italia dan Jepang), di beberapa negara Amerika latin serta beberapa negara bekas kolonial.

3. Gelombang ketiga dimulai pada tahun 1974 sampai sekarang yang dimulai dengan terjadinya proses demokrasi di Portugal, lalu diikuti negara-negara Asia, dan akhirnya negara-negara komunis setelah runtuhnya Uni Soviet.

Berbagai peristiwa penting di Asia menegaskan bahwa gelombang ketiga itu terus bergulir. Pada tahun 1979 terjadi revolusi Islam di Iran yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini dengan menggulingkan diktator Shah Reza Pahlevi. Bulan Februari 1986, pecah revolusi kekuatan rakyat di Manila dengan berhasil menumbangkan kediktatoran Ferdinand Marcos yang dipimpin oleh Cory Aquino.

Setelah itu revolusi demi revolusi atau reformasi demi reformasi terjadi di banyak negara, termasuk Indonesia. Reformasi politik di Indonesia terjadi pada tahun 1997 dengan lengsernya Suharto sebagai presiden selama kurang lebih 32 tahun berkuasa. Kesemuanya itu menegaskan bahwa perubahan sedang dan terus terjadi di segala tataran (Kompas, 30 Oktober 2000).

C. Prinsip-prinsip Pembangunan

Prinsip dasar dalam proses pembangunan adalah penekanan pada pertumbuhan ekonomi dengan hasil pembangunan yang tidak semata-mata bersifat kuantitatif tetapi juga bersifat kualitatif. Untuk mencapai hal tersebut, maka proses pertumbuhan secara serentak mengarahkan kepada tiga prinsip kunci bagi negara sedang berkembang maupun industri maju, yaitu berfokus pada semua aset: modal fisik, manusia dan alam, menyelesaikan aspek-aspek distributif sepanjang waktu, serta menekankan kerangka kerja institusional bagi pemerintahan yang baik.

Modal manusia dan alam akan memberikan kontribusi terhadap akumulasi modal fisik dengan meningkatkan pengembaliannya. Modal fisik meningkatkan pengembalian terhadap modal manusia dan modal alam serta, bila pasar mencerminkannya, akumulasinya. Selain itu, investasi yang dilakukan dalam modal fisik, manusia dan alam secara

bersama-sama akan memberikan kontribusi terhadap kemajuan di bidang teknologi dan pertumbuhan produktivitas faktor total, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kondisi perekonomian yang mengalami distorsi, seperti pemerintahan yang sewenang-wenang, tingginya tingkat korupsi serta kegagalan pasar, dapat menempatkan suatu negara dalam sebuah jalur akumulasi aset yang terdistorsi dan tidak seimbang. Keadaan ini dapat mengakibatkan kondisi negara dalam keadaan di bawah potensial dana pada akhirnya dapat mengakibatkan produktivitas total yang rendah sehingga pernaikan kesejahteraan menjadi terhambat.

D. Dampak Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan bagi suatu negara, sekalipun negara tersebut sudah dalam keadaan makmur. Bagaimanapun juga tingkat kemakmuran ini harus ditingkatkan, minimal dipertahankan, untuk itu pembangunan ekonomi masih diperlukan. Bagi negara yang sudah maju, pembangunan ekonomi lebih banyak ditekankan pada kemajuan di bidang teknologi dan informasi. Hal ini berbeda dengan pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang, yang pada umumnya menekankan pada pembangunan secara fisik, seperti pembangunan jalan raya dan tol, pembangunan gedung-gedung dan sebagainya. Hal ini terjadi mengingat di negara sedang berkembang prasarana dan sarana yang ada masih sangat minim.

Pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara dapat memberikan dampak yang positif maupun negatif. Dampak positif ini tentu akan sangat menguntungkan, tetapi dampak yang negatif akan sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. Pembangunan ekonomi pada dasarnya adalah suatu kebijakan dengan berbagai strategi pilihan. Oleh karena itu kebijakan pembangunan akan selalu menimbulkan dua sisi yang bertentangan. Kebijakan yang dipilih adalah suatu resiko yang harus ditanggung. Tidak ada pembangunan tanpa menimbulkan dampak yang negatif, sehingga bagi pengambil kebijakan adalah sangat bijaksana bila dalam proses pembangunan selalu meminimalkan dampak negatif/kerugian bagi masyarakatnya. Sebab pada dasarnya tujuan dari

pembangunan itu sendiri adalah meningkatkan kesejahteraan bukan kesengsaraan.

1. Manfaat Pembangunan Ekonomi

Manfaat pembangunan bagi suatu negara haruslah dirasakan oleh seluruh masyarakat. Artinya, bahwa pembangunan tidak hanya untuk segelintir orang saja atau kelompok tertentu, tetapi harus dapat dinikmati oleh semua lapisan dalam masyarakat. Adapun manfaat yang dapat ditimbulkan akibat adanya pembangunan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat Produksi Meningkat

Pembangunan adalah suatu proses kenaikan *Gross Domestic Product* (GDP). Konsep GDP secara makro adalah sama dengan out put atau produksi, yaitu produksi barang dan jasa. Dengan adanya pembangunan, maka perekonomian akan mengalami perkembangan, yaitu ditandai dengan adanya peningkatan akan produk barang dan jasa suatu negara.

b. Adanya Berbagai Alternatif Kemudahan

Dengan adanya out put yang meningkat, akan menjadikan masyarakat semakin terbuka untuk melakukan berbagai pilihan-pilihan. Kebebasan ini tentu sangat menguntungkan, karena masyarakat punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang disukainya. Kemudahan dalam membeli barang misalnya atau kemudahan dalam memilih sarana transportasi yang disukainya. Semua itu merupakan suatu alternatif yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat.

c. Terdapat Perubahan Pada Aspek Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang terjadi dalam jangka panjang. Pembangunan bukanlah sesuatu yang terjadi dalam sekejap, akan tetapi melalui suatu proses yang berkesinambungan. Perubahan-perubahan yang terjadi akibat pembangunan tidak saja secara fisik tetapi juga akan membawa perubahan di bidang sosial, ekonomi dan politik. Di bidang sosial, terjadinya pergeseran-pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat, seperti wawasan atau pandangan masyarakat tentang ilmu pengetahuan, cara berpikir yang lebih rasional.

Perubahan di bidang ekonomi jelas terjadi, yaitu adanya kenaikan tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Di bidang politik, semakin terbukanya pemahaman akan demokrasi dan sistem politik yang lebih adil.

d. Meningkatnya Akan Nilai-Nilai Kebersamaan

Apabila pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh suatu negara berhasil, maka masyarakat negara tersebut relatif sudah makmur. Karena kebutuhan dirinya sudah terpenuhi, sebagai kompensasi mereka mulai memperhatikan lingkungan sekitar. Pada taraf dimana kesejahteraan sudah begitu tingginya, ada suatu kecenderungan mereka mulai mempertentangkan masalah-masalah yang berhubungan dengan keadilan terutama masalah akan hak asasi manusia (HAM).

e. Tingkat Kesejahteraan Penduduk Meningkat

Pembangunan ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang berarti pula tingkat produksi tinggi, akan mengakibatkan perekonomian masyarakat berkembang. Perkembangan ini secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, yang tadinya tidak bekerja kemudian bekerja yang dengan sendirinya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Dengan meningkatkan pendapatan ini maka, kesejahteraan penduduk secara otomatis juga mengalami peningkatan.

2. Kerugian-kerugian Pembangunan Ekonomi

Permasalahan dalam pembangunan ekonomi sangatlah kompleks dan multidimensional, oleh karena itu pembangunan ekonomi selalu berkaitan dengan aspek lain. Setiap negara dalam menjalankan pembangunan ekonomi pasti akan mengalami berbagai hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan dimana antara negara satu dengan negara lain sudah barang tentu sangat berbeda. Kerugian-kerugian yang harus ditanggung negara dan masyarakat akibat pembangunan tidaklah sedikit.

Kerugian ini dapat secara materi atau nonmateri. Secara materi kerugian akibat pembangunan ekonomi dapat diperhitungkan sebagai biaya, namun kerugian nonmateri ini sangat sulit untuk diperhitungkan sebagai biaya. Namun demikian

kedua kerugian tersebut dapat digolongkan sebagai biaya sosial atau *social cost* yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat.

Ada beberapa kerugian yang ditimbulkan akibat pembangunan ekonomi ini seperti:

a. Pencemaran Lingkungan

Pembangunan ekonomi di negara berkembang pada umumnya identik dengan pembangunan sektor industri. Pemahaman ini dapat di mengerti, karena bagi negara berkembang untuk dapat menjadi negara maju, maka sektor industri harus dikembangkan. Persepsi ini dilatarbelakangi oleh keadaan negara Eropa yang notabene adalah negara maju, dengan sektor industri yang berkembang sangat pesat. Pembangunan industri, terkait langsung dengan lingkungan. Negara berkembang yang pada umumnya kaya akan sumberdaya alam, benar-benar memanfaatkan kondisi ini dengan menarik investor dari luar. Bagi negara berkembang yang penting industri tersebut dapat memberi masukan bagi negara, maka sepanjang hal tersebut dapat dicapai hal lainnya tidak dipikirkan dengan serius, seperti kerugian akibat pencemaran limbah industri. Hilangnya hutan dan sebagainya.

b. Rusaknya Tatanan Nilai-nilai Sosial Budaya

Pembangunan berarti suatu keterbukaan, keleluasaan dalam menyerap berbagai nilai-nilai dalam suatu masyarakat. Dengan semakin terbukanya hubungan dengan dunia internasional, maka semakin banyak nilai-nilai sosial budaya yang beriteraksi dengan nilai-nilai budaya setempat. Pergeseran ini sering terjadi dan menimbulkan permasalahan sendiri dalam masyarakat sebab, nilai-nilai sosial budaya yang berasal dari luar negeri belum tentu sesuai dengan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Maka dalam kondisi seperti inilah terjadi benturan-benturan. Sebagai contoh sikap hidup materialistis, individualistis adalah merupakan gaya hidup bagi masyarakat kapitalis. Bagi mereka gaya hidup seperti itu adalah hal biasa dan wajar-wajar saja, tetapi bagi masyarakat negara sedang

berkembang tentu akan menjadi hal yang dianggap tidak wajar dan dianggap tidak sesuai dengan budayanya.

c. Munculnya Ketimpangan di Berbagai Bidang

Model pembangunan yang ideal adalah model pembangunan yang diikuti dengan pemerataan akan hasil-hasil pembangunan di segala bidang dan antar daerah. Namun, pada kenyataannya pembangunan seringkali melahirkan berbagai macam ketimpangan-ketimpangan. Munculnya berbagai ketimpangan ini, tidak terlepas dari keterbatasan dana dan manajemen yang dimiliki, namun demikian hambatan ini sebetulnya bukanlah alasan utama untuk terjadinya ketimpangan.

Penentuan skala prioritas dalam pembangunan (akibat dari dana yang terbatas) harus benar-benar dilakukan secara adil dan merata. Seringkali yang terjadi adalah pemilihan prioritas berdasarkan pada adanya kepentingan politik maupun pribadi. Sehingga tidaklah mengeherankan apabila di negara sedang berkembang tumbuh dengan suburnya masalah kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pembangunan antar daerah atau wilayah.

d. Meningkatnya Kaum Urban

Model pembangunan yang timpang, dapat menimbulkan berbagai gejolak sosial dalam masyarakat. Model pembangunan yang banyak berfokus di kota jelas akan menimbulkan rasa iri bagi penduduk di pedesaan. Kehidupan yang dianggapnya jauh lebih baik dilihat dari sisi pendapatan akan mendorong penduduk desa untuk beramai-ramai pindah ke kota dan mencari pekerjaan di kota. Oleh karena itu tidaklah heran daerah-daerah dengan tingkat konsentrasi industri yang tinggi, sudah dapat dipastikan jumlah penduduk pendatang jauh lebih besar daripada penduduk aslinya.

e. Meningkatnya Pengangguran

Meningkatnya jumlah pengangguran adalah akibat langsung dari jumlah penduduk yang meningkat terus. Selain itu ketidakseimbang antara permintaan dan penawaran tenaga

kerja juga dapat menimbulkan masalah pengangguran. Pada umumnya di negara sedang berkembang, model pembangunan yang dijalankan lebih diarahkan pada tenaga kerja yang mempunyai skill, yaitu pada sektor industri. Padahal masyarakat di negara berkembang pada umumnya merupakan masyarakat agraris. Ironisnya sektor Pertanian seringkali diabaikan, dan dijauhkan dalam jangkauan pembangunan.

f. Terjadinya Pergeseran Mata Pencarian

Orientasi pembangunan yang menekankan pada sektor industri, jelas akan menggeser peran sektor pertanian ke sektor industri dalam pendapatan nasionalnya. Pergeseran ini, secara otomatis juga dapat menggeser mata pencarian penduduk. Sebagai contoh, pekerjaan semula petani kemudian beralih menjadi buruh industri atau sebagai buruh/pada proyek-proyek pembangunan di kota. Pergeseran ini dapat terjadi secara paksa atau sukarela. Pergeseran yang terjadi secara paksa, misalnya pelebaran jalan yang mengenai sawah-sawah atau pembangunan real estate. Sedang pergeseran yang terjadi secara sukarela lebih dikarenakan keinginan untuk memperbaiki tingkat pendapatan.

BAB III

TEORI PEMBANGUNAN EKONOMI

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi, baik yang berasal dari aliran klasik, neo klasik maupun sesudahnya. Pada umumnya teori-teori pembangunan ekonomi yang dikemukakan pada tahun sekitar 1950 atau sebelumnya dikenal dengan teori ekonomi aliran klasik dan neo klasik, sedang teori ekonomi yang dikemukakan sesudah tahun 1950 dinamakan aliran Post Keynesian. Untuk lebih jelasnya dalam bab ini akan dibahas secara singkat teori-teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli ekonomi antara lain teori klasik, teori Karl Marx, teori Schumpeter, teori neo klasik, dan teori Keynesian (Jhingan, 1998).

A. Teori Klasik

Teori klasik atau bisa juga disebut aliran klasik muncul akhir abad ke 18 dan permulaan abad ke 19. Pada umumnya para ahli ekonomi yang mengemukakan teorinya pada sekitar abad tersebut, dinamakan kaum klasik. Aliran klasik sendiri dalam sejarahnya ada dua yaitu aliran Klasik dan aliran Neo Klasik. Yang termasuk aliran klasik adalah mereka yang mengemukakan teorinya sebelum tahun 1870-an, yang termasuk dalam golongan ini adalah Adam Smith, Robert Malthus, David Ricardo dan John Stuart Mill. Yang termasuk aliran neo klasik adalah mereka yang mengemukakan teorinya sesudah tahun 1870-an, yang termasuk dalam golongan ini adalah Alfred Marshall, Leon Walras dan Knut Wicksel.

Kaum klasik pada dasarnya banyak membahas masalah-masalah mikroekonomi, yang dalam perkembangan selanjutnya teori tersebut dikembangkan lebih lanjut oleh kaum neo klasik. Para ahli ekonomi klasik banyak membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, sedang para ahli ekonomi neo klasik banyak membahas masalah yang bersifat jangka pendek dalam kegiatan masyarakat dan

sedikit sekali menganalisa mengenai masalah pembangunan ekonomi. Kaum neo klasik mempunyai keyakinan bahwa, dalam jangka panjang mekanisme pasar akan menciptakan perekonomian yang stabil dengan sendirinya, sekalipun perekonomian tumbuh secara perlahan tetapi akan lancar dan teratur.

Pendapat ini mengacu dari pendapat klasik yaitu Adam Smith dengan "*laissez faire*". Teori pembangunan ekonomi dari klasik muncul pada saat terjadinya revolusi industri di Inggris, sehingga teori-teori mereka banyak sekali diilhami dari keadaan tersebut. Pada saat itu negara-negara maju mengalami pembangunan ekonomi yang sangat pesat dan mulai tercipta era tinggal landas yang dipelopori oleh negara Inggris.

Dalam menganalisa mengenai masalah-masalah pembangunan ekonomi, kaum klasik menganalisa tentang sebab-sebab dari perkembangan ekonomi dalam jangka panjang dan mengenai corak dari terjadinya proses pertumbuhan tersebut. Dalam menganalisa hal tersebut para ahli ekonomi klasik mempunyai pandangan-pandangan yang berbeda satu sama lainnya, oleh karena itu teori dari mereka akan dibahas satu persatu.

1. Adam Smith

Adam Smith sangat terkenal sebagai pelopor dalam perkembangan ilmu ekonomi, maka tidaklah heran kalau dia mendapat julukan sebagai bapak ilmu ekonomi, hal ini sangat beralasan sebab Adam Smith lah orang pertama sebagai pelopor dari perkembangannya ilmu ekonomi dan juga pelopor dalam pentingnya kebijaksanaan *laissez faire* serta ahli ekonomi pertama yang banyak menumpahkan perhatiannya pada masalah pembangunan ekonomi.

Adam Smith menerbitkan buku yang menjadi acuan bagi para ekonom dengan judul *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation*, atau seringkali juga disebut dengan *The Wealth of Nation* saja. Dalam buku ini terutama menganalisa mengenai sebab akibat dari berkembangnya suatu negara.

Menurut Adam Smith kebijaksanaan *laissez faire* atau sistem mekanisme pasar akan memaksimalkan tingkat

pembangunan ekonomi yang dapat dicapai oleh suatu masyarakat. Kebijakan *laissez faire* adalah suatu kebijakan yang sifatnya memberikan kebebasan yang maksimal kepada para pelaku dalam perekonomian untuk melakukan kegiatan yang disukainya dan meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sistem ekonomi yang demikian dinamakan juga sistem mekanisme pasar atau sistem pasar bebas. Ada beberapa hal berkaitan dengan pandangan Adam Smith, yaitu:

a. Hukum Alam

Adam Smith meyakini berlakunya doktrin “hukum alam” dalam persoalan ekonomi. Ia menganggap setiap orang sebagai hakim yang paling tahu akan kepentingannya sendiri yang sebaiknya dibiarkan dengan bebas mengejar kepentingannya itu demi keuntungannya sendiri.

Menurutnya, setiap orang jika dibiarkan bebas akan berusaha memaksimalkan keuntungan dirinya sendiri, karena itu jika semua orang dibiarkan bebas akan memaksimalkan kesejahteraan mereka secara agregat. Smith pada dasarnya menentang setiap campur tangan pemerintah dalam industri maupun perdagangan. Ia penganut paham bebas dan penganjur kebijakan “pasar bebas” dalam aktivitas kegiatan ekonomi. Dengan kebijakan pasar bebas, yaitu terwujudnya pasar persaingan sempurna yang merupakan mekanisme menuju keseimbangan secara otomatis, cenderung untuk memaksimalkan kesejahteraan nasional.

b. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah titik permulaan dari teori pertumbuhan ekonomi. Menurut Adam Smith, dengan adanya pembagian kerja, maka akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan meningkatkan keterampilan pekerja, penghematan waktu dalam memproduksi barang, dan penemuan-penemuan yang sangat menghemat tenaga kerja. Namun demikian, pembagian kerja tergantung pada luas pasar.

c. Proses Akumulasi Modal

Smith menekankan bahwa proses akumulasi modal harus dilakukan lebih dahulu daripada pembagian kerja. Akumulasi modal merupakan syarat utama terjadinya proses pembangunan ekonomi, dengan demikian permasalahan pembangunan ekonomi secara luas adalah kemampuan manusia untuk lebih banyak menabung dan menanam modal.

d. Investasi

Menurut Smith, investasi dilakukan karena pemilik modal mengharapkan untung, dan harapan masa depan keuntungan tergantung pada iklim investasi pada hari ini dan pada keuntungan nyata. Keuntungan cenderung menurun dengan adanya kemajuan ekonomi. Kondisi ini dapat digambarkan, bahwa pada waktu laju pemupukan modal meningkat maka persaingan antar pemilik modal juga akan meningkat dengan sendirinya tingkat upah juga akan meningkat dan pada gilirannya akan menurunkan keuntungan pemilik modal.

Modal diperoleh dari tuan tanah atau bangsawan. Mereka ini yang mampu untuk melakukan investasi. Sebaliknya, para pengusaha atau kaum kapitalis yang mengembangkan modal dari tuan tanah atau bangsawan. Pada umumnya modal ini digunakan untuk perdagangan. Apabila stok para pedagang kaya beralih ke bidang perdagangan yang sama, maka persaingan antar mereka secara alamiah cenderung menurunkan keuntungan dan bila peningkatan yang sama terjadi pada stok di seluruh bidang perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat yang sama, persaingan yang sama seperti itu pasti akan menghasilkan pengaruh yang sama. Jadi dengan adanya pertumbuhan stok modal di dalam perekonomian, akan terjadi persaingan antar pengusaha dalam mendapatkan tenaga kerja. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang layak pengusaha cenderung menawarkan tingkat upah yang tinggi dan karena itu menurunkan tingkat keuntungan.

e. Tingkat Suku Bunga

Apabila modal dalam perekonomian sudah berkembang, maka akan terjadi peningkatan kemakmuran yang pada gilirannya akan meningkatkan jumlah penduduk. Sebaliknya dalam kondisi seperti ini tingkat suku bunga akan menurun dan akibatnya persediaan akan modal menjadi meningkat. Dengan tingkat suku bunga yang rendah para tuan tanah atau pengusaha terpaksa meminjamkan uangnya dalam jumlah yang lebih besar untuk mendapatkan lebih banyak bunga dengan maksud mempertahankan standar hidupnya. Jadi dengan menurunnya tingkat suku bunga, jumlah modal yang dipinjamkan akan meningkat. Tetapi bila suku bunga turun terlalu rendah para tuan tanah atau bangsawan tidak sanggup untuk meminjamkan uang lebih banyak lagi. Dalam kondisi ini mereka akan memilih investasi menjadi pengusaha. Jadi sekalipun suku bunga menurun, pada akhirnya terjadi pemupukan modal dan kemajuan ekonomi.

f. Pertumbuhan Ekonomi

Proses pertumbuhan bersifat kumulatif. Apabila timbul kemakmuran sebagai akibat kemajuan di bidang pertanian, industri manufaktur, dan perniagaan kemakmuran itu akan menarik ke pemupukan modal, kemajuan teknis, meningkatkan penduduk, perluasan pasar, pembagain kerja dan kenaikan keuntungan secara terus menerus. Situasi yang progresif ini akan menyenangkan masyarakat. Dalam keadaan maju ini, sementara masyarakat meraih hasil-hasil yang lebih baik, keadaan buruh miskin yang merupakan bagian terbesar dari masyarakat, agaknya menjadi kelompok paling bahagia dan nyaman.

2. David Ricardo

David Ricardo terkenal dengan teori Ricardian menulis dalam bukunya *The Principles of Political Economy and Taxation* pada tahun 1812 - 1823. David Ricardo dalam analisisnya mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Pada keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya

dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi, mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi. Dengan tingkat keuntungan yang tinggi itu dapat mempertinggi tingkat modal yang dimiliki yang selanjutnya dapat mempertinggi tingkat produktivitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktivitas ini para pekerja mulai menuntut tingkat upah yang tinggi.

Pada tingkat upah yang tinggi mengakibatkan penduduk bertambah sedang luas lahan tetap dengan demikian mutu tanah juga mulai menurun, sewa tanah semakin tinggi mengakibatkan pendapatan menurun yang selanjutnya mengakibatkan tingkat keuntungan para pengusaha menjadi berkurang. Dengan demikian modal juga menjadi berkurang, permintaan tenaga kerja berkurang, upah turun. Begitu terus sampai tingkat upah mencapai minim. Dalam keadaan seperti ini dikatakan dalam kondisi *stationary state* atau perekonomian dalam keadaan statis (pertumbuhan berhenti).

Ricardo membagi masyarakat dalam tiga golongan, yaitu:

1. Masyarakat pekerja atau buruh.
2. Masyarakat pengusaha atau kapitalis.
3. Tuan tanah atau bangsawan

Asumsi yang digunakan Ricardo adalah:

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri.
2. Berlakunya hukum "*law of diminishing return*" bagi tanah.
3. Persediaan tanah adalah tetap.
4. Permintaan gandum benar-benar inelastis.
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel.
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu.
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal.
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu.
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal.

10. Terdapat persaingan sempurna.

11. Pemupukan modal dihasilkan dari keuntungan

Pertumbuhan ekonomi terjadi akibat adanya produksi yang dihasilkan oleh masyarakat berupa adanya pemupukan modal. Pembagian pendapatan ini berdasarkan pada pendapatan tuan tanah berupa sewa, pengusaha atau kapitalis berupa keuntungan dan buruh berupa upah.

a. Proses Pemupukan Modal

Pemupukan modal merupakan keuntungan sebab keuntungan merupakan kekayaan yang disisihkan untuk pembentukan modal. Pemupukan modal tergantung pada kemampuan menabung dan kemauan menabung. Kemampuan untuk menabung adalah lebih penting, sebab dari sinilah akan terjadi pemupukan modal. Namun, kemampuan ini juga tidak akan berarti bila kemauan untuk menabung rendah.

b. Keadaan Stationer

Menurut Ricardo ada kecenderungan alamiah bahwa tingkat keuntungan akan menurun dalam perekonomian, sehingga negara akhirnya mencapai keadaan stationer. Apabila pemupukan modal meningkat sebagai akibat meningkatnya keuntungan, maka jumlah keseluruhan produksi meningkat sehingga dana upah meningkat. Dengan meningkatnya dana upah, penduduk akan meningkat yang pada gilirannya akan menaikkan permintaan gandum dan harganya.

Dengan jumlah penduduk meningkat. sedang tanah tetap, maka kualitas tanah yang kurang baik terpaksa diolah untuk memenuhi permintaan gandum yang meningkat. Akibat dari penggunaan tanah yang semakin luas, sewa tanah akan naik. Hal ini akan mengurangi bagian dari pemilik modal dan buruh. Akibatnya keuntungan menurun begitu juga upah cenderung jatuh ke tingkat yang cukup untuk hidup secara minimal. Sebaliknya pendapatan tuan tanah dari sewa akan mengalami peningkatan.

Proses naiknya sewa dan menurunnya keuntungan ini berlanjut terus sampai out put dari tambahan tanah menyamai upah minimal dari buruh yang dipekerjakan. Akhirnya

keuntungan adalah sama dengan nol. Ciri-ciri keadaan *stationary state* ditandai dengan:

1. Tingkat upah pekerja sebesar upah subsisten, akibatnya jumlah penduduk tidak bertambah.
2. Para pengusaha tidak memperoleh keuntungan sama sekali, pemupukan modal berhenti.
3. Tuan tanah dengan tingkat pendapatan yang sangat tinggi.
4. Kemajuan teknis berhenti.

Keadaan *stationary state* dapat diatasi dengan adanya perkembangan/kemajuan dibidang teknologi dan tuan tanah mau menggunakan pendapatan yang diterimanya untuk pembentukan modal. Kenaikan produktivitas yang tinggi disertai dengan adanya kemajuan di bidang teknologi mengakibatkan tingkat pendapatan pengusaha tinggi, tingkat upah juga tinggi dengan tingkat pendapatan yang tinggi ini maka dapat untuk usaha yang lebih besar lagi maka proses pertumbuhan ekonomi dapat berjalan terus.

Namun demikian proses ini tidak dapat berlangsung terus karena penduduk terus bertambah yang mengakibatkan tingkat upah menjadi menurun, pendapatan pengusaha juga menurun. Dengan demikian kemajuan di bidang teknologi hanya bersifat memperlambat proses terjadinya *stationary state* saja. Tuan tanah dalam keadaan *stationary state* ini diharapkan dapat lebih berperan, yaitu dengan kesediaannya menggunakan pendapatannya dari sewa tanah untuk digunakan sebagai modal dalam usaha.

Tetapi menurut Ricardo hal itu tidaklah mudah karena tuan tanah sangat pemboros sekali dan bersifat konsumtif artinya mereka lebih suka menggunakan uangnya untuk dibelanjakan barang-barang mewah daripada untuk usaha atau digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif. Apabila stok para pedagang kaya beralih ke bidang perdagangan yang sama, maka persaingan antar mereka secara alamiah cenderung menurunkan keuntungan dan bila peningkatan yang sama terjadi pada stok di seluruh bidang perdagangan yang dilakukan dalam masyarakat yang sama, persaingan yang sama seperti itu pasti akan menghasilkan pengaruh yang sama. Jadi

dengan adanya pertumbuhan stok modal di dalam perekonomian, akan terjadi persaingan antar wiraswastawan sehingga pengusaha dalam mendapatkan tenaga kerja yang layak cenderung menawarkan tingkat upah yang tinggi dan karena itu menurunkan tingkat keuntungan.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa teori pembangunan ekonomi dari kaum klasik pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tingkat perkembangan/pembangunan ekonomi dalam masyarakat tergantung pada 4 faktor yaitu jumlah penduduk, jumlah stok alat-alat modal, luas tanah, dan tingkat teknologi.
2. Pendapatan nasional suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi 3, yaitu upah para pekerja, keuntungan pengusaha, dan sewa tanah bagi pemilik tanah.
3. Kenaikan upah mengakibatkan jumlah penduduk meningkat. Tingkat keuntungan merupakan faktor penentu pembentukan modal, keuntungan tidak berubah (tetap atau menurun) maka perekonomian dalam keadaan *stationary state*.
4. Hukum hasil lebih yang semakin berkurang berlaku untuk segala kegiatan ekonomi.

3. John Stuart Mill

Pada intinya teori pembangunan ekonomi dari John Stuart Mill ini sependapat dengan Adam Smith, bahwa spesialisasi atau pembagian kerja akan mempertinggi keahlian pekerja, memperbaiki organisasi produksi dan mendorong dilakukannya inovasi sehingga akan mempertinggi tingkat produktivitas dan memperlancar pembangunan ekonomi. Suatu spesialisasi luas ini dibatasi oleh luas pasar.

Mengenai pandangan penduduk sama dengan Ricardo yaitu penduduk akan semakin meningkat terus, luas tanah tetap sehingga berlaku hukum hasil lebih yang semakin berkurang yang selanjutnya mengakibatkan keadaan *stationary state*. Sumbangan yang penting dari Mill dalam pembangunan ekonomi ini adalah mengenai faktor-faktor non ekonomi yang

tidak sedikit peranannya dalam pembangunan ekonomi. Faktor-faktor non ekonomi tersebut antara lain:

1. Kepercayaan masyarakat.
2. Kebiasaan-kebiasaan berpikir masyarakat.
3. Adat istiadat.
4. Corak institusi-institusi dalam masyarakat.

Mill berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut merupakan faktor-faktor yang penting yang menyebabkan ketiadaan pembangunan ekonomi di Asia. Di samping itu tingkat pengetahuan masyarakat akan mempengaruhi pembangunan ekonomi, sebab tingkat pengetahuan ini akan menentukan tingkat kemajuan industri yang dapat dicapai. Mill menganggap pembangunan ekonomi sebagai fungsi dari tanah, tenaga kerja dan modal. Peningkatan kesejahteraan hanya mungkin bila tanah dan modal mampu meningkatkan produksi lebih cepat dibandingkan angkatan kerja.

a. Pengendalian Pertambahan Penduduk

Mill percaya pada teori yang dikemukakan oleh Malthus, bahwa pembatasan penduduk merupakan hal yang penting untuk memperbaiki kondisi kelas pekerja sehingga mereka dapat menikmati hasil kemajuan teknologi dan akumulasi modal.

b. Laju Akumulasi Modal

Menurut Mill, laju akumulasi modal tergantung pada 2 hal, yaitu jumlah dana yang dapat menghasilkan tabungan dan kuatnya kecenderungan untuk menabung. Modal adalah hasil dari tabungan dan tabungan berasal dari penghematan konsumsi saat ini demi kepentingan konsumsi di masa yang akan datang.

Menurut Mill pembangunan ekonomi tergantung pada dua hal, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan untuk menghapus penghambat-penghambat dalam pembangunan ekonomi yang diciptakan oleh manusia. Oleh karena itu Mill menekankan pada pentingnya pendidikan ini sebab dengan pendidikan dapat mempertinggi pengetahuan teknis masyarakat dan mempertinggi pengetahuan umum masyarakat, pendidikan dapat juga

menciptakan pandangan-pandangan dan kebiasaan yang lebih modern.

B. Teori Karl Marx

Karl Marx sangat terkenal dengan bukunya yang berjudul *Das Kapital*. Melalui ajarannya ini Marx telah mempesonakan ratusan juta umat manusia. Ajaran Karl Marx ini terkenal dengan sebutan Marxis yang menurut Schumpeter, Marxisme adalah agama. Menurut kaum Marxisme kolot, tantangan bukan saja dianggap sebagai suatu kekeliruan tapi adalah juga dosa. Dengan demikian kaum Marxisme ini merupakan penganut suatu kepercayaan.

Sumbangan Karl Marx terhadap teori pembangunan ekonomi dengan menitik beratkan masalah kapitalis yang menurut Marx sendiri meramalkan bahwa kapitalis akan mengalami suatu keruntuhan dalam jangka panjang dan atas dasar ramalan ini maka komunis mendirikan bangunan besarnya. Analisa Marx merupakan suatu pengamatan yang paling tajam mengenai proses pembangunan kapitalis. Analisa ini memberikan pengaruh yang kuat dalam menentukan kebijakan yang dilakukan oleh Uni Soviet (dahulu), Cina dan negara komunis lainnya.

Dalam memahami analisa Marx ini perlu penelaah melalui beberapa tahapan. Dengan demikian analisa Marx secara keseluruhan sumbangannya terhadap ekonomi pembangunan dapat ditinjau dari tiga sudut, yaitu:

1. Sejarah Perkembangan Masyarakat

Karl Marx membagi ada lima tahap dalam perkembangan masyarakat bila ditinjau dari segi sejarah. Menurut Karl Marx ke lima tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. *Primitive Communal*

Dalam tahap ini masyarakat dalam melakukan suatu produksi masih menggunakan alat-alat yang sifatnya masih sangat sederhana sekali, yaitu alat-alat yang terbuat dari batu. Alat produksi yang masih bersifat sederhana ini bukan milik perseorangan tapi milik bersama (komunal). Pada awalnya

tidak berlebihan dalam memproduksi karena konsumsi mereka sama dengan yang diproduksi. Akan tetapi perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa masyarakat makin lama makin menunjukkan adanya suatu perkembangan dalam menggunakan alat-alat produksi ini, yaitu dengan ditemukannya alat-alat produksi yang sudah menggunakan besi.

Dengan adanya perkembangan ini jelas akan memberikan hasil lebih dalam memproduksi, dengan demikian dalam masyarakat sudah mulai ada suatu kelebihan produksi. Perbaikan dalam penggunaan alat-alat produksi juga mengakibatkan adanya perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat, seperti mulai perlu adanya suatu pembagian kerja dalam melakukan suatu produksi. Dengan adanya pembagian kerja ini akan mengakibatkan produksi semakin meningkat sehingga pertukaran hasil produksi sudah mulai semakin diperlukan dan semakin luas. Akhirnya untuk menghasilkan barang-barang dibutuhkan orang lain untuk membantu dan dengan demikian ada hubungan produksi antara orang-orang dalam masyarakat.

b. Perbudakan (*Slavery*)

Adanya hubungan antara orang-orang yang mempunyai alat-alat produksi dengan orang-orang yang bekerja merupakan awal terbentuknya masyarakat perbudakan. Dengan memperkerjakan orang-orang ini merupakan suatu keuntungan tersendiri bagi pemilik alat-alat produksi, lebih-lebih dengan sistem pengupahan yang sangat minim ini. Pekerja hanya diberi upah ala kadarnya saja yaitu sekedar untuk nafkah agar tidak meninggal. Adanya pembagian kerja akan melahirkan adanya spesialisasi dan akan meningkatkan produksi.

Spesialisasi akan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang akan mendorong terciptanya perbaikan dalam penggunaan alat-alat produksi yang lebih baik. Murahness tingkat upah atau tenaga kerja pada masa itu memberikan keuntungan yang banyak bagi pemilik alat-alat produksi dan mengakibatkan pemilik alat-alat produksi mempunyai keinginan untuk memperbaiki alat-alat produksinya. Akan tetapi lama kelamaan para pekerja semakin sadar akan

kedudukannya dan semakin tidak puas dengan sistem pengupahan yang ada. Oleh karena itu mulai terjadi adanya suatu pertentangan antara pemilik alat-alat produksi dengan pekerja (buruh).

c. Masyarakat Feodal

Dengan adanya pertentangan antara pemilik alat-alat produksi dan pekerja (buruh) maka berakhirlah sistem perbudakan dan lahirlah sistem masyarakat baru, yaitu masyarakat feodal. Dalam masyarakat feodal ini kaum bangsawan merupakan pemilik alat-alat produksi yang utama yakni tanah, dan sebagai petaninya adalah para bekas buruh yang dibebaskan.

Pada umumnya tugas para bekas buruh ini adalah mengerjakan tanah milik bangsawan dan setelah itu baru dapat mengerjakan tanah milik sendiri. Dalam perkembangannya alat-alat produksi di sektor pertanian ini terus berkembang dan mengalami kemajuan yang pesat dalam cara meningkatkan produksi. Dalam keadaan seperti itu dalam masyarakat terjadi perubahan dalam kehidupan sosialnya, yaitu ditandai dengan adanya kelas baru dalam masyarakat yaitu kelas bangsawan atau tuan tanah yang berkuasa dan kelas buruh. Pertentangan kepentingan bangsawan dan buruh, dimana bangsawan menghendaki keuntungan yang sebesar-besarnya, sedangkan buruh menghendaki tingkat upah yang wajar. Keuntungan bangsawan kemudian diinvestasikan lagi berupa pendirian pabrik-pabrik baru, sehingga menimbulkan adanya pedagang-pedagang baru akibat produksi yang meningkat. Dengan demikian mulai diperlukan adanya perluasan pasar untuk dapat menampung hasil produksi ini. Perkembangan ini mengakibatkan muncul adanya kaum kapitalis yang menghendaki dihapusnya sistem feodal. Masyarakat sudah mulai tidak menyukai rintangan-rintangan yang dapat menghambat perdagangan, mereka menghendaki adanya kebebasan-kebebasan yang mendukung sistem perdagangan.

d. Masyarakat Kapitalis

Ciri yang menonjol dalam kapitalis adalah adanya suatu kebebasan ekonomi dan pemilikan alat-alat produksi

secara pribadi (individu). Kelas kapitalis ini memperkerjakan kaum buruh yang dalam perkembangan memberikan keuntungan yang tinggi ini mengakibatkan alat-alat produksi semakin berkembang, produksi semakin meningkat dan menciptakan pasaran dunia. Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Perbedaan kepentingan antara kapitalis dan buruh mengakibatkan timbulnya perjuangan kelas dalam masyarakat.

e. Masyarakat Sosialis

Ciri yang menonjol dalam masyarakat sosialis adalah alat-alat produksi didasarkan atas milik sosial. Hubungan produksi merupakan hubungan kerjasama dan saling membantu antara buruh yang tidak dieksploitasi. Perbedaannya dengan sistem masyarakat komunal adalah alat-alat produksi dalam sistem sosialis berdasarkan atas hasil dari kebudayaan manusia yang telah tinggi. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk maju baik dilapangan produksi maupun dalam kehidupan kemasyarakatannya. Dalam sistem sosialis tidak ada lagi pembagian kelas-kelas dalam masyarakat.

2. Perkembangan dan Kehancuran Kapitalis

Seperti sudah dijelaskan bahwa, dalam perkembangannya kapitalis akan mengalami kemajuan yang pesat dengan semakin majunya teknologi. Kemajuan di bidang teknologi akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan demikian terjadi pergeseran-pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat. Oleh karena itu menurut Marx akibat adanya perkembangan akan menghilangkan fase atau struktur masyarakat terdahulu. Dalam jangka panjang akibat adanya perkembangan terus menerus akan mengakibatkan kapitalis mengalami kehancuran, sehingga Marx merasa pesimis. Adapun kehancuran kapitalis menurutnya disebabkan karena perkembangan kapitalis itu sendiri. Pendapat Marx ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masa Konsentrasi

Dalam masyarakat kapitalis dengan ciri yang menonjol adalah adanya suatu persaingan bebas. Semakin lama persaingan

ini semakin tajam, dengan demikian akan mengakibatkan hanya yang kuat saja yang dapat bersaing sedang yang lemah jelas akan tergusur. Bagi yang lemah dapat saja melakukan suatu penggabungan untuk mengantisipasi persaingan yang semakin ketat. Dengan demikian terjadi pemusatan-pemusatan perusahaan yang semakin lama semakin sedikit jumlahnya.

b. Akumulasi

Pada masa ini ditandai dengan adanya pemusatan-pemusatan perusahaan yang terakumulasi, dengan demikian perusahaan yang besar mempunyai peluang monopoli. Sehingga mengakibatkan penumpukan kekayaan yang semakin lama semakin meningkat. Perbedaan golongan dalam masyarakat semakin tajam dalam arti antara golongan kaya dan miskin terjadi kesenjangan semakin luas.

c. Kesengsaraan

Akibat adanya persaingan yang ketat mengakibatkan golongan lemah semakin mendesak kedudukannya. Dengan demikian mereka jadi tergeser dan semakin alternatif mereka yang tergeser ini menawarkan diri sebagai buruh dengan demikian jumlah buruh semakin melimpah. Dengan jumlah buruh yang semakin melimpah ini mengakibatkan upah menjadi rendah dan pengusaha dapat menekan buruh sedemikian rupa demi keuntungan yang ingin dicapai. Akibatnya kedudukan buruh semakin lemah dan semakin sengsara.

d. Masa Krisis

Dengan tingkat keuntungan yang semakin meningkat mengakibatkan produksi meningkat. Akan tetapi peningkatan produksi ini tidak diimbangi dengan adanya peningkatan daya beli masyarakat sehingga terjadilah keadaan over produksi. Dengan tingkat upah yang rendah jelas sekali mengakibatkan daya beli buruh semakin kecil. Karena daya beli yang rendah ini dan terjadinya over produksi mengakibatkan harga menjadi menurun. Harga menurun banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut dan menutup usahanya. Mulailah terjadi suatu krisis dalam perekonomian. Demikian proses kehancuran kapitalis menurut Karl Marx. Pada intinya kapitalis mengakibatkan makin

sengsaranya kaum buruh, terjadinya konsentrasi capital, dan turunnya tingkat keuntungan kaum kapitalis.

3. Pembangunan Ekonomi Terencana

Marx menggunakan teori nilai lebih sebagai basis bagi perjuangan kelas dalam kapitalisme dan atas dasar teori nilai lebih inilah digunakan sebagai dasar membangun suprastruktur analisa pembangunan ekonomi. Nilai lebih ini diperoleh dari tenaga kerja yang menjual tenaganya ke kapitalis. Nilai lebih merupakan jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja baru. Dengan demikian nilai disini adalah merupakan sarana kehidupan yang diperlukan untuk mempertahankan hidupnya, ditentukan oleh jumlah jam yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga kerja. Sebagai contoh, bila seorang buruh bekerja selama 10 jam, sedang kebutuhan buruh untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya diperlukan waktu 6 jam, dengan demikian ada selisih sebesar 4 jam yang disebut dengan nilai lebih. Nilai lebih ini yang merupakan suatu keuntungan bagi kaum kapitalis.

Akibat adanya nilai lebih ini memacu kapitalis untuk melakukan akumulasi modal dengan cara memperpanjang jam kerja buruh, mengurangi kebutuhan hidup buruh (tingkat upah), dan meningkatkan produktivitas buruh dengan diikuti kemajuan di bidang teknologi. Menimbun dan menyimpan sebanyak mungkin nilai lebih atau hasil lebih menjadi modal merupakan cara yang ditempuh para kapitalis. Dengan demikian keuntungan ditentukan oleh jumlah modal. Menurut Marx modal adalah buruh mati yang bagaikan drakula, hanya jaya dengan menghisap buruh yang hidup dan semakin panjang hidupnya akan semakin banyak pula buruh yang dihisap.

C. Teori Schumpeter

Joseph Alois Schumpeter pertama kali mengemukakan teori pertumbuhan ekonominya dalam buku *Theory of Economic Development* yang terbit di Jerman tahun 1911, yang kemudian diuraikan dan direvisi dalam *Business Cycles* tahun 1939 dan *Capitalism, Socialism, and Democracy* pada tahun 1942 tanpa ada perubahan yang berarti.

Menurut Schumpeter perkembangan ekonomi bukan merupakan proses yang harmonis ataupun gradual, tetapi merupakan perubahan spontan dan terputus-putus (*discontinous*), yaitu merupakan gangguan-gangguan terhadap keseimbangan yang telah ada. Perkembangan ekonomi disebabkan oleh adanya perubahan-perubahan terutama dalam lapangan industri dan perdagangan.

Salah satu pendapat Schumpeter yang penting, adalah keyakinannya bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun demikian menurut Schumpeter dalam jangka panjang ia merasa pesimis karena dalam jangka panjang kapitalis akhirnya akan mengalami keadaan tidak berkembang atau kemandegan (*stagnation*).

Menurut Schumpeter penambahan pendapatan negara dari masa ke masa perkembangannya sangat tidak stabil dan keadaannya ditentukan oleh besarnya kemungkinan untuk menjalankan pembentukan modal yang menguntungkan yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Dengan demikian proses pembangunan ekonomi akan mengalami kemakmuran dan depresi silih berganti.

Pembangunan ekonomi menurutnya sangat ditentukan sekali oleh adanya inisiatif dari golongan pengusaha yang inovatif atau golongan entrepreneur, yaitu golongan masyarakat yang mengorganisir dan mengembangkan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan barang-barang yang diperlukan oleh masyarakat. Mereka merupakan golongan masyarakat yang menciptakan inovasi atau pembaharuan dalam perekonomian. Inovasi atau pembaharuan itu dapat berupa:

1. Memperkenalkan suatu barang baru.
2. Penggunaan cara baru dalam memproduksi sesuatu barang.
3. Memperluas pasar.
4. Mengembangkan sumber bahan mentah yang baru.
5. Mengadakan reorganisasi dalam suatu perusahaan atau industri.

Dalam perekonomian Schumpeter membedakan antara pimpinan perusahaan dan pemilik modal. Masing-masing mempunyai kedudukan yang berbeda. Pimpinan perusahaan

atau manager hanya memimpin kegiatan memproduksi dalam suasana struktur organisasi dan teknik memproduksi yang tidak berubah. Sedang pemilik modal adalah mereka yang menyediakan modal untuk digunakan oleh para pengusaha untuk melakukan penyelidikan-penyelidikan dan melahirkan adanya suatu inovasi.

1. Proses Pembangunan Ekonomi

Schumpeter memulai analisisnya dengan memisalkan bahwa pada awalnya perekonomian dalam keadaan tidak berkembang atau mengalami *stationary*. Artinya dalam perekonomian tersebut tidak terdapat perkembangan penduduk, tidak terdapat penanaman modal baru dan adanya suatu pengangguran. Dalam keadaan seperti itu ada suatu kemungkinan untuk dapat melakukan suatu pembaharuan (inovasi) yang menguntungkan. Keadaan ini didasari oleh pengusaha dan mereka mulai meminjam modal ke pemilik modal dan menggunakannya untuk melakukan pembaharuan-pembaharuan.

Pada awalnya hanya sedikit saja pengusaha yang melaksanakan pembaharuan ini, akan tetapi lama kelamaan akan diikuti oleh pengusaha-pengusaha lainnya yang pada akhirnya akan tercipta kegiatan yang sangat aktif dalam penanaman modal dan hal ini akan mengakibatkan terciptanya tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi. Kegiatan perekonomian yang tinggi akan mempertinggi pula pendapatan masyarakat dan menaikkan tingkat konsumsi mereka.

Kenaikan tersebut akan mendorong perusahaan-perusahaan lain untuk memperbesar tingkat produksinya dan mengadakan penanaman modal baru. Schumpeter membagi ada dua jenis penanaman modal, yaitu penanaman modal otonomi (*autonomous investmen*) dan penanaman modal terpengaruh (*induced investmen*).

Penanaman modal otonomi ditentukan oleh perkembangan ekonomi dalam jangka panjang, terutama oleh penemuan kekayaan alam yang baru dan kemajuan teknologi. Dengan demikian penanaman modal otonomi adalah penanaman modal untuk pembaharuan-pembaharuan. Penanaman modal terpengaruh adalah penanaman modal yang dilakukan sebagai

akibat adanya kenaikan dalam produksi, pendapatan, penjualan atau keuntungan-keuntungan perusahaan.

2. Proses Terjadinya Depresi

Sesuai dengan ramalan Schumpeter bahwa dalam jangka panjang perekonomian akan mengalami apa yang dinamakan depresi. Proses terjadinya depresi itu atas tiga hal, yaitu usangnya fungsi pengusaha, runtuhnya rangka kehidupan kapitalis, dan runtuhnya golongan politikus. Pengusaha dalam perekonomian merupakan orang yang selalu melakukan pembaharuan-pembaharuan. Ia merupakan pendorong bagi perkembangan suatu perekonomian. Seiring dengan itu terdapat kemajuan di bidang teknologi yang dapat dilakukan oleh para ahli yang ada dalam suatu industri yang besar. Dengan demikian semua kegiatan dan pemasaran yang baru sudah diatur sepenuhnya. Inovasi tidak lagi sepenuhnya dilakukan oleh pengusaha tetapi sudah dilakukan oleh seorang manager perusahaan. Lama-lama pengusaha tidak lagi mempunyai peranan yang berarti dalam perekonomian, karena sekarang mereka justru bergantung pada manager perusahaan dan mereka diberi upah. Dengan adanya kemajuan-kemajuan ekonomi akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam masyarakat dan menghilangkan peranan seorang perusahaan dalam perekonomian.

Perubahan-perubahan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perkembangan ekonomi akan menyebabkan kegiatan pembaharuan dan pengembangan teknologi menjadi peristiwa yang rutin yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan dipimpin oleh seorang manager yang terdidik. Dengan demikian akan mengakibatkan peran pengusaha semakin berkurang.
2. Pembangunan ekonomi akan menghancurkan rangka dasar institusional sistem kapitalisme. Dengan adanya modernisasi akan menciptakan perusahaan-perusahaan raksasa yang dipimpin oleh seorang manager yang profesional. Mereka mempunyai sikap sebagai pegawai yang digaji dan

bukan bersifat sebagai pengusaha yang inovatif. Sedang para pemilik perusahaan dalam kegiatan sehari-hari sangat terpisah dengan kegiatan perusahaan.

3. Akhirnya pembangunan ekonomi akan menyebabkan sistem politik dan pemerintahan yang menjadi dasar dari sistem kapitalis yaitu sistem kerajaan dan tuan tanah mengalami kehancuran dan digantikan oleh sistem pemerintahan dan politik yang dikuasai oleh saudagar, pemilik modal dan industrialis.

Di samping faktor tersebut di atas, terdapat pula faktor lain yang akan membantu kehancuran kapitalis, yaitu timbulnya kritik terhadap sistem sosial politik yang ada. Kritik tersebut terutama datang dari kaum cendekiawan yang jumlahnya berkembang dengan pesat sebagai akibat dari berkembangnya pendidikan. Disamping itu bersatunya kaum buruh yang bersama kaum cendekiawan mengkritik dan menghancurkan sistem kapitalis. Mereka merupakan golongan yang anti kapitalis. Dengan demikian sistem feodal mulai tergoyahkan, peran raja-raja dalam perdagangan mulai berkurang. Perkembangan pemikiran yang rasional dan kehidupan keluarga, yaitu anggota keluarga menjadi bertambah sedikit dan mengurangi keinginan untuk menciptakan dinasti keluarga. Akibatnya keinginan untuk mengumpulkan harta bertambah lemah dan selanjutnya mengurangi keinginan para pengusaha untuk menciptakan pembaharuan.

D. Aliran Neo Klasik

Sekitar pada tahun 1870 an pergeseran dalam aliran ekonomi, dimana aliran ekonomi yang baru ini menggantikan aliran ekonomi klasik. Alasan adanya pergeseran ini disamping pada waktu itu nampak pentingnya kemajuan teknologi dan adanya penemuan-penemuan sumber produksi baru, juga ada kemungkinan-kemungkinan untuk perkembangan lebih lanjut di bawah kemajuan teknologi. Aliran baru ini disebut dengan aliran Neo-Klasik.

Kaum Neo-Klasik banyak menyumbangkan pendapatnya terhadap teori tingkat suku bunga dan dengan demikian

42| Pembangunan Ekonomi

banyak membahas masalah akumulasi kapital. Menurutnya perkembangan ekonomi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Adanya akumulasi kapital merupakan faktor penting dalam perkembangan ekonomi.
2. Perkembangan itu merupakan proses yang gradual.
3. Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
4. Aliran Neo-Klasik merasa optimis terhadap perkembangan.
5. Adanya aspek internasional dalam perkembangan tersebut.

Menurut Neo-Klasik, tingkat bunga dan tingkat pendapatan menentukan tingginya tingkat tabungan. Tingkat bunga juga menentukan tingginya tingkat investasi. Apabila tingkat bunga rendah maka investasi akan tinggi dan sebaliknya. Misalnya, suatu saat teknologi mengalami perkembangan, mengakibatkan permintaan investasi menjadi meningkat. Tambahan investasi ini akan mengakibatkan tingkat bunga mengalami kenaikan dengan demikian harga-harga barang kapital juga akan mengalami kenaikan. Dengan demikian investasi selanjutnya dapat menurun dan hanya dilakukan pada proyek-proyek yang dianggap menguntungkan saja.

Bila proyek tersebut terlaksana dan memberikan keuntungan maka permintaan investasi menjadi menurun dengan demikian tingkat bunga yang begitu rendah, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang mau menabung. Pada saat itu akumulasi kapital berakhir dan perekonomian mengalami keadaan yang statis. Dengan adanya akumulasi kapital berarti tidak ada perkembangan. Untuk mengatasi perekonomian yang statis ini, maka *full employment* harus selalu dijaga selama proses akumulasi kapital. Pemerintah diharapkan selalu mengadakan proyek-proyek yang bersifat sosial atau melakukan proyek pekerjaan umum.

Menurut Alfred Marshall, investasi dan teknologi merupakan proses yang gradual dan terus-menerus. Adanya tehnik penemuan baru sebetulnya adalah merupakan suatu mata rantai atau rentetan dari penemuan-penemuan terdahulu. Marshall menggambarkan pula adanya suatu keharmonisan

dalam perkembangan ekonomi karena adanya *internal economies* dan *external economies*.

Internal economies timbul karena adanya kenaikan dalam skala produksi yang tergantung pada sumber-sumber dan efisiensi dari pengusaha sendiri. Sedang *external economies* tergantung pada perkembangan industri-industri yang pada umumnya menyediakan kebutuhan-kebutuhan antar inovasi. Marshall menekankan pada sifat adanya saling ketergantungan dan komplementer dalam perekonomian. Keadaan ini yang nantinya akan memberikan suatu keuntungan dan akan mendorong sektor lain untuk berkembang.

Menurut Allen Young, bahwa perkembangan suatu inovasi tergantung pada pembagian kerja antar buruh. Pembagian kerja ini tergantung pada luas pasar dan sebaliknya luas pasar tergantung pada pembagian kerja yang ada dan seterusnya bersifat kumulatif. Bila terjadi ekspansi pada satu sektor akan mendorong ekspansi ke sektor lain. Tidak ada satu sektor yang berdiri sendiri. Neo-Klasik selalu merasa optimis dalam perkembangan ekonomi, karena berpendapat bahwa ada kemampuan manusia untuk dapat mengatasi terbatasnya pertumbuhan itu dan selalu akan ada kemajuan-kemajuan di bidang teknologi secara *gradual* dan *continous*. Bagi Neo-Klasik hal yang terpenting adalah adanya kemampuan untuk selalu menabung dan berhemat. Di samping pemerintah selalu berusaha untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada.

Suatu negara dalam perkembangan ekonomi akan mengalami tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pada awalnya suatu negara merupakan negara peminjam atau impor kapital (*immature debtor*).
2. Setelah kapital tersebut memberikan hasil, mulai negara tersebut membayar deviden dan bunga atas pinjaman kapital tersebut.
3. Setelah pendapatan nasionalnya meningkat terus, maka sebagian dari penghasilan tersebut digunakan untuk melunasi hutang dan sebagian lagi dipinjamkan ke negara lain yang membutuhkan. Akan tetapi deviden dan bunga yang harus dibayar masih

melebihi deviden dan bunga yang diterima dari negara lain. Maka negara tersebut termasuk negara dengan tingkat debitor yang sudah mapan (*mature debtor*).

4. Akhirnya negara tersebut hanya menerima deviden dan bunga saja dari negara lain. Negara tersebut sekarang sudah pada tingkat kreditur yang sudah mapan (*mature creditor*).

E. Teori Keynes

Teori keynes ini lebih banyak ditujukan untuk negara kapitalis maju dari pada negara berkembang. Adapun ringkasan teori dari Keynes ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya demikian pula sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif tergantung pada pertemuan antara barang permintaan dan penawaran yang terjadi. Permintaan efektif ini terdiri dari permintaan untuk konsumsi dan investasi. Sedang permintaan konsumsi sangat tergantung pada kecenderungan untuk berkonsumsi (MPC) yang kenaikannya tidak secepat kenaikan pendapatan.

Perbedaan antara besarnya pendapatan dan konsumsi dapat diatasi dengan adanya investasi. Bila jumlah investasi tidak terpenuhi maka harga akan turun. Akibatnya pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai perbedaan tersebut terpenuhi. Volume investasi ini tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Hal ini merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Kenaikan dalam volume investasi akan mengakibatkan naiknya pendapatan dan selanjutnya akan meningkat konsumsi masyarakat. Hubungan antara kenaikan investasi dengan tingkat pendapatan riil dapat dijelaskan dalam proses bekerja multiplier K. Bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut.

F. Teori Post Keynesian

Teori-teori yang dikemukakan sejak Perang Dunia II pada umumnya mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Keynes. Pemikiran Keynes ini ditandai dengan adanya unsur-unsur dinamika dalam sistem analisis tentang proses dan perkembangan ekonomi sehingga teori Keynes ini dapat terus berlangsung dan berkembang. Sebagai salah satu contoh teori yang bersumber dari Keynes ini adalah teori yang dikemukakan oleh Harrod yang mengacu pada kerangka analisis Keynes, baik dalam konsepsinya maupun perincian modelnya.

G. Teori Harrod

Roy F. Harrod, mengemukakan teorinya dalam tulisannya yang berjudul "*An Essay Inovasi Dynamic Theory* dalam *Economic Journal* edisi 49 pada bulan Maret tahun 1939" dan "*Toward a Dynamic Economics: Some Recent Developments of Economic Theory and Their Application Policy* pada tahun 1984". Pokok pikiran Harrod berkisar pada masalah pertumbuhan ekonomi yang dapat berlangsung secara terus menerus dalam pola keadaan ekuilibrium yang stabil. Sehubungan dengan hal tersebut Harrod menjelaskan dua konsep pengetahuan perihal laju pertumbuhan yang menjadi kunci dalam gagasannya, yaitu:

1. *The warranted rate of growth*, yaitu masalah laju pertumbuhan produksi dan pendapatan pada tingkat yang dianggap dari sudut pandang para pengusaha/ investasi.
2. *The naturan rate of growth*, yaitu laju pertumbuhan produksi dan pendapatan yang ditentukan oleh kondisi dasar (*fundamental conditions*) yang menyangkut antara lain bertambahnya angkatan kerja, karena penduduk bertambah dan meningkatnya produktivitas kerja, karena kemajuan di bidang teknologi.

Kondisi dasar ini yang menjadi batas maksimal bagi laju pertumbuhan produksi (dan pendapatan riil). Menurut pendapat Harrod, pertumbuhan yang stabil dan kontinu (pendapatan dan kesempatan kerja penuh) hanya bisa dicapai

jika dipenuhi kedua syarat tersebut di atas, yaitu berlangsungnya laju pertumbuhan yang warranted maupun laju pertumbuhan yang natural. Dengan kata lain laju pertumbuhan yang warranted adalah sama dengan laju pertumbuhan yang natural. Akan tetapi faktor-faktor yang mempengaruhi laju kedua pertumbuhan tersebut berlainan. Oleh sebab itu jarang sekali terjadi bahwa laju pertumbuhan *warranted* sama dengan laju pertumbuhan natural.

Kenyataan tersebut menjadi suatu pertimbangan dasar bagi Harrod untuk mengungkapkan kesimpulan pokok yang bersifat *instability theorem* yaitu bahwa proses pertumbuhan mengandung di dalam dirinya secara in heren unsur ketidak stabilan yang sewaktu-waktu dapat mengganggu keadaan ekuilibrium. Implikasi dari adanya *instability theorem* ini ialah keharusan adanya langkah-langkah kebijaksanaan tertentu untuk menanggulangi gangguan-gangguan terhadap kestabilan dalam ekuilibrium pertumbuhan.

Dengan demikian diperlukan adanya intervensi kebijaksanaan untuk menanggulangi gangguan dan penyimpangan yang merupakan ciri pokok pertumbuhan itu sendiri. Harrod juga meneliti keadaan-keadaan untuk perkembangan yang terus menerus, dan menunjukkan sifat/keadaan dari cara yang mungkin dapat ditempuh untuk suatu perkembangan ekonomi. Ia memulai dengan mengatakan bahwa tabungan sama dengan investasi atau kalau dalam persamaan $GC = S$

H. Analisa Harrod-Domar

Apabila membicarakan teori Harrod pasti akan dikaitkan dengan teori dari Domar sehingga secara implisit kedua teori ini seperti satu. Pada intinya analisisnya berpusat pada penentuan keadaan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pendapatan riil yang terus menerus tanpa ada suatu gangguan apa-apa. Harrod dan Domar menaekankan pada pentingnya peranan akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan. Bahwa akumulasi kapital akan menimbulkan pendapatan dan di samping itu akan menaikkan kapasitas produksi dengan cara memperbesar persediaan kapital.

Karena investasi akan menaikkan produksi dan juga menaikkan pendapatan, maka menjadi persoalan adalah beberapa seharusnya tingkat kenaikan investasi yang diperlukan agar supaya kenaikan pendapatan itu sama dengan kenaikan kapasitas produksi, sehingga tingkat pengerjaan penuh dapat dipertahankan. Untuk itu digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

1. Bahwa perekonomian sudah ada dalam tingkat pengerjaan penuh (*full employment income*).
2. Tidak ada campur tangan pemerintah dalam perdagangan luar negeri.
3. Tidak ada keterlambatan penyesuaian (*lag of adjustment*) atau dengan kata lain ada penyesuaian dengan cepat.
4. Hasrat menabung marjinal (*marginal propensity to save*) dan hasrat menabung rata-rata (*average propensity to save*) adalah sama.
5. Perbandingan antara kapital dan out put atau (*marginal propensity to save* dan *capital coefficient*) adalah tetap.

BAB IV

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Syarat-syarat Pembangunan Ekonomi

Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi tidak begitu saja dapat dilaksanakan, akan tetapi diperlukan beberapa syarat-syarat yang mendukung. Syarat utama dalam pembangunan adalah adanya pemerintahan dan rakyat. Pembangunan tergantung pada pemerintah dan rakyat. Pembangunan tidak dapat berjalan apabila hanya salah satu yang menjalankan. Sehingga pembangunan pada dasarnya adalah dari rakyat untuk rakyat. Rakyat yang berdaulat, maka sudah sewajarnya rakyat pulalah yang menikmati hasil-hasil pembangunan.

Pembangunan yang hanya dijalankan oleh satu pihak atau dipaksakan, artinya tanpa melibatkan rakyat dalam arti sebenarnya bukanlah model pembangunan yang ideal. Pembangunan semacam ini dapat terjadi, namun dalam kondisi dimana sistem pemerintahannya adalah diktator. Model pembangunan diktator hanya akan melahirkan penderitaan dan kesengsaraan rakyatnya, oleh karena itu model pembangunan yang seimbang atau ideal adalah model pembangunan dengan melibatkan dan didukung penuh oleh rakyat. Dukungan ini dalam bentuk partisipasi rakyat. Jika pembangunan hanya dilakukan oleh pemerintah, yaitu mengandalkan sepenuhnya pemerintah, maka dapat dipastikan pembangunan tidak akan mencapai sasaran yang diinginkan, oleh karena itu peran serta masyarakat menjadi sangat penting.

Penduduk, masyarakat atau istilahnya sumberdaya manusia merupakan aset penting dalam pembangunan, mengingat penduduk sebagai suatu *agent of development*, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan berhasil tidaknya pembangunan ditentukan oleh sikap penduduk selama proses

pembangunan berlangsung. Ada beberapa faktor yang sangat menentukan keberhasilan pembangunan, yaitu:

a. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu negara merupakan anugerah yang perlu disyukuri, sebab tidak semua negara memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan lengkap. Sumber daya alam seperti hutan dengan segala isinya, hasil pertambangan sudah sewajarnya digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakatnya. Dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, sumberdaya alam yang memiliki nilai ekonomis tinggi hendaknya tidak dieksploitasi. Sebab keberadaannya perlu dipikirkan untuk generasi yang akan datang. Jangan sampai hasil hutan dijarah habis sehingga mengakibatkan hutan gundul dan pada gilirannya dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor.

b. Akumulasi Modal

Modal atau kapital diperlukan dalam proses pembangunan. Modal diperlukan guna membiayai proyek-proyek yang dijalankan oleh pemerintah maupun swasta. Modal dibentuk melalui proses tabungan, investasi dan akumulasi modal. Modal dapat diperoleh dari dalam negeri, yaitu melalui penghimpunan tabungan masyarakat maupun dari luar negeri melalui bantuan luar negeri atau hutang luar negeri dan investasi asing.

c. Organisasi

Organisasi atau kumpulan sekelompok masyarakat sebagai tempat untuk mengorganisir semua kebutuhan masyarakat. Sehingga melalui organisasi dapat tertampung aspirasi masyarakat yang berkembang terus. Melalui organisasi masalah-masalah pembangunan dapat dipecahkan secara bersama-sama dan lebih demokratis.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi akan selalu mengalami perkembangan terus menerus. Kemajuan di bidang teknologi akan membantu dalam proses pembangunan. Kemajuan di bidang teknologi hanya

dimungkinkan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu pengembangan sumber daya manusia menjadi hal yang penting. Investasi sumber daya manusia bukanlah investasi jangka pendek tetapi merupakan investasi untuk jangka panjang, sehingga hasil yang diperoleh tidak dapat dilihat dalam sekejap. Kemajuan suatu bangsa pada saat ini sangatlah ditentukan oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek). Negara-negara maju mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan teknologi. Hal ini memungkinkan karena di negara maju tersedia dana dan sumber daya manusia. Sebaliknya di negara sedang berkembang dana sangat terbatas dan sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas.

e. Pembagian Kerja

Sistem pembagian kerja yang dikemukakan oleh Adam Smith pada hakekatnya adalah sebagai suatu spesialisasi, dapat meningkatkan kerja atau produktivitas. Pembagian kerja diperlukan untuk meningkatkan keterampilan dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan melalui produktivitas yang tinggi. Produktivitas dapat dicapai melalui kerja keras, disiplin dan ulet. Akan tetapi itu semua belum menjamin pada tingkat pendapatan yang tinggi. Sebab profesi atau jenis pekerjaan sangat menentukan tingkat upah yang diterima.

f. Skala Produksi

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah proses peningkatan produksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sangat tergantung pada skala produksi yang dimiliki oleh suatu negara.

g. Faktor Sosial

Kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat di negara sedang berkembang tidak dapat dilepaskan daerah kehidupan sosial, politik dan kebudayaan masyarakat internasional, maka sistem sosial dalam negeri saling berhubungan sistem sosial internasional beserta dengan organisasi dan peraturan-peraturan pelaksanaan tentang ekonomi global. Aspek yang terpenting dari kondisi ini adalah

munculnya fenomena dominasi dan dependensi atau ketergantungan di antara negara maju dengan negara-negara sedang berkembang.

h. Faktor Manusia

Sumber daya manusia sebagai *agent of development*, pelaksanaan dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia merupakan faktor produksi dalam proses pembangunan, sehingga bentuk dan sistem yang ada merupakan produk dari sumber daya manusia yang dimiliki. Sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Permasalahan muncul apabila sumber daya manusia yang dimiliki sangat terbatas dengan kualitas yang sangat rendah. Di negara sedang berkembang pada umumnya sumber daya manusia yang dimiliki melimpah dengan kualitas yang rendah. Dengan kondisi seperti ini jelas sangat menghambat proses pembangunan.

i. Faktor Politik dan Administrasi

Pengaruh kepentingan dan kekuasaan pada masyarakat negara sedang berkembang mempunyai segmen yang berbeda-beda. Hal ini sangat tergantung pada sistem sosial, ekonomi dan sejarah politik yang dimiliki oleh masing-masing negara sedang berkembang. Pada dasarnya di negara sedang berkembang peran militer dalam negara sangat kuat. Di Amerika Latin, kekuasaan negara terdiri dari militer, industrialis dan pemilik tanah, sedang di Afrika para politikus dan kaum buruh yang berkuasa.

B. Paradigma Pembangunan Ekonomi

Paradigma pembangunan ekonomi konvensional mengartikan pembangunan ekonomi hanya sekedar kenaikan pendapatan perkapita, sehingga tidaklah mengherankan jika pembangunan ekonomi identik dengan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara sedang berkembang banyak yang terjebak oleh paradigma ini. Hal ini ditandai dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang harus dicapai oleh setiap negara sedang berkembang untuk keluar dari kesengsaraan. Namun dalam kenyataannya paradigma pembangunan ekonomi yang hanya

menekankan pada pertumbuhan ekonomi memberikan dampak tidak seperti yang diharapkan.

Kondisi ini dapat dilihat dari keberhasilan negara-negara berkembang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonominya, namun tidak diikuti dengan perbaikan tingkat kehidupan masyarakatnya. Artinya pembangunan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat sedang sebagian besar masyarakat yang hidup pada tingkat kemiskinan tidak mengalami perubahan yang berarti.

Dengan melihat pengalaman negara sedang berkembang yang mengalami kegagalan dalam mengintegrasikan konsep pembangunan ekonomi, maka pada saat ini paradigma pembangunan mengalami perkembangan yang semakin dapat diterima oleh berbagai kalangan. Konsep tersebut dikembangkan oleh Meir pada tahun 1995 sebagai berikut.

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan perkapita suatu negara meningkat dalam kurun waktu yang panjang, dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolut tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang. Dengan demikian konsep pembangunan ekonomi tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga harus ada perubahan (*growth with change*). Jadi konsep pembangunan pada saat ini jauh lebih kompleks dan tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi saja sehingga indikator keberhasilan pembangunan juga mengalami pergeseran. Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi perubahan secara struktural dan perubahan secara kelembagaan. Perubahan secara struktural pada umumnya perubahan yang terjadi di bidang struktur secara ekonomi, yaitu dari struktur pertanian atau primer ke struktur industri atau sekunder. Sedangkan perubahan secara kelembagaan melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan.

C. Indikator Keberhasilan Pembangunan

Kegagalan pembangunan yang dialami Negara-negara sedang berkembang di dunia, menjadi suatu pelajaran sangat berharga untuk mendata ulang tentang makna atau arti dari pembangunan itu sendiri. Apakah artinya pembangunan dengan

pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi disisi lain masyarakat masih banyak yang tidak bisa ikut merasakan dampak yang positif dari pembanguna itu sendiri? Dan apakah artinya pembangunan jika pembangunan justru semakin membuat sengsara masyarakatnya? Tidak mudah memang menjalankan pembangunan di negara sedang berkembang dengan berbagai macam masalah yang sangat kompleks. Tantangan pembangunan di negara sedang berkembang tidak sesederhana yang dibayangkan seperti dalam konteks teori. Pandangan para ahli pembangunan dari berbagai belahan dunia, tentu tidak begitu saja mudah diterapkan pada negara sedang berkembang. Suatu teori cocok pada suatu negara belum tentu cocok untuk negara lain.

Pendekatan model pembangunan yang lebih mengutamakan pendekatan kuantitatif (seperti, pertumbuhan ekonomi) ternyata sangatlah berbahaya dan menyesatkan. Laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan pendapatan perkapita bukanlah sesuatu yang harus dikejar tetapi lebih dari sekedar itu adalah makna atau arti dari pencapaian tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan perkapita yang selalu meningkat merupakan indikator yang bersifat kuantitatif dan paling mudah untuk dilakukan. Padahal pembangunan tidak cukup dengan menggunkan pendekatan kuantitatif saja tetapi juga diperlukan pendekatan-pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang relative rumit dan sulit untuk mengukurnya.

Di masa yang akan datang, pembangunan tidak cukup dimaknai secara kuantitatif saja tetapi juga secara kualitatif. Oleh karena itu makna atau arti pembangunan ekonomi akan selalu berubah atau mengalami pergeseran sesuai dengan tuntutan zaman yang selalu berubah. Sebagai rumpun dalam ilmu sosial, perubahan makna atau arti pembangunan ekonomi bukanlah sesuatu yang luar biasa dan sangat wajar. Tentu saja perubahan makna ini akan ditanggapi berbeda oleh masing-masing negara khususnya negara sedang berkembang.

1. Paradigma Tradisional

Pembangunan ekonomi pada tahun 1960-an mengalami pergeseran makna dari pandangan tradisional berubah ke pandangan baru atau paradigma baru. Konsep pembangunan yang pada awalnya adalah identik dengan pertumbuhan atau *development with growth* berubah menjadi pembangunan tidak lagi identik dengan pertumbuhan tetapi pembangunan harus diikuti dengan perubahan atau *development with change*.

Konsep pembangunan yang identik dengan pertumbuhan ini merupakan kajian dari Arthur Lewis. Dalam bukunya yang berjudul *The Theory of Economic Growth*, Lewis menyebutkan bahwa tujuan utama pembangunan ekonomi adalah pencapaian laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi di negara manapun. Kata kunci untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi adalah pembentukan modal. Melalui pembentukan modal maka terciptalah industri-industri yang memberikan nilai tambah tinggi bagi pertumbuhan ekonomi.

Bagi negara sedang berkembang yang sebagian sebagai besar merupakan negara miskin, amatlah sulit untuk melakukan pembentukan modal, oleh karena itu mengundang investor asing melalui penanaman modal asing (PMA) dan utang luar negeri tidak dapat dihindarkan. Konsep pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi didasarkan pada pengalaman pembangunan di negara-negara EROPA yang disebut dengan Eropa Sentris atau Eurocentrism (Hettne, dalam Kuncoro, 2006).

Model pembangunan dengan strategi mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi melalui pengembangan industri memunculkan berbagai permasalahan. Permasalahan yang umum adalah rusaknya lingkungan, yang ditandai dengan adanya pencemaran atau limbah pembuangan industri, polusi udara dan kerusakan hutan. Kondisi ini sebagai akibat dari pembangunan industri yang tidak tertata dengan baik. Kerusakan dan pencemaran lingkungan seringkali tidak diperhitungkan oleh negara, akibatnya biaya sosial yang harus ditanggung masyarakat terlalu tinggi dan pada akhirnya masyarakat miskinlah yang menjadi korban.

Masyarakat miskin dengan segala keterbatasannya, membuat mereka semakin sulit untuk memperbaiki kualitas hidupnya. Ketidakmampuan secara ekonomi membuat masyarakat miskin tidak ada pilihan lain untuk sekedar bertempat tinggal yang layak atau berobat ke dokter karena masalah kesehatan. Belum lagi perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan industri mendorong masyarakat untuk beralih profesi dari petani atau buruh tani menjadi buruh pabrik atau sebaliknya malah tidak bekerja sama sekali sehingga menimbulkan masalah pengangguran. Model pembangunan industri yang lebih banyak bersifat *capital intensive* daripada *labour intensive* semakin memperparah kondisi pengangguran yang semakin bertambah.

Kondisi seperti itulah yang menyebabkan negara sedang berkembang semakin sulit untuk maju. Disisi lain laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata juga diikuti dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Pembagian kue pembangunan yang tidak merata hanya dinikmati oleh kalangan tertentu dalam hal ini pemilik modal atau golongan masyarakat kaya, semakin memiskinkan masyarakat yang memang sudah miskin. Oleh karena itu makna pembangunan menjadi dipertanyakan, sebenarnya pembangunan itu ditujukan untuk siapa? Kegagalan pembangunan di berbagai negara sedang berkembang menunjukkan salah satu bukti kegagalan strategi pembangunan yang selama ini diyakini kebenarannya. Hasil pembangunan tidak seperti yang diharapkan semakin memperkuat ada yang salah dalam proses pembangunan. Pembangunan yang seharusnya menyebabkan perbaikan atau peningkatan kualitas hidup ternyata justru sebaliknya.

Pembangunan yang terjadi selama ini lebih banyak menghasilkan masalah-masalah krusial dalam pembangunan, seperti meningkatnya jumlah pengangguran dan angka kemiskinan. Konsep *trickle down effect* (menetes ke bawah) yang selalu di dengung-dengungkan tidak memberikan hasil yang memadai. Pembangunan hanya terpusat pada kelompok dan wilayah tertentu saja, sehingga kue pembangunan tidak bisa dinikmati oleh semua lapisan masyarakat.

2. Paradigma Baru

Menurut Esmara dan Meier (dalam Kuncoro, 2006), bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan syarat yang mutlak diperlukan (*necessary*) tetapi tidak mencukupi (*sufficient*) bagi pembangunan. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar pertumbuhan ekonomi. Menurut Meier, pembangunan tidak lagi memuja GNP sebagai sasaran pembangunan, namun lebih memusatkan pada proses pembangunan itu sendiri. Pembangunan ekonomi tidak cukup dengan peningkatan pendapatan perkapita dalam jangka panjang saja, tetapi yang lebih penting lagi adalah jumlah penduduk miskin tidak mengalami peningkatan dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang.

Myrdal menekankan pada pembangunan sebagai pergerakan ke atas dari seluruh sistem sosial. Dudley dan Seers (1973), merujuk 3 (tiga) sasaran utama dari pembangunan, yaitu:

1. *What has been happening to poverty?*
2. *What has been happening to unemployment?*
3. *What has been to inequality?*

Myrdal, Dudley dan Seers, nampaknya mempunyai kecenderungan bahwa pembangunan lebih banyak menekankan pada aspek sosial, yaitu pentingnya mengurangi kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketidakmerataan distribusi pendapatan. Berdasarkan hal tersebut, maka pembangunan haruslah ditujukan pada perluasana kesempatan kerja dan pemerataan distribusi pendapatan. Hal inilah yang mendorong munculnya konsep baru dalam memahami makna pembangunan. Terdapat 5 (lima) strategi baru dalam pembangunan ekonomi, yaitu strategi pertumbuhan dengan distribusi, strategi kebutuhan pokok, strategi pembangunan mandiri, strategi pembangunan berkelanjutan, dan strategi pembangunan berdimensi etnik.

a. Strategi Pertumbuhan dan Distribusi

Strategi pertumbuhan dengan distribusi merupakan strategi pembangunan yang lahir dari kegagalan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi saja tanpa diikuti dengan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi yang

tinggi tidak akan berarti kalau distribusi pendapatan dalam masyarakat timpang. Pengalaman di beberapa negara sedang berkembang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga diikuti dengan ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin lama semakin lebar. Dengan demikian strategi pertumbuhan dan distribusi merupakan strategi pembangunan yang tidak saja mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi juga memperhatikan distribusi pendapatan masyarakat.

Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan miskin supaya tidak semakin timpang. Pembagian kue pembangunan ini sangat penting agar pembangunan dapat dinikmati oleh semua golongan. Implementasi dari strategi pembangunan ini adalah berupa kebijakan antara lain menciptakan lapangan kerja, perhatian terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah), investasi pada SDM (Sumber Daya Manusia), dan perhatian terhadap rakyat miskin. Kebijakan Pemerintah diarahkan pada kebijakan yang berorientasi pada masyarakat banyak, oleh karena itu strategi ini dinamakan juga sebagai strategi pembangunan yang bersifat populis (populisme).

b. Strategi Kebutuhan Pokok

Strategi kebutuhan pokok merupakan strategi pembangunan dengan berdasarkan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Kebutuhan pokok dapat didefinisikan sebagai kebutuhan yang meliputi pangan, papan, dan sandang, Namun demikian konsep kebutuhan pokok untuk masing-masing negara adalah berbeda, semakin maju dan kaya suatu negara semakin tinggi kebutuhan pokok. Pada umumnya kebutuhan pokok meliputi kebutuhan minimum konsumsi (pangan, sandang, perumahan) dan jasa umum (kesehatan, transportasi umum, air, fasilitas pendidikan), Namun menurut Todaro, pengertian kebutuhan pokok jauh lebih luas dari sekedar pemenuhan kebutuhan minimum. Todaro menyatakan bahwa kebutuhan pokok manusia mengacu pada 3 (tiga) nilai dasar pembangunan, yaitu kemampuan menyediakan kebutuhan dasar (*life sustenance*), kebutuhan untuk dihargai (*self esteem*), dan kebebasan untuk memilih (*freedom*).

Dengan demikian kebutuhan pokok menurut Todaro tidak sekedar pemenuhan kebutuhan minimum, tetapi lebih luas lagi sehingga pembangunan dapat dinikmati oleh semua masyarakat. Strategi pembangunan kebutuhan pokok ini merupakan strategi pembangunan dengan pendekatan ekonomi dan sosial.

c. Strategi Pembangunan Mandiri

Strategi pembangunan mandiri lahir sebagai antitesis dari strategi dependensia, yaitu strategi pembangunan yang berorientasi pada negara donatur sebagai pemasok modal melalui utang luar negeri. Model pembangunan seperti ini sangat rentan karena menggantungkan diri pada negara donatur. Kondisi ini melahirkan tingkat ketergantungan yang sangat tinggi antara negara sedang berkembang dengan negara maju. Negara sedang berkembang yang pada umumnya merupakan negara miskin sangat terbatas dalam pemumpukan modal sehingga tidaklah heran banyak negara sedang berkembang yang terjatuh dalam lilitan utang luar negeri, termasuk Indonesia.

Sebagai pelopor kelahiran strategi pembangunan mandiri adalah negara India pada masa pemerintahan Mahatma Gandhi, Tanzania pada masa pemerintahan Julius Nyerere, Cina pada masa pemerintahan Mao Zedong dan Indonesia pada masa pemerintahan Soekarno. Pengertian “mandiri” tidak saja mandiri secara ekonomi tetapi juga mandiri dalam segala hal, sehingga strategi pembangunan mandiri pada intinya merupakan strategi pembangunan yang tidak tergantung pada negara lain.

d. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Strategi pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), lahir sekitar tahun 1970 seiring dengan merebaknya masalah lingkungan. Kesadaran masyarakat yang sangat tinggi akan pentingnya lingkungan hidup, mendorong beberapa negara untuk mengadakan pertemuan dan membahas tentang kerusakan lingkungan yang terjadi. Laporan dari Club of Rome, dengan menggunakan data statistik, menyimpulkan bahwa “bila tren pertumbuhan penduduk, industrialisasi, polusi, produksi makanan, dan deplesi sumberdaya terus

menerus tidak berubah, maka batas pertumbuhan atas planet bumi akan dicapai dalam waktu kurang dalam 100 tahun.” Namun demikian ramalan ini tidak terbukti.

Mnurut Brown (1981), konsep *sustainable* sendiri merujuk pada 4 (empat) nilai utama, yaitu tertinggalnya transisi energy, memburuknya sistem biologis utama (perikanan laut padang rumput, hutan, lahan pertanian) , ancaman perubahan iklim yang sangat ekstrem (polusi, dampak rumah kaca, bencana banjir, musim panas yang sangat panas dan musin dingin yang sangat dingin), dan kurangnya bahan makanan.

Dengan demikian, strategi pembangunan berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan menjaga lingkungan. Pembangunan yang tidak semata-mata mengejar nilai ekonomis, tetapi disini lain juga memperhatikan ekologi maupun sosial di masa yang akan datang. Oleh karena itu para ahli pembangunan setuju tentang konsep pembangunan ecodevelopment dimana masyarakat dan lingkungan harus bersama-sama berkembang menuju produktivitas dan pemenuhan kebutuhan yang lebih baik.

Pada program *Millennium Development Goals* atau MDGs yang disepakati 189 negara, termasuk Indonesia pada konferensi Tingkat Tinggi Milenium Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan September 2000 merumuskan 8 (delapan) target pembangunan yang harus dicapai pada tahun 2015. Ke 8 (delapan) target pembangunan tersebut adalah penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, penyetaraan jender, perlawanan terhadap penyakit, penurunan kematian angka anak, peningkatan kesehatan ibu, perlindungan lingkungan hidup, dan kerjasama Global.

Program *Millennium Development Goals* atau MDGs merupakan salah satu program dunia tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di samping itu dalam program *Millennium Development Goals* atau MDGs terkandung makna pentingnya perubahan dalam memahami makna pembangunan. Pembangunan tidak saja dipandang dari segi ekonomi tetapi juga dari segi ekologi, lingkungan dan sosial. Dampak perubahan iklim sebagai salah satu penyebab pentingnya pembangunan berdasarkan lingkungan sekitar.

e. Strategi Berdimensi Etnik

Strategi pembangunan berdimensi etnik (*ethnodevelopment*) lahir dengan latar belakang konflik antar etnis. Konflik antara etnis terjadi pada negara yang memiliki berbagai macam etnis, (multietnis) seperti ras, suku dan agama yang beragam (heterogen). Negara dengan multietnis seperti ini sangat rentan untuk terjadinya konflik. Pada negara-negara seperti di Afrika, dan Asia Selatan pada umumnya sering terjadi konflik berupa konflik kepemilikan atas tanah, konflik penguasaan sumberdaya alam, konflik ketimpangan pembangunan, dan konflik penguasaan politik dan ekonomi.

Negara Malaysia secara terbuka memasukan konsep *ethnodevelopment* dalam formulasi kebijakan ekonomi barunya (NEP) yang dirancang dan digunakan untuk menjamin agar buah pembangunan dapat dirasakan oleh semua warga negara secara adil, baik dari komunitas Cina, India, maupun masyarakat pribumi Malaysia (Faaland, et al, 1990).

D. Mengukur Keberhasilan Pembangunan

Pembangunan seperti yang sudah ditegaskan di atas, tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi saja tetapi juga dari sisi lainnya. Oleh karena itu keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh faktor ekonomi dan non ekonomi. Kuncoro (2006) menetapkan ada 2 (dua) indikator utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan di negara sedang berkembang, yaitu indikator ekonomi dan indikator sosial. Indikator ekonomi meliputi laju pertumbuhan ekonomi, *Gross National Product* (GNP) perkapita, dan *Gross Domestic Product* (GDP) per kapita dengan *purcasing power parity*. Sedangkan indikator Sosial meliputi *Human Development Index* (HDI) dan *Physical Quality Life Index* (PQLI).

BAB V

MASALAH UTAMA DALAM PEMBANGUNAN

Proses pembangunan yang dilakukan di negara sedang berkembang membutuhkan waktu yang panjang. Pembangunan tidaklah terjadi begitu saja tetapi secara bertahap dan berkelanjutan. Model pembangunan di negara sedang berkembang lebih banyak berkiblat pada negara maju terutama negara Eropa dan Amerika Serikat. Namun demikian hasil yang diperoleh tidaklah sama. Bagi negara sedang berkembang kemajuan yang pesat di Eropa dan Amerika menginspirasi untuk mengikuti apa-apa yang dilakukan pada negara tersebut.

Banyak hal yang menyebabkan hasil pembangunan menjadi berbeda antara negara maju dengan negara sedang berkembang. Kondisi sosial ekonomi, geografis penduduk dan politik sangat berpengaruh terhadap hasil pembangunan. Bagi negara sedang berkembang kemajuan di negara Eropa dan Amerika sangat menarik untuk ditelaah dan selalu mencoba untuk bisa diikuti sejaknya. Hasil yang utama dari proses pembangunan di negara sedang berkembang adalah semakin lama semakin timpang antara kondisi negara maju dengan negara sedang berkembang sehingga sangat menarik untuk menelaah mengapa masyarakat di negara sedang berkembang taraf kehidupannya relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan tingkat kehidupan masyarakat di negara maju. Padahal bila dilihat dari usaha yang telah dilakukan ini tidak sederhana, tapi benar-benar dilakukan dengan sekuat tenaga. Perbedaan dalam tingkat kesejahteraan, mengakibatkan adanya suatu rasa ketidak puasaan dari negara sedang berkembang itu sendiri.

Perbedaan tingkat kesejahteraan ini semakin dirasa penting terutama setelah perang Dunia II. Untuk menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan ini para ahli ekonomi pembangunan menuangkan pemikiran mereka dalam bentuk teori-teori mengenai penghambat-penghambat pembangunan di negara sedang berkembang atau yang dikenal dengan istilah *Theories of Underdevelopment*. Penghambat-
62| Pembangunan Ekonomi

penghambat pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang dapat digolongkan menjadi dua, yaitu penghambat dari dalam negeri dan dari luar negeri.

A. Faktor dalam Negeri

Faktor dalam negeri merupakan faktor penghambat pembangunan yang bersumber dari negara sedang berkembang itu sendiri. Faktor ini disadari sangat berpengaruh terhadap proses pembangunan. Faktor-faktor dalam negeri yang dapat menjadi penghambat pembangunan antara lain penduduk, dualism, dan lingkaran perangkap kemiskinan.

1. Penduduk

Peran penduduk dalam pembangunan dapat berperan sebagai penghambat tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong. Jadi penduduk tidak selama sebagai faktor penghambat dalam pembangunan, hal ini tergantung pada beberapa aspek yang berkaitan dengan penduduk itu sendiri. Aspek tersebut antara lain, jumlah penduduk, kualitas penduduk dan distribusi penduduk.

Pada umumnya jumlah penduduk di negara sedang berkembang adalah sangat besar, seperti di China, India dan Indonesia. Peran penduduk sebagai faktor pendorong dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

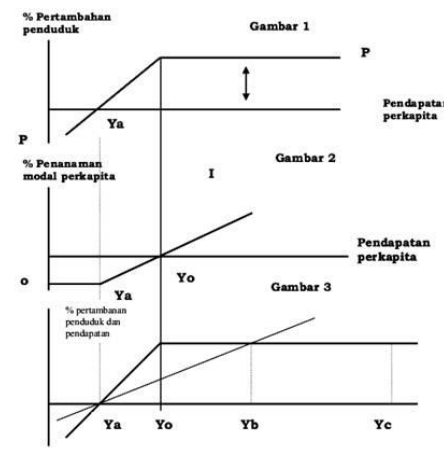
1. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja. Dengan semakin bertambah jumlah penduduk berarti memungkinkan adanya pertambahan tenaga kerja dari tahun ke tahun. Dengan demikian penduduk yang semakin besar merupakan aset dalam persediaan akan tenaga kerja.
2. Penduduk sebagai pangsa pasar. Penduduk merupakan konsumen dari hasil produksi. Dengan jumlah penduduk yang besar adalah merupakan konsumen yang potensial. Dengan demikian semakin besar jumlah penduduk secara langsung akan dapat menciptakan pasar yang pada gilirannya akan dapat memperluas pasar yang ada.

Sebaliknya, peran penduduk sebagai faktor penghambat dalam pembangunan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Produktivitas penduduk yang rendah. Penduduk di negara berkembang ditandai dengan masih banyaknya penduduk yang terbelakang. Hal ini mengakibatkan tingkat produktivitas penduduk menjadi rendah. Tingkat produktivitas yang rendah ini dapat dilihat dengan semakin tingginya tingkat pengangguran mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat dan selanjutnya dengan semakin rendahnya tingkat pendapatan ini mengakibatkan kemampuan untuk melakukan tabungan menjadi rendah pula yang selanjutnya mengakibatkan investasi menjadi rendah. Dengan demikian negara berkembang menjadi kekurangan investasi/modal untuk menjalankan pembangunan ekonominya.
2. Distribusi penduduk yang tidak merata. Di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar pada umumnya tidak diimbangi dengan adanya pemerataan dalam penyebaran jumlah penduduk, artinya jumlah penduduk hanya terfokuskan pada suatu daerah tertentu sedang daerah lainnya justru ada yang kekuarangan penduduk atau jumlah sangat sedikit. Dengan penyebaran penduduk yang kurang merata ini jelas tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonomi. Sebagai akibatnya dapat mengakibatkan pembagian pendapatan menjadi tidak merata atau timpang.

Dari kedua peran tersebut, penduduk di negara sedang berkembang ternyata lebih banyak berperan sebagai penghambat dalam proses pembangunan ekonomi, dengan demikian jumlah penduduk yang besar di negara sedang berkembang kurang menguntungkan dalam pembangunan ekonomi dengan melihat kondisi dan ciri-ciri penduduk yang masih terbelakang, tingginya tingkat pengangguran, tingkat pendapatan perkapita yang rendah, sarana transportasi yang belum baik, kurangnya skill dan sebagainya lebih banyak

menimbulkan hal-hal negatif dalam proses pembangunan ekonomi. Kondisi ini diperkuat dengan adanya teori perangkap penduduk yang dikemukakan oleh Nelson dan Leibenstein. Teori perangkap penduduk merupakan suatu teori yang menggambarkan bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk dapat menurun yang diakibatkan oleh perkembangan penduduk. Di negara sedang berkembang perkembangan penduduk lebih banyak merupakan penghambat dalam proses pembangunan ekonomi. Oleh karena itu para ahli ekonomi telah membuat suatu analisa mengenai pengaruh negatif yang ditimbulkan karena perkembangan penduduk. Analisa ini dilakukan oleh Nelson dan Leibenstein, mereka mengemukakan teori dalam waktu yang hampir bersamaan dan pokok pandangan mereka tidak jauh berbeda. Baik Nelson maupun Leibenstein menunjukkan bahwa pertambahan penduduk yang pesat di negara berkembang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut mengalami perbaikan yang berarti dan dalam jangka panjang mungkin menurun. Menurut mereka sebagai akibat dari perkembangan penduduk yang pesat dalam jangka panjang tingkat pendapatan perkapita akan kembali mencapai nilai yang sama dengan tingkat pendapatan cukup hidup. Dalam membuat analisisnya Nelson menggunakan tiga macam pola, seperti yang nampak pada gambar berikut:



Sumber: Sukirno, 2006

Gambar 5.1. Pertambahan penduduk terhadap pertambahan tingkat kesejahteraan

Gambar 1 menggambarkan hubungan antara pendapatan perkapita dan tingkat perkembangan penduduk, Nelson menggambarkan sifat hubungan tersebut dalam bentuk kurva PP. Titik Y_a adalah sebagai tingkat pendapatan perkapita yang merupakan pendapatan cukup hidup. Sebelum titik Y_a kurva PP berada dibawah sumbu datar karena tingkat pertumbuhan penduduk adalah negatif. Diantara Y_a dan Y_o tingkat kematian terus menerus turun sedang tingkat kelahiran tetap, maka apabila pendapatan lebih jauh dari titik Y_a (pendapatan bertambah tingkat) tingkat pertumbuhan penduduk menjadi bertambah besar.

Pada tingkat pendapatan sebesar Y_o dan sesudahnya tingkat pertumbuhan penduduk mencapai maksimum yaitu sebesar ΔP , dan keadaan itu tetap berlaku walaupun pendapatan perkapita bertambah tinggi. Pada tingkat tersebut, tingkat kelahiran dan kematian tidak mengalami perubahan walaupun pendapatan perkapita bertambah tinggi.

Gambar 2 menunjukkan hubungan antara tingkat penanaman modal perkapita dengan tingkat pendapatan. Nelson mengemukakan ada dua sumber dari penanaman modal, yaitu dari tanah dan tabungan masyarakat. Dari kedua sumber ini tabungan merupakan faktor yang paling menentukan besarnya tingkat penanaman modal yang dilakukan. Pada tingkat pendapatan yang cukup untuk hidup (Y_a) tidak terdapat tabungan masyarakat. Oleh karena itu tingkat penanaman modal perkapita adalah nol. Pada tingkat pendapatan dibawah Y_a konsumsi masyarakat melebihi tingkat pendapatannya (*dissaving*) dan mengurangi stok modal yang pada akhirnya akan mencapai suatu tingkat maksimum apabila pendapatan terus menerus turun. Apabila tingkat ini tercapai maka pada tingkat pendapatan perkapita sebesar Y_x atau kurang, kurva II menjadi sejajar dengan sumbu datar. Pada tingkat pendapatan lebih dari Y_a , pendapatan lebih besar dari pada tingkat konsumsi dengan demikian tabungan dan penanaman dapat dilakukan. Makin besar tingkat pendapatan makin besar tingkat tabungan dan penanaman yang dapat dilakukan.

Gambar 3 menunjukkan hubungan antara tingkat pendapatan nasional dengan pendapatan perkapita. Tingkat penanaman modal merupakan faktor yang menentukan lajunya tingkat pertumbuhan pendapatan nasional. Padahal tingkat penanaman modal ditentukan oleh besarnya tingkat pendapatan perkapita, karena tingkat pendapatan perkapita rendah maka tabungan rendah (negatif) maka tingkat penanaman modal menjadi rendah pula (negatif). Kurva Ya menunjukkan keadaan ini. Pada tingkat pendapatan sebesar Ya, yang merupakan tingkat pendapatan cukup hidup, tabungan adalah nol dengan demikian pendapatan nasional tidak berkembang atau mengalami kemunduran. Baru sesudah tingkat ini Yo baru dapat tercipta tabungan dengan demikian terjadi pertumbuhan pendapatan nasional. Akan tetapi hal ini tidak terjadi terus menerus, dan pada tingkat pendapatan perkapita sebesar Yc tingkat pendapatan nasional mengalami kemunduran. Dari gambar dapat dilihat bahwa pada tingkat pendapatan perkapita antara Ya dan Yb kurva PP di atas kurva YY, yang berarti tingkat pertumbuhan penduduk adalah lebih besar dari pada tingkat pendapatan nasional. Pada tingkat ini tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita adalah negatif, yang berarti adalah dari waktu ke waktu tingkat pendapatan perkapita akan menjadi bertambah kecil dan menurun sampai mencapai Ya pada tingkat ini oleh Nelson dinamakan sebagai *the low level equilibrium trap* atau perangkap tingkat keseimbangan ini merupakan tingkat keseimbangan yang stabil yang akan dicapai.

Tanpa adanya perubahan dibidang politik, sosial dan teknologi sesudah tingkat ini tercapai, maka perubahan dalam tingkat pendapatan perkapita tidak akan berlaku lagi. Antara Yb dan Yc menunjukkan hubungan yang sebaliknya, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional adalah lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk dengan demikian tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita adalah positif. Dalam jangka panjang kenaikan ini akan terus sampai mencapai tingkat pendapatan sebesar Yc. Tanpa adanya perkembangan perkapita teknologi dan perubahan keadaan politik sosial pendapatan perkapita sebesar Yc adalah tingkat pendapatan perkapita masyarakat yang paling maksimum.

2. Dualisme

Pengertian dualisme itu sendiri dapat diartikan sebagai adanya dua sistem yang sangat berbeda dan kedua-duanya wujud secara berdampingan. Adapun macam dari dualisme itu sendiri adalah:

1. Dualisme sosial, dikemukakan oleh Boeke, yang mengatakan bahwa di dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya wujud secara berdampingan dimana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang satu modern sedang yang lainnya tradisional. Sistem sosial yang lebih modern ini terutama berasal dari negara-negara barat.
2. Dualisme teknologi, dalam menelaah mengenai dualisme di negara berkembang dua ahli ekonomi yaitu Higgins dan Myint telah melakukan suatu studi tentang dualisme ini. Higgins menekankan kepada adanya dualisme di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan dualisme teknologi adalah suatu keadaan dimana di dalam sesuatu bidang kegiatan ekonomi tertentu digunakan teknik memproduksi dan organisasi produksi yang sangat berbeda sekali coraknya, dan mengakibatkan perbedaan yang besar sekali dalam tingkat produktivitas.
3. Dualisme finansial, sedang Myint lebih banyak menyoroti masalah lembaga keuangan di negara berkembang. Analisa Myint mengenai pasar yang melahirkan adanya dualisme finansial. Pengertian itu dapat dijelaskan dalam dua golongan yaitu: a) adanya pasar uang yang memiliki organisasi yang sempurna (*organized money market*), b) adanya pasar uang yang tidak terorganisir sama sekali (*unorganization money market*). Untuk pasar uang yang pertama meliputi Bank-bank komersial dan Badan-badan keuangan lainnya. Hal ini terutama terdapat di kota-kota besar dan pusat-pusat perdagangan. Sedangkan pasar uang

jenis yang kedua adalah bentuk pasar uang yang bukan berbentuk institusional terdiri dari tuan-tuan tanah, pedagang-pedagang perantara. Biasanya pasar uang jenis ini sangat menonjol untuk daerah pedesaan yang terkenal dengan renternir dan sistem ijon. Adanya kebutuhan yang mendesak akan uang mengakibatkan cara tersebut yang mudah dijangkau oleh masyarakat di pedesaan.

4. Dualisme regional, pada tahun 1960an banyak orang mulai membicarakan mengenai masalah dualisme regional. Yang dimaksud dengan dualisme regional ini adalah ketidakseimbangan tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Akibat dari ketidakseimbangan dalam pembangunan mengakibatkan adanya jurang perbedaan tingkat kesejahteraan antar berbagai daerah dan selanjutnya menimbulkan masalah sosial dan politik. Sebagai contoh misal dualisme antara kota dengan desa, dualisme antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Adanya berbagai macam tersebut jelas kurang menguntungkan bagi pembangunan, sebab akibat yang dapat ditimbulkan dapat berupa ada perbedaan yang menyolok antara golongan kaya dan miskin dimana perbedaan ini semakin lama semakin melebar dengan distribusi pembagian pemerataan pendapatan menjadi timpang. Di samping itu kemajuan di bidang teknologi juga akan memberikan pengaruh terhadap tingkat kesempatan kerja yang ada. Dualisme teknologi melahirkan akibat buruk terhadap lajunya pembangunan dan kaharmonisan proses pembangunan.

3. Lingkaran Perangkap Kemiskinan

Masalah lingkaran perangkap kemiskinan ini dikemukakan oleh ahli ekonomi yang bernama Nurske yang memelopori penilaian atas masalah pembentukan modal di negara-negara berkembang. Adapun pengertian dari lingkaran perangkap kemiskinan atau disingkat dengan lingkaran

kemiskinan atau *The Vicious Circle*, adalah “suatu rangkaian kekuatan-kekuatan yang saling mempengaruhi satu sama lain secara sedemikian rupa sehingga menimbulkan keadaan dimana sesuatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami banyak kesulitan untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih tinggi”.

Pada hakekatnya Nurske berpendapat bahwa kemiskinan bukan saja disebabkan oleh ketiadaan pembangunan pada masa lalu tetapi juga menimbulkan hambatan kepada pembangunan di masa yang akan datang. Sehubungan dengan hal itu Nurske mengatakan: “sesuatu negara adalah miskin karena ia merupakan negara miskin” atau istilahnya *“a country is poor because it is poor”*. Menurutnya penyebab utama adanya lingkaran perangkap kemiskinan ini adalah adanya hambatan dalam menciptakan tingkat penanaman modal di negara berkembang. Di lain pihak tingkat penanaman modal tergantung pada tingkat pembentukan modal. Oleh karena itu Nurske berpendapat, bahwa ada tiga penyebab terjadinya lingkaran perangkap kemiskinan ini yaitu:

1. Dari segi penawaran modal, bahwa tingkat produktivitas masyarakat yang rendah mengakibatkan tingkat pendapatan menjadi rendah, dengan demikian kemampuan untuk menciptakan tabungan menjadi rendah pula. Hal ini akan menyebabkan tingkat pembentukan modal menjadi rendah dan berarti negara berkembang kekurangan akan modal.
2. Dari segi permintaan modal, kekurangan modal mengakibatkan tingkat produktivitas masyarakat menjadi rendah. Di negara berkembang ada corak yang berbeda sehubungan dengan tingkat penanaman modal yang rendah ini, yaitu bahwa tingkat pembentukan modal yang rendah ini disebabkan karena luas pasar yang sempit. Pasar untuk berbagai jenis barang terbatas adanya. Penduduk yang besar tanpa diikuti dengan adanya daya beli mengakibatkan produksi tidak terserap oleh pasar. Rendahnya daya beli ini disebabkan tingkat

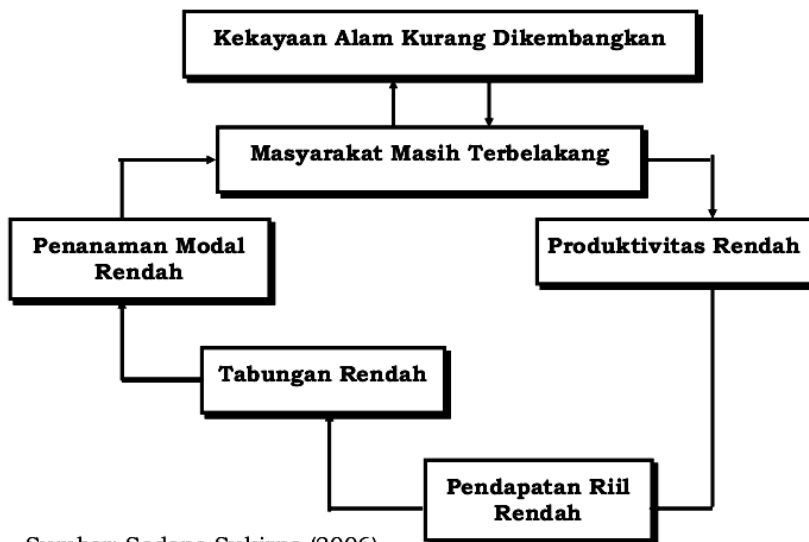
pendapatan masyarakat yang rendah yang hal ini disebabkan oleh tingkat produktivitas yang rendah pula. Sehingga pembentukan modal yang terbatas ini disebabkan oleh kekurangan perangsang untuk menanam modal.

3. *International demonstration effect*, selain dari itu Nurske juga menyatakan, bahwa peningkatan pembentukan modal bukan saja dibatasi oleh lingkaran perangkap kemiskinan saja, tetapi juga oleh adanya *international deminstration effect* ini adalah: “kecenderungan untuk mencontoh corak konsumsi di kalangan masyarakat yang lebih maju”. Akibat hubungan internasionalnya dengan negara maju memungkinkan masyarakat di negara berkembang untuk dapat meniru konsumsinya. Pola konsumsi ini dapat ditiru dengan adanya import menjadi semakin besar. Sudah barang tentu barang import ini mutunya jauh lebih baik dibandingkan dengan barang dalam negeri. Oleh karena itu dengan semakin meningkatnya import ini dapat mengakibatkan pengeluaran menjadi bertambah dan sebaliknya kemampuan untuk menabung menjadi berkurang. Selanjutnya dengan semakin rendahnya tingkat tabungan mengakibatkan tingkat pembentukan modal menjadi rendah.

Menurutnya hubungan ekonomi internasional suatu negara akan sangat menguntungkan negara-negara yang relatif miskin. Adanya hubungan tersebut memungkinkan sesuatu negara yang lebih miskin menyadari dan selanjutnya merubah sikap, kebiasaan dan adat istiadat yang dapat menjadi penghambat kepada usaha pembangunan. Di samping itu hubungan ekonomi internasional ini dapat mengembangkan pandangan-pandangan baru, tehnik-tehnik memproduksi baru, sikap dan cara-cara bekerja yang baru dan sebagainya.

Menurut Bauer, karena berhubungan dengan dunia luar memungkinkan diperolehnya berbagai jenis barang dan barang-barang yang bermutu tinggi, hubungan itu akan menimbulkan perangsang kepada penduduk di negara berkembang untuk bekerja lebih giat. Dengan cara demikian

tingkat pendapatan akan dapat dipertinggi dan memungkinkan mereka untuk mempertinggi tingkat konsumsinya. Di samping itu pendapatan yang tinggi akan mempertinggi tingkat tabungan dan selanjutnya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Lingkaran perangkap kemiskinan yang lain dikemukakan oleh Meier dan Baldwin yang mengemukakan adanya hubungan saling mempengaruhi antara keadaan masyarakat yang masih terbelakang dan tradisional dengan kekayaan alam yang masih belum dikembangkan. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Sadono Sukirno (2006)

Gambar 5.2. Lingkaran perangkap kemiskinan

Pada umumnya negara sedang berkembang merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Namun, kekayaan ini belum sepenuhnya diusahakan atau dikembangkan, karena berbagai kendala, seperti kekurangan modal, kekurangan tenaga-tenaga ahli, tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, dan terbatasnya mobilitas dari sumber-sumber daya. Karena kekayaan alam yang dimiliki belum sepenuhnya dikembangkan, mengakibatkan tingkat pembangunan di negara sedang berkembang terhambat. Oleh karena itu masyarakat di negara sedang berkembang harus berusaha lebih keras untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu cara untuk

mengatasi hambatan tersebut adalah meningkatkan kemampuannya untuk mempertinggi tingkat pengetahuan dan keahlian penduduknya.

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa, pada hakekatnya lingkaran perangkap kemiskinan disebabkan oleh ketidakmampuan untuk menggerakkan tabungan yang ada; kurangnya perangsang untuk melakukan penanaman modal; taraf pendidikan, pengetahuan; dan kemahiran masyarakat yang masih rendah. Ke tiga faktor tersebut yang merupakan hambatan terciptanya pembentukan modal dan perkembangan ekonomi yang pesat di negara sedang berkembang.

B. Faktor Luar Negeri

Faktor luar negeri juga dapat menyebabkan hambatan dalam proses pembangunan di negara sedang berkembang. Faktor luar negeri merupakan hubungan dengan dunia internasional. Hubungan ini dapat berupa hubungan politik maupun ekonomi. Faktor-faktor luar negeri yang menjadi penghambat pembangunan di negara sedang berkembang adalah perdagangan luar negeri dan proses sebab akibat kumulatif

1. Perdagangan Luar Negeri

Perdagangan luar negeri atau ekspor dan impor yang dilakukan negara sedang berkembang sebagai salah satu bentuk hubungan internasional dengan negara lain. Perdagangan ini bisa dilakukan antar negara sedang berkembang dengan negara maju atau sesama negara sedang berkembang. Sejarah hubungan di antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang besar sekali di antar keuntungan potensial yang mungkin diperoleh negara-negara sedang berkembang dari hubungan tersebut, dengan keuntungan yang sebenarnya mereka peroleh.

Keuntungan dari perdagangan sudah lama dianalisis oleh para ahli ekonomi yang dimulai dari kaum klasik, yang menunjukkan adanya keuntungan yang mungkin diperoleh suatu negara apabila mengadakan perdagangan dengan luar negeri. Apabila keuntungan-keuntungan ini dapat diperoleh dalam kenyataannya, hubungan ekonomi dan perdagangan dengan

negara-negara lain dapat merupakan alat pendorong yang sangat penting dalam rangka mempercepat proses pembangunan. Dalam kenyataannya seringkali yang terjadi adalah perdagangan luar negeri kurang menguntungkan bagi negara berkembang. Artinya perdagangan luar negeri banyak yang dikuasai oleh negara maju.

Apabila diperhatikan perkebangan sektor ekspor di negara-negara sedang berkembang, secara umum belumlah mencapai tingkat yang diharapkan. Sampai sebelum Perangn Dunia II beberapa negara sedang berkembang mengalami perkembangan ekspor yang pesat sekali, tetapi sektor tersebut gagal untuk mendorong perkembangan sektor-sektor lainnya (Sukirno, 2006).

a. Peranan Ekspor dalam Pembangunan Menurut Ricardo

Kaum klasik menganalisa mengenai peranan ekspor dalam pembangunan ekonomi. Ahli ekonomi klasik tersebut antara lain, Ricardo, Smith dan Mill, telah menunjukkan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan beberapa sumbangan yang pada akhir akan dapat mempercepat perkembangan ekonomi suatu negara. Keuntungan-keuntungan dari perdagangan menurut klasik terutama yang dikemukakan oleh Ricardo, meunjukkan bahwa apabila sesuatu negara sudah mencapai tingkat kesempatan kerja penuh, perdagangan luar negeri memungkinkannya mencapai tingkat kesempatan konsumsi yang tinggi dibanding apabila tidak melakukan perdagangan luar negeri.

Di samping itu menurut Smith dan Mill mengemukakan dua keuntungan lainnya dari hubungan ekonomi dan perdagangan luar negeri, yaitu memungkinkannya suatu negara memperluas pasar dan hasil-hasil produksinya dan memungkinkannya suatu negara menggunakan teknologi yang dikembangkan di luar negeri, yang lebih baik keadaannya dibandingkan dengan teknologi dalam negeri.

Keuntungan perdagangan luar negeri dapat mempertinggi tingkat konsumsi dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sekalipun suatu negara dengan kondisi sumber-sumber daya yang ada dalam suatu negara sudah sepenuhnya digunakan dan negara tersebut dalam kegiatan produksinya

tidak lebih efisien dari negara lain. Keuntungan yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dalam keadaan tersebut di atas, timbul sebagai akibat dari perbedaan harga-harga relatif (perbandingan harga-harga) dari barang-barang yang diperdagangkan, diantara negara-negara yang melakukan perdagangan.

b. Peranan Ekspor menurut Smith dan Mill

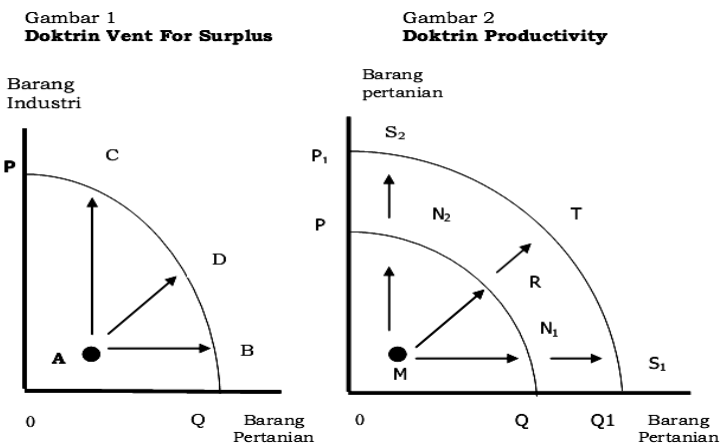
Adam Smith merupakan ahli ekonomi klasik yang mengatakan bahwa perdagangan luar negeri dapat memberikan dua keuntungan utama, yaitu perluasan pasar dan kemungkinan diperkenalkannya teknologi baru. Pada hakekatnya Adam Smith berpendapat, bahwa pertama, dengan adanya perdagangan luar negeri, suatu negara dapat menaikkan produksi barang-barang yang sudah tidak dapat dijual lagi di dalam negeri akan tetapi masih dapat dijual ke luar negeri. Selanjutnya, dengan adanya ekspor tersebut negara dapat mengimpor barang-barang luar negeri bukan saja akan memperbesar tingkat produksi, tetapi juga akan menambah jumlah barang yang dapat dikonsumsi oleh penduduknya. Keuntungan yang kedua, bahwa perluasan pasar yang terjadi akan mendorong sektor produktif untuk menggunakan teknik produksi yang lebih tinggi produktivitasnya.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk melaksanakan hal ini adalah dengan mengimpor teknologi yang lebih tinggi dari luar negeri. Pandangan senada juga dikemukakan oleh John Stuart Mill, secara lebih jelas. Menurutny, ada beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan internasional akan menciptakan dorongan untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam teknologi yang digunakan dalam proses produksi. Perdagangan internasional akan mempertinggi tingkat spesialisasi, mempertinggi efisiensi penggunaan mesin yang ada, dan akan mendorong usaha-usaha untuk memperbaiki efisiensi proses produksi dengan mengadakan inovasi atau pembaharuan-pembaharuan di segala bidang.

Keuntungan lain yang dijelaskan oleh Mill adalah adanya kesempatan bagi negara suatu untuk menggunakan teknik produksi yang lebih baik, yang dapat diperoleh dari

negara-negara yang lebih maju; mengimpor modal dari negara-negara lain dan dengan demikian dapat meningkatkan produksi di atas yang mungkin dicapai apabila pembentukan modal hanya dibiayai oleh modal yang dikerahkan di dalam negeri; dan mengembangkan ide-ide baru yang akan dapat menghancurkan pengaruh kebiasaan-kebiasan lama, menciptakan keinginan-keinginan baru, mengembangkan cita-cita baru dan memperluas pandangan ke depan.

Ricardo, menjelaskan tentang keuntungan yang diperoleh dari perdagangan internasional, yaitu masing-masing negara mengadakan spesialisasi, dengan cara memperbesar produksi barang-barang yang mempunyai keuntungan komparatif di pasaran internasional, yang oleh Myint dinamakan sebagai doktrin *comparative cost*. Sedangkan analisa Smith, tentang timbulnya perluasan pasar akibat perdagangan internasional dinamakan sebagai doktrin *vent for surplus*. Myint, menamakan uraian Mill, tentang timbulnya kemungkinan meningkatnya produktivitas sebagai akibat perdagangan internasional. Dinamakan sebagai *doktrin productivity*. Dari ketiga macam doktrin tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan gambar sebagai berikut:



Sumber: Sukirno, 2006

Gambar 5.3. *Doktrin Vent for Surplus* dan *Doktrin Productivity*

Kurva PQ menggambarkan kurva batas produksi. Dalam Gambar 1, sebelum perdagangan dilakukan, tingkat produksi ditentukan oleh titik A, yang berarti bahwa, sumber-
 76| Pembangunan Ekonomi

sumber daya yang terdapat dalam negara itu belum sepenuhnya digunakan. Hal ini terjadi karena permintaan terhadap barang-barang yang dapat dihasilkan di dalam negeri, yaitu barang pertanian dan barang industri, adalah lebih sedikit daripada kemampuan masyarakat untuk dapat menghasilkan barang tersebut. Oleh karena itu dengan perdagangan internasional akan menciptakan permintaan terhadap salah satu atau kedua-duanya barang tersebut. Naiknya permintaan akan meningkatkan produksi dan pada akhirnya penggunaan sumber- sumberdaya secara maksimal. Peningkatan produksi ini sangat tergantung pada jenis barang yang diminta dan dapat diekspor.

Apabila yang diminta adalah produk barang pertanian, maka tingkat produksi yang dapat dilakukan adalah pada sekitar titik A dan B. Sebaliknya apabila yang diminta adalah produk barang industri, maka tingkat produksi yang dapat dilakukan adalah pada sekitar titik A dan C. Akan tetapi apabila permintaan pada kedua barang tersebut, yaitu pertanian dan industri, maka tingkat produksi yang dapat dilakukan adalah pada sekitar segitiga ABC, misal satu titik antara A dan D. Dengan demikian tingkat produksi akan sangat ditentukan oleh permintaan pasar internasional.

Dalam Gambar 2, kurva PQ merupakan kurva batas produksi sebelum perdagangan internasional dilakukan, Selanjutnya, misal bahwa sumber-sumber daya alam belum sepenuhnya digunakan, dengan demikian tingkat produksi ditentukan oleh titik yang terletak di bawah kurva PQ, misalnya saja titik M. Apabila produksi dalam negeri mendapat pasaran yang luas di luar negeri, tetapi produktivitas tidak mengalami perubahan, produksi maksimum hanyalah terbatas sampai titik-titik yang terletak pada N_1N_2 , misalnya titik R.

Tetapi berdasarkan *doktrin productivity*, perdagangan internasional akan menimbulkan kenaikan dalam tingkat produktivitas, maka sebagai akibatnya, apabila ada perdagangan luar negeri, kurva batas produksi akan berpindah ke atas. Misal saja sekarang telah mencapai P_1Q_1 , dengan kenaikan tingkat produktivitas tersebut tingkat produksi dapat mencapai seperti

yang ditunjukkan oleh titik-titik S1 atau S2 atau titik-titik lainnya pada kurva P1Q1.

Hampir semua negara sedang berkembang merupakan negara bekas jajahan, oleh karena itu sistem perekonomiannya masih banyak diwarisi oleh sistem perekonomian kolonial. Demikian pula dalam perdagangan internasionalnya, masih dikuasai oleh struktur ekspor kolonial. Adapun yang dimaksud dengan struktur ekspor kolonial adalah struktur ekspor suatu negara yang memiliki tiga ciri pokok, yaitu:

1. Sebagian besar dari barang-barang yang diekspor merupakan hasil produksi primer atau pertanian, seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan dan masih berupa bahan mentah atau belum diolah.
2. Hasil produksi pertanian yang diekspor tersebut jenisnya sangat terbatas.
3. Pada awalnya sektor ekspor tersebut dikembangkan oleh pengusaha-pengusaha yang berasal dari negara penjajah.

Menurut para ahli ekonomi seperti, Myrdal, Myint, Prebisch, Singer dan Meier, mengatakan bahwaciri-ciri sektro ekspior seperti tersebut diatas tidak dapat memberikan sumbangan yang memuaskan kepada usaha untuk mempercepat pembangunan ekonomi. Negara kaya atau negara industri dengan ekspor hasil industrinya justru seringkali banyak menikmati keuntungan dibandingkan negara sedang berkembang dengan ekspor hasil pertaniannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan bila perdagangan internasional belum dapat memberikan manfaat banyak bagi negara sedang berkembang.

Menurut Myint mengemukakan dua sebab mengapa pada masa penjajahan yang lalu sektor ekspor, yang mengalami perkembangan yang sangat pesat di beberapa negara sedang berkembang, tidak berhasil merangsang keseluruhan perekonomian untuk bergerak laju. Kedua faktor tersebut adalah adanya unsur monopoli dan monopsoni di sektor luar negeri atau ekspor-impor dan pengaruh edukatif kegiatan ekspor yang bercorak kolonial terhadap masyarakat di negara sedang berkembang sangat terbatas.

Pada masa penjajahan, sektor luar negeri dan sektor-sektor ekonomi modern di daerah-daerah terjajah dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asing yang sepenuhnya menguasai kegiatan-kegiatan di sektor tersebut. Perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai kekuasaan monopoli dalam menentukan harga-harga barang impor yang dijual kepada penduduk, sehingga memungkinkan mereka memperoleh keuntungan yang tinggi. Selain itu, perusahaan-perusahaan asing tersebut mempunyai kekuasaan monopsoni dalam menentukan harga-harga faktor produksi yang mereka gunakan dan dalam membeli produksi barang-barang ekspor yang dihasilkan oleh para petani kecil. Kekuasaan ini memungkinkan mereka untuk tetap menikmati keuntungan yang tinggi.

Prebisch dan Singer, berpendapat bahwa faktor-faktor yang berasal dari luar negeri merupakan faktor yang terutama menyebabkan sektor ekspor kurang berhasil dalam memegang peranan sebagai penggerak pembangunan di negara sedang berkembang. Menurut mereka dalam jangka panjang syarat-syarat perdagangan atau *term of trade* negara-negara sedang berkembang akan semakin memburuk. Keadaan ini menyebabkan keuntungan dari perdagangan internasional akan dinikmati oleh negara-negara maju.

Syarat-syarat perdagangan atau *term of trade* semakin memburuk apabila perbandingan antara indeks harga ekspor berkembang lebih lambat dibandingkan dengan indeks harga impor. Menurut Prebisch ada dua faktor utama yang menyebabkan semakin memburuknya syarat-syarat perdagangan atau *term of trade*, yaitu sifat hubungan antara pendapatan dan kenaikan produktivitas dalam kegiatan menghasilkan bahan-bahan mentah di negara-negara sedang berkembang. Di negara-negara maju kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan faktor-faktor produksi, termasuk juga pendapatan para pekerja. Sebaliknya, di negara-negara sedang berkembang, dalam kegiatan menghasilkan barang-barang ekspor, kenaikan produktivitas akan menaikkan pendapatan para pekerja namun sangat minimal sekali, sebab adanya tekanan penduduk dan kelebihan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, harga-harga barang industri lebih cepat mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga-harga bahan mentah; dan perbedaan sifat perubahan harga-harga

barang industri dengan harga-harga bahan mentah yang dihasilkan oleh negara sedang berkembang. Kenaikan harga-harga bahan mentah adalah sangat lambat sekali dibandingkan dengan harga-harga barang industri pada waktu perekonomian mengalami ekspansi. Tetapi penurunan harga-harga bahan mentah akan lebih cepat dibandingkan harga-harga barang industri pada masa resesi.

2. Proses Sebab Akibat Kumulatif

Teori sebab akibat kumulatif ini dikemukakan oleh Myrdal, yaitu suatu teori tentang sebab-sebab bertambah memburuknya perbedaan dalam tingkat pembangunan di berbagai daerah dalam suatu negara. Di samping itu teori sebab akibat kumulatif juga bisa digunakan untuk menjelaskan tentang sebab-sebab terjadinya perbedaan pembangunan antara negara-negara miskin dengan negara-negara kaya menjadi bertambah lebar.

Dalam teori klasik dijelaskan bahwa dalam jangka panjang mekanisme pasar akan menciptakan pembangunan yang seimbang diantara berbagai daerah dan negara. Myrdal tidak sependapat dengan pandangan ini dan berkeyakinan bahwa dalam proses pembangunan terdapat faktor-faktor yang akan memperburuk perbedaan tingkat pembangunan diantara berbagai daerah dalam suatu negara. Keadaan ini terjadi sebagai akibat dari berlakunya suatu proses sebagai akibat kumulatif (*circular cumulative causation*).

Menurut Myrdal ada dua akibat yang ditimbulkan sehubungan dengan pembangunan yang dilakukan negara maju. Dua akibat tersebut adalah: a) *backwash effects*, dan b) *spread effects*. *Backwash effect*, diartikan sebagai akibat yang kurang menguntungkan. Bahwa pembangunan di daerah-daerah yang lebih maju dapat menciptakan keadaan yang menimbulkan hambatan yang lebih besar kepada daerah yang lebih terbelakang untuk berkembang. Faktor yang mengakibatkan *backwash effects* adalah corak perpindahan penduduk dari daerah miskin ke daerah yang lebih maju. Pada umumnya penduduk berpindah atau melakukan urbanisasi ke kota-kota besar atau daerah yang lebih maju. Penduduk yang melakukan urbanisasi merupakan penduduk yang potensial,

80 | Pembangunan Ekonomi

yaitu tenaga kerja yang masih muda dan produktivitas dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk yang tidak melakukan urbanisasi. Akibatnya di Desa atau daerah miskin akan terjadi kekurangan tenaga kerja produktif. Kondisi ini akan semakin mempersulit desa atau daerah miskin untuk berkembang. Penyebab selanjutnya adalah corak pengaliran modal. Modal pada umumnya lebih menguntungkan ditanamkan di kota atau daerah maju, sebab di kota banyak faktor yang mendukung, seperti tersedia lembaga perbankan, dan kemudahan dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu modal lebih banyak dan lebih mudah diperoleh di kota atau daerah maju. Sebaliknya, di desa atau daerah miskin modal sangat sedikit dan sulit diperoleh. Kondisi ini mengakibatkan permintaan akan modal di desa atau daerah miskin sangat rendah. Jadi ada dua penyebab timbulnya *backwash effect* yang disebabkan oleh modal, yaitu: kurangnya permintaan modal di desa atau daerah miskin dan modal lebih menguntungkan ditanamkan di kota atau di daerah yang lebih maju. Penyebab lainnya adalah pola Perdagangan. Kegiatan perdagangan banyak dikukasai oleh industri-industri di kota atau daerah yang lebih maju. Hal ini menyebabkan daerah miskin mengalami kesulitan untuk mengembangkan pasar untuk hasil-hasil industrinya dan memperlambat perkembangan di desa atau daerah miskin.

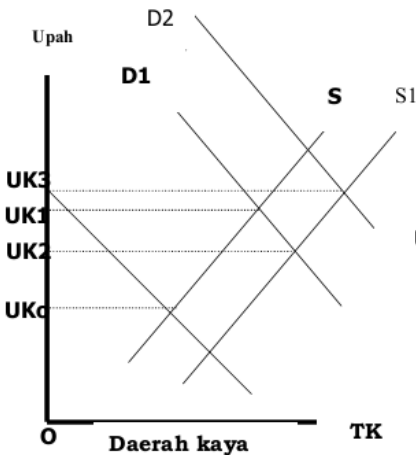
Penyebab selanjutnya adalah keadaan transportasi. Bahwa jaringan pengangkutan yang jauh lebih baik di daerah yang lebih maju, sehingga mengakibatkan kegiatan produksi dan perdagangan dapat dilaksanakan dengan lebih efisien di daerah tersebut. Sebaliknya, dorongan *spread effects*, menurut Myrdal terjadi dalam bentuk meningkatnya permintaan dari daerah kaya akan produksi daerah miskin, seperti hasil pertanian, hasil kerajinan, home industri dan produksi makanan yang merupakan hasil utama mereka.

Menurut Myrdal, dari kedua efek di atas, maka efek yang paling kuat adalah *backwash effects*, artinya bahwa pembangunan di daerah kaya lebih banyak menghambat daerah miskin untuk dapat berkembang atau dengan kata lain akibat pembangunan di daerah kaya, daerah miskin semakin miskin. Kondisi inilah yang menyebabkan terjadinya jurang yang lebar dalam

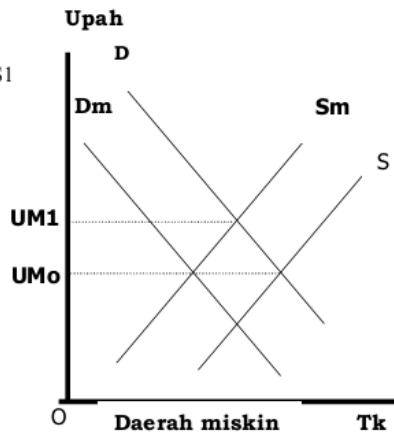
pembangunan antara daerah kaya dengan miskin yang makin lama semakin lebar. Hal ini jelas kurang menguntungkan bagi suatu negara, sebab jurang perbedaan yang semakin lebar sangat rawan untuk terjadinya kecemburuan sosial yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil.

Namun, demikian perbedaan pembangunan ini menurutnya, akan dapat berkurang apabila daerah kaya sudah menjadi sangat berkembang, sehingga akan timbul diseconomis ekstern (*external diseconomies*) terhadap berbagai perusahaan dan industri, yang terutama ditimbulkan oleh kongesti-kongesti yang terjadi di daerah yang lebih maju. Hal ini akan menciptakan kegiatan ekonomi di daerah-daerah lain yang belum berkembang, sebab di daerah yang maju sudah terjadi kejenuhan atau juga mahalnnya ongkos produksi. Dalam keadaan seperti itu terjadi pengurangan perpindahan tenaga kerja, dengan demikian perpindahan penduduk atau urbanisasi dapat dicegah. Mereka tidak perlu pergi mencari pekerjaan di daerah yang maju, sebab di daerahnya sendiri sudah banyak berdiri industri.

Gambar 1



Gambar 2



Sumber: Sukirno, 2006

Gambar 5.4. Pengaruh perpindahan tenaga kerja terhadap pembangunan di daerah

Menggambarkan kondisi tenaga kerja dan tingkat upah di daerah kaya, gambar 2 menggambarkan kondisi yang sama tetapi di daerah miskin. Misal tingkat upah di daerah kaya dan daerah miskin sama besarnya, yaitu $U_{k0} = U_{m0}$. Dengan tingkat upah yang sama mencerminkan bahwa tidak terdapat jurang perbedaan yang lebar antara daerah kaya dan miskin.

Misal daerah kaya meningkatkan permintaan tenaga kerja karena tingginya proses pembangunan, maka akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja dari D_1 ke D_2 , akibatnya tingkat upah menjadi lebih tinggi daripada daerah miskin, yaitu dari U_{k0} menjadi U_{k1} . Kenaikan upah memungkinkan karena di daerah kaya laju perkembangan pembangunan lebih cepat dari pada laju pembangunan di daerah miskin. Sebaliknya tingkat upah di daerah miskin tidak mengalami perubahan (tetap), maka yang terjadi adalah tenaga kerja akan mengalir dari daerah miskin ke daerah kaya sebab upah lebih menarik. Dengan bertambah besarnya upah di daerah kaya, sedangkan tingkat upah di daerah miskin tetap atau tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar U_{m0} , dengan demikian penawaran tenaga kerja akan bertambah besar di daerah kaya dan sebaliknya penawaran tenaga kerja di daerah miskin menjadi berkurang. Penawaran tenaga kerja di daerah kaya meningkat yang ditunjukkan dengan bergesernya kurva penawaran tenaga kerja dari S_1 menjadi S_2 , sebaliknya penawaran tenaga kerja di daerah miskin menjadi berkurang dari S menjadi S_m , akibatnya tingkat upah di daerah miskin meningkat menjadi U_{m1} .

Menurut Klasik perbedaan penawaran tenaga kerja ini akan terus berlangsung, artinya selama tingkat upah tidak sama, maka tenaga kerja akan mengalir dari daerah miskin ke daerah kaya begitu terus, sampai tidak ada perbedaan tingkat upah di ke dua daerah tersebut. Menurut Myrdal, dengan adanya perpindahan tenaga kerja dari daerah miskin ke daerah kaya, maka di daerah kaya akan timbul dorongan-dorongan baru dalam perekonomian yang akan menimbulkan perkembangan lebih lanjut. Permintaan tenaga kerja di daerah kaya menjadi bertambah besar lagi dan sekarang mencapai D_2 , maka tingkat upah di daerah tersebut akan mencapai tingkat upah yang lebih tinggi daripada masa-masa sebelumnya, yaitu

sebesar UK3. Sebaliknya di daerah miskin kegiatan perekonomian akan mengalami kelesuan akibat dari berpindahnya tenaga kerja ke daerah kaya. Akibatnya permintaan tenaga kerja di daerah miskin akan menurun dari D menjadi Dm. Dengan demikian tingkat upah di daerah miskin tidak mengalami perubahan kalau dibandingkan dengan kenaikan pada mula-mula sekali, yaitu besarnya tetap Um_0 .

Kelemahan teori Myrdal adalah bahwa tenaga kerja secara bebas mengalir dari satu negara ke negara lain adalah sulit untuk diterima. Kenyataannya pada saat sekarang ini pengaliran tenaga kerja dari satu negara ke negara lain tidak semudah itu. Pengaliran tenaga kerja terutama dari negara-negara sedang berkembang ke negara-negara kaya, sangat tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Banyak aturan yang dibuat untuk melarang atau memperbolehkan tenaga kerja asing masuk yang dibuat secara ketat.

BAB VI

PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM

Pertanyaan yang selalu menggoda kita adalah sejauh manakah kemampuan daya dukung sekarang? Sanggupkah ia menopang generasi yang akan datang?. Pertanyaan ini perlu diajukan oleh karena masa depan lingkungan tidak bisa dilepaskan dari keadaan lingkungan masa kini bahkan masa lalu. Jawaban atas baik buruknya lingkungan dimasa depan bergantung pada usaha-usaha generasi sekarang dalam mengelola sumber daya alam. Jangan harap akan tercipta ataupun tersisa lingkungan masa depan yang serasi apabila sekarang kehilangan kearifan dalam mengolah sumber daya.

Jadi, makna tanggapan masa depan disana bukanlah berarti masalahnya harus dihadapi generasi masa datang nanti melainkan menjadi tanggung jawab terutama generasi masa kini. Pembangunan berkelanjutan adalah terpenuhinya kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan generasi masa depan menikmati sumber daya alam dalam kondisi yang tak kalah baiknya dari generasi sebelumnya. Dengan perkataan lain, dalam konsep pembangunan berkelanjutan secara "*inherent*" sudah memuat soal tantangan itu dan tanggung jawabnya sekaligus.

Kita ketahui bersama sejumlah sumber daya alam sudah mulai menipis, terutama sumber daya yang tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi dan bahan mineral lainnya, generasi yang akan datang kemungkinan tidak akan bisa menikmati sumber daya alam sejenis itu apabila dari mulai sekarang efisiensi kurang apalagi tidak ditempuh sama sekali.

Tidaklah salah kalau pepatah mengatakan bahwa bumi ini bukanlah warisan dari nenek moyang, tetapi titipan anak cucu kita. Apabila generasi sekarang tidak mampu mencegah terjadinya lubang lapisan ozon yang semakin meluas serta mengendalikan pemanasan global ditambah lagi tidak dapat mengurangi penyusutan keaneka ragaman hayati, akibat ulah tangan manusia

dulu dan sekarang, boleh jadi generasi masa datang hanya menemukan bumi yang kering kerontang, bahkan tidak dapat hidup sama sekali.

Sumber daya dalam pengertian ekonomi adalah suatu "input" dalam suatu proses produksi. Defenisi lain dikatakan sumber alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati, yang diperlukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Sumber daya yang menjadi kendala tersebut secara umum bisa dikategorikan ke dalam sumber daya lahan, manusia, modal, teknologi, informasi dan energi. Sumber daya ini tidak lain merupakan faktor produksi atau masukan dalam suatu proses produksi. Jika faktor tenaga kerja, modal, informasi dan teknologi berasal dari manusia, maka yang merupakan pemberian alam adalah sumber daya dan energi.

Salah satu kelemahan dari pengelolaan sumber daya alam di negara-negara berkembang barangkali adalah usaha mengejar pertumbuhan ekonomi dengan cara menguras secara besar-besaran dari sumber daya alamnya tanpa memperhatikan akibat sampingan. Akibatnya mereka harus membayar mahal dengan semakin rusaknya lingkungan. Misalnya untuk membuat tambang suatu sumber daya alam yang berada di hutan, banyak hutan dan susunan tanahnya menjadi rusak akibat dipangkasnya tanah yang menutupi bahan tambang dan setelah itu hasil tambangnya diambil lokasi tempat penambangan tadi sampai berhektar-hektar dapat kita bayangkan apa yang akan terjadi.

Dalam pembangunan memang selalu timbul apa yang disebut dengan "*backwash effect*" dimana akibatnya dari adanya pembangunan pada suatu tempat akan terjadi akibat negatif, tapi dalam hal ini usaha kita adalah meminimalkan efek negatif tersebut. Dibangunnya waduk-waduk juga dapat menimbulkan efek yang negatif misalnya dalam bidang kesehatan dapat meledaknya jumlah hewan tempat hidup dari penyebab penyakit yang kita kenal dengan penyakit schistomiasis, dimana cacing-cacing ini bertambah penyebarannya dengan bertambahnya populasi dari siput-siput.

Demikian juga pembangunan beberapa industri dapat menyebabkan tercemarnya air dari suatu danau atau sungai

sehingga masyarakat yang selama ini tidak pernah banjir oleh karena adanya pembangunan didaerah tangkapan air (*catcment area*) maka daerah lain yang tadinya tidak kekurangan air menjadi kekurangan air.

Sejarah menunjukkan masyarakat bisa mencapai kemakmuran karena hasil manfaat dari sumber daya yang dimiliki. Kuznets (1955) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sayangnya dibatasi oleh kekurangan absolut dari sumber daya alam. Namun tidak dapat disangkal, bahwa dengan adanya suatu pembangunan juga dapat memberikan peluang-peluang bagi berbagai usaha dan dapat membantu meningkatnya kesejahteraan masyarakat seperti yang kita harapkan bersama. Sebagai contoh yang sederhana dengan adanya suatu pembangunan satu tempat pemukiman disatu daerah maka akan kita peroleh efek yang berganda yang kita kenal dengan "*spread effect*".

Dimulainya dari pembebasan tanah yang pada mulanya nilainya rendah tetapi dengan adanya rencana pembangunan tempat pemukiman disitu nilai tanah menjadi tinggi, kemudian dengan mulai pembangunan maka terseraplah kesempatan kerja bagi para pencari kerja baik kerja kasar maupun pekerja yang mempunyai keterampilan khusus, disamping itu karena rumah-rumah ini dari tingkat sangat sederhana sampai yang mewah tentunya memerlukan bahan-bahan perlengkapan untuk menyiapkan rumah tadi sehingga berbagai pengusaha-pengusaha berkompetisi dalam memasok produk-produknya.

Dengan adanya pembangunan ini tidak dapat dielakkan lagi tentunya terjadi pengurasan sumber daya alam mulai dari yang berada disungai-sungai seperti, batu-batuan. maupun dari industri-industri seperti semen dan dari hutan dengan hasilnya kayu, sebagai barang olahannya tentunya semua memerlukan pengendalian agar sumber daya alam tadi dapat juga lestari, disamping itu, juga dalam pemanfaatannya diperlukan penghematan dan tidak menimbulkan limbah yang sia-sia. Dari limbah-limbah tadi misalnya kayu-kayu potongan tadi dapat dipergunakan untuk keperluan-keperluan lain sehingga biaya produksinya pun dapat dikurangi seperti yang diharapkan oleh "*green hanufacturing*".

Di samping itu "*green manufacturing*" juga mengarahkan agar kegiatan dalam industri yang lain juga dapat mengurangi terjadinya limbah yang tidak terpakai yaitu dengan merekayasa suatu barang dengan cara membuat komponen-komponen tertentu yang dapat menggantikan suatu komponen lain yang telah rusak, jadi suatu unit barang tidak akan menjadi limbah tetapi dengan mengganti sebagian komponennya sudah dapat dipergunakan lagi, Kita juga harus mengingat kembali bahwa adanya keterbatasan dari sumber daya ini, misalnya dalam berproduksi yang kita kenal dengan adanya satu hukum populer disebut "*The Law of Diminshing Return*" yang mengatakan bahwa tambahan hasil produksi dari tambahan masukan pada akhirnya akan menurun. Hal ini disebabkan kenyataan bahwa sebagian dari masukan seperti tanah sifatnya adalah tetap atau konstan. Secara teknis, sama saja dengan menyatakan bahwa produk marjinal dari faktor yang bervariasi akan menurun sesudah titik tertentu.

Sebagai suatu contoh, pendapatnya yang pertama kali dikemukakan oleh Thomas Halthus bahwa kecendrungan alamiah dari penduduk adalah bertambah menurut deret ukur (1,2,4,6,8...) sedangkan produksi pangan bertambah menurut deret hitung (1,2,3, ...) dengan berjalannya waktu. Produksi pangan perkapita akan menurun dan akhirnya menjadi kendala pada pertambahan penduduk berikutnya. Bertambahnya penduduk yang bekerja disebidang tanah yang terbatas akan menurunkan hasil produksi dan pendapatan perkapita sampai kebatas yang hanya cukup untuk sekadar dapat hidup.

Dilihat disatu pihak karena lahan terbatas ataupun tidak subur lalu disuburkan dan berproduksi tetapi di lain pihak masyarakat negara lain yang menjadi pangsa pasar kita itu tidak mau menerimanya. Usaha diversifikasi, selain merupakan salah satu cara untuk menaikkan pendapatan petani juga diarahkan untuk memperluas sumber devisa, yaitu apabila hasil pertanian yang beragam itu bisa di ekspor. Selain hal ini bergantung pada teknologi pasca panen yang oleh Presiden disebut sebagai "masih merupakan tantangan dan menanti jawaban kita setepat-tepatnya", juga berkaitan dengan masalah teknologi pengolahan hasil-hasil pertanian yang merupakan tantangan yang lebih besar lagi. Salah satu tujuan yang berkaitan dengan peranan strategis

sektor pertanian adalah penyediaan bahan baku sebagai salah satu basis industrialisasi khususnya dalam pengolahan hasil-hasil pertanian.

Usaha diversifikasi dan penanganan masalah pasca panen tersebut diatas memerlukan pemikiran untuk menciptakan sistem "agribisnis" yang memerlukan paket kebijaksanaan yang berbeda. Dengan sistem agribisnis dimaksudkan untuk mencapai dua tujuan yaitu menghasilkan bahan pertanian sampai ke pasar, termasuk penanganan masalah pasca panen. Kedua, menghasilkan salah satu faktor produksi bagi sektor industri. Jadi dengan menciptakan dan membangun pabrik-pabrik dan industri-industri untuk pengolahan hasil pertanian tadi. Para petani juga akan bertambah kesejahteraannya, walaupun untuk membangun baik agribisnis sampai dengan "Agro Industri" memerlukan modal, teknologi dan informasi dan tenaga kerja yang banyak. Hal ini dapat dengan memperoleh yaitu mengirimkan tenaga kenegara yang lebih maju agribisnis dan agroindustri.

Ada tiga cara yang dapat dilakukan untuk mencapai peningkatan penyediaan pangan atau kebutuhan pokok lain yaitu:

1. Kegiatan yang berorientasi pada perluasan areal panen atau lebih baik dikenal dengan program "ekstensifikasi" dengan jalan membuka dan mengusahakan areal-areal baru yang selama ini dibiarkan tidak produktif.
2. Melalui program peningkatan hasil persatuan luas atau dikenal dengan program "intensifikasi".
3. Mencari kemungkinan sumber-sumber pangan baru yang dapat dimanfaatkan.

Dua cara yang pertama merupakan topik yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan sumber daya lahan, dalam upaya peningkatan produksi pangan melalui penggunaan lahan yang terencana dengan baik serta rasional. Sedangkan cara ketiga adalah merupakan eksplorasi terhadap sumber-sumber pangan dan kebutuhan pokok lainnya yang selama ini belum dimanfaatkan serta penggunaan teknologi tinggi dan informasi. Misalnya bioteknologi dalam menghasilkan sumber-sumber pangan baru dan kebutuhan pokok lainnya.

Daerah yang subur untuk pertanian dapat dikatakan sudah hampir seluruhnya digarap dan diusahakan sehingga yang

tersisa umumnya merupakan daerah yang relatif kurang subur. Akibat dari ini tentu harga produksi yang dihasilkan menjadi tinggi, sebagai akibat dari tingginya biaya sarana produksi yang diperlukan (misalnya untuk kapur, pupuk insektisida ataupun pestisida). Tetapi dari akibat diatas tadi muncul suatu dilema dimana hasil yang menggunakan bahan-bahan tadi tidak disukai oleh masyarakat yang telah mulai melaksanakan apa yang disebut dengan "*green consumer*", dimana mereka tidak mau mengkonsumsi bahan-bahan hasil produksi pertanian yang nyata sesudah diperiksa banyak mengandung zat-zat kimia yang telah dipergunakan untuk menaikkan produksi tadi.

Pembangunan berkelanjutan ini tentunya tidak terlepas dari ekonomi pembangunan yang dapat diartikan sebagai bagian dari Ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana usaha manusia atau suatu bangsa meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan pendapatan nasional perkapita, retribusi pendapatan serta menghapuskan kemiskinan. Sedangkan yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha bagaimana manusia atau suatu bangsa berusaha meningkatkan standar hidupnya ketaraf yang lebih baik dengan distribusi pendapatan yang lebih merata tanpa kemiskinan dan kebodohan bagi bangsa tersebut. Keberlanjutan pembangunan dapat didefinisikan dalam arti luas yaitu bahwa generasi yang akan datang harus berada dalam posisi yang tidak lebih buruk daripada generasi sekarang. Generasi sekarang boleh memiliki sumber daya alam serta melakukan berbagai pilihan dalam penggunaannya namun harus tetap menjaga keberadaannya, sedangkan generasi yang akan datang walaupun memiliki tingkat teknologi dan pengetahuan yang lebih baik serta persediaan kapital buatan manusia yang lebih memadai. Jadi yang penting dalam konsep ini adalah bahwa generasi sekarang maupun generasi akan datang tetap dalam keadaan terpenuhi kebutuhan hidupnya. Dapat diambil suatu kesimpulan pembangunan berkelanjutan bila tidak ada masalah ketidakmerataan antar generasi (*intergenerational inequality*).

Pembangunan berkelanjutan tidak berarti pembangunan di bidang ekonomi saja tetapi pembangunan ekonomi harus didahulukan dengan asumsi bahwa keberhasilan pembangunan di

bidang ekonomi akan membawa berbagai kemudahan dalam pembangunan bidang-bidang lain.

Dari uraian di atas tampak adanya konflik antara keberlanjutan pembangunan ekonomi dengan sumber daya, karena apa yang diperoleh oleh generasi muda akan datang adalah merupakan titipan dari generasi masa kini, jadi tanpa ada pengelolaan yang baik dapat kita bayangkan apa yang diutarakan oleh defenisi diatas tadi untuk meniadakan masalah ketidakmerataan antar generasi tadi tidak akan terpenuhi.

Namun bila keterkaitan antara kedua bidang tersebut diamati dan dipelajari dengan seksama, maka akan tampak bahwa keberlanjutan di kedua bidang itu akan saling mendukung dan menguntungkan. Pembangunan ekonomi berhasil berarti meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melindungi lingkungannya.

Pentingnya peranan sumber daya alam dalam pembangunan berkelanjutan, tanpa menghindari kepunahan dari sumber daya alam itu sendiri. Oleh karena itu perlu adanya pengelolaan dan pengendalian melalui berbagai usaha antara lain:

1. Pengambilan sumber daya alam tidak boleh melebihi tingkat pertumbuhan.
2. Kapasitas lingkungan dalam menyerap pencemaran tidak boleh berkurang.
3. Melestarikan fungsi lingkungan baik sebagai sumber bahan mentah maupun sebagai penampung limbah.
4. Menyatukan pemikiran ekonomi dengan ekologi.
5. Peran serta masyarakat setempat dalam pengelolaan sumber daya lingkungan ditingkatkan melalui penyuluhan-penyuluhan.

BAB VII

KEARIFAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

Kearifan lokal merupakan suatu bentuk kearifan lingkungan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di suatu tempat atau daerah. Jadi merujuk pada lokalitas dan komunitas tertentu. Menurut Ngakan dalam Akhmar dan Syarifudin (2007) kearifan lokal merupakan tata nilai atau perilaku hidup masyarakat lokal dalam berinteraksi dengan lingkungan tempatnya hidup secara arif. Maka dari itu kearifan lokal tidaklah sama pada tempat dan waktu yang berbeda dan suku yang berbeda. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Sementara itu Keraf (2002) menegaskan bahwa kearifan lokal adalah semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas ekologis. Semua bentuk kearifan lokal ini dihayati, dipraktekkan, diajarkan dan diwariskan dari generasi ke generasi sekaligus membentuk pola perilaku manusia terhadap sesama manusia, alam maupun gaib.

Selanjutnya Wahono (2005) menjelaskan bahwa kearifan lokal adalah kepandaian dan strategi-strategi pengelolaan alam semesta dalam menjaga keseimbangan ekologis yang sudah berabad-abad teruji oleh berbagai bencana dan kendala serta keteledoran manusia. Kearifan lokal tidak hanya berhenti pada etika, tetapi sampai pada norma dan tindakan dan tingkah laku, sehingga kearifan lokal dapat menjadi seperti religi yang mempedomani manusia dalam bersikap dan bertindak, baik

dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun menentukan peradaban manusia yang lebih jauh.

Adanya gaya hidup yang konsumtif dapat mengikis norma-norma kearifan lokal di masyarakat. Untuk menghindari hal tersebut maka norma-norma yang sudah berlaku di suatu masyarakat yang sifatnya turun menurun dan berhubungan erat dengan kelestarian lingkungannya perlu dilestarikan yaitu kearifan lokal

Pengertian pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan mengacu pada UU RI No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang tertera dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup”. Sedangkan sumberdaya alam disebutkan dalam ayat 10 mencakup sumberdaya alam hayati maupun non hayati dan sumberdaya buatan.

Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu ekosistem terdiri atas berbagai subsistem, yang mempunyai aspek sosial, budaya, ekonomi, dan geografi dengan corak ragam yang berbeda sehingga mengakibatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang berlainan. Keadaan demikian memerlukan pengelolaan dan pengembangan lingkungan hidup yang didasarkan pada keadaan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sehingga dapat meningkatkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan subsistem, yang berarti juga meningkatkan ketahanan subsistem itu sendiri.

Pembangunan memanfaatkan secara terus menerus sumberdaya alam guna meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat. Ketersediaan sumberdaya alam terbatas dan tidak merata, baik dalam jumlah maupun dalam kualitas, sedang permintaan akan sumberdaya alam semakin meningkat sebagai akibat meningkatnya kegiatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin meningkat dan beragam. Dampak pembangunan tersebut mengakibatkan daya dukung lingkungan hidup dapat terganggu dan daya tampung lingkungan hidup dapat menurun.

Melihat kenyataan tersebut maka kearifan lokal masyarakat setempat juga mendapatkan tantangan dengan harus memenuhi kebutuhan dasar yang semakin besar dan gaya hidup serta pola hidup yang dihadapi oleh masyarakat dengan adanya pengaruh-pengaruh: adopsi inovasi teknologi, ekonomi pasar dan kebijakan politik. Di samping itu dalam memanfaatkan sumberdaya alam oleh masyarakat lokal juga dipengaruhi oleh aspek: pemanfaatan, pelestarian, pengetahuan masyarakat dan kebijakan pemerintah yang semuanya itu akan mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menentukan apa yang harus dilakukan yang sekaligus merupakan keputusan untuk mempertahankan atau tidaknya kearifan lokal yang selama ini dilakukan.

Sebagaimana dipahami, dalam beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat memperoleh dan mengembangkan suatu kearifan yang berwujud pengetahuan atau ide, norma adat, nilai budaya, aktivitas, dan peralatan sebagai hasil abstraksi mengelola lingkungan. Seringkali pengetahuan mereka tentang lingkungan setempat dijadikan pedoman yang akurat dalam mengembangkan kehidupan di lingkungan pemukimannya. Keanekaragaman pola-pola adaptasi terhadap lingkungan hidup yang ada dalam masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun temurun menjadi pedoman dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Kesadaran masyarakat untuk melestarikan lingkungan dapat ditumbuhkan secara efektif melalui pendekatan kebudayaan. Jika kesadaran tersebut dapat ditingkatkan, maka hal itu akan menjadi kekuatan yang sangat besar dalam pengelolaan lingkungan. Dalam pendekatan kebudayaan ini, penguatan modal sosial, seperti pranata sosial-budaya, kearifan lokal, dan norma-norma yang terkait dengan pelestarian lingkungan hidup penting menjadi basis yang utama.

Seperti kita ketahui adanya krisis ekonomi dewasa ini, masyarakat yang hidup dengan menggantungkan alam dan mampu menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dengan kearifan lokal yang dimiliki dan dilakukan tidak begitu merasakan adanya krisis ekonomi, atau pun tidak merasa terpukul seperti halnya masyarakat yang hidupnya sangat dipengaruhi oleh kehidupan modern. Maka dari itu kearifan lokal penting untuk

dilestarikan dalam suatu masyarakat guna menjaga keseimbangan dengan lingkungannya dan sekaligus dapat melestarikan lingkungannya. Berkembangnya kearifan lokal tersebut tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor yang akan mempengaruhi perilaku manusia terhadap lingkungannya.

Perilaku manusia terhadap lingkungan disebabkan karena perilaku manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar, pendukung, pendorong dan persepsi, serta faktor lingkungan baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Faktor yang berpengaruh adalah faktor dasar, yang meliputi pandangan hidup, adat istiadat, kepercayaan dan kebiasaan masyarakat. Faktor pendukung meliputi pendidikan, pekerjaan, budaya dan strata sosial. Sebagai faktor pendorong meliputi sentuhan media massa baik elektronik maupun tertulis, penyuluhan, tokoh-tokoh agama dan masyarakat. Sejauh mana penyerapan informasi oleh seseorang tergantung dimensi kejiwaan dan persepsi terhadap lingkungan, untuk selanjutnya akan direfleksikan pada tatanan perilakunya (Ritohardoyo, 2006:51). Selanjutnya tatanan perilaku seseorang dapat digambarkan dalam suatu daur bagan, yaitu rangkaian unsur hubungan interpersonal, sistem nilai, pola pikir, sikap, perilaku dan norma (Ronald, 1988 dalam Su Ritohardoyo, 2006:52). Pada dasarnya manusia sebagai anggota masyarakat sangat tergantung pada lahan dan tempat tinggalnya. Di sini terdapat perbedaan antara lahan dan tempat tinggal. Lahan merupakan lingkungan alamiah sedangkan tempat tinggal adalah lingkungan buatan (binaan). Lingkungan binaan dipengaruhi oleh daur pelaku dan sebaliknya.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup kita juga membutuhkan moralitas yang berarti kemampuan kita untuk dapat hidup bersama makhluk hidup yang lain dalam suatu tataran yang saling membutuhkan, saling tergantung, saling berelasi dan saling memperkembangkan sehingga terjadi keutuhan dan kebersamaan hidup yang harmonis. Refleksi moral akan menolong manusia untuk membentuk prinsip-prinsip yang dapat mengembangkan relasi manusia dengan lingkungan hidupnya. Manusia harus menyadari ketergantungannya pada struktur ekosistem untuk dapat mendukung kehidupannya itu sendiri. Manusia harus dapat beradaptasi dengan lingkungan hidup yang

menjadi tempat ia hidup dan berkembang (Mali dalam Sunarko dan Kristiyanto, 2008:139).

Dalam belajar kearifan lokal khususnya dan kearifan lingkungan pada umumnya maka penting untuk mengerti:

1. Politik Ekologi (*Political Ecology*)

Politik ekologi sebagai suatu pendekatan, yaitu upaya untuk mengkaji sebab akibat perubahan lingkungan yang lebih kompleks daripada sekedar sistem biofisik yakni menyangkut distribusi kekuasaan dalam satu masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada pemikiran tentang beragamnya kelompok-kelompok kepentingan, persepsi dan rencana yang berbeda terhadap lingkungan. Melalui pendekatan politik ekologi dapat untuk melihat isu-isu pengelolaan lingkungan khususnya menyangkut isu "*right to environment dan environment justice*" dimana *right* merujuk pada kebutuhan minimal/standar individu terhadap obyek-obyek *right* seperti hak untuk hidup, hak untuk bersuara, hak untuk lingkungan dan lain-lain. Adapun *justice* menekankan alokasi kepemilikan dan penguasaan atas obyek-obyek *right* yaitu merujuk pada persoalan-persoalan relasional antar individu dan antar kelompok (Bakti Setiawan, 2006).

Konsep *right to environment dan environment justice* harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan diantara generasi (*intra-generational justice*) dan lintas generasi (*inter-generational justice*), karena konsep pembangunan berkelanjutan menekankan baik dimensi diantara generasi maupun lintas generasi.

2. Human Welfare Ecology

Pendekatan *human welfare ecology* menurut Ec kersley (dalam Bakti Setiawan, 2006) menekankan bahwa kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakatnya. Maka dari itu perlu strategi untuk dapat menerapkannya antara lain: melakukan perubahan struktural kerangka perundangan dan praktek politik pengelolaan sumberdaya alam, khususnya yang lebih memberikan peluang dan kontrol bagi daerah, masyarakat lokal dan petani untuk mengakses sumberdaya alam (pertanahan, kehutanan,

96| Pembangunan Ekonomi

pertambangan, kelautan). Dalam hal ini lebih memihak pada masyarakat lokal dan petani dan membatasi kewenangan negara yang terlalu berlebihan (hubungan negara – kapital – masyarakat sipil); dan menyangkut penguatan institusi masyarakat lokal dan petani.

3. Perspektif Antropologi

Dalam upaya untuk menemukan model penjelas terhadap ekologi manusia dengan perspektif antropologi memerlukan asumsi-asumsi. Tahara (dalam Akhbar dan Syarifuddin, 2007) selanjutnya menjelaskan bahwa secara historis, perspektif dimaksudkan mulai dari determinisme alam (*geographical determinism*), yang mengasumsikan faktor-faktor geografi dan lingkungan fisik alam sebagai penentu mutlak tipe-tipe kebudayaan masyarakat, metode ekologi budaya (*method of cultural ecology*) yang menjadikan variabel-variabel lingkungan alam dalam menjelaskan aspek-aspek tertentu dari kebudayaan manusia. Neofungsionalisme dengan asumsi keseimbangan (*equilibria*) dari ekosistem-ekosistem tertutup yang dapat mengatur dirinya sendiri (*self-regulating system*), materialisme budaya (*cultural materialism*) dengan keseimbangan *cost-benefit* terlembagakan, hingga ekologi Darwinisme dengan optimal *fitness* dalam respon atau adaptasi untuk “*survival*”.

4. Perspektif Ekologi Manusia

Menurut Lampe (dalam Akhbar dan Syarifuddin, 2007) terdapat tiga perspektif ekologi manusia yang dinilai relevan untuk aspek kearifan lokal, yaitu 1) pendekatan ekologi politik, 2) pendekatan ekosistemik dan 3) pendekatan konstruksionalisme. Pendekatan ekologi politik memusatkan studi pada aspek pengelolaan sumberdaya milik masyarakat atau tidak termiliki sama sekali, dan pada masyarakat-masyarakat asli skala kecil yang terperangkap di tengah-tengah proses modernisasi; pendekatan ekosistemik melihat komponen-komponen manusia dan lingkungan sebagai satu kesatuan ekosistem yang seimbang; dan paradigma komunalisme dan paternalisme dari perspektif konstruksionalisme. Dalam hal ini kedua komponen manusia dan lingkungan sumberdaya alam dilihat sebagai subyek-subyek yang

berinteraksi dan bernegosiasi untuk saling memanfaatkan secara menguntungkan melalui sarana yang arif lingkungan.

5. Pendekatan Aksi dan Konsekuensi (Model penjelasan Kontekstual Progressif)

Model ini lebih aplikatif untuk menjelaskan dan memahami fenomena-fenomena yang menjadi pokok masalahnya. Kelebihan dari pendekatan ini adalah mempunyai asumsi dan model penjelasan yang empirik, menyediakan tempat-tempat dan peluang bagi adopsi asumsi-asumsi dan konsep-konsep tertentu yang sesuai. Selanjutnya Vayda dalam Ritohardoyo (2006:25) menjelaskan bahwa pendekatan kontekstual progressif lebih menekankan pada obyek-obyek kajian tentang (a) aktivitas manusia dalam hubungan dengan lingkungan; (b) penyebab terjadinya aktivitas; dan (c) akibat-akibat aktivitas baik terhadap lingkungan maupun terhadap manusia sebagai pelaku aktivitas.

Masyarakat setempat yang menerapkan cara hidup tradisional di daerah pedesaan, yang nyaris tak tersentuh teknologi umumnya dikenal sebagai masyarakat suku, komunitas asli atau masyarakat hukum adat, penduduk asli atau masyarakat tradisional (Dasmaan dalam Indrawan, 2007). Masyarakat setempat seringkali menganggap diri mereka sebagai penghuni asli kawasan terkait, dan mereka biasanya berhimpun dalam tingkat komunitas atau desa. Kondisi demikian dapat menyebabkan perbedaan rasa kepemilikan antara masyarakat asli/pribumi dengan penghuni baru yang berasal dari luar, sehingga masyarakat setempat seringkali menjadi rekan yang tepat dalam konservasi. Di sebagian besar penjuru dunia, semakin banyak masyarakat setempat telah berinteraksi dengan kehidupan modern, sehingga sistem nilai mereka telah terpengaruh, dan diikuti penggunaan barang dari luar. Pergeseran nilai akan beresiko melemahnya kedekatan masyarakat asli dengan alam sekitar, serta melunturkan etika konservasi setempat.

Masyarakat tradisional pada umumnya sangat mengenal dengan baik lingkungan di sekitarnya. Mereka hidup dalam berbagai ekosistem alami yang ada di Indonesia, dan telah lama hidup berdampingan dengan alam secara harmonis, sehingga mengenal berbagai cara memanfaatkan sumberdaya alam secara

berkelanjutan. Masyarakat pedusunan memiliki keunikan khusus seperti kesederhanaan, ikatan emosional tinggi, kesenian rakyat dan loyalitas pada pimpinan kultural seperti halnya konsep-konsep yang berkembang di pedusunan sebagai seluk beluk masyarakat Jawa seperti dikemukakan oleh Anshoriy dan Sudarsono (2008:40-41) akan pemahamannya pada: 1) Gusti Allah, 2) Ingkang Akaryo jagad, 3) Ingkang Murbeng Dumadi, 4) Hyang Suksma Adiluwih, 5) Hyang maha Suci, 6) Sang Hyang Manon, 7) Agama Ageman Aji, dan 8) Kodrat Wiradat. Semua itu menjadi pedoman bagi orang Jawa dalam berperilaku, sehingga selalu mempertimbangkan pada besarnya Kekuasaan Gusti Allah dan harus menjaga apa saja yang telah diciptakannya. Di samping itu dalam berperilaku orang akan berpedoman pada berbagai macam hal yang pada hakekatnya mempunyai nilai baik dan buruk serta pada kegiatan yang didasarkan pada benar dan salah (Brennan, Andrew, Lo, Yeuk-Sze, 2002).

Dalam kearifan lokal juga terwujud upaya pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang juga merupakan wujud dari konservasi oleh masyarakat. Berkaitan dengan hal itu, maka

Nababan (1995) mengemukakan prinsip-prinsip konservasi dalam pengelolaan sumberdaya alam secara tradisional sebagai berikut:

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni). Hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagai bagian dari alam itu sendiri.
2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumberdaya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama (*communal property resource*). Rasa memiliki ini mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan sumberdaya bersama ini dari pihak luar.
3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat (*lokal knowledge system*) yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi dalam memanfaatkan sumberdaya alam yang terbatas.

4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat (input) energi sesuai dengan kondisi alam setempat.
5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumberdaya milik bersama dari penggunaan berlebihan, baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam satu kesatuan sosial tertentu.
6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak adanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumberdaya di luar aturan adat yang berlaku.

Tantangan terhadap kearifan lokal meliputi:

1. Jumlah Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang tinggi akan mempengaruhi kebutuhan pangan dan berbagai produksi lainnya untuk mencukupi kebutuhan manusia. Robert Malthus menyatakan bahwa penduduk yang banyak merupakan penyebab kemiskinan, hal ini terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang mengikuti deret ukur tidak akan pernah terkejar oleh penambahan makanan dan pakaian yang hanya mengikuti deret hitung (Soerjani dkk, 1997:99). Adanya kebutuhan pangan yang tinggi menuntut orang untuk meningkatkan produksinya guna mencukupi kebutuhan tersebut, sehingga melakukan modernisasi pertanian dengan melakukan revolusi hijau. Dalam revolusi hijau dikembangkan penggunaan bibit unggul, pemupukan kimia, pengendalian hama penyakit dengan obat-obatan, pembangunan saluran irigasi secara besar-besaran untuk pengairan dan penggunaan teknologi pertanian dengan traktor untuk mempercepat pekerjaan.

Sebagai akibat pelaksanaan revolusi hijau yang menekankan pada tanaman padi secara monokultur dengan bibit unggul maka akan mempengaruhi kehidupan petani lokal dalam

menggunakan bibit lokal yang sebenarnya mempunyai ketahanan terhadap hama dan penyakit, pupuk kandang dan pupuk organik yang digantikan dengan pupuk kimia, penggunaan hewan untuk membajak yang digantikan traktor, penggunaan obat-obatan dari tanaman untuk pertanian dengan obat-obatan kimia. Melalui program pemerintah ini, petani nampak hanya sebagai obyek, mereka tunduk patuh pada kehendak penguasa sehingga hak petani untuk mengekspresikan sikap dan kehendaknya terabaikan.

2. Teknologi Modern dan Budaya

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang cepat menyebabkan kebudayaan berubah dengan cepat pula. Selanjutnya Ritohardoyo (2006:42) menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi pada masyarakat yang kebudayaannya sudah maju atau kompleks, biasanya terwujud dalam proses penemuan (*discovery*), penciptaan baru (*invention*), dan melalui proses difusi (persebaran unsur-unsur kebudayaan). Perkembangan yang terwujud karena adanya inovasi (*discovery maupun invention*) dan difusi inovasi mempercepat proses teknologi, industrialisasi dan urbanisasi. Ketiga komponen tersebut secara bersama menghasilkan proses modernisasi dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Teknologi modern secara disadari atau tidak oleh masyarakat, sebenarnya menciptakan keinginan dan harapan-harapan baru dan memberikan cara yang memungkinkan adanya peningkatan kesejahteraan manusia.

Melihat kenyataan tersebut maka mudah dipahami mengapa cita-cita tentang teknologi lokal cenderung diabaikan, karena kebanyakan orang beranggapan bahwa teknologi modern selalu memiliki tingkat percepatan yang jauh lebih dinamis. Menurut Budisusilo dalam Wahono (2005:217) teknologi lokal sebagai penguatan kehidupan manusia sesungguhnya memiliki percepatan yang cukup dinamis, misalnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan dasar. Selain mengkusur pengetahuan dan teknologi lokal teknologi modern dan seluruh sistem kelembagaannya juga mempunyai potensi perusakan seperti pembagian hasil yang timpang, pencemaran lingkungan alam dan perusakan sistem nilai sosial-budaya masyarakat.

Terjadinya percepatan integrasi dari lokal ke global yang didukung oleh berbagai bentuk perkembangan teknologi (*hardware dan software*) telah menjadi suatu sistem dunia yang dominan. Banyak media informasi dan komunikasi dengan gencarnya menawarkan produk berikut gaya hidup, gaya konsumsi, dan berbagai sarana hidup yang dianggap sebagai tolok ukur kemajuan dan kebahagiaan yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Budisusilo dalam Wahono (2005:218) menjelaskan sebagai akibat perkembangan teknologi produksi yang pesat, baik pada sektor pertanian (bioteknologi dan mekanisasi), sektor industri (manufaktur dan eksplorasi alam), maupun sektor jasa (transportasi, medis, laboratoris, komunikasi dan informasi), masyarakat pun menjadi terbiasa menikmati produk barang dan jasa yang bersifat massif dengan efisiensi teknis, kualitas dan jenis yang sama pada semua belahan bumi. Di samping itu ketersediaan akses pada jaringan pemasaran seperti: hypermarket, supermarket, minimarket bahkan traditional market yang ditopang oleh fasilitas/alat bayar yang mudah dan cepat seperti telemarket, cybermarket telah merubah budaya dan kebiasaan baru sejumlah kalangan masyarakat. Pada gilirannya teknologi modern menjadi “standard produksi bagi pasar dunia” yang mengabaikan kemampuan penguasaan teknologi/pengetahuan keanekaragaman sumberdaya lokal dan menganggap teknologi lokal sebagai inferior.

Percepatan integrasi tersebut telah mengakibatkan berbagai kondisi paradoksal, seperti meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan, marginalisasi nilai kemanusiaan, krisis lingkungan, kerusakan dan konflik sumberdaya alam dan lingkungan. Melihat kenyataan tersebut maka perlu dicari cara bagaimana pengetahuan dan teknologi lokal dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak sehingga kerusakan lingkungan sosial dan alam pun dapat dihindarkan.

3. Modal Besar

Eksplorasi terhadap sumberdaya alam dan lingkungan sekarang ini telah sampai pada titik kritis, yang menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan masyarakat. Di samping masalah lingkungan yang terjadi di wilayah-wilayah dimana

dilakukan eksploitasi sumberdaya alam, sebenarnya terdapat masalah kemanusiaan, yaitu tersingkirnya masyarakat asli (*indigenous people*) yang tinggal di dalam dan sekitar wilayah eksploitasi baik eksploitasi sumberdaya hutan, sumberdaya laut, maupun hasil tambang. Mereka yang telah turun temurun tinggal dan menggantungkan kehidupannya pada hutan maupun laut, sekarang seiring dengan masuknya modal besar baik secara legal maupun illegal yang telah mengeksploitasi sumberdaya alam, maka kedaulatan dan akses mereka terhadap sumberdaya tersebut terampas.

Fenomena tersebut tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya alam selama ini yang lebih menitikberatkan kepada upaya perolehan devisa negara melalui eksploitasi sumberdaya alam yang bernilai ekonomis. Besarnya keuntungan yang bisa diraih diikuti dengan meningkatnya devisa dan daya serap tenaga kerja pada sektor yang bersangkutan, semakin menguatnya legitimasi beroperasinya modal besar di sektor tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa kekayaan sumberdaya alam dan hayati yang dimiliki dipandang sebagai sumberdaya yang dapat diekstraksi untuk mendapatkan surplus.

Namun demikian di lain pihak, keberhasilan perolehan devisa tersebut harus dibayar mahal dengan rusaknya ekosistem daerah yang bersangkutan dan akan berakibat pada terganggunya ekosistem global. Selanjutnya secara sosial budaya, terjadi konflik kepentingan antara tatanan budaya lokal dan budaya modern yang melekat pada industrialisasi dari sumberdaya alam yang dieksploitasi. Menurut Rimbo Gunawan dkk, (1998:5) persoalan tersebut di satu pihak, yaitu modernisasi melihat bahwa tatanan budaya lokal merupakan hambatan yang harus “dihilangkan” atau “diganti” agar proses pembangunan tidak mendapat gangguan serius dari komunitas lokal, sementara itu masyarakat lokal memandang industrialisasi dari hasil sumberdaya alam yang dieksploitasi sebagai ancaman bagi hak-hak adat mereka terhadap lingkungannya

Kejadian-kejadian tersebut khususnya pada sumberdaya hutan diperparah dengan banyaknya pengusaha illegal yang hanya mementingkan keuntungan tanpa mempertimbangkan

kerusakan lingkungan yang ditimbulkan, yang juga wujud dari keserakahan.

4. Kemiskinan dan Kesenjangan

Kemiskinan dan kesenjangan merupakan salah satu masalah yang paling berpengaruh terhadap timbulnya masalah sosial. Masalah sosial yang bersumber dari kemiskinan dan kesenjangan atau kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan pokok, sering kali tidak berdiri sendiri tetapi saling berkaitan dengan faktor lain.

Kemiskinan bukan saja menjadi masalah di Indonesia, tetapi juga di banyak negara berkembang. Kemiskinan juga mempengaruhi orang bertindak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, meskipun tindakan tersebut kadang bertentangan dengan aturan atau norma-norma yang sudah ada atau pun berkaitan dengan kerusakan lingkungan. Maka dari itu kemiskinan dan lingkungan merupakan isu strategis dan menjadi tantangan utama dalam proses pembangunan berkelanjutan dan menjadi sasaran dalam Agenda 21. Untuk itu maka UNDP dan EP menggalakkan program inisiatif penanggulangan kemiskinan dikaitkan dengan lingkungan. Basis program ini adalah suatu solusi "*win-win*" yang menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pengentasan rakyat miskin dan perbaikan lingkungan (Baiquni dan Wardani, 2002).

Prospek kearifan lokal di masa depan sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam, dimana masyarakat setempat tinggal dan kemauan masyarakat untuk tetap menjaga keseimbangan dengan lingkungan meskipun menghadapi berbagai tantangan. Maka dari itu penting untuk melibatkan masyarakat lokal dalam melakukan tindakan di lingkungan di mana mereka tinggal guna menghindari konflik-konflik sosial seperti diungkapkan Marfai (2005:124) bahwa pengelolaan sumberdaya dalam hal ini pengelolaan hutan wana tani yang kurang memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat lokal akan dapat menimbulkan konflik terutama dalam pengelolaan, alternatif pengelolaan lahan, dan pemetaan sumberdaya alam serta kepentingan antar kelompok masyarakat lokal. Melihat pentingnya peran masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian

lingkungannya maka penting untuk mempertahankan dan melindungi tindakan-tindakan masyarakat yang merupakan bentuk dari kearifan ekologis.

CBNRM (*Community Based Nature Resource Management*) atau pendekatan pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat merupakan strategi pengelolaan Sumberdaya Hayati (SDH) dimana masyarakat berpartisipasi secara aktif dan berperan dalam menanggulangi masalah yang mempengaruhi kondisi SDH sehingga dalam hal ini CBNRM sangat menaruh perhatian pada partisipasi masyarakat lokal dalam memanfaatkan dan memelihara SDH di sekitarnya. CBNRM merupakan contoh pendekatan dalam sistem pengelolaan SDA yang mempertimbangkan aspek-aspek keadilan, pemerataan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar SDH secara berkelanjutan (Supriatna, 2008)

Peran masyarakat lokal dalam CBNRM mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Secara umum peran masyarakat sendiri ditentukan oleh 3 hal yaitu : 1) sejauh mana pengetahuan lokal dapat dihargai dan dimanfaatkan dalam membentuk sebuah sistem pengelolaan kawasan konservasi yang baik; 2) seberapa besar kepedulian warga komunitas lokal terhadap alamnya sehingga mampu mendorong ke arah upaya-upaya untuk menjaga dan mengelola; sumberdaya alam dan lingkungan di dalam mau pun di luar kawasan dan 3) seberapa banyak manfaat (material dan nonmaterial) yang bisa diterima masyarakat dari kawasan konservasi sehingga keberadaannya memiliki nilai yang menguntungkan secara terus menerus.

Walaupun belum ada contoh yang berhasil namun konseptual CBNRM bisa menjadi rujukan dalam membangun model pengelolaan kawasan konservasi yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian keanekaragaman hayatinya. Beberapa pokok persoalan yang menjadi sasaran utama CBNRM, yaitu : 1) membuka akses bagi masyarakat (lokal) dan *stakeholder* lain terhadap informasi dan pengelolaan; 2) memberi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup lewat pemanfaatan sumberdaya hayati yang tersedia sehingga mendorong mereka untuk terus mempertahankan keberadaannya; dan 3) penguatan posisi masyarakat dan

stakeholder lain dalam proses-proses pembuatan kebijakan pemerintah yang terkait dengan pengelolaan sumberdaya alam.

Untuk menunjang keberhasilannya maka ada beberapa prinsip dalam penerapan CBNRM, yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat, prinsip kesetaraan peran, prinsip berorientasi pada lingkungan, prinsip penghargaan terhadap pengetahuan lokal/tradisional dan prinsip pengakuan terhadap perempuan (Supriatna, 2008)

BAGIAN II
PEMBANGUNAN EKONOMI DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI REGIONAL

BAB VIII

PEMBANGUNAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya – sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999 : 108).

Pembangunan regional pada dasarnya adalah berkenaan dengan tingkat dan perubahan selama kurun waktu tertentu suatu set (gugus) variabel- variabel, seperti produksi, penduduk, angkatan kerja, rasio modal tenaga, dan imbalan bagi faktor (*factor returns*) dalam daerah di batasi secara jelas. Laju pertumbuhan dari daerah - daerah biasanya di ukur menurut output atau tingkat pendapatan.

Pembangunan ekonomi daerah berorientasi pada proses. Suatu proses yang melibatkan pembentukan institusi baru, pembangunan industri alternatif, perbaikan kapasitas tenaga kerja yang ada untuk menghasilkan produk yang lebih baik, identifikasi pasar- pasar baru, dan transformasi pengetahuan (Adisasmita 2005 dalam Manik, 2009 : 32).

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi di wilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (*value added*) yang terjadi (Tarigan, 2005 : 46). Perhitungan pendapatan wilayah pada awalnya dibuat dalam harga berlaku. Namun agar dapat melihat pertambahan dari satu kurun waktu ke kurun waktu berikutnya, harus dinyatakan dalam nilai riil, artinya dinyatakan dalam harga konstan. Pendapatan wilayah menggambarkan balas jasa bagi faktor - faktor produksi yang beroperasi di daerah tersebut (tanah, modal, tenaga kerja, dan teknologi), yang berarti secara kasar dapat menggambarkan

kemakmuran daerah tersebut. Kemakmuran suatu wilayah selain ditentukan oleh besarnya nilai tambah yang tercipta di wilayah tersebut juga oleh seberapa besar terjadi *transfer payment*, yaitu bagian pendapatan yang mengalir ke luar wilayah atau mendapat aliran dana dari luar wilayah.

Pertumbuhan regional adalah produk dari banyak faktor, sebagian bersifat intern dan sebagian lagi bersifat ekstern dan sosio politik. Faktor - faktor yang berasal dari daerah itu sendiri meliputi distribusi faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal sedangkan salah satu penentu ekstern yang penting adalah tingkat permintaan dari daerah - daerah lain terhadap komoditi yang dihasilkan daerah tersebut.

Glasson (1997) menjelaskan bahwa region dapat diklasifikasikan menjadi daerah homogeny (*homogeneous region*), daerah administrasi (*administrative region*) dan daerah nodal (*nodal region*). Pertumbuhan ekonomi daerah yang berbeda - beda intensitasnya akan menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas ekonomi dan ketimpangan pendapatan antar daerah. Myrdal (1968) dan Friedman (1976) menyebutkan bahwa pertumbuhan atau perkembangan daerah akan menuju kepada divergensi.

Ada beberapa teori pembangunan dan pertumbuhan ekonomi regional yang lazim dikenal, diantaranya : (1) teori basis ekspor; (2) teori pertumbuhan jalur cepat; (3) teori pusat pertumbuhan; (4) teori neoklasik; (5) model kumulatif kausatif; dan (6) model interregional.

A. Teori Basis Ekspor

Teori basis ekspor (*export base theory*) dipelopori oleh Douglas C. North (1995) dan kemudian dikembangkan oleh Tiebout (1956). Teori ini membagi sektor produksi atau jenis pekerjaan yang terdapat di dalam suatu wilayah atas pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan service (non-basis). Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat *exogenous* artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah tersebut dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non- basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri.

Teori basis ekspor menggunakan dua asumsi, yaitu asumsi pokok atau yang utama bahwa ekspor adalah satu - satunya unsur eksogen (*independent*) dalam pengeluaran, artinya semua unsur pengeluaran lain terikat (*dependent*) terhadap pendapatan. Secara tidak langsung hal ini berarti diluar pertambahan alamiah, hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan daerah karena sektor lain terikat oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lain hanya meningkat apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Asumsi kedua adalah bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan.

Beberapa hal penekanan dalam model teori basis ekspor yaitu, antara lain:

1. Bahwa suatu daerah tidak harus menjadi daerah industri untuk dapat tumbuh dengan cepat, sebab faktor penentu pertumbuhan daerah adalah keuntungan komparatif (keuntungan lokasi) yang dimiliki oleh daerah tersebut.
2. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan dapat dimaksimalkan bila daerah yang bersangkutan memanfaatkan keuntungan komparatif yang dimiliki menjadi kekuatan basis ekspor.
3. Ketimpangan antar daerah tetap sangat besar dipengaruhi oleh variasi potensi masing- masing daerah.

Model teori basis ini adalah sederhana, sehingga memiliki kelemahan-kelemahan antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Richardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbalik dari besarnya suatu daerah. Artinya, makin besar suatu daerah maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan.
2. Ekspor jelas bukan satu- satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah seperti pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, investasi, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

3. Dalam melakukan studi atas suatu wilayah, multiplier basis yang diperoleh adalah rata - ratanya bukan perubahannya. Menggunakan multiplier basis rata - rata untuk proyeksi seringkali memberikan hasil yang keliru apabila nilai multiplier dari tahun ke tahun.
4. Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila pengganda basis digunakan sebagai alat proyeksi maka masalah *time lag* (masa tenggang) harus diperhatikan.
5. Ada kasus dimana suatu daerah yang tetap berkembang pesat meski ekspornya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan dari produk kegiatan lainnya.

B. Teori Pertumbuhan Jalur Cepat

Teori pertumbuhan jalur cepat (*turnpike*) diperkenalkan oleh Samuelson pada tahun 1955 (Tarigan, 2005 : 54). Inti dari teori ini adalah menekankan bahwa setiap daerah perlu mengetahui sektor ataupun komoditi apa yang memiliki potensi besar dan dapat dikembangkan dengan cepat, baik karena potensi alam maupun karena sektor itu memiliki *competitive advantage* untuk dikembangkan. Artinya, dengan kebutuhan modal yang sama sektor tersebut dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar, dapat memproduksi dalam waktu relatif singkat dan sumbangan untuk perekonomian juga cukup besar. Agar pasarnya terjamin, produk tersebut harus bisa diekspor (keluar daerah atau luar negeri).

Perkembangan sektor tersebut akan mendorong sektor lain turut berkembang sehingga perekonomian secara keseluruhan akan tumbuh. Mensinergikan sektor - sektor adalah membuat sector - sektor saling terkait dan saling mendukung. menggabungkan kebijakan jalur cepat dan mensinergikannya dengan sektor lain yang terkait akan mampu membuat perekonomian tumbuh cepat. Selain itu perlu diperhatikan pandangan beberapa ahli ekonomi (Schumpeter dan ahli lainnya) yang mengatakan bahwa kemajuan teknologi sangat ditentukan oleh jiwa usaha (*entrepreneurship*) dalam masyarakat. Jiwa usaha berarti pemilik modal mampu melihat peluang dan mengambil

resiko untuk membuka lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja yang bertambah setiap tahunnya.

C. Teori Pusat Pertumbuhan

Teori pusat pertumbuhan (*growth poles theory*) adalah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus. Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Dalam suatu wilayah, ada penduduk atau kegiatan yang terkonsentrasi pada suatu tempat, yang disebut dengan berbagai istilah seperti kota, pusat perdagangan, pusat industri, pusat pertumbuhan, simpul distribusi, pusat pemukiman, atau daerah modal. Sebaliknya, daerah di luar pusat konsentrasi dinamakan daerah pedalaman, wilayah belakang (*hinterland*), daerah pertanian, atau daerah pedesaan.

Keuntungan berlokasi pada tempat konsentrasi atau terjadinya agglomerasi disebabkan faktor skala ekonomi (*economic of scale*) atau *agglomeration (economic of localization)* (Tarigan, 2005 : 159). *Economic of scale* adalah keuntungan karena dalam berproduksi sudah berdasarkan spesialisasi, sehingga produksi menjadi lebih besar dan biaya per unitnya menjadi lebih efisien. *Economic of agglomeration* adalah keuntungan karena di tempat tersebut terdapat berbagai keperluan dan fasilitas yang dapat digunakan untuk memperlancar kegiatan perusahaan, seperti jasa perbankan, asuransi, perbengkelan, perusahaan listrik, perusahaan air bersih, tempat-tempat pelatihan keterampilan, media untuk mengiklankan produk, dan lain sebagainya.

Hubungan antara kota (daerah maju) dengan daerah lain yang lebih terbelakang dapat dibedakan sebagai berikut: (1) generatif, yaitu hubungan yang saling menguntungkan atau saling mengembangkan antara daerah yang lebih maju dengan daerah yang ada di belakangnya; (2) parasitif, yaitu hubungan yang terjadi dimana daerah kota (daerah yang lebih maju) tidak banyak

membantu atau menolong daerah belakangnya, dan bahkan bisa mematikan berbagai usaha yang mulai tumbuh di daerah belakangnya; (3) *enclave* (tertutup), yaitu daerah kota (daerah yang lebih maju) seakan - akan terpisah sama sekali dengan daerah sekitarnya yang lebih terbelakang.

Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya *multiplier effect* (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2005 : 162).

D. Teori Neo Klasik

Teori Neoklasik (*neo- classic theory*) dipelopori oleh Borts Stein (1964), kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Roman (1965) dan Siebert (1969). Dalam negara yang sedang berkembang, pada saat proses pembangunan baru dimulai, tingkat perbedaan kemakmuran antar wilayah cenderung menjadi tinggi (*divergence*), sedangkan bila proses pembangunan telah berjalan dalam waktu yang lama maka perbedaan tingkat kemakmuran antar wilayah cenderung menurun (*convergence*). Hal ini disebabkan pada negara sedang berkembang lalu lintas modal masih belum lancar sehingga proses penyesuaian kearah tingkat keseimbangan pertumbuhan belum dapat terjadi.

Teori ini mendasarkan analisisnya pada komponen fungsi produksi. Unsur -unsur yang menentukan pertumbuhan ekonomi regional adalah modal, tenaga kerja, dan teknologi. Adapun kekhususan teori ini adalah dibahasnya secara mendalam pengaruh perpindahan penduduk (migrasi) dan lalu lintas modal terhadap pertumbuhan regional.

E. Model Kumulatif Kausatif

Model kumulatif kausatif (*cummulative causation models*) dipelopori oleh Gunnar Myrdal (1975) dan kemudian diformulasikan lebih lanjut oleh Kaldor. Teori ini menyatakan bahwa adanya suatu keadaan berdasarkan kekuatan relatif dari "*spread effect*" dan "*back wash effect*". *Spread effect* adalah kekuatan yang menuju konvergensi antar daerah - daerah kaya dan daerah - daerah miskin. Dengan timbulnya daerah kaya, maka

akan tumbuh pula permintaannya terhadap produk daerah-daerah miskin. Dengan demikian mendorong pertumbuhannya.

Namun Myrdal yakin bahwa dampak *spread effect* ini lebih kecil daripada *back wash effect*. Pertambahan permintaan terhadap produk daerah miskin tersebut terutama barang-barang hasil pertanian oleh daerah kaya tentu saja mempunyai nilai permintaan yang rendah, sementara konsumsi daerah miskin terhadap produk daerah kaya akan lebih mungkin terjadi. Para pelopor teori ini menekankan pentingnya campur tangan pemerintah untuk mengatasi perbedaan yang semakin menonjol.

F. Model Interregional

Model ini merupakan perluasan dari teori basis ekspor dengan menambah faktor-faktor yang bersifat eksogen. Selain itu, model basis ekspor hanya membahas daerah itu sendiri tanpa memperhatikan dampak dari daerah tetangga. Model ini memasukkan dampak dari daerah tetangga, sehingga model ini dinamakan model interregional (Tarigan, 2005 : 58). Dalam model ini diasumsikan bahwa selain ekspor, pengeluaran pemerintah dan investasi juga bersifat eksogen dan daerah itu terikat kepada suatu sistem yang terdiri dari beberapa daerah yang berhubungan erat.

Sumber-sumber perubahan pendapatan regional (Tarigan, 2005 : 60) dapat berasal dari:

1. Perubahan pengeluaran otonomi regional, seperti investasi dan pengeluaran pemerintah.
2. Perubahan pendapatan suatu daerah atau beberapa daerah lain yang berada dalam suatu sistem yang akan terlihat dari perubahan ekspor.
3. Perubahan salah satu di antara parameter-parameter model (hasrat konsumsi marjinal, koefisien perdagangan interregional, atau tingkat pajak marjinal).

BAB IX

PRINSIP DASAR PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah yang dapat berlaku untuk semua daerah. Namun di pihak lain, dalam menyusun strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang, pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah, yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah.

Keinginan kuat dari pemerintah daerah untuk membuat strategi pengembangan ekonomi daerah dapat membuat masyarakat ikut serta membentuk bangun ekonomi daerah yang dicita-citakan. Dengan pembangunan ekonomi daerah yang terencana, pembayar pajak dan penanam modal juga dapat tergerak untuk mengupayakan peningkatan ekonomi. Kebijakan pertanian yang mantap, misalnya, akan membuat pengusaha dapat melihat ada peluang untuk peningkatan produksi pertanian dan perluasan ekspor. Dengan peningkatan efisiensi pola kerja pemerintahan dalam pembangunan, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan, pengusaha dapat mengantisipasi bahwa pajak dan retribusi tidak naik, sehingga tersedia lebih banyak modal bagi pembangunan ekonomi daerah pada tahun depan.

Pembangunan ekonomi daerah perlu memberikan solusi jangka pendek dan jangka panjang terhadap isu-isu ekonomi daerah yang dihadapi, dan perlu mengkoreksi kebijakan yang keliru. Pembangunan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah secara menyeluruh. Dua prinsip dasar

pengembangan ekonomi daerah yang perlu diperhatikan adalah (1) mengenali ekonomi wilayah dan (2) merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro-bisnis.

1. Mengenali Ekonomi Wilayah

Isu-isu utama dalam perkembangan ekonomi daerah yang perlu dikenali adalah antara lain sebagai berikut.

a. Perkembangan Penduduk dan Urbanisasi

Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama pertumbuhan ekonomi, yang mampu menyebabkan suatu wilayah berubah cepat dari desa pertanian menjadi agropolitan dan selanjutnya menjadi kota besar. Pertumbuhan penduduk terjadi akibat proses pertumbuhan alami dan urbanisasi. Pertumbuhan alami penduduk menjadi faktor utama yang berpengaruh pada ekonomi wilayah karena menciptakan kebutuhan akan berbagai barang dan jasa. Penduduk yang bertambah membutuhkan pangan. Rumah tangga baru juga membutuhkan rumah baru atau renovasi rumah lama berikut perabotan, alat-alat rumah tangga dan berbagai produk lain. Dari sini kegiatan pertanian dan industri berkembang.

Urbanisasi dilakukan oleh orang-orang muda usia yang pergi mencari pekerjaan di industri atau perusahaan yang jauh dari tempat dimana mereka berasal. Perpindahan ke wilayah lain dari desa atau kota kecil telah menjadi tren dari waktu ke waktu akibat pengaruh dari televisi, perusahaan penggerak tenaga kerja, dan berbagai sumber lainnya. Suatu kajian mengindikasikan bahwa pendidikan berkaitan erat dengan perpindahan ini. Secara umum semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat perpindahan pun semakin tinggi. Hal ini semakin meningkat dengan semakin majunya telekomunikasi, komputer dan aktivitas *high tech* lainnya yang memudahkan akses keluar wilayah.

Urbanisasi orang-orang muda ini dipandang pelakunya sebagai penyaluran kebutuhan ekonomi mereka namun merupakan peristiwa yang kurang menguntungkan bagi wilayah itu bila terjadi dalam jumlah besar. Untuk mengurangi migrasi keluar ini masyarakat perlu untuk mulai melatih angkatan kerja pada tahun-tahun pertama usia kerja dengan memberikan pekerjaan sambil, selanjutnya merencanakan masa depan mereka sebagai tenaga dewasa yang suatu saat akan membentuk

keluarga. Sebagai dorongan bagi mereka untuk tetap tinggal adalah dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang sesuai.

Lembaga pendidikan/pelatihan dan dunia usaha perlu menyadari adanya kebutuhan untuk membangun hubungan kerjasama. Pendidikan mencari cara agar mereka cukup berguna bagi pengusaha lokal dan pengusaha lokal mengandalkan pada pendidikan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal. Jika metode pendidikan yang ada tidak dapat mengatasi tantangan yang dihadapi, maka ada keperluan untuk mendatangkan tenaga ahli dari wilayah lain untuk memberikan pelatihan yang dapat mensuplai tenaga kerja terampil bagi pengusaha lokal.

b. Sektor Pertanian

Di setiap wilayah berpenduduk selalu terjadi kegiatan pembangunan, namun ada beberapa wilayah yang pembangunannya berjalan di tempat atau bahkan berhenti sama sekali, dan wilayah ini kemudian menjadi wilayah kelas kedua dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan penanam modal dan pelaku bisnis keluar dari wilayah tersebut karena wilayah itu dianggap sudah tidak layak lagi untuk dijadikan tempat berusaha. Akibatnya laju pertumbuhan ekonomi wilayah itu menjadi semakin lambat.

Upaya pengembangan sektor agribisnis dapat menolong mengembangkan dan mempromosikan agroindustri di wilayah tertinggal. Program kerjasama dengan pemilik lahan atau pihak pengembang untuk mau meminjamkan lahan yang tidak dibangun atau lahan tidur untuk digunakan sebagai lahan pertanian perlu dikembangkan. Dari jumlah lahan pertanian yang tidak produktif ini dapat diciptakan pendapatan dan lapangan kerja bagi penganggur di perdesaan. Program kerjasama mengatasi keterbatasan modal, mengurangi resiko produksi, memungkinkan petani memakai bahan baku impor dan produk yang dihasilkan dapat mampu bersaing dengan barang impor yang sejenis serta menarikan dan membuka pasaran yang baru.

Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi dapat berasal dari dalam wilayah maupun dari luar wilayah. Globalisasi adalah faktor luar yang dapat menyebabkan merosotnya kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Sebagai contoh, karena kebijakan AFTA, maka di pasaran dapat terjadi kelebihan stok produk

pertanian akibat impor dalam jumlah besar dari negara ASEAN yang bisa merusak sistem dan harga pasar lokal. Untuk tetap dapat bersaing, target pemasaran yang baru harus segera ditentukan untuk menyalurkan kelebihan hasil produksi pertanian dari petani lokal. Salah satu strategi yang harus dipelajari adalah bagaimana caranya agar petani setempat dapat mengikuti dan melaksanakan proses produksi sampai ke tingkat penyaluran. Namun daripada bersaing dengan produk impor yang masuk dengan harga murah, akan lebih baik jika petani setempat mengolah komoditi yang spesifik wilayah tersebut dan menjadikannya produk yang bernilai jual tinggi untuk kemudian disebarluaskan di pasaran setempat maupun untuk diekspor.

Apa yang telah terjadi di Pulau Jawa kiranya perlu dihindari oleh daerah-daerah lain. Pengalihan fungsi sawah menjadi fungsi lain telah terjadi tanpa sulit dicegah. Hal ini mengurangi pemasukan ekonomi dari sektor pertanian di wilayah tersebut, disamping itu juga menghilangkan kesempatan untuk menjadikan wilayah yang mandiri dalam pengadaan pangan, termasuk mengurangi kemungkinan berkembangnya wisata ekologi yang memerlukan lahan alami.

c. Sektor Pariwisata

Pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Kawasan sepanjang pantai yang bersih dapat menjadi daya tarik wilayah, dan kemudian berlanjut dengan menarik turis dan penduduk ke wilayah tersebut. Sebagai salah satu lokasi rekreasi, kawasan pantai dapat merupakan tempat yang lebih komersial dibandingkan kawasan lain, tergantung karakteristiknya. Sebagai sumber alam yang terbatas, hal penting yang harus diperhatikan adalah wilayah pantai haruslah menjadi aset ekonomi untuk suatu wilayah.

Wisata ekologi memfokuskan pada pemanfaatan lingkungan. Kawasan wisata ekologi merupakan wilayah luas dengan habitat yang masih asli yang dapat memberikan landasan bagi terbentuknya wisata ekologi. Hal ini merupakan peluang unik untuk menarik pasar wisata ekologi. Membangun tempat ini dengan berbagai aktivitas seperti berkuda, *surfing*, berkemah,

memancing dll. akan dapat membantu perluasan pariwisata serta mengurangi kesenjangan akibat pengangguran.

Wisata budaya merupakan segmen yang berkembang cepat dari industri pariwisata. Karakter dan pesona dari desa/kota kecil adalah faktor utama dalam menarik turis. Namun kegiatan pariwisata bersifat musiman, sehingga banyak pekerjaan bersifat musiman juga, yang dapat menyebabkan tingginya tingkat pengangguran pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan ekonomi lokal dapat rentan terhadap perputaran siklus ekonomi.

Ekonomi wilayah sebaiknya tidak berbasis satu sektor tertentu. Keaneka-ragaman ekonomi diperlukan untuk mempertahankan lapangan pekerjaan dan untuk menstabilkan ekonomi wilayah. Ekonomi yang beragam lebih mampu bertahan terhadap konjungtur ekonomi.

d. Kualitas Lingkungan

Persepsi atas suatu wilayah, apakah memiliki kualitas hidup yang baik, merupakan hal penting bagi dunia usaha untuk melakukan investasi. Investasi pemerintah daerah yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat sangat penting untuk mempertahankan daya saing. Jika masyarakat ingin menarik modal dan investasi, maka haruslah siap untuk memberi perhatian terhadap: keanekaragaman, identitas dan sikap bersahabat. Pengenalan terhadap fasilitas untuk mendorong kualitas hidup yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu wilayah dan dapat menarik bagi investor luar perlu dilakukan.

Kawasan bersejarah adalah pembentuk kualitas lingkungan yang penting. Pelestarian kawasan bersejarah berkaitan dengan berbagai aspek ekonomi lokal seperti keuangan daerah, permukiman, perdagangan kecil, dan pariwisata dengan menciptakan pekerjaan yang dapat signifikan. Kegiatan ini memberikan kontribusi terhadap kualitas hidup, meningkatkan citra masyarakat dan menarik kegiatan ekonomi yang menghasilkan pendapatan bagi penduduk. Pelestarian kawasan bersejarah memberikan perlindungan kepada warisan budaya dan membuat masyarakat memiliki tempat yang menyenangkan untuk hidup. Investor dan developer umumnya menilai kekuatan wilayah melalui kualitas dan karakter dari wilayahnya, salah satunya adalah terpeliharanya kawasan bersejarah.

Selain aset alam dan budaya, sarana umum merupakan penarik kegiatan bisnis yang penting. Untuk melihat dan mengukur tingkat kenyamanan hidup pada suatu wilayah dapat dilihat dari ketersediaan sarana umum di wilayah tersebut. Sarana umum merupakan kerangka utama dari pembangunan ekonomi dan sarana umum ini sangat penting bagi aktivitas masyarakat. Sarana umum yang paling dasar adalah jalan, pelabuhan, pembangkit listrik, sistem pengairan, sarana air bersih, penampungan dan pengolahan sampah dan limbah, sarana pendidikan seperti sekolah, taman bermain, ruang terbuka hijau, sarana ibadah, dan masih banyak fasilitas lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari masyarakat.

Kepadatan, pemanfaatan lahan dan jarak merupakan tiga faktor utama dalam pengembangan sarana umum yang efektif. Semakin padat dan rapat penduduk, biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan sarana umum jauh lebih murah jika dilihat daya tampung per unitnya. Pola pembangunan yang padat, kompak dan teratur, berbiaya lebih murah daripada pembangunan yang linier atau terpecah-pecah. Semakin efisien biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan dan pengadaan sarana umum maka akan semakin memperkuat dan memperkuat pembangunan ekonomi wilayah tersebut.

Sarana umum yang baru perlu dibangun sejalan dengan penambahan jumlah penduduk. Idealnya fasilitas sarana umum yang ada harus dapat menampung sesuai dengan kapasitas maksimalnya, sehingga dapat memberikan waktu untuk dapat membangun sarana umum yang baru. Penggunaan lahan dan sarana umum haruslah saling berkaitan satu sama lainnya. Perencana pembangunan seharusnya dapat memprediksikan arah pembangunan yang akan berlangsung sehingga dapat dibuat sarana umum yang baru untuk menunjang kegiatan masyarakat pada wilayah tersebut. Penyediaan sarana dapat juga dilakukan dengan memberikan potongan pajak dan ongkos kompensasi berupa pengelolaan sarana umum kepada sektor swasta yang bersedia membangun fasilitas umum.

Wilayah pinggiran biasanya memiliki karakter sebagai wilayah yang tidak direncanakan, berkepadatan rendah dan tergantung sekali keberadaannya pada penggunaan lahan yang

ada. Tempat seperti ini akan membuat penyediaan sarana umum menjadi sangat mahal. Dalam suatu wilayah antara kota, desa dan tempat-tempat lainnya harus ada satu kesatuan. Pemerintah daerah perlu mengenali pola pengadaan sarana umum di suatu wilayah yang efektif, baik di wilayah lama maupun di wilayah pinggiran.

e. Keterkaitan Wilayah dan Aglomerasi

Kemampuan wilayah untuk mengefisienkan pergerakan orang, barang dan jasa adalah komponen pembangunan ekonomi yang penting. Suatu wilayah perlu memiliki akses transportasi menuju pasar secara lancar. Jalur jalan yang menghubungkan suatu wilayah dengan kota-kota lebih besar merupakan prasarana utama bagi pengembangan ekonomi wilayah. Pelabuhan laut dan udara berpotensi untuk meningkatkan hubungan transportasi selanjutnya. Pemeliharaan jaringan jalan, perluasan jalur udara, jalur air diperlukan untuk meningkatkan mobilitas penduduk dan pergerakan barang. Pembangunan prasarana diperlukan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing wilayah. Mengenali kebutuhan pergerakan yang sebenarnya perlu dilakukan dalam merencanakan pembangunan transportasi.

Umumnya usaha yang sama cenderung beraglomerasi dan membentuk kelompok usaha dengan karakter yang sama serta tipe tenaga kerja yang sama. Produk dan jasa yang dihasilkan juga satu tipe. Sumber daya alam dan industri pertanian biasanya berada di tahap awal pembangunan wilayah dan menciptakan kesempatan yang potensial untuk perkembangan wilayah. Pengelompokan usaha (aglomerasi) berarti semua industri yang saling berkaitan saling membagi hasil produk dan keuntungan. Pengelompokan itu juga menciptakan potensi untuk menciptakan jaringan kerjasama yang dapat membangun kegiatan pemasaran bersama dan untuk menarik kegiatan lainnya yang berkaitan ke depan atau ke belakang.

Pertumbuhan ekonomi yang sehat sangat penting jika suatu wilayah ingin bersaing di pasar lokal dan nasional. Untuk mencapai tujuan ini, pendekatan kawasan yang terpadu diperlukan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi. Prioritas utama adalah mengidentifikasi kawasan-kawasan yang

menunjukkan tanda-tanda aglomerasi dengan seluruh kegiatan dan institusi yang membentuknya. Kemungkinan kawasan ini menjadi pusat usaha dan perdagangan tergantung pada jaringan transportasi yang baik, prasarana yang lengkap, tempat kerja yang mudah dicapai, dukungan modal, dan kesempatan pelatihan/pendidikan.

2. Manajemen Pembangunan Daerah yang Pro-Bisnis

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang, serta membentuk wawasan orang banyak. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Pemerintah daerah dalam mempertahankan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerahnya agar membawa dampak yang menguntungkan bagi penduduk daerah perlu memahami bahwa manajemen pembangunan daerah dapat memberikan pengaruh yang baik guna mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang diharapkan. Bila kebijakan manajemen pembangunan tidak tepat sasaran maka akan mengakibatkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi. Maka manajemen pembangunan daerah mempunyai potensi untuk meningkatkan pembangunan ekonomi serta menciptakan peluang bisnis yang menguntungkan dalam mempercepat laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Prinsip-prinsip manajemen pembangunan yang pro-bisnis adalah antara lain sebagai berikut.

a. Menyediakan Informasi kepada Pengusaha

Pemerintah daerah dapat memberikan informasi kepada para pelaku ekonomi di daerahnya ataupun di luar daerahnya kapan, dimana, dan apa saja jenis investasi yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang akan datang. Dengan cara ini maka pihak pengusaha dapat mengetahui arah kebijakan pembangunan daerah yang diinginkan pemerintah daerah, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan dalam kegiatan apa usahanya akan perlu dikembangkan. Pemerintah daerah perlu terbuka mengenai kebijakan pembangunannya, dan informasi yang diterima publik perlu diupayakan sesuai dengan yang diinginkan.

b. Memberikan Kepastian dan Kejelasan Kebijakan

Salah satu kendala berusaha adalah pola serta arah kebijakan publik yang berubah-ubah sedangkan pihak investor memerlukan ada kepastian mengenai arah serta tujuan kebijakan pemerintah. Strategi pembangunan ekonomi daerah yang baik dapat membuat pengusaha yakin bahwa investasinya akan menghasilkan keuntungan di kemudian hari. Perhatian utama calon penanam modal oleh sebab itu adalah masalah kepastian kebijakan. Pemerintah daerah akan harus menghindari adanya tumpang tindih kebijakan jika menghargai peran pengusaha dalam membangun ekonomi daerah. Ini menuntut adanya saling komunikasi diantara instansi-instansi penentu perkembangan ekonomi daerah. Dengan cara ini, suatu instansi dapat mengetahui apa yang sedang dan akan dilakukan instansi lain, sehingga dapat mengurangi terjadinya kemiripan kegiatan atau ketiadaan dukungan yang diperlukan.

Pengusaha juga mengharapkan kepastian kebijakan antar waktu. Kebijakan yang berubah-ubah akan membuat pengusaha kehilangan kepercayaan mengenai keseriusannya membangun ekonomi daerah. Pengusaha daerah umumnya sangat jeli dengan perilaku pengambil kebijakan di daerahnya. Kerjasama yang saling menguntungkan mensyaratkan adanya kepercayaan terhadap mitra usaha. Membangun kepercayaan perlu dilakukan secara terencana dan merupakan bagian dari upaya pembangunan daerah.

c. Mendorong Sektor Jasa dan Perdagangan

Sektor ekonomi yang umumnya berkembang cepat di kota-kota adalah sektor perdagangan kecil dan jasa. Sektor ini sangat tergantung pada jarak dan tingkat kepadatan penduduk. Persebaran penduduk yang berjauhan dan tingkat kepadatan penduduk yang rendah akan memperlemah sektor jasa dan perdagangan eceran, yang mengakibatkan peluang kerja berkurang. Semakin dekat penduduk, maka interaksi antar mereka akan mendorong kegiatan sektor jasa dan perdagangan. Seharusnya pedagang kecil mendapat tempat yang mudah untuk berusaha, karena telah membantu pemerintah daerah mengurangi pengangguran. Pada waktunya pengusaha kecil akan membayar pajak kepada pemerintah daerah. Dengan menstimulir usaha jasa dan perdagangan eceran, pertukaran ekonomi yang lebih cepat dapat terjadi sehingga menghasilkan investasi yang lebih besar. Adanya banyak pusat-pusat pedagang kaki lima yang efisien dan teratur akan menarik lebih banyak investasi bagi ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Sebagian besar lapangan kerja yang ada dalam suatu wilayah diciptakan oleh usaha kecil dan menengah. Namun usaha kecil juga rentan terhadap ketidakstabilan, yang terutama berkaitan dengan pasar dan modal, walaupun secara umum dibandingkan sektor skala besar, usaha kecil dan menengah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi. Pemerintah daerah perlu berupaya agar konjungtur ekonomi tidak berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha kecil.

d. Meningkatkan Daya Saing Pengusaha Daerah

Kualitas strategi pembangunan ekonomi daerah dapat dilihat dari apa yang akan dilakukan pemerintah daerah dalam menyiapkan pengusaha-pengusaha di daerahnya menghadapi persaingan global. Globalisasi (atau penduniaan) akan semakin mempengaruhi perkembangan ekonomi daerah dengan berlakunya perjanjian AFTA, APEC dan lain-lain. Mau tidak mau, siap atau tidak siap perdagangan bebas akan menjadi satu-satunya pilihan bagi masyarakat di semua daerah. Upaya untuk menyiapkan pengusaha daerah oleh sebab itu perlu dilakukan. Pengusaha dari negara maju telah siap atau disiapkan sejak lama. Pengusaha daerah juga perlu diberitahu konsekuensi langsung

dari ketidaksiapan menghadapi perdagangan bebas. Saat ini, pengusaha lokal mungkin masih dapat meminta pengertian manajer supermarket untuk mendapatkan tempat guna menjual produksinya. Tahun depan, bisa tidak ada toleransi untuk produksi lokal yang tidak lebih murah, tidak lebih berkualitas dan tidak lebih tetap pasokannya.

Meningkatkan daya saing adalah dengan meningkatkan persaingan itu sendiri. Ini berarti perlakuan-perlakuan khusus harus ditinggalkan. Proteksi perlu ditiadakan segera ataupun bertahap. Pengembangan produk yang sukses adalah yang berorientasi pasar, ini berarti pemerintah daerah perlu mendorong pengusaha untuk selalu meningkatkan efisiensi teknis dan ekonomis. Peraturan perdagangan internasional harus diperkenalkan dan diterapkan. Perlu ada upaya terencana agar setiap pejabat pemerinah daerah mengerti peraturan-peraturan perdagangan internasional ini, untuk dapat mendorong pengusaha-pengusaha daerah menjadi pemain-pemain yang tangguh dalam perdagangan bebas, baik pada lingkup daerah, nasional maupun internasional.

e. Membentuk Ruang yang Mendorong Kegiatan Ekonomi

Membentuk ruang khusus untuk kegiatan ekonomi akan lebih langsung menggerakkan kegiatan ekonomi. Pemerintah daerah perlu berusaha mengantisipasi kawasan-kawasan mana yang dapat ditumbuhkan menjadi pusat-pusat perekonomian wilayah. Kawasan-kawasan yang strategis dan cepat tumbuh ini dapat berupa kawasan yang sudah menunjukkan tanda-tanda aglomerasi, seperti sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan; klaster industri, dsb. Kawasan cepat tumbuh juga dapat berupa kawasan yang sengaja dibangun untuk memanfaatkan potensi SDA yang belum diolah, seperti yang dulu dikembangkan dengan sistim permukiman transmigrasi. Kawasan-kawasan ini perlu dikenali dan selanjutnya ditumbuhkan dengan berbagai upaya pengembangan kegiatan ekonomi, seperti pengadaan terminal agribisnis, pengerasan jalan, pelatihan bisnis, promosi dan sebagainya. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh ini perlu dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan keterampilan, pengembangan usaha, dan penguatan keberdayaan masyarakat.

BAB X

STRATEGI PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DALAM MENINGKATKAN TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI

Awal tahun 1960-an Raul Prebisch berhasil membangun dan menyebarkan konsep Strategi Substitusi Impor. Strategi ini diilhami oleh suatu kondisi ketidakseimbangan antara negara maju (*centre*) dengan negara berkembang (*periphery*). Pola hubungan antara kedua kelompok negara ini adalah hubungan *dominan-tergantung*, dimana negara maju pada posisi dominan dan negara berkembang pada posisi tergantung. Pola hubungan semacam ini lebih menguntungkan negara maju, yang pada gilirannya semakin memperlebar kesenjangan ekonomi antara kedua negara. Untuk mempersempit kesenjangan ekonomi antara negara berkembang dan negara maju, Prebisch menganjurkan agar negara berkembang menerapkan strategi substitusi impor. Substansi utama dari strategi ini adalah mengembangkan industri manufaktur untuk kebutuhan pasar domestik dan melindungi barang-barang hasil produksi dalam negeri dengan berbagai hambatan.

Indonesia termasuk salah satu negara yang mengadopsi strategi ini. Strategi industrialisasi substitusi impor (ISI) yang diterapkan oleh pemerintahan orde baru terpusat pada pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari sebaran industri manufaktur, dimana lebih dari 80 persen industri manufaktur Indonesia berlokasi di pulau Jawa. Strategi industrialisasi substitusi impor ini diterapkan Indonesia hingga pertengahan dekade 1980. Selama strategi ISI diterapkan Indonesia telah berhasil mengubah struktur ekonominya, dari struktur ekonomi yang semula didominasi oleh sektor pertanian menjadi struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor industri manufaktur. Seiring dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mencapai tingkat yang cukup tinggi.

Perubahan struktur ekonomi dan tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai Indonesia pada masa itu terjadi pada level nasional; sedangkan pada level daerah, tidak semua daerah memperoleh manfaat dari strategi tersebut, terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa. Malah strategi yang diterapkan tersebut, secara bertahap telah memperlebar kesenjangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-pulau besar lainnya. Telah terbangun pula pola hubungan antara pulau Jawa dengan pulau-pulau lainnya dengan pola dominan-tergantung, dimana pulau Jawa (sebagai *centre*) pada posisi dominan dan pulau-pulau lainnya (sebagai *periphery*) pada posisi tergantung.

Era otonomi daerah (otoda), sekalipun masih dalam masa awal, hendaknya menjadi titik balik untuk mengubah pola hubungan dari dominan-tergantung menjadi pola saling tergantung secara berimbang. Semangat untuk mengubah pola hubungan antar daerah ini harus dibangun oleh pemerintah pusat dan daerah, yang disertai dengan upaya-upaya sistimatis dan sungguh-sungguh untuk mencapainya. Apabila pola hubungan antar daerah telah berubah menjadi saling tergantung secara berimbang, maka semua daerah akan memberikan kontribusi yang optimal terhadap pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi nasional sembari memperkecil kesenjangan ekonomi antar daerah.

Penggunaan basis wilayah provinsi atau gabungan provinsi memang dimungkinkan dalam mekanisme dekonsentrasi ketika itu. Disamping itu, pernah pula menerapkan teori pembangunan ekonomi daerah berbasis wilayah gabungan kota dan kabupaten yang berciri "nodalitas" yang disebut dengan Satuan Wilayah Pengembangan (SWP). Hanya saja penerapannya tidak secara utuh memilih satu teori atau kombinasi dari berbagai teori, dan dalam rencana aksinya (*action plan*) lebih didasarkan pada presepsi kebutuhan daerah dan bukan pada realitas kebutuhan dan potensi daerah.

Bukan rahasia lagi bahwa pola perkembangan ekonomi nasional tidak terfokus, sehingga berimbas pada pengembangan ekonomi daerah yang juga tidak terfokus. Tidak terfokusnya pengembangan ekonomi nasional maupun pembangunan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh perubahan-perubahan institusi, baik

pergeseran dari dekonsentrasi menjadi desentralisasi, maupun pergeseran fungsi-fungsi pada institusi pemerintahan Pusat. Selain itu, juga diwarnai oleh munculnya paradigma-paradigma baru yang dianggap sebagai solusi, seperti misalnya: pendekatan partisipatif, *pro bottom up planning*, *rural-urban linkages*, program pengentasan kemiskinan, *good governance*, pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM), serta pendekatan investasi dan kereksadanaan (*obligasi*, *borrowing system*, sekuritisasi aset) dan lain sebagainya.

Berbagai paradigma tersebut, atau mungkin bisa disebut sebagai *Schools of Thought* saat ini, diikuti oleh berbagai sponsor seperti dari UNDP (*Partnership for Local Economic Development*), World Bank (*City Development Strategy*), ADB (*Sustainable Capacity Building for Decentralization*), USAID (*Performance Oriented Regional Management Project*), dan bantuan bilateral lainnya seperti GTZ, JICA, CIDA. Namun demikian, berbagai program yang diselenggarakan oleh pihak sponsor tersebut, berjalan sendiri-sendiri, tidak saling terkait dan tidak saling mendukung menuju pada sasaran-sasaran LED, bahkan cenderung acak satu sama lain. Semua ini menengarai tidak adanya visi yang sama terhadap pengembangan ekonomi nasional, khususnya LED. Dengan demikian, tidak terdapat strategi untuk dipakai sebagai "payung" dari semua upaya yang ada.

Interaksi ekonomi antar daerah berlangsung melalui perdagangan antar daerah. Daerah yang memperoleh manfaat dari perdagangan tersebut adalah daerah yang nilai eksportnya lebih besar dari nilai impor. Besar kecilnya nilai ekspor tergantung pada harga dari jenis barang yang diekspor dan volume ekspor. Sementara itu, besarnya volume ekspor suatu wilayah tergantung pada tingkat kebutuhan wilayah pengimpor, baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan produksi. Besarnya kebutuhan impor suatu daerah untuk tujuan produksi, tergantung pada seberapa besar keterkaitan (*linkages*) antara sektor-sektor produksi di daerah pengimpor terhadap sektor-sektor produksi di daerah pengekspor.

Interlinkages, keterkaitan antar sektor antar daerah, menentukan pola ketergantungan ekonomi antar daerah.

Ketergantungan ekonomi antar daerah dapat dikelompokkan ke dalam tiga pola. *Pertama*, pola “dominan-tergantung” (*dependence*). Pola ini mempunyai ciri interaksi antara wilayah dominan dan wilayah yang tergantung, di mana wilayah dominan memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam interaksi ekonomi, bahkan cenderung mengeksploitasi wilayah yang tergantung untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi. Dengan demikian, pola ini akan menimbulkan ketimpangan ekonomi antarwilayah yang semakin besar. *Kedua*, pola “*centre-periphery*” (konsep *interdependence*), di mana sektor industri (modern) umumnya berada di wilayah perkotaan sebagai wilayah *centre* dan sektor primer (tradisional) yang umumnya berada di wilayah pedesaan atau pinggiran kota sebagai wilayah *periphery*. Pola ini menunjukkan bahwa wilayah *periphery* menghasilkan dan memasok bahan baku (input) ke wilayah *centre*, sehingga kemajuan ekonomi wilayah *centre* akan menarik kemajuan ekonomi wilayah *periphery* ke tingkat yang lebih maju. Hal yang serupa juga terjadi apabila ekonomi wilayah *periphery* mengalami pertumbuhan maka permintaan akan hasil produksi wilayah *centre* akan meningkatkan, yang kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah *centre*. Pola interaksi semacam ini pun tidak luput dari kemungkinan terjadinya kesenjangan ekonomi antarwilayah, manakala nilai tukar (*term of trade*) sektor primer semakin rendah. *Ketiga*, pola yang serupa dengan pola interaksi ekonomi antara sesama negara industri maju. Pola ini menunjukkan interaksi ekonomi antarwilayah yang saling menguntungkan secara berimbang.

Studi empirik yang berkaitan dengan interaksi ekonomi antar daerah di Indonesia, dilakukan oleh beberapa pihak dengan pembagian wilayah yang berbeda dan kurun waktu yang berbeda, namun menunjukkan fenomena kesenjangan ekonomi antar daerah di Indonesia yang serupa.

Wuryanto (1996) menggunakan model *Computable General Equilibrium* (CGE) membagi wilayah studi menjadi wilayah makro Jawa dan wilayah makro luar Jawa, dan setiap wilayah makro dibagi lagi menjadi wilayah mikro. Wilayah makro Jawa terdiri atas tiga wilayah mikro, yakni: Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Sedangkan wilayah makro luar Jawa terdiri atas empat wilayah mikro, yakni: Sumatera, Kalimantan, Sulawesi,

dan Pulau-pulau lainnya. Hadi (2001) menggunakan model *Interregional Accounting Matrix* (IRSAM) membagi wilayah studi menjadi Kawasan Barat Indonesia (meliputi Jawa dan Sumatera) dan Kawasan Timur Indonesia. Achjar et al (2003) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan pulau-pulau lainnya di Luar Jawa. Sedangkan Alim (2006) menggunakan model IRSAM dengan wilayah studi Jawa dan Sumatera.

Secara umum, hasil studi empirik sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan bahwa melebarnya kesenjangan ekonomi antar daerah antara lain bersumber dari hal-hal sebagai berikut:

1. Lebih dari 80 persen industri manufaktur yang didirikan di Indonesia berlokasi di Jawa, sekitar 12 - 13 persen di Sumatera, dan sisanya yang kurang dari 10 persen (antara 7-8 persen) berada di wilayah lainnya. Kontribusi nilai tambahnya kurang lebih sama dengan persentase sebaran industri tersebut;
2. Daerah-daerah Luar Jawa pada umumnya mengekspor produk-produk primer ke Jawa dan mengimpor produk-produk sekunder dari Jawa, dimana nilai impor daerah Luar Jawa jauh lebih besar daripada nilai eksportnya. Hal yang demikian, membuat neraca perdagangan daerah-daerah Luar Jawa mengalami defisit terhadap neraca perdagangan Jawa. Ketimpangan neraca perdagangan ini menjadi semakin parah manakala harga relatif produk-produk primer semakin rendah terhadap produk-produk sekunder.
3. Kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi di Luar Jawa sangat bergantung pada input yang berasal dari Jawa, sedangkan sebaliknya tidak. Hal ini mengakibatkan efek multiplier yang diterima perekonomian Jawa atas kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa sangat besar, sedangkan sebaliknya tidak. Dengan kata lain *spillover effect* yang ditimbulkan oleh kemajuan ekonomi daerah-daerah Luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih besar daripada sebaliknya.

Paling sedikit tiga hal tersebut di atas, merupakan penyebab utama kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa menjadi semakin melebar. Kesenjangan ekonomi antar daerah yang sangat ekstrim akan sangat mudah menimbulkan konflik, baik konflik vertikal maupun konflik horizontal, yang pada gilirannya akan mengakibatkan terpecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, upaya untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antar daerah secara sungguh-sungguh merupakan suatu keharusan. Implikasinya, prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional adalah mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa. Sesungguhnya, upaya serius pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, akan berdampak pada penyebaran penduduk, mengurangi tekanan pengangguran dan kemiskinan.

Perekonomian daerah adalah ekonomi terbuka. Ini berarti bahwa aktivitas ekspor-impor terjadi dalam perekonomian daerah. Ekspor-impor dalam pengertian ini mencakup jual-beli barang dan jasa dari satu daerah ke daerah lain, disamping dari dan ke negara lain. Tenaga kerja yang berdomisili di suatu daerah, tetapi bekerja dan memperoleh uang dari daerah lain termasuk dalam pengertian ekspor. Ekspor-impor antar daerah dalam satu negara tidak pernah mengalami hambatan (*barrier*) apapun seperti yang dikenal dalam perdagangan antar negara (hambatan tarif dan non-tarif).

Kegiatan ekonomi daerah dari sudut pandang konsep basis ekonomi, dikelompokkan ke dalam dua sektor, yakni sektor basis dan sektor non-basis. Sektor basis adalah semua kegiatan yang mendatangkan uang dari luar daerah (ekspor barang dan jasa). Sedangkan sektor non-basis adalah semua kegiatan ekonomi yang diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi lokal. Dari sudut pandang sektor non-basis, aktivitas sektor produksi meningkat kalau permintaan output (*demand*) meningkat. Sementara itu, permintaan terhadap hasil-hasil produksi tersebut tergantung pada pendapatan masyarakat setempat dan pendapatan masyarakat lokal tergantung pada permintaan input oleh sektor produksi setempat. Dengan demikian, sektor non-basis terikat terhadap kondisi pendapatan masyarakat lokal,

sehingga ekonomi daerah tidak bisa berkembang melebihi pertumbuhan alamiah daerah (tidak bebas tumbuh).

Sementara itu, dari sudut pandang sektor basis, permintaan output sektor produksi tidak hanya terbatas pada permintaan lokal tetapi juga oleh permintaan daerah lain (ekspor). Konsep basis ekonomi beranggapan bahwa permintaan terhadap input hanya dapat meningkat melalui perluasan permintaan terhadap output yang diproduksi oleh sektor basis (ekspor) dan sektor non-basis (lokal). Permintaan terhadap produksi sektor non-basis hanya dapat meningkat apabila pendapatan lokal meningkat. Namun, peningkatan pendapatan lokal ini akan terbatas apabila perekonomiannya hanya mengandalkan pada sektor non-basis. Sedangkan suatu perekonomian yang mampu mengembangkan dan meningkatkan sektor basis, maka sektor basis akan mendorong sektor non-basis sehingga pendapatan lokal akan meningkat melebihi peningkatan pendapatan lokal yang hanya mengandalkan sektor non-basis. Dengan demikian, ekspor daerah (regional) merupakan penentu dalam pembangunan ekonomi daerah.

Dalam pembangunan ekonomi negara-negara berkembang terdapat dua strategi yang menonjol, yaitu: strategi industriliasasi substitusi impor dan strategi promosi ekspor. Strategi industriliasasi substitusi impor berorientasi pada pasar lokal (domestik), yang disebut juga *inward looking strategy*, sedangkan strategi promosi ekspor disebut *outward looking strategy*. Negara-negara berkembang yang menerapkan *inward looking strategy* berakhir dengan kegagalan, termasuk Indonesia (meskipun pada dekade 1980 beralih ke strategi promosi ekspor, namun basis industrinya masih lemah). Sedangkan negara-negara berkembang yang menerapkan *outward looking strategy* mencapai sukses dalam pembangunan ekonominya, seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, dan Singapura.

Dalam perdagangan dunia pasca GATT, negara-negara yang menikmati bagian terbesar dari keuntungan global adalah Amerika Serikat, Masyarakat Ekonomi Eropa, Jepang, dan Cina. Cina tidak tergolong ke dalam negara-negara industri maju, namun dapat menikmati bagian terbesar dari keuntungan global bersama-sama dengan negara-negara industri maju. Hal ini terjadi

karena Cina memiliki agroindustri yang cukup kuat disamping industri ringan lainnya, yang produk-produknya telah memasuki pasar dunia. Thailand juga menikmati keuntungan global karena agroindustri juga kuat.

Masalah pokok dalam pembangunan ekonomi daerah (*local economi development*) berada pada koridor neraca perdagangan daerah. Dengan demikian, pembangunan ekonomi daerah adalah pembangunan yang berpusat (fokus) pada perbaikan neraca perdagangan daerah (minimal tidak defisit).

Daerah-daerah yang ekspornya didominasi oleh komoditas primer dan industri pengolahannya sangat tergantung pada bahan baku impor, akan mengalami defisit neraca perdagangan. Keadaan yang seperti ini akan membuat perekonomian daerah tersebut akan semakin tertinggal dan kesenjangan ekonomi antar daerah akan semakin melebar. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi daerah haruslah berorientasi pada perbaikan neraca perdagangan daerah. Perbaikan neraca perdagangan daerah hanya dapat ditempuh melalui perubahan struktur ekspor dan struktur impor daerah. Upaya untuk mengubah struktur ekspor daerah berpangkal pada upaya meningkatkan nilai ekspor barang-barang yang sudah terolah melebihi nilai ekspor barang-barang primer. Sedangkan upaya untuk mengubah struktur impor daerah berpangkal pada upaya mengembangkan industri pengolahan berbasis bahan baku lokal. Ini berarti bahwa perubahan struktur ekspor-impor daerah baru akan terjadi manakala daerah-daerah berhasil mengembangkan agroindustri yang berorientasi ekspor. Dengan demikian, strategi pembangunan ekonomi daerah yang relevan adalah strategi agroindustri berorientasi ekspor.

Strategi pembangunan ekonomi daerah ini akan memperoleh tenaga yang besar apabila pemerintah pusat dapat memberikan dukungan penuh berupa penataan ulang strategi pembangunan nasional. Strategi pembangunan ekonomi nasional yang relevan adalah strategi promosi ekspor berbasis agribisnis. Mengapa agribisnis dipilih sebagai landasan pembangunan ekonomi daerah? Sekurang-kurangnya ada empat alasan pokok:

1. Indonesia memiliki potensi yang amat besar untuk mengembangkan agribisnis karena memiliki sumberdaya agroklimat dan keanekaragaman

sumberdaya hayati yang sangat besar dan terlengkap di dunia. Selain itu, potensi pasar juga besar, baik pasar domestik maupun pasar internasional.

2. Agribisnis pada dasarnya merupakan pemberdayaan keanekaragaman ekosistem yang terdapat di setiap daerah, sehingga pembangunan agribisnis tidak lain adalah pembangunan ekonomi pada setiap daerah.
3. Teknologi produksinya memiliki variasi yang sangat luas, mulai dari padat karya (*labor intensive*) sampai pada padat ilmu pengetahuan (*knowledge intensive*), sehingga mampu mengakomodasi tenaga kerja dari berbagai jenjang dan latar belakang pendidikan,
4. Pembangunan agribisnis yang berbasis sumberdaya lokal tidak terlalu menuntut pembiayaan dengan utang luar negeri yang besar, bahkan dapat menghasilkan devisa dan memupuk cadangan devisa.

Dengan demikian, apabila agribisnis dibangun dengan baik dan sungguh-sungguh, akan mampu mewujudkan pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di setiap daerah. Agribisnis merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat *subsistem saprotan* (penyediaan sarana produksi pertanian), subsistem budidaya, subsistem agroindustri, dan subsistem pemasaran. Penerapan konsep agribisnis hanya akan dapat memberikan hasil optimal apabila keseluruhan subsistemnya telah terintegrasi secara padu ke dalam satu wadah. Oleh karena itu, apabila pemerintah pusat telah berketetapan memilih strategi promosi ekspor berbasis agribisnis sebagai strategi pembangunan nasional, maka salah satu langkah yang mesti ditempuh adalah melakukan reorganisasi pada departemen teknis. Reorganisasi yang dimaksud adalah merubah nama dan fungsi Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, dan Departemen Kelautan dan Perikanan menjadi Departemen Agribisnis Pertanian, Departemen Agribisnis Kehutanan, dan Departemen Agribisnis Kelautan dan Perikanan. Tentunya fungsi dan peranan dari sejumlah departemen yang terkait akan mengalami perubahan, yakni: subsistem agroindustri dan subsistem pemasaran yang selama ini berada pada

departemen-departemen lain, mesti dipisahkan dan diintegrasikan kepada ketiga departemen yang disebutkan di atas.

apabila strategi promosi ekspor berbasis agribisnis berjalan dengan baik, maka laju pertumbuhan ekonomi daerah akan tinggi dan merata di seluruh wilayah. Dengan demikian, perekonomian daerah-daerah akan memberikan kontribusi secara optimal kepada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, kesenjangan ekonomi antar daerah juga akan bisa diminimumkan, serta meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi tingkat kemiskinan.

BAGIAN III
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT

BAB XI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SUATU PENGANTAR

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Dua kecenderungan tersebut memberikan (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu. Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut (Ife, 1996 : 59):

1. Struktural, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. Pluralis, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu "*rule of the game*" tertentu.

3. Elitis, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. Post-Strukturalis, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Hakikat dari konseptualisasi empowerment berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab.

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat *“people centred, participatory, empowering, and sustainable”* (Chambers, 1995). Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu. Konsep ini berkembang dari upaya banyak ahli dan praktisi untuk mencari apa yang antara lain oleh Friedman (1992) disebut sebagai *alternative development*, yang menghendaki *“inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity”* (Kartasasmita, 1997 : 55).

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang

dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Dalam upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu;

Pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian

pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi.

Friedman (1992) menyatakan *“the empowerment approach, which is fundamental to an alternative development, places the emphasis on autonomy in the decision making of territorially organized communities, local self-reliance (but not autarchy), direct (participatory) democracy, and experiential social learning”*.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan

masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasinkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan.

Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan abuse dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri.

Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep

dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkuat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*.

Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkuat di “batang” atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naive paradigm*.

Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka struktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya.

Konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*. Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalah-pahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran

kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum powerless untuk memperoleh surplus value sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh surplus value dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik.

Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul(1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik.

Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal. Berikut adalah

salah satu contoh problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya dalam bidang akses faktor produksi modal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas.

Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan. Contoh yang lebih umum dari problem spesifik yang dihadapi masyarakat tunadaya. Seperti diketahui bahwa salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah.

Rendahnya gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* rendah, tidak disiplin). Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui *affirmative action* (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana

dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar masyarakat tunadaya tidak memiliki usaha, atau walaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau kemampuan sumberdaya manusia dan distribusi (baik pada pasar input maupun pada pasar output atau pasar barang). Keempat kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif.

Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik.

Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun uraian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan menurut birokrasi pemerintah. Dari berbagai tulisan Sumodiningrat (1999), konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar price taker; (3) pelayanan pendidikan dan kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.
6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang

ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

Kekurangtepatan pemilihan strategi pembangunan terhadap negara dan masyarakatnya telah menghasilkan paradoks dan tragedi pembangunan seperti yang terjadi pada negara sedang berkembang sebagai berikut:

1. Pembangunan tidak menghasilkan kemajuan, melainkan justru semakin meningkatkan keterbelakangan (*the development of underdevelopment*).
2. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) negara sedang berkembang terhadap negara maju.
3. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) *pheriphery* terhadap *center*.
4. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat terhadap negara/pemerintah.
5. Melahirkan ketergantungan (*dependency*) masyarakat kecil (buruh, usaha kecil, tani, nelayan dan lain-lain) terhadap pemilik modal.

Pada pokoknya, pendekatan konvensional ini ditandai oleh transplantatif *planning, top down, inductive, capital intensive, west-biased technological transfer*, dan sejenisnya. Beberapa paradigma pendekatan pembangunan mulai mengalami pergeseran dari yang konvensional menuju pembangunan alternatif, yaitu:

1. Pembangunan wilayah (*regional development*).
2. Pembangunan berwawasan lingkungan (*environmental development*).
3. Pembangunan berbasis komunitas (*community-based development*).
4. Pembangunan berpusat pada rakyat (*people-centered development*).
5. Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*).
6. Pembangunan berbasis kelembagaan (*institution-based development*).

Ciri mencolok yang membedakan pendekatan alternatif ini adalah penekanannya terhadap lokalitas, baik dalam pengertian kelembagaan, komunitas, lingkungan, maupun kultur. Implikasi kebijakan pendekatan ini adalah penekanan pada *transformative and transactive planning, bottom up, community empowerment*, dan *participative*, semuanya ini terkenal dengan pembangunan komunitas (*community development*).

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut:

Pertama, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Kedua, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Ketiga, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumberdaya juga lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konskuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

Pemahaman tentang masalah pemberdayaan masyarakat memerlukan sikap subyektif dalam penelitiannya. Subyektifitas ini bertolak dari sikap dasar, bahwa setiap penelitian tentang suatu masalah sosial selalu dilakukan untuk memperbaiki situasi sosial yang ada, untuk meluruskan ketimpangan yang ada dan bukan hanya untuk sekedar melukiskan serta menerangkan kenyataan yang ada (Buchori, 1993).

Tidak ada penelitian sosial yang akan dapat mendatangkan perbaikan terhadap kondisi sosial yang ada selama para peneliti menempatkan diri mereka sebagai pakar yang

berdiri di luar kenyataan sosial yang diteliti, dan memperlakukan warga masyarakat yang sedang diteliti sebagai obyek yang hanya menjalani kenyataan sosial yang ada secara pasif. Para peneliti harus menempatkan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang sedang diteliti dan memandang warga masyarakat yang sedang diteliti sebagai subyek yang mempunyai hak moral untuk mengatur kehidupan mereka, serta mempunyai keinginan dan kemampuan untuk berbuat demikian.

Dalam kerangka ini, menjadi kewajiban moral para peneliti untuk memahami aspirasi masyarakat yang diteliti, dan mendampingi secara mental dan intelektual warga masyarakat yang diteliti dalam usaha mereka untuk mendatangkan perbaikan yang mereka dambakan. Dengan demikian, dalam penelitian semacam ini masalah penelitian tidak dapat dipisahkan dari masalah evaluasi. Keputusan untuk meneliti suatu masyarakat dengan tujuan untuk mendatangkan perbaikan ke dalam masyarakat itu, melalui antara lain pemberdayaan masyarakat, sudah merupakan suatu hasil evaluasi.

Untuk melaksanakan evaluasi apakah proyek yang telah dilaksanakan selama jangka waktu tertentu telah sungguh mendatangkan perbaikan yang sesuai dengan harapan warga masyarakat, perlu dilakukan suatu penelitian. Dua metoda penelitian evaluatif yang bersifat *bottom-up* adalah *rapid rural appraisal* (RRA), dan *participatory rural appraisal* (PRA).

Metoda RRA digunakan untuk pengumpulan informasi secara akurat dalam waktu yang terbatas ketika keputusan tentang pembangunan perdesaan harus diambil segera. Dewasa ini banyak program pembangunan yang dilaksanakan sebelum adanya kegiatan pengumpulan semua informasi di daerah sasaran. Konsekuensinya, banyak program pembangunan yang gagal atau tidak dapat diterima oleh kelompok sasaran meskipun program-program tersebut sudah direncanakan dan dipersiapkan secara matang, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam penyusunan prioritas dan pemecahan masalahnya.

Pada dasarnya, metoda RRA merupakan proses belajar yang intensif untuk memahami kondisi perdesaan, dilakukan berulang-ulang, dan cepat. Untuk itu diperlukan cara kerja yang khas, seperti tim kerja kecil yang bersifat multidisiplin,

menggunakan sejumlah metode, cara, dan pemilihan teknik yang khusus, untuk meningkatkan pengertian atau pemahaman terhadap kondisi perdesaan. Cara kerja tersebut tersebut dipusatkan pada pemahaman pada tingkat komunitas lokal yang digabungkan dengan pengetahuan ilmiah.

Komunikasi dan kerjasama diantara masyarakat desa dan aparat perencana dan pelaksana pembangunan (*development agent*) adalah sangat penting, dalam kerangka untuk memahami masalah-masalah di perdesaan. Di samping itu, metoda RRA juga berguna dalam memonitor kecenderungan perubahan-perubahan di pedesaan untuk mengurangi ketidakpastian yang terjadi di lapangan dan mengusulkan penyelesaian masalah yang memungkinkan.

Menurut James Beebe (1995), metoda RRA menyajikan pengamatan yang dipercepat yang dilakukan oleh dua atau lebih pengamat atau peneliti, biasanya dengan latar belakang akademis yang berbeda. Metoda ini bertujuan untuk menghasilkan pengamatan kualitatif bagi keperluan pembuat keputusan untuk menentukan perlu tidaknya penelitian tambahan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan. Metoda RRA memiliki tiga konsep dasar yaitu; (a) perspektif sistem, (b) triangulasi dari pengumpulan data, dan (c) pengumpulan data dan analisis secara berulang-ulang (*iterative*).

Konsepsi dasar pandangan PRA adalah pendekatan yang tekanannya pada keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan kegiatan. Metoda PRA bertujuan menjadikan warga masyarakat sebagai peneliti, perencana, dan pelaksana program pembangunan dan bukan sekedar obyek pembangunan. Kritik PRA terhadap pembangunan adalah bahwa program-program pembangunan selalu diturunkan "dari atas" (*top down*) dan masyarakat tinggal melaksanakan. Proses perencanaan program tidak melalui suatu "penjajagan kebutuhan" (*need assesment*) masyarakat, tetapi seringkali dilaksanakan hanya berdasarkan asumsi, survei, studi atau penelitian formal yang dilakukan oleh petugas atau lembaga ahli-ahli penelitian. Akibatnya program tersebut sering tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tidak adanya rasa memiliki terhadap program itu. Dengan PRA, yakni dengan partisipasi masyarakat keadaan itu diperbaiki dan juga keterampilan-keterampilan analitis dan perencanaan dapat

dialihkan kepada masyarakat. Dengan demikian secara bertahap ketergantungan pada pihak luar akan berkurang dan pengambilan prakarsa dan perumusan program bisa berasal dari aspirasi masyarakat (*bottom up*).

Metoda PRA didasarkan pada penyempurnaan dan modifikasi dari metoda AEA (*Agroecosystems Analysis*) dan RRA (*Rapid Rural Appraisal*) yang dilakukan oleh kalangan LSM dan peneliti yang bekerja di wilayah Asia dan Afrika. Walaupun ada beberapa kesamaan antara metoda PRA dan RRA, tetapi ada perbedaan secara mendasar. Metoda RRA penekannya adalah pada kecepatannya (*rapid*) dan penggalian informasi oleh orang luar. Sedangkan metoda PRA penekannya adalah pada partisipasi dan pemberdayaan.

Menurut Chambers (1987) PRA lebih cocok disebut sebagai metoda dan pendekatan-pendekatan jamak daripada metoda dan pendekatan tunggal, dan PRA adalah menu yang menyajikan daftar metoda dan teknik terbuka dan beragam. Dengan penekanannya pada partisipasi, maka metoda PRA mempunyai prinsip-prinsip: belajar dari masyarakat, orang luar sebagai fasilitator dan masyarakat sebagai pelaku, saling belajar dan saling berbagi pengalaman, keterlibatan semua kelompok masyarakat, bebas dan informal, menghargai perbedaan dan triangulasi.

Metoda PRA dibangun berdasarkan (a) kemampuan-kemampuan masyarakat desa setempat, (b) penggunaan teknik-teknik fasilitatif dan partisipatoris, dan (c) pemberdayaan masyarakat desa setempat dalam prosesnya (Khan and Suryanata, 1994).

Metoda PRA pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi 4 (empat) macam proses, yaitu: (1) appraisal dan perencanaan secara partisipatoris, (2) pelaksanaan, pemantauan, evaluasi program secara partisipatoris, (3) penyelidikan berbagai topik (seperti; manajemen sumberdaya alam, keamanan pangan, kesehatan, dan lain-lain), (4) pelatihan dan orientasi untuk peneliti dan masyarakat desa.

Alat-alat yang digunakan dalam metoda PRA serupa dengan yang digunakan dalam metoda RRA, tetapi berbeda dalam tingkat partisipasi dari masyarakat desa dalam praktik di

lapangan. Tidak seperti dalam RRA, masyarakat desa yang dilibatkan dalam PRA memainkan peran yang lebih besar dalam pengumpulan informasi, analisis data dan pengembangan intervensi seperti pada program-program pengembangan masyarakat yang didasarkan pada pengertian terhadap program secara keseluruhan. Proses ini akan memberdayakan masyarakat dan memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan kegiatan dalam memecahkan masalah mereka sendiri yang lebih baik dibanding dengan melalui intervensi dari luar.

Untuk mengetahui seberapa jauh pemberdayaan masyarakat telah berhasil, perlu ada pemantauan dan penetapan sasaran, sejauh mungkin yang dapat diukur untuk dapat dibandingkan. Pemberdayaan masyarakat dengan sendirinya berpusat pada bidang ekonomi, karena sasaran utamanya adalah memandirikan masyarakat, di mana peran ekonomi teramat penting. Cara mengukurnya telah banyak berkembang, seperti yang antara lain telah disebut di atas indeks gini, jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan, jumlah desa miskin, peranan industri kecil, nilai tukar pertanian, upah minimum dan sebagainya.

Pembangunan manusia yang berkualitas bukan hanya menyangkut aspek ekonominya, tetapi juga sisi lainnya, yaitu pendidikan dan kesehatannya. Di bidang ini, juga telah banyak ukuran dikembangkan antara lain persentase penduduk yang buta aksara, angka partisipasi sekolah untuk SD, SLTP, SLTA dan perguruan tinggi, angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup, persentase penduduk yang kurang gizi, dan rata-rata umur harapan hidup. Selain itu juga sedang dikembangkan oleh Bappenas bersama BPS semacam angka indeks kesejahteraan rakyat yang menggabungkan indikator ekonomi, kesehatan, dan pendidikan ke dalam suatu angka indeks. Di dunia internasional indeks kesejahteraan semacam ini telah dikembangkan oleh UNDP yang dikenal dengan nama *Human Development Index* (HDI) seperti telah dikemukakan di atas.

Manusia juga harus mempersiapkan diri untuk kehidupan abadi melalui pembangunan spiritual, sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat, dalam rangka membangun masyarakat berakhlak. Terkait dengan itu adalah pembangunan budaya, yakni untuk menciptakan, di atas budaya yang menjadi

jati diri bangsa Indonesia, sikap budaya kerja keras, disiplin, kreatif, ingin maju, menghargai prestasi dan siap bersaing. Ukurannya tentu sangat relatif dan terutama bersifat kualitatif.

Dalam pembangunan budaya perlu dikembangkan orientasi kepada ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemberdayaan teknologi, merupakan jawaban yang berjangkauan jauh ke depan dan berkesinambungan dalam membangun masyarakat yang maju, mandiri dan sejahtera. Pemberdayaan masyarakat harus pula berarti membangkitkan kesadaran dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakatnya. Masyarakat yang secara politik terisolasi bukanlah masyarakat yang berdaya, artinya tidak seluruh aspirasi dan potensinya tersalurkan. Maka, aspek politik juga terdapat dalam pemberdayaan masyarakat. Salah satu ukurannya, seperti indikator yang dikembangkan Dasgupta (1993), adalah hak berpolitik (mengikuti pemilu) dan hak sipil.

BAB XII

PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

A. Sejarah Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah terjemahan dari *empowerment*, sedang memberdayakan adalah terjemahan dari *empower*. Menurut Merriam Webster dan Oxford English Dictionary, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau authority to atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.

Beberapa literatur menyebutkan, bahwa konsep pemberdayaan sudah lahir sejak revolusi industri atau ada juga yang menyebut sejak lahirnya Eropa modern pada abad 18 atau zaman *renaissance*, yaitu ketika orang mulai mempertanyakan determinisme keagamaan. Kalau pemberdayaan dipahami sebagai upaya untuk keluar atau melawan diterminisme gereja serta monarki, maka pendapat bahwa gerakan pemberdayaan mulai muncul pada abad pertengahan barangkali benar.

Konsep pemberdayaan mulai menjadi diskursus pembangunan, ketika orang mulai mempertanyakan makna pembangunan. Di Eropa, wacana pemberdayaan muncul ketika industrialisasi menciptakan masyarakat penguasa faktor produksi dan masyarakat yang pekerja yang dikuasai. Di negara-negara sedang berkembang, wacana pemberdayaan muncul ketika pembangunan menimbulkan disinteraksi sosial, kesenjangan ekonomi, degradasi sumberdaya alam, dan alienasi masyarakat dari faktor-faktor produksi oleh penguasa.

Karena kekurangtepatan pemahanan mengenai pemberdayaan, maka dalam wacana praktik pembangunan, pemberdayaan dipahami secara beragam. Yang paling umum adalah pemberdayaan disepadankan dengan partisipasi. Padahal keduanya mengandung pengertian dan spirit yang tidak sama.

B. Konsep Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Konsep ini dibangun dari kerangka logik sebagai berikut: (1) bahwa proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat yang pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum, dan ideologi yang manipulatif untuk memperkuat dan legitimasi; dan (4) kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukum, sistem politik, dan ideologi, secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.

Akhirnya yang terjadi adalah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (*empowerment of the powerless*).

Pengalaman empirik dan pengalaman historis dari format sosial ekonomi yang dikotomis ini telah melahirkan berbagai pandangan mengenai pemberdayaan. Pandangan pertama, pemberdayaan adalah penghancuran kekuasaan atau *power to nobody*. Pandangan ini didasari oleh keyakinan, bahwa kekuasaan telah menterasingkan dan menghancurkan manusia dari eksistensinya. Oleh sebab itu untuk mengembalikan eksistensi manusia dan menyelamatkan manusia dari keterasingan dan penindasan, maka kekuasaan harus dihapuskan. Pandangan kedua, pemberdayaan adalah pembagian kekuasaan kepada setiap orang (*power to everybody*). Pandangan ini didasarkan pada keyakinan, bahwa kekuasaan yang terpusat akan menimbulkan *abuse* dan cenderung mengalienasi hak normatif manusia yang tidak berkuasa atau yang dikuasai. Oleh sebab itu, kekuasaan harus didistribusikan ke semua orang, agar semua orang dapat mengaktualisasikan diri. Pandangan ketiga, pemberdayaan adalah penguatan kepada yang lemah tanpa menghancurkan yang kuat. Pandangan ini adalah pandangan yang paling moderat dari dua pandangan lainnya. Pandangan ini adalah antitesis dari

pandangan *power to nobody* dan pandangan *power to everybody*. Menurut pandangan ini, *power to nobody* adalah kemustahilan dan *power to everybody* adalah chaos dan anarki. Oleh sebab itu menurut pandangan ketiga, yang paling realistis adalah *power to powerless*.

Ketiga pandangan tersebut di atas, kalau dikaji secara seksama, ternyata berpengaruh cukup signifikan dalam konsep dan praksis pemberdayaan. Di lapangan, paling tidak ada 3 konsep pemberdayaan. Konsep pertama, pemberdayaan yang hanya berkuat di “daun” dan “ranting” atau pemberdayaan konformis. Karena struktur sosial, struktur ekonomi, dan struktur ekonomi sudah dianggap *given*, maka pemberdayaan adalah usaha bagaimana masyarakat tunadaya harus menyesuaikan dengan yang sudah *given* tersebut. Bentuk aksi dari konsep ini merubah sikap mental masyarakat tunadaya dan pemberian santunan, seperti misalnya pemberian bantuan modal, pembangunan prasarana pendidikan, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *magical paradigm*. Konsep kedua, pemberdayaan yang hanya berkuat di “batang” atau pemberdayaan reformis. Artinya, secara umum tatanan sosial, ekonomi, politik dan budaya, sudah tidak ada masalah. Masalah ada pada kebijakan operasional. Oleh sebab itu, pemberdayaan gaya ini adalah mengubah dari *top down* menjadi *bottom up*, sambil mengembangkan sumberdaya manusianya, menguatkan kelembagaannya, dan sejenisnya. Konsep ini sering disebut sebagai *naïve paradigm*. Konsep ketiga, pemberdayaan yang hanya berkuat di “akar” atau pemberdayaan struktural. Karena tidak berdayanya masyarakat disebabkan oleh struktur politik, ekonomi, dan sosial budaya, yang tidak memberi ruang bagi masyarakat lemah untuk berbagi kuasa dalam bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka struktur itu yang harus ditinjau kembali. Artinya, pemberdayaan hanya dipahami sebagai penjungkirbalikan tatanan yang sudah ada. Semua tatanan dianggap salah dan oleh karenanya harus dihancurkan, seperti misalnya memfasilitasi rakyat untuk melawan pemerintah, memprovokasi masyarakat miskin untuk melawan orang kaya dan atau pengusaha, dan sejenisnya. Singkat kata, konsep pemberdayaan masyarakat yang hanya berkuat pada akar adalah

penggulingan *the powerful*. Konsep ketiga ini sering disebut sebagai *critical paradigm*.

Oleh Pranarka dan Moelyarto (1996), karena kesalahpahaman mengenai pemberdayaan ini, maka menimbulkan pandangan yang salah, seperti bahwa pemberdayaan adalah proses penghancuran kekuasaan, proses penghancuran negara, dan proses penghancuran pemerintah.

Menurut Karl Marx, pemberdayaan masyarakat adalah proses perjuangan kaum *powerless* untuk memperoleh *surplus value* sebagai hak normatifnya. Perjuangan memperoleh *surplus value* dilakukan melalui distribusi penguasaan faktor-faktor produksi. Dan perjuangan untuk mendistribusikan penguasaan faktor-faktor produksi harus dilakukan melalui perjuangan politik. Kalau menurut Marx, pemberdayaan adalah pemberdayaan masyarakat, maka menurut Friedmann, pemberdayaan harus dimulai dari rumah tangga. Pemberdayaan rumah tangga adalah pemberdayaan yang mencakup aspek sosial, politik, dan psikologis. Yang dimaksud dengan pemberdayaan sosial adalah usaha bagaimana rumah tangga lemah memperoleh akses informasi, akses pengetahuan dan keterampilan, akses untuk berpartisipasi dalam organisasi sosial, dan akses ke sumber-sumber keuangan. Yang dimaksud dengan pemberdayaan politik adalah usaha bagaimana rumah tangga yang lemah memiliki akses dalam proses pengambilan keputusan publik yang mempengaruhi masa depan mereka. Sedang pemberdayaan psikologis adalah usaha bagaimana membangun kepercayaan diri rumah tangga yang lemah. Selain Karl Marx dan Friedmann, masih banyak pandangan mengenai pengertian pemberdayaan, seperti Hulme dan Turner (1990), Robert Dahl (1963), Kassam (1989), sen dan Grown (1987), dan Paul (1987), yang pada prinsipnya adalah bahwa pemberdayaan adalah penguatan masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi masa depannya, penguatan masyarakat untuk dapat memperoleh faktor-faktor produksi, dan penguatan masyarakat untuk dapat menentukan pilihan masa depannya.

Dari berbagai pandangan mengenai konsep pemberdayaan, maka dapat disimpulkan, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor

produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya. Karena persoalan atau isu strategis perekonomian masyarakat bersifat lokal spesifik dan problem spesifik, maka konsep dan operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat diformulasikan secara generik. Usaha memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat secara generik, memang penting, tetapi yang jauh lebih penting, adalah pemahaman bersama secara jernih terhadap karakteristik permasalahan ketidakberdayaan masyarakat di bidang ekonomi. Sebab dengan pemahaman yang jernih mengenai ini, akan lebih produktif dalam memformulasikan konsep, pendekatan, dan bentuk operasional pemberdayaan ekonomi masyarakat yang sesuai dengan karakteristik permasalahan lokal.

Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat lemah adalah dalam hal akses untuk memperoleh modal. Dalam pasar uang, masyarakat perdesaan baik yang petani, buruh, pengusaha mikro, pengusaha kecil, dan pengusaha menengah, terus didorong untuk meningkatkan tabungan. Tetapi ketika mereka membutuhkan modal, mereka diperlakukan diskriminatif oleh lembaga keuangan. Sehingga yang terjadi adalah aliran modal dari masyarakat lemah ke masyarakat yang kuat. Lembaga keuangan atas posisinya sebagai perantara, maka di dalamnya berbagi resiko dengan *borrowers*, memberikan informasi kepada *borrower*, dan menyediakan likuiditas. Kenyataan yang terjadi, kepada masyarakat lemah dan pengusaha kecil, perlakuan atas ketiga hal tersebut juga diskriminatif. Dan atas perlakuan yang tidak adil itu, masyarakat tidak memiliki kekuatan tawar menawar dengan pihak lembaga keuangan.

Salah satu dari tujuan akhir pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah meningkatnya pendapatan masyarakat lemah. Pendapatan masyarakat pada umumnya berasal dari dua anasir, yaitu dari upah/gaji dan dari surplus usaha. Dari anasir upah/gaji, pada umumnya masyarakat yang tunadaya hanya menerima upah/gaji rendah. Rendahnya

gaji/upah yang diterima masyarakat tunadaya ini disebabkan karena mereka pada umumnya memiliki keterampilan yang terbatas dan sikap mental yang buruk (*need achievement* rendah, tidak disiplin). Rendahnya keterampilan masyarakat tunadaya disebabkan karena akses atau kesempatan mereka untuk mendapatkan pelayanan pendidikannya pada umumnya buruk. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang cukup realistis untuk masyarakat pekerja yang tunadaya, adalah melalui *affirmative action* (misalnya subsidi pendidikan bagi masyarakat tunadaya) di bidang pendidikan. Untuk melakukan *affirmative action* bagi masyarakat tunadaya, maka pemerintah harus memiliki dana. Untuk mendapatkan dana dapat dilakukan melalui kebijakan fiskal, misalnya dengan pajak progresif.

Demikian pula dari anasir surplus usaha. Sebagian besar masyarakat tunadaya tidak memiliki usaha, atau walaupun memiliki, maka mereka menghadapi kendala dalam hal modal, dan atau tanah, dan atau kemampuan sumberdaya manusia, dan distribusi (baik pada pasar input maupun pada pasar output atau pasar barang). Keempat kendala ini saling berkaitan satu sama lain. Oleh sebab itu dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sisi surplus usaha, maka perlu ditangani secara komprehensif.

Penanganan kendala modal, kendala distribusi, dan kendala tanah tidak seluruhnya dapat dilakukan melalui pendekatan ekonomi semata. Karena banyak dimensi-dimensi politik yang harus ditangani. Oleh sebab itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan tanpa pemberdayaan politik dan kebijakan politik.

Tesis ini, apabila diterima, akan menuntut kepada kita semua, bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat harus menjadi komitmen dan kebijakan semua departemen. Sebab sekali lagi, dimensi yang harus ditangani dalam pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, bersifat multi. Sekarang bagaimana dengan konsep pemberdayaan ini dikalangan birokrasi pemerintah. Walaupun urian berikut tidak mewakili pemahaman birokrasi pemerintah secara keseluruhan, tetapi paling tidak dapat membantu kita untuk memahami konsep pemberdayaan

menurut birokrasi pemerintah, konsep pemberdayaan ekonomi secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat. Perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat adalah bahwa perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri. Pengertian rakyat adalah semua warga negara.
2. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.
3. Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi: (1) pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya; (2) penguatan kelembagaan; (3) penguasaan teknologi; dan (4) pemberdayaan sumberdaya manusia.
4. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.
5. Kebijakannya dalam pemberdayaan ekonomi rakyat adalah: (1) pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal); (2) memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*; (3) pelayanan pendidikan dan

kesehatan; (4) penguatan industri kecil; (5) mendorong munculnya wirausaha baru; dan (6) pemerataan spasial.

6. Kegiatan pemberdayaan masyarakat mencakup: (1) peningkatan akses bantuan modal usaha; (2) peningkatan akses pengembangan SDM; dan (3) peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Dari enam butir pokok mengenai konsep pemberdayaan masyarakat ini, dapat disimpulkan, bahwa: (1) pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan daun saja, atau cabang saja, atau batang saja, atau akar saja; karena permasalahan yang dihadapi memang ada pada masing-masing aspek; (2) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak cukup hanya dengan pemberian modal bergulir, tetapi juga harus ada penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat, penguatan sumberdaya manusianya, penyediaan prasarananya, dan penguatan posisi tawarnya; (3) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, harus dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi kuat; untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil usaha menengah, dan usaha besar adalah jalan yang harus ditempuh; (4) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah proses penguatan ekonomi rakyat menuju ekonomi rakyat yang kokoh, modern, efisien; dan (5) pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi, tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu, melainkan harus melalui pendekatan kelompok.

C. Implikasi Pemberdayaan Ekonomi

1. Efektivitas dan Efisiensi Program Pemberdayaan

Kita patut bergembira, karena dalam 5 tahun terakhir ini banyak sekali program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh banyak pihak, mulai dari pihak pemerintah, pihak swasta, maupun pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Ini indikasi, bahwa pemberdayaan sebagai paradigma baru pembangunan, telah menjadi komitmen dari semua komponen bangsa. Untuk

efektivitas dan efisiensi, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Beberapa hal dimaksud antara lain: (1) perlu ada kesamaan paham mengenai konsep pemberdayaan, sebab pada akhir-akhir ini berbagai program/proyek pembangunan diberi label pemberdayaan, walaupun sebenarnya justru mengingkari makna pemberdayaan; dan (2) perlu ada koordinasi antarlembaga dan bahkan dalam lembaga dalam gerakan pemberdayaan ini, sebab ditengarai ada banyak kegiatan/proyek yang saling tumpang tindih dan mirip satu sama lain dengan nama yang berbeda.

2. Penguasaan Faktor Produksi

Dari banyak program pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan, hampir tidak ada yang mencoba memasuki aspek yang cukup fundamental, yaitu aspek penguasaan faktor-faktor produksi oleh rakyat. Kalaupun ada umumnya pada faktor produksi modal. Untuk faktor produksi lahan (lahan pertanian, pertambangan, perikanan, kehutanan) masih belum disentuh. Kelangkaan atau ketidakberanian menyentuh aspek ini, barangkali disebabkan kandungan politik yang cukup tinggi. Apapun alasannya, aspek ini perlu mendapat perhatian dalam kerangka pemberdayaan ekonomi rakyat. Sebab pada dasarnya penguatan ekonomi rakyat adalah penguatan pemilikan (spesifikasi hak) atas faktor-faktor produksi. Tanpa memasuki aspek ini, maka pemberdayaan ekonomi rakyat, hanya akan menyentuh permukaannya saja.

3. Distorsi Konsep

Distorsi konsep dalam implementasi dan kebijakan adalah hal yang umum terjadi. Demikian juga dalam program pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi. Dilihat dari segi konsep umum, pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi cukup jelas dan logik. Tetapi ketika diimplementasikan, terjadi pendangkalan yang luar biasa. Ini terjadi karena beberapa hal, antara lain: (1) konsepnya sendiri masih bersifat umum, sehingga dipahami beragam oleh pelaksana atau penyusun program; dan (2) kendala administrasi, dimana setiap proyek harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, sedang dalam program pemberdayaan kadang-kadang sulit didamaikan

dengan persyaratan administrasi yang sudah baku. Oleh sebab itu, yang paling aman adalah, desain proyek harus menyesuaikan administrasi, bukan sebaliknya. Pemberdayaan masyarakat tanpa didukung dengan perubahan administrasi pembangunan, akan mengalami kesulitan untuk dilaksanakan.

4. Penguatan SDM

Hampir pada setiap program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia dijadikan salah satu komponennya. Tetapi juga hampir disemua program pemberdayaan, aspek pengembangan sumberdaya manusia ini hanya dilakukan ala kadarnya. Tidak ada usaha sistematis dan rencana strategis untuk pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pengembangan ekonomi rakyat. Oleh sebab itu, pengembangan sumberdaya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, harus mendapat penanganan yang serius. Sebab sumberdaya manusia adalah unsur paling fundamental dalam penguatan ekonomi rakyat.

5. Spesifik Lokasi dan Permasalahan

Karena permasalahan yang dihadapi masyarakat tunadaya bersifat spesifik, baik dari aspek lokasi maupun dari aspek permasalahan, maka tidak mungkin didesain program pemberdayaan yang bersifat generik. Realitanya, hampir semua program pemberdayaan ekonomi rakyat, didesain generik. Kesalahan yang paling fatal, yang selama ini dilakukan adalah, adanya anggapan bahwa permasalahan mendasar masyarakat tunadaya adalah permasalahan modal, oleh sebab itu setiap program pemberdayaan selalu ada komponen bantuan modal bergulir. Padahal anggapan itu tidak selalu benar. Akibatnya, banyak program-program pemberdayaan ekonomi rakyat yang hasilnya tidak menyentuh permasalahan pokoknya.

BAB XIII

PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Model Pembangunan Ortodok

Model pembangunan ortodok yaitu suatu formula dan kebijakan yang disusun dan didesakkan oleh korporasi internasional dari negara-negara industri untuk dilaksanakan oleh negara-negara miskin melalui apa yang disebut “menghapuskan kemiskinan” melalui “pembangunan ekonomi” dengan strategi “pertumbuhan ekonomi”. Yang mereka anggap sebagai kemiskinan dan keterbelakangan adalah “rendahnya pendapatan perkapita”. Jika pendapatan perkapita dapat ditingkatkan, menurut mereka masalah kemiskinan dan keterbelakangan akan terpecahkan. Menurut formula tersebut, pertumbuhan ekonomi diramu dengan beberapa komponen inti yakni: industrialisasi, peningkatan produktivitas pertanian melalui revolusi hijau, investasi modal lebih besar, kenaikan GNP, dan “*trickle down effect*”. Begitulah rumus Kuznets.

Setelah tiga dasawarsa terlampaui, ternyata, pertumbuhan ekonomi tidak disertai turunnya kemiskinan dan keterbelakangan, melainkan yang terjadi adalah sebaliknya. Bahkan kemiskinan massal selalu menjadi bagian tak terpisahkan dari pola pertumbuhan itu sendiri. Memang para elit tersebut acapkali berbicara tentang situasi “ketidakmerataan” namun menurut *Ibrahim Samater : (Dari Pertumbuhan ke Basic Need, Sebuah Evolusi Teori Pertumbuhan)*, hal tersebut hanyalah merupakan bagian dari upaya “menipu rakyat” karena yang terjadi sesungguhnya adalah mereka hanya bicara: “strategi-strategi pembangunan pertumbuhan” saja.

Formula “pertumbuhan” telah mengalami evolusi sebagai akibat dari kritik yang kuat terhadap situasi “ketidakmerataan”. Berbagai kritik tersebut menumbuhkan keyakinan pada lembaga-lembaga internasional dan para elit politik dan ekonomi negara ketiga yaitu bahwa model pembangunan ortodok yang mempercayakan pada pertumbuhan GNP tidak akan memberi

keuntungan kepada kaum miskin dinegara berkembang, dan juga tidak memberi keuntungan segera pada mereka. Oleh karena itu 'pertumbuhan haruslah dibarengi dengan pemerataan.

Setidak-tidaknya, selama tiga dasawarsa ini, model pembangunan di negara-negara ketiga (termasuk Indonesia) sangat dipengaruhi oleh 7 formula "pertumbuhan dan pemerataan" sebagai berikut:

1. *Emplyoment generation* (penyerapan tenaga kerja/padat karya).
2. *Redirecting investment* (pengerahan kembali Investasi secara besar-besaran).
3. *Meeting basic needs* (pemenuhan kebutuhan dasar).
4. *Human resource development* (pembangunan sumber daya manusia).
5. *Agricultural first developement* (pembangunan dengan mengutamakan pertanian).
6. *Integrated rural development* (pembangunan pedesaan terpadu).
7. *The new international economic order* (tata ekonomi dunia baru).

James Weaver, K.P. Jameson dan Richard N.Blue (Analisa Kritik terhadap Pendekatan Pertumbuhan dan Pemerataan) menyatakan bahwa meskipun tujuh formula "pertumbuhan dan pemerataan" memperluas perhatiannya pada upaya-upaya pemerataan, namun semuanya tetap saja masih belum mampu keluar dari pijakan dasar 'pertumbuhan' yakni tetap berusaha menjawab kebutuhan-kebutuhan material. Sebaliknya ketujuh formula tersebut sama sekali atau bahkan menghindari untuk menjawab dua kebutuhan lain yang sangat fundamental dalam kehidupan rakyat yaitu: *pertama* kebutuhan yang bersifat non material seperti: Hak asasi untuk kebebasan; keamanan; partisipasi, dan demokrasi. Pada masalah-masalah tersebut mereka tetap tidak peduli dan bahkan memberikan andil yang sangat besar terhadap terciptanya sistem sosial yang represif, menindas dan dominatif. *Kedua*, Mereka tidak saja menghindari untuk memikirkan struktur kekuasaan, tapi juga tidak menyangkutpautkan masalah dunia ketiga dengan negara kaya. Memang pernah terjadi kesepakatan internasional dimana 7

persen GNP negara kaya dituntut untuk disedekahkan pada negara miskin disamping adanya kesepakatan pengaturan untuk mengurangi kecurangan perdagangan internasional; tetapi struktur ekonomi dunia tetap saja tak berubah dimana dominasi negara-negara industri kaya tetap kuat atas netgara-negara miskin.

B. Strategi Dominasi Negara Kaya Atas Negara Miskin

Untuk mempertajam kerangka analisa terhadap masalah dominasi tersebut berikut ini akan dikemukakan suatu teori dominasi yang disebut teori "*discourse and power*" (ilmu pengetahuan dan kekuasaan). Arturo Escobar, Profesor Antropologi Pembangunan pada Smith College Northampton, USA, merumuskan bahwa penciptaan *discourse* (wacana) negara-negara industri (negara dominan) untuk mendominasi negara-negara miskin dilakukan melalui apa yang disebut "*deployment of development*" yang dilakukan melalui tiga tahapan penting yaitu: "*abnormalities, profesionalization of development atau tecnification of development dan Institutionalization of development*".

"*Abnormalities*" menunjuk pada suatu situasi dan kondisi yang tidak normal karena tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dikehendaki oleh pihak yang merasa normal. *Abnormalities* dilakukan dengan penciptaan isu mengenai negara-negara ketiga seperti terbelakang, primitif, tradisional, miskin, *underdevelopment*, kurang gizi, buta huruf, krisis, dan yang terakhir barangkali terorisme. Kondisi ini disebut kondisi "sakit" yang perlu disembuhkan oleh dokter. Isu ini merasuk sampai pada level komunitas yang paling bawah, bahkan rumah tangga dan individu sekalipun. Tahap ini disebut juga "*the progressive incorporation of problem*" dimana berbagai anggapan tentang masalah dikumpulkan dan disatukan.

Cara pertama ini dimaksudkan untuk melahirkan apa yang disebut "*a field of intervention of power*" dimana kebutuhan untuk memecahkan situasi yang tidak normal tersebut dirasakan karena itu ruang-ruang intervensi kekuasaan mulai terbuka.

"*Profesionalization of development*" atau *tecnification of development*", menunjuk pada suatu pengertian dimana situasi problem tersebut harus dipandang sebagai sesuatu yang spesifik

dan karena itu harus dipecahkan secara spesifik pula oleh orang/kelompok orang yang ahli. Dalam tahap ini berbagai konsep dikembangkan sebagai resep-sesep untuk menormalkan negara-negara ketiga. Para ahli dari negara industri bekerjasama memisahkan urusan *development* (pembangunan) dengan masalah politik (dalam arti luas) melalui pendirian pusat-pusat studi pembangunan, yang menjadi alat untuk mengeksplor gagasan-gagasan pembangunan ke negara-negara ketiga.

Cara ini dimaksudkan untuk melahirkan apa yang disebut "*a field of knowledge control*" yaitu dimana ilmu pengetahuan akan diperankan untuk mengontrol proses-proses sosial, ekonomi dan politik. Tujuan utamanya adalah bagaimana ekonomi mampu mengendalikan pembangunan secara efisien.

"*Institutionalization of development*" menunjuk pada pengertian penciptaan instrument-instrument pembangunan yang akan berfungsi sebagai aliran proses dominasi sosial, ekonomi dan politik. Institusionalisasi pembangunan itu diciptakan disemua level. seperti dibentuknya badan-badan/organisasi internasional (seperti UN, World Bank, IMF, IGGI, CGI, Paris Club, WTO), national (seperti Bappenas, Bapeda, LKMD, PKK, dan pusat-pusat penelitian serta lembaga-lembaga pembanguaan lainnya) sebagai aparat pembangunan.

Dengan tiga tahapan strategi "*deployment of development*" tersebut negara-negara industri maju telah mampu melakukan penetrasi, integrasi, pengelolaan, kontrol terhadap negara-negara ketiga dan penduduknya secara mendetail terutama sejak selesainya perang dunia kedua.

Wacana dan strategi "*development dan underdevelopment*" itu selanjutnya mendapat tempat yang sangat penting dinegara-negara ketiga bukan saja menjadi pengetahuan baru, tetapi juga kekuasaan baru dan keimanan baru, sehingga telah terjadi perubahan yang luar biasa yakni dari kepentingan dominasi Barat dan Amerika terhadap negara ketiga, berubah menjadi suatu teori yang memperoleh legitimasi filosofis dan berubah menjadi "isme' baru (*developmentalism*).

C. Paradigma Alternatif

Apa yang diperlukan sekarang ini adalah adanya model pembangunan yang sama sekali berbeda dari model ortodox.

Model alternatif ini disebut “transformasi struktural”. Model pembangunan transformasi struktural meletakkan prioritas pada kebutuhan-kebutuhan internal dari negara-negara berkembang itu sendiri untuk menjamin keberlangsungan pembangunannya baik secara ekonomi maupun lingkungan, yang menjamin perbaikan kondisi penduduk miskin.

Pendekatan pembangunan harus didasarkan atas “partisipasi” dari rakyat negara-negara miskin itu sendiri dan tidak diatur serta dikontrol oleh kekuatan-kekuatan eksternal lain, baik pembangunan yang berskala lokal, regional maupun nasional. The UN Economic Commission for Africa dalam “*alternative framework*”nya menyebut model pembangunan alternatif ini sebagai “*fundamental transformation of social, economic and political structure*” (perubahan fundamental dalam struktur sosial, ekonomi dan politik).

Pendekatan pembangunan yang baru ini menekankan pada prinsip “*equity* (keadilan), *participation* (partisipasi), dan *sustainability* (keberlanjutan). Komisi Selatan yang dipimpin oleh Julius Nyerere menyimpulkan bahwa “pembangunan yang benar harus menempatkan manusia sebagai pusatnya, dan di rancang untuk menjamin kepentingan sosial dan ekonomi rakyat itu sendiri.

Dinamika model pembangunan ortodox yang bertumpu pada “pertumbuhan ekonomi dan modernisasi” di utara tidaklah layak dan cukup menjadi penggerak untuk meningkatnya pertumbuhan secara berkelanjutan di selatan. Berdasarkan pengalaman koalisi NGO regional di utara maupun diselatan dengan proyek-proyek mereka yang disebut dengan “*local development inisiative*” merumuskan, bahwa keberhasilan pembangunan yang berhasil harus mendasarkan atas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Partisipasi rakyat dalam menentukan/memutuskan setiap kebijakan pembangunan.
2. Menghormati ilmu pengetahuan lokal, pengalaman praktis mereka dan budaya setempat.
3. Mengangkat keswadayaan rakyat melalui produksi-produksi konsumsi lokal.

4. Mengikuti keragaman sistem ekologi dan mengadaptasikan alternatif-alternatif pemecahan terhadap masalah-masalah ekonomi dan lingkungan.
5. Pendekatan-pendekatan yang fleksible, terpadu, dan multidimensi;

Model pembangunan yang berpusat pada manusia (*“people-oriented model of development”*) selama ini telah didesakkan sebagai pengganti/alternatif dari model ortodok yang ber-orientasi pada pertumbuhan (*“growth oriented”*) tersebut sehingga model ortodok tidak menjadi resep tunggal yang diterapkan dalam segala keadaan. Model alternatif ini menjamin fleksibilitas, tepat-guna secara lokal, dimana rakyat mendapatkan kesempatan baik untuk merumuskan masalah maupun menciptakan pemecahannya.

Pengalaman kerja-kerja NGO pada tingkat komunitas baik di utara maupun selatan telah menunjukkan keberhasilan dalam mengurangi kemiskinan dan dapat memperkuat posisi masyarakat. Sudah seharusnya lembaga-lembaga pembangunan internasional, lembaga-lembaga donor internasional, dan pemerintah baik di utara maupun selatan mengambil pelajaran dari keberhasilan-keberhasilan tersebut. Sampai saat ini kerjasama-kerjasama NGO internasional dan masyarakat sipil terus bergerak melakukan advokasi dan mendesakkan perubahan kebijakan pembangunan alternatif di semua level.

Salah satu faktor yang sangat penting dalam implementasi model pembangunan alternatif adalah adanya kesadaran baru akan pentingnya agenda dan cara-cara baru dalam riset dan pemberdayaan rakyat. Jika dalam model ortodok lebih menggunakan prinsip *“essentialism”* dan *“economic determinism”*, maka dalam model alternatif lebih cenderung mendasarkan pendekatan *“multidisipliner”* dan *“overdeterminism”* (Resnick dan Wolf). Kesadaran ini harus dibangun bersama dengan berbagai kekuatan dimana rakyat harus benar-benar menjadi pelaku aktif dari setiap perubahan melalui pendidikan yang membebaskan (freire) dan untuk ini mereka harus diorganisir untuk membangun kekuatan mereka sendiri (*community organizing*) (Alinsky). Pengorganisasian dan Pendidikan ini harus dilakukan oleh kelompok-kelompok progresif yang memiliki

ikatan historis terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh rakyat atau disebut *intellectual organic* oleh Gramsci. Rakyat harus secara terus menerus menentukan dan memrumuskan masalahnya, menentukan apa yang paling tepat untuk mengatasinya, serta menilai hasilnya yang oleh Lewin disebut *action research*.

D. Pengertian dan Hakikat Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) bukanlah istilah baru di kalangan LSM, akademisi, organisasi sosial kemasyarakatan, bahkan pemerintah sekalipun. Ia muncul hampir bersamaan dengan adanya kesadaran akan perlunya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Diasumsikan bahwa kegiatan pembangunan itu mestinya mampu merangsang proses pemandirian masyarakat (*self sustaining process*). Dan ada hipotesis bahwa tanpa partisipasi masyarakat niscaya tidak akan diperoleh kemajuan yang berarti dalam proses pemandirian tersebut.

Adanya gagasan bahwa partisipasi masyarakat itu seyogyanya merefleksikan pemandirian bukanlah tanpa alasan. Diasumsikan tanpa adanya pemandirian maka suatu bentuk partisipasi masyarakat itu tidak lain adalah proses mobilisasi belaka. Dalam tataran konseptual istilah pemberdayaan itu nampaknya tidak ada persoalan untuk dapat dicerna. Ia berkaitan erat dengan proses transformasi sosial, ekonomi, politik dan budaya. Per definisi, pemberdayaan ialah proses penumbuhan kekuasaan dan kemampuan diri dari kelompok masyarakat yang miskin/lemah, terpinggirkan, dan tertindas. Melalui proses pemberdayaan diasumsikan bahwa kelompok masyarakat dari strata sosial terendah sekali pun bisa saja terangkat dan muncul menjadi bagian dari lapisan masyarakat menengah dan atas. Ini akan terjadi bila mereka bukan saja diberi kesempatan akan tetapi mendapatkan bantuan atau terfasilitasi pihak lain yang memiliki komitmen untuk itu. Kelompok miskin di pedesaan misalnya, niscaya tidak akan mampu melakukan proses pemberdayaan sendiri tanpa bantuan atau fasilitasi pihak lain. Harus ada sekelompok orang atau suatu institusi yang bertindak sebagai pemicu keberdayaan (*enabler*) bagi mereka.

Pemberdayaan Masyarakat dengan demikian sama sekali berbeda dengan apa yang biasa disebut dengan pendekatan *karitatif* (memberi bantuan dengan dasar belas kasihan) dan pengembangan masyarakat (*community development*) yang biasanya berisi pembinaan, penyuluhan, bantuan teknis dan manajemen serta mendorong keswadayaan. Dua pendekatan ini biasanya berupa intervensi dari orang luar yang mengambil inisiatif, memutuskan dan melakukan sesuai pikirannya sendiri. Masyarakat "diikutkan" sebagai obyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai pembina, penyuluh, pembimbing dan pemberi bantuan.

Pemberdayaan adalah proses dari, oleh dan untuk masyarakat, di mana masyarakat didampingi/difasilitasi dalam mengambil keputusan dan berinisiatif sendiri agar mereka lebih mandiri dalam pengembangan dan peningkatan taraf hidupnya. Masyarakat adalah subyek pembangunan. Pihak luar berperan sebagai fasilitator.

Memahami konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan rakyat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Pemberdayaan masyarakat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat.

Pemberdayaan masyarakat dimasa sekarang mempunyai kendala yang sangat kompleks karena "rejim pertumbuhan" ala orde baru telah banyak menyisakan rancang bangun yang tidak ramah terhadap rakyat banyak disamping menimbulkan kerusakan yang dahsyat terhadap sumberdaya alam. Kesukaran lain yang juga akan dihadapi adalah menyangkut kesiapan teknis dari berbagai pihak terutama birokrasi/pemerintah dan legislatif karena mau atau tidak mau gagasan pemberdayaan rakyat harus dibarengi dengan perubahan kultural ditingkat perilaku politik terutama perilaku birokrasi dan legislatif (Sasono, 1998).

Berangkat dari pengertian diatas, dapatlah dimengerti bahwa hakikat pemberdeayaan adalah upaya melepaskan

berbagai bentuk dominasi budaya, tekanan politik, eksploitasi ekonomi, yang menghalangi upaya masyarakat menentukan masalahnya sendiri serta upaya-upaya mengatasinya.

E. Partisipasi sebagai Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Elemen dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah: partisipasi dan mobilisasi sosial (*social mobilisation*). Disebabkan lemahnya pendidikan, ekonomi dan segala kekurangan yang dimiliki, penduduk miskin secara umum tidak dapat diharapkan dapat mengorganisir diri mereka tanpa bantuan dari luar. Hal yang sangat esensial dari partisipasi dan mobilisasi sosial ini adalah membangun kesadaran akan pentingnya mereka menjadi agen perubahan sosial.

Partisipasi telah banyak ditafsirkan orang. Berbagai penafsiran itu antara lain: “dalam kaitannya dengan pembangunan pedesaan, partisipasi berarti melibatkan rakyat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pembagian manfaat dan keterlibatan mereka dalam upaya evaluasi program” (Cohen dan Uphoff, 1977). “Partisipasi adalah dikaitkan dengan upaya terorganisir untuk meningkatkan kontrol terhadap sumberdaya dan lembaga-lembaga pembuat kebijakan” (Pearse dan Stifel, 1979). “Partisipasi masyarakat adalah proses aktif yang dilakukan untuk mempengaruhi corak dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh masyarakat atas dasar pandangan yang menguntungkan bagi perbaikan kehidupan mereka, peningkatan pendapatan, perkembangan individu, dan keswadayaan atau nilai-nilai lain yang mereka hargai (Paul, 1987)”. “Partisipasi dapat diartikan sebagai proses pemberdayaan kelompok masyarakat yang tertinggal dan terpinggirkan. Pandangan ini didasarkan pada pengakuan atas perbedaan-perbedaan dalam kekuatan ekonomi dan politik diantara kelompok-kelompok dan klas sosial yang berbeda. Partisipasi dalam hal ini merupakan kreasi dari organisasi-organisasi kelompok miskin yang demokratis, independen dan mandiri” (Ghai, 1990). “Pembangunan yang partisipatif mencirikan kerjasama (*partnership*) yang didasarkan atas dialog diantara para pelaku, dimana semua agenda disusun bersama, dan pandangan lokal serta pangalaman-pengalaman asli dihormati dan di perjuangkan. Ini lebih merupakan negosiasi dari sekedar

dominasi dari kekuatan eksternal yang menyusun agenda proyek. Sehingga rakyat menjadi pelaku dan tidak sekedar penerima manfaat” (OECD, 1994). ”Partisipasi adalah sebuah proses dimana stakeholders mempengaruhi dan mengontrol inisiatif pembangunan, pengambilan keputusan dan sumberdaya yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka” (World Bank, 1994).

Dari penafsiran atas partisipasi tersebut, dapatlah di simpulkan bahwa situasi partisipatif akan dapat terjadi bila:

1. Manipulasi dapat dihindari dengan menjauhkan proses indoktrinasi dari yang kuat kepada yang lemah.
2. *Stakeholders* menginformasikan hak-haknya, tanggungjawabnya serta pandangan-pandangannya.
3. Ada komunikasi timbal balik dimana stakeholder mempunyai kesempatan untuk menyatakan perhatian dan pikirannya sungguhpun tidak mesti pikiran mereka akan digunakan.
4. *Stakeholder* berinteraksi untuk saling memahami untuk membangun konsensus melalui proses negosiasi.
5. Pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif.
6. Adanya pemahaman dan pembagian resiko diantara stakeholders.
7. Adanya kerjasama (*partnership*) untuk mencapai tujuan bersama.
8. Pengelolaan bersama (*self-management*) diantara stakeholders (diadopsi dari UNCDF, 1996)

F. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Uraian diatas memberikan penjelasan bahwa peristiwa pembangunan tidaklah cukup dipahami sebagai peristiwa ekonomi ansih. Setiap peristiwa pembangunan selalu memiliki dimensi ekonomi, politik, dan budaya. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa berbagai upaya yang hanya berdimensi ekonomi selalu menemui kegagalan dan tidak membawa perubahan yang cukup berarti.

Upaya pemberdayaan masyarakat merupakan jalan yang panjang dan penuh tantangan baik internal maupun eksternal. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan terhadap

rakyat yang tulus serta upaya yang sungguh-sungguh pemberdayaan masyarakat dapat dikembangkan.

Pemberdayaan masyarakat membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, legislatif, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga-lembaga pendidikan serta organisasi-organisasi non pemerintah. Cara kerja yang langsung berhubungan dengan masyarakat dilapis bawah memberikan peluang yang luas untuk menggerakkan dan melancarkan proses belajar masyarakat dalam membangun kehidupannya melalui kerja-kerja konkrit dan melalui uji coba-uji coba dalam skala mikro, kecil dan menengah. Dalam kaitan ini fasilitator pemberdayaan masyarakat memiliki peran penting dan strategis. Fasilitator bukanlah pekerja ansih yang bekerja dengan model “tukang” tetapi mereka adalah aktivis yang bekerja penuh komitmen dan kreativitas serta memiliki semangat tinggi membantu masyarakat belajar membebaskan dirinya dari segala bentuk dominasi yang memiskinkan dan dan membodohkan.

Tugas utama fasilitator pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan pembelajaran bagi masyarakat lokal untuk membangun tingkat kemandirian dalam menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bersamaan dengan itu, membangun kesadaran kritis masyarakat terhadap berbagai format ekonomi-politik yang berlangsung secara mapan dibarengi dengan memperkuat kemampuan masyarakat untuk berdialog sehingga mempunyai kapasitas transaksional dan diharapkan bisa mengambil posisi tawar yang kuat dengan kekuatan lain. Upaya-upaya itu harus disertai dengan menggalang kemampuan untuk membentuk aliansi strategis dengan kekuatan-kekuatan lain agar mampu mempengaruhi perubahan-perubahan kebijakan yang lebih menguntungkan bagi kehidupan mereka.

Berdasar uraian tersebut, maka upaya pemberdayaan masyarakat haruslah melibatkan beberapa pendekatan dan strategi sebagai berikut: memulai dengan tindakan mikro. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro – makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input dan policy reform* sebagai unsur utama pemberdayaan sehingga memiliki dampak yang lebih luas.

Membangun kembali kelembagaan rakyat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat. Peran serta masyarakat secara teknis membutuhkan munculnya kelembagaan sosial, ekonomi dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri.

Pengembangan kesadaran rakyat. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Yang diperlukan adalah tindakan politik yang berbasis pada kesadaran rakyat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan-kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Pendidikan alternatif dan kritis merupakan pendekatan yang sangat penting sebagai upaya membangun kesadaran rakyat.

Redistribusi sumberdaya ekonomi merupakan syarat pokok pemberdayaan rakyat. Redistribusi aset bukanlah sejenis hibah. Tapi merupakan keikutsertaan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumberdaya ekonomi nasional serta pendayagunaannya dengan segala resiko dan keuntungan yang akan dihadapi.

Menerapkan model pembangunan berkelanjutan. Sudah tidak jamannya lagi mempertentangkan pendekatan ekonomi dan lingkungan. Memperpanjang perdebatan masalah ini akan memperpanjang deretan kerusakan sumberdaya lingkungan yang mengancam terhadap proses pembangunan itu sendiri. Yang harus diwujudkan adalah setiap peristiwa pembangunan harus mampu secara terus menerus mengkonservasi daya dukung lingkungan. Dengan demikian daya dukung lingkungan akan dapat dipertahankan untuk mendukung pembangunan.

Kontrol kebijakan dan advokasi. Upaya menciptakan sistem ekonomi modern dan meninggalkan sistem ekonomi primitif (*primitive capitalisme*) haruslah didukung oleh berbagai kebijakan politik yang memadai oleh pemerintah. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung terhadap upaya pemberdayaan rakyat maka kekuasaan pemerintahan harus dikontrol. Setiap kebijakan yang bertentangan dengan upaya pemberdayaan rakyat haruslah diadvokasi. Untuk ini sangatlah

penting munculnya kelompok penekan yang melakukan peran kontrol terhadap kebijakan.

Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Ini merupakan upaya untuk menggerakkan gerbong ekonomi agar ekonomi rakyat kembali bergerak. Yang dimaksud produk strategis (unggulan) di sini tidak hanya produksi yang ada di masyarakat laku di pasaran, tetapi juga unggul dalam hal bahan baku dan teknis produksinya, serta memiliki keterkaitan sektoral yang tinggi.

Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar disamping keragaman model yang didasarkan atas keunggulan antara kawasan satu dengan lainnya. Lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.

Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan rakyat pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Pendidikan alternatif yang mampu mengembalikan kepercayaan diri rakyat serta dapat menggerakkan proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka sangat penting untuk dikembangkan.

Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan ekonomi strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Disamping itu jaringan strategis juga akan berfungsi sebagai media pembelajaran rakyat dalam berbagai aspek dan advokasi.

G. Peran Komunitas Riset dan Pemberdayaan Masyarakat

Beberapa isu strategis berikut mungkin penting untuk diperhatikan oleh komunitas riset dan pemberdayaan masyarakat:

1. Membangun wacana publik bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Hal ini penting mengingat dalam perubahan-perubahan kedepan situasi konflik akan terus mewarnai proses perubahan masyarakat dan hal ini tidak mungkin dihindari sebagai proses yang wajar menuju demokrasi.
2. Mengembangkan model pembangunan yang benar-benar berbasis pada sumberdaya lokal dan keilmuan lokal.
3. Membangun basis-basis pengembangan keilmuan yang benar-benar relevan bagi kebutuhan masyarakat disatu sisi dan dalam rangka merespon perubahan global yang sangat dinamis disisi lain.
4. Mengembangkan pusat-pusat belajar masyarakat (*community learning center*). Hal ini sangat penting kaitannya dengan penyiapan sumberdaya manusia.
5. Membantu pengembangan studi-studi kebijakan baik tingkat lokal, nasional maupun internasional dalam rangka policy reform.

Untuk dapat menggarap isu-isu strategis tersebut sangat diperlukan perubahan pandangan yang lebih terbuka dari komunitas riset dan pemberdayaan masyarakat untuk membangun kerjasama-kerjasama strategis dengan kekuatan-kekuatan lain seperti pemerintah, legislatif, pengusaha, organisasi-organisasi sosial, LSM baik pada level lokal, nasional maupun internasional.

Dalam kaitan dengan pengembangan partisipasi rakyat, komunitas riset dan pemberdayaan masyarakat harus benar-benar memahami konsep Participatory Research (PR), yang dikembangkan dari pengalaman "*popular Education*" dan "*grass-roots activism*" yang telah terbukti benar-benar bermanfaat. Dasar pemikiran PR adalah membangun kekuasaan rakyat ("*popular power*") yakni mekanisme investigasi untuk

membangun perlawanan terhadap kekuasaan (*"counter-power"*) dan perlawanan dominasi (*"counter domination"*) untuk menciptakan transformasi sosial dalam hubungannya dengan penciptaan ilmu pengetahuan rakyat (*"production of people knowledge"*). Gerakan pendidikan kritis ini lebih diarahkan untuk meningkatkan 'popular-power' sebagai jalan keluar masyarakat untuk membangun diri mereka sendiri (Faqih, 1993).

Dari pengalaman dalam program-program popular education, terutama yang banyak dilakukan oleh NGO di Asia dan Amerika Latin, dan Afrika, dapatlah dikemukakan disini bahwa proses-proses kegiatan-kegiatan tersebut antara lain meliputi:

1. Memulai dengan kegiatan kecil yang dianggap penting dan dapat dilakukan oleh rakyat.
2. Melalui kegiatan tersebut membangun kesadaran kritis dan pemberdayaan proses-proses belajar rakyat.
3. Membangun organisasi lokal dan memunculkan pemimpin-pemimpin lokal.
4. Mengatasi masalah-masalah ketidakadilan dan ketimpangan internal.
5. Mendorong kelompok-kelompok sosial untuk menentukan tujuan-tujuan dan rencana-rencana lebih jauh dan lebih besar.
6. Mengembangkan aksi-aksi penelitian kritis lebih luas.
7. Membangun kerjasama-kerjasama antar kelompok-kelompok lokal.
8. Membangun keterampilan komunikasi yang lebih luas.
9. Membangun jaringan dengan intelektual dan politik yang kritis dan memiliki kepedulian.
10. Meningkatkan kemampuan dalam mengontrol manipulasi dan penyimpangan-penyimpangan politik oleh penguasa.
11. Mengembangkan strategi-strategi politik.
12. Mempengaruhi dan mewarnai keputusan dan kebijakan.

Tahapan tersebut tidak senantiasa berjalan linier dan sistematis. Implementasinya sangat ditentukan oleh proses-proses yang diciptakan oleh masyarakat sendiri. Melalui tahapan tersebut, berdasarkan pengalaman telah mampu membuka ruang partisipasi dan demokratisasi lebih luas.

BAB XIV

SOCIAL CAPITAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (ekonominya) di banyak negara termasuk di Indonesia terlalu menekankan pentingnya peranan modal alam (*natural capital*) dan modal ekonomi (*economic capital*) modern seperti barang-barang modal buatan manusia, teknologi dan manajemen, dan sering mengabaikan pentingnya modal sosial seperti kelembagaan lokal, kearifan lokal, norma-norma dan kebiasaan lokal.

Meskipun secara sadar, pemberdayaan masyarakat (ekonomi) dirancang sebagai bagian dari pembangunan masyarakat, pada kenyataannya perkembangan ekonomi akan terlepas dan tidak berakar dengan masyarakat itu sendiri. Akibatnya, pemberdayaan masyarakat (ekonominya) yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat terasa asing bagi masyarakat itu sendiri, kurang memberi manfaat yang ujung-ujungnya menampilkan perkembangan ekonomi dualistik dan sarat dengan ketimpangan sosial ekonomi.

Dalam masyarakat Indonesia, cukup banyak nilai-nilai sosial (modal sosial) seperti budaya gotong royong, kelembagaan bagi hasil, berbagai bentuk kearifan lokal (*local wisdom*) yang dimiliki semua etnis, yang dapat dikembangkan sebagai bagian dari budaya ekonomi modern. Modal sosial telah teruji oleh sejarah sebagai mekanisme penting baik dalam upaya mencapai pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkerakyatan peranan modal sosial menjadi sangat penting diperhatikan

A. Pengertian Modal Sosial

Modal sosial adalah sumberdaya yang dapat dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru. Seperti diketahui bahwa sesuatu yang disebut sumber daya (*resources*)

adalah sesuatu yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi, disimpan dan diinvestasikan. Sumberdaya yang digunakan untuk investasi disebut sebagai modal.

Dimensi modal sosial cukup luas dan kompleks. Modal sosial berbeda dengan istilah populer lainnya yaitu modal manusia (*human capital*). Pada modal manusia segala sesuatunya lebih merujuk ke dimensi individu yaitu daya dan keahlian yang dimiliki oleh seorang individu. Pada modal sosial lebih menekankan pada potensi kelompok dan antar kelompok dengan ruang perhatian pada jaringan sosial, norma, nilai, dan kepercayaan antar sesama yang lahir dari anggota kelompok dan menjadi norma kelompok.

Bank Dunia (1999) mendefinisikan Modal Sosial sebagai sesuatu yang merujuk ke dimensi institusional, hubungan-hubungan yang tercipta, dan norma-norma yang membentuk kualitas dan kuantitas hubungan sosial dalam masyarakat. Modal Sosial bukan sekedar deretan jumlah institusi atau kelompok yang menopang kehidupan sosial, melainkan dengan spektrum yang lebih luas, yaitu sebagai perekat yang menjaga kesatuan anggota kelompok secara bersama-sama.

Eva Cox (1995) mendefinisikan Modal Sosial sebagai suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang di topang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifitas koordinasi dan kerjasama untuk keuntungan bersama. Francis Fukuyama (1995) lebih menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan, dan di dalamnya diikat nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipatuhi.

B. Unsur Pokok Modal Sosial

Inti telaah Modal Sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat dalam suatu entitas atau kelompok untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama. Kerjasama tersebut diwarnai oleh suatu pola interrelasi yang imbal balik dan saling menguntungkan, dan dibangun di atas kepercayaan yang ditopang oleh norma-norma dan nilai-nilai sosial yang positif dan kuat. Kekuatan tersebut akan maksimal jika didukung oleh semangat proaktif membuat jalinan

hubungan di atas prinsip-prinsip yang disepakati. Adapun unsur-unsur modal sosial, yaitu:

1. Partisipasi dalam suatu Jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

2. *Resiprocity*

Modal sosial senantiasa diwarnai oleh kecenderungan saling tukar-kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran ini bukanlah sesuatu yang dilakukan secara resiprokal seketika seperti dalam proses jual beli, melainkan suatu kombinasi jangka pendek dan jangka panjang dalam nuansa *altruism* (semangat untuk membantu dan mementingkan kepentingan orang lain). Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharpakan imbalan seketika. Dalam konsep Islam, semangat semacam ini disebut sebagai keikhlasan. Semangat untuk membantu bagi keuntungan orang lain. Imbalannya tidak diharapkan seketika dan tanpa batas waktu tertentu. Pada masyarakat, dan pada kelompok-kelompok sosial yang terbentuk, yang didalamnya memiliki tingkat modal social yang tinggi. Ini akan juga terefleksikan dengan tingkat kepedulian sosial yang tinggi, saling membantu dan saling memperhatikan. Pada masyarakat yang demikian, kemiskinan akan lebih memungkinkan dan kemungkinan lebih mudah diatasi. Begitu juga berbagai problema sosial lainnya akan dapat diminimalkan.

3. Rasa Percaya Diri

Rasa percaya diri (*trust*)(mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan bertindak

merugikan dari dan kelompoknya (Robert, 2002). Dalam pandangan Fukuyama (2002), *trust* adalah sikap saling mempercayai di masyarakat yang memungkinkan masyarakat tersebut saling bersatu dengan yang lain dan memberikan kontribusi pada peningkatan modal sosial.

Berbagai tindakan kolektif yang di dasari atas rasa saling mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai ragam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Kehancuran rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang hadirnya berbagai problematik sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki perasaan saling mempercayai akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas tenggelam dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah. Jika rasa saling mempercayai telah luntur maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku.

4. Norma Sosial

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Pengertian norma itu sendiri adalah sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh anggota masyarakat pada suatu entitas sosial tertentu. Norma-norma ini biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan. Aturan kolektif tersebut biasanya tidak tertulis tapi dipahami oleh setiap anggota masyarakat dan menentukan pola tingkah laku yang diharapkan dalam konteks hubungan sosial.

5. Nilai-nilai

Nilia adalah suatu yang dianggap benar dan penting oleh anggota masyarakat. Misalnya nilai harmoni, prestasi, kerja keras, kompetisi dan lainnya merupakan contoh nilai yang sangat umum dikenal dalam masyarakat. Nilai senantiasa memiliki kandungan

konsekuensi yang ambivalen. Nilai harmoni misalnya yang oleh banyak pihak dianggap sebagai pemicu keindahan dan kerukunan hubungan social yang tercipta, tetapi disisi lain dipercayakan pula untuk senantiasa menghasilkan suatu kenyataan yang menghalangi kompetisi dan produktifitas. Modal sosial yang kuat juga sangat ditentukan oleh konfigurasi yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat. Jika suatu kelompok memberikan bobot tinggi pada nilai-nilai kompetisi, pencapaian, keterusterangan dan kejujuran, maka kelompok masyarakat tersebut cenderung jauh lebih cepat berkembang dan maju dibandingkan pada kelompok masyarakat yang senantiasa menghindari keterusterangan, kompetisi dan pencapaian.

C. Peran Modal Sosial dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Modal sosial saat ini dipandang sebagai bumbu vital bagi perkembangan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Francis Fukuyama menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara bahwa modal social yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan alam jaringan yang lebih luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi.

Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Di sektor pertanian misalnya, upaya pemerintah untuk meningkatkan produksi seringkali mengalami kegagalan walaupun berbagai input modal telah mengucur ke pedesaan seperti pupuk, peralatan-peralatan modern, irigasi modern, dan berbagai fasilitas kredit yang melimpah. Tanpa mengabaikan beberapa tekanan struktural, misalnya yang bersumber dari disparitas yang tinggi atas penguasaan lahan, kegagalan meningkatkan produksi sangat berkait erat dengan spektrum Modal Sosial yang sangat lemah. Faktor ini sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Perubahan-perubahan iklim memang semakin menyulitkan petani untuk memprediksi waktu musim tanam yang tepat. Tetapi dari perubahan iklim ini pada tingkat kemasing-masing petani untuk memulai musim tanam semakin tinggi. Dewasa ini, walaupun di beberapa daerah belum terasa,

184| Pembangunan Ekonomi

kecenderungan untuk sendiri-sendiri memulai bercocok tanam padi tumbuh dan menjadi warna baru budaya di pedesaan. Antar individu dalam satu desa, kekompakan menurun dratis yang sekaligus merefleksikan hilangnya kohesifitas sosial di pedesaan.

Semangat gotong royong, tolong-menolong, dan saling ingat mengingatkan antar individu dalam suatu entitas masyarakat desa menurun dratis, bahkan lebih dari itu, hilangnya rasa dan semangat untuk saling memberi (*reciprocity*), rasa saling percaya (*trust*) dan menipisnya jaringan-jaringan sosial (*social networking*) di pedesaan.

Hilangnya kekompakan memulai bercocok tanam, member kesempatan besar bagi hama pengganggu untuk merusak tanaman pada penduduk. Tidak mengherankan jika banyak petani yang merasa putus asa menghadapi serangan belalang, tikus dan berbagai hama dan penyakit yang sangat merusak tanaman padi penduduk. Budaya dengan orientasi *inward looking* dan sulit menerima ide-ide pembaharuan yang berasal dari luar kelompok dan lingkungan social dari suatu entitas sosial telah menghambat masyarakat untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian nilai, norma, dan perilaku kelompok. Akibatnya, fasilitas kredit yang mengalir ke pedesaan, telah berlangsung selama lebih 30 tahun, namun hampir tidak banyak menolong mencapai tujuan-tujuan seperti yang diinginkan. Pada masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang lemah, dalam keterisolasian budaya, maka tradisi-tradisi, dalam hal ini terutama kaitannya dengan ritus-ritus tertentu, akan sangat sulit untuk menyesuaikan diri. Dana Kredit Usaha Tani (KUT) yang diterima digunakan untuk keperluan kenduri, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan konsumtif keluarga seperti membeli sepeda motor, membeli pakaian baru, memperbaiki rumah. Dana kredit yang diterima tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan adanya kredit itu sendiri.

Pembangunan industri, baik industri besar, sedang, maupun industri kecil akan mengalami hambatan di negara yang memiliki tingkat modal sosial yang rendah. Modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat, yang selanjutnya akan mendorong berkembangnya dunia usaha. Industri besar yang dimiliki para investor lokal maupun asing akan tumbuh dan berkembang di tengah

masyarakat yang memiliki tradisi dan nilai kejujuran (*trust*), terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi.

Modal sosial berpengaruh kuat pada perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya seperti sektor perdagangan, jasa, konstruksi, pariwisata dan beberapa yang lain. Apapun pembangunan ekonomi yang dilakukan, faktor *trust*, *reciprocity*, *positive externalities*, dan nilai-nilai etis merupakan penopang yang akan menentukan perkembangan dan keberlanjutan beragam aktifitas usaha di setiap sektor perekonomian.

Pemberdayaan masyarakat harus memasukkan dimensi modal social sebagai salah satu komponennya. Pemberdayaan masyarakat akan mengalami kegagalan tanpa menyadari pentingnya melibatkan dimensi kultural dan mendayagunakan peran modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat dalam mempercepat dan mengoptimalkan hasil dari proses pemberdayaan itu sendiri. Modal sosial yang berisikan *trust*, *reciprositas*, norma sosial dan nilai-nilai etis merupakan pondasi penopang yang akan menentukan perkembangan dan keberlanjutan beragam aktifitas usaha di berbagai sektor kehidupan.

BAGIAN IV
PENGEMBANGAN EKONOMI DAN
SUMBER DAYA BERBASIS KEKUATAN
LOKAL

BAB XV

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL

Pendekatan pembangunan berorientasi pertumbuhan yang selama ini menjadi “credo” negara-negara berkembang dalam mengejar ketertinggalannya dari negara-negara kapitalis maju, atau yang lebih dikenal dengan paradigma pertumbuhan, telah membawa sejumlah perubahan penting. Disamping berbagai prestasi yang berhasil dicapainya, tercatat sederatan persoalan pelik yang turut memperburuk citra pembangunan dengan orientasi di atas. Diantaranya adalah semakin panjangnya barisan kemiskinan, meningkatnya pengangguran, semakin beratnya beban hutang luar negeri yang harus ditanggung, masifikasi, undimensionalisasi, degradasi kualitas lingkungan hidup secara terus menerus, proses dehumanisasi tersamar yang nyaris tak terkontrol, dan masih banyak lagi. Untuk implikasi terkahir ini, apresiasi terhadap manusia hanya ditempatkan sebatas kontribusinya terhadap pembangunan (Tjokrowinoto, 1996:28; Tjokrowinoto, 1998:19). Pada tingkat yang paling nyata, terjadi eliminasi peran masyarakat disatu sisi dan dominasi negara di sisi lain. Tidak heran kalau partisipasi menjadi wacana sentral pembangunan selama beberapa dekade terakhir sebagai wujud kritik, sekaligus kontribusi terhadap upaya perombakan paradigma pembangunan menuju paradigma yang lebih manusiawi, tercerahkan dan menyentuh nilai-nilai mendasar dari pembangunan.

Munculnya upaya perombakan paradigma pembangunan serta implikasi-implikasi praktis yang mengikutinya selama beberapa dekade terkahir ini tidak terlepas dari peran serta agen-agen non-pemerintah, atau yang di tanah air populer dengan sebutan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan misi dan visinya yang agak berbeda untuk tidak mengatakan bertentangan dengan misi dan visi negara, kelompok tersebut menjadi aktor pembangunan alternatif, yang dengan agenda-agenda visionernya berusaha menggerogoti posisi dan peran dominan negara disatu sisi dan mengangkat eksistensi masyarakat disisi lain. Lembaga ini

188| Pembangunan Ekonomi

berusaha melakukan koreksi terhadap paradigma pembangunan yang diadopsi sebelumnya dengan fokus meletakkan negara pada peran yang sebenarnya dan masyarakat pada posisi yang seharusnya. Dengan agenda tersebut, LSM tidak jarang minimal dari sudut pandang negara menjadi kompetitor negara.

Salah satu nilai penting sekaligus kontroversial yang diperjuangkan LSM dalam kerangka perubahan diatas adalah pemberdayaan (*empowerment*). Isu tersebut menjadi isu dominan sejak sekitar dekade 1970-an walaupun bibit-biitnya sudah mulai tumbuh sejak beberapa dekade sebelumnya. Bersamaan dengan munculnya nilai-nilai baru dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya *good governance* (Grindle, 1998) atau *human governance* (Falk, 1997), tema tentang pemberdayaan masyarakat semakin aktual dan upaya untuk mewujudkannya merupakan tantangan pembangunan yang paling kontemporer. Tetapi mengapa pemberdayaan?

Pertanyaan diatas memiliki tingkat urgensi yang sangat tinggi jika realitas pembangunan dan implikasi yang ditimbulkannya sebagaimana terjadi selama ini menjadi pertimbangan utama. Para inisiator gagasan tersebut beranggapan bahwa pembangunan yang dijalankan selama ini telah mengeliminasi peran dan posisi masyarakat untuk secara utuh ditaklukkan dibawah dominasi dan hegemoni negara. Dalam kerangka kerja yang demikian, perhatian hanya akan difokuskan pada hitungan-hitungan ekonomi makro yang memang langsung berhubungan dengan legitimasi suatu pemerintahan. Implikasinya adalah tidak adanya jaminan sustainabilitas kebijakan. Masa depan kebijakan sepenuhnya bergantung pada inisiatif dan sumberdaya yang disediakan pemerintah. Orientasi yang bersifat *supply-driven* itu coba dirombak dengan meletakkan manusia pada pusat lingkaran konsentrik pembangunan, sedangkan dimensi-dimensi pembangunan lainnya (ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, lingkungan dan sebagainya) berperan sebagai pendukung realisasi eksistensi manusia. Dalam konteks yang demikian, manusia tidak hanya dilihat sebagai tujuan atau objek utama pembangunan tetapi juga sekaligus menjadi aktor sentral yang peran dan kontribusinya menentukan masa depan pembangunan itu sendiri. Dengan cara pandang seperti itu, kapasitas manusia mendapat prioritas utama, dan oleh karenanya

dijadikan semacam *moral benchmark*. Artinya, kinerja pembangunan hanya akan dinilai baik atau buruk sejauh dapat meningkatkan kapasitas manusia atau mengeliminasinya. Hal itu sejalan dengan pemikiran pembangunan kontemporer dimana pembangunan dilihat sebagai proses pengembangan kapasitas personal dan institusional untuk dapat memobilisasi dan mengelola sumberdaya yang dimiliki guna meningkatkan kualitas hidup yang sesuai dengan aspirasi masyarakat (Korten, 1990:67). Cara pandang inilah yang dipromosikan oleh para pendukung paradigma *People-Centered Development* atau *Capacity Building* yang muncul selama beberapa dekade terakhir ini.

Bagi Indonesia yang sedang giat melaksanakan pembangunan, wacana diatas sangat menarik dan telah direspons secara positif dalam berbagai paket pemabnguan dan kebijakan publik secara umum. Pemberdayaan menjadi "*trademark*" atapun jargon yang dapat dicontohkan pada agenda dan kegiatan apa saja. Kondisi ini, dalam batas-batas tertentu, telah menyebabkan reduksi makna pemberdayaan sekaligus membelokkan pemberdayaan dari orientasi awalnya. Dengan kata lain, pemberdayaan telah semakin kehilangan makna substantifnya bersamaan digunakannya konsep tersebut untuk berbagai situasi dan kondisi (Ife, 1996:56). Kecenderungan itu dapat dilihat dari beberapa paket pembangunan berisi pemberdayaan yang dijalankan selama ini, terutama oleh pemerintah pusat. Betapa banyak program pemberdayaan yang dijalankan namun berakhir dengan kegagalan. Atau pada kondisi lain, misi pemberdayaan yang diemban program-program tersebut justru bermuara pada semakin tidak berdayanya kelompok masyarakat yang seharusnya diberdayakan. Banyak kelompok target yang menjadi sasaran pemberdayaan justru menjadi korban dari program pemberdayaan itu sendiri. Kasus-kasus kegagalan Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) dan sejenisnya adalah contoh paling nyata yang merefleksikan kegagalan dan misorientasi kebijakan pemberdayaan masyarakat. Demikian halnya dengan beberapa program pemberdayaan lain yang dijalankan selama ini.

Selain itu, kegagalan kebijakan-kebijakan pemberdayaan juga disebabkan oleh tidak adanya pendekatan yang baik dan integral yang mampu menjamin sustainabilitas. Dalam konteks

itu, banyak pengamat menyakini bahwa intervensi kelembagaan merupakan salah satu jalan keluar yang menjanjikan (Rubin & Rubin, 1986). Dengan berbagai karakter inherennya, pendekatan ini mampu menjamin sustainability kebijakan apapun yang sedang dijalankan sejauh diintroduksi secara konsisten. Tuntutan ini sekaligus menjadi salah satu titik terlemah dalam berbagai program pemberdayaan yang dijalankan selama ini.

A. Permasalahan

Persoalan kontemporer dan paling fundamental dari pembangunan di Indonesia dalam kerangka pemberdayaan adalah bagaimana mengangkat kekuatan ekonomi lokal sebagai basis perekonomian nasional. Persoalan tersebut berkaitan dengan dua pertanyaan pokok, yaitu *pertama*, bagaimana peran dan kontribusi perekonomian lokal terhadap perekonomian nasional selama ini, dan *kedua*, bagaimana melakukan upaya optimalisasi atas peran dan kontribusi tersebut. Termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana mengelola potensi-potensi yang ada dan dimiliki oleh masyarakat, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun aset pengalaman (Haeruman, 2001). Pandangan transformatif melihat bahwa sebenarnya perekonomian lokal dapat memberikan kontribusi riil dalam porsi yang signifikan jika terdapat upaya serius pemerintah untuk mendayagunakan. Misalnya dengan membuka akses yang seluas-luasnya serta menciptakan iklim yang kondusif. Pandangan itu berangkat dari kenyataan bahwa pembangunan yang dijalankan selama ini telah menyebabkan marginalisasi terhadap perekonomian lokal, dan oleh karenanya, dibutuhkan upaya serius dan sungguh-sungguh untuk mengangkatnya kembali. Upaya inilah yang selama ini dikemas dalam paket pemberdayaan.

Isu pokok yang seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal adalah bagaimana membangun kapasitas itu sendiri sehingga mereka mampu mengelola potensi-potensi yang dimilikinya secara optimal. Kapasitas dimaksud pada gilirannya merupakan fungsi dari dan ditentukan oleh tingkat akses masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan langsung dengan pengembangan kemampuan ekonomi mereka dan iklim yang kondusif dimana mereka bekerja.

Secara lebih spesifik akses dimaksud berkaitan dengan akses terhadap sumberdaya ekonomi seperti modal, lokasi usaha atau lahan, informasi pasar, teknologi serta sarana dan prasarana produksi lainnya. Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, keterbatasan akses pada aspek-aspek perekonomian diatas telah membatasi peluang mereka untuk memperbaiki kondisi perekonomiannya. Hal itu dapat ditelusuri dari rendahnya tingkat penghasilan masyarakat yang dari waktu ke waktu belum menunjukkan dinamika yang cukup berarti.

Realitas keterbatasan diatas tidak dapat dilepaskan dari persoalan pada aspek lain yang juga turut menentukan yaitu rendahnya daya dukung kelembagaan (*institutional carrying-capacity*) dan organisasi manajerial sebagai prasyarat optimalisasi pengelolaan potensi atau sumberdaya perekonomian. Lemahnya daya dukung kelembagaan tersebut berimplikasi pada mudahnya nasib ekonomi masyarakat dipermainkan oleh fluktuasi pasar yang antara lain disebabkan oleh ulah para pelaku ekonomi yang kuat. Masa depan perekonomian masyarakat semakin terhimpit ditengah permainan kekuatan-kekuatan ekonomi besar disatu sisi serta rendahnya dukungan dan perlindungan regulatif negara disisi lain. Dalam kondisi tersebut, sangat masuk akal jika upaya pemberdayaan masyarakat mendapat prioritas penanganan, sedangkan negara dan aktor-aktor lainnya belum begitu banyak disentuh. Namun harus disadari bahwa pemberdayaan pada hakekatnya merupakan proses integral yang melibatkan semua dimensi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, institusi-institusi diluar masyarakat, yaitu negara dan kalangan swasta sebagai pilar penopang *good governance*, harus juga diberi perhatian.

Terpusatnya perhatian pada upaya pemberdayaan masyarakat, terutama untuk golongan yang kurang beruntung (*powerless*), merupakan cara pandang simplistik yang berusaha mengeliminasi persoalan ketidakberdayaan pada kelompok masyarakat. Sementara realitas ketidak berdayaan pada dua pilar *good governance* lainnya masih agak luput dari perhatian. Hal itu menjadi salah satu penyebab, bahkan penyebab utama, gagalnya program-program pemberdayaan selama ini adalah masih

kuatnya peran negara, dan oleh karenanya, sangat bias kepentingan negara yang antara lain dapat dilihat dari model pendekatan yang digunakana (Fakih, 1996). Karenanya, untuk masa-masa yang akan datang, upaya pemberdayaan dalam hal apapun harus terlebih dahulu menjawab beberapa pertanyaan fundamental berikut:

Pertama, siapa atau kelompok mana yang harus diberdayakan? Pertanyaan tersebut akan mengarahkan pada upaya identifikasi secara obyektif dan relatif komprehensif aktor-aktor mana yang menentukan masa depan pembangunan, tetapi mengalami banyak keterbatasan, dan oleh karenanya, harus dijadikan sasaran pemberdayaan. Dalam konteks pemberdayaan ekonomi lokal, pertanyaan tersebut akan mengarah pada *economic cluster* yang semakin spesifik seperti kelompok petani, nelayan, pengusaha kecil, pedagang eceran, dan sebagainya. Identifikasi semacam itu sangat penting sehingga nantinya dapat ditetapkakn strategi yang tepat dalam sebuah konteks yang spesifik. Sebaliknya, identifikasi yang kabur dan cenderung bias akan berakibat pada kesalahan menentukan kelompok sasaran serta strategi implementasinya. Muaranya adalah, lagi-lagi, terjadinya kegagalan dalam upaya pemberdayaan.

Kedua, dalam hal apa kelompok-kelompok yang telah diidentifikasi tadi harus diberdayakan? Atau singkatnya, apa yang mau diberdayakan? Pertanyaan tersebut berkaitan erat dengan persoalan fundamental apa yang benar-benar dialami suatu kelompok. Dikatakan fundamental apa benar-benar dialami suatu kelompok. Dikatakan fundamental karena persoalan tersebut berhubungan langsung dengan kemampuan dan akses mereka dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan derajat keberdayaannya. Pada tataran yang lebih riil, pertanyaan tersebut akan berhubungan dengan pilihan hidup seseorang atau suatu kelompok, proses definisi kebutuhan untuk mewujudkan pilihan tersebut, bagaimana pengembangan gagasan, bagaimana mengembangkan institusi atau organisasi pendukung, sumberdaya apa yang paling dibutuhkan, apa aktivitas-aktivitas ekonomi pokoknya, bagaimana sistem produksi, dan sebagainya. Dengan demikian, upaya pemberdayaan tidak saja memiliki objek yang jelas tetapi juga fokus yang spesifik.

Ketiga, bagaimana atau dengan cara apa pemberdayaan dilakukan? pertanyaan tersebut berkaitan dengan strategi yang akan ditempuh untuk mengupayakan pemberdayaan. Pertanyaan itu sangat mendasar, dan karenanya, harus dijawab dengan tepat sehingga upaya implementasi program-program pemberdayaan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan. Sebaliknya, pilihan strategi yang keliru akan berakibat pada gagalnya misi pemberdayaan yang diemban suatu program atau kebijakan. Atau lebih buruk lagi, program pemberdayaan yang coba diintroduksi untuk memperbaiki nasib target group itu tidak memberikan solusi apa-apa, tetapi malah menciptakan masalah baru.

Ketiga pertanyaan pokok diatas sebenarnya merupakan pertanyaan-pertanyaan derivatif yang terkandung dalam sebuah paradigma. Dengan kata lain, terlepas dari dimensi-dimensi paradigmatis lain, sebuah paradigma akan memiliki implikasi praktis bagi ketiga persoalan tersebut. Kenyataan empiris bahwa ketiga pertanyaan tersebut belum terlalu diperhatikan dalam dinamika dan operasionalisasi kebijakan-kebijakan pemberdayaan di tanah air sekaligus merefleksikan kurang jelasnya bangun paradigma apa yang sebenarnya sedang digunakan. Misalnya apa yang dilakukan pemerintah melalui Program Jaring Pengaman Sosial – Penanggulangan Kemiskinan (JPS-PK) seperti Program IDT, PDM-DKE, program-program karitatif lainnya. Ambisi pemberdayaan yang dibawa program-program tersebut tidak banyak mengubah realitas ketidakberdayaan kelompok miskin. Secara hipotetis, salah satu penyebab kegagalan itu dapat ditelusuri dari ketidakjelasan jawaban atas ketiga pertanyaan diatas. Bahkan sustainability program-program itu sama sekali tidak dapat dijamin. Begitu pemerintah mengundurkan diri, maka berakhir pula program tersebut. Misi pemberdayaan dengan sendirinya tidak tercapai. Bahkan barisan kaum miskin yang perlu diberdayakan semakin bertambah panjang.

B. Pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal (*Local Economic Development*)

Edward J. Blakely (1994), mendefinisikan *Local Economic Development* “ = $f(\text{natural resources, labor, capital, investment, entrepreneurs, transport, communication, industrial$ 194| Pembangunan Ekonomi

composition, technology, size, export market, international economic situation, local government capacity, national dan state government spending and development supports). All of these factors may be important. However, the economic development practitioner is never certain which factor has the greatest weight in any given situation". Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa ".... The central feature of locally based economic development is in the emphasis on endogenous development using the potential of local human and physical resources to create new employment opportunities and to stimulate new, locally based economic activity".

Sementara itu, The World Bank (2001) mendefinisikan *"....Local Economic Development (LED) is the process by which public, business and non governmental sector partners work collectively to create better conditions for economic growth and employment generation". The aim is to improve the quality of life for all. Practicing local economic development means working directly to build the economic strength of all local area to improve its economic future and the quality of life of its inhabitants. Prioritizing the local economy is crucial if communities today depends upon them being able to adopt to the fast changing and increasingly competitive market environment".*

Dari sisi masyarakat, Pengembangan Ekonomi Lokal diartikan sebagai upaya untuk membebaskan masyarakat dari semua keterbatasan yang menghambat usahanya guna membangun kesejahteraannya. Kesejahteraan tersebut dapat diartikan secara khusus sebagai jaminan keselamatan bagi adat istiadat dan agamanya, bagi usahanya, dan bagi harga dirinya sebagai manusia. Semua jaminan tersebut tidak dapat diperoleh dari luar sistem masyarakat karena tidak berkelanjutan, dan oleh karena itu harus diupayakan dari sistem masyarakat itu sendiri yang kerap kali disebut kemandirian. Dengan demikian, pembangunan ekonomi lokal merupakan upaya pemberdayaan masyarakat ekonomi dalam suatu wilayah dengan bertumpukan kepada kekuatan lokal, baik itu kekuatan nilai lokasi, sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, kemampuan manajemen kelembagaan (*capacity of institutions*) maupun asset pengalaman (Haeruman, 2001).

Seiring dengan dinamika pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan serta dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan sejahtera. Dalam ekonomi yang makin terbuka, ekonomi makin berorientasi pada pasar, peluang dari keterbukaan dan persaingan pasar belum tentu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang kemampuan ekonominya lemah. Dalam keadaan ini harus dicegah terjadinya proses kesenjangan yang makin melebar, karena kesempatan yang muncul dari ekonomi yang terbuka hanya dapat dimanfaatkan oleh wilayah, sektor, dan golongan ekonomi yang lebih maju. Secara khusus perhatian harus diberikan dengan pemihakan dan pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan ekonomi lokal.

Pengembangan ekonomi lokal erat kaitannya dengan pemberdayaan sumberdaya manusianya, lembaganya dan lingkungan sekitarnya. Untuk mengembangkan ekonomi lokal tidak cukup hanya dengan meningkatkan kemampuan sumberdaya manusianya, tetapi juga diperlukan adanya lembaga yang terlatih untuk mengelola sumberdaya manusia yang sudah maju, dan memerlukan lingkungan yang kondusif untuk memungkinkan lembaga ekonomi lokal tersebut berkembang. Pengembangan ekonomi lokal melalui pengembangan lembaga kemitraan semua *stakeholders* (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dengan demikian membutuhkan kemampuan komunikasi diantara semua lembaga yang bersangkutan yang menjamin kesinambungan mitra kerja dan mitra usaha. Untuk selanjutnya, komunikasi multi arah menjadi kebutuhan dasar dalam pengembangan lembaga kemitraan tersebut.

C. Kemitraan (*Partnership*)

Kemitraan pada hakekatnya merupakan wujud yang ideal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan. Kemitraan didasari atas hubungan antar pelaku yang bertumpu pada ikatan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan serta saling menghidupi berdasarkan asas kesetaraan dan kebersamaan. Dengan kemitraan diharapkan

196| Pembangunan Ekonomi

dapat menumbuhkan dan menjamin keberlanjutan jaringan kelembagaan untuk mendukung inisiatif lokal dalam pengembangan ekonomi lokal (Haeruman, 2001).

Sejalan dengan itu, Edward J. Blakely (1994) menguraikan *Public-Private-Partnerships* : “*No matter what organizational structure is selected, public agencies and private firms have to enter into new relationships to make the development process work. This approach is much more than the public sector merely offering cooperation to the private sector to facilitate economic activities for private gain; it is far more than occasional meetings between the municipal council and local business organizations, such as the chamber of commerce. Although these activities are important, and perhaps integral to good business/government relations, they do not constitute true partnerships among the sectors. Partnerships are shared commitments to pursue common economic objectives jointly determined by public, private, and community sectors and instituted as joint actions.*”

Pola kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam pola ini diharapkan suatu lembaga mampu berfungsi sebagai penampung aspirasi para anggota kemitraan tersebut. Perlu diingat bahwa salah satu fungsi dari lembaga kemitraan adalah arus mampu mencerminkan keikutsertaan para anggotanya (*participatory approach*) dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Dari pengalaman yang lalu, keikutsertaan sektor swasta dan wakil dari masyarakat sangat berperan dalam meningkatkan dinamika suatu kemitraan. Bahkan kalau perlu lembaga kemitraan tersebut dipimpin oleh wakil dari swasta atau wakil dari masyarakat. Hal ini akan sangat mempengaruhi kinerja dari kemitraan itu sendiri. Dengan prinsip “duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi”, para anggota akan lebih untuk mengutarakan berbagai masalah atau tantangan yang dianggap menjadi ganjalan dalam membangun daerahnya. Banyak pengamat menunjukkan bahwa kecenderungan di dunia usaha sekarang bukan kepada membangun usaha yang semakin besar, tapi kepada unit usaha kecil atau menengah dan independen sehingga menjadi lincah dan cepat tanggap dalam menghadapi perkembangan dan perubahan yang cepat di pasar. Peluang pasar akan terdiri bukan atas

peningkatan permintaan yang besar, melainkan atas peluang-peluang kecil.

Kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Karena merupakan suatu strategi bisnis maka keberhasilan kemitraan sangat ditentukan oleh adanya kepatuhan diantara yang bermitra dalam menjalankan etika bisnis. Dalam konteks ini pelaku-pelaku yang terlibat langsung dalam kemitraan tersebut harus memiliki dasat-dasar etika bisnis yang dipahami bersama dan dianut bersama sebagai titik tolak dalam menjalankan kemitraan. Hal ini erat kaitannya dengan peletakan dasar-dasar moral berbisnis bagi pelaku-pelaku kemitraan. Pemahaman etika bisnis sebagai landasan moral dalam melaksanakan kemitraan merupakan suatu solusi dalam mengatasi kurang berhasilnya kemitraan yang ada selama ini. Komposisi kemitraan itu sangat bervariasi, tetapi merupakan representasi pelaku ekonomi seperti produsen, pedagang, eksportir, pengolah, pemerintah daerah/pusat, perguruan tinggi, lembaga riset lain, lembaga swadaya masyarakat dan sebagainya.

Lebih lanjut, Herman Haeruman (2001) mengelaborasi kemitraan sebagai suatu proses. Proses yang dimulai dengan perencanaan, kemudian rencana itu diimplementasikan dan selanjutnya dimonitor serta dievaluasi terus-menerus oleh pihak yang bermitra. Dengan demikian terjadi alur tahapan pekerjaan yang jelas dan teratur sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Karena kemitraan merupakan suatu proses maka keberhasilannya diukur dengan pencapaian nilai tambah yang didapat oleh pihak yang bermitra baik dari segi material maupun non-material, nilai tambah ini akan berkembang terus sesuai dengan meningkatnya tuntutan untuk mengadaptasi berbagai perubahan yang terjadi. Singkatnya, nilai tambah yang didapat merupakan fungsi dari kebutuhan yang ingin dicapai.

Dalam mengembangkan kemitraan, masing-masing *partner* harus sensitif dan menunjukkan komitmen dan empatinya tidak saja terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan bersangkutan tetapi terutama terhadap apa yang menjadi tujuan masing-masing individu. Dengan kata lain, setiap

anggota harus sensitif terhadap apa yang menjadi tujuan forum kemitraan, tujuannya sendiri, serta tujuan individual identik dengan mencabut akar kemitraan itu sendiri (The Peter F. Drucker Foundation, 1996; Austin, 2000; The Jean Monnet Program, 2001).

Secara sederhana, Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal atau disingkat dengan akronim "KPEL" adalah suatu pendekatan untuk mendorong aktivitas ekonomi melalui pembentukan kemitraan masyarakat-swasta-pemerintah dan memfokuskan pada pembangunan aktivitas kluster ekonomi, sehingga terbangun keterkaitan (*linkage*) antara pelaku-pelaku ekonomi dalam satu wilayah atau region (perdesaan/kota/kecamatan/kabupaten/propinsi) dengan *market* (pasar lokal, nasional dan pasar internasional) (UNDP, UN-HABITAT & BAPPENAS, 2002). KPEL juga merupakan instrumen untuk mendukung terciptanya : 1). pembangunan ekonomi yang mendayagunakan sumber daya lokal; 2) peningkatan pendapatan dan penciptaan peluang lapangan kerja; 3). perencanaan yang terintergrasi - baik vertikal dengan horizontal maupun sektoral dan regional (daerah); pemerintahan yang baik (*good governance*).

D. Demand-Driven sebagai Basis "KPEL"

Dalam konteks desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah yang masih mencari bentuk seperti sekarang ini, pemilihan dan aplikasi suatu strategi pengembangan ekonomi lokal menjadi begitu krusial. Tidak dapat disangkal lagi, bahwa dengan implementasi undang-undang tentang kewenangan daerah, tidak sedikit daerah otonom di Indonesia yang hanya mengetahui aspek kewenangannya sebagai birokrasi di daerah, bukan sebagai stimulator pembangunan ekonomi di daerah. Juga terdengar agak ironis apabila suatu daerah otonomi tidak persis mengetahui posisi dan berkah sumberdayanya sendiri karena selama ini tidak pernah secara sistematis membuat dan mengembangkan peta potensi sumberdaya ini. Dengan logika paling sederhana pun, cukup sukar bagi suatu daerah untuk merumuskan arah dan sasaran pengembangan ekonomi lokal apabila tempat awal berpijaknya (*initial steps*) tidak diketahui atau tidak dikuasainya (Arifin, 2001).

Lebih lanjut, Arifin (2001) menjelaskan bahwa pendekatan, strategi atau paradigma perencanaan pembangunan ekonomi berbasis permintaan (*demand-driven*) ini sebenarnya telah lama dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional, walaupun tidak pernah secara baik diterapkan di Indonesia. Dalam konteks pengembangan ekonomi lokal, pendekatan ini dilandasi dan diturunkan dari teori-teori ekonomi pembangunan yang sudah mapan, dan didukung dengan bukti empiris yang cukup. Pada intinya, pendekatan berbasis permintaan ini menyakini bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang luas (*broad-base*) suatu daerah minimal harus memiliki dua kondisi sebagai berikut:

Pertama, daerah tersebut harus mampu dan berhasil dalam memasarkan produk (barang dan jasa) ke wilayah lain dalam suatu negara atau ekspor ke luar negeri. *Kedua*, penerimaan ekspor itu harus menghasilkan dampak ganda (*multiplier effect*) atau perputaran tambahan pendapatan dalam perekonomian lokal, minimal melalui pembelian faktor produksi dan pengeluaran rumah tangga terhadap barang konsumen oleh segenap aktor ekonomi yang terlibat dalam aktivitas produksi dan ekspor. Kedua prakondisi ini hanya dapat terjadi apabila suatu daerah memiliki suatu keterkaitan yang efisien, yang menghubungkan produsen, pedagang dan supplier di daerah perdesaan dan perkotaan di daerah tersebut dan sekitarnya. Dalam terminologi ekonomi regional, argumen seperti diatas dikenal dengan istilah pengembangan keterkaitan desa-kota atau *rural-urban linkages*.

Pengembangan ekonomi lokal dengan basis permintaan ini tentu saja diarahkan untuk meningkatkan tingkat keterkaitan atau integrasi daerah-daerah otonomi di Indonesia-khususnya lagi daerah-daerah yang tertinggal-kedalam pasar yang lebih luas atau ke dalam arus utama perekonomian (*economic mainstream*). Oleh karenanya, pendekatan berbasis permintaan ini sering pula disebut pendekatan berbasis pasar (*market-driven*) karena orientasi utamanya adalah untuk memperbaiki akses pasar, minimal menghubungkan atau bahkan menciptakan pasar, di tingkat domestik dan internasional, bagi aktor ekonomi produksi dan ekspor di daerah. Fokus pendekatan ini dapat bermacam-

macam, namun yang sering dipilih dalam suatu disain implementasi pendekatan berbasis permintaan untuk pengembangan ekonomi lokal adalah dengan kluster ekonomi (*economic clusters*), terutama yang merupakan kunci atau “*starting point*” utama di daerah. Pertimbangan fokus kluster ekonomi-bukan semata wilayah geografis – tetapi adalah untuk menerapkan suatu kombinasi strategi keunggulan komparatif (*comparative advantage*) dan kompetitif sekaligus (*competitive advantage*).

Istilah kluster ekonomi itu sendiri sebenarnya sangat sederhana, yaitu suatu aktivitas ekonomi yang agak sejenis atau berkelompok dan berbasis suatu komoditas yang sama. Pada tingkat yang lebih luas, kluster ekonomi suatu komoditas tertentu, pasti mencakup perusahaan besar, usaha kecil dan menengah, industri rumah tangga dan institusi pendukung lain yang terlibat dalam produksi, pengolahan, perdagangan dan ekspor dalam konteks integrasi dengan pasar yang lebih luas tersebut. Dengan sendirinya, istilah “ekspor” dalam konteks ini atau dalam ekonomi regional secara umum tidak hanya mencakup kegiatan perdagangan ke luar negeri saja, tetapi juga meliputi aktivitas perdagangan ke daerah lain dalam suatu wilayah ekonomi. Penekanan yang diperlukan adalah pada dampak berganda dari penerimaan perdagangan ekspor tersebut kepada aktivitas ekonomi lain, yang meliputi segenap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Untuk menjalankan fokus kluster ekonomi itu, seluruh aktor pengembangan ekonomi lokal haruslah memiliki informasi dan pengetahuan mendalam tentang beberapa hal kunci berikut: tingkat permintaan dunia, permintaan domestik, tingkat dan pasokan produksi primer (barang mentah), keterkaitan ke belakang dan ke depan (pengolahan, pengolahan lanjutan, pemasaran ekspor), serta jasa pendukung yang dapat menopang perputaran ekonomi lokal seperti jasa kredit, sarana dan infrastruktur lain yang relevan. Seluruh aktor ekonomi lokal harus pula memiliki pemahaman lebih mendalam tentang kendala dan peluang, tingkat ke bekerjaan pasar atau institusi yang melingkupinya, derajat inisiatif, aspek insentif dan disinsentif yang mempengaruhi laju investasi oleh sektor swasta, termasuk pula suatu strategi intervensi kebijakan-baik yang harus

dirumuskan oleh pemerintah daerah, maupun oleh pemerintah pusat, plus serangkaian rencana aksi atau implementasi kebijakan tersebut beserta komponen evaluasinya. Salah satu langkah aplikasi pendekatan berbasis permintaan ini adalah pemberdayaan kemitraan atau forum tripartit pelaku ekonomi dan stakeholders: swasta, pemerintah dan masyarakat madani (*civil society*). Paradigma perencanaan berbasis permintaan di atas akan sangat kompetabel dengan desentralisasi ekonomi atau otonomi daerah, karena merupakan suatu katalisator pada sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good corporate governance*) dan diharapkan lebih transparan dan *accountable* kepada masyarakat luas. Pemberdayaan kemitraan tripartit itu dilandasi pada tujuan dan semangat bersama untuk meningkatkan rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam merumuskan suatu rencana dan kegiatan pembangunan di daerah untuk pengembangan ekonomi lokal.

E. Strategi Program KPEL

Dalam pelaksanaan Program KPEL, terdapat dua strategi inti yang diformulasikan sedemikian rupa dan memiliki keterkaitan satu dengan lainnya sebagai berikut:

1. Memfasilitasi forum kemitraan pada setiap jenjang pemerintahan dengan melibatkan semua *stakeholder* (masyarakat, pemerintah, swasta), untuk berdialog mengenai pembangunan ekonomi. Melalui forum ini, seluruh *stakeholder* berpartisipasi dalam proses perencanaan, formulasi kebijakan, pembuatan keputusan, monitoring dan evaluasi.
2. Mendorong forum kemitraan untuk menstimulasi kegiatan kluster ekonomi sebagai suatu sarana untuk menciptakan kesempatan peningkatan pendapatan dan peluang lapangan kerja. Hal ini dapat dicapai melalui identifikasi pasar serta pengembangan, diversifikasi dan pemasaran dari *cluster* komoditas terpilih (UNDP, UN-Habitat & Bappenas, 2002).

Strategi 1, terkait dengan aransemen dan penguatan kelembagaan yang menghasilkan dua demarkasi penting, yaitu konvensi (*conventions*) dan aturan main (*rules of the game*).
202| Pembangunan Ekonomi

Kelembagaan adalah suatu aturan yang dikenal dan diikuti secara baik oleh anggota masyarakat, yang memberi naungan (*liberty*) dan meminimalkan hambatan (*constraints*) bagi individu atau anggota masyarakat. Kelembagaan kadang ditulis secara formal dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, tetapi kelembagaan juga dapat tidak ditulis secara formal seperti pada aturan adat dan norma yang dianut masyarakat. Kelembagaan itu umumnya dapat diprediksi (*predictable*) dan cukup stabil, serta dapat diaplikasikan pada situasi berulang. Demikianlah dasar-dasar awal yang diletakkan oleh para penemu (*the founding fathers*) ekonomi kelembagaan John R. Commons dan Thorstein Veblen (dalam Arifin, 2001)

Menurut Bapak ekonomi kelembagaan (*the patron saint*) Thorstein Veblen (1926), kelembagaan adalah *settled habits of thought common to the generality of men*. Kelembagaan dianggap sebagai suatu konvensi atau suatu keteraturan dalam tingkah laku manusia yang menghasilkan suatu tingkat kepastian prediksi (*predictability*) dalam hubungan antarmanusia. Walaupun kelembagaan (sosial) sangat peduli pada pemecahan masalah-masalah koordinasi sosial, kelembagaan tidak mesti mengawasi dirinya sendiri (*self-policing*). Kelembagaan mungkin perlu otoritas eksternal, seperti negara, untuk menegakkan konvensi dan kebiasaan di atas, karena seseorang dapat saja mempunyai insentif untuk mencuri hak-hak orang lain.

Sementara itu, John R. Commons (1934), mendefinisikan kelembagaan adalah *collective action in restraint, liberation, and expansion of individual action*. Kelembagaan adalah kerangka acuan atau hak-hak yang dimiliki individu-individu untuk berperan dalam pranata kehidupan, tetapi juga berarti perilaku dari pranata tersebut. Setiap perilaku ekonomis juga sering disebut kelembagaan, sehingga setiap yang dinamis atau tidak statis, yang terproses atau tidak semata komoditas, yang beraktivitas atau tidak semata perasaan dan kepekaan, yang berupa manajemen atau tidak sekadar keseimbangan, semuanya tercakup dalam ekonomi kelembagaan. Dengan demikian, kelembagaan itu dianggap sebagai seperangkat aturan main atau tata cara untuk kelangsungan sekumpulan kepentingan (*a set of working rules of going concerns*). Jadi, kelembagaan itu adalah kegiatan kolektif dalam suatu kontrol atau yuridiksi, pembebasan

atau liberasi dan perluasan atau ekspansi kegiatan individu, seperti disebutkan di atas.

Dari uraian definisi dan kelembagaan di atas, kelembagaan menentukan “bagaimana seseorang atau sekelompok orang *harus* dan *tidak harus* mengerjakan sesuatu (kewajiban atau tugas), bagaimana mereka *boleh* mengerjakan sesuatu tanpa intervensi dari orang lain (kebolehan atau *liberty*), bagaimana mereka *dapat* (mampu) mengerjakan sesuatu dengan bantuan kekuatan kolektif (kemampuan atau hak), dan bagaimana mereka *tidak dapat* memperoleh kekuatan kolektif untuk mengerjakan sesuatu atas namanya (ketidakmampuan atau *exposure*)” (Commons, 1968, hlm. 6). Bromley (1989) secara tegas mengatakan bahwa kelembagaan itu adalah serangkaian hubungan keteraturan (*ordered relationships*) antara beberapa orang yang menentukan hak, kewajiban atau tepatnya kewajiban menghargai hak orang lain, priviliis dan tanggung jawab mereka dalam masyarakat atau kelembagaan tersebut.

Strategi 2, berupaya mendorong kerangka kelembagaan yang terbentuk untuk melakukan kluster aktivitas ekonomi yang terencana, jelas, dan terarah sebagai “*starting point*”. Kriteria untuk pemilihan kluster aktivitas ekonomi yang dapat diterapkan pada pengembangan ekonomi lokal dengan basis atau pendekatan permintaan adalah sebagai berikut:

Pertama, potensi permintaan dari luar daerah (pasar ekspor) besar. Kriteria ini merupakan kriteria dasar dari suatu pendekatan *market-driven*. Informasi dasar mengenai potensi permintaan ini haruslah digali dan dikuasai, karena merupakan pra-syarat awal untuk menentukan strategi pembangunan berikutnya. Dengan kata lain, potensi pasar inilah yang sebenarnya basis informasi bagi pemilihan, perumusan dan implementasi strategi keunggulan kompetitif dengan pasar yang lebih luas. Tingkat permintaan pasar yang sebenarnya –bukan permintaan semu (*fake demand*) harus mampu diketahui dan dianalisis kecenderungan dan implikasinya kepada ekonomi lokal. Jika diperlukan, data rinci dan diidentifikasi lain mengenai pelaku ekonomi di pasar luar negeri itu harus juga dikuasai dan dijadikan acuan utama pengambilan keputusan.

Kedua, potensi mampu tumbuh tinggi di atas rata-rata dan *sustainable*. Kriteria ini secara implisit mengandung semangat strategi keunggulan komparatif, yang mungkin saja dapat kompatibel dengan komoditas unggulan daerah. Pada langkah awal ini pun tidaklah terlalu bijak apabila pengembangan ekonomi lokal masih berlandaskan unsur coba-coba dengan berbasis komoditas sama sekali baru, dengan tingkat pertumbuhan rendah, walaupun mungkin potensial. Komponen keberlanjutan juga perlu diperhatikan agar dampak berganda dari pengembangan kluster dapat diciptakan dan dipertahankan pada masa-masa mendatang.

Ketiga, melibatkan usaha kecil-menengah. Kriteria ini sebenarnya secara ekonomi dan politik dapat diterima secara luas, apalagi ditengah-tengah perubahan paradigma strategi pembangunan ekonomi untuk mengembangkan ekonomi rakyat, tidak bertumpu pada konglomerasi dan usaha besar semata. Dengan sendirinya, pengembangan ekonomi lokal dengan basis industri atau usaha besar seperti pertambangan minyak dan gas bumi, batu bara dan sebagainya yang cenderung terpusat pada beberapa aktor saja atau *enclave economy*, tidak termasuk dalam pendekatan berbasis permintaan ini. Tingkat keterkaitan kluster ekonomi industri besar ini umumnya telah cukup tinggi, sehingga tidak perlu relevan untuk dibahas dalam pengembangan ekonomi lokal ini.

Keempat, menciptakan lapangan kerja produktif bagi kelompok rumah tangga miskin. Kriteria ini, selain berdasarkan pertimbangan ekonomi dan pembangunan, juga berdasarkan pertimbangan politik atau kebijakan pemihakan yang harus ditunjukkan oleh pemerintah daerah, dan sektor swasta beserta komponen masyarakat madani lainnya. Lapangan kerja produktif hanya dapat diciptakan apabila, pendapatan dari perdagangan itu menciptakan dampak ganda (*multiplier effects*) bagi aktivitas ekonomi lain, yang secara konsisten diharapkan meningkatkan pendapatan kelompok rumah tangga miskin di daerah. Dari sinilah, esensi pemihakan kepada kelompok pendapatan rendah dan upaya penciptaan lapangan kerja produktif dapat dikembangkan secara konsisten (Arifin, 2001).

Strategi, paradigma atau pendekatan berbasis permintaan di Program KPEL ini jelas masih dalam taraf wacana dan ujicoba.

Artinya, pemberdayaan forum kemitraan dan modifikasi yang diperlukan untuk daerah-daerah lain di Indonesia harus dikerjakan. Pemberdayaan kemitraan yang baik apabila pengambilan keputusan dilakukan secara otonom dan bersama-sama oleh seluruh *stakeholders*. Di banyak negara termasuk Indonesia pada saat ini, pemerintah memandang dirinya semata hanya bertugas untuk membuat suatu kebijakan dan kurang mananggapi kebutuhan produsen skala kecil dan usaha kecil menengah pada umumnya.

Organisasi atau forum kemitraan swasta-pemerintah dan masyarakat ini bukanlah merupakan alat atau kepanjangan pemerintah, namun sebagai organisasi otonom yang bebas mengajukan proposal sendiri. Organisasi itu diharapkan segera dapat mengimplementasikan program-programnya sendiri, terutama apabila cukup tersedia dana dari pihak luar pemerintah dan melakukan advokasi pandangannya dan membuat rekomendasi terhadap rencana dan kebijakan publik di daerah.

Pengalaman berharga dari Program Kemitraan Bagi Pengembangan Ekonomi Lokal (*Partnership for Local Economic Development*) kerjasama UNDP, UN-Habitat dan Bappenas memperlihatkan bahwa anggota forum kemitraan di luar pemerintah secara perlahan mulai menyadari bahwa mereka mempunyai peran baru. Tadinya, mereka menjadi penonton pasif dalam pembangunan. Sekarang mereka memperoleh kesempatan untuk berperan aktif sebagai agen perubahan. Anggota kemitraan dari pemerintah juga mulai belajar bahwa mereka tidak lagi membuat keputusan dari atas ke bawah, namun mereka sekarang mendapat kesempatan untuk mengalokasikan sumber dana publik berdasar kebutuhan masyarakat dan pasar.

Program KPEL juga berangkat dari adanya kelangkaan sumber daya dan konflik yang timbul dari kelangkaan tersebut, tetapi lebih mementingkan pengelihatian ke depan, khususnya mengenai "*rule of the game*" atau tata cara sekumpulan kepentingan yang akan tercipta. Jadi, permasalahan mengenai konflik dan pertentangan kepentingan tidak dapat dibahas hanya dengan prinsip-prinsip optimalisasi dan maksimisasi saja, tetapi memerlukan alat analisa alternatif misalnya mengapa terdapat

konflik, apakah karena perbedaan kekuasaan, keinginan, perilaku, dan sebagainya.

Dengan tetap berlandaskan pada semangat desentralisasi ekonomi dan otonomi daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus merangsang dunia usaha swasta untuk menggarap dan memanfaatkan inisiatif di tingkat daerah atau tingkat lokal untuk mengembangkan sektor pertanian, sektor perikanan, sektor perkebunan dan basis sumber daya alam lainnya. Pemerintah daerah dilarang keras membunuh inisiatif lokal, begitupun, pemerintah pusat juga perlu memberikan insentif yang lebih besar lagi untuk inisiatif investasi di tingkat daerah, demi masa depan pembangunan ekonomi kita yang lebih cerah.

BAB XVI

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA EKONOMI LOKAL

Dalam rangka untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan daerah, tiap-tiap daerah sudah barang tentu berupaya untuk menggali potensi-potensi pengembangan ekonomi berbasis sumberdaya lokal. Bagi wilayah yang kaya akan sumberdaya ekonomi potensial akan menjadi lebih mudah dalam menciptakan produk-produk ekonomi unggulan, namun bagi wilayah-wilayah marginal, baik dari sisi keterbatasan kondisi fisik maupun sumberdaya manusia maka upaya untuk menggali potensi ekonomi unggulan merupakan satu pekerjaan yang menuntut kerja keras, kreativitas dan dukungan dari segala pihak, baik dari pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha.

Beberapa hal penting dalam upaya pengembangan ekonomi lokal adalah bagaimana menjadikan produk ekonomi yang ada di suatu wilayah agar supaya memiliki nilai jual, mampu bersaing dengan wilayah lain dan memiliki jaringan pemasaran yang baik. Permasalahannya adalah bagaimana upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh masing-masing daerah sehingga dapat mencapai hal tersebut?

Sumberdaya dalam hal ini meliputi sumber daya alam (*natural resources*), sumberdaya manusia (*human resources*). Sumberdaya alam (*natural resources*) merupakan komponen-komponen dari unit lahan yang penggunaan secara ekonomi digunakan untuk tempat tinggal yang dengan keadaan iklim, tanah, hidrologi tertentu akan menghasilkan produksi tertentu (FAO, 1995). Sumberdaya manusia (*human resources*) dapat meliputi *entrepreneurs* dan tenaga kerja (*skilled labour*), sumberdaya kelembagaan (*institutional resources*) (IHS, 2006).

Adanya fenomena hilangnya kesempatan kerja oleh penurunan usaha/tempat kerja seperti penurunan kesempatan kerja di bidang manufaktur oleh adanya mobilitas modal, kompetisi dan atau penerapan teknologi menyebabkan persoalan sosial, oleh karena itu penting sekali bagi

pemerintah untuk memobilisasi sumberdaya yang ada untuk menciptakan ekonomi alternatif dan penciptaan kesempatan kerja (Blakely, 1990). Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal adalah kegiatan ekonomi yang menekankan pada sumberdaya lokal atau setempat. Dapat berupa usaha atau kegiatan yang sedang dirintis pengembangannya (*business start-ups*). Pengembangan sumberdaya ekonomi lokal merupakan isu terbaru dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat dan wilayah melalui pengembangan usaha (kecil dan menengah utamanya) karena lebih mengandalkan pada bahan baku lokal dan tenaga kerja lokal sehingga dipandang tidak rentan terhadap krisis ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal menaruh perhatian pada pengembangan kelembagaan baru berbasis lokal yang mampu menggerakkan masyarakat kedalam marketplace dan lebih menempatkan kelompok masyarakat dibanding individual pada pusat sistem ekonomi dan mampu menciptakan tenagakerja (Blakely, 1990).

Ada dua metode dan teknik yang dapat digunakan dalam mengenali potensi dan permasalahan dalam pengembangan ekonomi lokal yaitu SWOT dan PCA (*Product Competitiveness Analisis*).

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT dapat digunakan untuk mengenali kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang disebabkan oleh faktor internal (dari wilayah itu sendiri) sedangkan peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threath*) merupakan faktor-faktor eksternal (dari luar wilayah). Analisis SWOT ini sangat membantu dalam menyusun rencana aksi untuk pengembangan ekonomi lokal.

Analisis SWOT dapat dilakukan pada tahapan awal untuk memberikan gambaran makro kekuatan dan kelemahan pengembangan sumber daya ekonomi lokal di level regional. Setelah analisis SWOT dapat digunakan PCA (*Product Competitiveness Analisis*) untuk mendapatkan analisis detail penilaian kekuatan dan kelemahan produk ekonomi yang akan dan atau telah dikembangkan.

2. PCA (*Product Competitiveness Analysis*)

Matrik PCA dapat digunakan untuk melakukan penilaian kekuatan dan kelemahan beberapa faktor seperti produk, pasar (*market*), bahan baku (*raw material*), efisiensi (*efficiency*), sumberdaya manusia (*human resources*), infrastruktur (*infrastrucure*) dan lain-lain antar pesaing (*competitor*) baik di tingkat lokal, regional, maupun global. Hasil dari analisis PCA ini dapat digunakan sebagai alat atau bahan untuk memperbaiki, membangun kekuatan dan mengatasi kelemahan, serta sebagai dasar dalam menyusun beberapa strategi (IHS, 2006).

Pada pembahasan berikutnya akan dikaji 10 (sepuluh) faktor yang diharapkan dapat menjadi kunci sukses dalam upaya pengembangan sumberdaya ekonomi lokal. Namun demikian dalam pembahasannya akan mengulas juga faktor-faktor yang menjadi pembatas dan upaya untuk mengeliminir faktor pembatas tersebut. Kajian akan dilengkapi dengan contoh-contoh kasus sebagai basis analisis. Kajian dari pengalaman empirik ini diharapkan agar paper ini tidak semata-mata menekankan pada konsep dan metode saja tetapi juga mengulas praktek-praktek pengembangan ekonomi sumberdaya lokal yang telah dilakukan sehingga dapat dijadikan refleksi baru bagi pengembangan ekonomi lokal.

1. Mengenal Potensi Sumberdaya Wilayah

Beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam kaitannya untuk mengidentifikasi potensi sumberdaya wilayah adalah; 1) sumberdaya apa yang ada di wilayah perencanaan? 2) sumberdaya apa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan? 3) sumberdaya apa dianggap paling penting dan unggul? sumberdaya potensial bisa jadi pada saat ini belum menunjukkan sesuatu yang berarti namun bila ada upaya-upaya untuk mengembangkannya maka dimungkinkan akan menjadi sesuatu yang unggul. Sebagai contoh pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan dengan sumberdaya persuteraan alam yang potensial mencoba untuk meningkatkan pendapatan petani dan daerah dengan meningkatkan hasil produksi murbei, ulat dan pengolahannya (Munarfarah dan Hasan, 2012). Berbagai keterbatasan diupayakan pemecahannya seperti bibit

yang kurang optimal serta minimnya keterampilan pekerja dan pendeknya jalur pemasaran.

2. Menemukan Keunikan Produk

Keunikan produk merupakan keunggulan suatu wilayah, karena tidak terdapat pada wilayah yang lainnya. Sebagai contoh salak di Kabupaten Enrekang dan Kopi di Kabupaten Tana Toraja, dari sisi rasa tidak ada yang dapat menyamai meskipun telah ditanam bibit yang sama di tempat lain. Kondisi fisik dan lingkungan sangat berpengaruh pada produk salak di Kabupaten Enrekang dan produk kopi di Kabupaten Tana Toraja.

3. Mengembangkan Variasi Produk

Variasi produk diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan nilai lebih dari produk olahan. Sebagai contoh di salah sebuah bagian wilayah di Kabupaten Sengkang, terdapat desa dengan hasil rumput laut yang cukup produktif. Namun karena dari sisi kualitas dan volumenya kalah bersaing dengan produk dari wilayah lain yaitu di Kabupaten Jeneponto, maka di pasaran rumput laut Kabupaten Sengkang kurang bersaing sehingga banyak yang tidak terjual. Untuk mengantisipasi hal tersebut pemerintah melalui dinas perindustrian membantu dalam memberikan pelatihan pengolahan rumput laut menjadi makanan camilan (snack rumput laut goreng), agar-agar, dan kosmetik. Peralatan dan teknologi disediakan oleh dinas tersebut, demikian juga pelatihan tenaga terampilnya.

4. Meningkatkan *Performance*

Penampilan (*performance*) dari suatu produk sangat diperlukan agar supaya produk tersebut bernilai lebih. Contoh salah satu perusahaan di Róterdam Belanda melakukan bisnis pengemasan seperti kopi, teh, dan lainnya yang didatangkan dari negara lain. Dengan menggunakan kemasan yang menarik dan label yang sudah sangat dikenal di pasaran maka produk tersebut menjadi bernilai jual lebih tinggi.

5. Memperluas Pasar dan Promosi

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi maka pemasaran dapat dilakukan melalui Internet dengan membangun website. Melalui internet jangkauan pemasaran dapat menjadi lebih luas dengan lebih menghemat biaya transportasi, perjalanan, penyelenggaraan pameran dan lain-lain. Namun kendalanya adalah pada penyiapan pembuatan web dan pengelolaannya. Promosi dapat dilakukan melalui web di samping melalui pameran. Hal ini juga dilakukan oleh industri atap seng di Kota Makassar. Dengan adanya pemberitaan matinya atau berhentinya kegiatan industri ini menyebabkan kerugian besar bagi para pengusaha sehingga salah satu alternatif solusinya adalah perlu adanya pemberitaan kondisi dan prospek dari industri ini melalui Internet dengan membangun web sebagai cara untuk melakukan promosi, meyakinkan kepercayaan dan ketertarikan konsumen dan memperluas pasar.

6. Keterkaitan antar Sektor dan Wilayah

Keterkaitan antar sektor disini maksudnya adalah perlu adanya kerjasama antara sektor yang satu dengan sektor yang lain. Sektor pariwisata dapat dikaitkan dengan sektor industri, demikian juga dengan sektor pertanian dengan industri. Sementara keterkaitan wilayah dapat berupa keterkaitan antar desa sebagai penghasil produk pertanian dengan kota sebagai pasar penjualan produk. Dalam contoh kasus pengolahan buah salak di Kabupaten Enrekang, desa sebagai tempat penghasil pertanian dan pengolahannya sementara hasil produk yang telah dikemas dengan bentuk yang menarik dijual di pasar, supermarket dan toko-toko, baik di Kabupaten Enrekang, maupun kabupaten/kota lain yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan.

7. Dukungan Pemerintah dan Kerjasama Pemerintah-Swasta (*Public Privat Partnership*)

Dukungan dari pemerintah sangat diperlukan dalam memfasilitasi agar produk lebih dikenal oleh pasar. Pemerintah dapat mengangkat produk yang diunggulkan sebagai *icon* daerah atau membangun *image* (*image building/city marketing*).

Sebagai contoh Kabupaten Bulukumba menjadikan produk jagung sebagai produk andalan daerah sehingga Jagung dijadikan icon untuk Kabupaten Bulukumba. Dalam rangka meningkatkan produksi, pemerintah memberikan lahan secara cuma-cuma kepada petani dengan luasan yang telah ditentukan. Regulasi juga merupakan bagian yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai bagian dari kontrol pengembangan sumberdaya ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang mendukung dan penyediaan infrastruktur juga merupakan bagian yang penting. Di samping itu perlu juga adanya kerjasama antara pemerintah dengan swasta.

8. Insentif bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah dan Investor

Insentif dapat diberikan dalam bentuk kemudahan dalam mendapatkan modal atau dana bantuan bagi usaha kecil menengah, sementara bagi investor dapat berupa kemudahan-kemudahan dalam pengurusan perijinan termasuk lokasi-lokasi strategis untuk usaha .

9. Iklim Usaha yang Kondusif

Iklim usaha yang kondusif dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada para pengusaha kecil menengah untuk mengembangkan usahanya demikian juga bagi investor.

10. Belajar dari Pengalaman yang Lain

Belajar dari yang lain dimaksudkan agar dapat dipelajari upaya-upaya atau cara-cara untuk mengembangkan sumberdaya ekonomi lokal. Belajar dapat dilakukan pada wilayah lain yang sudah berhasil dalam mengembangkan suatu produk atau kegiatan ekonomi baik itu di wilayah lain di Indonesia maupun di luar negeri.

BAGIAN V
PEMBANGUNAN SEKTOR
PERTANIAN

BAB XVII

SEKTOR PERTANIAN DAN PERUBAHAN STRUKTUR EKONOMI

Sektor pertanian yang dimaksudkan dalam konsep pendapatan nasional menurut lapangan usaha atau sektor produksi ialah pertanian dalam arti luas. Di Indonesia, sektor pertanian dalam arti luas dibedakan menjadi lima subsektor (Dumairy, 1996:205), yaitu (1) subsektor tanaman pangan, (2) subsektor perkebunan, (3) subsektor kehutanan, (4) subsektor peternakan dan (5) subsektor perikanan.

Masing-masing subsektor dengan dasar klasifikasi tertentu, dirici lebih lanjut menjadi subsektor yang lebih spesifik. Nilai tambah sektor pertanian dalam perhitungan PDB merupakan hasil penjumlahan nilai tambah dari subsektor-subsektor tersebut dan perhitungannya dilakukan oleh Biro Pusat Statistik. Sumber data sebagian merupakan hasil survey yang dilakukan oleh BPS sendiri dan sebagian lainnya berasal dari instansi teknis seperti Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan. Nilai tambah subsektor-subsektor tersebut dihitung dengan menggunakan produksi. Tingkat harga yang dipakai untuk menghitung nilai produksi adalah harga pada tingkat perdagangan besar. Penjelasan dari kelima subsektor tersebut dapat dilihat pada deskripsi berikut ini.

1. Subsektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan sering juga disebut subsektor pertanian rakyat. Disebut demikian karena tanaman pangan biasanya diusahakan oleh rakyat dan bukan oleh perusahaan atau pemerintah. Subsektor ini mencakup komoditi-komoditi bahan makanan seperti padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kedelai, sayur-sayuran dan buah-buahan.

2. Subsektor Perkebunan

Subsektor perkebunan dibedakan atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan

yang diusahakan sendiri oleh rakyat atau masyarakat, biasanya dalam skala kecil dan dengan teknologi budidaya yang sederhana. Hasil-hasil tanaman perkebunan rakyat terdiri antara lain atas karet, koprak, teh, kopi, tembakau, cengkeh, kapuk, kapas, coklat dan berbagai rempah-rempah. Adapun yang dimaksud dengan perkebunan besar adalah semua kegiatan perkebunan yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan perkebunan berbadan hukum. Tanaman perkebunan besar meliputi karet, teh, kopi, kelapa sawit, coklat, kina, tebu, dan beberapa lagi yang lainnya.

3. Subsektor Kehutanan

Subsektor kehutanan terdiri atas tiga macam kegiatan, yaitu penebangan kayu, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuan. Kegiatan penebangan kayu menghasilkan kayu-kayu gelondongan, kayu bakar, arang dan bambu. Hasil hutan lain meliputi damar, rotan, getah kayu, kulit kayu serta berbagai macam akar-akaran dan umbi kayu. Sedangkan kegiatan perburuan menghasilkan binatang-binatang liar seperti rusa, penyu, ular, buaya dan termasuk juga madu.

4. Subsektor Peternakan

Subsektor peternakan mencakup kegiatan beternak dan pengusahaan hasil-hasilnya. Subsektor ini meliputi produksi ternak-ternak besar dan kecil, susu segar, telur, wol dan hasil pemotongan hewan. Untuk menghitung produksi subsektor ini, BPS mendasarkannya pada data pemotongan, selisih stok atau perubahan populasi dan ekspor neto. Produksi subsektor peternakan adalah pertambahan/pertumbuhan hewan dan hasil-hasilnya. Namun mengingat data pertambahan/pertumbuhan hewan belum tersedia, maka untuk sementara BPS menggunakan cara yang sudah disebutkan tadi.

5. Subsektor Perikanan

Subsektor perikanan meliputi semua hasil kegiatan perikanan laut, perairan umum, kolam, tambak, sawah dan keramba serta pengolahan sederhana atas produk-produk perikanan (pengeringan dan pengasinan). Dari segi teknis kegiatannya, subsektor ini dibedakan atas tiga macam sektor, yaitu perikanan laut, perikanan darat dan penggaraman. Komoditi

yang tergolong subsektor ini tidak terbatas hanya pada ikan, tetapi juga udang, kepiting, ubur-ubur dan semacamnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, jelas bahwa sektor pertanian tidak hanya terbatas hanya pada tanaman pangan atau pertanian rakyat. Berdasarkan pemahaman ini juga, pelaku/produsen di sektor pertanian bukan hanya petani, akan tetapi juga meliputi pekebun, peternak, nelayan dan petambak. Produsen di sektor pertanian juga tidak hanya perorangan, tapi juga perusahaan berbadan hukum. Kalaupun sektor pertanian lebih sering dipahami terbatas seakan-akan hanya urusan tanaman pangan saja, hal tersebut disebabkan tanaman pangan merupakan subsektor inti di dalam sektor pertanian, termasuk di Indonesia dan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia. Sebagai pemasok kebutuhan pokok yang utama bagi manusia, yakni sebagai bahan makanan, kedudukan subsektor tanaman pangan sangat strategis. Itulah sebabnya kepedulian terhadap subsektor tanaman pangan sangat besar, jauh melebihi kepedulian terhadap subsektor-subsektor lain.

Sehubungan dengan aspek teknologi, pertanian tidak relevan untuk diidentikkan dengan keterbelakangan atau ketertinggalan, sebab teknologi di sektor pertanian juga selalu berkembang. Bukan hanya teknologi dalam pengolahan hasil-hasilnya saja, melainkan juga teknologi produksi hasil-hasil pertanian itu sendiri, baik dalam hal budidayanya (penanaman atau pemeliharaan) maupun dalam hal perbenihannya.

A. Pertanian sebagai Sektor Pemimpin

Pentingnya sektor pertanian dalam perekonomian nasional maupun perekonomian regional tidak hanya diukur dari kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan PDB/PDRB, kesempatan kerja dan sebagai salah satu sumber devisa negara, tetapi potensinya juga harus dilihat sebagai salah satu motor penggerak pertumbuhan output atau nilai tambah dan diversifikasi produksi di sektor-sektor ekonomi lainnya. Dalam hal ini, pertanian disebut sebagai sektor pemimpin, artinya semakin besar ketergantungan dari pertumbuhan nilai tambah di sektor-sektor lain terhadap pertumbuhan nilai tambah di sektor pertanian, maka semakin besar peranan pertanian sebagai sektor pemimpin.

Pentingnya sektor pertanian sebagai motor penggerak pembangunan atau pertumbuhan ekonomi pertama kali direkomendasikan oleh Adelman, terutama lewat keterkaitannya dengan pendapatan dan konsumsi. Pandangan strategis ini didasarkan pada asumsi bahwa pasar lokal akan berkembang apabila pendapatan masyarakat setempat meningkat dan faktor terakhir ini bisa terjadi apabila ada peningkatan produktifitas di sektor pertanian. Akan tetapi, Adelman berpendapat bahwa fokus lebih baik diberikan kepada perkembangan pertanian skala kecil dan menengah karena ini lebih cocok bagi daerah yang pembangunannya masih terbelakang. Hal ini dijelaskan oleh Kotler, dkk (dalam Tambunan, 2003 : 121-122) sebagai berikut:

Strategi (industrialisasi yang dipimpin permintaan pertanian) terdiri dari pembangunan pasaran konsumsi massal domestik dengan cara memperbaiki produktifitas pertanian skala kecil dan menengah. Pertanian skala kecil dan menengah memiliki efek kaitan yang lebih besar dengan industri domestik bila dibandingkan dengan pertanian skala besar yang juga memiliki tingkat produktifitas yang tinggi. Usaha-usaha pertanian yang lebih kecil adalah padat karya dan menggunakan permesinan domestik. Petani-petani kecil memiliki kecenderungan konsumsi marginal yang lebih besar dan bagian marginal yang lebih besar dari konsumsi mereka diarahkan ke tekstil produksi lokal, pakaian, alas kaki dan alat-alat konsumsi yang sederhana lainnya. Mereka juga cenderung mengadakan banyak penanaman dalam pembangunan modal manusia dengan cara mengeluarkan bagian besar dari penghasilan mereka bagi pendidikan.

Konsep dasar dari pentingnya pertanian sebagai sektor pemimpin di dalam pembangunan ekonomi dapat dilihat dari pernyataan Simatupang dan Syafa'at (dalam Tambunan, 2003 : 122) sebagai berikut:

Sektor andalan perekonomian adalah sektor yang memiliki ketangguhan dan kemampuan tinggi. Sektor andalan merupakan tulang punggung (*backbone*) dan mesin penggerak perekonomian (*engine of growth*) sehingga dapat pula disebut sebagai sektor kunci atau

sektor pemimpin (*leading sector*). Menurut mereka, terdapat lima syarat yang harus dilihat sebagai kriteria dalam mengevaluasi pertanian sebagai sektor kunci dalam perekonomian. Kelima syarat itu adalah (1) Strategis, dalam artian esensial dan besar kontribusinya dalam mewujudkan sasaran-sasaran dan tujuan-tujuan dari pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, peningkatan devisa negara, pembangunan ekonomi daerah dan lain sebagainya; (2) Tangguh, yang berarti unggul dalam persaingan, baik dalam negeri maupun di pasar global dan mampu menghadapi gejolak ekonomi, politik maupun alam. Pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, berbasis pada kemampuan sendiri (domestik) atau kemandirian dan dapat menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan strategis (sosial, ekonomi, politik dan alam); (3) Artikulatif, yang artinya pertanian sebagai sektor andalan harus memiliki kemampuan besar sebagai dinamisator dan fasilitator bagi pertumbuhan output di sektor-sektor ekonomi lainnya dalam suatu spektrum yang luas; (4) Progresif, yang berarti pertanian dapat tumbuh secara berkelanjutan tanpa menimbulkan efek-efek yang negatif terhadap kualitas lingkungan hidup. Hanya jika output pertanian tumbuh positif dan berkelanjutan, sektor tersebut dapat berfungsi sebagai motor pertumbuhan bagi perekonomian; (5) Responsif, dalam arti pertanian sebagai sektor andalan mampu memberi respon yang cepat dan besar terhadap setiap kebijakan pemerintah.

B. Perubahan Struktur Ekonomi

Proses pembangunan ekonomi dalam periode jangka panjang, mengikuti pertumbuhan pendapatan per kapita, akan membawa suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor kunci ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer, khususnya industri pengolahan dengan skala hasil yang meningkat (relasi positif dalam pertumbuhan antara output dengan produktifitas), perdagangan dan jasa sebagai motor

penggerak utama pertumbuhan ekonomi (Weis dalam Tambunan, 2003 : 32).

Terdapat kecendrungan (dapat dikatakan sebagai suatu hipotesis) bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang membuat semakin tinggi atau semakin cepat proses peningkatan pendapatan nasional per kapita, semakin cepat proses perubahan struktur ekonomi dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lain mendukung proses tersebut, seperti ketersediaan tenaga kerja, bahan baku dan teknologi. Pola dari perubahan struktur ekonomi seperti ini memang merupakan suatu evolusi alamiah seiring dengan proses pembangunan dan industrialisasi.

Meminjam istilah Kuznets, perubahan struktur ekonomi umum disebut transformasi struktural, dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait satu dengan yang lainnya dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri (ekspor dan impor), penawaran agregat (produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal) yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Chenery dalam Tambunan, 2003 : 32).

Terdapat dua teori utama yang umum digunakan dalam menganalisis perubahan struktur ekonomi, yakni dari Arthur Lewis (teori migrasi) dan Hollis Chenery (teori perubahan struktural). Kerangka pemikiran dari Chenery pada dasarnya sama seperti ide dasar yang melandasi teori Lewis, yaitu memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses pembangunan ekonomi di negara yang sedang berkembang.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Chenery dan Syrquin (1975) juga mengidentifikasi adanya perubahan struktur perekonomian suatu negara yang bergeser dari yang semula didominasi oleh sektor primer, seperti pertanian, ke sektor non primer, seperti industri, perdagangan dan jasa. Pergeseran ini mengikuti peningkatan pendapatan per kapita yang membuat perubahan dalam pola permintaan konsumen dari makanan dan bahan-bahan kebutuhan pokok menjadi berbagai macam barang industri dan jasa, akumulasi kapital fisik dan manusia (SDM), perkembangan kota dan pertumbuhan industri di daerah

perkotaan bersamaan dengan berlangsungnya migrasi penduduk ke kota besar dari daerah pedesaan dan penurunan laju pertumbuhan penduduk dan ukuran keluarga yang semakin kecil.

Perubahan struktur ekonomi berbarengan dengan pertumbuhan PDB yang merupakan total pertumbuhan nilai tambah (NT) dari semua sektor ekonomi dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Dimisalkan di suatu ekonomi hanya ada dua sektor, yaitu pertanian dan non pertanian dengan NT masing-masing NT_a dan NT_n yang membentuk PDB:

$$PDB = NT_a + NT_n$$

atau

$$1 = [b(t)_a + b(t)_n] PDB$$

Dimana $b(t)_a$ dan $b(t)_n$ adalah pangsa PDB, masing-masing dari pertanian dan non pertanian; t menunjukkan periode. Pada tahap awal pembangunan ($t=0$), sebelum industrialisasi dimulai: $b(0)_n < b(0)_a$. Dalam proses pembangunan terjadi transformasi ekonomi, dimana pangsa PDB dari sektor non pertanian meningkat dan dari sektor pertanian menurun. Pada tahap akhir pembangunan ekonomi ($t=1$): $b(1)_a < b(1)_n$, dimana $b(1)_n > b(0)_n$ dan $b(1)_a < b(0)_a$.

Proses transformasi struktural akan mencapai taraf yang paling cepat bila pergeseran pola permintaan domestik ke arah output dari industri pengolahan (manufaktur) diperkuat oleh perubahan yang serupa dalam komposisi perdagangan luar negeri atau ekspor. Dalam model transformasi struktural, relasi antara pertumbuhan output industri pengolahan dan pola perubahan permintaan domestik dan perubahan perdagangan luar negeri dapat digambarkan dalam persamaan sederhana berikut (Chenery dalam Tambunan, 2003 : 34):

$$X_i = D_i + (E_i - M_i) + \sum_j \sum_{ij}$$

Dimana X_i = jumlah output bruto dari industri pengolahan; D_i = permintaan domestik terhadap produk akhir (konsumsi plus investasi) dari industri pengolahan; $(E_i - M_i)$ = volume perdagangan neto (ekspor minus impor produk kompetitif); $\sum_j \sum_{ij} = \sum_j a_{ij} \sum_j =$ penggunaan produk dari industri manufaktur sebagai barang antara oleh sektor j ; a_{ij} = koefisien input-output, yang diasumsikan bervariasi sehubungan dengan variasi tingkat pendapatan per kapita.

Indikator penting kedua yang sering digunakan dalam studi empiris untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi adalah distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah (tahap awal pembangunan ekonomi), sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi (tahap akhir), sektor sekunder, terutama industri pengolahan, perdagangan dan jasa menjadi sangat penting dalam penyerapan tenaga kerja.

BAB XVIII

PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi sangat penting karena sebagian besar anggota masyarakat di negara-negara miskin menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Para petani di negara-negara sedang berkembang tidak hanya memproduksi untuk kebutuhan mereka saja, mereka juga memproduksi untuk memenuhi kebutuhan perkotaan. Jika pangsa (*share*) penduduk perkotaan terhadap penduduk keseluruhan meningkat, maka produktivitas para petani pun harus meningkat.

Sektor pertanian juga dapat merupakan sumber modal yang utama bagi pertumbuhan ekonomi yang modern. Modal berasal dari tabungan yang diinvestasikan dan tabungan berasal dari pendapatan. Di negara-negara yang paling miskin, pangsa pendapatan pertanian terhadap produk nasional mencapai 50 persen. Berarti separuh atau lebih dari produk nasional disumbangkan oleh sektor non-pertanian, terutama industri dan perdagangan (jasa-jasa), dan sektor-sektor ini merupakan penyumbang penting bagi tabungan yang akhirnya digunakan untuk investasi.

B. Syarat-syarat Pembangunan Pertanian

Menurut Mosher ada 5 syarat mutlak untuk adanya pembangunan pertanian. Kalau satu saja diantara syarat-syarat tersebut tidak ada, maka terhentilah pembangunan pertanian, pertanian bisa berjalan tetapi statis. Syarat-syarat mutlak itu menurut Mosher adalah:

1. Adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Pembangunan pertanian akan meningkatkan produksi hasil-hasil usaha tani. Hasil-hasil ini tentunya akan dipasarkan dan dijual dengan harga yang cukup tinggi untuk menutupi biaya-biaya dan tenaga yang telah dikeluarkan para petani sewaktu memproduksi. Di dalam memasarkan hasil-hasil

produk pertanian ini diperlukan adanya permintaan (*demand*) akan hasil-hasil pertanian tersebut, sistem pemasaran, dan kepercayaan para petani pada sistem pemasaran tersebut.

2. Teknologi yang senantiasa berkembang. Teknologi pertanian berarti cara-cara bertani. Di dalamnya termasuk cara-cara bagaimana para petani menyebarkan benih, memelihara tanaman, dan memungut hasil serta memelihara ternak. Termasuk pula di dalamnya benih, pupuk, obat-obatan, alat-alat dan sumber-sumber tenaga.
3. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Pembangunan pertanian memerlukan kesemua faktor di atas dan tersedia di berbagai tempat dalam jumlah yang cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang mungkin mau menggunakannya.
4. Adanya perangsang produksi bagi petani. Faktor perangsang utama yang membuat petani bergairah untuk meningkatkan produksinya adalah yang bersifat ekonomis. Faktor tersebut antara lain adalah harga hasil produksi pertanian yang menguntungkan, pembagian hasil yang wajar, serta tersedianya barang-barang dan jasa yang ingin dibeli oleh para petani untuk keluarganya.
5. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu. Tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat berjalan secara efektif, karena produksi pertanian harus tersebar luas. Oleh karena itu diperlukan suatu jaringan pengangkutan yang bercabang luas untuk membawa bahan-bahan perlengkapan produksi ke tiap usaha tani dan membawa hasil usaha tani ke konsumen di kota-kota besar dan kecil.

Di samping ke lima syarat mutlak itu, menurut Mosher ada lima syarat lagi yang adanya tidak mutlak tetapi kalau ada (atau dapat diadakan) benar-benar akan sangat memperlancar

pembangunan pertanian. Yang termasuk syarat-syarat atau sarana pelancar adalah:

1. Pendidikan pembangunan. Pendidikan pembangunan di sini dititik beratkan pada pendidikan non formal yaitu berupa kursus-kursus, latihan-latihan, dan penyuluhan-penyuluhan. Pendidikan pembangunan ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas petani.
2. Kredit produksi. Untuk meningkatkan produksi, petani harus lebih banyak mengeluarkan uang yang digunakan untuk membeli pupuk, bibit unggul, obat-obatan, dan alat-alat lainnya. Pengeluaran ini harus dibiayai oleh tabungan atau dengan meminjam. Oleh karena itu, lembaga-lembaga prekreditasi yang memberikan kredit produksi kepada para petani merupakan suatu factor pelancar yang penting bagi pembangunan pertanian.
3. Kegiatan gotong royong petani. Kegiatan gotong royong biasanya digunakan secara berkelompok dan bersifat informal.
4. Perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Ada dua cara tambahan untuk mempercepat pembangunan pertanian yaitu: pertama, memperbaiki mutu tanah yang telah menjadi usaha tani, misalnya dengan pupuk, irigasi, dan pengaturan pola tanam. Kedua, mengusahakan tanah baru, misalnya pembukaan petak-petak sawah baru.
5. Perencanaan nasional pembangunan pertanian. Perencanaan pertanian adalah proses memutuskan apa yang hendak dilakukan Pemerintah mengenai tiap kebijaksanaan dan kegiatan yang mempengaruhi pembangunan pertanian selama jangka waktu tertentu.

C. Tahap-tahap Pembangunan Pertanian

Ada 3 fase perkembangan pembangunan pertanian. Fase pertama adalah pertanian tradisional yang produktivitasnya rendah. Fase kedua adalah fase penganekaragaman produk pertanian sudah mulai terjadi di mana produk pertanian sudah

ada yang dijual ke sektor komersial, tetapi pemakaian modal dan teknologi masih rendah. Fase ketiga adalah fase yang menggambarkan pertanian yang modern yang produktivitasnya sangat tinggi yang disebabkan oleh pemakaian modal dan teknologi yang tinggi pula. Pada fase ini produk pertanian seluruhnya ditujukan untuk melayani keperluan pasar komersial.

Modernisasi pertanian dari fase tradisional (subsisten) menuju pertanian modern membutuhkan banyak upaya lain selain pengaturan kembali struktur ekonomi pertanian atau penerapan teknologi pertanian yang baru. Kita telah mengetahui bahwa dalam hampir bagi semua masyarakat tradisional, pertanian bukanlah hanya sekedar kegiatan ekonomi saja, tetapi sudah merupakan bagian dari cara hidup mereka. Setiap pemerintah yang berusaha mentransformasi pertanian tradisional haruslah menyadari bahwa pemahaman akan perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik dan kelembagaan masyarakat pedesaan adalah sangat penting. Tanpa adanya perubahan-perubahan seperti itu, pembangunan pertanian tidak akan pernah bisa berhasil seperti yang diharapkan.

Tahap-tahap pembangunan pertanian adalah :

1. Pertanian tradisional (subsisten). Dalam pertanian tradisional, produksi pertanian dan konsumsi sama banyaknya dan hanya satu atau dua macam tanaman saja yang merupakan sumber pokok bahan makanan. Produksi dan produktivitas rendah karena hanya menggunakan peralatan yang sangat sederhana. Penggunaan modal sangat sedikit sekali, sedangkan tanah dan tenaga kerja manusia merupakan factor produksi yang dominan. Dalam keadaan yang demikian, kekuatan motivasi utama dalam kehidupan para petani ini barangkali bukanlah meningkatkan penghasilan tetapi berusaha untuk bisa mempertahankan kehidupan keluarganya.
2. Pertanian tradisional menuju pertanian modern.
3. Mungkin merupakan suatu tindakan yang kurang realistis jika mentransformasikan secara cepat suatu system pertanian yang tradisional ke dalam system

pertanian yang modern (komersial). Upaya untuk mengenalkan tanaman perdagangan dalam pertanian tradisional sering mengalami kegagalan dalam membantu petani untuk meningkatkan tingkat kehidupannya. Oleh karena itu, penganekaragaman merupakan suatu langkah pertama yang cukup logis dalam masa transisi dari pertanian tradisional (subsisten) ke pertanian modern (komersial). Pada fase ini tanaman pokok tidak mendominasi produk pertanian lagi. Diversifikasi produk pertanian juga bisa memperkecil dampak kegagalan panen tanaman pokok dan memberikan jaminan kepastian pendapatan yang sebelumnya tidak pernah ada. Keberhasilan atau kegagalan usaha-usaha untuk menstraformasikan pertanian tradisional tidak hanya tergantung pada keterampilan dan kemampuan para petani dalam meningkatkan produktivitasnya, tetapi juga tergantung pada kondisi-kondisi sosial, komersial dan kelembagaan.

4. Pertanian modern. Pertanian modern atau dikenal juga dengan istilah pertanian spesialisasi menggambarkan tingkat pertanian yang paling maju. Pertanian spesialisasi ini berkembang sebagai respon terhadap dan sejalan dengan pembangunan yang menyeluruh di bidang-bidang lain dalam ekonomi nasional. Dalam pertanian modern (spesialisasi), pengadaan pangan untuk kebutuhan sendiri dan jumlah surplus yang bisa dijual, bukan lagi merupakan tujuan pokok. Keuntungan (profit) komersial murni merupakan ukuran keberhasilan dan hasil maksimum per hektar dari hasil upaya manusia (irigasi, pupuk, pestisida, bibit unggul dan lain-lain) dan sumber daya alam merupakan tujuan kegiatan pertanian. Dengan kata lain, produksi diarahkan untuk keperluan pasar.

BAB XIX

PEMBANGUNAN KELAUTAN DALAM KONTEKS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

Sudah menjadi suatu mitos yang berkembang ditengah-tengah masyarakat bahwa Indonesia memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik sumber hayatinya maupun non hayatinya, walaupun mitos seperti itu perlu dibuktikan dengan penelitian yang lebih mendalam dan komprehensif. Terlepas dari mitos tersebut, kenyataannya Indonesia adalah negara maritim dengan 70 persen wilayahnya adalah laut, namun sangatlah ironis sejak 32 tahun yang lalu kebijakan pembangunan perikanan tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.

Implikasi dari tidak adanya prioritas kebijakan pembangunan perikanan tersebut, mengakibatkan sangat minimnya prasarana perikanan di wilayah pesisir, terjadinya abrasi wilayah pesisir dan pantai, pengrusakan ekosistem laut dan terumbu karang, serta belum teroptimalkannya pemanfaatan sumber daya perikanan dan kelautan.

A. Persoalan Pembangunan Perikanan

Implikasi langsung terhadap peningkatan pertumbuhan penduduk adalah makin meningkatnya tuntutan kebutuhan hidup, sementara potensi sumber daya alam di darat yang kita miliki sangatlah terbatas. Hal tersebut mendorong kita untuk mengalihkan alternatif potensi sumber daya alam lain yang kita miliki yaitu potensi kelautan. Ada lima potensi kelautan yang dapat kita andalkan, yaitu: potensi perikanan, potensi wilayah pesisir, potensi sumber daya mineral, minyak dan gas bumi bawah laut, potensi pariwisata, dan potensi transportasi laut.

Kebijakan pembangunan kelautan, selama ini, cenderung lebih mengarah kepada kebijakan “produktivitas” dengan memaksimalkan hasil *eksploitasi* sumber daya laut tanpa ada kebijakan memadai yang mengendalikannya. Akibat dari

kebijakan tersebut telah mengakibatkan beberapa kecenderungan yang tidak menguntungkan dalam aspek kehidupan, seperti:

1. Aspek ekologi, *overfishing* penggunaan sarana dan prasarana penangkapan ikan telah cenderung merusak ekologi laut dan pantai (*trawl*, bom, potas, pukot harimau, dan lain-lain) akibatnya menyempitnya wilayah dan sumber daya tangkapan, sehingga sering menimbulkan konflik secara terbuka baik bersifat vertikal dan horisontal (antara sesama nelayan, nelayan dengan masyarakat sekitar dan antara nelayan dengan pemerintah).
2. Aspek sosial ekonomi, akibat kesenjangan penggunaan teknologi antara pengusaha besar dan nelayan tradisional telah menimbulkan kesenjangan dan kemiskinan bagi nelayan tradisional. Akibat dari kesenjangan tersebut menyebabkan sebagian besar nelayan tradisional mengubah profesinya menjadi buruh nelayan pada pengusaha perikanan besar.
3. Aspek sosio kultural, dengan adanya kesenjangan dan kemiskinan tersebut menyebabkan ketergantungan antara masyarakat nelayan kecil/ tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara *pherphery* terdapat center, antara masyarakat dengan pemerintah. Hal ini menimbulkan penguatan terhadap adanya komunitas juragan dan buruh nelayan.

Arah modernisasi di sektor perikanan yang dilakukan selama ini, hanya memberi keuntungan kepada sekelompok kecil yang punya kemampuan ekonomi dan politis, sehingga diperlukan alternatif paradigma dan strategis pembangunan yang holistik dan terintegrasi serta dapat menjaga keseimbangan antara kegiatan produksi, pengolahan dan distribusi.

B. Konsep Pembangunan Alternatif

Paradigma pembangunan holistik, yaitu pembangunan yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi yang sangat memperhatikan aspek spasial, yaitu pembangunan berwawasan lingkungan, pembangunan berbasis komunitas, pembangunan

berpusat pada rakyat, pembangunan berkelanjutan dan pembangunan berbasis kelembagaan.

Untuk mewujudkan pembangunan yang holistik tersebut diperlukan alternatif strategi, yaitu strategi yang berorientasi pada sumber daya atau *Resource Base Strategy (RBS)*, yang meliputi ketersediaan sumber daya, faktor keberhasilan serta proses belajar. Pendekatan dalam RBS adalah strategi pengelolaan sumber daya lokal/pesisir dan kelautan yang berorientasi pada: kualitas, proses, kinerja, pengembangan, budaya, lingkungan (*management by process*) yang berdasarkan pada pembelajaran, kompetensi, keunggulan, berpikir sistematis, dan pengetahuan (*knowledge based management*).

C. Memberdayakan Masyarakat Pesisir

Saat ini banyak program pemberdayaan yang mengklaim sebagai program yang berdasar kepada keinginan dan kebutuhan masyarakat (*bottom up*), tapi ironisnya masyarakat tetap saja tidak merasa memiliki akan program-program tersebut sehingga tidak aneh banyak program yang hanya seumur masa proyek dan berakhir tanpa dampak berarti bagi kehidupan masyarakat.

Pertanyaan kemudian muncul apakah konsep pemberdayaan yang salah atau pemberdayaan dijadikan alat untuk mencapai tujuan tertentu dari golongan orang? Memberdayakan masyarakat pesisir berarti menciptakan peluang bagi masyarakat pesisir untuk menentukan kebutuhannya, merencanakan dan melaksanakan kegiatannya, yang akhirnya menciptakan kemandirian permanen dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Memberdayakan masyarakat pesisir tidaklah seperti memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, karena didalam habitat pesisir terdapat banyak kelompok kehidupan masyarakat diantaranya:

1. Masyarakat nelayan tangkap, adalah kelompok masyarakat pesisir yang mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan dilaut. Kelompok ini dibagi lagi dalam dua kelompok besar, yaitu nelayan tangkap modern dan nelayan tangkap tradisional. Keduanya kelompok ini dapat dibedakan dari jenis kapal/peralatan yang digunakan dan jangkauan wilayah tangkapannya.

2. Masyarakat nelayan pengumpul/bakul, adalah kelompok masyarakat pesisir yang bekerja disekitar tempat pendaratan dan pelelangan ikan. Mereka akan mengumpulkan ikan-ikan hasil tangkapan baik melalui pelelangan maupun dari sisa ikan yang tidak terlelang yang selanjutnya dijual ke masyarakat sekitarnya atau dibawah ke pasar-pasar lokal. Umumnya yang menjadi pengumpul ini adalah kelompok masyarakat pesisir perempuan.
3. Masyarakat nelayan buruh, adalah kelompok masyarakat nelayan yang paling banyak dijumpai dalam kehidupan masyarakat pesisir. Ciri dari mereka dapat terlihat dari kemiskinan yang selalu membelenggu kehidupan mereka, mereka tidak memiliki modal atau peralatan yang memadai untuk usaha produktif. Umumnya mereka bekerja sebagai buruh/anak buah kapal (ABK) pada kapal-kapal juragan dengan penghasilan yang minim.
4. Masyarakat nelayan tambak, masyarakat nelayan pengolah, dan kelompok masyarakat nelayan buruh.

Setiap kelompok masyarakat tersebut haruslah mendapat penanganan dan perlakuan khusus sesuai dengan kelompok, usaha, dan aktivitas ekonomi mereka. Pemberdayaan masyarakat tangkap minsalnya, mereka membutuhkan sarana penangkapan dan kepastian wilayah tangkap. Berbeda dengan kelompok masyarakat tambak, yang mereka butuhkan adalah modal kerja dan modal investasi, begitu juga untuk kelompok masyarakat pengolah dan buruh. Kebutuhan setiap kelompok yang berbeda tersebut, menunjukkan keanekaragaman pola pemberdayaan yang akan diterapkan untuk setiap kelompok tersebut.

Dengan demikian program pemberdayaan untuk masyarakat pesisir haruslah dirancang dengan sedemikian rupa dengan tidak menyamaratakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya apalagi antara satu daerah dengan daerah pesisir lainnya. Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya? Banyak sudah

program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, salah satunya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir (PEMP). Pada intinya program ini dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu:

1. Kelembagaan. Bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
2. Pendampingan. Keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.
3. Dana usaha produktif bergulir. Pada program PEMP juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

BAB XX

PENGEMBANGAN WILAYAH DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN PERTANIAN

A. Konsep Wilayah dan Pengembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentukbentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Konsep wilayah yang paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*).

Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik; fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar

bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan; fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi.

Menurut Saefulhakim, dkk (2002) wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Wilayah berasal dari bahasa Arab "*wālā-yuwālī-wilāyah*" yang mengandung arti dasar "saling tolong menolong, saling berdekatan baik secara geometris maupun *similarity*". Contohnya: antara *supply* dan *demand*, hulu-hilir. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Wilayah Pengembangan adalah pewilayahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan.

Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan

ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*), pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri (Direktorat Jenderal Penataan Ruang, 2003). Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002).

Menurut Direktorat Pengembangan Kawasan Strategis, Ditjen Penataan Ruang, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) prinsip-prinsip dasar dalam pengembangan wilayah adalah:

1. Sebagai *growth center*. Pengembangan wilayah tidak hanya bersifat internal wilayah, namun harus diperhatikan sebaran atau pengaruh (*spread effect*) pertumbuhan yang dapat ditimbulkan bagi wilayah sekitarnya, bahkan secara nasional.
2. Pengembangan wilayah memerlukan upaya kerjasama pengembangan antar daerah dan menjadi persyaratan utama bagi keberhasilan pengembangan wilayah.
3. Pola pengembangan wilayah bersifat integral yang merupakan integrasi dari daerah-daerah yang tercakup dalam wilayah melalui pendekatan kesetaraan.
4. Dalam pengembangan wilayah, mekanisme pasar harus juga menjadi prasyarat bagi perencanaan pengembangan kawasan.

Dalam pemetaan *strategic development region*, satu wilayah pengembangan diharapkan mempunyai unsur-unsur

strategis antara lain berupa sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan infrastruktur yang saling berkaitan dan melengkapi sehingga dapat dikembangkan secara optimal dengan memperhatikan sifat sinergisme diantaranya (Direktorat Pengembangan Wilayah dan Transmigrasi, 2003).

B. Teori Lokasi dan Pusat Pertumbuhan

Teori tempat pemusatan pertama kali dirumuskan oleh Christaller (1933) dan dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang pada dasarnya menyatakan bahwa pertumbuhan kota tergantung spesialisasinya dalam fungsi pelayanan perkotaan, sedangkan tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota (tempat pemusatan) tersebut. Terdapat tiga faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan: (1) faktor lokasi ekonomi, (2) faktor ketersediaan sumberdaya, (3) kekuatan aglomerasi, dan (4) faktor investasi pemerintah.

Menurut Mercado (2002) konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan pada tahun 1949 oleh Francois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. Menurut Rondinelli (1985) dan Unwin (1989) dalam Mercado (2002) bahwa teori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota.

Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkapi kondisi terjadinya *trickle down effect* (dampak penetes ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Menurut Stohr (1981) dalam Mercado (2002), konsep pusat pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas

(*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim dengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) dan industrialisasi (hanya pada sektor industri). Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland dan perdesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland. Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

C. Pembangunan Berkelanjutan

Definisi konsep pembangunan berkelanjutan diintegrasikan oleh beberapa ahli secara berbeda-beda. Namun demikian pembangunan berkelanjutan sebenarnya didasarkan kepada kenyataan bahwa kebutuhan manusia terus meningkat. Kondisi yang demikian ini membutuhkan suatu strategi pemanfaatan sumberdaya alam yang efisien. Di samping itu perhatian dari konsep pembangunan yang berkelanjutan adalah adanya tanggungjawab moral untuk memberikan kesejahteraan bagi generasi yang akan datang, sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana memperlakukan alam dengan kapasitas yang terbatas namun akan tetap dapat mengalokasikan sumberdaya secara adil sepanjang waktu dan antar generasi untuk menjamin kesejahteraannya.

Penyusutan yang terjadi akibat pemanfaatan masa kini hendaknya disertai suatu bentuk usaha mengkompensasi yang

dapat dilakukan dengan menggali kemampuan untuk mensubstitusi semaksimal mungkin sumberdaya yang langka dan terbatas tersebut sehingga pemanfaatan sumberdaya alam pada saat ini tidak mengorbankan hak pemenuhan kebutuhan generasi yang akan datang (*intergenerational equity*).

Menurut Bond et al. (2001) pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pembangunan dari kesepakatan multidimensional untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik untuk semua orang dimana pembangunan ekonomi, sosial dan proteksi lingkungan saling memperkuat dalam pembangunan. Bosshard (2000) mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan yang harus mempertimbangkan lima prinsip kriteria yaitu: (1) abiotik lingkungan, (2) biotik lingkungan, (3) nilai-nilai budaya, (4) sosiologi, dan (5) ekonomi. Marten (2001) mendefinisikan sebagai pemenuhan kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kecukupan kebutuhan generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan tidak berarti berlanjutnya pertumbuhan ekonomi, karena tidak mungkin ekonomi tumbuh jika ia tergantung pada keterbatasan kapasitas sumberdaya alam yang ada.

Konsep pembangunan yang berkesinambungan memang mengimplikasikan batas, bukan batas absolut akan tetapi batas yang ditentukan oleh tingkat teknologi dan organisasi sosial sekarang ini mengenai sumberdaya lingkungan serta oleh kemampuan biosfer menyerap pengaruh-pengaruh kegiatan manusia, akan tetapi teknologi untuk memberi jalan bagi era baru pertumbuhan ekonomi.

Dalam definisi di atas dapat dipahami bahwa konsep pembangunan berkelanjutan didirikan atau didukung oleh 3 pilar, yaitu: ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga pendekatan tersebut bukanlah pendekatan yang berdiri sendiri, tetapi saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain.

D. Dimensi Pembangunan Berkelanjutan

Munasinghe (1994) menyatakan bahwa pendekatan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan bertujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan manusia melalui pertumbuhan ekonomi dan efisiensi penggunaan kapital dalam keterbatasan dan kendala sumberdaya serta keterbatasan

teknologi. Peningkatan output pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologi dan sosial sepanjang waktu dan memberikan jaminan kepada kebutuhan dasar manusia serta memberikan perlindungan kepada golongan. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan adalah dengan melakukan analisis biaya manfaat atau suatu proyek pembangunan. Perencanaan pembangunan hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan tujuan-tujuan jangka panjang. Selain itu yang dapat dilakukan untuk mengurangi eksploitasi sumberdaya secara berlebihan dan menutupi dampak yang mungkin ditimbulkan dari eksploitasi sumberdaya tersebut adalah memberikan harga kepada sumberdaya (*pricing*) dan biaya tambahan (*charges*).

Jadi sasaran ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan dan kecukupan kebutuhan ekonomi, kelestarian aset yaitu efisiensi dalam pembangunan sumberdaya dengan pengelolaan yang ramah lingkungan dan tetap memperhitungkan keadilan bagi masyarakat baik saat ini maupun generasi yang akan datang. Dalam hal ini pembangunan ekonomi tidak hanya mengejar efisiensi dan pertumbuhan yang tinggi saja tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Pandangan ekologis didasarkan kepada pertimbangan bahwa perubahan lingkungan akan terjadi di waktu yang akan datang dan dipengaruhi oleh segala aktifitas manusia.

Para ahli sosiologi memberikan pandangan yang berbeda dengan ahli ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dikemukakan oleh Cernea (1994) bahwa pembangunan berkelanjutan adalah menekankan kepada pemberdayaan organisasi sosial masyarakat. Penekanan pandangan para sosiolog tersebut terletak kepada manusia sebagai kunci keberhasilan pembangunan melalui pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan yang berkembang. Pemberdayaan organisasi sosial kemasyarakatan ditujukan untuk pengelolaan sumberdaya alam dengan memberikan motivasi yang mengarah kepada keberlanjutan. Pendekatan partisipatif masyarakat dalam pembangunan dilakukan dengan menciptakan kesadaran masyarakat pada

peningkatan kemampuan sumberdaya manusia, penghargaan terhadap bentuk kelembagaan dan organisasi sosial masyarakat sebagai satu sistim kontrol terhadap jalannya pembangunan, pengembangan nilai-nilai masyarakat tradisional yang mengandung keutamaan dan kearifan, meningkatkan kemandirian dan kemampuan masyarakat dengan berorganisasi.

Dengan demikian faktor sosial dalam pembangunan yang berkelanjutan merupakan salah satu faktor yang tidak kalah penting apabila dibandingkan dengan faktor ekonomi dan ekologi. Bukti-bukti menjelaskan bahwa proyek pembangunan yang kurang memperhatikan faktor sosial kemasyarakatan akan menjadi ancaman bagi keberhasilan proyek atau program pembangunan yang dilaksanakan karena tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

Menurut Serageldin (1994) Tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan memiliki hubungan dengan tujuan lingkungan. Keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh kondisi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan akan terhambat apabila kondisi sosial ekonomi masyarakat penuh dengan ketidakpastian. Di samping itu pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan efisiensi penggunaan sumberdaya dan kelestarian alam akan menyebabkan degradasi alam yang tidak dapat pulih kembali, sehingga usaha yang dapat dilakukan adalah dengan efisiensi penggunaan sumberdaya alam dan juga memberikan penilaian terhadap lingkungan dengan mengevaluasi dampak lingkungan yang ditimbulkannya. Karena bagaimanapun proses pembangunan yang berjalan sedikit ataupun banyak akan menimbulkan eksternalitas negatif dimana masyarakat yang akan merasakan akibat dari kerusakan tersebut. Masyarakatlah yang menanggung beban berupa biaya - biaya sosial yang harus ditanggung baik oleh masyarakat saat ini maupun generasi yang akan datang.

Hal yang terpenting adalah bagaimana pemahaman mengenai pembangunan dimulai dari pendekatan kepada berhasil atau tidaknya pembangunan itu mengurangi kemiskinan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi berperan dan bagaimana

proses pertumbuhan itu dipengaruhi oleh semakin berkurangnya sumberdaya dan makin meningkatnya biaya lingkungan. Langkah selanjutnya yang harus menjadi pertimbangan global adalah bagaimana menemukan cara yang efektif sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat sekaligus memecahkan masalah kemiskinan tanpa membahayakan lingkungan atau menurunkan kualitas sumberdaya alam untuk generasi ayang akan datang.

E. Pembangunan Pertanian Perdesaan yang Berkelanjutan (*Sustainable Rural Development*)

Dalam hubungan dengan konsep pembangunan daerah melalui pendekatan agropolitan oleh Anwar (1999) disebutkan bahwa hubungan ketiga aspek dalam pembangunan yang berkelanjutan tersebut diterjemahkan sebagai pembangunan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan. Pertumbuhan berupa peningkatan kapasitas produksi daerah diakibatkan oleh aktifitas pertanian secara luas bukan hanya peningkatan aktifitas pertanian budidaya saja. Jadi dalam hal ini aktifitas pertanian yang mengolah bahan mentah yang dihasilkan dari pertanian budidaya dan aktifitas pemasaran hasil menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam hal ini konsep pembangunan ekonomi perdesaan yang berkelanjutan mempunyai kaitan erat dengan aktifitas pembangunan wilayah dengan agroindustri dan agrobisnis yang akan dikembangkan. Selanjutnya pemerataan pembangunan dapat dicapai dengan menyertakan masyarakat lokal baik secara individu maupun melalui organisasi sosial kemasyarakatan dalam aktifitas perekonomian daerah dengan distribusi pendapatan yang lebih adil.

Selanjutnya dikatakan bahwa sektor pertanian sejak tahap awal pembangunan selalu menjadi sektor penting dalam perekonomian nasional Indonesia. Hal tersebut didasarkan kepada pertimbangan bahwa selain dapat meningkatkan sumbangan kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga menjadi sumber pendapatan dan kesempatan kerja. Selain itu sektor pertanian juga menjadi sektor input yang

memasok input-input untuk sektor lain seperti untuk keperluan agroindustri. Adanya peranan untuk menyediakan input bagi sektor lain, menyebabkan nilai tambah sektor pertanian akan meningkat dan merupakan sumber peningkatan devisa negara. Di samping itu selama krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sektor tradisional ini ternyata dapat terus memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sebagai basis perekonomian masyarakat maka pembangunan pada sektor pertanian di perdesaan juga dapat lebih menjamin pemerataan pendapatan karena sebagian besar masyarakat Indonesia hidup di perdesaan dan menggantungkan hidupnya pada sektor tradisional ini.

Meskipun peranan relatif sektor pertanian telah menyusut akibat perubahan struktural yang terjadi namun sektor pertanian masih tetap memainkan peranan yang sangat penting terutama dalam peningkatan PDB dan penyerapan tenaga kerja, sehingga pembangunan yang diorientasikan kepada sektor pertanian dan wilayah perdesaan ini sekarang tetap menjadi hal penting karena apabila pembangunan di sektor ini tidak berhasil terutama dalam jangka menengah dan jangka panjang akan dapat berdampak negatif terhadap pembangunan nasional secara keseluruhan berupa kesenjangan yang semakin melebar antar wilayah dan antar kelompok-kelompok masyarakat. Kondisi ini akan memperlemah fondasi kehidupan sosial, ekonomi, politik dalam masyarakat. Adanya sifat-sifat ketangguhan sektor pertanian ini menumbuhkan harapan bahwa sektor pertanian akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi dan penggerak perekonomian yang utama, dan harapan tersebut diperkuat dengan adanya komitmen pemerintah untuk mengembangkan koperasi, perusahaan kecil dan menengah sebagai pelaku ekonomi utama pembangunan nasional yang dapat mendorong kemajuan.

Nasoetion (1999) dalam Hastuti (2001) menyatakan bahwa relatif tangguhannya sektor pertanian antara lain disebabkan karena (1) Indonesia mempunyai keunggulan komparatif dalam ketersediaan sumberdaya alam yang menjadi penyangga utama kegiatan sektor pertanian, (2) secara institusional sektor pertanian yang relatif tradisional terlindung

dari pengaruh eksternal yang merugikan karena keterbatasan kaitan sektor tersebut dengan sektor manufaktur yang berorientasi keluar, (3) sektor pertanian terdiri dari rumah tangga petani, perusahaan kecil menengah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan internal, dan (4) sumberdaya alam Indonesia sangat beragam diantara wilayah sehingga memungkinkan terjadinya perdagangan antar wilayah yang ekstensif.

Wilayah perdesaan dengan berbagai kenyamanan dan daya tarik tersendiri telah diperlakukan secara tidak adil dalam berbagai kebijakan pemerintah di masa lalu. Pengurusan sumberdaya yang berlebihan tanpa adanya pembagian yang adil terhadap manfaat dan hasil-hasil pembangunan, telah membuat ketimpangan spasial dan ketimpangan dalam berbagai bidang kehidupan. Penyebab kondisi ini diantaranya adalah masyarakat perdesaan tidak mempunyai posisi tawar yang kuat, sehingga hak-hak kehidupan masyarakat yang lebih baik tidak diperolehnya.

Kemiskinan dan ketidak mampuan masyarakat perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kehidupan mereka. Hal ini merupakan salah satu kegagalan kebijakan pemerintah dimasa lalu karena seringkali kebijakan yang ditempuh tidak sesuai dengan kondisi ekosistem wilayah, keinginan serta nilai-nilai kehidupan yang dianut oleh masyarakat. Kebijakan pemerintah tersebut hanya didasarkan kepada tujuan meningkatkan kapital dan kepentingan segolongan tertentu saja yang merugikan golongan masyarakat yang lain, tidak memperhatikan keberagaman wilayah yang ada serta tidak sesuai dengan kebutuhan daerah.

Seharusnya keberagaman potensi wilayah baik kondisi biofisik wilayah, kemampuan sumberdaya alam, pertumbuhan penduduk, dan akses ke pasar yang berbeda menghendaki perlakuan ataupun kebijakan yang berbeda pula yang sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Kesalahan dalam pengaturan dan perancangan program-program pembangunan menyebabkan kegagalan proses pembangunan itu sendiri.

Keragaman wilayah perdesaan di Indonesia tergantung kepada tipologinya yang bervariasi, yang oleh Anwar (1999) kebijakan pertanian dan perdesaan tidak dapat dilakukan

secara seragam untuk semua keadaan wilayah yang masing-masing memiliki kekhasan dan sifat-sifat khusus yang berbeda satu dengan yang lain, sehingga setiap kebijakan harus memperhatikan kondisi perkembangan dari wilayah yang bersangkutan yang secara konseptual tergantung kepada akses pasar dan biaya-biaya transaksi.

Namun selama ini kebijakan pembangunan yang dilaksanakan adalah bias perkotaan dan akibatnya ketimpangan di berbagai bidang kehidupan antara desakota terjadi. Kesenjangan spasial yang terjadi antar wilayah perkotaan yang bercorak industri dan jasa dengan wilayah perdesaan yang di dominasi oleh sektor pertanian agribisnis merupakan akibat kebijakan yang salah dari masa lalu. Untuk itu diperlukan usaha-usaha untuk mengurangi ketimpangan spasial tersebut dengan menyeimbangkan pembangunan desa-kota yang dilakukan secara terpadu.

Keseimbangan spasial tersebut dapat tercapai apabila dalam perencanaan pembangunan perdesaan memperhatikan berbagai faktor yang terkait dan pembangunan diarahkan untuk mencapai tujuan : (1) pemerataan, (2) pertumbuhan, (3) keterkaitan, (4) keberimbangan, (5) kemandirian, dan (6) keberlanjutan.

Keterpaduan tujuan pembangunan tersebut dalam perencanaan dan proses pembangunan akan meningkatkan produktifitas daerah dengan berpegang pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat. Pembangunan desa bukanlah kegiatan pada ruang kosong tetapi kegiatan yang dilakukan pada tempat dimana sejumlah penduduk yang memiliki nilai-nilai tertentu menjadi obyek dan sekaligus sebagai subyek pembangunan. Sehingga nilai-nilai keutamaan yang dianut masyarakat, organisasi swadaya dan pengelolaan sumberdaya yang bersifat swadaya hendaknya menjadi landasan penyelenggaraan pembangunan desa.

F. Agropolitan

Beberapa dekade yang lalu paradigma pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah lebih menitik beratkan pada pembangunan fisik tanpa diikuti pembangunan ekonomi sosial

dan lingkungannya yang dilakukan secara terpadu. Hal ini menimbulkan masalah di dalam pengelolaannya, karena masyarakat belum punya kemampuan untuk mengelola agar investasi yang sudah dilakukannya dapat lestari/berfungsi. Investasi dalam skala besar yang dilaksanakan di daerah perkotaan yang diharapkan memberikan efek penetesan terhadap wilayah di sekitarnya juga tidak terjadi secara serta merta. Berdasarkan paradigma tersebut di atas, maka pembangunan harus juga memberikan perhatiannya ke wilayah perdesaan. Pendekatan pembangunan ke wilayah perdesaan harus dilakukan tidak hanya kegiatan fisik saja, melainkan yang lebih penting sebagai *entry point*-nya adalah kegiatan ekonomi berdasarkan pada potensi unggulan dimasing-masing wilayah. Terkait dengan pendekatan ini maka melalui konsep pembangunan agropolitan menjadi relevan untuk dilaksanakan di daerah perdesaan.

Pengembangan agropolitan, seperti redistribusi tanah, prasarana dan sarana pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan perdesaan sehingga masyarakat petani tidak perlu pergi ke kota untuk mendapatkan pelayanan yang berkaitan dengan produksi, pemasaran, sosial budaya dan kehidupan setiap hari (Syahrani, 2001). Pembangunan infrastruktur pada kawasan agropolitan memungkinkan penciptaan lapangan pekerjaan, kompetisi pemanfaatan lahan yang dapat ditanami untuk kepentingan non-pertanian dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat perdesaan dapat ditingkatkan melalui kegiatan agro-industri (Dardak dan Elistianto, 2005)

Menurut Soenarno (2004), infrastruktur termasuk spektrum pelayanan yang luas seperti sistem transportasi. Fasilitas umum mempunyai dimensi teknologi yang kuat dan penting untuk mendukung kegiatan manusia. Dalam pembangunan perdesaan yang berimbang tidak hanya membentuk suatu permukiman secara individu tapi juga sangat penting untuk membangun sibiotik generator keterkaitan desa-kota yaitu melalui pengembangan agropolitan (Prayitno, 2004).

Pendekatan pembangunan perdesaan ditujukan untuk mewujudkan kemandirian pembangunan perdesaan yang didasarkan pada potensi wilayah itu sendiri, dimana

ketergantungannya dengan perekonomian kota harus bisa diminimalkan. Agropolitan menjadi relevan dengan wilayah perdesaan karena pada umumnya sektor pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam memang merupakan mata pancaharian utama bagi sebagian besar masyarakat perdesaan. Dari berbagai alternatif model pembangunan, pendekatan agropolitan dipandang sebagai konsep yang dapat mengatasi permasalahan ketidakseimbangan perdesaan-perkotaan selama ini. Kawasan agropolitan tidak ditentukan oleh batasan administratif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan *economic of scale* dan *economic of scope*.

Agropolitan terdiri dari kata “agro” = pertanian dan “politan” = kota, sehingga agropolitan dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota didaerah lahan pertanian (departemen pertanian, 2002 dalam Pranoto, 2005). Hasan (2003) mengemukakan bahwa kegiatan kota tani berbasis budidaya pertanian, konservasi sumberdaya alam dan pengembangan potensi daerah dengan bingkai pembangunan berwawasan lingkungan, yang merupakan suatu upaya untuk menghindari kesalahan pembangunan masa lalu.

Menurut (Saefulhakim, 2004) “agro” bermakna: “tanah yang dikelola” atau “budidaya tanaman”, yang digunakan untuk menunjuk berbagai aktivitas berbasis pertanian. Sedang “polis” bermakna “*a Central Point or Principal*”. Agro-polis bermakna: lokasi pusat pelayanan sistim kawasan sentra-sentra aktivitas ekonomi berbasis pertanian. Kawasan agropolitan adalah kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (agropolis) yang merupakan pusat pelayanan (Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian, 2003).

Dari uraian tersebut di atas agropolitan dapat diartikan:

1. Suatu model pembangunan mengandalkan desentralisasi, pembangunan infrastruktur setara wilayah perkotaan, dengan kegiatan pengelolaan agribisnis yang berkonsentrasi di wilayah perdesaan.
2. Pendekatan agropolitan dapat mengurangi dampak negatif pembangunan yang telah dilaksanakan, yaitu

terjadinya urbanisasi yang tak terkendali, polusi, kemacetan lalu lintas, pengkumuhan kota, pengurusan sumberdaya alam dan pemiskinan desa.

3. Menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan perdesaan yang spesifik.

Pendekatan pembangunan perdesaan melalui konsep agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Keduanya bahkan menekankan pentingnya pendekatan agropolitan dalam mengembangkan perdesaan di kawasan Asia dan Afrika. Pendekatan agropolitan menggambarkan bahwa pembangunan perdesaan secara beriringan dapat dilakukan dengan pembangunan wilayah perkotaan pada tingkat lokal. Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) akses terhadap lahan pertanian dan penyediaan pengairan, (2) desentralisasi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat dan tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian. Melihat kota-kota sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pendekatan pengembangan agropolitan di banyak negara lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (Douglass, 1998).

Menurut Friedman dan Douglass (1975), tujuan pembangunan agropolitan adalah menciptakan "*cities in the field*" dengan memasukkan beberapa unsur penting dari gaya hidup kota ke dalam daerah perdesaan yang berpenduduk dengan kepadatan tertentu. Agropolitan *districts* merupakan satuan yang tepat untuk membuat suatu kebijaksanaan pembangunan ruang, melalui desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan (*decentralized*). Agropolitan *districts* dapat dikembangkan didaerah perdesaan dengan kepadatan penduduk tinggi atau peri-urban untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan kesempatan bekerja dan mengurangi tingkat migrasi ke kota (Friedman, 1996).

Friedman dan Douglass (1975) bahkan menekankan pentingnya pendekatan agropolitan dalam pengembangan perdesaan di kawasan Asia dan Afrika. Perdesaan (*rural development*) secara beriringan dapat dilakukan dengan

pembangunan wilayah perkotaan pada tingkat lokal. Dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isue utama yang perlu mendapat perhatian:

1. Akses terhadap lahan pertanian dan air.
2. Desentralisasi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat ke tingkat lokal.
3. Perubahan paradigma pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian.

Implikasi hal tersebut menyebabkan kota-desa berperan sebagai site utama untuk fungsi politik dan administrasi, transformasi wewenang dari pusat ke daerah (desentralisasi) dan demokratisasi. Sebagai bagian dari perubahan politik, hal tersebut akan berdampak terhadap perencanaan pembangunan perdesaan mengenai bagaimana upaya-upaya melaksanakan pembangunan kapasitas lokal dan partisipasi masyarakat dalam suatu program yang menumbuhkan manfaat mutual bagi masyarakat perdesaan dan perkotaan.

Selanjutnya Mercado (2002) mengemukakan bahwa gambaran agropolitan adalah sebagai berikut: (1) skala geografinya relatif kecil; (2) proses perencanaan dan pengambilan keputusan berdasarkan partisipasi dan aksi kooperatif pada tingkat lokal; (3) diversifikasi tenaga lokal termasuk pertanian dan kegiatan non-pertanian; (4) pemanfaatan teknologi dan sumberdaya lokal; (5) berfungsi sebagai urban-rural industrial.

Dengan skala luasan kabupaten akan memungkinkan hal-hal sebagai berikut: (1) akses lebih mudah bagi masyarakat untuk menjangkau kota, (2) cukup luas untuk meningkatkan dan mengembangkan wilayah pertumbuhan ekonomi dan cukup luas dalam upaya mengembangkan diversifikasi produk dalam rangka mengatasi keterbatasan pemanfaatan desa sebagai unit ekonomi, dan (3) pengetahuan lokal akan mudah dimanfaatkan dalam proses perencanaan jika proses itu dekat dengan rumah tangga dan produsen perdesaan.

Pendekatan pembangunan perdesaan tersebut ditangani oleh berbagai *stakeholders* secara terpadu sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Pendekatan pembangunan

harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu untuk meningkatkan produktifitas, meningkatkan kualitas hidup penduduk perdesaan dan meningkatkan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Pendekatan pembangunan tersebut disarankan agar dilaksanakan melalui enam elemen dasar, yaitu: (1) pembangunan pertanian dengan padat karya (labour intensif), (2) menciptakan lapangan kerja, (3) membangun industri kecil/industri rumah tangga pada wilayah pertanian, (4) gotong royong masyarakat setempat dan partisipasi dalam membuat keputusan, (5) mengembangkan hirarki pembangunan kota untuk mendukung pembangunan perdesaan, dan (6) kelembagaan yang tepat untuk koordinasi multisektor.

Menurut Rustiadi (2004) pembangunan agropolitan memerlukan terjadinya re-organisasi pembangunan ekonomi wilayah perdesaan. Hal ini dapat dilakukan melalui strategi peningkatan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Strategi tersebut memerlukan beberapa dukungan kebijakan pemerintah agar mampu meningkatkan kinerja ekonomi perdesaan, seperti antara lain redistribusi aset, terutama yang menyangkut lahan dan kapital.

Model dan manipulasinya melalui proses simulasi adalah alat yang sangat bermanfaat dalam sistim analisis. Model dapat digunakan sebagai representasi sebuah sistim yang sedang dikerjakan atau menganalisis sistim yang sudah dilakukan. Dengan menggunakan model dapat dihasilkan desain atau keputusan operasional dalam waktu yang singkat dan biaya yang murah (Blanchord dan Fabrycky, 1981 dalam Pranoto, 2005). Menurut Kholil (2005) untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan pendekatan kesisteman, harus diawali dengan berpikir sistemik (*system thinking*), sibematik (*goal oriented*), holistik dan efektif.

Dari terminologi penelitian operasional, secara umum model didefinisikan sebagai suatu perwakilan atau abstraksi dari sebuah objek atau situasi aktual. Model memperlihatkan hubungan-hubungan langsung maupun tidak langsung serta kaitan timbal balik dalam istilah sebab akibat. Oleh karena itu suatu model adalah suatu abstraksi dari realitas, maka pada

wujudnya kurang kompleks dari pada realitas itu sendiri (Eriyanto, 2003).

Menurut Muhamadi, dkk (2001) model adalah suatu bentuk yang dibuat untuk menirukan suatu gejala atau proses. Model dapat dikelompokkan menjadi model kuantitatif, kualitatif dan model ikonik. Model kualitatif adalah model yang berbentuk gambar, diagram atau matrik. Model ikonik adalah model yang mempunyai bentuk fisik sama dengan barang yang ditirukan.

Menurut Meadows (1982) model adalah usaha memahami beberapa segi dari dunia kita yang sangat beraneka ragam sifatnya, dengan cara memilih sekian banyak pengamatan dan pengalaman masa lalu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Dari berbagai pendapat tersebut diatas, maka model secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk peniruan dan penyederhanaan dari suatu gejala proses atau benda dalam skala yang lebih kecil skalanya.

BAGIAN VI
MODEL DAN STRATEGI
PEMBERDAYAAN EKONOMI
RAKYAT

BAB XXI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PETANI DAN NELAYAN KECIL

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan. Dengan demikian maka masyarakat harus mampu meningkatkan kualitas kemandirian mengatasi masalah yang dihadapi.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas. Pembentukan dan perubahan perilaku tersebut, baik dalam dimensi sektoral yakni dalam seluruh aspek/sektor-sektor kehidupan manusia; dimensi kemasyarakatan yang meliputi jangkauan kesejahteraan dari materiil hingga non materiil; dimensi waktu dan kualitas yakni jangka pendek hingga jangka panjang dan peningkatan kemampuan dan kualitas untuk pelayanannya, serta dimensi sasaran yakni dapat menjangkau dari seluruh strata masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tidak lain adalah memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat agar mampu menggali potensi dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya, melalui cara antara lain dengan pendidikan untuk penyadaran dan pemampuan diri mereka.

Di Indonesia, perkembangan pemberdayaan petani dan nelayan kecil dikenal dengan program penyuluhan, dimulai bersamaan dengan berdirinya Departemen Pertanian (*Van Landbouw*) pada tahun 1905. Pada masa itu, salah satu tugas departemen tersebut adalah menyalurkan hasil penyelidikan pertanian kepada petani. Lalu, menjelang dan awal Pelita I, melalui program Bimbingan Massal-Intensifikasi Massal (Bimas-Inmas), penyuluhan dilakukan besar-besaran. Walaupun demikian, praktis sejak perang kemerdekaan orientasi kegiatan

penyuluhan ditujukan untuk meningkatkan produksi bahan makanan pokok rakyat Indonesia yaitu beras.

Puncak pengaruh langsung maupun tidak langsung pelaksanaan penyuluhan adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, yaitu beras yang diakui secara internasional pada sidang FAO 1985 di Roma (Pambudy, 1998). Namun, landasan penyuluhan yang selama ini diketahui hanya sekedar meningkatkan produksi perlu dikaji kembali. Selain itu, kelembagaan/institusi (pendidikan/ pemerintahan/birokrasi) yang juga lebih berorientasi pada peningkatan produksi sektor pertanian (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan) juga perlu ditinjau kembali.

A. Arah Tantangan di Era Globalisasi

Menurut Saragih (1998), makna terdalam era globalisasi dalam struktur perekonomian adalah perdagangan bebas. Dalam perdagangan bebas berarti ada persaingan. Dalam globalisasi tersebut yang akan bersaing adalah barang sekunder, yaitu produk agroindustri. Di Indonesia bahan baku untuk industri tersedia, tetapi yang menjadi kendala adalah penggunaan dan penguasaan teknologi modern yang memperkuat agribisnis, atau penekanan masalah yang dihadapi dalam era globalisasi adalah pada peningkatan SDM (termasuk bagi para petani dan nelayan kecil).

Berdasarkan hal di atas, maka arah pengembangan pertanian dan perikanan ke depan adalah agribisnis, yaitu mengembangkan pertanian dan agroindustri atau industri yang mengolah hasil pertanian/ perikanan dan jasa-jasa yang menunjangnya. Termasuk di dalam perikanan, misalnya di Indonesia ini dari sisi penawaran, kita memiliki perairan laut seluas 5,8 juta km² dan garis pantai sepanjang 90 ribu km, adalah merupakan basis kegiatan ekonomi perikanan yang sangat besar. Hal ini tentu belum termasuk potensi perikanan air tawar, baik perairan umum (sungai dan danau), budidaya kolam, budidaya ikan karamba/jarring apung, budidaya ikan rawa dan budidaya ikan sawah yang juga masih terbuka luas. Khusus tentang arah pembangunan perikanan dengan pendekatan agribisnis adalah dengan membangun dan mengembangkan subsistem industri hulu perikanan (pembenihan, industri peralatan tangkap ikan, industri

pakan ikan), subsistim budidaya pasca panen/tangkap, subsistim pengolahan hasil perikanan dan perdagangan, dan subsistim jasa penunjang (R and D) dalam suatu sistim yang terintegrasi.

Masih menurut Saragih (1998) pengembangan agribisnis di Indonesia merupakan tuntutan perkembangan yang logis dan harus dilanjutkan sebagai wujud kesinambungan, penganekaragaman dan pendalaman pembangunan pertanian selama ini. Pengembangan agribisnis akan tetap relevan walau telah tercapai setinggi apapun kemajuan suatu negara. Bahkan agribisnis akan menjadi andalan utama bagi suatu negara yang masih sulit melepaskan ketergantungan pembangunan nasionalnya dari sektor pertanian dan pedesaan seperti Indonesia ini. Beberapa alasan lain untuk memperkuat pilihan pada agribisnis, adalah: (1) tersedianya bahan baku yang tersedia, (2) akan memperluas daya tampung tenaga kerja di sektor pertanian dan pedesaan, dan (3) pengembangan agribisnis dalam skala kecil lebih mudah diarahkan untuk lebih bersahabat dengan lingkungan (daripada industri besar), sehingga dapat menekan kerusakan lingkungan.

B. Penguatan Peranserta dan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Korten (1984), masa pasca industri akan menghadapi kondisi-kondisi baru yang sama sekali berbeda dengan kondisi di masa industri, dimana potensi-potensi baru penting dewasa ini memperkokoh kesejahteraan, keadilan, dan kelestarian umat manusia. Titik pusat perhatian adalah pada pendekatan ke arah pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat.

Ada alasan untuk yakin bahwa paradigma seperti itu dewasa ini sedang muncul dari proses penemuan sosial kolektif sedunia. Logika paradigma ini yang menonjol adalah logika lingkungan hidup manusia yang berimbang, sumber dayanya yang dominan adalah sumber daya informasi dan prakarsa yang kreatif yang tak kunjung habis, dan sasarannya yang dominan adalah pertumbuhan umat manusia yang dirumuskan dalam rangka lebih terealisasinya potensi umat manusia. Individu bukanlah sebagai obyek, melainkan berperan sebagai pelaku, yang menentukan tujuan, mengontrol sumber daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi hidupnya sendiri. Pembangunan yang memihak

rakyat menekankan nilai pentingnya prakarsa dan perbedaan lokal. Karenanya pembangunan seperti itu mementingkan sistem swa-organisasi yang dikembangkan di sekitar satuan-satuan organisasi berskala manusia dan masyarakat yang berswadaya.

Kesejahteraan dan realisasi diri manusia merupakan jantung konsep pembangunan yang memihak rakyat. Perasaan berharga diri yang diturunkan dari keikutsertaan dalam kegiatan produksi adalah sama pentingnya bagi pencapaian mutu hidup yang tinggi dengan keikutsertaan dalam konsumsi produk-produknya. Keefisienan sistem produksi, karenanya haruslah tidak semata-mata dinilai berdasar produk-produknya, melainkan juga berdasar mutu kerja sebagai sumber penghidupan yang disediakan bagi para pesertanya, dan berdasar kemampuannya menyertakan segenap anggota masyarakat.

Salah satu perbedaan penting antara pembangunan yang memihak rakyat dan pembangunan yang mementingkan produksi ialah bahwa yang kedua itu secara terus menerus menundukkan kebutuhan rakyat di bawah kebutuhan sistem agar sistem produksi tunduk kepada kebutuhan rakyat (Korten, 1984).

Perbedaan paradigma pembangunan yang mementingkan produksi yang dewasa ini unggul dan pembangunan yang lebih berpihak kepada rakyat sebagai tandingannya, mengandung arti penting bagi penciptaan masa depan yang lebih manusiawi. Khususnya pemahaman akan perbedaan itu penting artinya bagi pemilihan teknik sosial termasuk bagaimana pemberdayaan masyarakat dilakukan secara tepat untuk mencapai tujuan-tujuan yang mementingkan rakyat.

Penyadaran diri (*conscienzazione*), satu di antara argumen-argumen yang paling telak dan tajam diajukan oleh Paulo Freire (1984), adalah merupakan inti dari usaha bagaimana bisa mengangkat rakyat dari kelemahannya selama ini. Kesempitan pandangan dan cakrawala rakyat yang tersekap dalam kemiskinan dan sering menghayati kehidupan mereka dalam keterpencilan (isolasi) dan kekumuhan, harus diubah kearah suatu keinsyafan, perasaan, pemikiran, gagasan, bahwa hal-ihwal dapat menjadi lain, dan tersedia alternatif-alternatif.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat harus mampu mengembangkan teknik-teknik pendidikan tertentu yang imajinatif untuk menggugah kesadaran masyarakat. Menurut

Sikhondze (1999), orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu petani dan nelayan (sasaran) agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi-inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal-hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Sedangkan peran petugas pemberdayaan masyarakat sebagai *outsider people* dapat dibedakan menjadi 3 bagian yaitu peran konsultan, peran pembimbingan dan peran penyampai informasi. Dengan demikian peranserta kelompok sasaran (masyarakat itu sendiri) menjadi sangat dominan.

Belajar dari pengalaman menunjukkan bahwa ketika peran penguasa sangat dominan dan peranserta masyarakat di pandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru terpinggirkan dari proses pembangunan. Penguatan peranserta masyarakat haruslah menjadi bagian dari agenda demokratisasi lebih-lebih dalam era globalisasi. Peranserta masyarakat harus lebih dimaknai sebagai hak katibang kewajiban. Kontrol rakyat terhadap isi dan prioritas agenda pengambilan keputusan atas program-program pembangunan yang ditujukan kepadanya adalah hak masyarakat sebagai pemegang kata akhir dan mengontrol apa saja yang masuk dalam agenda dan urutan prioritas.

Apabila peranserta masyarakat meningkat efektivitasnya, maka sebenarnya upaya pemberdayaan masyarakat telah dijalankan. Upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan meningkatkan efisiensi dan produktifitas melalui pengembangan sumberdaya manusia, penguasaan teknologi dan penguatan kelembagaan serta perbaikan sarana dan prasarana ekonomi dan sosial. Upaya ini memerlukan adanya kerjasama yang sinergis dari berbagai kekuatan pembangunan yang ada. Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat, sebagai berikut:

1. Belajar dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional

masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2. Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Walaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3. Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan tradisional masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

C. Pemberdayaan Menuju Petani dan Nelayan Kecil Mandiri

Konsep pemberdayaan masyarakat secara mendasar berarti menempatkan masyarakat beserta institusi-institusinya sebagai kekuatan dasar bagi pengembangan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Menghidupkan kembali berbagai pranata ekonomi masyarakat untuk dihimpun dan diperkuat sehingga

dapat berperan sebagai lokomotif bagi kemajuan ekonomi merupakan keharusan untuk dilakukan. Ekonomi rakyat akan terbangun bila hubungan sinergis dari berbagai pranata sosial dan ekonomi yang ada di dalam masyarakat dikembangkan kearah terbentuknya jaringan ekonomi rakyat. Dalam rangka mencari solusi masalah ekonomi dan politik serta budaya yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, semua pihak telah memberikan rambu-rambu untuk tidak terjebak membuat “bungkus baru namun isi lama”. Dari berbagai tawaran alternatif model pemberdayaan masyarakat, “model ekonomi kerakyatan” secara teoritik telah berkembang menjadi wacana baru saat ini.

Paradigma pemberdayaan ekonomi rakyat sebenarnya bukan saja berupa tuntutan atas pembagian secara adil aset ekonomi, tetapi juga merupakan keniscayaan ideologis dengan semangat meruntuhkan dominasi-dominasi birokrasi dalam mengatur dan menentukan berbagai bidang kehidupan rakyat (Sasono, 1999). Untuk itu, maka pemberdayaan ekonomi rakyat (dalam penerapan untuk petani dan nelayan kecil) berarti menuju kepada terbentuknya kemandirian petani dan nelayan itu, yaitu berperilaku efisien, modern dan berdaya saing tinggi. Perilaku efisien artinya berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi secara tepat guna atau berdaya guna. Berperilaku modern artinya mengikuti dan terbuka terhadap perkembangan dan inovasi serta perubahan yang ada. Sedangkan berdaya saing tinggi yaitu mampu berpikir dan bertindak serta menggunakan sarana produksi atas dasar memperhatikan mutu hasil kerjanya dan kepuasan konsumen yang dilayaninya (Sumardjo, 1999).

Gagasan pemberdayaan ekonomi rakyat menurut Mahmudi (1999) adalah merupakan upaya mendorong dan melindungi tumbuh dan berkembangnya kekuatan ekonomi lokal dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) oleh masyarakat yang berbasiskan pada kekuatan rakyat. Muatan gagasan ini tidak saja dituntut untuk dapat mendayagunakan dan menghasilgunakan potensi sumber daya lokal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi juga terlindunginya hak-hak rakyat dalam pengelolaan sumberdaya lokal sesuai dengan kepentingan ekonomi dan sosialnya.

Beberapa pendekatan dan strategi dalam pemberdayaan masyarakat (Karsidi, 2001) menuju kemandirian petani dan nelayan kecil, dapat ditempuh dengan berbagai upaya sebagai berikut:

1. Memulai dengan tindakan mikro dan lokal. Proses pembelajaran rakyat harus dimulai dengan tindakan mikro dan lokal, namun memiliki konteks makro dan global. Dialog mikro-makro harus terus menerus menjadi bagian pembelajaran masyarakat agar berbagai pengalaman mikro dapat menjadi *policy input* dan *policy reform* sehingga memiliki dampak yang lebih luas. Petugas pemberdayaan/pendamping masyarakat tani dan nelayan kecil seyogyanya diberikan kebebasan untuk mengembangkan pendekatan dan cara yang sesuai dengan rumusan tuntutan kebutuhan setempat/lokal di wilayah tugasnya masing-masing.
2. Pengembangan sektor ekonomi strategis sesuai dengan kondisi lokal (daerah). Karena masing-masing daerah potensinya berbeda, maka kebijakan yang akan diberlakukan juga berbeda antar daerah. Pemberlakuan kebijakan secara seragam untuk semua daerah harus ditinggalkan.
3. Mengganti pendekatan kewilayahan administratif dengan pendekatan kawasan. Pemberdayaan masyarakat tidak mungkin didasarkan atas kewilayahan administratif. Pendekatan kewilayahan administratif adalah pendekatan birokrasi/kekuasaan. Pendekatan kawasan berarti lebih menekankan pada kesamaan dan perbedaan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan tertentu. Dengan pendekatan ini akan memungkinkan terjadinya pemberdayaan masyarakat dalam skala besar dan lebih lanjut akan memungkinkan terjadinya kerjasama antar kawasan yang lebih produktif.
4. Membangun kembali kelembagaan masyarakat. Peranserta masyarakat menjadi keniscayaan bagi semua upaya pemberdayaan masyarakat, jika tidak dibarengi munculnya kelembagaan sosial, ekonomi

dan budaya yang benar-benar diciptakan oleh masyarakat sendiri. Misalnya lumbung desa dan organisasi lokal lainnya dipersilahkan tetap hidup.

5. Mengembangkan penguasaan pengetahuan teknis. Perlu dipahami bersama bahwa desakan modernisasi telah menggusur ilmu pengetahuan dan teknologi lokal dan menciptakan ketergantungan masyarakat lokal pada input luar serta hilangnya kepercayaan diri yang sangat serius. Temuan-temuan lokal oleh petani dan nelayan setempat harus mendapatkan pengakuan sejajar dan dipersilahkan bebas berkompetisi dengan inovasi baru dari luar. Pola penyuluhan yang bersifat sentralistik, *topdown* dan linier (Sumardjo, 1998) perlu diubah menjadi pendekatan yang lebih dialogis terhadap masalah.
6. Pengembangan kesadaran pelaku ekonomi. Karena peristiwa ekonomi juga merupakan peristiwa politik atau lebih dikenal dengan politik ekonomi, maka tindakan yang hanya ber-orientasi memberikan bantuan teknis jelas tidak memadai. Pemberdayaan yang diperlukan adalah tindakan berbasis pada kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari belenggu kekuatan ekonomi dan politik yang menghambat proses demokratisasi ekonomi. Komitmen para petugas pemberdayaan masyarakat dan lembaga-lembaga terkait pada pengembangan kemandirian petani dan nelayan kecil merupakan sesuatu yang sangat diperlukan.
7. Membangun jaringan ekonomi strategis. Jaringan strategis akan berfungsi untuk mengembangkan kerjasama dalam mengatasi keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki kelompok ekonomi satu dengan lainnya baik dalam bidang produksi, pemasaran, teknologi dan permodalan. Salah satu yang sudah waktunya dibangun adalah jaringan infrastruktur telekomunikasi dan sistem informasi pendukungnya yang memanfaatkan seperti internet untuk membuka pintu gerbang seluas-luasnya bagi

petani dan nelayan atas informasi yang diperlukan bagi pengembangan usahanya (setidaknya melalui mediasi para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat).

8. Kontrol kebijakan. Agar kebijakan pemerintah benar-benar mendukung upaya pemberdayaan masyarakat, maka kekuasaan pemerintah harus dikontrol. Sebagai contoh adalah keikutsertaan organisasi petani dan nelayan dalam proses pengambilan keputusan tentang kebijakan pertanian dan perikanan.

Dengan memperhatikan arah tantangan pertanian dan perikanan yaitu seharusnya dikembangkan ke arah agribisnis, maka perlu mendapat penekanan bahwa sasaran strategis pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar peningkatan pendapatan semata, melainkan juga sebagai upaya membangun basis-basis ekonomi yang bertumpu pada kebutuhan masyarakat dan sumberdaya lokal yang handal. Dalam kerangka tersebut, keberhasilan upaya pemberdayaan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan masyarakat melainkan juga aspek-aspek penting dan mendasar lainnya.

Beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian dalam pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan, antara lain:

1. Pengembangan organisasi/kelompok masyarakat yang dikembangkan dan berfungsi dalam mendinamisir kegiatan produktif masyarakat, misalnya berfungsinya HKTI, HNSI, dan organisasi lokal lainnya.
2. Pengembangan jaringan strategis antar kelompok/organisasi masyarakat yang terbentuk dan berperan dalam pengembangan masyarakat tani dan nelayan, misalnya asosiasi dari organisasi petani dan nelayan, baik dalam skala nasional, wilayah, maupun lokal.
3. Kemampuan kelompok petani dan nelayan kecil dalam mengakses sumber-sumber luar yang dapat mendukung pengembangan mereka, baik dalam bidang informasi pasar, permodalan, serta teknologi dan manajemen, termasuk didalamnya kemampuan lobi ekonomi. Di sinilah maka perlunya ekonomi

jaringan dipembangkan. Ekonomi jaringan adalah suatu perekonomian yang menghimpun para pelaku ekonomi, baik dari produsen, konsumen, *service provider*, *equipment provider*, *cargo*, dan sebagainya di dalam jaringan yang terhubung baik secara elektronik maupun melalui berbagai forum usaha yang aktif dan dinamis. Ekonomi jaringan ini harus didukung oleh jaringan telekomunikasi, jaringan pembiayaan, jaringan usaha dan perdagangan, jaringan advokasi usaha, jaringan saling belajar, serta jaringan lainnya seperti hasil temuan riset dan teknologi/inovasi baru, jaringan pasar, informasi kebijakan dan pendukung lainnya yang dapat diakses oleh semua dan tidak dimonopoli oleh kelompok tertentu (Sasono, 2000).

4. Pengembangan kemampuan-kemampuan teknis dan manajerial kelompok-kelompok masyarakat, sehingga berbagai masalah teknis dan organisasi dapat dipecahkan dengan baik. Di sini, selain masyarakat sasaran (petani dan nelayan), juga para petugas penyuluh/pendamping pemberdayaan masyarakat harus meningkatkan kompetensi diri sebagai petugas yang mampu memberdayakan, karena banyak diantara mereka justru ketinggalan kemampuannya dengan kelompok sasarannya.

Upaya pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil merupakan jalan yang masih panjang dan masih penuh tantangan. Model pembangunan ekonomi yang sentralistik dan sangat kapitalistik telah melembaga sangat kuat baik secara ekonomi, politik maupun budaya, sehingga tidak mudah untuk menjebolnya. Hanya dengan komitmen yang kuat dan keberpihakan yang tulus, serta upaya yang sungguh-sungguh, pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil tersebut dapat diwujudkan.

Pemberdayaan masyarakat petani dan nelayan kecil agar mampu menjawab tantangan di era globalisasi (yaitu menuju usaha agribisnis) membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, para pelaku ekonomi, rakyat, lembaga pendidikan,

organisasi profesi, serta organisasi-organisasi non pemerintah lainnya. Komitmen itu dapat diwujudkan dalam bentuk memberikan kepercayaan berkembangnya kemampuan-kemampuan lokal atas dasar kebutuhan setempat.

Penguatan peranserta masyarakat petani dan nelayan kecil sebagai pelaku pembangunan, karena harus didorong seluas-luasnya melalui program-program pendampingan menuju suatu kemandirian mereka. Disamping itu pula, perlu pengembangan organisasi, ekonomi jaringan dan faktor-faktor pendukung lainnya. Dengan usaha pemberdayaan masyarakat yang demikian itu, mudah-mudahan dapat membebaskan mereka dari kemiskinan dan keterbelakangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

BAB XXII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN BERBASISKAN MASYARAKAT TERPENCIL

Di negara kita masih terdapat banyak penduduk miskin (38,4 juta jiwa tahun 2009). Penduduk miskin ini tersebar di perkotaan dan pedesaan. Diantara masyarakat miskin di pedesaan ini, yang kondisi kemiskinannya paling rentan adalah yang berdiam di wilayah terpencil. Wilayah terpencil adalah wilayah yang tidak terhubung dengan prasarana transportasi (darat, laut maupun udara) dan komunikasi dengan pusat-pusat pertumbuhan terkecil sekalipun (yaitu pusat desa atau kecamatan). Wilayah terpencil berada di pulau-pulau kecil maupun di pedalaman. Di beberapa wilayah pedesaan terpencil ini bermukim masyarakat adat dan masyarakat umum. Mereka adalah masyarakat yang masih sangat terbelakang, belum mampu mengembangkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan sangat sedikit menerima sentuhan pembangunan.

A. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merujuk pada pengertian perluasan kebebasan memilih dan bertindak. Bagi masyarakat miskin, kebebasan ini sangat terbatas karena ketidakmampuan bersuara (*voicelessness*) dan ketidakberdayaan (*powerlessness*) dalam hubungannya dengan negara dan pasar. Karena kemiskinan adalah multi dimensi, masyarakat miskin membutuhkan kemampuan pada tingkat individu (seperti kesehatan, pendidikan dan perumahan) dan pada tingkat kolektif (seperti bertindak bersama untuk mengatasi masalah). Memberdayakan masyarakat miskin dan terbelakang menuntut upaya menghilangkan penyebab ketidakmampuan mereka meningkatkan kualitas hidupnya.

Unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah: (1) inklusi dan partisipasi; (2) akses pada informasi; (3) kapasitas organisasi lokal; dan (4) profesionalitas pelaku pemberdaya. Keempat elemen ini terkait satu sama lain dan saling mendukung.

Inklusi berfokus pada pertanyaan siapa yang diberdayakan, sedangkan partisipasi berfokus pada bagaimana mereka diberdayakan dan peran apa yang mereka mainkan setelah mereka menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. Menyediakan ruang partisipasi bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dalam pembangunan adalah memberi mereka otoritas dan kontrol atas keputusan mengenai sumber-sumber pembangunan. Partisipasi masyarakat miskin dalam menetapkan prioritas pembangunan pada tingkat nasional maupun daerah diperlukan guna menjamin bahwa sumber daya pembangunan (dana, prasarana/sarana, tenaga ahli, dan lain-lain) yang terbatas secara nasional maupun pada tingkat daerah dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat miskin tersebut.

Partisipasi yang keliru adalah melibatkan masyarakat dalam pembangunan hanya untuk didengar suaranya tanpa betul-betul memberi peluang bagi mereka untuk ikut mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang partisipatif tidak selalu harmonis dan seringkali ada banyak prioritas yang harus dipilih, oleh sebab itu mekanisme resolusi konflik kepentingan harus dikuasai oleh pemerintah guna mengelola ketidak-sepakatan.

Ada berbagai bentuk partisipasi, yaitu secara langsung, dengan perwakilan (yaitu memilih wakil dari kelompok-kelompok masyarakat), secara politis (yaitu melalui pemilihan terhadap mereka yang mencalonkan diri untuk mewakili mereka), berbasis informasi (yaitu dengan data yang diolah dan dilaporkan kepada pengambil keputusan), dan berbasis mekanisme pasar yang kompetitif (misalnya dengan pembayaran terhadap jasa yang diterima).

Partisipasi secara langsung oleh masing-masing anggota masyarakat adalah tidak realistis, kecuali pada masyarakat yang jumlah penduduknya sedikit, atau untuk mengambil keputusan-keputusan kenegaraan yang mendasar melalui referendum. Yang umum dilakukan adalah partisipasi secara tidak langsung, oleh wakil-wakil masyarakat atau berdasarkan informasi dan mekanisme pasar. Organisasi berbasis masyarakat seperti lembaga riset, LSM, organisasi keagamaan, dll. mempunyai peran yang penting dalam membawa suara masyarakat miskin untuk didengar oleh pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah.

Walaupun keterwakilan sudah dilakukan dengan benar, proses partisipasi masih belum benar jika penyelenggaraannya dilakukan secara tidak sungguh-sungguh. Upaya yang dilandasi niat jujur untuk menampung pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang menyangkut ruang hidup mereka dapat menjadi tidak berhasil, jika pendapat wakil-wakil masyarakat yang diharapkan mewakili kepentingan semua unsur masyarakat itu kemudian hanya diproses sekedarnya saja, tanpa upaya memahami pertimbangan apa dibalik pendapat yang diutarakan wakil-wakil tersebut.

Partisipasi semu seperti itu menambah ongkos pembangunan, tanpa ada manfaat yang jelas bagi peserta yang diajak berpartisipasi. Upaya melibatkan masyarakat dalam pengertian yang benar adalah memberi masyarakat kewenangan untuk memutuskan sendiri apa-apa yang menurut mereka penting dalam kehidupan mereka.

Unsur ke dua, akses pada informasi, adalah aliran informasi yang tidak tersumbat antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Informasi meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. Masyarakat pedesaan terpencil tidak mempunyai akses terhadap semua informasi tersebut, karena hambatan bahasa, budaya dan jarak fisik. Masyarakat yang *informed*, mempunyai posisi yang baik untuk memperoleh manfaat dari peluang yang ada, memanfaatkan akses terhadap pelayanan umum, menggunakan hak-haknya, dan membuat pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat bersikap akuntabel atas kebijakan dan tindakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Kapasitas organisasi lokal adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Masyarakat yang *organized*, lebih mampu membuat suaranya terdengar dan kebutuhannya terpenuhi.

Profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat. Pelaku pemberdaya juga harus mampu mempertanggungjawabkan kebijakan dan tindakannya yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

B. Hasil yang Diharapkan

Memberdayakan masyarakat berarti melakukan investasi pada masyarakat, khususnya masyarakat miskin, dan organisasi mereka, sehingga asset dan kemampuan mereka bertambah, baik kapabilitas perorangan maupun kapasitas kelompok. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung secara efektif, maka reformasi kenegaraan, *state reform*, harus dilakukan pada tingkat nasional maupun daerah. Berbagai peraturan, ketentuan, mekanisme kelembagaan, nilai-nilai dan perilaku harus disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat miskin berinteraksi secara efektif dengan pemerintah. Berbagai ketentuan perlu disiapkan untuk memungkinkan masyarakat miskin dapat memantau kebijakan, keputusan dan tindakan pemerintah dan pihak-pihak lain yang terlibat. Tanpa pemantauan yang efektif dari masyarakat miskin, maka kepentingan mereka dapat terlampaui oleh kepentingan-kepentingan lain.

Adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan menghasilkan wujud yang berbeda jika pembangunan tidak melalui proses yang partisipatif. Pembangunan yang partisipatif menghasilkan tata pemerintahan yang lebih baik, kemakmuran yang lebih adil, pelayanan dasar yang lebih bermanfaat bagi masyarakat banyak, akses ke pasar dan jasa bisnis yang lebih merata, organisasi masyarakat yang lebih kuat, dan kebebasan memilih yang lebih terbuka.

C. Contoh Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Skala Nasional

Salah satu penerapan prinsip partisipasi, sebagai salah satu unsur dalam proses pemberdayaan masyarakat, yang penting adalah dalam proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Dalam *participatory budgeting* ini, sejumlah *stakeholders* mendiskusikan, menganalisis, memprioritaskan dan

memantau keputusan tentang anggaran belanja pemerintah. *Stakeholders* ini mencakup masyarakat umum, kelompok miskin, dan kelompok terpinggirkan seperti kaum perempuan, dan kelompok-kelompok pemangku kepentingan lain seperti dunia usaha, anggota parlemen dan juga lembaga pemberi pinjaman.

Penganggaran yang partisipatif dilakukan dalam tiga tahap penganggaran: analisa dan formulasi anggaran, penelusuran dan pemantauan pengeluaran anggaran, dan penilaian terhadap hasil kerja pemerintah. Hasil dari proses perencanaan dan penggunaan anggaran pembangunan secara partisipatif yang diharapkan adalah pelaksanaan pembangunan yang pro-kemiskinan, terwujudnya konsensus sosial, dan meningkatnya dukungan masyarakat dalam proses reformasi yang seringkali menuntut pengorbanan.

Penganggaran yang partisipatif ternyata berakibat positif bagi ekonomi makro dan keuangan negara, seperti ditunjukkan oleh negara Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif. Hasil yang tampak adalah anggaran yang semula defisit berubah menjadi surplus, persentase hutang/pinjaman terhadap PDB menurun, tingkat inflasi berkurang, pertumbuhan ekonomi lebih cepat, investasi asing meningkat dan pengangguran berkurang.

Penganggaran partisipatif di Irlandia didorong oleh kemauan keras pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi resesi ekonomi pada tahun 1980an, dimana inflasi sangat tinggi, hutang pemerintah meningkat, defisit anggaran besar, dan produktivitas sektor industri menurun. Pada tahun 1986 dibentuk Dewan Ekonomi dan Sosial Nasional, yang berfungsi menjadi wadah bagi "mitra sosial" (*social partners*) untuk mengupas berbagai persoalan ekonomi dan mencari jalan keluar bersama. Seluruh elemen pemberdayaan masyarakat ada dalam proses pembangunan ini.

Sampai tahun 2002 sudah ada lima produk kesepakatan yang diputuskan oleh dewan ini. Kalau tiga kesepakatan pertama berfokus pada masalah-masalah ekonomi, dua kesepakatan terakhir cakupannya lebih luas. Kesepakatan yang kelima, (2000-2002) bertema *Program for Prosperity and Fairness*, mencakup tujuan-tujuan sosial disamping tujuan ekonomi. Proses konsultasi

antara pemerintah dengan organisasi masyarakat sipil berlangsung selama empat bulan untuk menghasilkan kesepakatan tersebut.

Selain keadaan ekonomi makro dan keuangan negara yang membaik di Irlandia sejak menerapkan proses penganggaran yang partisipatif, hasil *intangible* penting adalah terbangunnya modal sosial berupa saling percaya yang tinggi antara pemerintah dan unsur-unsur masyarakat. Masing-masing pihak tidak bisa lari dari tanggungjawab sebab akan harus akuntabel terhadap komitmen yang telah dinyatakan dalam pertemuan sebelumnya. Setiap pihak mempunyai kesempatan untuk menyampaikan kepentingan, keberatan dan kontribusinya dalam mengatasi persoalan bangsa. Jadi baik pemerintah maupun unsur-unsur masyarakat sama-sama harus bertanggungjawab terhadap kesepakatan yang dibuat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam skala lebih mikro menghasilkan tingkat pelayanan umum yang menjangkau masyarakat lebih banyak, kualitas prasarana/sarana yang lebih murah dan tahan lama, dan pendapatan masyarakat yang lebih baik, dan secara keseluruhan berkurangnya tingkat kemiskinan.

D. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Terpencil

Masyarakat pedesaan terpencil adalah masyarakat yang relatif tertutup, mempunyai keterkaitan dengan alam yang tinggi, melakukan kegiatan produksi yang bersifat *subsistence*, memperoleh pelayanan sosial yang sangat minim sehingga menghasilkan tingkat kualitas SDM yang relatif sangat rendah. Namun, sebagian masyarakat pedesaan terpencil, khususnya masyarakat adat, mampu menghasilkan produk budaya yang berkualitas tinggi seperti ukiran suku Asmat, tato suku Mentawai, pengelolaan hutan yang harmonis suku Baduy, dan lain-lain.

Tujuan pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil adalah meningkatkan kesejahteraannya sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup sebagaimana yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Dalam wujud fisik, pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil akan memungkinkan mereka untuk bermukim secara menetap, melakukan kegiatan ekonomi pasar yang menguntungkan dan berkelanjutan, terlayani oleh fasilitas sosial ekonomi: sekolah,

klinik, listrik, air bersih, terhubung dengan angkutan darat/laut reguler ke pusat desa/kecamatan.

Strategi pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil dilakukan dengan mewujudkan ke empat elemen pemberdayaan masyarakat: inklusi dan partisipasi, akses pada informasi, kapasitas organisasi lokal, profesionalitas pelaku pemberdaya. Tantangan utama yang dihadapi dalam memberdayakan masyarakat pedesaan terpencil adalah pengetahuan yang terbatas, wilayah yang sulit dijangkau, dan pemahaman adat yang kuat pada masyarakat adat.

Untuk dapat memasukkan mereka dalam proses perubahan, maka upaya yang pertama kali perlu dilakukan adalah memahami pemikiran dan tindakan mereka serta membuat mereka percaya kepada pelaku pemberdaya. Selanjutnya mereka perlu berpartisipasi dalam proses perubahan yang ditawarkan dengan memberikan kesempatan menentukan pilihan secara rasional. Proses ini dapat memerlukan waktu yang lama, namun hasilnya akan lebih efektif daripada memberikan pilihan yang sudah tertentu. Pengikutan masyarakat dalam proses perubahan dilakukan secara berangsur-angsur dari kelompok kecil menuju masyarakat lebih luas.

Akses pada informasi dibuka dengan memberikan penjelasan mengenai program-program pemerintah yang akan dilakukan, norma-norma bermasyarakat yang perlu diketahui, ilmu pengetahuan dasar, hak-hak yang mereka peroleh, manfaat perubahan yang akan terjadi, masalah-masalah yang mungkin dihadapi, dan sebagainya.

Kapasitas organisasi lokal ditumbuhkan dengan melakukan pengorganisasian terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat pada tingkat bawah (seperti kelompok perempuan, kelompok pemuda, kelompok peladang), dan terhadap tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, aparat desa/dusun, dan sebagainya. Tujuan pemerkuatan organisasi lokal ini adalah untuk menjadikan mereka mampu merencanakan perbaikan lingkungan mereka, mampu meningkatkan produktivitas, mampu bernegosiasi dengan pihak lain, mampu melakukan kegiatan-kegiatan bersama yang bermanfaat. Teknik-teknik pemetaan wilayah, penyusunan rencana tata ruang,

perbaikan sarana permukiman, pembangunan rumah, cara bercocok tanam, cara mengolah hasil kebun, melindungi mata air, dan lain-lain perlu diajarkan atau dipelajari bersama.

Pelaku pemberdaya perlu mempunyai kemampuan profesional yang tinggi agar dapat melakukan pendampingan secara baik. Pelaku pemberdaya yang potensial adalah organ pemerintah daerah atau organisasi berbasis masyarakat lokal, yang mempunyai perhatian, komitmen, dan kemampuan untuk membangun masyarakat miskin dan terbelakang. Upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil, baik masyarakat adat maupun masyarakat lokal, menuntut pola kerja yang fleksibel, tidak terhambat oleh sistem administrasi penganggaran yang ketat. Agar pelaku pemberdaya masyarakat dapat bekerja secara profesional, maka mereka perlu mendapat pelatihan dan pendidikan yang memadai.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil merupakan salah satu strategi mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Strategi lain yang perlu dilakukan adalah pemberian peluang (*creating opportunity*), pengembangan kapasitas dan modal manusia (*capacity building and human capital development*), dan perlindungan sosial (*social protection*).

Pemberian peluang dilakukan dengan penyediaan prasarana dan sarana umum khususnya transportasi, listik, komunikasi, dan pasar. Pengembangan kapasitas dan modal manusia dilakukan dengan menyediakan pelayanan pendidikan dan kesehatan sesuai kondisi lokal. Penyediaan prasarana dan sarana umum serta pelayanan sosial bagi masyarakat pedesaan terpencil, akan menghadapi kendala keterpencilan wilayah, jumlah penduduk yang sedikit, lokasi yang tersebar. Untuk itu berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan. Perlindungan sosial dilakukan antara lain dengan membuat peraturan yang menjamin kepastian hukum terhadap hak ulayat masyarakat adat, atau hak milik masyarakat umum, disertai dengan ketentuan tentang batas-batas tanah yang selanjutnya diakomodasikan dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah. Perlindungan hukum juga diberikan pada produk-produk budaya masyarakat.

Masyarakat pedesaan berbasis masyarakat terpencil adalah kelompok miskin paling rentan diantara kelompok-

kelompok miskin pada umumnya. Pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil perlu dilakukan dengan mengikutkan mereka dalam perencanaan program-program pembangunan, dan menyertakan mereka sebagai pelaku aktif proses perubahan yang dilakukan. Untuk itu mereka perlu mempunyai akses terhadap informasi tentang berbagai hal yang menyangkut kehidupan mereka, mendorong mereka mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok yang mampu menyuarakan kepentingan dan menyelesaikan masalah yang dihadapi secara mandiri. Upaya pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pelaku-pelaku yang profesional, yang mempunyai kemampuan, komitmen dan perhatian pada masyarakat pedesaan terpencil yang relatif kurang pendidikan. Berbagai teknik dan bentuk-bentuk prasarana dan sarana serta pola-pola pelayanan khusus perlu diciptakan.

Perubahan-perubahan yang dihasilkan oleh upaya-upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan terpencil lambat laun diharapkan akan meningkatkan kualitas kehidupan mereka, menjadikan mereka lebih berdaya, mampu melepaskan diri dari keterbelakangannya, dan menjadi masyarakat yang maju dan mandiri.

BAB XXIII

PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

A. Masalah

Dalam dunia empirik dijumpai adanya sejumlah pedagang antara (*middleman*) yang harus dilalui sebelum barang itu sampai ke tangan konsumen. Semakin banyak pedagang antara yang ada dalam struktur distribusi, maka semakin panjang rantai distribusi yang harus dilalui. Seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penawaran dan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir akan dilakukan oleh pedagang eceran.

Sektor perdagangan eceran pada hakekatnya merupakan muara seluruh barang yang diproduksi di dalam negeri ditambah barang hasil impor. Berfungsinya pedagang eceran sebagai muara dari distribusi barang akan mendapatkan posisinya dalam struktur perekonomian makro menjadi sangat strategis, atau dengan kata lain, sektor perdagangan akan sangat peka terhadap gelombang pasang surutnya perkembangan ekonomi nasional.

Berkaitan dengan pola konsumsi masyarakat pada satu dasawarsa yang lalu, sebagian masyarakat Indonesia hanya mengetahui bahwa pusat pembelanjaan yang ada itu adalah pasar tradisional, yang lazimnya tempat ini menjual berbagai kebutuhan rumah tangga seperti bumbu masak, ikan, sayur-mayur dan sebagainya.

Penggunaan istilah pasar tradisional dalam penelitian ini dimaksudkan sebagai tempat bertemunya pedagang eceran dan pembeli untuk melakukan transaksi barang kebutuhan sehari-hari dengan organisasi pasar yang ada masih sangat sederhana, tingkat efisiensi dan spesialisasi yang rendah, serta pola bangunan yang apa adanya (*sempit*) sebagaimana disediakan oleh pemerintah daerah setempat.

Apabila pola belanja masyarakat dikaitkan dengan indikasi kepadatan perkapita Indonesia yang masih dalam transisi menuju pada pendapatan mencapai angka US \$ 1.000,00 maka kemungkinan keberadaan pasar tradisional masih tetap memiliki peluang untuk berkembang. Di samping itu, pasar tradisional

sebenarnya memiliki keunggulan yang mampu menarik pembeli, yakni adanya tawar-menawar. Namun adanya *image* pasar tradisional yang kumuh, kotor, sumpek, tidak aman, dan sebagainya akan menjadi kendala sendiri.

Pasar tradisional yang menjadi arena pergulatan hidup mayoritas warga kota menjadi kurang diperhatikan. Kondisi ini dapat mengakibatkan keberadaan pasar tradisional yang biasanya terletak pada pusat-pusat perdagangan yang dipandang dari aspek lokasi umumnya memiliki arti strategis bagi pengembangan usaha dalam lingkungan perkotaan, sedikit demi sedikit mulai tergusur.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, permasalahan yang dihadapi oleh pasar tradisional di Kota Makassar secara spesifik adalah sebagai berikut:

1. Kondisi pasar yang kurang tertib. Hal tersebut disebabkan karena banyaknya pedagang yang berjualan dengan menggunakan lapak-lapak cenderung bersikap kurang memperhatikan ketertiban. Di sisi lain, mereka lebih memilih untuk berjualan dengan menggunakan lapak akibat terbatasnya pendapatan yang mereka miliki, sehingga tidak mampu untuk membeli kios yang telah disiapkan oleh pengelola pasar.
2. Kondisi pasar yang jorok dan kumuh. Hal tersebut disebabkan karena di pasar tradisional para pedagang tidak menjaga kebersihan dengan baik. Fasilitas atau sarana kebersihan belum tersedia secara layak. Di sisi lain, baik pedagang maupun pengunjung masih belum memiliki kesadaran untuk menjaga kebersihan pasar tradisional.
3. Pedagang yang kurang memperhatikan kualitas dan kebersihan barang yang dijualnya. Produk-produk yang memiliki banyak limbah sering kali dijual berdekatan dengan produk makanan, sehingga hal tersebut menimbulkan kesan bahwa produk-produk yang terdapat pada pasar tradisional kurang berkualitas dan tidak higienis. Hal tersebut disebabkan karena para pedagang di pasar tradisional

masih belum memiliki keterampilan dan pengetahuan dalam hal strategi pemasaran produk.

4. Sarana dan prasarana yang terdapat pada pasar tradisional di Kota Makassar masih sangat minim. Mayoritas pasar tradisional di Kota Makassar tidak memiliki lahan parkir, memiliki jalan yang becek, dan sarana kebersihan yang minim. Hal tersebut disebabkan karena minimnya dana dan lemahnya pengelolaan yang dilakukan oleh pengelola pasar di Kota Makassar.

Keempat permasalahan pokok dan penyebabnya tersebut, merupakan hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan pembeli atau masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional. Kondisi tersebut justru tidak didapati pada pasar modern seperti mall atau swalayan yang justru memberikan kenyamanan pada konsumen pada saat berbelanja. Jika hal tersebut tidak segera diatasi, keberadaan pasar tradisional akan terancam. Padahal pasar tradisional masih sangat dibutuhkan, khususnya oleh golongan ekonomi menengah ke bawah.

B. Strategi Pemberdayaan Pasar Tradisional

Pengelolaan potensi pasar seyogianya tidak hanya berorientasi pada peningkatan PAD, tetapi berpihak pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Karena itu, dalam menggagas model revitalisasi pasar perlu melibatkan berbagai *stakeholders* yang terkait, seperti Dinas Pengelolaan Pasar, Dinas Bangunan, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Koppas, asosiasi pedagang tradisional, perusahaan pengembang, dan sebagainya agar kepentingan dari setiap pihak dapat terakomodasi dengan adil. Dengan demikian, materi muatan kebijakan pengelolaan pasar nantinya akan mengatur pula bagaimana potensi pasar tersebut dikembangkan, mulai dari jenis dan kualitas komoditi yang akan diperjualbelikan, mekanisme bongkar muat komoditi sehingga jalur distribusi produk menjadi lebih efisien dan efektif, serta model kemitraan yang perlu dikembangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat renovasi pasar tradisional. Dalam melakukan pengelolaan pasar, setidaknya dibutuhkan beberapa paradigma sebagai berikut.

Pertama, paradigma dalam memandang pasar harus bergeser dari tempat bertransaksi ekonomi menjadi ruang publik tempat berlangsungnya interaksi sosial. Pasar yang sukses secara inheren memiliki bermacam-macam ruang yang berfungsi sebagai ruang publik, misalnya jalan, gang, tangga, trotoar, plaza terbuka, dan lain-lain, di mana tindakan untuk mencegah masyarakat menggunakan barang publik yang milik umum tersebut akan menjadi sangat mahal atau sulit, karena hak-hak "kepemilikan" terhadap barang-barang tersebut sangat labil dan sulit dispesifikasi secara tegas. Oleh karena itu, ruang pasar lantas memiliki ciri inklusif.

Kedua, model revitalisasi pasar tradisional difokuskan pada upaya memperbaiki jalur distribusi komoditas yang diperjual-belikan di pasar-pasar tradisional. Distribusi di sini mengandung makna yang luas, mulai dari pemilahan komoditas; pengangkutan; bongkar muat; pengemasan; hingga penjualan komoditas di pasar. Pemerintah kota dapat merumuskan kebijakan insentif untuk mendukung perbaikan jalur distribusi ini, misalnya dengan memperbaiki ketentuan bongkar muat. Dalam Perda No. 19 Tahun 2001, bongkar muat barang dagangan dari kendaraan pengangkut dilakukan di areal pasar. Praktik semacam ini justru menimbulkan kerugian karena menyebabkan kebersihan di sekitar areal pasar menjadi terganggu dan dapat menimbulkan kemacetan. Seyogianya pengaturan tentang bongkar muat dilakukan di luar areal tempat berjualan dan komoditas yang masuk ke pasar tradisional harus benar-benar diperiksa kualitasnya ketika bongkar muat.

Ketiga, pembangunan pasar jangan dihambat oleh kepentingan mencari keuntungan finansial karena pembangunan pasar selain memiliki tujuan sosial juga berperan untuk mereduksi biaya sosial, di mana revitalisasi pasar tradisional harus dipandang sebagai investasi jangka panjang dalam kerangka pengembangan properti kota (*property development*). Dengan kata lain, pembangunan pasar adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan, menangkap, dan mendistribusikan kapital bagi kesejahteraan masyarakat. Dari sudut ini, secara paradigmatik pembangunan pasar lantas menjadi

sebuah instrumen untuk menciptakan keuntungan bagi masyarakat.

Keempat, modernisasi pasar juga merupakan langkah untuk meningkatkan perekonomian pedagang kecil. Modernisasi pasar disini dimaksudkan sebagai upaya pengelolaan pasar secara modern sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat, sekaligus untuk menghambat beralihnya tempat belanja masyarakat. Pelebaran budaya produksi ke budaya dagang bukan saja akan memperkuat daya tahan harga (*reservation price*) untuk produk-produk yang dijual di pasar tradisional, tetapi juga mendorong lancarnya penjualan, dasar pertukaran yang lebih baik, dan perputaran barang dan uang yang lebih cepat. Melalui tahapan seperti itu, pasar pun akan berubah bukan hanya mempunyai fungsi ekonomis, tetapi juga menjadi identitas kebanggaan bagi daerah yang mampu mengubah citra pasar tradisional yang semula tidak menarik, jorok, busuk, dan tidak terorganisasi menjadi salah satu pusat komunikasi ekonomi dan simpul perdagangan, penyebaran informasi, dan pertemuan kultural antarpenduduk, bagi setiap tingkatan status masyarakat.

Kelima, model kemitraan menjadi penting untuk dirumuskan bersama karena APBD Kota Makassar tidak pernah membuat pos khusus untuk penataan pasar, sehingga mau tidak mau pemerintah kota selalu melibatkan pengembang untuk merevitalisasi pasar. Masalahnya adalah bagaimana agar pelibatan perusahaan pengembang ini tidak kemudian menyebabkan para pedagang tradisional yang semula berjualan di sana menjadi "tergusur". Koppas sebagai *intermediaries institution* sebenarnya dapat diberdayakan untuk menjadi penghubung antara kepentingan pengembang/pengelola pasar dengan pedagang tradisional, sehingga revitalisasi pasar tradisional tidak terjebak dalam arus kepentingan kapitalisme yang semakin ekspansif. Pemberdayaan Koppas penting untuk dilakukan karena selama ini posisi Koppas melemah akibat tidak adanya sumber dana bagi kegiatan Koppas. Konsep renovasi pasar yang diterapkan pemerintah kota menempatkan pihak pengembang sekaligus sebagai pengelola dan mengambil alih seluruh kegiatan pengelolaan pasar, seperti jasa listrik, parkir, dan kebersihan yang semula menjadi sumber penghasilan bagi Koppas. Pemberdayaan bagi pedagang pasar tradisional dapat

dilakukan antara lain dengan membantu memperbaiki akses mereka kepada informasi, permodalan, dan hubungan dengan produsen atau *supplier* (pemasok). Pedagang pasar tradisional perlu mendapatkan informasi tentang masa depan, ancaman dan peluang usahanya, serta perlunya perubahan sikap dan pengelolaan usahanya sesuai dengan perubahan tuntutan konsumen. Dalam kaitannya dengan produsen pemasok, pedagang pasar tradisional perlu dibantu dalam mengefisienkan rantai pemasaran untuk mendapatkan barang dagangannya. Pemerintah dapat berperan sebagai mediator untuk menghubungkan pedagang pasar tradisional secara kolektif kepada industri untuk mendapatkan akses barang dagangan yang lebih murah. Selain itu, pembinaan terhadap para pedagang pasar tradisional dan Koppas perlu dilakukan secara kontinyu agar nantinya Koppas dapat memenuhi syarat untuk menjadi mitra bagi pihak pengembang dalam pengelolaan pasar.

Keenam, pasar tradisional harus dikelola secara kreatif untuk memecahkan persoalan ruang usaha bagi masyarakat. Pasar, tempat usaha rakyat harus diciptakan secara lebih imajinatif, kreatif, dan rekreatif untuk bisa berkompetisi dengan *department stores, shopping centers, mall*, dan sejenisnya yang biasa dipasok sektor swasta. Ragam pasar yang lebih transformatif seperti pasar tematik (pasar elektronik, pasar tekstil, dan lain-lain), dapat dikembangkan menjadi model pengembangan pasar modern agar pasar modern tidak memonopoli seluruh komoditas yang menyebabkan daya saing pasar tradisional makin lemah. Pengelolaan pasar dengan demikian adalah memberdayakan pasar secara lebih kreatif, terjangkau, manusiawi, kompetitif, dan nyaman bagi masyarakat.

Berdasarkan hal di atas, maka strategi revitalisasi yang dianggap mampu untuk meningkatkan daya saing pedagang di pasar tradisional adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan disiplin pedagang

- a. Dibuat aturan main yang jelas dan disosialisasikan kepada para pedagang. Pengelola pasar harus membuat peraturan yang jelas dan kemudian dilakukan sosialisasi dan proses edukasi kepada para pedagang secara rutin dan menyeluruh

sehingga semua penghuni pasar mengetahui isi dan maksudnya. Jika ada yang tidak disetujui oleh penghuni pasar maka harus dilakukan pertemuan khusus untuk melakukan perubahan sehingga bisa diterima dengan baik. Jika sudah diterima, selanjutnya diminta komitmen dari penghuni pasar untuk menaatinya. Agar bisa selalu diingat oleh para penghuni pasar, maka naskah peraturan dibuat menjadi semenarik mungkin dan ditempel di berbagai tempat di lokasi pasar.

- b. Penegakan aturan dan penerapan sanksi yang tegas pada setiap pelanggaran. Pengelola pasar harus bisa bertindak tegas untuk mengenakan sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran. Jangan bertindak diskriminatif dan harus konsisten menjalankan peraturan. Pasar akan terjaga ketertibannya apabila pelaku-pelaku di dalamnya menaati peraturan dengan baik dan konsekuen.
 - c. Ciptakan pola pengamanan bersama. Petugas sekuriti terbatas jumlahnya, karena itu harus dibantu oleh semua penghuni pasar agar tercipta suatu pola pengamanan bersama. Setiap pedagang atau penghuni harus memiliki tanggung jawab tertentu terhadap keamanan pasar.
2. Edukasi untuk menciptakan pasar yang bersih, indah dan higienis. Edukasi perlu dilakukan terus menerus terhadap para pedagang penghuni pasar. Hal ini dilakukan agar para penghuni bisa menyadari perlunya memelihara dan membuat pasar menjadi indah, nyaman, bersih dan sehat baik untuk penghuni maupun untuk pengunjung atau pembeli. Mereka harus selalu disadarkan bahwa persaingan semakin ketat sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menarik para pembeli untuk berbelanja di lokasinya. Dalam kaitan ini, diperlukan upaya-upaya agar para pedagang penghuni pasar senantiasa:
 - a. Menata kios dan jualannya dengan rapi dan lebih menarik bagi pembeli.

- b. Berpakaian sopan dalam melayani pembeli.
 - c. Bagi yang berjualan bahan mentah seperti daging, ikan dan sayuran, memakai celemek khusus sehingga terkesan lebih bersih.
 - d. Menyapa dan melayani pembeli dengan ramah.
 - e. Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
 - f. Merapikan dan membersihkan kios/lapak masing-masing setiap selesai berdagang.
 - g. Mencuci tangan dengan sabun setelah selesai berdagang dan atau selesai membersihkan kios/lapak.
 - h. Tidak menjual bahan mentah daging (ayam/sapi/kambing, dan lain-lain) dan ikan mentah bersama-sama dengan makanan siap saji di tempat yang sama.
 - i. Menggunakan peralatan berdagang (pisau, talenan, baskom, ember, sarung tangan, celemek, dan lain-lain) yang bersih dan mencucinya dengan deterjen setelah selesai berdagang.
 - j. Mencuci atau membasuh meja dagangan dengan deterjen setiap kali selesai berdagang.
 - k. Pergunakan lokasi yang telah disediakan oleh petugas pengelola pasar.
 - l. Tidak menjual hewan sakit atau mati yang tidak wajar.
 - m. Praktek rutin berkala kegiatan disinfeksi total minimal 3 bulan sekali.
 - n. Semua peralatan yang dipakai untuk handling produk asal hewan sebaiknya disikat dan direndam dengan obat suci hama.
3. Memahami perilaku konsumen. Pola perilaku konsumen dewasa ini telah mengalami perubahan. Mereka tidak saja menginginkan kualitas dan harga produk yang bagus, tetapi juga kualitas tempat (pasar) yang memadai dan layak sesuai dengan tingkat pendapatannya. Secara umum, tempat yang nyaman, aman dan memadai akan menjadi pilihan utama bagi

kebanyakan pembeli. Kondisi ini harus bisa menjadi perhatian serius dari para pedagang di pasar tradisional. Walaupun tradisional tetapi tetap memiliki daya tarik untuk dikunjungi oleh para calon pembeli. Pedagang harus mengetahui bahwa persaingan tidak hanya terbatas pada kualitas dan harga produk, tetapi juga sudah pada tataran lain yaitu bagaimana memuaskan pelanggan dari faktor yang lainnya, seperti adanya kenyamanan berbelanja dan adanya nuansa khusus menarik lainnya yang tidak dimiliki oleh pasar modern.

4. Peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang
 - a. Pelatihan administrasi pembukuan. Administrasi Pembukuan dalam hal ini adalah tata cara pencatatan transaksi keuangan baik yang masuk maupun yang keluar. Sehingga para pedagang dapat lebih mudah melakukan analisa keuangannya dengan tepat dan akurat. Termasuk perlunya para pedagang menyiapkan cadangan untuk membayar sewa kios/lapak pada waktu yang tepat dengan jumlah yang tepat.
 - b. Pelatihan strategi penjualan. Menyikapi persaingan antar pedagang yang semakin ketat maka diperlukan strategi untuk meningkatkan penjualan. Dalam kaitan ini, para pedagang perlu diberi pengetahuan tentang tatacara pengaturan barang dagangan, pelayanan kepada pembeli, teknik komunikasi dan transaksi yang jujur namun tetap menguntungkan, serta promosi barang yang dijual.
 - c. Sistem stok dan *delivery*. Pedagang perlu diberi pengetahuan tentang pengaturan stok barang sehingga tidak perlu terjadi penumpukan jika permintaan sedang turun dan tidak kekurangan pada saat permintaan sedang meningkat. Ini terkait langsung dengan mekanisme serta sistem distribusi dan *delivery* barang dagangan pada waktu yang dibutuhkan dengan jumlah yang tepat. Hal ini perlu didukung oleh adanya kelancaran

transportasi dan lokasi bongkar yang lapang dan tidak sesak (perlu ada jalur atau pintu masuk yang khusus untuk mengangkut lalu lintas barang).

- d. Informasi harga barang di pasar. Baik pedagang maupun pembeli sebaiknya mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan informasi tentang harga yang sedang berlaku untuk semua jenis barang yang diperdagangkan di pasar. Ini akan banyak membantu para produsen (petani/peternak) untuk mengetahui harga jual yang wajar bagi produknya sehingga ada insentif untuk meningkatkan volume dan kualitas produksinya. Demikian pula dengan pembeli, walaupun harus melakukan tawar menawar, tetapi mereka akan puas jika dapat membeli barang dengan harga yang pantas untuk kualitas yang sesuai dengan kebutuhannya.

BAB XXIV

PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL

A. Masalah

Secara sektoral, peran industri kecil dalam menanggulangi kemiskinan perlu dikedepankan, khususnya dalam kasus di Kota Makassar. Jumlah masyarakat miskin di Makassar mencapai 70.156 KK (Kepala Keluarga) atau 350.780 jiwa. Itu berarti secara persentase, jumlah warga miskin di Makassar mencapai 30 persen. Jumlah tersebut merupakan data terakhir pada tahun 2006. Padahal, jumlah pada tahun 2005 menunjukkan bahwa masyarakat miskin di Makassar hanya 60 ribu KK. Fenomena lain yang tak bisa dihindari akibat terus berkembangnya masyarakat miskin di Makassar adalah susahya menghilangkan anak jalanan (anjala) dan gelandangan pengemis (gepeng). Jumlah anak jalanan di Kota Makassar pada tahun 2006 adalah sebesar 1.540 orang dan jumlah gelandangan serta pengemis pada tahun 2006 adalah sebesar 345 orang (BPS Kota Makassar, 2009).

Data di atas menunjukkan besarnya jumlah masyarakat miskin dan implikasinya terhadap fenomena-fenomena lainnya yang terjadi di Kota Makassar. Hal tersebut mesti segera untuk diatasi melalui strategi pembinaan dan pengembangan industri kecil. Namun, berbagai masalah riil kemudian terjadi di lapangan yang dapat menghambat kontribusi industri kecil dalam memberdayakan masyarakat.

Hasil Penelitian PSE KP UGM, LPEM-FEUI dan PSP-IPB (2008) pada kasus pengentasan kemiskinan di Pulau Jawa melalui pemberdayaan industri kecil menunjukan bahwa terdapat 7 aspek yang menjadi masalah-masalah pokok yang dihadapi oleh industri kecil di Pulau Jawa. Ketujuh aspek tersebut, meliputi masalah produksi, pembiayaan/perbankan, sumberdaya manusia, pemasaran/promosi, kemitraan, manajemen usaha serta peran pemerintah dan LSM.

Menurut Tambunan (1997), permasalahan yang paling mendasar dihadapi oleh industri kecil adalah permasalahan di bidang manajemen. Sektor industri kecil masih kurang mampu

menentukan pola manajemen yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangan usaha.

Anoraga dan Sudantoko (2002) mengemukakan bahwa permasalahan industri kecil pada bidang pemasaran terfokus pada tiga hal, yaitu permasalahan persaingan pasar dan produk, permasalahan akses terhadap informasi pasar dan permasalahan kelembagaan pendukung usaha kecil.

Berbagai gambaran masalah yang terjadi di atas merupakan masalah-masalah riil yang umum dihadapi oleh sektor industri kecil dalam pembinaan dan pengembangannya. Penelitian ini akan mengkaji berbagai masalah yang dihadapi oleh sektor industri kecil di Kota Makassar, kemudian akan merekomendasikan strategi pembinaan dan pengembangan yang dianggap tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

B. Arah Pemberdayaan Industri Kecil

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, pemberdayaan industri kecil di Kota Makassar akan dilaksanakan dalam kerangka strategi sebagai berikut:

1. Perluasan basis usaha serta penumbuhan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja terutama dengan:
 - a. Meningkatkan perpaduan antara tenaga kerja terdidik dan terampil dengan adopsi penerapan teknologi.
 - b. Mengembangkan industri kecil melalui pendekatan klaster di sektor agribisnis dan agroindustri disertai pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha, termasuk dengan cara meningkatkan kualitas kelembagaan industri kecil di Kota Makassar sebagai wadah organisasi kepentingan usaha bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif.
 - c. Mengembangkan industri kecil untuk makin berperan dalam proses industrialisasi, perkuatan keterkaitan industri, percepatan pengalihan teknologi, dan peningkatan kualitas SDM.
 - d. Mengintegrasikan pengembangan usaha dalam konteks pengembangan regional, sesuai dengan

karakteristik pengusaha dan potensi usaha di setiap daerah.

2. Penguatan kelembagaan terutama untuk:
 - a. Memperluas akses kepada sumber permodalan khususnya perbankan.
 - b. Memperbaiki lingkungan usaha dan menyederhanakan prosedur perijinan.
 - c. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung non-finansial.
3. Pengembangan industri kecil yang diarahkan untuk berperan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing; sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk makin berperan dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
4. Pengembangan industri kecil untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik khususnya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak.

1. Strategi-strategi Pembangunan

Berdasarkan sasaran dan arah strategi pemberdayaan industri kecil dalam, langkah-langkah atau strategi-strategi yang ditempuh dijabarkan ke dalam program-program pembangunan yang merupakan strategi implementasi dari arah kebijakan tersebut.

a. Program Penciptaan Iklim Usaha Industri Kecil

Tujuan program ini adalah untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, sehat dalam persaingan, dan non-dikriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha industri kecil di Kota Makassar. Sasaran program adalah berkurangnya beban administratif dan hambatan usaha, menurunnya biaya usaha, meningkatnya rata-rata skala usaha, meningkatnya mutu layanan perijinan/pendirian usaha, mantapnya landasan legalitas bagi industri kecil, dan meningkatnya partisipasi *stakeholders* dalam perencanaan,

pemantauan dan evaluasi berbagai kebijakan dan program industri kecil di Kota Makassar.

Program ini memuat strategi-strategi pokok dalam rangka:

1. Penuntasan penyempurnaan peraturan perundangan, seperti Undang-undang tentang industri kecil, Undang-undang tentang Usaha Kecil dan Menengah, dan Undang-undang tentang Wajib Daftar Perusahaan, beserta ketentuan pelaksanaannya dalam rangka membangun landasan legalitas usaha yang kuat, dan melanjutkan penyederhanaan birokrasi, perijinan lokasi, serta peninjauan terhadap peraturan perundangan lainnya yang kurang kondusif bagi industri kecil, termasuk peninjauan terhadap pemberlakuan berbagai pungutan biaya usaha, baik yang sektoral maupun spesifik daerah.
2. Fasilitasi dan penyediaan kemudahan dalam formalisasi badan usaha industri kecil.
3. Peningkatkan kelancaran arus barang, baik bahan baku maupun produk, dan jasa yang diperlukan seperti kemudahan perdagangan antar daerah dan pengangkutan.
4. Peningkatan kemampuan aparat dalam melakukan perencanaan dan penilaian regulasi, kebijakan dan program.
5. Pengembangan pelayanan perijinan usaha yang mudah, murah dan cepat termasuk melalui perijinan satu atap bagi industri kecil, mengembangkan unit penanganan pengaduan serta menyediakan jasa advokasi/mediasi yang berkelanjutan bagi industri kecil.
6. Pelaksanaan asesmen dampak regulasi/kebijakan nasional dan daerah terhadap perkembangan dan kinerja industri kecil, dan memantau pelaksanaan kebijakan/regulasi.
7. Peningkatan kualitas penyelenggaraan koordinasi dalam perencanaan kebijakan dan program industri kecil dengan partisipasi aktif para pelaku dan instansi terkait.

8. Peningkatan penyebarluasan dan kualitas informasi industri kecil dan industri kecil, termasuk pengembangan jaringan pelayanan informasinya.

b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Industri Kecil

Program ini bertujuan untuk mempermudah, memperlancar dan memperluas akses industri kecil kepada sumber daya produktif agar mampu memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi sumber daya lokal serta meningkatkan skala usahanya. Sasaran program adalah tersedianya lembaga pendukung/penyedia jasa pengembangan usaha yang terjangkau dan bermutu untuk meningkatkan akses industri kecil terhadap pasar dan sumber daya produktif, seperti sumber daya manusia, modal, pasar, teknologi, dan informasi, meningkatnya fungsi intermediasi lembaga-lembaga keuangan bagi industri kecil, dan meningkatnya jangkauan layanan lembaga keuangan.

Kegiatan-kegiatan pokok dari program ini antara lain berkenaan dengan upaya:

1. Penyediaan fasilitas untuk mengurangi hambatan akses industri kecil terhadap sumber daya produktif, termasuk sumber daya alam.
2. Peningkatan peranserta dunia usaha/masyarakat sebagai penyedia jasa layanan teknologi, manajemen, pemasaran, informasi dan konsultan usaha melalui penyediaan sistem insentif, kemudahan usaha serta peningkatan kapasitas pelayanannya.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan KSP/USP antara lain melalui perlindungan status badan hukum, kemudahan perijinan dan pembentukan sistem jaringan antar LKM dan antara LKM dan Bank, serta peningkatan kualitas dan akreditasi KSP/USP/LKM sekunder.
4. Perluasan sumber pembiayaan industri kecil, khususnya skim kredit investasi industri kecil, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, seperti modal ventura, serta peran lembaga penjaminan kredit industri kecil nasional dan daerah, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya.

5. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan dana pengembangan industri kecil yang bersumber dari berbagai instansi pemerintah pusat, daerah dan BUMN.
6. Dukungan terhadap upaya mengatasi masalah kesenjangan kredit dalam pendanaan industri kecil (kesenjangan skala, formalisasi dan informasi).
7. Pengembangan sistem insentif, akreditasi, sertifikasi dan perkuatan lembaga-lembaga pelatihan serta jaringan kerjasama antarlembaga pelatihan.
8. Pengembangan dan revitalisasi unit pelatihan dan penelitian dan pengembangan (litbang) teknis dan informasi milik berbagai instansi pemerintah pusat dan daerah untuk berperan sebagai lembaga pengembangan usaha industri kecil;
9. Penataan dan perkuatan organisasi dan modernisasi manajemen industri kecil yang menjadi wadah kepentingan bersama industri kecil untuk memperoleh efisien kolektif; serta
10. Penguatan jaringan pasar produk industri kecil, termasuk pasar ekspor, melalui pengembangan lembaga pemasaran, jaringan usaha termasuk kemitraan usaha, dan pengembangan sistem transaksi usaha yang bersifat on-line, terutama bagi komoditas unggulan berdaya saing tinggi.

c. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Industri Kecil

Program ini ditujukan untuk mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan dan meningkatkan daya saing industri kecil. Sasaran yang akan dicapai adalah berkembangnya pengetahuan serta sikap wirausaha, meningkatnya produktivitas, tumbuhnya wirausaha baru berbasis pengetahuan dan teknologi, berkembangnya ragam produk-produk unggulan industri kecil, dan tumbuhnya industri kecil yang sesuai dengan jatidiri, nilai-nilai serta prinsip dasar industri kecil.

Strategi-strategi pokok dari program ini antara lain mencakup:

1. Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan nasional dan pengembangan sistem insentif bagi wirausaha baru, terutama yang berkenaan dengan aspek pendaftaran/ijin usaha, lokasi usaha, akses pendanaan, perpajakan dan informasi pasar.
2. Penyediaan sistem insentif dan pembinaan untuk memacu pengembangan industri kecil berbasis teknologi termasuk wirausaha baru berbasis teknologi, utamanya industri kecil berorientasi ekspor, subkontrak atau penunjang, agribisnis atau agroindustri dan yang memanfaatkan sumber daya lokal.
3. Pembangunan jaringan lembaga pengembangan kewirausahaan.
4. Pengembangan inkubator teknologi dan bisnis, termasuk dengan memanfaatkan fasilitas litbang pemerintah pusat/daerah dan melalui kemitraan publik, swasta dan masyarakat.
5. Pengembangan kemitraan investasi antar industri kecil, termasuk melalui aliansi strategis atau investasi bersama (*joint investment*) dengan perusahaan asing dalam rangka mempercepat penguasaan teknologi dan pasar.
6. Pengembangan jaringan produksi dan distribusi melalui pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan usaha kelompok dan jaringan antar industri kecil dalam wadah industri kecil serta jaringan antara industri kecil dan usaha besar melalui kemitraan usaha.
7. Pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan bagi praktisi, calon praktisi dan pengelola industri kecil, termasuk pemasyarakatan industri kecil sukses yang sesuai dengan jatidiri dan nilai/prinsip industri kecil.
8. Peningkatan kualitas pengusaha kecil dan menengah (PKM), termasuk wanita pengusaha, menjadi wirausaha tangguh yang memiliki semangat kooperatif.

d. Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan dan siap untuk tumbuh dan bersaing. Sasaran dari program pemberdayaan usaha mikro adalah meningkatnya kapasitas usaha mikro, meningkatnya keterampilan pengelolaan usaha, dan terselenggaranya kepastian, perlindungan serta pembinaan usaha.

Program ini memuat strategi-strategi pokok dalam rangka:

1. Penyediaan kemudahan dan pembinaan dalam memulai usaha, termasuk dalam perizinan, lokasi usaha, dan perlindungan usaha dari pungutan informal.
2. Penyediaan skim-skim pembiayaan alternatif dengan tanpa mendistorsi pasar, seperti sistem bagi-hasil dari dana bergulir, sistem tanggung-renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai pengganti agunan.
3. Penyelenggaraan dukungan teknis dan pendanaan yang bersumber dari berbagai instansi pusat, daerah dan BUMN yang lebih terkoordinasi, profesional dan institusional.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas layanan lembaga keuangan mikro (LKM).
5. Pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan dan bimbingan teknis manajemen usaha.
6. Penyediaan infrastruktur dan jaringan pendukung bagi usaha mikro serta kemitraan usaha.
7. Fasilitasi untuk pembentukan wadah organisasi bersama di antara usaha mikro, termasuk pedagang kaki lima, baik dalam bentuk koperasi maupun asosiasi usaha lainnya dalam rangka meningkatkan posisi tawar dan efisiensi usaha.
8. Dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengrajin melalui pendekatan pembinaan sentra-

sentra produksi/klaster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.

9. Pengembangan usaha ekonomi produktif bagi usaha mikro/sektor informal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi pedesaan terutama di daerah tertinggal dan kantong-kantong kemiskinan.

BAGIAN VII
PEMBERDAYAAN KOPERASI
DAN UMKM

BAB XXV

KOPERASI DAN ILMU EKONOMI

A. Ilmu Ekonomi

Ilmu ekonomi adalah suatu studi mengenai bagaimana orang membuat pilihan yang tepat atau optimal untuk memanfaatkan sumber-sumber daya/produksi seperti tanah, tenaga kerja, barang-barang modal seperti mesin, energi, pengetahuan teknis maupun non-teknis, dan lain-lain, yang langkah atau jumlahnya terbatas untuk menghasilkan berbagai macam output (barang dan jasa) dan mendistribusikan ke semua anggota masyarakat untuk digunakan/dikonsumsi. Samuelson (1973) atau Samuelson dan Nordhaus (1992) mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi mengenai cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam menggunakan sumber daya yang ada yang jumlahnya terbatas untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang bermanfaat serta mendistribusikannya ke semua anggota masyarakat.

Formulasi yang lebih sederhana melihat ilmu ekonomi sebagai studi mengenai perilaku manusia baik sebagai konsumen maupun produsen, secara individu maupun kelompok, untuk mendapatkan kepuasan atau kesejahteraan semaksimal mungkin dengan menggunakan sumber daya yang ada dan terbatas. Dilihat dalam ukuran moneter, kepuasan atau kesejahteraan bisa dalam bentuk pendapatan yang tinggi, keuntungan yang besar, atau pengeluaran yang sedikit.

Berdasarkan definisi di atas, ada tiga hal yang menjadi pokok pemikiran di dalam ilmu ekonomi (Rosyidi, 1996). Pertama, pemilihan cara penggunaan sumber-sumber produksi yang langka dan dapat mempunyai penggunaan-penggunaan alternatif. Artinya, setiap barang atau sumber daya mempunyai lebih dari satu penggunaannya. Dalam hal ini, ilmu ekonomi adalah studi mengenai pemilihan cara penggunaan yang paling menguntungkan. Misalnya, dalam suatu proses produksi dibutuhkan dua faktor produksi yakni modal dan tenaga kerja. Pertanyaannya sekarang adalah kombinasi yang mana dalam pemakaian kedua faktor produksi tersebut yang menghasilkan *output* paling maksimal dengan biaya produksi paling rendah

(atau tingkat efisiensi dari pemakaian kedua faktor tersebut paling tinggi). Kedua, sumber-sumber produksi yang ada merupakan barang-barang yang langka, sehingga terdapat konsekuensi biaya dalam pemakaiannya. Hal ini pun kembali ke masalah pemilihan, yakni sumber daya atau kombinasi dari sejumlah sumber daya yang mana paling murah biaya pemakaiannya dengan tingkat output yang diinginkan. Ketiga, produksi serta pembagian hasilnya kepada anggota-anggota masyarakat untuk konsumsi. Jadi, dalam hal ini harus ada keseimbangan antara pembuatan dan pemakaian atau produksi dan konsumsi.

Uraian di atas menunjukkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi yang terkait dengan upaya mencari solusi terbaik terhadap tiga permasalahan yang mendasar, yakni:

1. Komoditas apa yang harus dibuat?
2. Bagaimana membuatnya?
3. Untuk siapa komoditas itu dibuat?

Dilihat dari sejarah lahirnya ilmu ekonomi, terdapat berbagai pemahaman (mazhab) yang kemunculannya yang tidak lepas dari kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan politik pada saat itu. Dari sekian banyak mazhab yang (pernah) ada, saat ini ada tiga pemahaman yang masih sangat relevan, adalah:

1. Mazhab Liberal

Mazhab Liberal berasal dari Adam Smith dengan bukunya yang sangat terkenal, *The Wealth of Nations*. Mazhab ekonomi liberal ini menentang segala macam bentuk campur tangan pemerintah dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Paham ini disebut juga paham ekonomi klasik dan sejalan dengan paham ekonomi kapitalisme yang dicirikan dengan antara lain: (a) harga ditentukan oleh pasar; (b) persaingan bebas; (c) setiap manusia bebas berusaha; dan (d) peran pemerintah minimum (jika tidak bisa dikatakan tidak ada atau tidak perlu sama sekali) (Tambunan 2006).

Saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi yang pesat, terutama dalam komunikasi dan transportasi, adanya organisasi perdagangan dunia atau WTO dan munculnya banyak wilayah perdagangan bebas (FTA), termasuk di ASEAN (AFTA) dan oleh ASEAN dengan China, Jepang dan Korea Selatan

(ASEAN+3), maka perekonomian dan perdagangan global cenderung semakin liberal. Kecenderungan ini disebut juga sebagai pemahaman ekonomi neoklasik.

2. Mazhab Sosialis-Komunis

Sosialis-komunis berasal dari beberapa ahli ekonomi Jerman yang dimotori oleh Karl Marx. Paham ini muncul sebagai respons terhadap dampak negatif dari proses ekonomi berlandaskan pemikiran liberal, yakni ketidakadilan dalam pembagian “kue” ekonomi - pemilik modal semakin kaya sedangkan pekerja/buruh semakin tertindas. Mazhab komunis tidak percaya terhadap mekanisme pasar. Oleh karena itu, peran pemerintah dalam pemahaman ini sangat besar.

Saat ini negara-negara yang menerapkan sistem ekonomi komunis kemungkinan besar hanya Korea Utara, di mana alokasi sumber daya, harga, upah, konsumsi, dan kesempatan kerja sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan negara-negara yang menerapkan sistem sosial atau sering disebut sistem campuran sosial dan kapitalis adalah negara-negara di Eropa Barat; lazim disebut *the welfare states*. Dalam sistem ini mekanisme pasar dalam menentukan harga, upah dan volume produksi tetap berperan, masyarakat bebas berusaha, dan persaingan pasar tetap ada. Namun demikian, peran pemerintah tetap besar, terutama dalam menentukan hal-hal yang sangat mempengaruhi distribusi pendapatan seperti harga dan upah minimum.

3. Mazhab Keynesian

Mazhab Keynesian muncul sebagai reaksi terhadap kegagalan mekanisme pasar sebagai motor pertumbuhan *output* dan kesempatan kerja. Inti dari paham Keynesian adalah peran pemerintah yang sangat besar sebagai salah satu pendorong pertumbuhan, dan peran ini dilakukan melalui pengeluaran pemerintah (atau dalam kasus Indonesia, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)).

Saat ini, walaupun semakin banyak negara di dunia yang sistem ekonominya cenderung semakin liberal, khususnya dalam perdagangan, namun demikian masih banyak negara yang tetap menganut sistem ekonomi Keynesian. Sistem ini dianggap sangat

penting dalam kondisi ekonomi yang sedang lesu (pertumbuhan rendah atau mengalami resesi) karena motor pertumbuhan dari sektor swasta tidak bekerja (konsumsi atau investasi swasta lesu).

Ilmu ekonomi seperti yang telah dibahas di atas berkaitan dengan alokasi sumber daya yang terbatas jumlahnya untuk menghasilkan barang dan jasa sebanyak mungkin demi memenuhi kebutuhan individual atau meningkatkan kesejahteraan. Ekonomi pembangunan selain alokasi sumber daya juga bersangkutan paut dengan formulasi kebijaksanaan pemerintah untuk mendukung upaya-upaya pembangunan ekonomi yang diarahkan pada perbaikan tingkat hidup masyarakat, yang sejalan dengan dimensi pembangunan ekonomi yakni berorientasi pada pengurangan kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan (Suryana, 2000).

Ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah dalam proses pembangunan ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, hutang luar negeri, dan ketimpangan pendapatan yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang (NSB), dan cara-cara untuk mengatasinya agar NSB tersebut dapat membangun ekonomi mereka lebih baik dan cepat (Sukirno, 1985).

Secara garis besar, pembahasan ilmu ekonomi pembangunan dapat dimasukkan dalam dua golongan. Pertama, pembahasan mengenai pembangunan ekonomi baik bersifat deskriptif maupun analitis yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang berbagai sifat perekonomian masyarakat di NSB dan implikasinya terhadap kemungkinan untuk membangun ekonomi NSB tersebut. Kedua, pembahasan selebihnya bersifat memberikan berbagai pilihan kebijaksanaan pembangunan ekonomi yang dapat dilakukan dalam upaya-upaya untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi di NSB tersebut (Suryana, 2000).

Menurut defnisi lama, pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang membuat pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Pendapatan per kapita paling sering digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur peningkatan kesejahteraan masyarakat di dalam sebuah ekonomi/negara. Dalam definisi baru, pembangunan

ekonomi adalah suatu proses multidimensional yang melibatkan perubahan besar secara sosial dalam ekonomi (Hakim, 2004).

B. Konsep Dasar Koperasi

1. Definisi Koperasi

Kata koperasi, memang bukan asli dari khasanah bahasa Indonesia. Banyak yang berpendapat bahwa kata tersebut berasal dari bahasa Inggris: *co-operation*, *cooperative*, atau bahasa Latin: *coopere*, atau dalam bahasa Belanda: *cooperatie*, *cooperatieve*, yang kurang lebih berarti bekerja bersama-sama, atau kerja sama, atau usaha bersama atau yang bersifat kerja-sama. Kata koperasi tersebut dalam bahasa Indonesia sebelum tahun 1958, dikenal dengan ejaan kooperasi (dengan dua 'o'), tetapi selanjutnya berdasarkan Undang-undang Nomor 79 Tahun 1958 kata kooperasi telah diubah menjadi koperasi (dengan satu o), demikian seterusnya hingga sampai sekarang.

Ada beberapa ilmuwan seperti Margareth Digby, seorang praktisi sekaligus kritikus koperasi berkebangsaan Inggris, dalam buku *"The World Cooperative Movement"*, juga C.R. Fay, dalam buku *"Cooperative at Home and Abroad"*, G. Mladenant, ilmuwan asal Perancis, dalam buku *"L 'Histoire des Doctrines Cooperatives"*, kemudian H.E. Erdman, dalam buku *"Passing Of Monopoly As An Aim Of Cooperative"*, Frank Robotka, dalam buku *"A Theory Of Cooperative"*, Calvert, dalam buku *"The Law and Principles of Cooperation"*, Arifinal Chaniago dalam buku *"Perkoperasian Indonesia"*, dan masih banyak lagi, masing-masing telah memaparkan pemikirannya tentang apa yang dimaksud dengan koperasi dan membuat definisi sendiri-sendiri. Demikian juga, di dalam setiap undang-undang koperasi yang pernah berlaku juga senantiasa merumuskan tentang makna koperasi.

Calvert, misalnya, memberi definisi tentang koperasi sebagai organisasi orang-orang yang hasratnya dilakukan sebagai manusia atas dasar kesamaan untuk mencapai tujuan ekonomi masing-masing. Arifinal Chaniago memberi definisi koperasi sebagai suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberi kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan

usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Organisasi Buruh Sedunia (*International Labor Organization/ILO*), dalam resolusinya Nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, membuat batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu:

- a. merupakan perkumpulan orang-orang;
- b. yang secara sukarela bergabung bersama;
- c. untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
- d. melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;
- e. yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan di mana anggota aktif berpartisipasi.

"Cooperative is an association of persons, usually of limited man, who have voluntary jointed together, to achieve a common economic end through the formation of a demokratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepts a fair share of the risks and benefits of the undertaking"

Selanjutnya dalam pernyataan tentang jatidiri koperasi yang dikeluarkan oleh Aliansi Koperasi Sedunia (*Intemational Cooperatives Alliance/ICA*), pada kongres ICA di Manchester, Inggris pada bulan September 1995, yang mencakup rumusan-rumusan tentang definisi koperasi, nilai-nilai koperasi dan prinsip-prinsip koperasi, koperasi didefinisikan sebagai "perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis" (berdasarkan terjemahan yang dibuat oleh Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).

Berbagai definisi yang ada mengenai koperasi, terdapat hal-hal yang menyatukan pengertian tentang koperasi, antara lain yaitu:

- a. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang yang mempunyai kebutuhan dan kepentingan ekonomi yang sama, yang ingin dipenuhi secara bersama melau

- pembentukan perusahaan bersama yang dikelola dan diawasi secara demokratis;
- b. Koperasi adalah perusahaan, dimana orang-orang berkumpul tidak untuk menyatukan modal atau uang, melainkan sebagai akibat adanya kesamaan kebutuhan dan kepentingan ekonomi;
 - c. Koperasi adalah perusahaan yang harus memberi pelayanan ekonomi kepada anggota;

Sedangkan pengertian mengenai koperasi dalam uraian ini adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang mendefinisikan koperasi sebagai "badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan" .

2. Ide Koperasi

Pengertian yang amat umum, ide adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai. Cita-cita berkoperasi juga tumbuh dan berkembang dari berbagai ide yang melandasinya. Ide berkoperasi, telah berkembang jauh sebelum koperasi itu sendiri berwujud sebagai koperasi. Ide yang berasal dari berbagai pandangan itu kemudian melebur ke dalam prinsip-prinsip, asas-asas, atau sendi-sendi dasar koperasi.

Dunia perkoperasian mencatat nama seorang ilmuwan berkebangsaan Rusia, Ivan Emelianoft (1860-1900), yang melarikan diri ke Amerika, kemudian membuat disertasi doktornya berjudul : "*Economic Theory Of Cooperation*". Buku ini kemudian menjadi buku teori koperasi yang terkenal. Demikian juga Paul Lambert, seorang aktivis koperasi di Eropa, dalam bukunya yang terkenal: "*Studies on The Social Phylosophy of Cooperation* ", telah mengupas tentang ide dasar falsafah koperasi yang berangkat dari nilai-nilai kerja-sama.

Kerja-sama (*cooperation*), memang bukan hal yang baru. Bahkan secara universal, mungkin sama panjangnya dengan sejarah umat manusia itu sendiri. Sangat mustahil seseorang dapat hidup sendiri. Bergaul, bersosialisasi dan ber *homo homini socius* adalah naluri setiap manusia. Sebagai anggota masyarakat,

seseorang tentu memiliki naluri untuk bekerja-sama dan tolong menolong.

Di berbagai belahan dunia akan dengan mudah dapat ditemukan bentuk-bentuk kerja-sama yang bersifat "*gemeinschaft*" atau semacam paguyuban, antara lain misalnya: perkumpulan tolong menolong, perkumpulan yang mengurus acara perkawinan, perkumpulan yang mengurus pembuatan rumah secara bersama-sama, perkumpulan yang mengurus acara kematian, perkumpulan persaudaraan dan sebagainya, yang pada umumnya diikat kuat oleh semangat solid yang tinggi.

3. Nilai dan Prinsip Koperasi

Aliansi Koperasi Sedunia, tahun 1995, mengikuti pernyataan tentang jati diri koperasi dan nilai-nilai koperasi dirumuskan sebagai berikut:

Koperasi bekerja berdasarkan nilai-nilai

a. Nilai-nilai organisasi

- 1)Menolong diri sendiri
- 2)Tanggung jawab sendiri
- 3)Demokratis
- 4)Persamaan
- 5)Keadilan
- 6)Kesetiakawanan

b. Nilai-nilai etis

- 1)Kejujuran
- 2)Tanggung jawab sosial
- 3)Kepedulian terhadap orang lain.

Beberapa ide yang melandasi lahirnya prinsip-prinsip koperasi antara lain adalah solidaritas, demokrasi, kemerdekaan, altruisme (sikap memperhatikan kepentingan orang lain selain kepentingan diri sendiri), keadilan, keadaan perekonomian negara dan peningkatan kesejahteraan (Suwandi, 1982).

Prinsip-prinsip koperasi (sering juga disebut sebagai asas-asas atau sendi-sendi dasar koperasi), adalah garis-garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktik.

- a. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan bekerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya,

sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.

- b. Prinsip-prinsip Koperasi yang pertama kali dikenal dan dirintis oleh Koperasi Rochdale tahun 1844, sebenarnya adalah rumusan yang disepakati oleh seluruh anggota tentang cara-cara bekerja bagi suatu koperasi konsumsi (Danoewikarsa, 1977) yaitu:
 - 1) Menjual barang yang murni, tidak dipalsukan, dan dengan timbangan yang benar;
 - 2) Menjual dengan tunai;
 - 3) Menjual dengan harga umum (pasar);
 - 4) Pembagian keuntungan seimbang dengan pembelian anggota dari koperasi;
 - 5) Satu suara bagi seorang anggota;
 - 6) Tidak membeda-bedakan aliran dan agama anggota.
- c. Revrisond Baswir, masih menambahkan lagi dengan tiga unsur prinsip koperasi, yaitu:
 - 1) Pembatasan bunga atas modal;
 - 2) Keanggotaan bersifat sukarela; dan
 - 3) Semua anggota menyumbang dalam permodalan. (Revrisond Baswir, 1997).
- d. Bentuk asli, prinsip-prinsip koperasi Rochdale tahun 1844, adalah seperti yang dikemukakan oleh Coole, dalam buku "*A Century of Cooperative*", yaitu ada delapan hal (Damanik, 1980), masing-masing adalah:
 - 1) Pengelolaan yang demokratis (*democratic control*);
 - 2) Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (*open membership*);
 - 3) Pembatasan bunga atas modal (*fix or limited interest on capital*);
 - 4) Pembagian sisa basil usaha kepada anggota sesuai dengan transaksinya kepada koperasi (*distribution of surplus in dividend to members in propotion to their purchase*);
 - 5) Transaksi usaha dilakukan secara tunai (*trading strictly on a cash basis*);

- 6) Menjual barang-barang yang murni dan tidak dipalsukan (*selling only pure and unadulterated goods*);
 - 7) Menyelenggarakan pendidikan tentang prinsip-prinsip dan koperasi kepada anggota, pengurus, pengawas dan pegawai koperasi (*providing for the education of the members, the board and the staff*);
 - 8) Netral di bidang politik dan agama (*political and religious neutrality*).
- e. Koperasi kredit model Raiffeisen tahun 1860, juga memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas (Danoewikarsa, 1977), yaitu:
- 1)Keanggotaan terbuka bagi siapa saja;
 - 2)Perlu ikut sertanya orang kecil, terutama petani kecil atas dasar saling mempercayai;
 - 3)Seorang anggota mempunyai hak suara satu;
 - 4)Tidak ada pemberian jasa modal;
 - 5)Tidak ada pembagian keuntungan, sisa hasil usaha masuk ke dalam cadangan.

Sejak semula, penerapan prinsip-prinsip koperasi adalah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing koperasi di suatu negara, sehingga pada saat itu, prinsip koperasi memiliki banyak ragam. Henzler dari Jerman (Hendrojogi, 1997), membagi asas koperasi menjadi dua hal, yaitu asas yang struktural dan asas yang fungsional.

Democratic control, termasuk asas struktural. Sedangkan asas yang berkaitan dengan masalah manajemen, kebijakan harga, pemberian kredit, menentukan metode dan standar dari prosedur-prosedur operasi adalah asas fungsional, yang bisa berbeda pada beberapa jenis koperasi.

ICA (*The International Cooperative Alliance*) sebagai organisasi puncak perkoperasian sedunia memandang perlu untuk membuat rumusan umum tentang prinsip-prinsip koperasi yang diharapkan dapat diterapkan oleh koperasi-koperasi sedunia. Untuk itu, telah dibentuk komisi khusus guna mengkaji prinsip-prinsip koperasi yang telah dirintis oleh para pionir

koperasi Rochdale. Komisi tersebut telah bekerja pada tahun 1930-1934.

Pada Kongres ICA tahun 1934 di London, komisi khusus yang dibentuk tahun 1934 tersebut menyimpulkan bahwa dari 8 asas Rochdale tersebut, 7 (tujuh) buah di antaranya dianggap sebagai asas pokok atau esensial, (E.D. Damanik, 1980), yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela;
- b. Pengurusan dikelola secara demokratis;
- c. Pembagian SHU sesuai partisipasi masing-masing anggota dalam usaha koperasi;
- d. Bunga yang terbatas atas modal;
- e. Netral dalam lapangan politik dan agama;
- f. Tata niaga dijalankan secara tunai;
- g. Menyelenggarakan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan karyawan koperasi.
- h. Asas ke delapan, yaitu dilarang menjual barang yang tidak murni atau dipalsukan, dihapus (Hendrojogi, 1997).

Ternyata dalam perkembangannya, tidak semua negara sepakat dengan rumusan yang dihasilkan oleh komisi khusus tahun 1934, terutama sekali terhadap tiga butir rumusan yaitu tentang netral di bidang politik dan agama, tata niaga dijalankan secara tunai dan mengadakan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan staf. Banyak negara yang berbeda pandangan mengenai hal tersebut. Maka, pada Kongres ICA di Paris tahun 1937, ditetapkan bahwa dari tujuh prinsip koperasi Rochdale yang diakui pada Kongres ICA di London tahun 1934, empat yang pertama, telah ditetapkan sebagai prinsip-prinsip ICA sendiri, yaitu:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela;
- b. Pengendalian secara demokratis;
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) sebanding dengan partisipasi anggota;
- d. Pembatasan bunga atas modal.

Kongres ICA di Praha tahun 1948, ICA menetapkan dalam anggaran dasarnya, bahwa koperasi di suatu negara yang dapat menjadi anggota lembaga tersebut harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keanggotaan bersifat sukarela;

- b.Pengendalian secara demokratis;
- c.Pembagian SHU sebanding dengan partisipasi anggota;
- d.Pembatasan bunga atas modal.

Sementara tiga lainnya, yaitu:

- a.Tata niaga dilaksanakan secara tunai;
- b.Penyelenggaraan pendidikan dan
- c.Netral di bidang politik dan agama menjadi hal yang tidak diwajibkan.

Keadaan menjadi berkembang lagi tatkala Kongres ICA tahun 1966, di Wina yang memutuskan enam prinsip koperasi, yaitu:

- a.Keanggotaan yang terbuka dan sukarela (*voluntary and open membership*);
- b.Pengelolaan yang demokratis (*democratic administration*);
- c.Pembatasan bunga atas modal (*limited interest on capital*);
- d.Pembagian SHU kepada anggota sesuai partisipasi usahanya cara tunai (*distribution of surplus, in proportion to their purchase*);
- e.Penyelenggaraan pendidikan bagi anggota, pengurus, pengawas dan staf (*providing for members, board members and staf education*);
- f.Kerja sama antar koperasi (*cooperation among the cooperatives*).

Terakhir, adalah penyempumaan yang dilakukan melalui Kongres ICA tahun 1995 di Manchester, Inggris tahun 1995, yang berhasil merumuskan pernyataan tentang jati diri koperasi (*Identity Cooperative ICA Statement/ICIS*), yang butir-butirnya adalah sebagai berikut:

- a.Keanggotaan sukarela dan terbuka;
- b.Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis;
- c.Partisipasi ekonomi anggota;
- d.Otonomi dan kebebasan;
- e.Pendidikan, Pelatihan dan Informasi;
- f.Kerja sama di antara koperasi-koperasi;
- g.Kepedulian terhadap komunitas.

Di samping melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip koperasi yang berlaku secara universal, keberadaan koperasi Indonesia adalah juga berdasarkan landasan idiil, yaitu Pancasila dan landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

4.Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi Koperasi antara lain adalah:

- a.Memenuhi kebutuhan anggota untuk memajukan kesejahteraannya;
- b.Membangun sumber daya anggota dan masyarakat;
- c.Mangembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota;
- d.Mengembangkan aspirasi ekonomi anggota dan masyarakat di lingkungan kegiatan koperasi;
- e.Membuka peluang kepada anggotanya untuk mengaktualisasikan diri dalam bidang ekonomi secara optimal.

Peran koperasi antara lain adalah sebagai:

- a.Wadah peningkatan tarat hidup dan ketangguhan berdaya saing para anggota koperasi dan masyarakat di lingkungannya;
- b.Bagian integral dari sistem ekonomi nasional;
- c.Pelaku stategis dalam sistem ekonomi rakyat;
- d.Wadah pencerdasan anggota dan masyarakat di lingkungannya.

5.Beberapa Aliran Koperasi

Beberapa pakar koperasi menengarai adanya beberapa aliran dalam koperasi, seperti:

- a.Aliran *socialist school*, yang berkeinginan untuk menjadikan koperasi sebagai batu loncatan untuk mencapai sosialisme.
- b.Aliran *commonwealth school*, yang menginginkan agar koperasi dapat menguasai kehidupan ekonomi, dan ini umumnya terjadi di Inggris dan negara-negara persemakmuran.
- c.Aliran *competitive yardstict school*, yang menginginkan agar tumbuhnya koperasi dapat berperan sebagai

penghilang dampak negatif yang diakibatkan oleh sistem kapitalisme. Aliran ini banyak dianut di Swedia, dan merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai *Institutional Economic Balance Theory*.

- d. Aliran pendidikan, yang menginginkan hendaknya koperasi berperan untuk meningkatkan pendidikan demi tercapainya tujuan peningkatan ekonomi.
- e. Aliran *nimes*, yang menghendaki agar keberhasilan koperasi dapat memperbaiki perekonomian semua golongan.

Dalam menyikapi adanya beberapa aliran koperasi tersebut, koperasi Indonesia, tampaknya lebih bersikap moderat, yaitu menyaring semua nilai-nilai yang baik dari masing-masing aliran tersebut, kemudian diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi spesifik masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya, memang tidak ada aliran yang dianut secara murni oleh sesuatu negara.

6. Karakteristik Koperasi

Ada beberapa hal pokok yang membedakan koperasi dengan badan usaha lain yang non koperasi. Hal tersebut antara lain adalah:

- a. Koperasi adalah kumpulan orang, bukan kumpulan modal sebagaimana perusahaan non koperasi.
- b. Kalau di dalam suatu badan usaha lain yang non koperasi, suara ditentukan oleh besarnya jumlah saham atau modal yang dimiliki oleh pemegang saham, dalam koperasi setiap anggota memiliki jumlah suara yang sama, yaitu satu orang mempunyai satu suara dan tidak bisa diwakilkan (*one man one vote, by proxy*).
- c. Pada koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus pelanggan (*owner-user*), oleh karena itu kegiatan usaha yang dijalankan oleh koperasi harus sesuai dan berkaitan dengan kepentingan atau kebutuhan ekonomi anggota. Hal yang demikian itu berbeda dengan badan usaha yang non koperasi. Pemegang saham tidak harus menjadi pelanggan. Badan

usahanyapun tidak perlu harus memberikan atau melayani kepentingan ekonomi pemegang saham.

d. Tujuan badan usaha non koperasi pada umumnya adalah mengejar laba yang setinggi-tingginya. Sedangkan koperasi adalah memberikan manfaat pelayanan ekonomi yang sebaik-baiknya (benefit) bagi anggota.

e. Anggota koperasi memperoleh bagian dari sisa hasil usaha sebanding dengan besarnya transaksi usaha masing-masing anggota kepada koperasinya, sedangkan pada badan usaha non koperasi, pemegang saham memperoleh bagian keuntungan sebanding dengan saham yang dimilikinya.

BAB XXVI

KOPERASI DAN EKONOMI KERAKYATAN

A. Pendahuluan

Salah satu gagasan ekonomi yang dalam beberapa waktu belakangan ini cukup banyak mengundang perhatian adalah mengenai “ekonomi kerakyatan”. Di tengah-tengah himpitan krisis ekonomi yang sedang melanda Indonesia, serta maraknya perbincangan mengenai globalisasi dan globalisme dalam pentas wacana ekonomi-politik dunia, kehadiran ekonomi kerakyatan dalam pentas wacana ekonomi-politik Indonesia memang terasa cukup menyegarkan. Akibatnya, walau pun penggunaan ungkapan itu dalam kenyataan sehari-hari cenderung tumpang tindih dengan ungkapan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan cenderung dipandang seolah-olah merupakan gagasan baru dalam pentas ekonomi-politik di Indonesia.

Kesimpulan seperti itu tidak dapat dibenarkan. Sebab, bila ditelusuri ke belakang, dengan mudah dapat diketahui bahwa perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan sesungguhnya telah berlangsung jauh sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada mulanya adalah Bung Hatta, di tengah-tengah dampak buruk depresi ekonomi dunia yang tengah melanda Indonesia, yang menulis sebuah artikel dengan judul Ekonomi Rakyat di harian Daulat Rakyat (Hatta, 1954). Dalam artikel yang diterbitkan tanggal 20 Nopember 1933 tersebut, Bung Hatta secara jelas mengungkapkan kekusarannya dalam menyaksikan kemerosotan kondisi ekonoroI rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda.

Yang dimaksud dengan ekonomi rakyat oleh Bung Hatta ketika itu tidak lain adalah ekonomi kaum pribumi atau ekonomi penduduk asli Indonesia. Dibandingkan dengan ekonomi kaum penjajah yang berada di lapisan atas, dan ekonomi warga timur asing yang berada di lapisan tengah, ekonomi rakyat Indonesia ketika itu memang sangat jauh tertinggal. Sedemikian mendalamnya kekusaran Bung Hatta menyaksikan penderitaan rakyat pada masa itu, maka tahun 1934 beliau kembali menulis sebuah artikel dengan nada serupa. Judulnya kali ini adalah

308| Pembangunan Ekonomi

Ekonomi Rakyat Dalam Bahaya (Hatta, 1954). Dari judulnya dengan mudah dapat diketahui betapa semakin mendalamnya kekusaran Bung Hatta menyaksikan kemerosotan ekonomi rakyat Indonesia di bawah tindasan pemerintah Hindia Belanda.

Tetapi sebagai seorang ekonom yang berada di luar pemerintahan, Bung Hatta tentu tidak bisa berbuat banyak untuk secara langsung mengubah kebijakan ekonomi pemerintah. Untuk mengatasi kendala tersebut, tidak ada pilihan lain bagi Bung Hatta kecuali terjun secara langsung ke gelanggang politik. Dalam pandangan Bung Hatta, perbaikan kondisi ekonomi rakyat hanya mungkin dilakukan bila kaum penjahat disingkirkan dari negeri ini. Artinya, bagi Bung Hatta, perjuangan merebut kemerdekaan sejak semula memang diniatkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Walau pun demikian, sebagai seorang ekonom pejuang, tidak berarti Bung Hatta serta merta meninggalkan upayanya untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui perjuangan ekonomi. Tindakan konkret yang dilakukan Bung Hatta untuk memperkuat ekonomi rakyat ketika itu adalah dengan menggalang kekuatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi. Terinspirasi oleh perjuangan kaum buruh dan tani di Eropa, Bung Hatta berupaya sekuat tenaga untuk mendorong pengembangan koperasi sebagai wadah perjuangan ekonomi rakyat. Sebagaimana terbukti kemudian, kepedulian Bung Hatta terhadap koperasi tersebut berlanjut jauh setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaannya. Hal itu antara lain disebabkan oleh kesadaran Bung Hatta bahwa perbaikan kondisi ekonomi rakyat tidak mungkin hanya disandarkan pada proklamasi kemerdekaan.

Perjuangan untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat harus terus dilanjutkan dengan mengubah struktur ekonomi Indonesia dari sebuah perekonomian yang berwatak kolonial menjadi sebuah perekonomian nasional. Sebagaimana dikemukakan Bung Karno, yang dimaksud dengan ekonomi nasional adalah sebuah perekonomian yang ditandai oleh meningkatnya peran serta rakyat banyak dalam penguasaan modal atau faktor-faktor produksi di tanah air (Weinsten, 1976).

Kesadaran-kesadaran seperti itulah yang menjadi titik tolak perumusan pasal 33 Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal tersebut, "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua unluk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".

Dalam kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konsepsional yang ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 itu adalah mengenai "demokrasi ekonomi". Walaupun demikian, mengacu pada definisi kata "kerakyatan" sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (Hatta, 1932), serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu. Artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi (Baswir, 1995). Ekonomi Kerakyatan dan Bung Hatta.

Perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi memang tidak dapat dipisahkan dari Bung Hatta. Sebagai pendiri bangsa dan sekaligus sebagai ekonom pejuang, Bung Hatta tidak hanya telah turut meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan sebuah negara merdeka dan berdaulat berdasarkan konstitusi. Beliau juga memainkan peranan yang sangat besar dalam meletakkan dasar-dasar penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi. Bahkan, sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta lah yang secara konsisten dan terus menerus memperjuangkan tegaknya kedaulatan ekonomi rakyat dalam penyelenggaraan perekonomian Indonesia.

Bila ditelusuri ke belakang, diketahui bahwa persinggungan Bung Hatta dengan gagasan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sekurang-kurangnya telah dimulai sejak berlangsungnya perbincangan antara Bung Hatta dan Tan Malaka di Berlin, bulan Juli 1922. Bung Hatta ketika itu genap setahun

berada di negeri Belanda. Dalam perbincangan tersebut, yaitu ketika Tan Malaka mengungkapkan kekecewaannya terhadap model pemerintahan diktator yang diselenggarakan Stalin di Uni Soviet, Bung Hatta serta merta menyelanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat tajam, "Bukankah kediktatoran memang inheren dalam paham komunisme?"

Pertanyaan Bung Hatta tersebut ditanggapi oleh Tan Malaka dengan menjelaskan teori diktator proletariat yang diperkenalkan oleh Karl Marx. Menurut Tan Malaka, diktator proletariat sebagaimana dikemukakan oleh Marx hanya berlangsung selama periode transisi, yaitu selama berlangsungnya pemindahan penguasaan alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis ke tangan rakyat banyak.

Selanjutnya, kaum pekerja yang sebelumnya telah tercerahkan di bawah panduan perjuangan kelas, akan mengambil peran sebagai penunjuk jalan dalam membangun keadilan. Hal itu akan dicapai dengan cara menyelenggarakan produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat. Hal tersebut jelas sangat bertolak belakang dengan diktator personal (Hatta, 1981).

Penggalan kalimat Tan Malaka yang berbunyi "produksi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan berbagai institusi dalam masyarakat" itu tentu mengingatkan kita pada penggalan kalimat yang terdapat dalam penjelasan pasal 33 IJUD 1945 sebagaimana dikemukakan tadi. Kemiripan kedua kalimat tersebut secara jelas mengungkapkan bahwa persinggungan Bung Hatta dengan konsep ekonomi kerakyatan setidaknya telah berlangsung sejak tahun 1922, sejak tahun pertama ia berada di negeri Belanda.

Perkenalan pertama itu tampaknya sangat berkesan bagi Bung Hatta, sehingga mendorongnya untuk melakukan pengkajian secara mendalam. Selain membaca buku-buku sosialisme, Bung Hatta juga memperluas pergaulannya dengan kalangan Partai Buruh Sosial Demokrat (SDAP) di Belanda. Bahkan, tahun 1925, sebagai aktivis Perhimpunan Indonesia, Bung Hatta sengaja memutuskan untuk melakukan kunjungan ke beberapa negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia. Tujuannya adalah untuk mempelajari gerakan koperasi dari dekat (Hatta, 1981).

Selepas menyelesaikan studi di Belanda, komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan terus berlanjut. Salah satu tulisan yang mengungkapkan konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan adalah pamphlet yang disusunnya untuk Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) pada tahun 1932. Dalam pamphlet yang berjudul "Menuju Indonesia Merdeka" tersebut, Bung Hatta mengupas secara panjang lebar mengenai pengertian kerakyatan, demokrasi, dan arti penting demokrasi ekonomi sebagai salah satu pilar model demokrasi sosial yang cocok bagi Indonesia merdeka, Sebagaimana dituliskannya, di atas sendi yang ketiga (cita-cita tolong-menolong-pen.) dapat didirikan tonggak demokrasi ekonomi. Tidak lagi orang seorang atau satu golongan kecil yang mesti menguasai penghidupan orang banyak seperti sekarang, melainkan keperluan dan kemauan rakyat yang banyak harus menjadi pedoman perusahaan dan penghasilan.

Sebab itu, segala tangkai penghasilan besar yang mengenai penghidupan rakyat harus berdasar pada milik bersama dan terletak di bawah penjagaan rakyat dengan perantaraan Badan-badan perwakilannya (Hatta, 1932). Dengan latar belakang seperti itu, mudah dimengerti bila dalam kedudukan sebagai penyusun UUD 1945, Bung Hatta berusaha sekuat tenaga untuk memasukkan ekonomi kerakyatan sebagai prinsip dasar sistem perekonomian Indonesia. Hal itu pula, saya kira, yang menjelaskan mengapa setelah menjabat sebagai wakil presiden, Bung Hatta terus mendorong pengembangan koperasi di Indonesia. Berkat komitmen tersebut, sangat wajar bila tahun 1947 Bung Hatta secara resmi dikukuhkan oleh Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Konsistensi komitmen Bung Hatta terhadap ekonomi kerakyatan itu bahkan berlanjut setelah beliau melepaskan jabatannya sebagai wakil presiden. Sebagaimana terungkap dalam tulisannya yang berjudul Demokrasi Kita, yang diterbitkan empat tahun setelah beliau meletakkan jabatannya sebagai wakil presiden pada tahun 1956, Bung Hatta sekali lagi mempertegas pentingnya penyelenggaraan ekonomi kerakyatan atau demokrasi

ekonomi sebagai jalan dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

Sebagaimana ditulisnya, "Demokrasi politik saja tidak dapat melaksanakan persamaan dan persaudaraan. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka, persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, melingkupi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia," (Hatta, 1960).

Mengikuti jejak Bung Hatta dalam memperjuangkan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia, dapat disaksikan betapa Bung Hatta tidak hanya memandang ekonomi kerakyatan sebagai amanat konstitusi. Bung Hatta telah menghayati ekonomi kerakyatan jauh sebelum ia kembali ke Indonesia. Ia terus menerus meletakkan dasar-dasarnya selama masa perjuangan kemerdekaan. Bahkan ia terus menerus mendorong penyelenggarannya selama menjadi penguasa. Dan ia tetap meyakini kebenarannya setelah menanggalkan kekuasaannya, yang perlu digaris bawahi adalah, dengan dinyatakannya ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi sebagai konsep dasar sistem perekonomian Indonesia, berarti Bung Hatta dan para penyusun UUD 1945 telah secara resmi menggeser perbincangan mengenai "ekonomi rakyat" menjadi "ekonomi kerakyatan".

Tujuan jangka pendek kebijakan itu adalah untuk menghapuskan penggolong-golongan status sosial-ekonomi masyarakat, baik berdasarkan ras maupun berdasarkan tingkat penguasaan faktor-faktor produksi. Sedangkan tujuan jangka panjangnya adalah untuk mengoreksi struktur ekonomi kolonial yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda, serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian Indonesia.

Tetapi karena pengembangan ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi harus dilakukan secara demokratis pula, hal itu secara tidak langsung mengungkapkan pandangan dialektik para bapak pendiri bangsa mengenai hubungan antara transformasi politik dan transformasi ekonomi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Secara politik, penjajahan harus segera dihapuskan dari muka bumi. Namun secara ekonomi,

transformasi ekonomi harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan perangkat hukum yang tersedia, adalah tugas pemerintah Indonesia untuk secara berangsur-angsur memperbaharui perangkat hukum yang mendasari penyelenggaraan sistem perekonomian Indonesia.

Yang menarik, walau pun memiliki akar jauh sebelum Indonesia merdeka, perjalanan ekonomi kerakyatan dalam pentas pemikiran ekonomi Indonesia ternyata bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Dalam era 1945 - 1958, gagasan ekonomi kerakyatan cenderung mengalami proses pasang surut. Sebagaimana diketahui, sampai dengan 1949 kaum penjajah belum sepenuhnya rela meninggalkan Indonesia, Sementara antara 1950 - 1958, walaupun Pemilu 1955 berlangsung dengan sukses, Indonesia terlanjur terjebak ke dalam kancah pergulatan politik internal yang hampir tiada hentinya.

Sedangkan antara 1959 - 1965, yang dikenal sebagai era ekonomi dan demokrasi terpimpin itu, di tengah-tengah situasi perekonomian Indonesia yang teras memburuk, semangat ekonomi kerakyatan cenderung mengalami politisasi secara besar-besaran. Puncaknya adalah pada terjadinya kudeta 30 September 1965, yaitu yang memicu terjadinya peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto pada 11 Maret 1966.

B. Ekonomi Orde Baru

Sebagai antithesis dari era pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Soeharto yang kemudian dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru, menandai bergesernya bandul perekonomian Indonesia ke sisi sebelah kanan. Hal itu antara lain ditandai dengan diundangkannya Undang Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) No. 1/1967 dan UU Koperasi No. 12/1967. Memang, di awal Orde Baru ini gagasan ekonomi kerakyatan sempat mencoba muncul kembali. Tetapi dalam pergulatan pemikiran yang terjadi antara kubu ekonomi kerakyatan yang antara lain dimotori oleh Sarbini Sumawinata, dengan kubu ekonomi neoliberal yang dimotori oleh Widjojo Nitisastro, kubu ekonomi neoliberal muncul sebagai pemenang. Sarbini hanya sempat singgah sebentar di Bappenas pada beberapa tahun pertama Orde Baru.

Setelah itu, walaupun tahun 1974 Indonesia sempat diguncang oleh peristiwa Malari, perkembangan perekonomian Indonesia di tangan teknokrat neoliberal boleh dikatakan semakin sulit dibendung. Para teknokrat neoliberal, dengan dukungan penuh dari Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, dan negara-negara kreditur yang tergabung dalam *Inter Governmental Group on Indonesia* (IGGI), silih berganti memimpin perumusan kebijakan ekonomi Indonesia. Sasaran utama mereka adalah terpeliharanya stabilitas makro ekonomi dan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya.

Untuk itu, instrumen utamanya adalah penggalangan modal asing, baik melalui pembuatan utang luar negeri maupun dengan mengundangnya masuknya investasi asing langsung. Pada mulanya prestasi teknokrat neoliberal, yang sempat dikenal sebagai Mafia Berkeley itu, memang cukup mencengangkan. Terhitung sejak awal Pelita I (1969 -1973), inflasi berhasil dikendalikan di bawah dua digit. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berhasil dipacu dengan rata-rata 6,5 persen pertahun. Implikasinya, pendapatan perkapita penduduk Indonesia yang pada 1969 masih sekitar USD 90, tahun 1982 berhasil ditingkatkan menjadi USD 520.

Bahkan, di penghujung 1980-an, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan sempat dipuji oleh Bank Dunia. Menurut lembaga keuangan multilateral yang didirikan pada tahun 1944 tersebut, keberhasilan Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan patut menjadi contoh bagi negara-negara sedang berkembang lainnya (*World Bank*, 1990), Tahun 1997, sebelum perekonomian Indonesia ambruk dilanda oleh krisis moneter, pendapatan perkapita penduduk Indonesia sudah berhasil ditingkatkan menjadi USD 1,020. Dengan mengemukakan hal itu tentu tidak berarti bahwa perjalanan ekonomi neoliberal sepanjang era Orde Baru tidak berlangsung tanpa kritik. Salah satu kritik yang sering dialamatkan terhadap kebijakan ekonomi yang pro pertumbuhan dan modal asing itu adalah soal melebarnya jurang kesenjangan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup mengagumkan itu, ternyata tidak dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan penduduk. Kesenjangan pengeluaran antara 10 persen penduduk termiskin dengan 10 persen

penduduk terkaya, meningkat dari 1 : 6,5 pada tahun 1970, meujadi 1 : 8,7 pada tahun 1995.

Salah seorang pengkritik kebijakan ekonomi neoliberal yang cukup terkemuka sepanjang tahun delapan puluhan adalah Mubyarto. Dalam pidato pengukuhanannya sebagai guru besar ekonomi di Universitas Gadjah Mada (UGM) tahun 1979, Mubyarto dengan tajam mengkritik kebijakan ekonomi Orde Baru yang dipandang sudah sangat jauh melenceng dari amanat konstitusi. Sembari menggaris bawahi pentingnya pendekatan transdisipliner dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia, Mubyarto kembali memunculkan semangat ekonomi kerakyatan ke permukaan dengan label Ekonomi Pancasila. Namun demikian, sebagaimana Sarbini, kritik tajam Mubyarto hilang begitu saja seperti ditelan ombak. Bahkan, Mubyarto sendiri kemudian turut ditelan oleh “ombak” Kabinet Pembangunan VI.

Kritik lain yang mencuat terhadap kebijakan ekonomi neoliberal dalam era 1980-an adalah mengenai merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kesenjangan ekonomi Indonesia terayata tidak hanya disebabkan oleh adanya *trade off* antara pertumbuhan dengan pemerataan. Secara empiris, hal itu ternyata diperparah oleh merajalelanya KKN pada hampir semua tingkat birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Beberapa tahun terakhir menjelang kejatuhan Soeharto, Indonesia praktis sudah dikenal oleh masyarakat internasional sebagai salah satu negara juara korupsi di dunia. Konsekuensinya, perkoncoan penguasa-pengusaha dalam pentas ekonomi Orde Baru cenderung tampak semakin kasat mata. Bahkan, terhitung sejak pertengahan 1980-an, keterlibatan kerabat Cendana dalam memperebutkan kue bisnis di Indonesia mulai mencuat ke permukaan menjadi bahan perbincangan umum. Separuh terakhir era ekonomi Orde Baru memang ditandai oleh maraknya perbincangan mengenai perkembangan kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) di Indonesia.

Yang tidak banyak diketahui oleh warga masyarakat adalah soal keterlibatan para pejabat pemerintah dan para pengusaha kroni Orde Baru itu dalam menumpuk utang luar negeri. Selain hidup dari fasilitas negara dan penyalahgunaan tabungan masyarakat, para pengusaha kroni Orde Baru tersebut

ternyata juga membangun kerajaan bisnis mereka dengan cara menumpuk utang. Dengan bertumpuknya utang luar negeri sektor swasta sebesar 65 milyar dolar AS, di atas tumpukkan utang luar negeri pemerintah sebesar 54 milyar dolar AS, dapat disaksikan betapa kebiasaan menumpuk utang luar negeri dalam era Orde Baru, selain dilakukan oleh sektor negara, dilakukan pula oleh sektor dunia usaha. Klimaksnya, sebagaimana berlangsung sejak pertengahan 1997, perekonomian Indonesia tiba-tiba ambruk dihantam oleh badai krisis moneter yang ditiupkan. oleh kekuatan kapitalisme kasino (*casino capitalism*). Fundamental ekonomi Indonesia yang di permukaan tampak cukup meyakinkan, bagian dalamnya ternyata keropos dan menyimpan bom waktu. Selain ditandai oleh tingkat kesenjangan ekonomi yang mencolok dan merajalelanya KKN, pertumbuhan ekonomi Orde Baru yang rata-rata mencapai 6,5 persen tadi ternyata hanyalah pertumbuhan ekonomi semu yang dibangun di atas fondasi tumpukan utang luar negeri.

Selanjutnya, seiring dengan semakin merosotnya nilai rupiah dan tumbangnya Soeharto, para kroni Orde Baru yang telah terlanjur menumpuk utang luar negeri tersebut, terjungkal satu per satu. Celaknya, antara lain melalui penerbitan obligasi rekapitalisasi yang secara keseluruhan berjumlah sekitar Rp 650 triliun, yaitu yang ditujukan untuk menyelamatkan sektor perbankan, rakyat banyak yang sudah cukup lama menderita turut mereka bawa serta. Sebagaimana diketahui, kurs rupiah pada permulaan 1998 memang sempat merosot secara tajam dari rata-rata Rp 2.400 menjadi Rp 16.000 per satu dollar AS. Akibatnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 mengalami kontraksi secara dramatis sebesar -13,8 persen. Dengan demikian, krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidak hanya menjadi malapetaka bagi mereka yang berkuasa dan serba punya, tetapi menjadi malapetaka pula bagi rakyat banyak yang telah lama menderita.

Singkat cerita, krisis ekonomi yang sempat meluas menjadi kerusuhan sosial dan politik itu, bermuara pada melambungnya harga berbagai kebutuhan pokok rakyat, ditutupnya 16 bank atas perintah Dana Moneter Internasional (MF), bangkrutnya sejumlah perusahaan, dan meluasnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara nasional. Bahkan,

317| Pembangunan Ekonomi

menyusul penerbitan obligasi rekapitalisasi sebesar Rp 650 triliun sebagaimana dikemukakan tadi, pemerintah Indonesia secara resmi terpuruk ke dalam perangkap utang dalam dan luar negeri sebesar Rp 1.300 triliun. Di tengah-tengah situasi seperti itu, yaitu dengan berlangsungnya proses sistematis sosialisasi beban ekonomi negara kepada rakyat banyak, kondisi perekonomian rakyat dengan sendirinya terpuruk semakin dalam.

Pertanyaannya, urgensi apakah sesungguhnya yang mendorong mencuatnya kembali perbincangan mengenai ekonomi kerakyatan dalam beberapa tahun belakangan ini? Adakah hal itu merupakan pertanda bahwa gagasan ekonomi kerakyatan akan kembali menunjukkan taringnya dalam pergulatan pemikiran ekonomi di Indonesia? Ataukah ia hanya akan singgah sebentar untuk kemudian pergi kembali tanpa meninggalkan bekas apa-apa?

Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada baiknya bila substansi ekonomi kerakyatan dikemukakan secara singkat. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, landasan konstitusional sistem ekonomi kerakyatan adalah Pasal 33 UUD 1945. "Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi".

Berdasarkan bunyi kalimat pertama penjelasan Pasal 33 UUD 1945 itu, dapat disaksikan bahwa substansi ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya mencakup tiga hal. Pertama, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional. Partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam proses produksi nasional ini menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Hal itu tidak hanya penting untuk menjamin pendayagunaan seluruh potensi sumberdaya nasional, tetapi juga sebagai dasar untuk memastikan keikutsertaan seluruh anggota masyarakat dalam menikmati hasil produksi nasional. Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat 2

UUD 1945 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".

Kedua, partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, harus ada jaminan bahwa setiap anggota masyarakat turut menikmati hasil produksi nasional, termasuk para fakir miskin dan anak-anak terlantar. Hal itu antara lain dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan, "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara". Dengan kata lain, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, negara wajib menyelenggarakan sistem jaminan sosial bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar di Indonesia.

Ketiga, kegiatan pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional itu harus berlangsung di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek kegiatan ekonomi. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek kegiatan ekonomi. Dengan demikian, walaupun kegiatan pembentukan produksi nasional dapat dilakukan oleh para pemodal asing, tetapi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan itu harus tetap berada di bawah pimpinan dan pengawasan anggota-anggota masyarakat.

Unsur ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang ketiga tersebut saya kira perlu digaris bawahi. Sebab unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itulah yang mendasari perlunya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut memiliki modal atau faktor-faktor produksi nasional. Perlu diketahui, yang dimaksud dengan modal dalam hal ini tidak hanya terbatas dalam bentuk modal material (*material capital*), tetapi mencakup pula modal intelektual (*intellectual capital*) dan modal institusional (*institusional capital*).

Sebagai konsekuensi logis dari unsur ekonomi kerakyatan yang ketiga itu, negara wajib untuk secara terus menerus mengupayakan terjadinya peningkatan kepemilikan ketiga jenis modal tersebut secara relatif merata di tengah-tengah masyarakat. Sehubungan dengan modal material, misalnya, negara tidak hanya wajib mengakui dan melindungi hak kepemilikan setiap anggota masyarakat. Negara juga wajib

memastikan bahwa semua anggota masyarakat turut memiliki modal material. Jika ada di antara anggota masyarakat yang sama sekali tidak memiliki modal material, dalam arti terlanjur terperosok menjadi fakir miskin atau anak-anak terlantar, maka negara wajib memelihara mereka.

Sehubungan dengan modal intelektual, negara wajib menyelenggarakan pendidikan nasional secara cuma-cuma. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi, penyelenggaraan pendidikan berkaitan secara langsung dengan tujuan pendirian negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Negara memang tidak perlu melarang jika ada pihak swasta yang menyelenggarakan pendidikan, tetapi hal itu sama sekali tidak menghilangkan kewajiban negara untuk menanggung biaya pokok penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh anggota masyarakat yang membutuhkannya.

Sementara itu, sehubungan dengan modal institusional, saya kira tidak ada keraguan sedikit pun bahwa negara memang wajib melindungi kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Secara khusus hal itu diatur dalam Pasal 28 UUD 1945, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tertulis dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang".

Kemerdekaan anggota masyarakat untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat tersebut tentu tidak terbatas dalam bentuk serikat-serikat sosial dan politik, tetapi meliputi pula serikat-serikat ekonomi. Sebab itu, tidak ada sedikit pun alasan bagi negara untuk meniadakan hak anggota masyarakat untuk membentuk serikat-serikat ekonomi seperti serikat tani, serikat buruh, serikat nelayan, serikat usaha kecil-menengah, serikat kaum miskin kota dan berbagai bentuk serikat ekonomi lainnya, termasuk mendirikan koperasi.

Bertolak dari uraian tersebut, dapat disaksikan bahwa tujuan utama ekonomi kerakyatan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian. Bila tujuan utama ekonomi kerakyatan itu dijabarkan lebih lanjut, maka sasaran pokok

ekonomi kerakyatan dalam garis besarnya meliputi lima hal berikut:

1. Tersedianya peluang kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
2. Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terantar.
3. Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relatif merata di antara anggota masyarakat.
4. Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
5. Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

Sejalan dengan itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945, negara memainkan peranan yang sangat penting dalam sistem ekonomi kerakyatan. Peranan negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian. Melalui pendirian Badan-badan Usaha Milik Negara (BUMN), yaitu untuk menyelenggarakan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, negara dapat terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi tersebut. Tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakinuran orang seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke taugan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.

Walau pun demikian, sama sekali tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ekonomi kerakyatan cenderung mengabaikan efisiensi dan bersifat anti pasar. Efisiensi dalam sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya dipahami dalam perspektif jangka pendek dan berdimensi keuangan, melainkan dipahami secara komprehensif dalam arti memperhatikan baik aspek kualitatif dan kuantitatif, keuangan dan non-keuangan, maupun aspek kelestarian lingkungan. Politik ekonomi kerakyatan memang tidak didasarkan atas pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas, melainkan atas keadilan, partisipasi, dan keberlanjutan.

Mekanisme alokasi dalam sistem ekonomi kerakyatan, kecuali untuk cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, tetap di dasarkan atas mekanisme pasar. Tetapi mekanisme pasar bukan satu-satunya. Selain melalui mekanisme pasar, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui mekanisme usaha bersama (koperasi). Mekanisme pasar dan koperasi dapat diibaratkan seperti dua sisi dari sekeping mata uang yang sama dalam mekanisme alokasi sistem ekonomi kerakyatan.

Dalam rangka itu, sejalan dengan amanat penjelasan pasal 33 UUD 1945, penyelenggaraan pasar dan koperasi dalam sistem ekonomi kerakyatan harus dilakukan dengan terus menerus melakukan penataan kelembagaan, yaitu dengan cara pemerataan penguasaan modal atau faktor-faktor produksi kepada segenap lapisan anggota masyarakat. Proses sistematis untuk mendemokratisasikan penguasaan faktor-faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat inilah yang menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan (lihat Dahl, 1992).

Dilihat dari sudut Pasal 33 UUD 1945, keikutsertaan anggota masyarakat dalam memiliki faktor-faktor produksi itulah antara lain yang menyebabkan dinyatakan koperasi sebagai bangun perusahaan yang sesuai dengan sistem ekonomi kerakyatan. Sebagaimana diketahui, perbedaan koperasi dari perusahaan perseroan terletak pada diterapkannya prinsip keterbukaan bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan dalam lapangan usaha yang dijalankan oleh koperasi untuk turut menjadi anggota koperasi (Hatta, 1954:218).

Sehubungan dengan itu, Bapak Koperasi Indonesia Bung Hatta, berulang kali menegaskan bahwa pada koperasi memang terdapat perbedaan mendasar yang membedakannya secara diametral dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Di antaranya adalah pada dihilangkannya pemilahan buruh-majikan, yaitu diikutsertakannya buruh sebagai pemilik perusahaan atau anggota koperasi. Sebagaimana ditegaskan oleh Bung Hatta, "Pada koperasi tak ada majikan dan tak ada buruh, semuanya pekerja yang bekerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama" (Hatta, 1954:203).

Penegasan seperti itu diuraikan lebih lanjut oleh Bung Hatta dengan mengemukakan beberapa contoh, "misalnya koperasi menggaji buruh untuk menyapu ruangan bekerja, supaya anggota-anggota yang bekerja jangan terganggu kesehatannya oleh debu. Umpamanya pula koperasi menggaji instruktur untuk mengajar dan memberi petunjuk tentang cara mengerjakan administrasi dan pembukuan kepada anggota yang disertai dengan pekerjaan itu. Sungguh pun demikian, juga terhadap mereka yang memburuh itu, yang mengerjakan pekerjaan kecil-kecil, koperasi harus membuka kesempatan untuk menjadi anggota. Bukan corak pekerjaan yang dikerjakan yang menjadi ukuran untuk menjadi anggota, melainkan kemauan dan rasa bersekutu dan cita-cita koperasi yang dikandung dalam dada dan kepala masing-masing" (Hatta, 1954:215).

Berdasarkan ilustrasi Bung Hatta itu, kiranya jelas, karakter utama ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi pada dasarnya terletak pada dihilangkannya watak individualistis dan kapitalistis dari wajah perekonomian Indonesia. Secara mikro hal itu antara lain berarti diikutsertakannya pelanggan dan buruh sebagai anggota koperasi atau pemilik perusahaan. Sedangkan secara makro hal itu berarti ditegakkannya kedaulatan ekonomi rakyat dan diletakkannya kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang.

Pendek kata, dengan diangkatnya ekonomi kerakyatan sebagai prinsip penyelenggaraan ekonomi Indonesia, prinsip itu dengan sendirinya tidak hanya memiliki kedudukan penling dalam menentukan corak sistem perekonomian yang harus diselenggarakan oleh pemerintah pada tingkat makro. Ia juga memiliki kedudukan yang sangat penting dalam menentukan corak perusahaan yang sepatunya dikembangkan pada tingkat mikro.

Penegakan kedaulatan ekonomi rakyat dan pengutamakan kemakmuran masyarakat di atas kemakmuran orang seorang, hanya dapat dilakukan dengan menerapkan dan mengamalkan prinsip tersebut.

C. Urgensi Ekonomi Kerakyatan

Sebagai sebuah paham dan sistem ekonomi yang bermaksud menegakkan kedaulatan rakyat dalam bidang

ekonomi, tentu sangat wajar bila ekonomi kerakyatan cenderung mendapat perlawanan dari berbagai kalangan. Bagi para penganut kapitalisme neoliberal, misalnya, gagasan ekonomi kerakyatan tidak hanya dipandang tidak sejalan dengan teori-teori ekonomi yang telah mereka yakini, tetapi juga cenderung dipandang sebagai ancaman serius terhadap pemenuhan kepentingan-kepentingan pribadi mereka.

Terdapat berbagai argumen yang sering dilontarkan oleh para penghayat kapitalisme neoliberal untuk melecehkan ekonomi kerakyatan. Mereka yang bergerak dalam dunia akademis biasanya akan segera mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan hanyalah sebuah jargon politik, tidak ada dalam *teks book*, dan tidak ada contohnya dalam dunia nyata.

Sementara mereka yang bergerak di sektor dunia usaha, cenderung mengasosiasikan ekonomi kerakyatan dengan sistem ekonomi sosialis otoriter ala Uni Soviet yang sudah bangkrut itu. Agak berbeda dari para penghayat paham kapitalisme neoliberal adalah mereka yang bersimpati terhadap substansi ekonomi kerakyatan, tetapi tidak yakin terhadap peluang penerapannya. Kelompok yang tergolong ragu-ragu ini biasanya menganggap ekonomi kerakyatan sebagai sebuah gagasan idealis yang tidak realistis. Menurut mereka, di tengah-tengah hegemoni kapitalisme neoliberal yang ditandai oleh berlangsungnya dominasi kapitalisme kasino seperti saat ini, bagaimana mungkin ekonomi kerakyatan dapat diselenggarakan?

Perlawanan dan keragu-raguan terhadap ekonomi kerakyatan adalah hal yang wajar. Sebagai sebuah paham dan sistem ekonomi, setidaknya-tidaknya dalam jangka pendek, ekonomi kerakyatan memang tidak bermaksud membahagiakan semua kalangan. Artinya, walau pun dalam jangka panjang ekonomi kerakyatan menjanjikan kondisi perekonomian yang lebih berkeadilan, dalam jangka pendek ia adalah ancaman yang sangat serius bagi mereka yang telah merasa sangat diuntungkan oleh sistem ekonomi kapitalis neoliberal.

Sehubungan dengan itu, mungkin ada baiknya bila dikemukakan secara singkat argumentasi yang melatar belakangi pentingnya pelaksanaan demokratisasi modal atau demokratisasi penguasaan faktor-faktor produksi dalam rangka

penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan. Selain didasarkan pada motivasi untuk menciptakan keadilan ekonomi, secara politik, demokratisasi modal atau demokratisasi penguasaan faktor-faktor produksi adalah pilar penting bagi sistem demokrasi sosial Indonesia untuk menjamin terselenggaranya demokrasi politik dalam arti yang sebenarnya (Hatta, 1960).

Dalam pandangan ekonomi kerakyatan, demokrasi politik saja tidak mencukupi bagi rakyat banyak untuk mengendalikan jalannya roda perekonomian. Sebab, sebagaimana berbagai bidang kehidupan lainnya, persaingan politik sangat tergantung pada modal. Dengan demikian, walau pun suatu masyarakat telah memiliki kelembagaan politik yang secara prosedural tergolong demokratis, tetapi faktor modal akan tetap memainkan peranan sangat penting dalam mempengaruhi pilihan-pilihan politik masyarakat.

Sebagaimana pernah dikemukakan oleh Gramsci (dalam Sugiono, 1999), sesungguhnya para pemodal besar tidak hanya cenderung memanfaatkan negara sebagai sarana untuk membela kepentingan kelas mereka. Melalui kekuatan modal yang mereka miliki, demokrasi pun cenderung mereka pakai sekedar sebagai sarana untuk melestarikan posisi dominan mereka di tengah-tengah masyarakat.

Hal itu mereka lakukan baik dengan memberi dukungan modal material terhadap kandidat atau partai politik yang memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelas mereka, menghambat proses penguatan modal institusional pada kelompok masyarakat yang mereka eksploitasi, maupun dengan cara menguasai dan memanipulasi informasi serta dengan cara mengkomersialkan penyelenggaraan pendidikan. Untuk menghadapi kelicikan para pemodal besar tersebut, tidak ada pilihan lain bagi rakyat banyak seperti kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, usaha kecil-menengah, dan kaum miskin kota, kecuali berusaha mempersenjatai diri mereka dengan modal material yang cukup, kemampuan intelektual yang memadai, dan terutama sekali modal institusional yang kuat.

Upaya untuk mempersenjatai diri dengan ketiga jenis modal tersebut jelas tidak mungkin diperoleh secara cuma-cuma. Ia memerlukan perjuangan. Jika dilihat berdasarkan perspektif pemenuhan hak azasi manusia, terutama hak-hak ekonomi, rakyat

banyak pada dasarnya memiliki hak untuk menuntut kepada negara agar memfasilitasi proses penguasaan ketiga jenis modal atau faktor produksi tersebut. Sebagai misal, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, adalah dengan menuntut penyediaan peluang kerja dan penghidupan yang layak, serta menyelenggarakan pendidikan cuma-cuma bagi seluruh anggota masyarakat.

Dengan latar belakang seperti itu, sebagaimana halnya kapitalisme neoliberal, ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah paham dan sistem ekonomi. Selain merupakan sebuah paham dan sistem ekonomi, ekonomi kerakyatan adalah gerakan politik yang secara tegas memihak pada pemberdayaan kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal, khususnya dari dominasi para pemodal besar yang memang memiliki watak untuk secara terus menerus meminggirkan mereka.

Tujuan utama paham dan sistem ekonomi kerakyatan, berbeda dari sistem ekonomi sosialis otoriter yang pernah dijalankan di Uni Sovyet, bukanlah untuk membasmi para pemodal besar. Tujuan utama ekonomi kerakyatan adalah untuk menciptakan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan dalam arti yang sebenar-benarnya. Dengan meningkatnya penguasaan modal atau faktor-faktor produksi oleh segenap lapisan anggota masyarakat, dan dengan meningkatnya kemampuan mereka dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian, maka penyalahgunaan demokrasi sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi oleh para pemodal besar diharapkan akan dapat dihindari.

Berangkat dari substansi dan urgensi sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana dikemukakan tersebut, beberapa hal mudah-mudahan kini menjadi lebih jelas, terutama bagi mereka yang selama ini masih ragu-ragu terhadap kemungkinan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan di Indonesia. Pertama, sebagai sebuah paham, ekonomi kerakyatan bukanlah sebuah paham yang bersifat apolitis. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, ekonomi kerakyatan juga berperan sebagai gerakan politik untuk mencegah berlanjutnya kesewenang-wenangan para pemodal besar, termasuk kesewenang-wenangan

kekuatan modal internasional dan lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO.

Kedua, jika dilihat dari segi konstituennya, konstituen utama ekonomi kerakyatan adalah kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal. Dalam garis besarnya mereka terdiri dari kaum buruh, kaum tani, kaum nelayan, pegawai negeri golongan bawah, usaha kecil-menengah, dan kaum miskin kota. Di luar kelima kelompok besar tersebut tentu terdapat berbagai kelompok masyarakat lainnya yang dapat pula digolongkan sebagai kelompok terpinggirkan dalam sistem ekonomi kapitalis neoliberal.

Ketiga, jika dilihat dari musuh strategisnya, musuh utama gerakan ekonomi kerakyatan terdiri dari para penguasa negara-negara industri pemberi ulang, perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional (MNC dan IC), lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan multilateral yang menjadi agen utama penyebarluasan kapitalisme neoliberal, para penguasa negara yang menjadi kaki tangan kepentingan para pemodal besar, dan para pemodal besar domestik yang menghalang-halangi upaya perwujudan sistem ekonomi kerakyatan.

Orientasi ekonomi kerakyatan pada penciptaan kondisi ekonomi dan politik yang demokratis dan berkeadilan tersebut tentu sangat bertentangan dengan kepentingan kelompok-kelompok masyarakat yang telalu merasa sangat diuntungkan oleh sistem perekonomian yang sedang berjalan. Artinya, dengan orientasi seperti itu, tantangan yang dihadapi oleh ekonomi kerakyatan pada dasarnya tidak hanya karena ia sekedar jargon politik, atau karena ia tidak ditemukan dalam *teks book*, melainkan karena penyelenggaraannya merupakan ancaman bagi kesinambungan dominasi kelompok yang berkuasa dan serba punya dalam mengendalikan jalannya roda perekonomian Indonesia. Dalam konteks situasi perekonomian Indonesia saat ini, secara keseluruhan, tantangan terbesar yang dihadapi oleh ekonomi kerakyatan terutama datang dari dua pihak.

Pertama, dari kelompok masyarakat yang selama ini telah sangat diuntungkan oleh kapitalisme perkoncoan (*crony capitalism*) yang diselenggarakan oleh Orde Baru. Walau pun secara formal Orde Baru telah berhasil disingkirkan, tetapi praktik KKN masih terus merajalela. Bahkan, ada indikasi bahwa dalam

era multi partai sekarang ini, berlangsung proses demokratisasi dalam pelaksanaan KKN di Indonesia. Sebagaimana ditengarai oleh lembaga *Transparency International* yang berkedudukan di Jerman, tahun 2002 Indonesia masih menempati urutan ketujuh sebagai negara juara korupsi. Tetapi tahun 2003, posisi Indonesia justru naik ke urutan keenam. Kejahatan ekonomi-politik yang sebagian besar melibatkan para pejabat negara dan para pemodal besar tersebut, tentu merupakan kenikmatan tersendiri yang diwariskan Orde Baru, yang tidak mudah untuk dihapus begitu saja. Para pejabat negara yang telah bertahun-tahun menikmati rasa manis kapitalisme perkoncoan tersebut tentu akan mempertahankan sistem itu sekuat tenaga. Demikian halnya dengan para pengusaha perkoncoan atau para kroninya. Banyak cara yang dapat mereka tempuh dalam mempertahankan posisi dominan mereka miliki, termasuk dengan menyelip dan menelikung proses transisi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

Kedua, dari jaringan kekuatan modal internasional, khususnya dari kekuatan kapitalisme kasino yang ingin mencengkeram dan menghisap perekonomian Indonesia. Walau pun selama Orde Baru kekuatan modal internasional ini sudah hadir di sini, tetapi ketika itu mereka terpaksa harus berbagi dengan Soeharto dan para kroninya. Kini, setelah berakhimya kekuasaan Soeharto, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memiliki arena bermain yang lebih leluasa untuk mengeksploitasi dan mengurus kekayaan Indonesia.

Celakanya, Orde Baru telah mewariskan utang luar negeri yang sangat besar jumlahnya terhadap rakyat Indonesia. Bahkan, untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari kehancuran yang lebih drastis, Soeharto telah secara resmi mengundang IMF untuk menjadi “dokter penyelamat” perekonomian Indonesia. Kondisi ekonomi Indonesia yang terlanjur terjebak dalam perangkap utang luar negeri sebesar hampir 130 milyar dolar AS itulah terutama yang dicoba dimanfaatkan oleh jaringan kekuatan modal internasional untuk memaksakan penyelenggaraan sistem ekonomi kapitalis neoliberal di negeri ini.

Sebagaimana berlangsung beberapa tahun belakangan ini, menyusul penanda tangan *Letter of Intent* (LOI) oleh

pemerintah Indonesia, negeri ini dipaksa oleh IMF untuk menyelenggarakan sejumlah agenda kapitalisme neoliberal yang dikenal sebagai paket program penyesuaian struktural (*structural adjustment program*). Pelaksanaan paket program penyesuaian struktural yang dikenal pula sebagai paket kebijakan Konsensus Washington itulah yang kita saksikan melalui pelaksanaan kebijakan uang ketat dan penghapusan subsidi, liberalisasi keuangan dan perdagangan, serta dalam pelaksanaan privatisasi BUMN di Indonesia.

Di tengah-tengah situasi perekonomian Indonesia yang tengah menjadi ajang rebutan antara oligarki kekuatan kapitalisme perkoncoan Orde Baru dan kekuatan kapitalisme internasional itu, jelas tidak ada pilihan lain bagi rakyat Indonesia, kecuali segera merapatkan barisan untuk memperjuangkan penyelenggaraan sistem ekonomi kerakyatan secepatnya. Amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) No. IV/1999) untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan, harus benar-benar dimanfaatkan oleh seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan secepatnya.

D. Agenda Ekonomi Kerakyatan

Agar ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda kongkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Dalam garis besarnya terdapat tujuh agenda pokok ekonomi kerakyatan yang perlu mendapat perhatian. Ketujuhnya adalah inti dari politik ekonomi kerakyatan dan merupakan titik masuk untuk menyelenggarakan sistem ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang.

Pertama, memperjuangkan penghapusan sebagian utang luar negeri Indonesia sebagai upaya untuk mengurangi tekanan terhadap belanja negara dan neraca pembayaran. Penghapusan utang luar negeri terutama perlu dilakukan terhadap utang luar negeri yang tergolong sebagai utang najis (*odious debt*), yaitu utang luar negeri yang proses pembuatannya sarat dengan manipulasi para kreditur, sedangkan pemanfaatannya cenderung diselewengkan oleh para pejabat yang berkuasa untuk memperkaya diri mereka sendiri.

Selanjutnya, pembuatan utang luar negeri baru perlu dihentikan, sebab selain ini ia lebih banyak ditujukan untuk

menjaga keseimbangan neraca pembayaran dan membangun berbagai proyek yang bersifat memfasilitasi penanaman modal asing di sini. Selain tidak bermanfaat bagi peningkatan kemakmuran rakyat, pembuatan utang luar negeri baru hanya akan menyebabkan semakin dalamnya perekonomian Indonesia terpuruk ke dalam perangkap utang.

Kedua, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan negara dengan tujuan untuk memerangi KKN dalam segala dimensinya. Salah satu tindakan yang perlu diprioritaskan dalam hal ini adalah penghapusan dana-dana non-bujeter yang tersebar secara merata pada hampir semua instansi pemerintah. Melalui peningkatan disiplin pengelolaan keuangan negara ini, diharapkan tidak hanya dapat diketahui volume pendapatan dan belanja negara yang sesungguhnya, tetapi nilai tambah dari berbagai komponen keuangan negara itu terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan pula.

Sehubungan dengan itu, peranan negara dalam penyelenggaraan perekonomian nasional sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945, wajib dipertahankan. Peranan ekonomi negara tidak hanya terbatas sebagai pembuat dan pelaksana peraturan. Melalui pengelolaan keuangan negara yang disiplin, negara selanjutnya memiliki kewajiban dalam memenuhi hak-hak dasar ekonomi setiap warga negara. Prioritas peranan negara dalam hal ini adalah dalam menanggulangi kemiskinan, menyediakan peluang kerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi setiap anggota masyarakat.

Ketiga, mendemokratisasikan pengelolaan BUMN. Sebagaimana diketahui pengelolaan BUMN selama ini cenderung didominasi oleh para pejabat pemerintah pusat. Dominasi para pejabat pemerintah ini tidak hanya berakibat pada buruknya kualitas pelayanan BUMN, tetapi terutama berdampak pada berubahnya BUMN menjadi objek sapi perah para penguasa. Dengan latar belakang seperti itu, alih-alih tumbuh menjadi badan usaha meringankan beban keuangan negara, BUMN justru hadir sebagai badan usaha yang menggerogoti keuangan negara.

Untuk mengakhiri hal itu, solusinya bukanlah dengan melakukan privatisasi BUMN, tetapi dengan mendemokratisasikan pengelolaannya. Tiga hal yang perlu

dilakukan dalam hal ini adalah sebagai berikut. Pertama, otonomi penyelenggaraan BUMN dari birokrasi pemerintahan, yaitu dengan melimpahkannya kepada sebuah badan otonom yang secara khusus dibentuk sebagai penyelenggara BUMN. Kedua, peningkatan peranan serikat pekerja dalam penyelenggaraan BUMN, baik dengan secara langsung mengikutsertakan pekerja sebagai pemilik saham BUMN, atau memberi hak suara kepada para pekerja BUMN melalui penerbitan Undang Undang. Ketiga, khusus bagi BUMN yang bergerak dalam bidang eksplorasi sumberdaya alam, keikutsertaan pemerintah daerah dalam kepemilikan perlu dipertimbangkan (Baswir, 2003).

Keempat, peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini terutama harus diselenggarakan dengan melakukan pembagian pendapatan (*revenue and tax sharring*), yaitu dengan memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk turut secara langsung dalam pengumpulan berbagai jenis pajak yang selama ini dimonopoli oleh pemerintah pusat. Bahkan, untuk jenis-jenis pajak tertentu seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hak pungut sebaiknya langsung diserahkan kepada pemerintah daerah.

Kelima, pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja serta peningkatan partisipasi para pekerja dalam penyelenggaraan perusahaan. Sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat 2 UUD 1945, setiap warga negara Indonesia tidak hanya berhak mendapatkan pekerjaan, tetapi juga berhak mendapatkan penghidupan yang layak berdasarkan kemanusiaan. Dalam rangka itu, peningkatan partisipasi pekerja dalam penyelenggaraan perusahaan (demokrasi di tempat kerja), yang antara lain dapat dimulai dengan menyelenggarakan program kepemilikan saham bagi para pekerja (*employee stock option program*), adalah bagian integral dari proses pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasar para pekerja tersebut.

Keenam, pembatasan penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada para petani penggarap. Penguasaan lahan pertanian secara berlebihan yang dilakukan oleh segelintir pejabat, konglomerat, dan petani berdasi sebagaimana berlangsung saat ini harus segera diakhiri. Sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945 dan Pasal 2 UUPA 1960,

negara berhak mengatur peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan lahan pertanian bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hasil pengambilalihan lahan pertanian ini, ditambah dengan ribuan hektar lahan pertanian di bawah penguasaan negara lainnya, harus didistribusikan kembali kepada para petani penggarap yang memang menggantungkan kelangsungan hidup segenap anggota keluarganya dari mengolah lahan pertanian.

Ketujuh, pembaharuan UU koperasi dan pembentukan koperasi-koperasi sejati dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan. Koperasi sejati tidak sama dengan koperasi “persekutuan majikan” ala Orde Baru yang keanggotaannya bersifat tertutup dan dibatasi pada segelintir pemilik modal sebagaimana saat ini banyak terdapat di Indonesia (Baswir, 2000). Koperasi sejati adalah koperasi yang modalnya dimiliki secara bersama-sama oleh seluruh konsumen dan karyawan koperasi itu. Dengan kata lain, koperasi sejati adalah koperasi yang tidak mengenal diskriminasi sosial, agama, ras, dan antar golongan dalam menentukan kriteria keanggotaannya. Dengan berdirinya koperasi-koperasi sejati, pemilikan dan pemanfaatan modal dengan sendirinya akan langsung berada di bawah kendali anggota masyarakat.

Sebagai penutup perlu dikemukakan bahwa peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan, berbeda dari kebiasaan selama ini, tidak didasarkan pada paradigma lokomotif. Tetapi berdasarkan paradigma pondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan rakyat dalam rangka sistem ekonomi kerakyatan tidak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, pasar ekspor, modal asing, dan dominasi perusahaan-perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya domestik, partisipasi para pekerja, usaha pertanian rakyat, serta pada pengembangan koperasi sejati, yaitu yang berfungsi sebagai fondasi penguatan dan peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat.

Di tengah-tengah situasi perekonomian dunia yang dikuasai oleh kekuatan kapitalisme kasino seperti saat ini, kekuatan pemerintah daerah, sumberdaya dan pasar domestik, partisipasi para pekerja, usaha-usaha pertanian rakyat, serta

jaringan koperasi sejati, sangat diperlukan sebagai pondasi tahan gempa keberlanjutan perekonomian Indonesia. Di atas fondasi ekonomi tahan gempa itulah selanjutnya sistem ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan akan diselenggarakan.

Dengan melaksanakan ketujuh agenda ekonomi kerakyatan tersebut, mudah-mudahan bangsa Indonesia tidak hanya mampu keluar dari krisis, tetapi sekaligus mampu mewujudkan masyarakat yang adil-makmur sebagaimana pernah dicita-citakan oleh para Bapak Pendiri Bangsa.

BAB XXVII

KEDUDUKAN DAN KIPRAH KOPERASI DALAM MENDUKUNG PEMBERDAYAAN UMKM

A. Pendahuluan

Sesuai dengan definisi negara, tujuan bernegara dan ketentuan-ketentuan adanya suatu negara, maka perhatian pemerintah terhadap kehidupan rakyatnya sangat diperlukan, karena rakyat merupakan salah satu komponen berdirinya suatu negara. Bagi Indonesia, rakyat bukan hanya sebagai indikator keberadaan negara, tetapi juga merupakan penegak kedaulatan yang menduduki tempat paling tinggi dalam konstitusi (UUD 1945). Keinginan untuk mensejahterakan semua rakyat juga merupakan amanat konstitusi dan oleh karena sebagian besar (87,4 persen) rakyat Indonesia adalah kelompok usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah (UMKM), maka pemberdayaan ekonomi rakyat dapat diidentikkan dengan pemberdayaan UMKM.

Keinginan menciptakan kesejahteraan seluruh anggota masyarakat dalam bentuk pemberdayaan ekonomi rakyat melalui perkuatan UMKM sudah diikrarkan sejak awal masa kemerdekaan dan untuk itu telah dilakukan berbagai program pembangunan, walaupun sampai sekarang ini masih ada sekelompok masyarakat yang tergolong miskin. Belum optimalnya keberhasilan pembangunan ekonomi dari rezim ke rezim yang lain nampaknya tidak terlepas dari konsepsi dasar pembangunan yang belum sepenuhnya mengutamakan kepentingan pemberdayaan ekonomi rakyat. Indikator dari kondisi tersebut antara lain terlihat dari semakin menyurutnya peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi, bahkan sebagian ekonom sekarang malah mempertanyakan apakah koperasi merupakan alternatif kelembagaan untuk memberdayakan UMKM, atau hanya merupakan salah satu solusi. Timbulnya pertanyaan tersebut dari satu sisi terlihat wajar-wajar saja karena banyak kegiatan-kegiatan yang jika dilakukan oleh koperasi tidak berhasil (keberhasilannya lebih kecil dibandingkan jika dilaksanakan oleh pihak-pihak lain). Pertanyaan terlihat janggal,

memperhatikan bahwa keberadaan dan kiprah koperasi merupakan penjabaran dari ekonomi kekeluargaan yang secara tegas telah dinyatakan dalam UUD 1945.

Memang banyak kegiatan yang dilakukan oleh koperasi belum mencapai keberhasilan seperti yang dilakukan oleh badan usaha lainnya, tetapi dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga banyaknya faktor yang dapat mendorong atau menghambat kegiatan usaha koperasi, Faktor-faktor tersebut antara lain, sebagian pengelola koperasi belum memiliki kepekaan bisnis (*sense of bussines*), karena pada awalnya mereka memang bukan orang-orang profesional. Demikian juga jaringan bisnis koperasi dapat dikatakan hampir tidak berperan, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kondisi lingkungan ekonomi dan profesionalisme. Demikian juga faktor lingkungan (eksternal) yang berkaitan dengan masalah kebijaksanaan pemerintah, serta lingkungan usaha ekonomi yang dibangun oleh banyak pelaku usaha lainnya, tidak dapat diharapkan berperan untuk mendukung keberhasilan koperasi.

Masalah kedua yang dihadapi koperasi adalah dalam membangun partisipasi anggota koperasinya. Dalam hal ini banyak pakar, antara lain Nasution (1991) yang mengatakan “berikan kebutuhan yang paling diperlukan oleh anggota”. Azas *one man one fote* yang menjadi slogan koperasi belum menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk masuk menjadi anggota koperasi. Demikian juga asas yang merupakan prinsip dasar koperasi ini, belum dapat dipahami oleh sebagian besar anggota koperasi dengan tingkat kesejahteraan, dan pendidikan masih rendah, serta lingkungan sosial budaya masih kurang kondusif.

Memang banyak konsep pembangunan partisipasi anggota koperasi yang bersumber dari koperasi-Koperasi di luar negeri, tetapi konsep tersebut tidak dapat diaplikasikan karena kondisi faktor-faktor lingkungan ekonomi sosial dan budaya tidak sama. Kekeliruan yang mungkin perlu diluruskan dalam membangun partisipasi anggota koperasi adalah adanya anggapan bahwa penyebab rendahnya partisipasi anggota koperasi lebih dikarenakan besarnya intervensi pemerintah serta adanya kelemahan kebijaksanaan dasar dalam pembangunan koperasi yang tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 dan heterogenitas anggota koperasi sendiri.

Faktor lain yang menyebabkan tidak konsistennya penilaian terhadap keberhasilan pembangunan koperasi adalah belum adanya standar baku tentang indikator keberhasilan koperasi, sehingga orang menilai koperasi dari indikator yang dibangunnya sendiri. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa sesuai dengan azas dan prinsip dasar koperasi tujuan pembangunan koperasi adalah untuk mendukung pembangunan kemampuan ekonomi dari anggotanya. Keberhasilan koperasi akan dicirikan oleh keberhasilan pembangunan ekonomi anggotanya, sebagai akibat dari adanya hubungan dalam kegiatan ekonomi antara anggota dengan koperasi. Dalam memenuhi kebutuhan anggota koperasi seharusnya dapat berhubungan langsung dengan produsen. Hubungan langsung ini dapat mengurangi biaya-biaya diluar biaya produksi seperti biaya pembungkus, dan biaya pemasaran sehingga harga dasar yang diperoleh koperasi dapat lebih murah.

Berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan koperasi tersebut di atas, mungkin dapat dijadikan bahan untuk menjawab pertanyaan tentang kedudukan koperasi dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa dari aspek normatif dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia koperasi dianggap sebagai alat bagi anggota untuk mencapai kesejahteraan ekonomi, alat pemerintah untuk membangun kesejahteraan semua warga masyarakat. Jika koperasi dinyatakan sebagai kelembagaan alternatif, mungkin perlu diperhatikan bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan kelompok-kelompok miskin. Koperasi juga merupakan organisasi non profit yang dapat mengumpulkan serta mempersatukan kelompok kelompok marginal, yang karena kemarjinalannya tidak mampu bersaing dalam pasar bebas. Satu hal lagi yang merupakan kekuatan koperasi selama ini jarang diperhitungkan adalah koperasi merupakan bentuk kelembagaan formal yang memiliki jaringan sangat luas bersifat internasional. Kelemahan dari koperasi adalah karena faktor internalnya sendiri yang membatasi partisipasi anggota, karena koperasi menghendaki homogenitas anggota terutama dari aspek kepentingannya terhadap koperasi (Syarif dan Nasution, 1989). Dari adanya

berbagai kekuatan koperasi dan dengan mengeliminir kelemahan yang ada maka koperasi idealnya dapat menjadi aktor penting dalam mendukung perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam system perekonomian nasional. Sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi.

Selanjutnya kajian mungkin harus diarahkan pada faktor yang mempengaruhi keberhasilan koperasi terutama yang terkait dengan hubungan koperasi dan anggotanya sebagai modal utama koperasi antara lain faktor perekat. Dalam suatu koperasi faktor perekat yang sangat mendasar adalah kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi dari para anggotanya. Signifikansi faktor ini tergambar jelas diperhatikan adanya fenomena bahwa seorang anggota yang telah berhasil dalam usahanya cenderung akan meninggalkan koperasi walaupun sebelumnya keberhasilan orang tersebut didukung sepenuhnya oleh koperasi. Orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi. Peningkatan kemampuan menyebabkan orang berubah kepentingannya maka orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun koperasi.

Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan cerminan dari kepentingan anggota. Tetapi sekarang AD diseragamkan (oleh instansi pemerintah), yang berarti menyeragamkan kepentingan anggota. Hal ini dimaksudkan agar AD yang disusun sesuai dengan peraturan. Tetapi perlu diingat bahwa perlakuan tersebut merupakan kesalahan, oleh sebab itu harus diperbaiki. Disini pihak yang berwenang boleh saja menjadi konsultan dalam penyusunan AD, tetapi sebagai konsultan yang harus mampu melihat kepentingan anggota dari suatu koperasi yang akan dibentuk.

Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai pembina untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah sistem. Pada kenyataannya juga, koperasi sering dipilih tetapi kerap kali menjadi pilihan yang tidak tepat. Pada akhirnya

koperasi selalu diidentikan sebagai badan usaha yang marginal. Perkembangan koperasi mengalami pasang surut sesuai dengan intensitas pembinaan yang dipengaruhi oleh banyak aspek. Pada akhirnya timbul pertanyaan mengapa sampai sekarang peran dan kiprah koperasi di Indonesia sulit dikembangkan.

B. Kedudukan dan Kiprah Koperasi Pada Era Tahun 2000-an

1. Kedudukan Koperasi dalam Sistem Perekonomian Nasional

Walaupun koperasi telah berdiri di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan, tetapi kinerja koperasi sebagai institusi solusi pemberdayaan ekonomi rakyat (yang pada waktu itu disebut Bumi Putera) belum pernah mencapai harapan. Kinerja koperasi terus mengalami pasang surut sampai pada suatu saat (dekade tahun 1990-an) mengalami titik terendah (stagnan), bahkan kemudian menurun (periode reformasi), sehingga sekarang ini koperasi oleh sebagian besar masyarakat hanya dianggap sebagai solusi kelembagaan pembangunan UMKM yang banyak bermasalah.

Ketidakmampuan koperasi untuk menjadi solusi kelembagaan andalan pemberdayaan UMKM bukan karena konsepsi dasar kelembagaan koperasi yang salah, tetapi lebih banyak disebabkan oleh komitmen politik dan pendekatan pembangunan, yang secara langsung dipengaruhi oleh politik dan perekonomian dunia. Kondisi globalisasi merupakan salah satu faktor yang seharusnya mendorong pengembangan koperasi (tantangan agar kelompok UMKM bersatu dalam rangka meningkatkan skala usaha dan efisiensi), bahkan sekarang sebaliknya menjadi kendala yang menghambat kelangsungan pengembangan koperasi. Hal ini terkait nampaknya terkait juga dengan pola pembangunan koperasi yang mengedepankan aspek usaha dan indikator keberhasilan kuantitatif, yang tidak mendukung kebersamaan dalam koperasi.

2. Keanggotaan Koperasi

Anggota koperasi adalah orang-orang yang berkumpul, bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama, melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka

kendalikan secara demokratis. Dalam suatu organisasi yang memiliki karakteristik suatu kelembagaan seperti koperasi, dipihak yang satu keberadaan anggota adalah sebagai pemilik berkewajiban memberikan kontribusi pada organisasinya.

Di pihak yang lain anggota sebagai pemakai mempunyai hak untuk memperoleh insentif atau manfaat dari organisasi koperasi. Dengan kedua fungsi tersebut, anggota koperasi mempunyai kedudukan sentral dalam koperasi sebagai suatu kelembagaan ekonomi. Dilihat dari pengertian dasar, sifat, ciri keanggotaan, dan hak, serta kewajiban anggota dalam organisasi koperasi, maka kedudukan anggota dapat diuraikan menjadi:

- a. Pemilik, pemakai, sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi (melalui Rapat Anggota Tahunan).
- b. Orang-orang yang mempunyai kesepakatan berdasarkan kesadaran rasional dan utuh yang secara bersama-sama memenuhi kepentingan ekonomi dan sosial mereka, baik sebagai konsumen, sebagai produsen, maupun sebagai anggota masyarakat yang hidup dan berinteraksi dalam suatu komunal.
- c. Keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka untuk setiap warga negara yang memenuhi persyaratan-persyaratan spesifikasi koperasinya
- d. Keanggotaannya melekat pada diri pribadi orang-orangnya:
 - 1) memiliki rasa senasib dalam upaya memenuhi kepentingan ekonomi dan sosialnya,
 - 2) memiliki keyakinan bahwa hanya dengan bergabung bersama-sama maka kepentingan ekonomi dan sosialnya secara bersama-sama akan dapat diselesaikan, dan
 - 3) memiliki kesamaan dalam jenis kepentingan ekonominya.
- e. Keanggotaan koperasi merupakan keputusan berdasarkan tingkat kesadaran rasional dari orang-orang yang:
 - 1) merasa cocok bila mereka melakukan kegiatan tolong-menolong khususnya dalam bidang ekonomi,

- 2) merasa kuat bila mereka bersatu menjadi anggota Koperasi, dan
- 3) merasa tidak perlu bersaing dengan kegiatan usaha koperasinya.

3. Organisasi dan Koperasi

Organisasi sering diartikan sebagai interaksi dan kerja sama antara dua orang/pihak atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu, di dalam sebuah perusahaan, kerja sama ini mutlak diperlukan karena kegiatan dalam perusahaan sangat kompleks, beraneka ragam, dan saling terkait antara yang satu dan yang lain. Kerja sama ini tidak terbatas antar karyawan di dalam perusahaan tetapi juga dengan berbagai pihak di luar perusahaan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

Organisasi koperasi dibentuk atas dasar kepentingan dan kesepakatan anggota pendirinya dan mempunyai tujuan utama untuk lebih mensejahterakan anggotanya. Sistem kontribusi insentif sangat relevan dalam suatu organisasi koperasi. Sistem tersebut dapat menjamin eksistensi koperasi dan sekaligus merangsang anggota untuk lebih berpartisipasi secara aktif. Dalam pembicaraan mengenai organisasi di masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, kiranya lebih dulu perlu dipahami bahwa basis terendah dalam kehidupan pedesaan adalah "desa", atau kampung dusun-dusun kecil yang penduduknya hidup berkelompok dengan keterikatan/ketergantungan antar individu yang sangat erat. Komunitas penduduk berlangsung dalam rangka membangun kehidupan yang pada awalnya bersifat subsistem. Meskipun demikian (pola hidup subsistem), kaitan pemasaran sudah ada dengan daerah urban yang lebih modern. Dalam hal ini yang dikenal sebagai pedesaan adalah kumpulan rumah tangga petani yang secara tradisional mengambil keputusan-keputusan produksi, konsumsi, dan investasi. Di sektor perkotaan kegiatan yang sama dilakukan oleh lembaga perusahaan dan rumah tangga secara terpisah dengan tujuan memaksimalkan penghasilan perusahaan.

Oleh sebab itu yang diperlukan adalah aktualisasi dari prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:

- a. Kelompok koperasi (*cooperative Groups*); bahwa koperasi adalah kelompok orang yang mempunyai

tujuan dan kepentingan yang sama yaitu meningkatkan kemampuan ekonomi secara berkelompok dengan harapan akan memperbesar skala ekonomi mereka yang berdampak akhir pada meningkatnya efisien dari kegiatan (jual-beli) yang dilakukannya bersama-sama.

- b. Menolong diri sendiri (*self help organization*); bahwa dengan berkelompok mereka akan menjadi lebih besar dan lebih kuat posisinya dalam pasar, sehingga mereka dapat menolong diri sendiri.
- c. Perusahaan koperasi (*cooperative enterprises*); bahwa koperasi merupakan perusahaan yang jika dalam kegiatan usahanya mendapatkan nilai lebih maka kelebihan yang diterima dapat dikembalikan lagi kepada anggotanya dan atau dapat dijadikan tambahan modal usaha serta investasi.
- d. Meningkatkan keuntungan ekonomi anggotanya (*member promotion*); tujuan berkoperasi adalah kebersamaan dalam rangka meningkatkan efisiensi dengan memperbesar skala ekonomi (*economic of scale*), mengurangi resiko usaha (*down sizing*) dan kontribusi insentif (*incentive contribution*).

Dari prinsip dan tujuan koperasi tersebut, selama ini baru sangat sedikit yang dapat diakomendir oleh gerakan koperasi, bahkan sebaliknya ada unsur-unsur yang sama sekali belum dapat dilaksanakan seperti menolong diri sendiri dan efisiensi biaya. Kondisi yang demikian sering dikaitkan dengan kondisi ekonomi anggota koperasi yang rata-rata terbelah miskin (dibawah pendapatan rata-rata nasional) dan arah pembinaan pemerintah yang lebih pada pembangunan usaha ketimbang pengkaderan koperasi.

Buruknya kinerja koperasi ternyata diperparah oleh kurang baiknya kinerja pembina. Kondisi seperti ini sebenarnya sudah diketahui sejak era orde baru, yang diduga terkait erat dengan pendekatan, strategi dan pola pembinaan serta kualitas SDM pembina. Dalam hal ini, Nasution (1990) dalam disertasinya mengatakan bahwa kunjungan pembina membawa dampak negatif bagi kinerja koperasi (KUD), yang diindikasikan dari semakin banyak kunjungan pembina ke suatu KUD maka akan

semakin cepat KUD tersebut mengalami penurunan kinerjanya. Perbaikan konsepsi pembinaan ternyata sampai sekarang ini belum banyak mendapat perhatian dari pemerintah dan hal ini diduga terkait dengan komitmen politik untuk memberdayakan koperasi yang cukup kuat, sehingga pembenahan permasalahan tersebut belum mendapat respon yang signifikan dari pemerintah.

Permasalahan di atas nampaknya juga terkait dengan masalah-masalah internal koperasi yang belum terselesaikan antara lain; a) proses penyempurnaan RUU Perkoperasian yang sudah tersendat hamper 4 tahun; b) pergantian Pengurus Dewan koperasi Indonesia (DEKOPIN) yang berakhir kisruh sehingga gerakan koperasi pecah menjadi beberapa kelompok; c) koperasi tidak diberikan peran dalam agenda dan prioritas pembangunan nasional dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 (dalam pidato Kenegaraan Presiden SBY tanggal 16 Agustus 2006 tidak menyebutkan koperasi); d) dalam dunia pendidikan mata ajaran perkoperasian menjadi pelajaran pilihan dan sampai sekarang belum ada standar baku untuk mata ajaran tersebut dan; e) promosi, penyuluhan dan sosialisasi koperasi di media masa selama era reformasi hampir tidak pernah ada lagi.

Di samping masalah makro di atas, dalam gerakan koperasi juga terdapat masalah mikro yang sangat mempengaruhi kinerja koperasi, yang sampai sekarang ini juga belum terselesaikan antara lain; a) anggota koperasi cenderung hanya sebagai pemilik tetapi bukan sebagai pengguna yang diindikasikan dari rendahnya keterkaitan usaha antara anggota dan koperasi yang secara langsung mempengaruhi rendahnya manfaat koperasi buat anggota; b) kepentingan bisnis koperasi lebih diutamakan (menyolok) daripada kepentingan anggotanya; c) partisipasi anggota sebagai pemilik dan pengguna sangat rendah; d) rasa kebersamaan diantara anggota maupun antara anggota dengan koperasi juga hampir tidak ada; e) kaderisasi sangat jarang dilakukan dan jika adapun sifatnya temporer atau tidak berkesinambungan serta; f) proses penyuluhan, pendidikan dan pelatihan tidak berjalan dengan baik dan berkesinambungan serta hasil-hasil penelitian ataupun pemikiran-pemikiran ilmiah tidak pernah dimanfaatkan sebagai bahan masukan dalam pengambilan keputusan oleh para pengambil kebijaksanaan.

C. Solusi Pemberdayaan Koperasi

Solusi yang diperlukan untuk memberdayakan koperasi sekarang ini adalah adanya komitmen yang kuat dan sekaligus upaya nyata dari pihak-pihak terkait khususnya pemerintah, gerakan koperasi dan lembaga koperasi untuk melakukan pembenahan dalam rangka pemurnian dan revitalisasi kegiatan usaha serta penguatan pembiayaan koperasi. Alternatif pemurnian kelembagaan koperasi dapat dilakukan dengan; a) memperbaiki dan melengkapi aturan perundang-undangan (mempercepat proses penyusunan dan pengesahan RUU perkoperasian); b) melakukan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan kepada anggota pengurus dan pembina koperasi dengan materi dan metoda yang tepat, agar mereka benar-benar mengetahui dan mengerti koperasi secara utuh (koperasi yang *genuine*); c) melakukan sosialisasi/promosi melalui media yang tepat terarah dan terencana serta berkesinambungan; d) menyusun standar dan metoda yang tepat bagi mata ajaran koperasi untuk mendukung kaderisasi koperasi ditingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta; e) menyerahkan sebagian besar tugas dan tanggung jawab pembinaan dan pengembangan koperasi kepada gerakan koperasi sendiri.

Alternatif revitalisasi usaha dan penguatan pembiayaan koperasi dapat dilakukan melalui; a) mengkaji secara cermat bidang usaha yang mempunyai keunggulan komparatif yang tepat untuk diusahakan oleh koperasi dan sesuai dengan usaha anggotanya sebagai fokus pengembangan usaha koperasi; b) kegiatan koperasi hanya dilakukan atas dasar perencanaan dan kelayakan bisnis bukan hanya karena adanya suatu program yang diciptakan oleh pemerintah (sektoral di tingkat pusat); c) membangun jaringan antara koperasi serta dengan lembaga usaha lainnya baik dalam keperluan pengadaan bahan baku dan teknologi maupun pemasaran hasil produksi; d) merancang sekaligus melaksanakan model pendidikan dan latihan teknis usaha yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan usaha anggota koperasi serta; e) membangun sistem pembiayaan koperasi dengan prioritas pengembangan lembaga *interlending* dan penjaminan kredit yang handal dan bertanggung jawab.

Dalam membahas peluang koperasi untuk menjadi lembaga alternative pemberdayaan UMKM juga perlu dikaji hubungan antara koperasi dengan anggotanya yang UMKM. Dalam hal ini salah satu aspek yang menarik untuk diperhatikan adalah faktor perekat dalam koperasi (antara koperasi dengan anggotanya dan antar anggota di dalam koperasi) adalah, kesamaan (homogenitas) kepentingan ekonomi. Lebih lanjut juga perlu dipikirkan bagaimana jika keberhasilan koperasi telah mampu meningkatkan perekonomian seseorang, sehingga orang tersebut malah merasa tidak memerlukan koperasi lagi.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa peningkatan kemampuan ekonomi seseorang dapat menyebabkan orang berubah kepentingannya. Sehingga mungkin saja orang tersebut dapat pindah ke koperasi lain, yang dapat memenuhi kepentingannya. Dengan kata lain faktor homogenitas kepentingan anggota merupakan kata kunci dalam membangun faktor perekat dalam koperasi. Tidak ada penugasan khusus kepada instansi pemerintah sebagai Pembina untuk menjadikan koperasi sebagai sebuah system, merupakan salah satu penyebab dari kesulitan membangun sistem koordinasi antar pembinaan. Menurut Mutis (1999), untuk memberdayakan wirausaha dengan skala usaha kecil, menengah, dan koperasi ataupun kalangan usaha di sektor informal adalah salah satu bentuk menterjemahkan visi kerakyatan dalam fraxis bisnis kekinian.

Menurut UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada atas asas kekeluargaan. Karena adanya berbagai penafsiran tentang koperasi sebagai akibat dari bentuk badan usaha ini yang mudah dimasuki oleh unsur-unsur non-ekonomi maka dalam membicarakan koperasi ada baiknya jika lebih dulu disepakati berbagai aspek penting dalam koperasi.

Dalam usaha, petani untuk menaikkan pendapatan keluarga dan faktor konsumsi keluarganya (melalui peningkatan produksi usaha taninya), inilah mereka banyak mengadakan kontak dengan dunia luar, terutama dalam memenuhi kebutuhan

sarana produksi. Penggunaan faktor produksi sedikit banyak ditentukan oleh ketentuan adat istiadat melalui lembaga tradisional seperti sistem Mapalus di Sulawesi dan sekarang melalaui kelompok tani. Dengan berorganisasi ini, koordinasi pemanfaatan sumberdaya yang langka bisa dinikmati oleh petani-petani individu. Dengan demikian apa yang tampak dalam kehidupan ekonomi para petani adalah hubungan kekerabatan itu sangat erat dan berpengaruh besar, sebab mereka hidup di lokasi yang sama serta mendorong para petani bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan.

Berbagai bentuk organisasi ekonomi dan sosial yang ada di pedesaan umumnya dimiliki ciri yang pluratistik. Dengan pengertian luas, yang dikatakan oleh Gunardi (1981) sebagai kolektivisme desa mau kolektivisme asli. Ciri utama kolektivisme tersebut adalah semangat gotong-royong, tolong-menolong, musyawarah untuk mufakat, dan toleransi yang tinggi dalam pola paguyuban yang kuat. Bila dibandingkan antara koperasi sosial yang telah berkembang sejak berabad-abad yang lalu di perdesaan dalam berbagai bentuk organisasi sosial ekonomi yang diuraikan di atas terlihat hanya sedikit perbedaan yang tidak mendasar, seperti diperlihatkan pada Tabel 7.1 di bawah ini.

Tabel 27.1 Perbedaan antara koperasi sosial dengan koperasi

No.	Koperasi Sosial (Tradisional)	Koperasi Modern
1.	Perlakuan terhadap semua anggota sama (satu orang satu suara).	Perlakuan terhadap semua anggota adil berdasarkan partisipasinya dalam kegiatan koperasi.
2.	Satu orang satu suara.	Suara berdasarkan besarnya partisipasi dalam kegiatan koperasi.
3.	Jumlah koperasi banyak dan berskala kecil.	Dapat beramalgalami membentuk koperasi-koperasi yang lebih besar.
4.	Pelayanan bersifat pasif.	Pelayanan agresif.
5.	Ada kesepakatan untuk tidak bertindak tanpa persetujuan bersama dengan wewenang pengambilan keputusan dari rapat anggota.	Keputusan berdasarkan mayoritas dan kebijaksanaan didelegasikan penuh kepada pengurus.
6.	Kebijaksanaan bersifat desentralisasi.	Kebijaksanaan bersifat terpusat.
7.	Diorganisir berdasarkan batas wilayah keanggotaan.	Diorganisir sesuai kebutuhan pemasaran, suatu konfigurasi sistem yang saling terkait.
8.	Kebijaksanaan personalia dalam seleksi dan penerimaan tidak berdasarkan yang terbaik.	Kebijaksanaan personalia dalam seleksi dan penerimaan berdasarkan yang terbaik.
9.	Mutu dan cara kerja karyawan terikat pada status quo dan masa lalu.	Mutu dan cara kerja karyawan terikat pada perubahan yang terjadi.
10.	Tindakan pengurus dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan tekanan politik tidak memperhatikan akibat jangka panjang.	Tindakan pengurus berdasarkan kepentingan jangka panjang yang terbaik tanpa memperhatikan pemilihan kembali pengurus atau keuntungan jangka panjang.
11.	Pengelolaan dan pengurusan berdasarkan keputusan sehari-hari didelegasikan kepada karyawan.	Manajer dan pengurus lebih mencurahkan perhatian pada masalah-masalah strategis dan perencanaan.
12.	Masalah manajemen personil cukup	Perhatian terhadap masalah pemahaman

Sumber: Nasution, 1996

D. Penutup

Sehubungan dengan permasalahan di atas, berapa isue yang layak untuk didiskusikan; 1) aksesibilitas dan UMKM terhadap sumber-sumber permodalan, terutama untuk menghilangkan kesan bahwa masalah permodalan UMKM dan koperasi dapat diselesaikan melalui pengembangan Lembaga Keuangan Mikro saja; 2) aspek perlindungan terhadap koperasi yang selama ini tertutupi oleh semangat globalisasi yang sebenarnya bertentangan dengan UU Nomor 25 Tahun 1992; 3) masalah kelembagaan koperasi yang antara lain diindikasikan dari anggapan sekarang ini bahwa koperasi tidak berbeda dengan jenis badan usaha ekonomi lainnya dan; 4) evaluasi terhadap berbagai program unggulan yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara Koperasi dan UMKM.

Sebagai bagian dari kehidupan bangsa pembangunan koperasi tidak terlepas dari pengaruh perubahan yang terjadi di berbagai aspek kehidupan, baik aspek ekonomi, sosial, budaya, hankam ataupun aspek-aspek lainnya. Realita memperlihatkan bahwa perkembangan koperasi semakin redup, antara lain disebabkan perubahan kebijaksanaan pemerintah sebagai tuntutan dari era globalisasi. Kebijakan moneter semakin memperlemah koperasi/UMKM untuk mengakses sumber permodalan. Bank bukan lagi menjadi agen *development*. Pemilikan BUMN oleh perusahaan asing bukan lagi hal yang aneh. Subsidi kredit untuk UMKM dan koperasi semakin dikurangi.

Jika koperasi hanya dijadikan sebagai sebuah alternatif kelembagaan dalam mendukung pemberdayaan UMKM, sedangkan diketahui bahwa koperasi memiliki banyak keunggulan dalam mendukung pemberdayaan ekonomi kelompok-kelompok miskin, maka perlu dipikirkan adanya opsi lain. Namun demikian dalam pemilihan opsi seharusnya koperasi dinyatakan sebagai suatu sistem kelembagaan yang dengan kriteria-kriteria tertentu dapat menjadi soko guru perekonomian nasional, yang dibangun oleh sebagian besar rakyat yang tergolong dalam kelompok UMKM. Yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana memposisikan koperasi dalam sistem perekonomian nasional tersebut, sedangkan diketahui sekarang ini sangat banyak kendala yang menghambat

pengembangan koperasi, terutama dari aspek kebijakan makro yang dipengaruhi semangat globalisasi. Pertanyaan akhir yang perlu dijawab adalah “bentuk koperasi yang bagaimana yang seharusnya dibangun di Indonesia?”, apakah Koperasi *single purpose* atau koperasi *multy purpose*? Kedua jenis koperasi ini nampaknya cocok, untuk UMKM, tetapi harus disesuaikan dengan bidang usaha, kondisi ekonomi dan sosial dari anggota yang UMKM dengan beragam jenis kegiatan usaha terutama yang bersifat spesifik daerah.

BAB XXVIII

STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI

A. Pembangunan Koperasi dan Pemberdayaan Anggota

Pembangunan koperasi yang berhasil memerlukan sejumlah prasyarat dan pemenuhan syarat-syarat tertentu, sebagaimana layaknya dalam pelaksanaan suatu proses. Pembangunan itu merupakan proses dinamik, karena koperasi adalah lembaga yang hidup dan beraksi terhadap perubahan kondisi internal maupun eksternal.

Mengingat koperasi merupakan lembaga milik sekelompok masyarakat, yang dibangun sendiri oleh masyarakat bersangkutan, dengan maksud untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar ekonomi masyarakat tersebut, maka dapat dipahami bahwa koperasi harus mampu melaksanakan berbagai kegiatan ekonomi. Kegiatan mana, harus terkait dengan upaya untuk memenuhi kepentingan ekonomi para anggotanya pada tingkat usaha yang efektif dan efisien. Dengan demikian kegiatan itu harus terencana, yaitu dengan melalui penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi yang khas sifatnya.

Sehubungan dengan hal itu perlu dipahami peran berbagai faktor yang mencakup kriteria-kriteria prasyarat, yaitu faktor-faktor yang dianggap sangat menentukan bagi keberhasilan dan kesinambungan koperasi yang dibangun. Selanjutnya, setelah prasyarat dipenuhi, maka koperasi berarti sudah siap lahir dan siap tumbuh. Tetapi faktor yang tergolong sebagai syarat keberhasilan, bagi tumbuhnya koperasi bersangkutan di masa mendatang. Syarat tersebut menjadi komponen pokok yang perlu dipenuhi dan diwujudkan, agar koperasi itu dapat berprestasi dan dapat disebut sebagai koperasi yang berhasil. Artinya bila syarat keberhasilan itu tidak terpenuhi, maka koperasi bersangkutan dapat dianggap tidak berhasil dalam proses pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

Dengan demikian bisa saja satu koperasi dibentuk, akan tetapi koperasi yang telah mampu memenuhi prasyarat yang ditetapkan itu untuk selanjutnya ternyata tidak mampu tumbuh normal, dengan mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan, ataupun kalau dapat tumbuh maka pertumbuhan koperasi itu menjadi

sangat lambat atau dapat dinyatakan dengan "hidup segan, mati tak mau".

Pemahaman tentang hal-hal tersebut tidak kalah penting bila dibanding dengan upaya memahami sejumlah langkah-langkah pembinaan atau mengenali sejumlah hambatan dan kendala pertumbuhan koperasi, yang mengharuskan kita membawa koperasi itu kembali pada jati dirinya (*menerapkan pendekatan "back to basic"*).

Pemberdayaan anggota mencakup pemberdayaan modal (bantuan modal) dan pemberdayaan *knowledge*, yang meliputi peningkatan kemampuan manajemen, skill dan pemahaman yang benar mengenai prinsip-prinsip koperasi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemberdayaan ini akan memberikan dampak peningkatan partisipasi anggota.

Memang harus diakui bahwa peningkatan partisipasi anggota bukanlah dampak langsung dari pendidikan dan pelatihan. Partisipasi anggota merupakan fungsi dari intrinsik anggota dan nilai ekstrinsik yang berasal dari luar anggota itu sendiri. Peningkatan partisipasi merupakan *outcome* atau dampak positif tidak langsung dari pendidikan dan pelatihan. Peningkatan partisipasi anggota ini diharapkan akan memberikan dampak kepada kinerja koperasi yang ditandai dengan 5 indikator keberhasilan koperasi. Peningkatan kinerja koperasi yang ditandai akhirnya akan menghasilkan tujuan yang hendak dicapai yakni kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota harus memperhatikan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Dominasi pemerintah (pemerintah daerah) dalam pendidikan *in service*/diklat harus dikurangi karena di masa lalu telah menimbulkan ketergantungan koperasi kepada Pemerintah sehingga mengurangi pemupukan rasa percaya diri dan kemampuan menolong dirinya sendiri bagi koperasi.
2. Harus jelas konsep "*link and matc*", karena penyelenggaraan diklat pada masa-masa sebelumnya tersentralisasi dan berdasarkan pemikiran-pemikiran dari atas, belum pernah dilakukan analisis kebutuhan pelatihan, yang bersumber kepada kebutuhan koperasi. Hingga kini pendidikan yang sudah

dilaksanakan masih belum mengarah kepada kebutuhan koperasi.

3. Dana pendidikan dari gerakan koperasi secara formal merupakan salah satu sumber dana pendidikan koperasi, namun pada kenyataannya dana tersebut belum optimal terkumpul.
4. Pemerintah daerah harus memiliki akreditasi untuk lembaga penyelenggara pendidikan termasuk standarisasi materi pelatihan.
5. Peserta harus dipersiapkan dengan baik, karena pendidikan dan pelatihan di masa depan tidak gratis. Pada masa lalu umumnya peserta tidak dipersiapkan dengan baik, lebih-lebih karena pendidikan bersifat gratis, sehingga yang dilatih orangnya tetap sama atau tidak relevan dengan tugasnya.
6. Perlu ada evaluasi yang menyeluruh mengenai dampak dari diklat terhadap kinerja koperasi.

Untuk mencapai tujuan seperti yang diharapkan maka Pemerintah Pusat bersama-sama dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Koperasi Indonesia melakukan tugas sebagai berikut:

1. Secara bertahap mengintegrasikan, mengkoordinir dan mengkonsolidasikan potensi pendidikan dan pelatihan perkoperasian secara nasional.
2. Secara bertahap dan simultan memberdayakan dan mengkoordinir potensi lembaga-lembaga dan pelatihan perkoperasian yang dimiliki oleh negara (antar departemen), Gerakan Koperasi (LAPENKOP), Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lembaga-lembaga pendidikan swasta pelaksana pendidikan koperasi.
3. Secara pro aktif memberdayakan lembaga-lembaga pendidikan perkoperasian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam kerangka semangat otonomi daerah.
4. Menentukan kebijaksanaan pokok program pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang mencakup sistem, metodologi, kurikulum, silabus, sistem evaluasi, kelompok sasaran, dan bahan serta alat bantu.

5. Melaksanakan program pendidikan dan pelatihan perkoperasian sesuai dengan rencana dan kebutuhan.

B. Pembangunan Koperasi Lintas Sektoral

Membicarakan keberhasilan koperasi, harus mulai dengan membahas sejumlah prasyarat, yang nampaknya akhir-akhir ini kurang mendapat perhatian yang sungguh-sungguh (terbaik atau diabaikan) oleh para pendiri koperasi (masyarakat luas) maupun oleh para pembina koperasi pada umumnya. Prasyarat tersebut boleh dinyatakan sebagai kriteria yang relatif sifatnya mutlak, atau merupakan faktor yang mau atau tidak mau harus dipenuhi agar dapat membuat koperasi lahir dan siap tumbuh dalam dinamika perekonomian. Oleh karena itu dalam setiap pembentukan koperasi baru, haruslah benar-benar dapat dipenuhi prasyarat yang ditetapkan, dengan maksud agar dapat menumbuhkan koperasi yang berkemampuan tumbuh secara berkelanjutan tanpa menimbulkan berbagai masalah di masa mendatang. Singkatan bila faktor-faktor dimaksud tidak dipenuhi, secara konseptual koperasi akan sulit tumbuh sebagaimana diharapkan karena organisasinya tidak didukung oleh faktor-faktor yang diperlukan.

Misalnya dalam satu proses pembentukan koperasi baru, ternyata ada satu prasyarat yang tidak dipenuhi, umpamanya "tidak jelasnya hubungan antara kepentingan ekonomi anggota-anggota pendiri, yang seharusnya menjadi alasan dasar bagi pembentukan koperasi tersebut". Koperasi itu bisa saja dibentuk tanpa dilandasi oleh pemahaman dan kesamaan kepentingan para pendiri atau anggotanya. Namun demikian, potensinya sangat besar untuk menghadapi berbagai hambatan dan kesulitan di masa mendatang, karena landasan arah dan proses pertumbuhan kelompoknya tidak jelas. Secara konseptual, rencana pendirian suatu koperasi seperti itu dapat saja ditolak, apabila syarat mutlaknya tidak terpenuhi walaupun tidak sesuai dengan ketentuan formal koperasi itu mungkin saja tetap dibentuk. Baru kemudian, sambil berjalan koperasi bersangkutan menyesuaikan kembali hal-hal yang belum dipenuhi atau yang dapat diperbaiki, sehingga akhirnya koperasi itu juga mampu memenuhi syarat mutlak yang seharusnya perlu dipenuhi lebih dahulu.

Namun demikian secara praktis tidak jarang pengalaman menunjukkan, bahwa hal dimaksud kerap kali sulit dilakukan, mengingat koperasinya terlanjur menghadapi masalah dan sibuk dalam mengelola kegiatan bisnisnya, yang kerap kali justru tidak terkait dengan kepentingan ekonomi pada anggotanya, karena tidak teridentifikasi sebelumnya. Koperasi seperti itu tergolong pada koperasi "*palsu*" (*psue coop*), apabila ditinjau dan pelaksanaan identitas koperasinya. Padahal kita faham justru identitas koperasilah yang menjadi keunggulan komparatif, dan sekaligus menjadi keunggulan kompetitif dan suatu badan usaha koperasi, karena hal-hal itu membuat kelompok anggota mampu mendukung eksistensi koperasi dalam menghadapi pasar bebas.

C. Pembangunan Koperasi dan *Local Spesific (Resource Based dan Community Based)*

Pembentukan koperasi baru, perlu dipahami dan diidentifikasi kepentingan ekonomi para pendiri khususnya dan umumnya kepentingan anggota baru di masa mendatang, yang dijadikan landasan utama pengembangan organisasi dan kegiatan usahanya. Apabila kemudian ada koperasi dibentuk tanpa ada landasan kepentingan anggota dan kemudian memperoleh badan hukum resmi, maka sudah bisa dipastikan bahwa koperasi itu tidak mungkin digolongkan dalam kelompok koperasi genuine, atau koperasi yang dapat memenuhi kriteria internasional (identitas koperasi menurut ICA 1995). Pada umumnya koperasi itu dalam proses pertumbuhan selanjutnya, tidak mampu memanfaatkan peluang besar atau tidak cukup berhasil dalam proses pertumbuhan memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal, walaupun koperasi dimaksud tetap saja berpeluang tumbuh sebagai organisasi atau badan usaha.

Prasyarat dasar lain yang juga harus dapat dipenuhi melalui pembentukan koperasi, agar selanjutnya proses pengembangan koperasi itu berhasil atau koperasinya dapat meraih sukses dalam pertumbuhan selanjutnya, berupa pemenuhan kriteria tentang kualitas calon anggota koperasi. Mereka dipersyaratkan mampu memenuhi indikator, bahwa secara sadar anggota-anggota koperasi itu mengetahui dan memahami dengan baik dan sistematis, peran dan fungsi koperasi yang akan dibentuk. Sebagai suatu lembaga ekonomi milik

bersama, koperasi diharapkan mampu membantu memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dasar para anggotanya, baik secara individu maupun secara kelompok serta dalam lingkup lokal, regional maupun nasional.

Wujud sebab dan akibat dan dua sisi itu, apabila perlu harus dilatihkan dan dikembangkan lebih dahulu, dengan melalui proses yang disebut sebagai masa pra koperasi. Akan banyak manfaat yang diperbolehkan koperasi di masa mendatang apabila kegiatan masa pra koperasi dilakukan dengan sadar dan terprogram (dalam rencana). Karena itu pada hakekatnya pembentukan koperasi bukanlah sekedar pembentukan lembaga ekonomi biasa melainkan sebagai usaha terencana untuk menimbulkan suatu lembaga yang harus memiliki komitmen dan wawasan luas serta terpadu. Itulah sebabnya di dalam buku ini dilampirkan proses yang lazimnya perlu dilalui dalam mendirikan badan usaha koperasi.

Selanjutnya, apabila prasyarat itu telah dipenuhi, dan kondisi lingkungannya juga mendukung, maka masih ada syarat berikut yang harus dipenuhi. Syarat dimaksud adalah merupakan syarat tidak mutlak, yang dapat disebut sebagai syarat yang diinginkan. Syarat ini sifatnya komparatif dan dapat dibandingkan serta berada pada satu selang (*range*) indikator tertentu. Selang indikator itu dapat disesuaikan dengan kondisi sehingga berdasar indikator yang dipenuhi oleh koperasinya, akan diperoleh sejumlah nilai indikator koperasi yang berbeda-beda ukurannya. Akan tetapi nilainya tetap berada pada batas-batas kelompok angka yang di tetapkan, sesuai dengan jenis dan kualitas dari koperasi-koperasi yang dinilai. Hal itulah yang menjadi ciri khas dari masing-masing koperasi bersangkutan. Ciri khas koperasi itu biasanya dituangkan dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang disahkan dalam rapat anggota (RAT).

Dengan mengetahui komposisi kriteria syarat yang dipenuhi, secara otomatis akan dapat dikenali berbagai keunggulan dan sekaligus hal-hal yang perlu mendapat perhatian khusus dari koperasi bersangkutan untuk membuatnya sukses. Pemenuhan kriteria itu memungkinkan dapat dilakukannya perbandingan antar koperasi yang satu dengan koperasi yang lain walaupun tidak sejenis. Posisi koperasi seperti itu juga dapat digunakan untuk mengarahkan dan menemukan pokok-pokok

masalah tentang koperasi-koperasi bersangkutan dalam proses pembinaan. Dengan demikian, tingkat keberhasilan koperasi untuk memenuhi kriteria itu dapat dimanfaatkan pula untuk sekaligus menilai tingkat prestasi koperasi secara transparan dan adil. Untuk itu kriterianya perlu disusun dengan nasional, sesuai dengan kaidah-kaidah lembaga usaha.

D. Koperasi dalam Program Redistribusi *Asset* Secara Transparan

Saat ini dengan berlakunya otonomi daerah maka tugas teknis pembinaan koperasi merupakan tugas pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota sendiri dihadapkan pada berbagai masalah spesifik di daerah masing-masing. Terdapat paling tidak tiga tipologi kinerja ekonomi wilayah, dan masing-masing diharapkan dapat memberikan peran yang paling optimal bagi perkembangan koperasi di daerahnya maupun secara regional dan nasional.

1. Daerah kaya dan daerah berkembang dengan potensi alam cukup
 - a. Koperasi menjadi pelaku yang aktif dalam bidang distribusi;
 - b. Koperasi sektor jasa (sektor tersier) dikembangkan secara lebih profesional;
 - c. Koperasi Simpan Pinjam diarahkan melakukan *interlending* dengan Koperasi daerah yang berada di sekitarnya yang lebih miskin;
 - d. Koperasi yang telah memiliki modal cukup besar diarahkan bekerjasama dengan koperasi daerah yang sejenis atau atas pertimbangan kemitraan strategis;
 - e. Koperasi menjadi *prime mover* dalam pengelolaan potensi alam;
2. Daerah Miskin potensi alam belum tergarap
 - a. Koperasi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat bersaan dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi masuknya investor;
 - b. Koperasi yang telah terbina bersama-sama dengan investor mengelola *strategic asset* yang ada.

BAB XXIX

KOPERASI INDONESIA, GLOBALISASI EKONOMI, DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN DUNIA

A. Latar Belakang Permasalahan

Ropke (1987) mendefinisikan koperasi sebagai organisasi bisnis yang para pemilik atau anggotanya adalah juga pelanggan utama perusahaan tersebut (kriteria identitas). Kriteria identitas suatu koperasi akan merupakan dalil atau prinsip identitas yang membedakan unit usaha koperasi dari unit usaha yang lainnya. Berdasarkan definisi tersebut, menurut Hendar dan Kusnadi (2005), kegiatan koperasi secara ekonomis harus mengacu pada prinsip identitas (hakikat ganda) yaitu anggota sebagai pemilik yang sekaligus sebagai pelanggan. Organisasi koperasi dibentuk oleh sekelompok orang yang mengelola perusahaan bersama yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan ekonomi individu para anggotanya. Koperasi adalah organisasi otonom, yang berada di dalam lingkungan sosial ekonomi, yang menguntungkan setiap anggota, pengurus dan pemimpin dan setiap anggota, pengurus dan pemimpin merumuskan tujuan-tujuannya secara otonom dan mewujudkan tujuan-tujuan itu melalui kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilaksanakan secara bersama-sama (Hanel, 1989).

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan (atau ada yang bilang dimasa revolusi industri di Inggris) yang diprakarsai oleh seorang industrialis yang sosialis bernama Robert Owen. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Berdirinya koperasi buruh tersebut berfungsi membeli barang kebutuhan pokok secara bersama-sama dan memang ternyata bahwa harga di toko koperasi lebih murah jika dibandingkan dengan toko-toko yang bukan koperasi. Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan

negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis.

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (NM) dan negara sedang berkembang (NSB) memang sangat diametral. Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstalasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi (Soetrisno, 2003).

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi sekaligus diharapkan

menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Keberadaan koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat ditilik dari sisi usianya pun yang sudah lebih dari 50 tahun berarti sudah relatif matang. Sampai dengan bulan November 2001, misalnya, berdasarkan data Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 28,55%, sedangkan yang menjalankan rapat anggota tahunan (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Data terakhir tahun 2006 ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit.

Namun uniknya, kualitas perkembangannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya. Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya.

Pangsa koperasi dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama pemerintah, masih sangat besar.

Jadi, dengan kata lain, di Indonesia, setelah lebih dari 50 tahun keberadaannya, lembaga koperasi yang diharapkan menjadi pilar atau soko guru perekonomian nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju (NM). Oleh karena itu tidak heran kenapa peran koperasi di dalam perekonomian Indonesia masih sering dipertanyakan dan selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, maka pertanyaan-pertanyaan penting sekarang ini adalah bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia hingga saat ini dan bagaimana prospeknya ke depan di dalam era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia, dan apa tantangan-tantangan utama yang sedang dan/atau akan dihadapi oleh koperasi Indonesia?

B. Perkembangan Koperasi dalam Ekonomi Kapitalis dan Semi Kapitalis

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Kemudian di Prancis yang didorong oleh gerakan kaum buruh yang tertindas oleh kekuatan kapitalis sepanjang abad ke 19 dengan tujuan utamanya membangun suatu ekonomi alternatif dari asosiasi-asosiasi koperasi menggantikan perusahaan-perusahaan milik kapitalis (Moene dan Wallerstein, 1993). Ide koperasi ini kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. Di Indonesia, koperasi baru diperkenalkan pada awal abad 20.

Sejak munculnya ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni Eropa (UE)

dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-korporat kapitalis.

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di NM dan NSB memang sangat diametral. Di NM koperasi lahir sebagai gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi tawar dan kedudukan penting dalam konstalasi kebijakan ekonomi termasuk dalam perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di NSB, baik oleh pemerintah kolonial maupun pemerintahan bangsa sendiri setelah kemerdekaan (Soetrisno, 2001). Dalam kasus Indonesia, hal ini ditegaskan di dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 mengenai sistem perekonomian nasional. Berbagai peraturan perundangan yang mengatur koperasi dilahirkan dan juga dibentuk departemen atau kementerian khusus yakni Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan maksud mendukung perkembangan koperasi di dalam negeri.

Soetrisno (2001) mencatat bahwa pada akhir dekade 80-an koperasi dunia mulai gelisah dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan yang semakin pesat, sehingga berbagai langkah pengkajian ulang kekuatan koperasi dilakukan. Hingga tahun 1992 kongres *International Cooperative Alliance* (ICA) di Tokyo melalui pidato Presiden ICA (Lars Marcus) masih melihat perlunya koperasi melihat pengalaman swasta khususnya di NM yang mampu membangun koperasi menjadi unit-unit usaha yang besar yang mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan non-koperasi, termasuk perusahaan-perusahaan multinasional, dan pentingnya koperasi di NSB terutama sebagai salah satu cara untuk mengurangi kemiskinan.

Pada tahun 1995 gerakan koperasi menyelenggarakan kongres koperasi di Manchester, Inggris dan melahirkan suatu landasan baru yang dinamakan *International Cooperative Identity Statement* (ICIS) yang menjadi dasar tentang pengertian prinsip dan nilai dasar koperasi untuk menjawab tantangan globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan. Di dalam pertemuan tersebut, disepakati bahwa untuk bisa menghadapi globalisasi dan liberalisasi ekonomi dan perdagangan koperasi harus bersikap seperti layaknya “perusahaan swasta.” Dengan demikian mengakhiri perdebatan apakah koperasi sebagai lembaga bisnis atau lembaga “kuasi-sosial”. Sejak saat itu semangat untuk mengembangkan koperasi terus menggelora di berbagai sistem ekonomi yang semula tertutup kini terbuka. Dengan kata lain, seperti yang diungkapkan oleh Soetrisno (2001), koperasi harus berkembang dengan keterbukaan, sehingga liberalisasi ekonomi dan perdagangan bukan musuh koperasi.

Menurut data dari ICA, di dunia saat ini sekitar 800 juta orang adalah anggota koperasi dan diestimasi bahwa koperasi-koperasi secara total mengerjakan lebih dari 100 juta orang, 20% lebih dari jumlah yang diciptakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Pada tahun 1994, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa kehidupan dari hampir 3 miliar orang, atau setengah dari jumlah populasi di dunia terjamin oleh perusahaan-perusahaan koperasi.

Tidak hanya di NSB yang pendapatan per kapitanya rendah, tetapi juga di NM, terutama di Amerika Utara, Eropa dan Jepang peran koperasi sangat penting. Suatu studi dari Eurostat (2001) di tujuh negara Eropa menunjukkan bahwa pangsa dari koperasi-koperasi dalam menciptakan kesempatan kerja mencapai sekitar 1 persen di Perancis dan Portugal hingga 3,5 persen di Swiss. Menurut ICA, di Kanada 1 dari 3 orang (atau sekitar 33% dari jumlah populasinya) adalah anggota koperasi. Koperasi (termasuk koperasi kredit atau *credit union*) mengerjakan lebih dari 160 ribu orang. Gerakan koperasi the Desjardins (koperasi tabungan dan kredit) dengan lebih dari 5 juta anggota adalah pencipta kesempatan kerja terbesar di Propinsi Quebec. Banyak koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan banyak koperasi yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengeboran

minyak bumi. Banyak koperasinya yang memiliki pangsa yang cukup besar di pasar global. Misalnya koperasi-koperasi gula menguasai sekitar 35% dari produksi gula dunia.

Di Eropa koperasi tumbuh terutama melalui koperasi kredit dan koperasi konsumen yang kuat hingga disegani oleh berbagai kekuatan. Di perdagangan eceran, koperasi-koperasi konsumsi merupakan pionir dari penciptaan rantai perdagangan eceran modern (Furlough dan Strikwerda, 1999). Di sektor perbankan di negara-negara seperti Perancis, Austria, Finlandia dan Siprus, menurut data ICA (1998a), pangsa pasar dari bank-bank koperasi mencapai sekitar 1/3 dari total bank yang ada. Bahkan 2 (dua) bank terbesar di Eropa milik koperasi yakni "Credit Agricole" di Perancis dan RABO-Bank di Netherlands. Kredit sebagai kebutuhan universal bagi umat manusia terlepas dari kedudukannya sebagai produsen maupun konsumen dan penerima penghasilan tetap atau bukan adalah anggota potensial dari koperasi kredit (Soetrisno, 2001).

Tabel 29.1 Perkembangan koperasi di negara maju tahun 1922-1998

Negara	1922		1998	
	Jumlah Anggota	% Dari Populasi	Jumlah Anggota	% Dari Populasi
Inggris	4.559.000	10,8	9.038.018	15,3
Jerman	2.382.000	4,6	21.640.000	26,4
Perancis	2.300.000	5,9	17.845.573	30,3
Swiss	369.000	9,5	1.513.327	21,3
Finlandia	375.000	11,9	1.066.774	20,7
Denmark	376.000	12,3	1.392.244	26,3
AS	-	-	156.192.982	57,8
Kanada	-	-	14.518.682	47,9
Jepang	-	-	42.842.643	33,9

Sumber: Kalmi (2006)

Di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi soko guru perekonomian dan mempunyai suatu sejarah yang sangat panjang. Di Norwegia, satu dari t orang (atau 1,5 juta dari jumlah populasi 4,5 juta orang) adalah anggota koperasi. Koperasi-

koperasi susu bertanggung jawab untuk 99% dari produksi susu; koperasi-koperasi konsumen memegang 25% dari pasar; koperasi-koperasi perikanan bertanggung jawab untuk 8,7% dari jumlah ekspor ikan; dan koperasi-koperasi kehutanan bertanggung jawab untuk 76% dari produksi kayu. Di Finlandia, koperasi S-Group punya 1.468.572 anggota yang mewakili 62% dari jumlah rumah tangga di negara tersebut. Grup-grup koperasi dari Pellervo bertanggung jawab untuk 74% dari produk-produk daging, 96% dari produk-produk susu, 50% dari produksi telur, 34% dari produk-produk kehutanan, dan menangani sekitar 34,2% dari jumlah deposito di bank-bank di negara tersebut. Pada tahun 1995, dua koperasinya yang masuk di dalam 20 koperasi pertanian terbesar di Uni Eropa (UE) adalah Metsaliitto (kayu) dengan penghasilan 3.133 juta ecu dengan 117.783 anggota, dan Valio (produk-produk susu) dengan penghasilan 1.397 juta ecu, 47 anggota dan 5.101 pekerja. Di Denmark, pada tahun 2004 koperasi-koperasi konsumen menguasai pasar 37% dan dua koperasi pertaniannya, yakni MD Foods (produk-produk susu) dan Danish Crown (daging) masuk 20 koperasi pertanian terbesar di UE berdasarkan nilai omset pada tahun 1995. Pada tahun itu, penghasilan MD Foods mencapai 1,681 miliar ecu dengan 8919 petani sebagai anggota dan mengerjakan 3678 orang, sedangkan Danish Crown hampir mencapai 1,577 miliar ecu dengan 12560 orang anggota dan 6965 pekerja. Di Sweden, koperasi-koperasi konsumen memegang 17,5% dari pasar pada tahun 2004, dan pada tahun 1995 satu koperasi pertaniannya dari subsektor susu masuk 20 besar di EU, yakni Arla dengan omset 1,369 miliar ecu, anggota 10365 orang, dan mengerjakan 6020 orang.

Di Jerman, sekitar 20 juta orang (atau 1 dari 4 orang) adalah anggota koperasi, dan koperasi yang jumlahnya mencapai 8106 unit telah memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian negara tersebut, diantaranya menciptakan kesempatan kerja untuk 440 ribu orang. Salah satu sektor dimana koperasi sangat besar perannya adalah perbankan. Misalnya, bank koperasi Raiffaisen sangat maju dan penting peranannya, dengan kantor-kantor cabangnya di kota maupun desa. Pada tahun 1995, ada dua koperasi dari Jerman yang masuk 20 koperasi pertanian terbesar di UE, yakni Baywa (fungsi multi) dengan penghasilan 3.542 juta

ecu dan mengerjakan 10794 orang, dan RHG (fungsi multi) dengan penghasilan 1.790 juta ecu, 260 anggota, dan 2.946 pekerja.

Di Inggris, diperkirakan sekitar 9,8 juta orang adalah anggota koperasi, dan pertanian merupakan sektor di mana peran koperasi sangat besar. Sektor lainnya adalah pariwisata. Biro perjalanan swasta terbesar di negara itu adalah sebuah koperasi. Pada tahun 1995, Milk Marque, koperasi produk-produk susu, masuk 20 koperasi pertanian terbesar di UE, dengan omset mencapai 2.393.000.000 ecu, dengan jumlah anggota tercatat sebanyak 18 ribu orang dan memberi kesempatan kerja ke 300 orang. Sedangkan di Irlandia, koperasi-koperasi pertaniannya yang juga masuk di dalam kelompok besar tersebut adalah The Irish Dairy Board (jumlah anggota: 71), Avonmore (13245), dan Kerry Group (6000) yang semuanya di bidang produksi susu dengan omset antara 1.463,3 juta ecu hingga 1.523,3 juta ecu. Jumlah kesempatan kerja yang diciptakan oleh ketiga koperasi susu tersebut mencapai antara 2010 hingga 6426 orang.

Di Perancis jumlah koperasi tercatat sebanyak 21 ribu unit yang memberi pekerjaan kepada 700 ribu orang, sedangkan di Italia terdapat 70400 koperasi yang mengerjakan hampir 1 juta orang pada tahun 2005. Pada tahun 1995 berdasarkan omset tahunannya, tiga koperasi di Perancis masuk 20 koperasi pertanian terbesar di EU, yakni Sodiaal untuk produk-produk susu dengan omset hampir mencapai 2,6 miliar ecu, Socopa untuk daging dengan 1,99 miliar ecu, dan UNCAA untuk input-input dan produk-produk daging dengan omset 1.527.900 ribu ecu.

Di negara-negara Eropa Timur, koperasi juga sangat maju. Misalnya, di Hongaria, koperasi-koperasi konsumen bertanggung jawab terhadap 14,4% dari makanan nasional dan penjualan-penjualan eceran umum pada tahun 2004. Di Polandia, koperasi-koperasi susu bertanggung jawab untuk 75% dari produksi susu di dalam negeri. Di Slovenia, koperasi-koperasi pertanian bertanggung jawab untuk 72% dari produksi susu, 79% dari sapi, 45% dari gandum, dan 77% dari produksi kentang. Di Slovakia, terdapat lebih dari 700 koperasi yang mengerjakan hampir 75 ribu orang.

Di Selandia Baru, 40% dari populasi remaja adalah anggota koperasi, dan 22% dari PDB negara tersebut berasal dari

perusahaan-perusahaan koperasi. Koperasi-koperasi bertanggung jawab untuk 95% dari pasar susu di dalam negeri dan 95% dari ekspor susu. Pasar domestik untuk banyak komoditas lainnya juga didominasi oleh koperasi: 70% dari pasar daging, 50% dari pasar suplai pertanian, 70% dari pasar pupuk, 75% dari penjualan farmasi, dan 62% dari pasar grosiri.

Belanda, walaupun negaranya sangat kecil, tetapi koperasinya sangat maju. Salah satu adalah Rabo Bank milik koperasi yang adalah bank ketiga terbesar dan konon bank ke 13 terbesar di dunia. Contoh lain adalah perdagangan bunga. Mayoritas perdagangan bunga di negara ini digerakkan oleh koperasi bunga yang dimiliki oleh para petani setempat. Belanda juga punya banyak koperasi yang berkecimpung di sektor pertanian yang masuk 20 koperasi pertanian terbesar di UE, yakni Campina Melkunie (produk-produk susu), Cebeco Handelsrand (input dan produksi pertanian), Friesland Dairy Foods (produk-produk susu), Coberco (produk-produk susu), Demeco (daging), dan Greenery/VTN (buah-buahan dan sayur-sayuran), dengan penghasilan paling kecil 1,346 miliar ecu (VTN) hingga terbesar 3.1 miliar ecu (Campina), jumlah anggota paling sedikit 50 orang (Cebeco) dan terbanyak 17850 orang (VTN) dan jumlah pekerja paling sedikit 3000 orang (Dumeco) dan terbanyak 7490 orang (Friesland). Di negara tetangganya Belgia, pada tahun 2001 tercatat jumlah koperasi mencapai 29.933 unit, dan koperasi farmasinya memiliki pangsa pasar sekitar 19,5%.

Sementara itu, di AS 1 dari 4 orang (atau sekitar 25% dari jumlah penduduk) adalah anggota koperasi. Lebih dari 30 koperasi punya penghasilan tahunan lebih dari 1 miliar dollar AS. Salah satu koperasi yang sangat besar adalah koperasi kredit (*credit union*) yang jumlah anggotanya mencapai sekitar 80 juta orang dengan rata-rata jumlah simpanannya 3000 dollar (Mutis, 2001). Di Negara Paman Sam ini koperasi kredit berperan penting terutama di lingkungan industri, misalnya dalam pemantauan kepemilikan saham karyawan dan menyalurkan gaji karyawan. Begitu pentingnya peran koperasi kredit ini sehingga para buruh di Amerika Serikat (seperti juga di Kanada) sering memberikan julukan koperasi kredit sebagai “bank rakyat”, yang dimiliki oleh anggota dan memberikan layanan kepada anggotanya pula

(Mulyo, 2004). Selain di sektor kredit, koperasi di AS juga kuat di sektor-sektor lainnya termasuk, industri, pertanian dan energi. Sekitar 90% lebih distribusi listrik desa di AS dikuasai oleh koperasi. Koperasi Sunkis di California mensuplai bahan dasar untuk pabrik Coca Cola, sehingga pabrik tersebut tidak perlu membuat kebun sendiri. Dengan demikian pabrik Coca Cola cukup membeli sunkis dari koperasi Sunkis yang dimiliki oleh para petani sunkis (Mutis, 2001).

Koperasi di AS terutama sangat penting di pertanian. Data 2002 menunjukkan bahwa pada tahun itu, ada sekitar 27 ribu lebih koperasi pertanian dengan sekitar 156,19 juta petani sebagai anggotanya (banyak dari mereka menjadi anggota dari lebih dari 1 koperasi. Jumlah ini paling besar di antara kelompok NM. Koperasi di pertanian terfokus pada kegiatan-kegiatan berikut ini: pemasaran produk-produk pertanian, pemasokan bahan baku/input, dan yang terkait dengan pelayanan-pelayanan petani lainnya. Mereka menguasai kurang lebih 28% hingga 30% pangsa pasar (Zeuli dan Cropp, 2005). Beberapa koperasi pertanian yang sangat maju di AS adalah Agrilink, Cenex Harvest States, Dairy Farmers of America, Farmland, dan Land O' Lakes.

Hal penting lainnya yang dapat dilihat dari tabel tersebut adalah bahwa di Finlandia dan Inggris, perbandingan data yang ada untuk dua periode yakni 1996 dan 2002 menunjukkan adanya penurunan jumlah koperasi yang cukup signifikan. Banyak literatur mengenai koperasi di Eropa dan AS mengatakan bahwa dalam 20 tahun terakhir ini memang koperasi-koperasi di dua wilayah tersebut menghadapi persaingan yang semakin ketat yang memaksa mereka untuk melakukan penggabungan, akuisisi, atau kerja sama dalam bentuk-bentuk lain sebagai salah satu strategi untuk *survive*. Misalnya Nello (2000) memaparkan bahwa memang sejak akhir 90an banyak koperasi di Eropa yang melakukan strategi tersebut.

Tabel 29.2 Jumlah koperasi pertanian di negara maju tahun 2002

Negara	Jumlah Koperasi	Jumlah Anggota (Juta)	Penghasilan*
Kanada	7880	14,52	-
Denmark	214*	0,113*	12100 ecu
	1446	1,39	-
Finlandia	403*	1,229*	7590 ecu
	46	1,07	-
Perancis	3618*	0,720*	52600 ecu
	23573	17,49	-
Jerman	3950*	3,280*	39300 ecu
	9112	21,64	-
Jepang	3860	42,84	-
Norwegia	4259	1,59	-
Korea Selatan	7669	17,07	-
Sweden	50*	0,300*	8240 ecu
	15106	4,78	-
Swiss	16	1,51	-
Inggris	506*	0,271	7660 ecu
	42	9,04	-
AS	27076	156,19	-
Yunani*	6919	0,738	850 ecu
Spanyol*	4350	0,950	6300 ecu
Irlandia*	128	0,186	9590 ecu
Italia**	8850	1,124	16450 ecu
Luxemburg**	25	-	120 ecu
Belanda**	251	0,273	22400 ecu
Austria	1757	2,182	-
Portugal	909	0,800	1270 ecu

Keterangan : * data 1996; ** data 1995.

Sumber : International Co-operative Alliance, www.coop.org/statistics.html. (April, 2002); untuk tahun 1996 dan 1995 dari Van Bekkum dan Van Dijk (1997) yang dikutip dari Nello (2000).

Pada tahun 2002 jumlah koperasi di negara adi daya ini tercatat mencapai 48 ribu unit di hampir semua jalur bisnis,

memberikan pelayanan kepada 120 juta anggota, atau sekitar 4 dari setiap 10 penduduk di negara tersebut. 100 koperasi terbesar di AS, diperingkat menurut omset, secara individu menciptakan paling sedikit 346 juta dollar AS dan dalam total mencapai 119 miliar dollar AS pada tahun tersebut (Zeuli dan Cropp, 2002).

Di Jepang, 1 dari setiap 3 keluarga adalah anggota koperasi. Koperasi menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian. Koperasi-koperasi pertanian menghasilkan output sekitar 90 miliar dollar AS dengan 91% dari jumlah petani di negara tersebut sebagai anggota. Peran koperasi di pedesaan Jepang telah menggantikan fungsi bank sehingga koperasi sering disebut pula sebagai “bank rakyat” karena koperasi tersebut beroperasi dengan menerapkan sistem perbankan. Bahkan salah satu bank besar di Jepang adalah koperasi, yakni bank Nurinchukin bank (Rahardjo, 2002).

Tabel 29.3 Seratus koperasi terbesar menurut omset dan sektor bisnis di AS pada tahun 2002

Sektor	Jumlah Koperasi	Omset (Juta Dollar AS)
Pertanian	41	58
Perdagangan besar/Groseri	18	26,1
Keuangan	12	10,2
Komunikasi energi	16	9,7
Perangkat keras dan <i>lumber</i>	6	8,8
Lainnya	7	6,5

Sumber: Zeuli dan Cropp, 2002.

Di negara-negara Asia lainnya dengan tingkat pembangunan ekonominya yang sudah relatif tinggi seperti Singapura dan Korea Selatan, peran koperasi juga sangat besar. Di Singapura 50% dari jumlah populasinya adalah anggota koperasi. Koperasi-koperasi konsumennya memegang 55% dari pasar dalam pembelian-pembelian *supermarket* dan mempunyai suatu penghasilan sebesar 700 juta dollar AS. Di Korea Selatan,

koperasi-koperasi pertanian punya anggota lebih dari 2 juta petani (90% dari jumlah petani), dan menghasilkan output sebanyak 11 miliar dollar AS. Koperasi-koperasi di subsektor perikanan memiliki pangsa 71%.

Koperasi konsumen di Singapura, seperti juga di misalnya Jepang, Kanada dan Finlandia mampu menjadi pesaing terkuat perusahaan raksasa ritel asing yang mencoba masuk ke negara tersebut (Mutis, 2003). Bahkan di beberapa negara tersebut, mereka berusaha untuk mengarahkan perusahaannya agar berbentuk koperasi. Dengan membangun perusahaan yang berbentuk koperasi diharapkan masyarakat setempat mempunyai peluang besar untuk memanfaatkan potensi dan asset ekonomi yang ada di daerahnya (Mulyo, 2004).

Hebatnya perkembangan dari koperasi-koperasi di negara-negara maju tersebut memberi kesan bahwa koperasi tidak bertentangan dengan ekonomi kapitalis. Sebaliknya, koperasi-koperasi tersebut tidak hanya mampu selama ini bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar non-koperasi, tetapi mereka juga menyumbang terhadap kemajuan ekonomi dari negara-negara kapitalis tersebut. Seperti telah dijelaskan di atas bahwa koperasi lahir pertama kali di Eropa yang juga merupakan tempat lahirnya sistem ekonomi kapitalis.

Banyak studi-studi kasus atau laporan-laporan mengenai keberhasilan dari koperasi-koperasi di NM. Misalnya dari Trechter (2005) mengenai the Fonterra Cooperative Group (FCG) di Selandia Baru (SB) dan the Australian Wheat Board (AWB). Dalam suatu jangka waktu yang relatif pendek, pemasaran susu di SB telah berubah dari suatu sektor yang terfrakmentasi ke dalam sejumlah koperasi yang saling bersaing ke satu sektor yang didominasi oleh satu koperasi. Tahun 1996 ada 14 koperasi susu di SB. Sekarang hanya ada satu koperasi susu yang besar, yakni FCG, dan dua yang kecil berbasis regional yang beroperasi di SB. Tahun 2000, Kiwi Cooperative Dairies (Kiwi) dan New Zealand Dairy Group (NZDG) mendominasi industri susu di SB dan mereka adalah pesaing-pesaing berat. Negosiasi-negosiasi antara Kiwi dan NZDG yang akhirnya membuat terbentuknya FCG sangat lama dan alot. Menurut *website*-nya, FCG adalah korporasi terbesar di SB, dengan 7% dari PDB negara itu, menyumbang sekitar 20% dari

cadangan devisa SB, dan perusahaan susu terbesar ke empat di dunia (<http://fonterra.com>). FCG melalui Kiwi Dairies dan NZDG memiliki sejumlah merek konsumen yang sangat kuat, diantaranya Anchor, Peters and Brownes, dan Tip Top. FCG punya sekitar 12.300 anggota dan fasilitas-fasilitas produksi di Brazil dan Australia, selain di SB. FCG secara cepat memperluas pengaruhnya di pasar susu di Australia dengan membeli Australian Food Holdings, bagian dari National Food dan upaya-upaya yang sedang dilakukan untuk memperluas kepemilikannya dari Koperasi Bonlac dari 25% ke 50%. Tujuan utama dari didirikannya FCG adalah untuk mencapai penghematan biaya-biaya dan untuk menyediakan suatu landasan yang lebih efektif untuk bisa bersaing di pasar-pasar susu global. Kedua tujuan ini mempromosikan penggabungan dua tipe yang teridentifikasi dari penghematan-penghematan biaya-biaya. Pertama, rasionalisasi dari rantai suplai diharapkan dapat menciptakan penghematan-penghematan yang substansial. Fasilitas-fasilitas dan posisi-posisi yang duplikat dieliminasi lewat penggabungan itu. Kedua, penggabungan itu diharapkan bisa membuat FCG mampu merealisasikan skala ekonomis, yang berarti biaya rata-rata, yang berarti juga harga jual rata-rata per satu unit output menjadi murah.

Pendirian FCG waktu itu diharapkan bisa meningkatkan kemampuan dari industri susu SB untuk bersaing di pasar-pasar internasional. FCG cocok dengan definisi dari suatu generasi baru dari koperasi dalam banyak hal: (1) koperasi tersebut dimiliki dan diawasi oleh pemakai (dengan pemberian suara berdasarkan jumlah susu yang diserahkan bukan berdasarkan satu orang-satu suara); (2) keuntungan-keuntungan dibagikan berdasarkan pemakaian; (3) FCG bukan sepenuhnya suatu koperasi berdasarkan keanggotaan karena koperasi itu harus menerima pemasok-pemasok baru; (4) FCG punya suatu hubungan kontraktual dengan produsen-produsennya yang harus punya satu bagian dari stok susu FCG untuk setiap kilo dari susu yang akan diserahkan.

Karakteristik penting lainnya dari FCG adalah bahwa koperasi tersebut mempunyai suatu fokus yang kuat pada pembuatan produk-produk yang bervariasi yang menciptakan kesetiaan pembeli dan harga premium.

AWB juga memiliki suatu sejarah yang panjang. Didirikan oleh pemerintah Australia pada tahun 1939 dan memberikan otoritas untuk mengeksport gandum. Pada tahun 2001 AWB ekspor lebih dari 15 juta mt, gandum dan mempunyai pembeli-pembeli di lebih dari 40 negara. AWB punya saham 3% dari jumlah ekspor dan 12% dari ekspor pertanian Australia. Di dalam konteks Australia dan pasar gandum global, AWB adalah pemain utama. Pada tahun 2001, AWB memegang saham terbesar kedua (17%) dari penjualan-penjualan di pasar gandum global.

Peterson (2005), mengatakan bahwa koperasi harus memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif dibandingkan organisasi-organisasi bisnis lainnya untuk bisa menang dalam persaingan di dalam era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini. Keunggulan kompetitif disini didefinisikan sebagai suatu kekuatan organisasional yang secara jelas menempatkan suatu perusahaan di posisi terdepan dibandingkan pesaing-pesaingnya. Faktor-faktor keunggulan kompetitif dari koperasi harus datang dari: (1) sumber-sumber *tangible* seperti kualitas atau keunikan dari produk yang dipasarkan (misalnya formula Coca-Cola Coke) dan kekuatan modal; (ii) sumber-sumber bukan *tangible* seperti *brand name*, reputasi, dan pola manajemen yang diterapkan (misalnya tim manajemen dari IBM); dan (iii) kapabilitas atau kompetensi-kompetensi inti yakni kemampuan yang kompleks untuk melakukan suatu rangkaian pekerjaan tertentu atau kegiatan-kegiatan kompetitif (misalnya proses inovasi dari 3M). Menurutnya, salah satu yang harus dilakukan koperasi untuk bisa menang dalam persaingan adalah menciptakan efisiensi biaya. Tetapi ini juga bisa ditiru/dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lain (non-koperasi). Jadi, ini bukan suatu keunggulan kompetitif yang sebenarnya dari koperasi. Menurutnya satu-satunya keunggulan kompetitif sebenarnya dari koperasi adalah hubungannya dengan anggota. Misalnya, di koperasi produksi komoditas-komoditas pertanian, lewat anggotanya koperasi tersebut bisa melacak bahan baku yang lebih murah, sedangkan perusahaan non-koperasi harus mengeluarkan uang untuk mencari bahan baku murah.

Loyd (2001) menegaskan bahwa koperasi-koperasi perlu memahami apa yang bisa membuat mereka menjadi unggul di

pasar yang mengalami perubahan yang semakin cepat akibat banyak faktor multi termasuk kemajuan teknologi, peningkatan pendapatan masyarakat yang membuat perubahan selera pembeli, penemuan-penemuan material baru yang bisa menghasilkan output lebih murah, ringan, baik kualitasnya, tahan lama, dsb.nya, dan makin banyaknya pesaing-pesaing baru dalam skala yang lebih besar. Dalam menghadapi perubahan-perubahan tersebut, menurutnya, faktor-faktor kunci yang menentukan keberhasilan koperasi adalah: (1) posisi pasar yang kuat (antara lain dengan mengeksplorasi kesempatan-kesempatan vertikal dan mendorong integrasi konsumen); (2) pengetahuan yang unik mengenai produk atau proses produksi; (3) sangat memahami rantai produksi dari produk bersangkutan; (4) terapkan suatu strategi yang cemerlang yang bisa merespons secara tepat dan cepat setiap perubahan pasar; dan (5) terlibat aktif dalam produk-produk yang mempunyai tren-tren yang meningkat atau prospek-prospek masa depan yang bagus (jadi mengembangkan kesempatan yang sangat tepat).

Berdasarkan penelitian mereka terhadap perkembangan dari koperasi-koperasi pekerja di AS Lawless dan Reynolds (2004) memberikan beberapa kriteria kunci dan praktek-praktek terbaik. Menurut mereka, kriteria-kriteria kunci untuk memulai suatu koperasi yang berhasil adalah sebagai berikut: (1) memiliki kepemimpinan yang visioner yang bisa “membaca” kecenderungan perkembangan pasar, kemajuan teknologi, perubahan pola persaingan, dll.; (2) menerapkan struktur organisasi yang tepat yang merefleksikan dan mempromosikan suatu kultur terbaik yang cocok terhadap bisnis bersangkutan (antara lain kondisi pasar/persaingan dan sifat produk atau proses produksi dari produk bersangkutan); (3) kreatif dalam pendanaan (jadi tidak hanya tergantung pada kontribusi anggota, tetapi juga lewat penjualan saham ke non-anggota atau pinjam dari bank); dan (4) mempunyai orientasi bisnis yang kuat. Sedangkan *best practices* menurut mereka adalah termasuk: (1) anggota sepenuhnya memahami industri-industri atau sektor-sektor yang mereka guleti dan kekuatan-kekuatan serta kelemahan-kelemahan dari koperasi mereka; (2) struktur organisasi atau pola manajemen yang diterapkan sepenuhnya didukung oleh anggota (sistem manajemen bisa secara kolektif

atau dengan suatu struktur hirarki manajemen/dewan pengurus; (3) punya suatu misi yang didefinisikan secara jelas dan fokus; dan (4) punya pendanaan yang cukup.

Sedangkan menurut Pitman (2005) dari hasil penelitiannya terhadap kinerja berbagai macam koperasi di Wisconsin (AS), selain faktor-faktor di atas, koperasi yang berhasil adalah koperasi yang melakukan hal-hal berikut ini: (1) memakai komite-komite, penasehat-penasehat dan ahli-ahli dari luas secara efektif; (2) selalu memberikan informasi yang lengkap dan *up to date* kepada anggota-anggotanya sehingga mereka tetap terlibat dan suportif; (3) melakukan rapat-rapat atau pertemuan-pertemuan bisnis dengan memakai agenda yang teratur, prosedur-prosedur parlemen, dan pengambil keputusan yang demokrasi; (4) mempertahankan relasi-relasi yang baik antara manajemen dan dewan direktur/pengurus dengan tugas-tugas dan tanggung jawab- tanggung jawab yang didefinisikan secara jelas; (5) mengikuti praktek-praktek akuntansi yang baik, dan mempersentasikan laporan-laporan keuangan secara regular; (6) mengembangkan aliansi-aliansi dengan koperasi-koperasi lainnya; dan (7) mengembangkan kebijakan-kebijakan yang jelas terhadap konfidensial dan konflik kepentingan.

Keeling (2005) meneliti mengapa dalam beberapa tahun belakangan ini banyak koperasi-koperasi besar di California termasuk dua yang terkenal *Tri-Valley Growers* (TVG) dan *the Rice Growers Association* (RGA) telah tutup, sedangkan banyak lainnya sedang mengalami kesulitan-kesulitan keuangan. Perkembangan-perkembangan tersebut memberi kesan bahwa koperasi-koperasi di California mungkin semakin mengalami kesulitan untuk bersaing dalam iklim bisnis pertanian saat ini dengan persaingan yang semakin ketat dari produk-produk luar negeri termasuk dari China. Akhirnya, hasil studi tersebut mendukung hipotesis awal bahwa, RGA dan TVG tutup terutama akibat kombinasi dari sejumlah faktor berikut: (1) kurangnya pendidikan dan pengawasan dari dewan direktur/pengurus; (2) manajemen yang tidak efektif; dan (3) keanggotaan yang pasif.

Sedangkan bagi Anderson dan Henehan (2003), manajemen dan direktur yang efektif dalam arti cepat mengambil suatu keputusan yang tepat dalam merespons terhadap

perkembangan-perkembangan bisnis terkait (misalnya perubahan pasar atau masuknya pesaing-pesaing baru) sangat menentukan keberhasilan suatu koperasi. Mereka harus memastikan bahwa dengan langkah-langkah yang cepat koperasi mereka bisa mendapatkan keberhasilan-keberhasilan yang maksimum. Menurut mereka, koperasi yang bisa berhasil atau paling tidak yang bisa *survive* dalam era persaingan yang semakin ketat ini, diantara faktor-faktor kunci lainnya, adalah yang dipimpin oleh dewan direktur berkualitas. Dan untuk mendapatkan direktur-direktur berkualitas adalah tugas para anggota untuk memilih mereka. Kemudian, dewan direktur bertanggung jawab dalam menyeleksi manajer yang berkualitas, mengembangkan suatu strategi yang kuat, dan mengimplementasikan suatu struktur keuangan yang baik. Selain itu, para anggota juga harus aktif memonitor kinerja dari koperasi, dewan dan manajemennya.

Di NM koperasi terutama di pertanian saat ini sedang mengalami perubahan akibat persaingan global yang semakin sengit dan perubahan selera konsumen. Di AS, akibat persaingan dari produk-produk pertanian dari luar negeri dan perubahan pola konsumsi, telah terjadi konsolidasi dari produksi pertanian. Pada tahun 1969 terdapat 2.730.250 petani di negara tersebut, dan pada tahun 1997 jumlahnya merosot ke 1.911.859, suatu penurunan 30%. Pada waktu yang sama, rata-rata skala usaha petani meningkat. Saat jumlah petani menurun dan jumlah produksi per petani meningkat, setiap individu pembeli produk-produk pertanian menjadi sangat penting bagi koperasi koperasi lokal pemasok dan pemasaran produk-produk pertanian. Pada waktu bersamaan, koperasi-koperasi pertanian tersebut yang menghadapi pembeli yang lebih sedikit, masing-masing dengan daya beli yang lebih besar, bersaing lebih agresif satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan pembeli/keuntungan. Industri-industri yang memasok petani (bibit, pupuk dll.) dan industri-industri pengolahan produk-produk pertanian sedang mengalami suatu periode dari konsolidasi, yang menyisakan lebih sedikit jumlah pemain untuk bersaing mendapatkan bisnis dari sisa produsen yang masih ada. Sebagai tambahan, perusahaan-perusahaan kunci di industri-industri tersebut dalam banyak kasus juga merupakan koperasi pemasok-pemasok dan pembeli-

pembeli lokal produk-produk pertanian. Ini artinya pilihan menjadi lebih sedikit bagi koperasi saat harus menetapkan membeli dari dan menjual kepada siapa, yang mengurangi daya tawar dari koperasi lokal tersebut. Saat seperti ini dimana koperasi-koperasi lokal berjuang untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, banyak yang merespons dengan melakukan perubahan struktural.

Dari penelitian mereka, Vandeburg, dkk. (2000) menemukan banyak manajer-manajer koperasi lokal melakukan perubahan struktural dengan cara bergabung, akuisisi, bekerja sama, dan melakukan aliansi strategis dengan koperasi-koperasi lainnya atau dengan perusahaan-perusahaan berorientasi investor. Dari penemuan tersebut, mereka menyimpulkan bahwa langkah-langkah seperti itu adalah sangat tetap agar koperasi-koperasi pertanian bisa *survive* atau tetap kompetitif dalam kondisi seperti yang digambarkan di atas.

Tetapi di atas segalanya, kualitas dari manajer atau dewan direktur sangatlah krusial. Mereka harus bisa membaca perkembangan tren-tren di pasar domestik dan global, baik yang sedang berlangsung saat ini maupun kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Mereka harus bisa merespons secara cepat dan tepat setiap perubahan yang terjadi. (Barr, 2005).

Dari pengamatannya terhadap perkembangan koperasi di AS, McKenna (2001) menjabarkan sejumlah karakteristik dari koperasi yang berhasil. Diantaranya yang paling menonjol adalah: (1) menerapkan strategi yang rasional yang cocok dengan lingkungan bisnisnya yang berlaku untuk bisa tetap beroperasi; (2) mempunyai suatu visi yang lebih luas dari hanya memproduksi bahan baku (produsen perlu memahami apa artinya menanam dalam nilai tambah); (3) keputusan-keputusan didasarkan pada informasi yang kredibel; (4) keuangan baik; (5) pemilik atau dewan direktur bisa memimpin dengan baik (dewan direktur yang lebih banyak diambil dari luar bisa menaikkan kemampuannya untuk membuat keputusan-keputusan strategis); (6) memakai/mengerjakan manajer profesional (ini juga meningkatkan kinerja koperasi); dan (6) punya keinginan menjadi “yang paling hebat di kelompoknya” vs. “menambah rantai nilai”.

Dari penelitiannya terhadap perkembangan koperasi pertanian dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh koperasi di Uni Eropa (UE), Nello (2000) memberikan sejumlah langkah yang harus diambil agar koperasi pertanian bisa berkembang dengan baik, yang antara lain adalah (1) menghilangkan ketidakunggulan dari petani-petani skala kecil yang terfregmentasi dengan cara membantu mereka untuk mengkonsentrasi suplai, menstabilkan harga produsen, dan meningkatkan kekuatan tawar dari petani-petani (anggotanya); (2) menciptakan kesempatan atau kemampuan petani untuk mengeksploit skala ekonomis dan meningkatkan kapasitas mereka untuk bersaing pada suatu pasar yang lebih besar (misalnya pasar ekspor); (3) memperbaiki kualitas dan menaikkan orientasi pasar, dan dengan cara itu menolong petani untuk memenuhi permintaan-permintaan yang meningkat dari konsumen untuk produk-produk makanan yang bervariasi, aman, dan spesifik regional (spesialisasi); (4) membantu petani untuk bisa memperbaiki kualitas dalam proses produksi, pembungkusan, penyimpanan dan lain sebagainya sesuai standar-standar internasional yang berlaku; (5) memperbaiki kinerja manajemen, dewan direktur dan organisasi koperasi untuk meningkatkan kepuasan anggota; dan (6) menjamin sumber pendanaan yang cukup.

Dengan membandingkan koperasi perdesaan di Belanda dengan di Afrika Sub-Sahara, Braverman, dkk. (1991) menyimpulkan bahwa buruknya kinerja koperasi di Afrika Sub-Sahara (atau di banyak negara berkembang (NB) pada umumnya) disebabkan oleh sejumlah faktor yang bisa dibedakan antara faktor-faktor eksternal diluar kontrol koperasi dan faktor-faktor internal. Faktor-faktor internal terutama adalah keterbatasan partisipasi anggota, masalah-masalah struktural dan kontrol, dan kesalahan manajemen. Sedangkan faktor-faktor eksternal terutama adalah intervensi pemerintah yang terlalu besar yang sering didorong oleh donor, kesulitan lingkungan-lingkungan ekonomi dan politik, dan harapan-harapan yang tidak realistic dari peran dari koperasi. Menurut mereka, problem yang paling signifikan adalah cara bagaimana koperasi itu dipromosikan oleh pemerintah. Promosi yang sifatnya dari atas ke bawah telah menghalangi anggota untuk aktif berpartisipasi dalam

pembangunan koperasi. Bentuk-bentuk organisasi dan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan diatur oleh pihak luar. Jadi koperasi telah gagal untuk berkembang menjadi unit-unit yang mandiri dan sepenuhnya berdasarkan anggota. Masih dalam kaitan ini, Linstad (1990) mengatakan bahwa di banyak NB sering kali pemerintah melihat dan menggunakan koperasi sebagai suatu alat untuk menjalankan agenda-agenda pembangunannya sendiri. Koperasi sering diharapkan bahkan di paksa berfungsi sebagai kesejahteraan sosial dan sekaligus sebagai organisasi ekonomi, yang dengan sendirinya memberi beban sangat berat kepada struktur manajemen koperasi yang pada umumnya lemah. Menurut Braverman, dkk. (1991), sedikit sekali perhatian diberikan kepada kondisi-kondisi ekonomi dimana koperasi-koperasi diharapkan melakukan berbagai aktivitas. Promosi koperasi yang tidak diskriminatif, yakni tanpa memberi perhatian pada hal-hal seperti dinamik-dinamik internal, insentif, struktur kontrol, dan pendidikan dari anggota, sering kali telah membuat koperasi-koperasi menjadi organisasi-organisasi birokrasi yang sangat tergantung pada dukungan pemerintah dan politik. Oleh karena itu, Gentil (1990) menegaskan bahwa agar koperasi maju maka hubungan antara pemerintah dan koperasi yang didefinisikan ulang.

Rangkuman dari hasil Konferensi Tahunan Koperasi-Koperasi Petani, Oktober 29-20, 2001 di Las Vegas, Nevada (AS) menghasilkan beberapa butir penting yang disampaikan oleh pembicara-pembicara mengenai tantangan yang dihadapi oleh koperasi pada era sekarang ini. Diantaranya dari Larson, yakni sebagai berikut: (1) membangun suatu sistem koperasi yang menyatukan peran lokal dan peran regional; dalam kata lain bagaimana koperasi lokal dan koperasi regional bisa bekerja sama untuk jangka panjang); (2) menciptakan penghasilan yang cukup (atau menaikkan profit); (3) mengembangkan atau menyempurnakan strategi dan keahlian pemasaran (mensegmentasikan pasar hanya permulaan); (4) program-program SDM; dan (5) mengembangkan dan melaksanakan suatu strategi *e-commerce*. Pesan paling utama dari Larson untuk koperasi-koperasi lokal adalah bahwa kinerja keuangan yang solid

sangat penting; koperasi-koperasi harus mempunyai tujuan-tujuan penggerak/peningkatan kinerja.

Selain studi-studi kasus di atas, beberapa pengamat koperasi di Indonesia juga mencoba mengevaluasi keberhasilan koperasi di NM. Misalnya menurut Soetrisno (2001), model-model keberhasilan koperasi di dunia umumnya berangkat dari tiga kutub besar, yaitu konsumen seperti di Inggris, kredit seperti di Perancis dan Belanda dan produsen yang berkembang pesat di daratan Amerika, khususnya AS dan di beberapa negara di Eropa. Dari evaluasinya, Soetrisno melihat ada beberapa syarat agar koperasi bisa maju, yakni: (i) skala usaha koperasi harus layak secara ekonomi; (ii) koperasi harus memiliki cakupan kegiatan yang menjangkau kebutuhan masyarakat luas, kredit (simpan-pinjam) dapat menjadi platform dasar menumbuhkan koperasi; (iii) posisi koperasi produsen yang menghadapi dilema bilateral monopoli menjadi akar memperkuat posisi tawar koperasi; dan pendidikan dan peningkatan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan kekuatan koperasi (pengembangan SDM).

C. Potret Singkat Kinerja Koperasi di Indonesia

Dalam sistem perekonomian Indonesia dikenal ada tiga pilar utama yang menyangga perekonomian. Ketiga pilar itu adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi. Ketiga pilar ekonomi tersebut mempunyai peranan yang masing-masing sangat spesifik sesuai dengan kapasitasnya. Sayangnya, seperti yang diungkapkan oleh Widiyanto (1998), dari ketiga pilar itu, koperasi, walau sering disebut sebagai soko guru perekonomian, secara umum merupakan pilar ekonomi yang "jalannya paling terseok" dibandingkan dengan BUMN dan apalagi BUMS.

Padahal koperasi selama ini sudah didukung oleh pemerintah (bahkan berlebihan) sesuai kedudukan istimewa dari koperasi di dalam sistem perekonomian Indonesia. Sebagai soko guru perekonomian, ide dasar pembentukan koperasi sering dikaitkan dengan pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa "perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok

dengan asas kekeluargaan itu adalah koperasi. Tafsiran itu sering disebut sebagai perumus pasal tersebut.

Kata azas kekeluargaan ini, walau bisa diperdebatkan, sering dikaitkan dengan koperasi sebab azas pelaksanaan usaha koperasi adalah juga kekeluargaan. Untuk lebih menata organisasi koperasi, pada tahun 1967 pemerintah Indonesia (Presiden dan DPR) mengeluarkan UU No. 12 dan pada tahun 1992 UU tersebut direvisi menjadi UU No. 25. Di banding UU No.12, UU No. 25 lebih komprehensif tetapi juga lebih berorientasi ke pemahaman "kapitalis". Ini disebabkan UU baru itu sesungguhnya memberi peluang koperasi untuk bertindak sebagai sebuah perusahaan yang memaksimalkan keuntungan (Widiyanto, 1998).

Berdasarkan data resmi dari Departemen Koperasi dan UKM, sampai dengan bulan November 2001, jumlah koperasi di seluruh Indonesia tercatat sebanyak 103.000 unit lebih, dengan jumlah keanggotaan ada sebanyak 26.000.000 orang. Jumlah itu jika dibanding dengan jumlah koperasi per-Desember 1998 mengalami peningkatan sebanyak dua kali lipat. Jumlah koperasi aktif, juga mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Jumlah koperasi aktif per-November 2001, sebanyak 96.180 unit (88,14 persen). Hingga tahun 2004 tercatat 130.730, tetapi yang aktif mencapai 71,50%, sedangkan yang berjalan rapat tahunan anggota (RAT) hanya 35,42% koperasi saja. Tahun 2006 tercatat ada 138.411 unit dengan anggota 27.042.342 orang akan tetapi yang aktif 94.708 unit dan yang tidak aktif sebesar 43.703 unit. Sedangkan menurut Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Adi Sasono, yang diberitakan di Kompas, Kamis, per 31 Mei 2007 terdapat 138.000 koperasi di Indonesia, namun 30 persennya belum aktif. Informasi terakhir dari Triyatna (2009), jumlah koperasi tahun 2007 mencapai 149.793 units, diantaranya 104.999 aktif, atau sekitar 70% dari jumlah koperasi dan sisanya 44.794 non-aktif. Selama periode 2006-2007, jumlah koperasi aktif tumbuh 6,1% sedangkan laju pertumbuhan koperasi tidak aktif sekitar 5,7%. Corak koperasi Indonesia adalah koperasi dengan skala sangat kecil.

Tabel 29.4 Perkembangan usaha koperasi di Indonesia tahun 1998-2007

umlah Unit	Jumlah Anggota (Juta Orang)	Koperasi Aktif		RAT (% dari Koperasi Aktif)
		Jumlah	%	
52.000	-	-	-	-
103.077	27,3	-	86,3	40,8
110.766	23,7	96.180	81,0	41,9
117.906	24,001	-	78,9	46,3
123.181	27,3	93.800	76,20	47,6
130.730	27,5	93.402	71,50	49,6
132.965	27,4	94.818	71,0	47,4
141.738	28,1	94.708	70,1	46,7
149.793	-	104.999	70,00	-

Sumber: Menekop & UKM

Mengenai jumlah koperasi yang meningkat cukup pesat sejak krisis ekonomi 1997/98, menurut Soetrisno (2003), pada dasarnya sebagai tanggapan terhadap dibukanya secara luas pendirian koperasi dengan pencabutan Inpres 4/1984 dan lahirnya Inpres 18/1998. Sehingga orang bebas mendirikan koperasi pada basis pengembangan dan hingga 2001 sudah lebih dari 35 basis pengorganisasian koperasi.

Salah satu indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah perkembangan volume usaha dan sisa hasil usaha (SHU). Data yang ada menunjukkan bahwa kedua indikator tersebut mengalami peningkatan selama periode 2000-2006. Untuk volume usaha, nilainya naik dari hampir 23,1 triliun rupiah tahun 2000 ke hampir 54,8 triliun rupiah tahun 2006; sedangkan SHU dari 695 miliar rupiah tahun 2000 ke 3,1 triliun rupiah tahun 2006. Menurut data paling akhir yang ada yang dikutip oleh Triyatna (2009), pada tahun 2007 jumlah SHU koperasi aktif mencapai 3.470 miliar rupiah sedangkan modal luar koperasi aktif sekitar 23.324 miliar rupiah. Selama periode 2006-2007, pertumbuhan SHU sekitar 7,9% dan modal luar 5,7%.

Tabel 29.5 Perkembangan usaha koperasi di Indonesia tahun 2000-2006

Modal Sendiri Modal Luar	Volume Usaha (Rp. Miliar)	SHU (Rp. Miliar)	SHU terhadap Volume Usaha (%)
0,55	23.122	695	3,00
0,72	38.730	3.134	8,09
0,58	26.583	1.090	4,1
0,63	31.684	1.872	5,91
0,71	37.649	2.164	5,75
0,71	34.851	2.279	6,54
0,77	54.761	3.131	5,72
-	-	3.470	-

Sumber: Menekop & UKM

Memasuki tahun 2000 koperasi Indonesia didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55%-60% dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Hingga akhir 2002, posisi koperasi dalam pasar perkreditan mikro menempati tempat kedua setelah Bank Rakyat Indonesia (BRI)-unit desa sebesar 46% dari KSP/USP dengan pangsa sekitar 31%. Dengan demikian walaupun program pemerintah cukup gencar dan menimbulkan distorsi pada pertumbuhan kemandirian koperasi, tetapi hanya menyentuh sebagian dari populasi koperasi yang ada. Sehingga pada dasarnya masih besar elemen untuk tumbuhnya kemandirian koperasi (Soetrisno, 2003).

Berdasarkan data propinsi 2006, jumlah koperasi dan jumlah koperasi aktif sebagai persentase dari jumlah koperasi bervariasi antar propinsi. Pertanyaan sekarang adalah kenapa jumlah koperasi atau proporsi koperasi aktif berbeda menurut propinsi? Apakah mungkin ada hubungan erat dengan kondisi ekonomi yang jika diukur dengan pendapatan atau produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita memang berbeda antar propinsi? Secara teori, hubungan antara koperasi aktif dan kondisi ekonomi atau pendapatan per kapita bisa positif atau negatif. Dari sisi permintaan (pasar output), pendapatan per kapita yang tinggi yang membuat prospek pasar output baik, atau pasar output dalam kondisi *booming*, memberi suatu insentif bagi perkembangan aktivitas koperasi karena pelaku-pelaku koperasi melihat besarnya peluang pasar (*ceteris paribus*). Fenomena yang

bisa disebut efek *demand-pull*. Dari sisi penawaran (pasar input; dalam hal ini petani atau produsen), pendapatan per kapita yang tinggi yang menciptakan peluang pasar atau peningkatan penghasilan bagi individu petani atau produsen bisa menjadi suatu faktor disinsentif bagi kebutuhan para petani atau produsen untuk membentuk koperasi. Fenomena yang dapat disebut *supply-push*.

Berdasarkan data pemerintah yang ada, ditemukan bahwa, sebagian besar dari jumlah propinsi di Indonesia memiliki jumlah koperasi aktif di atas 50% dan propinsi-propinsi tersebut berada di dalam kelompok pendapatan rendah. Hanya ada tiga titik yang memberi kesan adanya suatu korelasi positif antara jumlah koperasi aktif dan tingkat pendapatan. Dalam kata lain, gambar tersebut memberi kesan bahwa efek *supply-push* lebih besar daripada efek *demand-pull*.

Fenomena *supply-push* mau mengatakan bahwa sekelompok petani atau produsen terpaksa membentuk koperasi karena kondisi pasar yang tidak menguntungkan mereka jika beroperasi secara individu. Misalnya adanya monopoli alamiah di pasar oleh sebuah perusahaan besar yang mempunyai keunggulan harga sehingga dengan berkoperasi para petani/produsen lebih mampu meningkatkan efisiensi harganya sehingga bisa bersaing dengan perusahaan tersebut (*bargaining power* lebih kuat). Pada tingkat lebih agregat atau makro, fenomena ini bisa diukur oleh tingkat pendapatan per kapita atau tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran. Hipotesisnya adalah bahwa semakin rendah tingkat pendapatan per kapita atau semakin tinggi tingkat kemiskinan atau tingkat pengangguran semakin banyak jumlah koperasi (atau koperasi aktif), terutama koperasi kredit.

Data yang sama juga memberi kesan adanya korelasi yang kuat antara jumlah koperasi aktif dan tingkat pengangguran. Menurut data tersebut, tingkat pengangguran tertinggi adalah di Jawa Barat (22,86%) dan jumlah koperasi dan koperasi aktif juga paling banyak di propinsi tersebut (masing-masing 14211 dan 20562 unit). Sedangkan tingkat pengangguran terendah adalah di Bangka Belitung (0,25%) dan jumlah koperasi aktif terkecil (473 unit) setelah Gorontalo (416 unit) dan Irian (393 unit).

Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja koperasi adalah sisa hasil usaha (SHU). Seperti halnya profit

perusahaan, SHU sangat dipengaruhi oleh sisi permintaan (harga dan volume penjualan efektif) dan penawaran (biaya produksi). Jadi, SHU mencerminkan tingkat efisiensi yang berbanding lurus dengan tingkat produktivitas di koperasi. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor lain konstan, maka terdapat tiga relasi antara SHU dan ketiga variabel tersebut: (i) SHU – harga penjualan (positif); (ii) SHU – volume penjualan (positif); dan (iii) SHU – biaya produksi (negatif). Data yang ada menunjukkan bahwa korelasinya memang cenderung positif. Semakin rendah tingkat efisiensi atau tingkat produktivitas, *ceteris paribus*, semakin rendah volume produksi/kegiatan, semakin rendah SHU.

Dari kasus-kasus perkembangan koperasi di NM (seperti yang telah dibahas sebelumnya), salah satu kiat sukses koperasi adalah kondisi keuangan yang solid, dan salah satu sumbernya adalah modal investasi dari luar. Berdasarkan pemikiran ini, hipotesisnya adalah bahwa semakin besar porsi dari modal luar di dalam total modal usaha koperasi semakin besar volume kegiatan koperasi dan semakin besar SHU-nya, *ceteris paribus*. Di dalam studi ini, yang dilihat hanya modal luar dari koperasi aktif, dengan dasar pemikiran bahwa hanya koperasi aktif yang memerlukan banyak dana, termasuk modal luar. Namun demikian, data yang ada memberi kesan bahwa relasi tersebut cenderung tidak kuat. Hal ini mengidentifikasi bahwa masih banyak faktor lain yang mungkin lebih dominan daripada peran modal luar dalam mempengaruhi volume kegiatan koperasi.

Di dalam teori, seperti juga kasus-kasus perkembangan koperasi di NM, juga dikatakan bahwa manajemen dan organisasi yang baik juga merupakan faktor krusial dalam menentukan keberhasilan suatu koperasi. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur “kecanggihan” sistem manajemen dan organisasi yang diterapkan oleh koperasi adalah jumlah manajer dan karyawan. Semakin canggih sistem manajemen semakin banyak jumlah manajer (misalnya manajer keuangan dan manajer operasional) dan semakin besar organisasi semakin banyak jumlah karyawan. Dalam hubungannya dengan SHU, hipotesisnya adalah bahwa semakin bagus manajemen atau organisasi koperasi semakin besar SHU-nya. Namun hasil *mem-plot* data yang ada mengenai perubahan jumlah manajer dan karyawan dan data

mengenai perubahan SHU memberi kesan bahwa hubungan yang ada tidak sesuai perkiraan teorinya. Ini menandakan bahwa masih banyak faktor determinan lainnya bagi SHU.

Teori koperasi juga mengatakan bahwa sebuah koperasi yang baik kinerjanya akan menarik minat masyarakat atau produsen/petani menjadi anggotanya. Dalam kata lain, ada suatu korelasi positif antara jumlah koperasi yang maju atau koperasi aktif dan jumlah anggota. Sebaliknya, semakin banyak jumlah anggota dari suatu koperasi, dengan asumsi bahwa anggota juga aktif dan faktor-faktor lain konstan, semakin baik kinerja koperasi tersebut, yang dalam hal ini bisa diukur dengan jumlah SHU-nya. Maka dalam tingkat propinsi, semakin banyak anggota koperasi di suatu propinsi semakin besar SHU koperasi di propinsi tersebut. Namun demikian, data yang ada tidak membuktikan adanya hubungan tersebut.

Paling tidak ada dua alasan utama yang bisa menjelaskan kenapa hubungan-hubungan antar variabel seperti yang ditunjukkan oleh beberapa gambar di atas tidak sesuai dugaan teori. Pertama, untuk menguji hubungan-hubungan tersebut secara empiris (atau untuk menjawab apakah suatu variabel mempengaruhi variabel-variabel lain) harus dengan pendekatan multi-regresi yang menggunakan data deret waktu, yang sayangnya tidak ada. Kedua, dipercaya bahwa jumlah atau perubahan dari variabel-variabel seperti SHU, volume kegiatan, atau koperasi aktif dipengaruhi secara bersamaan oleh sejumlah faktor dalam suatu kombinasi tertentu yang kompleks, yang mana faktor-faktor penjelas tersebut bisa saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Konsukwensinya, hubungan antara, misalnya, SHU, dengan variabel-variabel penjelas tersebut secara individu tidak menunjukkan adanya suatu hubungan yang jelas atau teratur atau denganplu sesuai dugaan teorinya.

D. Mencari Bentuk Koperasi yang Sebenarnya

Dalam Undang-undang No. 25 Tahun 1992 yang mengatur tentang koperasi, hanya dikatakan bahwa koperasi adalah kumpulan orang-orang untuk melakukan usaha bersama. Untuk mendirikannya cukup hanya dengan minimal 20 orang anggota, tanpa memperinci lebih jauh mengenai kriteria orang-orang yang menjadi anggota-koperasi tersebut; padahal anggota-koperasi

adalah pemilik koperasi itu sendiri. Tanpa adanya kriteria keanggotaan yang jelas, maka dengan sendirinya kriteria koperasi (sebagai badan usaha yang berbadan hukum) juga menjadi tidak jelas.

Sekarang ini, hampir semua orang merasa bahwa mereka tahu apa-itu-koperasi; padahal yang mereka tahu hanyalah koperasi adalah badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh minimal 20 orang anggota, selain daripada itu mereka tidak tahu dan lebih fatal lagi “mereka tidak tahu dan juga tidak tahu bahwa mereka tidak tahu”. Memang dalam prakteknya demikian, siapa saja kalau jumlah mereka sudah mencapai (minimal) 20 Orang; sudah bisa mendirikan koperasi, tanpa memperinci lebih jauh siapa dan apa kriteria orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut.

Untuk mengetahui lebih jauh bahwa koperasi sebagai badan usaha yang berbadan hukum belum memiliki identitas keanggotaan yang jelas, dapat ditelusuri dengan cara membandingkannya dengan PT (Perseroan Terbatas) yaitu badan usaha yang juga sama-sama berbadan hukum.

PT adalah kumpulan modal, jadi pemilik PT itu adalah pemilik modalnya sendiri. Pemilik modal di PT ditentukan dalam lembaran-lembaran saham dan pemegang lembaran-lembaran saham tersebutlah pemiliknya; yang disebut dengan pemegang saham. Tanggung-jawab pemegang saham juga dijelaskan “terbatas hanya sebesar modal yang disetorkan” dan tidak lebih daripada itu. Pemegang-saham mendapat bahagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Pada dasarnya, pemegang saham adalah orang-orang yang ingin mencari keuntungan dalam bentuk uang atau setara uang; tanpa harus ikut bekerja dalam PT tersebut. Dengan uraian tersebut jelaslah bahwa PT adalah kumpulan-pemilik-modal yang ingin mencari keuntungan (kalau bisa keuntungan yang sebesar-besarnya).

Koperasi, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 25 1992 adalah kumpulan orang-orang, tidak dijelaskan kriteria orang-orang yang berkumpul tersebut; artinya siapa saja asalkan orang (tentunya yang sedang tidak dicabut hak hukumnya) dan memiliki KTP dan berjumlah minimal 20 orang, boleh mendirikan koperasi dan setelah me-lunasi simpanan pokok/wajib dalam

bentuk uang tunai “syahlah mereka menjadi anggota-koperasi”. Dengan ketentuan tersebut, seakan-akan syahnya seseorang menjadi anggota-koperasi setelah menyetorkan simpanan pokok/wajib; dalam hal ini akan timbul pertanyaan: *kalau begitu apa bedanya dengan PT?* Padahal sudah barang tentu: ada perbedaan yang prinsipil antara koperasi dan PT. Selama kriteria seseorang untuk menjadi anggota-koperasi tidak jelas, maka tidak mungkin bisa diharapkan koperasi akan eksis sebagai “soko guru ekonomi Indonesia”.

Seperti telah disinggung di halaman pertama dari makalah ini, koperasi pertama yang didirikan oleh Robert Owen, sebetulnya bukanlah koperasi buruh, akan tetapi koperasi konsumen yang kebetulan profesi para-anggotanya adalah buruh. Semenjak itu berdirilah koperasi-koperasi di berbagai negara eropah, dimana para anggotanya adalah: kelompok petani, kelompok peternak bahkan menurut ceritanya pabrik susu cap “bendera” atau “Frisian flag” adalah milik petani-sapi-perah yang diorganisir dalam bentuk koperasi. Dari gambaran tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa “koperasi adalah kumpulan pelaku-ekonomi-individual yang sejenis bidang kegiatannya, untuk melakukan usaha secara bersama; dalam rangka memaksimalisir penghasilan para anggotanya.

Dari gambaran tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa perbedaan antara koperasi dan PT, adalah mengenai siapa-pelaku-ekonominya. Pada PT, pelaku-ekonominya adalah manajemen organisasinya yaitu: PT itu sendiri; akan tetapi pada koperasi pelaku-ekonominya adalah anggotanya sendiri. Model organisasi & manajemen koperasi yang disebutkan diatas, bisa dibicarakan dilain kesempatan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, dapatlah dijawab pertanyaan berikut, yaitu: (1) apa koperasi itu, jawabannya: badan usaha yang berbadan hukum, dan (2) siapa koperasi itu? Jawabannya adalah himpunan- pelaku-ekonomi-sejenis. Jadi kalau kita berbicara koperasi, maka yang dimaksud adalah “kegiatan ekonomi para anggotanya.

Dari paparan singkat tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa koperasi adalah himpunan pelaku-ekonomi-individual sejenis yang dikelola secara profesional.

E. Prospek dan Tantangan

Bagaimana prospek koperasi Indonesia ke depan dan apa tantangan-tantangannya? Untuk menjawabnya, dua hal yang harus dilihat terlebih dahulu, yakni sejarah keberadaan koperasi dan fungsi yang dijalankan oleh koperasi yang ada di Indonesia selama ini. Dalam hal pertama itu, pertanyaannya adalah apakah lahirnya koperasi di Indonesia didorong oleh motivasi seperti yang terjadi di NM (khususnya di Eropa), yakni sebagai salah satu cara untuk menghadapi mekanisme pasar yang tidak bekerja sempurna. Dalam hal kedua tersebut, pertanyaannya adalah: apakah koperasi berfungsi seperti halnya di NM atau lebih sebagai “instrumen” pemerintah untuk tujuan-tujuan lain.

Menurut Rahardjo (2002), gagasan tentang koperasi telah dikenal di Indonesia sejak akhir abad 19, dengan dibentuknya organisasi swadaya (*self-help organization*) untuk menanggulangi kemiskinan di kalangan pegawai dan petani, oleh Patih Purwokerto dan Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Jadi, dapat dikatakan bahwa pengembangan koperasi selanjutnya yang meluas keseluruh pelosok tanah air lebih karena dorongan atau kebijakan pengembangan koperasi dari pemerintah, bukan sepenuhnya inisiatif swasta seperti di NM; walaupun di banyak daerah di Indonesia koperasi lahir oleh inisiatif sekelompok masyarakat.

Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat tiga pola pengembangan koperasi. Secara khusus pemerintah memerankan fungsi sebagai pengatur dan pengembang sekaligus (Soetrisno, 2003).

Menurut Rahardjo (2002), Bung Hatta sendiri mulai tertarik kepada sistem koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara "koperasi sosial" yang berdasarkan asas gotong royong, dengan "koperasi ekonomi" yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif. Bagi Bung Hatta, koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga *self-help* lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi.

Sedangkan, menurut Widiyanto (1998), sejak diperkenalkan koperasi di Indonesia pada awal abad 20, dan dalam perkembangannya hingga saat ini koperasi di Indonesia mempunyai makna ganda yang sebenarnya bersifat *ambivalent*, yakni koperasi sebagai badan usaha dan sekaligus juga sebagai jiwa dan semangat berusaha. Untuk pengertian yang pertama, koperasi sering dilihat sebagai salah satu bentuk usaha yang bisa bergerak seperti bentuk usaha lainnya yang dikenal di Indonesia seperti PT, CV, Firma, NV. Menurutnya, dalam kerangka seperti inilah, koperasi sepertinya diperkenankan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Karena pengertian inilah, pusat-pusat koperasi dan induk koperasi dibentuk dengan tujuan agar dapat memperkuat eksistensi koperasi primer. Contohnya adalah dibentuknya PUSKUD (Pusat Koperasi Unit Desa) dan INKUD (Induk Koperasi Unit Desa). Sedangkan dalam konteks makna kedua tersebut, usaha yang dilakukan koperasi disusun berdasarkan atas azas kebersamaan. Karena kebersamaannya ini, bentuk kepemilikan properti pada koperasi yang "konservatif" sering tidak diwujudkan dalam bentuk kepemilikan saham melainkan dalam wujud simpanan baik wajib maupun pokok dan sukarela, iuran, sumbangan dan bentuk lainnya. Konsekuensi dari bentuk kepemilikan seperti itu adalah sebutan kepemilikannya bukan sebagai pemegang saham melainkan sebagai anggota. Oleh

karenanya, koperasi sering dijadikan alat untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para anggotanya atau untuk kesejahteraan anggota.

Masih menurut Widiyanto (1998), secara bisnis, sebenarnya makna ganda koperasi ini cukup merepotkan. Karena koperasi diakui sebagai badan usaha, maka kiprah usaha koperasi mestinya harus seperti badan usaha lainnya. Dalam artian ini, sebagai sebuah badan usaha, koperasi mestinya mengejar profit sebesar-besarnya dengan langkah-langkah dan perhitungan bisnis seperti yang biasa dilakukan oleh perusahaan lainnya. Namun langkah bisnis ini sering "bertabrakan" dengan keinginan anggotanya yakni menyejahterakan anggota. Sehingga dalam konteks ini, penghitungan kelayakan usaha koperasi, jika hanya mengandalkan aspek liquiditas, solvabilitas dan rentabilitas usaha, menjadi tidak tepat.

Mungkin perbedaan yang paling besar antara koperasi di negara-negara lain, khususnya NM, dengan di Indonesia adalah bahwa keberadaan dan peran dari koperasi di Indonesia tidak lepas dari ideologi Pancasila dan UUD 45, yakni merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia untuk menjamin hak hidupnya memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang sepenuhnya merupakan hak setiap warga negara (Hariyono, 2003). Konsekuensinya, koperasi di Indonesia memiliki tanggung jawab sosial jauh lebih besar daripada tanggung jawab "bisnis" yang menekankan pada efisiensi, produktivitas, keuntungan dan daya saing, dan sangat dipengaruhi oleh politik negara atau intervensi pemerintah dibandingkan koperasi di NM.

Sementara itu, Soetrisno (2001) berpendapat bahwa ciri utama perkembangan koperasi di Indonesia adalah dengan pola penitipan kepada program yaitu: (i) program pembangunan secara sektoral seperti koperasi pertanian, koperasi desa, KUD; (ii) lembaga-lembaga pemerintah dalam koperasi pegawai negeri dan koperasi fungsional lainnya; dan (iii) perusahaan baik milik negara (BUMN) maupun swasta (BUMS) dalam koperasi karyawan. Sebagai akibatnya prakarsa masyarakat luas kurang

berkembang dan kalau ada tidak diberikan tempat semestinya. Menurutny, intervensi dari pemerintah yang terlalu besar sebagai salah satu penyebab utama lambatnya perkembangan koperasi di Indonesia. Selama ini koperasi dikembangkan dengan dukungan pemerintah dengan basis sektor-sektor primer dan distribusi yang memberikan lapangan kerja terbesar bagi penduduk Indonesia. Sebagai contoh sebagian besar KUD sebagai koperasi program di sektor pertanian didukung dengan program pembangunan untuk membangun KUD. Di sisi lain pemerintah memanfaatkan KUD untuk mendukung program pembangunan pertanian untuk swasembada beras seperti yang dilakukan selama pembangunan jangka panjang pertama (PJP I) pada era Orde Baru menjadi ciri yang menonjol dalam politik pembangunan koperasi. Bahkan koperasi secara eksplisit ditugasi melanjutkan program yang kurang berhasil ditangani langsung oleh pemerintah bahkan bank pemerintah, seperti penyaluran kredit ke petani lewat BIMAS menjadi koperasi unit tani (KUT), pola pengadaan beras pemerintah, sampai pada penciptaan monopoli baru (cengkeh). Sehingga nasib koperasi harus memikul beban kegagalan program, sementara koperasi yang berswadaya praktis tersisihkan dari perhatian berbagai kalangan termasuk para peneliti dan media masa.

Sedangkan dilihat dari strukturnya, organisasi koperasi di Indonesia mirip organisasi pemerintah/lembaga kemasyarakatan yang terstruktur dari primer sampai tingkat nasional. Hal ini telah menunjukkan kurangnya peran organisasi sekunder dalam membantu koperasi primer. Tidak jarang menjadi instrumen eksploitasi sumberdaya dari daerah pengumpulan. Menurut Soetrisno (2001), fenomena ini sekarang ini harus diubah karena adanya perubahan orientasi bisnis yang berkembang sejalan dengan proses globalisasi dan liberalisasi perdagangan dan ekonomi. Untuk mengubah arah ini hanya mampu dilakukan bila penataan mulai diletakkan pada daerah otonom.

Pandangan dari Soetrisno (2001) tersebut diatas juga didukung oleh Widiyanto (1998) yang mengatakan bahwa keberhasilan usaha koperasi di Indonesia biasanya bergantung pada dua hal. Pertama, program pemerintah karena koperasi sering dijadikan "kepanjangan" tangan pemerintah dalam

mengatur sendi perekonomian. Kedua, keinginan pemenuhan kebutuhan anggota; jadi koperasi koperasi seringkali dipakai sebagai alat pemenuhan kebutuhan anggota yang biasanya juga berkaitan dengan program yang telah dicanangkan pemerintah. Misalnya KUD. Dalam prakteknya, KUD sering kali merupakan institusi yang menyediakan faktor produksi bagi petani yang kuantitas dan kualitas faktor produksinya sangat bergantung pada program pemerintah.

Sebagai contoh, di sektor pertanian, dimana koperasi pertanian pernah menjadi model pengembangan pada tahun 1960an hingga awal 1970an. Pada dasarnya koperasi pertanian di Indonesia diperkenalkan sebagai bagian dari dukungan pemerintah terhadap sektor pertanian. Pada sub sektor pertanian tanaman pangan yang pernah disebut pertanian rakyat koperasi pertanian praktis menjadi instrumen pemerintah untuk menggerakkan pembangunan pertanian, terutama untuk mencapai swasembada beras. Hal serupa juga di ulang oleh pemerintah Orde Baru dengan mengaitkan dengan pembangunan desa dan tidak lagi terikat ketat dengan Departemen Pertanian seperti pada masa Orde Lama dan awal Orde Baru. Tugas koperasi pertanian ketika itu adalah menyalurkan sarana produksi pertanian terutama pupuk, membantu pemasaran yang kesemuanya berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian dan penggerakannya kepada koperasi selalu apabila gagal dilaksanakan sendiri atau langsung oleh pemerintah, contoh padi sentra, kredit BIMAS hingga distribusi pupuk (Soetrisno, 2003).

Hasil pengamatan Soetrisno (2003) menunjukkan bahwa koperasi pertanian yang digerakan melalui pengembangan kelompok tani setelah keluarnya Inpres 18/1998 mempunyai jumlah yang besar, namun praktis belum memiliki basis bisnis yang kuat dan mungkin sebagian sudah mulai tidak aktif lagi. Usaha mengembangkan koperasi baru di kalangan tani dan nelayan selalu berakhir kurang menggembirakan. Mereka yang berhasil jumlah terbatas dan belum dapat dikategorikan sebagai koperasi pertanian sebagai mana lazimnya koperasi pertanian di dunia atau bahkan oleh KUD-khusus pertanian yang ada.

Hasil penelitian Widiyanto (1998) menunjukkan bahwa jenis usaha yang sering menjadi andalan koperasi adalah susu, kredit usaha tani, penggilingan padi, pengadaan pupuk dan obat, simpan pinjam, pertokoan, jasa tagihan listrik atau air, dan tebu rakyat intensifikasi. Sedangkan jenis koperasi adalah KUD dan KOPPAS (Koperasi Pasar). Dalam beberapa penelitiannya, Widiyanto (1996, 1998) juga melakukan analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman) untuk mengidentifikasi faktor kunci sukses yang mungkin dimiliki koperasi, namun hanya dari faktor-faktor internal. Mengetahui faktor kunci sukses dari koperasi sangat penting untuk memberi informasi bagaimana sebenarnya profil keunggulan bersaing yang dimiliki koperasi relatif terhadap perusahaan-perusahaan non-koperasi. Hasilnya dapat dilihat di Tabel 6, dan kesimpulan dari Widiyanto adalah bahwa tidak banyak koperasi yang memiliki profil keunggulan bersaing, dan secara umum sebenarnya Widiyanto menemukan bahwa posisi bisnis koperasi cenderung pada posisi "dapat bertahan" ke "lemah" (Widiyanto, 1996).

Tabel 29. 6 Inventarisasi Kekuatan dan Kelemahan Faktor-faktor Internal Koperasi

No.	Faktor	Kekuatan	Kelemahan	Netral
1	<i>Captive market</i>	X		
2	Loyalitas	X		
3	Mentalitas			X
4	Legalitas	X		
5	Personalialia		X	
6	Dominasi kekuasaan		X	
7	Konflik misi		X	
8	Rantai distribusi		X	
9	Administrasi		X	

Dari pengamatannya sendiri, Rahardjo (2002) juga sependapat bahwa tidak baiknya perkembangan koperasi di Indonesia selama ini erat kaitannya dengan kebijakan "jajah" dan "fasilitas" khusus dari pemerintah, terutama di masa Orde Baru. Orang masuk koperasi bukan karena ingin bekerja sama dalam kegiatan produktif, melainkan karena ingin menikmati fasilitas

dan jatah dari Pemerintah. Menurutnya, sebenarnya koperasi adalah sebuah lembaga instrumen penghimpun dana masyarakat lewat tabungan, tapi dalam kenyataannya, koperasi selalu menadah dan mendapatkan dana dari pemerintah. Oleh karena itu, Rahardjo menegaskan bahwa untuk bisa berkembang dengan baik, koperasi perlu didukung oleh orang yang berpenghasilan di atas garis kemiskinan, orang yang bekerja (bukan penganggur) dan pengusaha yang produktif. Adanya penghasilan adalah prasyarat bagi perkembangan koperasi.

Hal ini sejalan dengan pandangan dari Djojohadikusumo (dalam Rahardjo, 2002) bahwa pengembangan koperasi di pedesaan perlu didahului dengan pembangunan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan penghasilan. Dari situlah koperasi dapat menghimpun tabungan. Pada gilirannya tabungan akan merupakan sumber permodalan. Dewasa ini penghimpunan modal lebih banyak dilakukan oleh lembaga perbankan.

Rahardjo (2002) juga mempertanyakan apakah yang menjadi kunci keberhasilan perkembangan koperasi di Indonesia adalah peran pemerintah ataukah sepenuhnya ditentukan oleh pasar. Memang sejak krisis ekonomi 1997/98, peran pemerintah telah menyusut. Bank Indonesia tidak lagi menyediakan kredit program melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI). Departemen Koperasi dan UKM telah direduksi perannya menjadi Kantor Menteri Negara. Bahkan Badan Pengembangan Koperasi dan UKM yang tadinya berfungsi operasional dan dibiayai dengan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) telah dihapus juga. Apakah ini berarti kehancuran bagi masa depan koperasi, atau, sebaliknya, menjadi suatu dorongan bagi kemandirian koperasi di Indonesia? Mengingat pengalaman peranan pemerintah di masa lalu yang melemahkan kemandirian koperasi, maka timbul pandangan bahwa koperasi justru akan bisa bangkit melalui mekanisme pasar.

Fajri (2007) berpendapat bahwa pengembangan koperasi di Indonesia selama ini barulah sebatas konsep yang indah, namun sangat sulit untuk diimplementasikan. Semakin banyak koperasi yang tumbuh semakin banyak pula yang tidak aktif. Bahkan ada koperasi yang memiliki badan hukum, namun kehadirannya tidak membawa manfaat sama sekali. Menurutnya,

koperasi tidak mungkin tumbuh dan berkembang dengan berpegang pada tata kelola yang tradisional dan tidak berorientasi pada pemuasan keperluan dan keinginan konsumen. Koperasi perlu diarahkan pada prinsip pengelolaan secara modern dan aplikatif terhadap perkembangan zaman yang semakin maju dan tantangan yang semakin global. Dari kemungkinan banyak faktor penyebab kurang baiknya perkembangan koperasi di Indonesia selama ini, Fajri menganggap bahwa salah satunya yang paling serius adalah masalah manajemen dan organisasi. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa koperasi di Indonesia perlu mencontoh implementasi *good corporate governance* (GCG) yang telah diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum perseroan. Prinsip GCG dalam beberapa hal dapat diimplementasikan pada koperasi. Untuk itu, regulator, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM perlu memperkenalkan secara maksimal suatu konsep GCG atau tata kelola koperasi yang baik. Lebih rincinya, Fajri menjelaskan bahwa konsep GCG sektor koperasi perlu dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjawab tantangan pengelolaan koperasi yang semakin kompleks. Implementasi GCG perlu diarahkan untuk membangun kultur dan kesadaran pihak-pihak dalam koperasi untuk senantiasa menyadari misi dan tanggung jawab sosialnya, *yaitu menyejahterakan anggotanya*. Fajri menjelaskan lebih lanjut bahwa dalam mengimplementasikan GCG, koperasi Indonesia perlu memastikan beberapa langkah strategis yang memadai dalam implementasi GCG. Pertama, koperasi perlu memastikan bahwa tujuan pendirian koperasi benar-benar untuk menyejahterakan anggotanya.

Pembangunan kesadaran akan tujuan perlu dijabarkan dalam visi, misi dan program kerja yang sesuai. Pembangunan kesadaran akan mencapai tujuan merupakan modal penting bagi pengelolaan koperasi secara profesional, amanah, dan akuntabel. Ketidakamanahan dari pengurus dan anggota akan membawa koperasi pada jurang kehancuran. Inilah yang harus diperkecil dengan implementasi GCG. Kedua, perbaikan secara menyeluruh. Kementerian Koperasi dan UKM perlu menyiapkan *blue print* pengelolaan koperasi secara efektif dan terencana. *Blue print* koperasi ini nantinya diharapkan akan menjadi panduan bagi seluruh koperasi Indonesia dalam menjalankan kegiatan

operasinya secara profesional, efektif dan efisien. Ketiga, membenahi kondisi internal koperasi. Praktik-praktik operasional yang tidak efisien dan mengandung kelemahan perlu dibenahi. Dominasi pengurus yang berlebihan dan tidak sesuai dengan proporsinya perlu dibatasi dengan adanya peraturan yang menutup celah penyimpangan koperasi.

Seperti yang diberitakan di Tempo Interaktif (Minggu, 18 Maret 2007), Ketua Dewan Koperasi Indonesia Adi Sasono menilai pertumbuhan anggota koperasi simpan-pinjam di Indonesia masih rendah. Hal itu terlihat pada kecilnya tingkat keanggotaan koperasi yang hanya 20% dari 150 juta penduduk dewasa Indonesia. Adi menjelaskan bahwa rendahnya pertumbuhan anggota koperasi di Indonesia karena koperasi belum berperan sebagai penggerak roda ekonomi nasional. Masyarakat juga belum memandang koperasi sebagai tempat simpan dan pinjam serta mengembangkan UKM. Menurutnya, orang masih mengandalkan perusahaan besar sebagai kesempatan kerja dibanding membuat usaha sendiri yang bisa membuka peluang kerja untuk orang lain. Adi menegaskan bahwa ke depan, jika koperasi ingin tetap hidup dan bahkan berkembang di tengah-tengah ekonomi yang semakin dikuasai oleh unit-unit bisnis moderen, koperasi harus meningkatkan standar pelayanan dan melakukan audit secara berkala, supaya peran koperasi dalam meningkatkan roda ekonomi meningkat. Ia mengatakan bahwa koperasi jangan hanya mengandalkan bantuan pemerintah saja, tapi juga harus mampu menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi aktif.

Berdasarkan data resmi seperti yang ditunjukkan di atas, jumlah unit koperasi di Indonesia meningkat terus; sama seperti jumlah UKM juga bertambah terus setiap tahun. Ini aspek kuantitasnya, sedangkan kualitas dari pertumbuhannya selalu menjadi bahan perdebatan karena tidak jarang koperasi dimanfaatkan di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap PDB, ekspor, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.

Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu upaya-upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia usaha yang berubah mengikuti proses globalisasi dan hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara (termasuk dengan Indonesia) yang cenderung semakin liberal.

Apakah lembaga yang namanya koperasi bisa *survive* atau bisa bersaing di era globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia? Apakah koperasi masih relevan atau masih dibutuhkan masyarakat, khususnya pelaku bisnis dalam era modern sekarang ini? Jawabnya: ya. Buktinya bisa dilihat di banyak NM. Seperti telah dibahas sebelumnya mengenai perkembangan koperasi di NM, di Belanda, misalnya, Rabbo Bank adalah bank milik koperasi, yang pada awal dekade 20-an merupakan bank ketiga terbesar dan konon bank ke 13 terbesar di dunia. Di banyak NM koperasi juga sudah menjadi bagian dari sistem perekonomian. Ternyata koperasi bisa bersaing dalam sistem pasar bebas, walaupun menerapkan asas kerja sama daripada persaingan. Di AS, 90% lebih distribusi listrik desa dikuasai oleh koperasi. Di Kanada, koperasi pertanian mendirikan industri pupuk dan pengeboran minyak bumi. Di negara-negara Skandinavia, koperasi menjadi soko guru perekonomian. Di Jerman, bank koperasi Raifaissen sangat maju dan penting perannya, dengan kantor-kantor cabangnya di kota maupun desa. Dan banyak lagi contoh lain.

Di NM koperasi lahir dan tetap ada karena satu hal, yakni adanya distorsi pasar yang membuat sekelompok petani atau produsen kecil secara individu tidak akan mampu menembus atau bermain di pasar secara optimal. Oleh karena itu, mereka melakukan suatu kerjasama yang dilembagakan secara resmi dalam bentuk suatu koperasi. Demikian juga lahirnya koperasi simpan pinjam atau kredit. Karena banyak masyarakat tidak mampu mendapatkan pinjaman dari bank komersial konvensional, maka koperasi kredit menjadi suatu alternatif. Jadi, di NM, koperasi produsen, misalnya, adalah suatu cara bagi sekelompok produsen untuk bisa *survive* di dalam persaingan pasar, bukan untuk menggantikan sistem pasar yang berlaku. Selama ada distorsi pasar, selama ada kelompok produsen atau

petani lemah atau masyarakat yang "termarjinalisasi", koperasi akan tetap ada.

Esensi globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang sedang berlangsung saat ini dan yang akan semakin pesat di masa depan adalah semakin menghilangnya segala macam hambatan terhadap kegiatan ekonomi antar negara dan perdagangan internasional. Melihat perkembangan ini, prospek koperasi Indonesia ke depan sangat tergantung pada dampak dari proses tersebut terhadap sektor bersangkutan. Oleh karena itu, prospek koperasi harus dilihat berbeda menurut sektor. Selain itu, dalam menganalisisnya, koperasi Indonesia perlu dikelompokkan ke dalam ketiga kelompok atas dasar jenis koperasi. Pengelompokan itu meliputi pembedaan atas dasar: (i) koperasi produsen atau koperasi yang bergerak di bidang produksi, (ii) koperasi konsumen atau koperasi konsumsi, dan (iii) koperasi kredit dan jasa keuangan.

Koperasi produsen terutama koperasi pertanian memang merupakan koperasi yang paling sangat terkena pengaruh dari globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan dunia. Sektor pertanian, yang berarti juga koperasi di dalamnya, di seluruh belahan dunia ini memang selama ini menikmati proteksi dan berbagai bentuk subsidi serta dukungan pemerintah. Dengan diadakannya pengaturan mengenai subsidi, tarif, dan akses pasar, maka sektor ini semakin terbuka dan bebas, dan kebijakan perencanaan pertanian yang kaku dan terfokus akan (sudah mulai) dihapuskan. Sehingga pengekan program pembangunan pertanian dari pemerintah tidak mungkin lagi dijalankan secara bebas, tetapi hanya dapat dilakukan secara lokal dan harus sesuai dengan potensi lokal. Konsukwensinya, produksi yang dihasilkan oleh anggota koperasi pertanian tidak lagi dapat menikmati perlindungan seperti semula, dan harus dibuka untuk pasaran impor dari negara lain yang lebih efisien.

Khusus untuk koperasi-koperasi pertanian yang selama ini menangani komoditi sebagai pengganti impor atau ditutup dari persaingan impor jelas hal ini akan merupakan pukulan berat dan akan menurunkan pangsa di pasar domestik kecuali ada upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas dan daya saing. Sementara untuk koperasi yang menghasilkan barang pertanian

untuk ekspor seperti minyak sawit, kopi, dan rempah serta produksi pertanian dan perikanan maupun peternakan lainnya, jelas perdagangan bebas merupakan peluang emas. Karena berbagai kebebasan tersebut berarti membuka peluang pasar yang baru. Dengan demikian akan memperluas pasar yang pada gilirannya akan merupakan peluang untuk peningkatan produksi dan usaha bagi koperasi yang bersangkutan. Namun demikian, kemampuan koperasi-koperasi pertanian Indonesia untuk memanfaatkan peluang pasar ekspor tersebut sangat tergantung pada upaya-upaya mereka meningkatkan efisiensi, produktivitas dan daya saing dari produk-produk yang dihasilkan.

Menurut Soetrisno (2003), dengan perubahan tersebut, prinsip pengembangan pertanian akan lebih bersifat insentif driven ketimbang program driven seperti dimasa lalu. Dengan demikian corak koperasi pertanian akan terbuka tetapi untuk menjamin kelangsungan hidupnya akan terbatas pada sektor selektif yang memenuhi persyaratan tumbuhnya koperasi. Olehnya, perkembangan koperasi pertanian ke depan digambarkan sebagai "restrukturisasi" koperasi yang ada dengan fokus pada basis penguatan ekonomi untuk mendukung pelayanan pertanian skala kecil. Oleh karena itu konsentrasi ciri umum koperasi pertanian di masa depan adalah koperasi kredit pedesaan, yang menekankan pada kegiatan jasa keuangan dan simpan pinjam sebagai ciri umum. Pada saat ini saja hampir di semua KUD, unit simpan pinjam telah menjadi motor untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi. Sementara kegiatan pengadaan sarana produksi dan pemasaran hasil menjadi sangat selektif. Hal ini terkait dengan struktur pertanian dan pasar produk pertanian yang semakin kompetitif, termasuk jasa pendukung pertanian (jasa penggilingan dan pelayanan lainnya) yang membatasi insentif berkoperasi.

Di banyak NM, strategi yang dilakukan oleh koperasi-koperasi pertanian untuk bisa bersaing adalah antara lain dengan melakukan penggabungan, akuisisi, atau kerjasama dalam bentuk *joint ventures* dan aliansi strategis, tidak hanya antar koperasi tetapi juga dengan perusahaan-perusahaan non-koperasi. Di AS, pertumbuhan koperasi pertanian mencapai puncaknya pada tahun 1930 yang jumlahnya mencapai 12 ribu unit, dan setelah itu merosot. Namun pada tahun 1940an menghadapi perubahan

pasar, teknologi dsb.nya, koperasi pertanian di AS memasuki fase konsolidasi dan suatu reorganisasi besar dalam tubu koperasi yang terus berlangsung hingga saat ini. Bergabung, konsolidasi, dan ekspansi dari koperasi-koperasi regional di AS seperti juga di NM sudah umum. Juga mereka semakin *diversified* dan terintegrasi secara vertikal dengan pasar internasional. Banyak koperasi-koperasi pertanian di AS yang menjadi lebih kuat setelah konsolidasi saat ini berperan penting di dalam perdagangan internasional. Banyak juga koperasi-koperasi pertanian AS dalam upaya mereka untuk bisa *survive* atau bisa terus berkembang mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan nilai tambah tinggi.

Saat ini koperasi-koperasi pertanian di NM juga menerapkan teknologi informasi, terutama untuk manajemen operasi dan komunikasi elektronik dengan pembeli dan pemasok. Banyak koperasi pertanian modern memasarkan produk-produk mereka yang bernilai tambah tinggi: komoditi-komoditi dari para anggota (petani) diproduksi, diproses lebih lanjut, di bungkus sedemikian rupa hingga bisa dijual dengan harga tinggi (Vandenburg dkk., 2000).

Di sektor lain, misalnya keuangan, kegiatan koperasi kredit di Indonesia, baik secara teoritis maupun empiris, terbukti selama ini mempunyai kemampuan untuk membangun segmentasi pasar yang kuat sebagai akibat struktur pasar keuangan di dalam negeri yang sangat tidak sempurna, terutama jika menyangkut masalah informasi. Bagi koperasi kredit Indonesia, keterbukaan perdagangan dan aliran modal yang keluar masuk akan merupakan kehadiran pesaing baru terhadap pasar keuangan, namun tetap tidak dapat menjangkau para anggota koperasi. Apabila koperasi kredit mempunyai jaringan yang luas dan menutup usahanya hanya untuk pelayanan anggota saja, maka segmentasi ini akan sulit untuk ditembus pesaing baru. Bagi koperasi-koperasi kredit di Indonesia, adanya globalisasi ekonomi dunia akan merupakan peluang untuk mengadakan kerjasama dengan koperasi kredit di negara-negara lain, khususnya NM, dalam membangun sistem perkreditan melalui koperasi. Menurut Soetrisno (2003), koperasi kredit atau simpan pinjam di masa mendatang akan menjadi pilar kekuatan sekitar

koperasi yang perlu diikuti oleh dukungan lainnya seperti sistem pengawasan dan jaminan.

Menurut teori dari Rutten (2002) mengenai inovasi lembaga menjelaskan bahwa lembaga seperti koperasi di dunia, khususnya di NM, tidak statis tetapi terus berubah sebagai respons terhadap perubahan-perubahan teknologi, kondisi-kondisi budaya, ekonomi dan sosial, sumber-sumber daya, pasar, dll. Sebagai contoh, Rutten menunjukkan bahwa saat ini "transaksi perdagangan hanya dengan uang" tidak lagi merupakan prinsip dari koperasi seperti pada awal lahirnya koperasi (sekitar tahun 1840an di Eropa). Hal ini disebabkan oleh pasar keuangan yang telah sangat maju sehingga prinsip tersebut tidak relevan lagi; bahkan bisa kontra-produktif.

Hasil penelitian dari Braverman dkk. (1991) yang membandingkan koperasi pertanian di Belanda dan di Afrika Sub-Sahara (SS) menyimpulkan bahwa kelemahan koperasi di NSB pada umumnya dan di Afrika SS pada khususnya disebabkan oleh sejumlah hambatan eksternal dan internal. Ada tiga hambatan eksternal utama, yakni sebagai berikut. Pertama, keterlibatan pemerintah yang berlebihan (yang sering kali karena desakan pihak donor). Kedua, terlalu banyak yang diharapkan dari koperasi atau terlalu banyak fungsi yang dibebankan kepada koperasi melebihi fungsi atau tujuan koperasi sebenarnya. Di Belanda, tujuan koperasi pertanian yang untuk menandingi monopoli pasar, baik di pasar output maupun pasar input. Mereka sama sekali tidak bermaksud mempengaruhi kebijakan pertanian (ini urusan asosiasi petani) atau bukan bertujuan untuk pemerataan atau keadilan sosial dan sebagainya. Jadi, berdirinya koperasi petani di Belanda murni bisnis. Sedangkan koperasi di NSB, seperti halnya di Indonesia, digunakan secara eksplisit sebagai salah satu instrumen pembangunan yang bertujuan pada pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Ketiga, kondisi yang tidak kondusif, seperti distorsi pasar, kebijakan ekonomi seperti misalnya kebijakan proteksi yang anti-pertanian, dan sebagainya. Sedangkan, hambatan internal adalah termasuk keterbatasan anggota atau partisipasi anggota, isu-isu struktural, perbedaan antara kepentingan individu dan kolektif, dan lemahnya manajemen.

Berdasarkan penemuan mereka tersebut, Braverman dkk (1991) menyimpulkan bahwa masa depan koperasi di NSB, khususnya di Afrika Selatan, sangat tergantung pada peran atau fungsi yang dijalankan oleh koperasi. Menurut mereka, koperasi tidak bisa diharapkan memberikan suatu solusi kelembagaan universal di dalam suatu lingkungan dimana pemain-pemain lain, yakni perusahaan-perusahaan swasta non-koperasi atau lembaga-lembaga semi publik, juga tidak bisa *survive*. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Pohlmeier (1990) yang juga meneliti perkembangan koperasi di Afrika. Ia menegaskan bahwa Koperasi tidak bisa memberikan pelayanan-pelayanan sosial, paling tidak tidak sebelum koperasi berhasil dalam pelayanan-pelayanan ekonomi.

Braverman dkk (1991) juga menegaskan bahwa jika koperasi diterima bahwa koperasi-koperasi harus terlibat di dalam kegiatan-kegiatan dengan konsumwensi-konsumwensi yang positif dan berkelanjutan bagi anggota-anggota, maka agen-agen eksternal seperti pemerintah atau donor tidak boleh mendukung mereka terkecuali koperasi-koperasi tersebut punya suatu peluang yang lumayan untuk menjadi unit-unit bisnis yang mandiri. Jika tidak, koperasi-koperasi akan tergantung sepenuhnya pada bantuan-bantuan dari pemerintah dan donor.

BAB XXX

KEWIRAUSAHAAN KOPERASI DAN PERAN KEWIRAUSAHAAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

A. Pendahuluan

Dalam usaha pemulihan krisis ekonomi Indonesia dewasa ini, sesungguhnya koperasi mendapatkan peluang (*opportunity*) untuk tampil lebih eksis. Krisis ekonomi yang diawali dengan krisis nilai tukar dan kemudian membawa krisis hutang luar negeri, telah membuka mata semua pemerhati ekonomi bahwa "fundamental ekonomi" yang semula diyakini kesahihannya, ternyata hancur lebur.

Para pengusaha besar konglomerat dan industri manufaktur yang selama ini diagung-agungkan membawa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada rata-rata 7% pertahun, ternyata hanya merupakan wacana. Sebab, ternyata kebesaran mereka hanya ditopang oleh hutang luar negeri sebagai hasil perkoncoan dan praktik *mark-up* ekuitas, dan tidak karena variabel *endogenous* (yang tumbuh dari dalam) (Manurung, 2000).

Setelah dicanangkan oleh pendiri negara kita, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang cocok dengan spirit masyarakatnya, yaitu azas kekeluargaan. Bahkan disebutkan oleh Hadhikusuma (2000) kekeluargaan adalah azas yang memang sesuai dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan telah berurat akar dalam jiwa bangsa Indonesia. Namun sampai saat ini dalam kenyataannya peran koperasi untuk berkontribusi dalam perekonomian Indonesia belum mencapai taraf signifikan. Banyaknya masalah yang menghambat perkembangan koperasi di Indonesia menjadi problematik yang secara umum masih dihadapi.

Pencapaian misi mulia koperasi pada umumnya masih jauh dan idealisme semula. Koperasi yang seharusnya mempunyai

amanah luhur, yaitu membantu pemerintah untuk mewujudkan keadilan ekonomi dan sosial, belum dapat menjalani peranannya secara maksimal. Membangun koperasi menuju kepada peranan dan kedudukannya yang diharapkan merupakan hal yang sangat sulit, walau bukan merupakan hal yang tidak mungkin.

Oleh karena itu, tulisan ini tetap pada satu titik keyakinan, bahwa seburuk apapun keadaan koperasi saat ini, kalau semua komponen bergerak bersama, tentunya ada titik terang yang diharapkan muncul. Juga diharapkan mampu menjadi pencerahan bagi kita semua, tentang bagaimana koperasi dikembalikan kepada cita-cita para pendiri bangsa ini, menjadikan kegiatan ekonomi menjadi milik semua rakyat. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi yang merembet pada kesenjangan sosial dan penyakit-penyakit masyarakat lainnya dapat dikurangi (Nuhung, 2002).

Citra koperasi di masyarakat saat ini identik dengan badan usaha marginal, yang hanya bisa hidup bila mendapat bantuan dari pemerintah. Hal ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena banyak koperasi yang bisa menjalankan usahanya tanpa bantuan pemerintah. Tantangan koperasi ke depan sebagai badan usaha adalah harus mampu bersaing secara sehat sesuai etika dan norma bisnis yang berlaku.

Pendapat mengenai keberadaan unit usaha koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia, adalah: *Pertama* adalah yang mengutarakan perlunya mengkaji ulang apakah koperasi masih perlu dipertahankan keberadaannya dalam kegiatan ekonomi. Secara implisit pendapat ini menghendaki agar kita tidak perlu mempertahankan koperasi sebagai unit usaha ekonomi. Pendapat ini mewakili pemikiran kanan baru (*new-right*) yang tidak begitu mempermasalahkan konsentrasi ekonomi di kalangan segelintir orang dalam masyarakat dan tidak menghendaki adanya pertanda pandangan populis di dalam masyarakat. *Kedua*, adalah pendapat yang memandang bahwa unit usaha koperasi dipandang perlu untuk dipertahankan sekadar untuk tidak dianggap menyeleweng dari UUD 1945. Pendapat inilah yang selama ini hidup dalam pemikiran para birokrat pemerintahan. *Ketiga*, adalah pendapat yang menganggap bahwa koperasi sebagai organisasi ekonomi rakyat yang harus dikembangkan menjadi unit usaha yang kukuh

dalam rangka proses demokratisasi ekonomi. Pendapat ini mendasarkan pada semangat dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang ingin mengubah hubungan dialektik ekonomi, dari dialektik kolonial pada jaman penjajahan kepada dialektik hubungan ekonomi yang menjadikan rakyat sebagai kekuatan ekonomi (Sritua, 1997).

Tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan Usaha Kecil Menengah, mencakup aspek yang luas, antara lain : peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, organisasi dan teknologi, kompetensi kewirausahaan, akses yang lebih luas terhadap permodalan, informasi pasar yang transparan, faktor input produksi lainnya, dan iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat (Haeruman, 2000).

B. Permasalahan Koperasi

Untuk mampu bertahan di era globalisasi tentunya koperasi harus instropeksi atas kondisi yang ada pada dirinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa hanya dengan mengenal jati diri koperasi secara benar maka kemungkinan bersaing dengan badan usaha lain akan terbuka. Jelas bahwa ditinjau dari sudut bentuk organisasinya, maka organisasi koperasi adalah SHO (*self-help* organisasi).

Intinya koperasi adalah badan usaha yang otonom. Problemnya adalah otonomi koperasi sejauh ini menjadi tanda tanya besar. Karena bantuan pemerintah yang begitu besar menjadikan otonomi koperasi sulit terwujud. Dalam dataran konsepsional otonomi koperasi juga mengandung implikasi bahwa badan usaha koperasi seharusnya lepas dari lembaga pemerintah, artinya organisasi koperasi bukan merupakan lembaga yang dilihat dari fungsinya adalah alat administrasi langsung dari pemerintah, yang mewujudkan tujuan-tujuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh pemerintah (Rozi dan Hendri, 1997).

Masalah mutu sumberdaya manusia pada berbagai perangkat organisasi koperasi menjadi masalah yang menonjol dan mendapat sorotan. Subyakto (1996) mempunyai pandangan bahwa, kendala yang sangat mendasar dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil adalah masalah sumberdaya manusia.

Pengurus dan karyawan secara bersama-sama ataupun saling menggantikan menjadi pelaku organisasi yang aktif, dan menjadi *front line staff* dalam melayani anggota koperasi.

Keadaan saling menggantikan seperti itu, banyak terjadi dalam praktik manajemen koperasi di Indonesia. Kinerja *front line staff* memiliki dampak terhadap kepuasan pihak-pihak yang memiliki kaitan dengan pengembangan koperasi, antara lain adalah anggota sebagai pemilik dan pemanfaat, pemerintah sebagai pembina serta pihak mitra bisnis yang berperan sebagai pemasok, distributor, produsen, penyandang dana dan lain sebagainya.

C. Manajemen Koperasi

Koperasi merupakan lembaga yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Di dalam sebuah lembaga bisnis diperlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien yang dikenal dengan manajemen. Demikian juga dalam badan usaha koperasi, manajemen merupakan satu hak yang harus ada demi terwujudnya tujuan yang diharapkan.

Prof. Ewell Paul Roy mengatakan bahwa manajemen koperasi melibatkan empat unsur yaitu: anggota, pengurus, manajer, dan karyawan. Seorang manajer harus bisa menciptakan kondisi yang mendorong para karyawan agar mempertahankan produktivitas yang tinggi. Karyawan merupakan penghubung antara manajemen dan anggota pelanggan (Hendrojogi, 1997).

Menurut Suharsono Sagir, sistem manajemen di lembaga koperasi harus mengarah kepada manajemen partisipatif yang di dalamnya terdapat kebersamaan, keterbukaan, sehingga setiap anggota koperasi baik yang turut dalam pengelolaan (kepengurusan usaha) ataupun yang di luar kepengurusan (anggota biasa), memiliki rasa tanggung jawab bersama dalam organisasi koperasi (Anoraga dan Widiyanti, 1992).

A.H. Gopnar mengatakan bahwa manajemen koperasi pada dasarnya dapat ditelaah dan tiga sudut pandang, yaitu organisasi, proses, dan gaya (Hendar dan Kusnadi, 1999). Dari sudut pandang *organisasi*, manajemen koperasi pada prinsipnya terbentuk dan tiga unsur: anggota, pengurus, dan karyawan. Dapat dibedakan struktur atau alat perlengkapan organisasi yang sepintas adalah sama yaitu: rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Untuk itu,

hendaknya dibedakan antara fungsi organisasi dengan fungsi manajemen. Unsur pengawas seperti yang terdapat pada alat perlengkapan organisasi koperasi, pada hakekatnya adalah merupakan perpanjangan tangan dan anggota, untuk mendampingi pengurus dalam melakukan fungsi kontrol sehari-hari terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Keberhasilan koperasi tergantung pada kerjasama ketiga unsur organisasi tersebut dalam mengembangkan organisasi dan usaha koperasi, yang dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada anggota. Dan sudut pandang proses, manajemen koperasi lebih mengutamakan demokrasi dalam pengambilan keputusan. Istilah satu orang satu suara (*one man one vote*) sudah mendarah daging dalam organisasi koperasi. Karena itu, manajemen koperasi ini sering dipandang kurang efisien, kurang efektif, dan sangat mahal. Terakhir, ditinjau dan sudut pandang gaya manajemen (*management style*), manajemen koperasi menganut gaya partisipatif (*participation management*), di mana posisi anggota ditempatkan sebagai subjek dan manajemen yang aktif dalam mengendalikan manajemen perusahaannya.

Sitio dan Tamba (2001) menyatakan badan usaha koperasi di Indonesia memiliki manajemen koperasi yang dirunut berdasarkan perangkat organisasi koperasi, yaitu: rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola. Telah diuraikan sebelumnya bahwa, watak manajemen koperasi ialah gaya manajemen partisipatif. Pola umum manajemen koperasi yang partisipatif tersebut menggambarkan adanya interaksi antar unsur manajemen koperasi. Terdapat pembagian tugas (*job description*) pada masing-masing unsur. Demikian pula setiap unsur manajemen mempunyai lingkup keputusan (*decision area*) yang berbeda, kendatipun masih ada lingkup keputusan yang dilakukan secara bersama (*shared decision areas*).

Adapun lingkup keputusan masing-masing unsur manajemen koperasi adalah sebagai berikut (Sitio dan Tamba, 2001):

1. *Rapat Anggota* merupakan pemegang kuasa tertinggi dalam menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Kebijakan yang sifatnya sangat strategis dirumuskan dan

ditetapkan pada forum Rapat Anggota. Umumnya, rapat anggota diselenggarakan sekali setahun.

2. Pengurus dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Dengan demikian, pengurus dapat dikatakan sebagai pemegang kuasa rapat anggota dalam mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan strategis yang ditetapkan rapat anggota. Penguruslah yang mewujudkan arah kebijakan strategis yang menyangkut organisasi maupun usaha.
3. *Pengawas* mewakili anggota untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh Pengurus. Pengawas dipilih dan diberhentikan oleh rapat anggota. Oleh sebab itu, dalam struktur organisasi koperasi, posisi pengawas dan pengurus adalah sama.
4. Pengelola adalah tim manajemen yang diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, untuk melaksanakan teknis operasional di bidang usaha. Hubungan pengelola usaha (*managing director*) dengan pengurus koperasi adalah hubungan kerja atas dasar perikatan dalam bentuk perjanjian atau kontrak kerja.

D. Kewirausahaan Koperasi

Secara definitif seorang wirausahawan termasuk wirausahawan koperasi adalah orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan darinya dan mengambil tindakan yang tepat guna memastikan sukses (Meredith, *et al*, 1984).

Para wirausahawan koperasi adalah orang yang mempunyai sikap mental positif yang berorientasi pada tindakan dan mempunyai motivasi tinggi dalam mengambil risiko pada saat mengejar tujuannya. Tetapi mereka juga orang-orang yang cermat dan penuh perhitungan dalam mengambil keputusan tentang sesuatu yang hendak dikerjakan, Setiap mengambil keputusan tidak didasarkan pada metode coba-coba, melainkan dipelajari setiap peluang bisnis dengan mengumpulkan informasi-informasi yang berharga bagi keputusan yang hendak dibuat.

Selanjutnya menurut Meredith (1984) para wirausahawan (termasuk wirausahawan koperasi) mempunyai ciri dan watak yang berlainan dengan individu kebanyakan. Ciri-ciri dan watak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Mempunyai kepercayaan yang kuat pada diri sendiri.
2. Berorientasi pada tugas dan hasil yang didorong oleh keuletakan untuk berprestasi, berorientasi pada keuntungan, mempunyai ketekunan dan ketabahan, mempunyai tekad kerja keras, dan mempunyai energi inisiatif.
3. Mempunyai kemampuan dalam mengambil risiko dan mengambil keputusan secara cepat dan cermat.
4. Mempunyai jiwa kepemimpinan, suka bergaul dan suka menanggapi saran-saran dan kritik.
5. Berjiwa inovatif, kreatif dan tekun.
6. Berorientasi ke masa depan.

Kewirausahaan koperasi adalah suatu sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif dengan mengambil prakarsa inovatif serta keberanian mengambil risiko dan berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi dalam mewujudkan terpenuhinya kebutuhan nyata serta peningkatan kesejahteraan bersama (Hendar dan Kusnadi, 1999). Dari definisi tersebut terkandung beberapa unsur yang patut diperhatikan seperti penjelasan di bawah ini.

Kewirausahaan koperasi merupakan sikap mental positif dalam berusaha secara koperatif. Ini berarti wirausahawan koperasi (orang yang melaksanakan kewirausahaan koperasi) harus mempunyai keinginan untuk memajukan organisasi koperasi, baik itu usaha koperasi maupun usaha anggotanya. Usaha itu harus dilakukan secara koperatif dalam arti setiap kegiatan usaha koperasi harus mementingkan kebutuhan anggotanya.

Tugas utama wirausahawan koperasi adalah mengambil prakarsa inovatif, artinya berusaha mencari, menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada demi kepentingan bersama (Drucker, 1988). Bertindak inovatif tidak hanya dilakukan ada saat memulai usaha tetapi juga pada saat usaha itu berjalan, bahkan pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran.

Pada saat memulai usaha agar koperasi dapat tumbuh dengan cepat dan menghasilkan. Kemudian pada saat usaha koperasi berjalan, agar koperasi paling tidak dapat mempertahankan eksistensi usaha koperasi yang sudah berjalan dengan lancar. Perihal yang lebih penting adalah tindakan inovatif pada saat usaha koperasi berada dalam kemunduran (stagnasi).

Pada saat itu wirausahawan koperasi diperlukan agar koperasi berada pada siklus hidup yang baru. Wirausahawan koperasi harus mempunyai keberanian mengambil risiko. Karena dunia penuh dengan ketidakpastian, sehingga hal-hal yang diharapkan kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam menghadapi situasi semacam itu diperlukan seorang wirausaha yang mempunyai kemampuan mengambil risiko. Tentu saja pengambilan risiko ini dilakukan dengan perhitungan-perhitungan yang cermat.

Pada koperasi risiko-risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian sedikit berkurang oleh orientasi usahanya yang lebih banyak di pasar internal. Pasar internal memungkinkan setiap usaha menjadi beban koperasi dan anggotanya karena koperasi adalah milik anggota. Oleh karena itu secara nalar tidak mungkin anggota merugikan koperasinya. Kalaupun terjadi kerugian dalam kegiatan operasional, maka risiko tersebut akan ditanggung bersama-sama, sehingga risiko per anggota menjadi relatif kecil.

Tetapi bila orientasi usaha koperasi lebih banyak ke pasar eksternal seperti KUD, maka risiko yang ditimbulkan oleh ketidakpastian akan mempunyai bobot yang sama dengan risiko yang dihadapi oleh pesaingnya. Dalam kondisi ini tugas wirausaha koperasi lebih berat dibanding dengan wirausaha koperasi yang lebih banyak orientasinya di pasar internal.

Kegiatan wirausahawan koperasi harus berpegang teguh pada prinsip identitas koperasi, yaitu anggota sebagai pemilik dan, sekaligus sebagai pelanggan. Kepentingan anggota harus diutamakan agar anggota mau berpartisipasi aktif terhadap koperasi. Karena itu wirausaha koperasi bertugas meningkatkan pelayanan dengan jalan menyediakan berbagai kebutuhan anggotanya.

Tujuan utama setiap wirausaha koperasi adalah memenuhi kebutuhan nyata anggota koperasi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Tugas seorang wirausaha koperasi sebenarnya cukup berat karena banyak pihak yang berkepentingan di lingkungan koperasi, seperti anggota, perusahaan koperasi, karyawan, masyarakat di sekitarnya, dan lain-lain. Seorang wirausaha koperasi terkadang dihadapkan pada masalah konflik kepentingan di antara masing-masing pihak. Bila ia lebih mementingkan usaha koperasi, otomatis ia harus berorientasi di pasar eksternal dan hal ini berarti mengurangi nilai pelayanan terhadap anggota. Sebaliknya bila orientasinya di pasar internal dengan mengutamakan kepentingan anggota, maka yang menjadi korban adalah pertumbuhan koperasi.

Kewirausahaan dalam koperasi dapat dilakukan oleh anggota, manajer, birokrat yang berperan dalam pembangunan koperasi dan katalis, yaitu orang yang peduli terhadap pengembangan koperasi. Keempat jenis wirausaha koperasi ini tentunya mempunyai kebebasan bertindak dan insentif yang berbeda-beda yang selanjutnya menentukan tingkat efektivitas yang berbeda-beda pula.

E. Pembangunan Ekonomi dan Kewirausahaan

Pertumbuhan dan perkembangan suatu bangsa tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi atau kestabilan politik bangsa itu sendiri, melainkan sebagian besar terletak pada bagaimana kemampuan dan kemauan serta semangat sumber daya manusianya sebagai aset utama dan terbesar dalam mengembangkan potensi bangsa. Semua sadar bahwa mereka yang hidup pada masa sekarang selalu menginginkan kehidupan yang lebih baik dari hari kemarin. Padahal kehidupan masa sekarang adalah merupakan hari kemarin bagi mereka yang hidup di masa yang akan datang. Keadaan masa depan tidak mudah diramal, namun dapat dipastikan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) merupakan sumber penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kehidupan masyarakat di sebagian besar negara dunia.

Iptek dan perkembangannya nantinya akan menghasilkan hal-hal yang baru dengan laju yang pesat, baik

berupa barang dan jasa; layanan komunikasi baru tata cara kegiatan ekonomi. Pengaruh-pengaruh tersebut akan mendunia, melewati batas-batas negara yang meliputi berbagai segi kehidupan. Dalam bidang ekonomi akan menyebabkan pasar yang semakin terbuka dan bebas yang menyebabkan arus barang dan jasa serta tenaga kerja akan melintas batas negara tanpa hambatan. Keadaan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara, yang mana di Indonesia, hal ini dalam PJP II ini merupakan titik berat pembangunan nasional yang seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk dapat mengambil manfaat dari proses globalisasi ditentukan oleh produktivitas dan efisiensi di dalam berproduksi. Modal penggeraknya adalah dana dan penguasaan teknologi SDM yang handal. SDM yang handal tidak cukup yang hanya menguasai Iptek, tetapi juga warga negara yang baik dalam bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya tatanan ekonomi dunia yang mengalami proses perubahan yang cepat dan mendasar, terutama sebagai akibat globalisasi ekonomi yang semakin meluas dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kemajuan pesat di bidang teknologi menyebabkan kekuatan daya saing suatu negara yang berbasis pada keunggulan komparatif dengan mengandalkan kekayaan sumber alam dan tenaga kerja yang berlimpah, cenderung tidak lagi menjadi andalan. Bersamaan dengan itu, ketersediaan sumber daya alam baik dalam jenis dan jumlah maupun mutunya juga semakin berkurang. Demikian pula sumber pendanaan bagi keperluan investasi akan semakin langka. Sumber daya manusia akan makin menentukan dalam memenangkan persaingan dibandingkan dengan sumber daya lainnya. Dalam perkembangan demikian, tantangan di masa mendatang adalah mengupayakan daya saing dan keunggulan kompetitif yang mengandalkan pada keterampilan dan kreativitas SDM, kemampuan teknologi dan kemampuan manajemen dengan tetap memanfaatkan keunggulan komparatif yang telah dimiliki.

Uraian di atas sekedar menunjukkan betapa besar tantangan yang harus dihadapi sekarang dan masa depan,

serta betapa penting peran pendidikan tinggi dalam menghasilkan lulusan sebagai warga negara yang baik dan profesional andal serta berkemampuan tinggi, yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berproduksi agar industri di Indonesia berdaya saing tinggi. Sehubungan dengan hal tersebut maka sangatlah penting pengembangan kewirausahaan (*entrepreneurship*) bagi mahasiswa. Pendorong utama meningkatnya kebutuhan akan entrepreneur ialah munculnya aneka ragam kesempatan berusaha dalam era perkembangan teknologi tinggi. Kecenderungan ke arah desentralisasi dalam produksi, distribusi, dan pemasaran telah menimbulkan kesempatan-kesempatan baru bagi berkembangnya industri barang dan jasa yang berorientasi lokal. Berkembangnya teknologi informasi dan program-program komputer yang canggih telah mendorong tumbuhnya kesempatan kerja lokal yang semakin beranekaragam. Perkembangan baru dalam industri jasa seperti konsultan komputer, manajemen, periklanan, dan kepariwisataan juga terus akan berkembang secara meluas sebagai sektor-sektor penunjang industri.

BAGIAN VIII
PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN MODAL MANUSIA

BAB XXXI

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Pendidikan memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan karena pendidikan merupakan investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, yang mana dalam jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi sangat beragam tergantung konteks penggunaannya. Para ahli ekonomi mengembangkan teori pembangunan yang didasari pada kapasitas produksi tenaga manusia di dalam proses pembangunan, yang kemudian dikenal dengan istilah *investment in human capital* (Schultz, 1961). Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai *human capital* tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan (*ide*), kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital lain yang hanya diperlakukan sebagai alat saja, *human capital* ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi, misalnya pendidikan formal/informal, pengalaman kerja, kesehatan, atau gizi, bahkan migrasi. Secara umum dapat dinyatakan bahwa faktor utama yang mendukung proses pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Dalam proses tersebut didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya, pendidikan termasuk di dalamnya. Teori *human capital* mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi (Schultz, 1961). Semakin tinggi

pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Dalam proses pembangunan, teori *human capital* tersebut setidaknya harus memiliki dua syarat keharusan. Pertama, adanya pemanfaatan teknologi secara efisien serta adanya sumber daya manusia yang mengelola dan/atau menggunakan teknologi tersebut. Sumber daya manusia dihasilkan melalui proses pendidikan. Hal inilah yang menyebabkan teori *human capital* percaya bahwa investasi dalam pendidikan merupakan investasi dalam rangka meningkatkan produktivitas masyarakat.

Eksistensi teori ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuannya dalam menjelaskan fenomena perekonomian aktual. Analisis teoritis dan pembuktian empiris selalu menjadi aktivitas kembar yang dilakukan secara koheren pada setiap bidang ilmu termasuk ilmu ekonomi (Henderson dan Quant, 1980). Pertumbuhan ekonomi umumnya merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terkait dengan proses, output per kapita, dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada satu saat saja/kurun waktu yang sebentar. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita, berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total atau Produk Domestik Bruto (PDB) dan jumlah penduduk, karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan terkait aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama, misalnya 10 atau 20 tahun dan bahkan lebih lama. Smith (1776), dalam bukunya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, mengajukan teori yang sangat terkenal, yaitu mengenai spesialisasi dan pembagian kerja. Stok kapital (K) mempunyai dua pengaruh terhadap tingkat output total (Q), yaitu pengaruh langsung dan pengaruh tak langsung. K berpengaruh langsung terhadap Q karena penambahan K yang diikuti penambahan tenaga kerja (L) akan meningkatkan Q. Secara matematis, ditulis sebagai berikut: $Q = f(K, L)$. Pengaruh tidak langsung dari K terhadap Q adalah berupa peningkatan produktivitas per kapita melalui dimungkinkannya spesialisasi

dan pembagian kerja (*specialization and division of labor*) yang lebih tinggi. Makin besar kapital (K) yang digunakan, makin besar kemungkinan dilakukan spesialisasi dan pembagian kerja, dan selanjutnya akan meningkatkan produktivitas per pekerja. Peningkatan produktivitas bersumber dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, spesialisasi justru akan meningkatkan keterampilan setiap tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Kedua, melalui sistem pembagian kerja akan menghemat waktu, saat pekerja beralih dari jenis pekerjaan yang satu ke pekerjaan yang lain. Ketiga, ditemukannya mesin-mesin berteknologi semakin baik, yang mempermudah dan mempercepat proses pekerjaan. Dari uraian di atas, dapat diartikan bahwa peningkatan stok kapital (K) secara terus menerus dengan berasumsi bahwa tenaga kerja (L) selalu terpenuhi, juga akan diikuti oleh peningkatan output total (Q) secara terus menerus sampai mencapai batas atas sumber daya. Di sini terjadi proses pertumbuhan ekonomi berhenti, yang disebut sebagai keadaan dalam posisi stasioner (*stationary state*). Pada posisi ini, semua proses pertumbuhan berhenti; pertumbuhan kapital berhenti, pertumbuhan penduduk berhenti, dan pertumbuhan output berhenti.

Pendidikan tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Alhumami (2005), menyatakan pendidikan bukan hanya melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta menguasai teknologi, melainkan juga dapat menumbuhkan iklim bisnis yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut mendorong setiap warga negara untuk mandiri berwirausaha secara adil dan sehat. Kata lainnya, turut serta memberikan kontribusi aktif dalam pembangunan, melalui produktivitasnya dapat meningkatkan pendapatan serta akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Studi tentang investasi sumber daya manusia telah dilakukan oleh Schultz (1961), menyatakan bahwa investasi sumber daya manusia akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya itu menjadi lebih produktif dan merupakan salah satu cara untuk keluar dari perbudakan. Meningkatnya sumber

daya manusia ini akan menjadikan manusia memiliki lebih banyak pilihan, sehingga akan tercipta peningkatan kesejahteraan. Beberapa kegiatan yang menurut Schultz dapat memperbaiki kemampuan sumber daya manusia adalah pendidikan formal yang paling memiliki hubungan erat dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Investasi pada bidang pendidikan tidak hanya berfaedah bagi perorangan, melainkan juga bagi komunitas bisnis dan masyarakat umum. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi, sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial: pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan *welfare dependency* yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah. Istilah *welfare dependency* merupakan keadaan di mana seseorang atau rumah tangga yang sangat bergantung pada tunjangan kesejahteraan dari pemerintah untuk pendapatan mereka dalam jangka waktu lama, dan tanpanya mereka tidak akan mampu untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Istilah tersebut sangat kontroversial, sering membawa konotasi menghina bahwa penerima tidak bersedia untuk bekerja (Bane and Ellwood, 1996). *United Nations Development Programme* (UNDP) sejak tahun 1990-an dengan tegas menjelaskan betapa pentingnya pembangunan manusia, dimana kualitas manusia merupakan kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Disebutkan juga, bahwa tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati usia panjang, badan sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Laporan tersebut menjelaskan bahwa, pembangunan berpusat pada manusia dipromosikan melalui penegasan bahwa pembangunan manusia adalah tujuan akhir pembangunan (*the ultimate end*), sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah sarana (*the principal means*) untuk mencapai tujuan akhir pembangunan tersebut. Semakin jelas bahwa perluasan pilihan dimaksud berada pada tataran proses dan tataran hasil akhir pembangunan. Perluasan pilihan dalam tataran proses disediakan untuk manusia dalam perannya sebagai pelaku pembangunan, sedangkan perluasan

pilihan dalam tataran hasil akhir disediakan untuk manusia dalam perannya sebagai penikmat pembangunan. Pembangunan manusia pada dasarnya adalah suatu upaya dalam rangka membangun kemampuan manusia, tidak peduli apakah mereka miskin atau kaya, melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan dan keterampilan, sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilizing*) kemampuan atau keterampilan mereka tersebut.

Qureshi (2010), menyatakan konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan dengan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Uraian-uraian di atas semakin memperkokoh paradigma pembangunan berpusat pada manusia (*people centered development*) yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir pembangunan dan bukan hanya sebagai alat pembangunan. Untuk mewujudkan tujuan akhir pembangunan dimaksud, terdapat empat hal pokok (*productivity, equality, sustainability, dan empowerment*) yang harus diperhatikan sebagai komponen kunci pembangunan manusia, sebagaimana uraian dari UNDP berikut.

Pertama, produktivitas (*productivity*), mengandung makna bahwa manusia yang produktif akan mampu menghasilkan pendapatan bagi dirinya dan bagi keluarganya serta bagi daerahnya. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia, dan merupakan variabel endogen yang akan berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Kedua, keadilan (*equality*), mengandung makna bahwa manusia sebagai makhluk sosial harus memiliki kesempatan yang sama untuk hidup lebih baik. Praktik monopoli, seperti monopoli ekonomi dan monopoli politik, harus dihapuskan melalui pengaturan-pengaturan yang dilakukan secara demokratis. Semua orang boleh memilih apa yang terbaik bagi kehidupannya sepanjang tidak melanggar aturan main yang telah disepakati bersama secara konstitusional dan demokratis. Ketiga, keberlanjutan (*sustainability*), mengandung makna bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara bijaksana untuk kepentingan manusia, baik generasi masa kini maupun

generasi masa yang akan datang. Generasi masa kini harus sadar dan menjamin ketersediaan sumber daya yang sama-sama diperlukan oleh generasi masa yang akan datang. Sumber daya yang tidak dapat diperbaharui hanya digunakan secara hemat sambil menanamkan kewajiban bagi generasi sekarang untuk mencari alternatif sumber daya substitusi dari sumber daya yang dapat diperbaharui. Keempat, pemberdayaan (*empowerment*), mengandung arti bahwa adalah fitrah manusia yang tidak selalu memiliki kemampuan untuk mengakses peluang dan kesempatan yang sama untuk mensejahterakan diri dan keluarganya. Karena itu perlu adanya pemberdayaan agar pembangunan manusia dapat dilakukan oleh semua orang, bukan semata-mata dilakukan untuk semua orang. Dengan pemberdayaan, maka semua orang dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan dan proses mempengaruhi kesejahteraan mereka.

Konsep human development atau pembangunan manusia dibahas oleh UNDP untuk pertama kalinya pada era kotemporer dalam *Human Development Report* (1990). Konsep ini menunjukkan bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk menguntungkan manusia - masyarakat, maka *high national income* dan *growth* tidak secara langsung menjamin *human development*, karena terkadang hanya mementingkan pihak elit politis dan ekonomi. Gagasan model pembangunan manusia adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi masyarakat untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif. UNDP memberikan pendefinisian sebagai berikut: *Human development is a process of enlarging people's choices. The most critical ones are to lead a long and healthy life, to be educated and to enjoy a decent standard of living. Additional choices include political freedom, guaranteed human rights and self respect* (UNDP HDR, 1990). Dengan merujuk kepada Ul Haq (1996) pemahaman *human development* menunjukkan 5 karakteristik dan 4 komponen yang membentuknya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. *Human development* itu memusatkan perhatian kepada manusia, "*people in the center of the stage*", sehingga pendekatan pembangunan itu diartikan seperti aksi perluasan pilihan atau alternatif bagi

rakyat, *“expanding people’s choices”*. Dalam semua proses pembangunan dipertanyakan bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dan juga mendapatkan manfaat dari pembangunan.

2. Menekankan kepada kedua sisi yang dimiliki pembangunan manusia, yaitu *formation of human capabilities* (peningkatan *health, knowledge* dan *skills*); dan *people use of acquired capabilities* (untuk pekerjaan, kegiatan produktif, partisipasi dalam urusan politik,dll) . Hal itu bermaksud bahwa proses pembangunan seharusnya memperdaya masyarakat dengan menyediakan berbagai institusi atau prasarana untuk meningkatkan kapabilitas manusia, sehingga mereka mampu berkreaitivitas di tengah masyarakat untuk juga mendorong pembangunan.
3. Untuk memperluas pilihan bagi rakyat diperlukan *means*, yaitu pertumbuhan ekonomi, terutama melalui peningkatan *Gross National Product*. Namun pertumbuhan ekonomi tidak otomatis memberi kesejahteraan masyarakat, tetapi harus didistribusikan secara merata melalui kebijakan yang jelas.
4. *Human development* merupakan sebuah teori dan pendekatan yang menggabungkan pembangunan ekonomi, sosial dan politik. Perhatian tidak hanya terfokus kepada faktor ekonomi tetapi kepada semua faktor yang menyangkut suatu *society*.
5. Manusia merupakan tujuan, juga sarana daripada pembangunan. Sedangkan *economic growth* adalah sebagai sarana untuk mencapai *human development*.

Sementara empat komponen penting dalam paradigma *human development* ialah *equity, sustainability, productivity* dan *empowerment*. *Equity* berarti bahwa dalam memperluas pilihan dan kesempatan untuk manusia harus ada keadilan, berarti akses terhadap kesempatan yang merata. Disini juga ditekankan istilah *growth with equity by income distribution*, bahwa peningkatan GNP didistribusikan kepada masyarakat, melalui kebijakan fiskal yang optimal, *land reform*, akses kepada kredit, *political*

opportunities, dan penghapusan hambatan sosial atau legal yang membatasi kaum minoritas kepada kesempatan ekonomi dan politik.

Sustainability adalah komponen yang sangat penting juga yang berarti bahwa, tingkat kesejahteraan yang dinikmati masa kini harus juga bisa dinikmati oleh generasi mendatang, jadi *sustanaibility* di sini adalah kelestarian daripada *human development opportunities*. Dengan kata lain kelestarian dari semua kapital: kapital fisik; finansial; lingkungan hidup; dan sumber daya manusia, dengan kapasitas memperbarui dan meregenerasi kapital tersebut.

Productivity merupakan satu elemen dalam human development dimana pentingnya adalah sama dengan *equity*, *sustainability* dan *empowerment*. *Productivity* berarti peningkatan kapabilitas sumber daya manusia melalui *investment in people* agar potensial maksimal mereka dapat digunakan sebagai sarana untu mencapai pertumbuhan. Di sini manusia dilihat sebagai sarana atau partisipan dari pembangunan namun human development menggarisbawahi bahwa manusia adalah *means* dan juga *the ultimate ends of development*, oleh karena itu konsep *productivity* dianggap hanya sebagai suatu unsur dalam *human development*.

Empowerment bermaksud pembangunan berdasarkan partisipasi penuh masyarakat, masyarakat bukan hanya sebagai penerima tetapi aktif dalam menentukan pilihan mengenai bagaimana seharusnya hidup mereka sendiri dibentuk. Pemberdayaan masyarakat menurut Ul Haq (1996) adalah investasi dalam pendidikan dan kesehatan suapaya masyarakat dapat mengambil keuntungan dari peluang ditawarkan pasar; akses kepada kredit dan *productive assets*; juga pemberdayaan yang sama kepada wanita dan pria agar mempunyai kesempatan bersaing yang setara. Dengan demikian memerlukan *political democracy*, *economic liberalism*, desentralisasi dan partisipasi dari organisasi non-pemerintah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya.

Para ekonom telah sepakat bahwa sumber daya manusia (SDM) suatu bangsa, bukan hanya modal fisik atau sumber daya material merupakan faktor paling menentukan karakter dan

kecepatan pembangunan sosial dan ekonomi suatu bangsa bersangkutan (Todaro dan Smith, 2006). Proses tersebut mempunyai minimal dua syarat pokok; pertama, adanya SDM yang secara kuantitas maupun kualitas mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya lain dalam proses pembangunan, dan kedua, adanya pasar yang mendukung transaksi barang dan jasa yang dihasilkan dalam pembangunan tersebut. Interaksi antara keluaran pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja hampir dapat dipastikan bakal selalu mengalami kesenjangan. Salah satu penyebabnya, karena pendidikan dan ketenagakerjaan merupakan dua entitas yang memiliki ranah serta karakteristik berbeda. Perbedaan yang mencolok dan selalu menciptakan kesenjangan adalah sifat pendidikan yang merupakan faktor demografis, sementara ketenagakerjaan merupakan faktor ekonomis dan sebagian dari tujuan pendidikan itu sendiri. Faktor demografis dalam arti bahwa pendidikan yang bersifat pelayanan kepada masyarakat secara merata dan adil di manapun, terkait di Indonesia yang terkendala dengan luasnya negara kepulauan dan harus memberikan akses dan pemerataan yang sama. Faktor ekonomis merujuk ketenagakerjaan yang merupakan optimasi pilihan dalam hal ini tenaga kerja berpendidikan dan berketrampilan. Manakala terjadi kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan ketenagakerjaan semakin melebar maka hal ini akan mengancam produktivitas individu dan selanjutnya mempengaruhi pertumbuhan secara keseluruhan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempunyai proyeksi terhadap kebutuhan tenaga kerja dan bidang apa saja untuk mendukung pembangunan masa depan. Hal ini guna mengurangi terjadinya kegagalan pasar ketika pasar bebas berfungsi atau gagal untuk memberikan alokasi sumber daya yang efisien (*market failure*), sehingga terwujud adanya equilibrium atau kesetimbangan antara permintaan dan kebutuhan tenaga kerja.

Dalam pendekatan PDB yang merupakan fungsi dari faktor-faktor produksi yang terdiri dari modal, tenaga kerja (baik kuantitas dan kualitas yang dapat diwakili oleh pendidikan), teknologi, dan kualitas masyarakat (yang dapat diwakili oleh pendidikannya). PDB akan meningkat atau pertumbuhan ekonomi akan terjadi apabila faktor-faktor produksi ini meningkat. Dengan menggunakan data sekunder yang dibutuhkan dan menerapkan

metode ekonometrika, dapat diketahui peranan masing-masing faktor produksi, termasuk faktor produksi yang berupa pendidikan (baik secara umum atau vokasi maupun per jenjang pendidikan) tenaga kerja dan masyarakat, terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lewis (1954), mendefinisikan bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan adalah tenaga kerja dikaitkan dengan pemanfaatan *capital*. Dengan *stock of capital* tertentu, maka *marginal product* dari tenaga kerja (MPL) mulai dari titik tertentu, menurun. Senada dengan Lewis, menjelaskan pertumbuhan ekonomi adalah suatu formula kausalitas antara investasi, tabungan, modal, dan penduduk untuk mempengaruhi hasil/output (Ray, 1998).

Kaldor dalam Djoyohadikusumo (1994) menyatakan bahwa proses pertumbuhan jangka panjang diarahkan pada pertumbuhan sektoral yang mencakup sektor produksi primer dan sektor sekunder, sedangkan sektor tersier dianggap sebagai fungsi dari perkembangan industri. Sejalan dengan pendapat Kaldor, Lucas (dalam McMahan *et al.*, 2002) mengemukakan bahwa yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah kapital dan tenaga kerja dengan unsur kualitas termasuk di dalamnya.

Solow (1956), menyatakan bahwa faktor yang dominan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah modal dan tenaga kerja. Persamaan modelnya adalah:

$$Q = f(K,L)$$

dimana:

Output

Kapital

Tenaga kerja

Pendekatan ini menggunakan model fungsi produksi yang mula-mula diperkenalkan oleh Cobb dan Douglas selama 1927-1947, yang fokus pada pentingnya peranan modal manusia (*human capital*) dalam fungsi produksi itu mula-mula dikembangkan oleh Solow (1956) dan argumennya dikembangkan oleh Becker (1993), dan terakhir model itu dikembangkan oleh Lucas, yang diterapkan dan dikembangkan lagi salah satunya oleh McMahan (2002).

McMahon (2002), menunjukkan bagaimana peranan pendidikan secara umum terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan menggunakan *endogenous growth model* yang diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = A [(\varpi_1 h N)^{1-\alpha} K^\alpha] h_a \psi \varepsilon$$

dimana:

Y	=	output atau produk domestik bruto (PDB)
A	=	tingkat teknologi yang dianggap konstan
ϖ_1	=	alokasi waktu pekerja yang digunakan untuk produksi
h	=	kualitas tenaga kerja yang dapat diwakili oleh tingkat pendidikannya
N	=	jumlah tenaga kerja
$\varpi_1 h N$	=	modal tenaga kerja
K	=	modal fisik digunakan proksi nilai pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB)
h_a	=	pendidikan masyarakat
α	=	koefisien modal fisik yang menunjukkan peranan atau pengaruh modal fisik terhadap PDB
$1-\alpha$	=	koefisien modal tenaga kerja yang menunjukkan peranan atau pengaruh modal tenaga kerja terhadap PDB
ψ	=	koefisien kualitas masyarakat yang menunjukkan peranan atau pengaruh kualitas masyarakat terhadap PDB
ε	=	suku galat (error term)

Melalui proses transformasi, model pertumbuhan ekonomi endogenous tersebut menjadi bentuk linier berikut.

$$\ln Y = \ln A + (1-\alpha) \ln (\varpi_1 h N) + \alpha \ln K + \psi \ln h_a$$

Produk Domestik Bruto (PDB) atau Y pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga berlaku pada tahun tertentu sebagai dasarnya. Menurut pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu

(satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan menjadi 9 lapangan usaha (sektor), yaitu: (1) pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan; (2) pertambangan dan penggalan; (3) industri pengolahan; (4) listrik, gas dan air bersih; (5) bangunan; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan; dan (9) jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintah. Variabel teknologi (A), dalam persamaan tersebut merupakan teknologi yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Dalam klasifikasi yang lazim teknologi dikelompokkan menjadi dua yaitu teknologi modern dan teknologi tradisional. Teknologi modern diidentikkan dengan kegiatan proses produksi dalam menghasilkan barang dan jasa dengan memanfaatkan menggunakan peralatan produksi yang serba modern (mesin produksi modern, komputerisasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang terkini). Teknologi tradisional adalah kegiatan proses produksi yang masih lebih banyak menggunakan tenaga manusia serta peralatan produksi yang lebih bersifat manual dan kurang mekanis. Variabel teknologi untuk penelitian ini dalam jangka pendek diasumsikan konstan atau tidak berubah.

Dalam kaitan variabel modal manusia (N), dalam konteks ini akan dilihat tidak hanya jumlahnya yang dari tahun ke tahun cenderung bertambah melainkan juga akan ditinjau peningkatan kualitasnya. Sudah barang tentu peningkatan kualitas sumber daya manusia ini salah satunya bisa dicapai melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal serta informal. Variabel modal fisik (K) merupakan nilai kapital atau peralatan produksi yang digunakan dalam proses produksi guna menghasilkan barang dan jasa. Variabel ini agak mendapatkan kesulitan dalam cara pengukurannya, sementara dapat digunakan proksi nilai pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB). Variabel pendidikan masyarakat (ha) merupakan gambaran tingkat pendidikan yang telah diperoleh atau telah dicapai oleh seluruh masyarakat dalam satu wilayah tertentu. Variabel ini bisa didekati dengan rata-rata tingkat pendidikan penduduk di suatu wilayah. Signifikansi pendidikan masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi dalam model berasal dari pemahaman bahwa semakin maju tingkat pendidikan masyarakat, maka

masyarakat yang bersangkutan akan semakin responsif terhadap proses perubahan sosial dan ekonomi yang selalu berkembang dinamis. Dengan kata lain, pendidikan masyarakat menjadi stimulus dalam pertumbuhan ekonomi.

Sejak karya Mankiw, Romer, dan Weil (1992) dan Barro (1991), telah dikembangkan literatur, Hanushek (1995), Temple (2001), Krueger dan Lindahl (2001), Gemmel (1996), Benhabib dan Spiegel (1994) yang menyatakan hubungan positif antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah pendidikan diukur dengan rasio penerimaan siswa di sekolah (Mankiw, Romer dan Weil, 1992); Barro, (1991); Levine dan Renelt (1992), rata-rata tahun bersekolah (Krueger dan Lindhal (2001); Hanushek dan Woessmann (2008), tingkat melek huruf orang dewasa (Durlauf dan Johnson, 1995); serta Romer (1990).

Hubungan antara kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi yang teruji merupakan hasil karya Barro (1999), Hanushek dan Kimko (2000), Hanushek dan Woessmann (2008). Studi tersebut mengembangkan pengukuran kualitas tenaga kerja berdasarkan keterampilan kognitif dalam matematika dan ilmu pengetahuan, hal ini dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Barro (1990) menggunakan data nilai ujian siswa internasional untuk mengukur kualitas sekolah, ditemukan hubungan positif antara kualitas pendidikan dan pertumbuhan ekonomi. Barro menggunakan model pertumbuhan endogen sederhana dengan pemerintah berangkat dari standar karakterisasi konsumsi pemerintah yang dibiayai oleh investasi publik (seperti jalan, pelabuhan, sanitasi, atau pendidikan) dan melengkapi investasi swasta. Dalam konteks pendidikan, investasi termasuk meningkatkan kualitas manusia itu sendiri yang memberikan dampak terhadap produktivitas dan akhirnya pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Cooray (2009), menguraikan bahwa dalam masyarakat yang lebih terdidik akan membawa kepada tingkatan lebih tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, dan dengan demikian kemampuan pemerintah menjadi lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan. Hubungan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi ini secara garis besar dapat dijelaskan melalui teori pertumbuhan ekonomi dan teori human capital. Semacam konsensus umum bahwa modal manusia merupakan faktor utama di balik pertumbuhan ekonomi

jangka panjang. Meskipun, pada tingkat makro, hasil empiris tidak selalu sesuai dengan pandangan ini. Untuk menjelaskan hal kesenjangan antara teori dan empiris, secara terfokus telah diletakkan pada kesalahan pengukuran dan kualitas data.

Hasil kajian Van Leeuwen *et al.*, (2008), menggunakan perkiraan alternatif modal manusia, serta menemukan bukti bahwa dua pandangan utama tentang peran modal manusia dalam pembangunan ekonomi oleh Lucas (1988) dan Romer (1990) dapat diterima secara berdampingan dan bukan berarti saling menolak satu sama lain. Dengan menggunakan uji kointegrasi, Van Leeuwen (2008) menemukan bahwa di India dan Indonesia, tingkat modal manusia adalah cointegrated dengan tingkat pendapatan agregat selama abad ke-20 secara keseluruhan, yang menegaskan teori Lucas (1988). Namun di Jepang, pendekatan Lucasian dapat diverifikasi hanya untuk paruh awal abad ini, sementara setelah 1950 ada kointegrasi antara tingkat pertumbuhan pendapatan agregat dan tingkat modal manusia, yang sejalan dengan pandangan Romer (1990).

Studi Sitepu dan Sinaga (2004), bertujuan menganalisis dampak investasi sumber daya manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan in Indonesia. Analisisnya menggunakan kombinasi model Komputasi Keseimbangan Umum dan metode Foster-Greer-Thorbecke. Investasi sumber daya manusia diwakili oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Hasil simulasinya menunjukkan bahwa investasi sumber daya manusia mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan rumah tangga. Indeks rasio kemiskinan, indeks kesenjangan dan indeks intensitas kemiskinan juga menurun, kecuali untuk rumah tangga bukan angkatan kerja di kota. Investasi sumber daya manusia untuk pendidikan memberi manfaat lebih besar bagi rumah tangga perdesaan dibandingkan dengan rumah tangga perkotaan, terutama untuk rumah tangga buruh pertanian dan pengusaha pertanian di perdesaan, sedangkan investasi kesehatan memberi manfaat lebih besar bagi rumah tangga bukan pertanian golongan atas di kota.

Penelitian Chenery dan Syrquin (1975), menyatakan bahwa saat PDB per kapita sangat rendah, di bawah \$100, peranan sektor pertanian sangat dominan karena menyumbang

lebih dari 50 persen, sedangkan sektor industri dan jasa masing-masing hanya sekitar 10 dan 30 persen, sisanya sebesar 10 persen adalah sektor lain-lain. Pada saat PDB per kapita meningkat, peranan sektor pertanian semakin menurun sementara peranan kedua sektor yang lain semakin meningkat. Ketika PDB per kapita mencapai \$1000, peranan pertanian semakin mengecil, hanya sekitar 12 persen, sedangkan peranan sektor industri dan jasa masing-masing mencapai 35 dan 44 persen. Titik temu antara sektor pertanian dan industri terjadi pada saat PDB per kapita sekitar \$350 dengan masing-masing sumbangannya terhadap PDB sebesar 25 persen.

Terjadinya pergeseran struktur ekonomi tersebut ternyata tidak dengan sendirinya diikuti adanya realokasi tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri yang memerlukan pengetahuan/keterampilan relatif lebih tinggi. Mereka yang bekerja di sektor pertanian bergeser ke sektor jasa, yang memerlukan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai. Artinya tidak serta merta dengan terjadinya pergeseran struktur ekonomi, tenaga kerja dengan cepat mengganti/menambah pengetahuannya agar tertampung dalam struktur perekonomian baru, melalui pendidikan dan pelatihan merupakan jawaban sangat tepat.

Tulisan Yoon (2006), mengkaji sebuah model siklus bisnis riil internasional dengan modal manusia dapat menjelaskan siklus bisnis dalam sebuah perekonomian kecil yang terbuka. Parameter dan kalibrasi dalam model tersebut menyertakan investasi guncangan teknologi khusus dan modal manusia ke dalam kerangka neoklasik. Model tersebut dimungkinkan untuk diduplikasikan dengan modus penyesuaianpenyesuaian pada siklus bisnis model di Korea. Penelitian lainnya Donald dan Shuanglin (1993), melakukan estimasi persamaan yang diturunkan dari fungsi produksi agregat dan menggunakan data cross section pada 47 negara dalam 10 tahun dan 58 negara dalam 11 tahun. Hasilnya, tingkat pertumbuhan pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada semua kasus. Tingkat pertumbuhan pengeluaran kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu kasus tetapi tidak signifikan pada semua kasus, dan tingkat pertumbuhan

pengeluaran pertahanan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada satu subset negara-negara tertentu tetapi insignifikan untuk negara lainnya.

Hasil penelitian Pascual dan Álvarez-García (2006), yang menggunakan model regresi dan panel data terhadap 15 negara di Eropa tahun 1994-2000 mempunyai hubungan yang positif. Khususnya terhadap pengeluaran pemerintah bidang pendidikan sangat mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala propinsi atau kabupaten/kota.

Kuznets mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara untuk menyediakan berbagai jenis barang dan jasa kepada penduduk. Dengan demikian, manifestasi dari pertumbuhan ekonomi diwujudkan dalam peningkatan output jangka panjang atau secara berkesinambungan (Todaro, 2006).

Berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut oleh Todaro diwujudkan dalam 3 komponen utama. Pertama, akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik dan modal manusia atau sumberdaya manusia. Kedua, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya akan menambah jumlah angkatan kerja. Ketiga, kemajuan teknologi yang dalam pengertian sederhananya terjadi karena ditemukannya cara-cara baru atau perbaikan atas cara-cara lama dalam menangani suatu pekerjaan (Todaro, 2006).

Selanjutnya, konsep modal manusia ini menjadi penting sejalan dengan perkembangan pemikiran, bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara tidak hanya didukung oleh kenaikan stok modal fisik dan jumlah tenaga kerja, tetapi juga peningkatan mutu modal manusia yang memiliki pengaruh kuat terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja serta pemanfaatan kemajuan teknologi. Dalam konsep pertumbuhan modern, faktor teknologi dalam arti luas yang dianggap konstan dan ditentukan secara eksogenus oleh aliran pemikiran pertumbuhan tradisional, dianggap kurang tepat. Faktor teknologi adalah dinamis dan ditentukan oleh sumberdaya manusia atau mutu modal manusia. Menurut teori pertumbuhan modern, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bersumber dari peningkatan jumlah faktor-faktor produksi berupa tenaga kerja (L) dan modal fisik (K) saja, tetapi juga dari produktivitas dari tenaga kerja yang berkaitan erat dengan sejauhmana peningkatan mutu modal manusia.

Teori pertumbuhan ekonomi modern menetapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan ditentukan oleh modal fisik (K), tenaga kerja (L) dan modal manusia (HC). Sehingga pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dinotasikan dalam persamaan fungsi sebagai berikut:

$$Y = F(K, L, Hc, Z)$$

Dimana:

K = modal fisik

L = tenaga kerja

Hc = mutu modal manusia

Z = variabel lain yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi

Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh Barro (1999) melihat pengaruh langsung modal manusia yang diwakili oleh tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap PDB serta beberapa variabel lain. Penelitian ini mengambil sampel 100 negara dan menunjukkan pengaruh positif dari variabel pendidikan terhadap laju pertumbuhan PDB per kapita. Dengan demikian, kebijakan yang dapat meningkatkan tingkat pendidikan penduduk akan meningkatkan laju pertumbuhan PDB per kapita.

Pertumbuhan ekonomi meningkatkan persediaan sumberdaya yang dibutuhkan pembangunan manusia.

Peningkatan sumberdaya bersama dengan alokasi sumberdaya yang tepat serta distribusi peluang yang semakin luas, khususnya kesempatan kerja akan mendorong pembangunan manusia lebih baik. Hal ini berlaku juga sebaliknya, pembangunan manusia mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pembangunan manusia yang tinggi sangat menentukan kemampuan penduduk dalam menyerap dan mengelola sumber-sumber pertumbuhan ekonomi, baik kaitannya dengan teknologi maupun terhadap kelembagaan sebagai sarana penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi (Ramirez, *et al.*, 1998; Brata, 2004).

Dengan demikian keterkaitan pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi dapat dipahami dari 2 (dua) arah, yaitu pengaruh dari pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dan pengaruh dari pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi. Keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak bisa dianggap linier atau langsung, namun ditentukan oleh sejauhmana peranan faktor-faktor yang menghubungkan kedua konsep tersebut. Di bawah ini akan diuraikan lebih terperinci keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia, baik pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia serta sebaliknya, pengaruh pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi, beserta faktor-faktor yang mengaitkan keduanya.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia dihubungkan dengan atau dipengaruhi oleh 2 (dua) jalur utama, yaitu jalur aktivitas rumah tangga, mencakup rumah tangga serta berbagai organisasi kemasyarakatan serta jalur belanja dan kebijakan pemerintah.

Aktivitas rumah tangga memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia melalui belanja rumah tangga untuk makanan, air bersih, pemeliharaan kesehatan dan sekolah (UNDP, 1996; Ramirez *et al.*, 1998; Ranis, 2004). Kecenderungan aktivitas rumah tangga untuk membelanjakan sejumlah faktor yang langsung berkaitan dengan indikator pembangunan manusia di atas dipengaruhi oleh tingkat dan distribusi pendapatan, tingkat pendidikan serta

sejauhmana peran perempuan dalam mengontrol pengeluaran rumah tangga.

Ketika tingkat pendapatan atau PDB per kapita rendah akibat dari pertumbuhan ekonomi yang rendah, menyebabkan pengeluaran rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia menjadi turun. Begitu juga sebaliknya, tingkat pendapatan yang relatif tinggi cenderung meningkatkan belanja rumah tangga untuk peningkatan pembangunan manusia. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Ranis (2004), bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat langsung terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan akan meningkatkan alokasi belanja rumah tangga untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan, terutama pada rumah tangga miskin. Dengan kata lain, peningkatan pendapatan menurut Sen (1999) memberikan kontribusi secara langsung terhadap peningkatan kapabilitas penduduk.

Banyak studi menyebutkan, peningkatan pendapatan mendorong peningkatan kesehatan dan pendidikan. Studi di Brazil, Chile dan Nikaragua menunjukkan, bahwa peningkatan pendapatan berpengaruh terhadap peningkatan beberapa indikator tingkat kesehatan, seperti rasio usia dengan tinggi badan serta angka harapan hidup ketika lahir (UNDP, 1996). Studi-studi lain juga menyebutkan, peningkatan pendapatan mempengaruhi tingkat pendidikan. Angka perkiraan di Brazil menyebutkan, bahwa 10 persen peningkatan pendapatan mempengaruhi 5 persen - 8 persen peningkatan pendidikan. Begitu juga di Pakistan, terdapat hubungan yang erat antara peningkatan pendapatan dengan rata-rata tahun pendidikan yang dapat diselesaikan. Studi Lee (2005) di Korea juga menghasilkan pengaruh yang signifikan tingkat pendapatan dan beberapa variabel lainnya terhadap rata-rata tahun sekolah (*years of schooling*) penduduk.

Di samping ditentukan oleh tingkat pendapatan per kapita penduduk, distribusi pendapatan juga turut menentukan pengeluaran rumah tangga yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan pembangunan manusia. Pada saat distribusi pendapatan buruk atau terjadi ketimpangan pendapatan menyebabkan banyak rumah tangga mengalami keterbatasan

keuangan. Akibatnya mengurangi pengeluaran untuk pendidikan yang lebih tinggi dan makanan yang mengandung gizi baik (Ramirez *et al.*, 1998). Pengeluaran lebih banyak ditujukan untuk mengkonsumsi makanan yang tidak mengandung banyak asupan gizi dan nutrisi yang baik (UNDP, 1996). Dengan demikian, jika terjadi perbaikan dalam distribusi pendapatan akan menyebabkan penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih baik. Peningkatan pendapatan pada penduduk miskin mendorong mereka untuk membelanjakan pengeluaran rumah tangganya agar dapat memperbaiki kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarga.

Studi Birdsall, Ross dan Sabot (1994) menunjukkan, jika distribusi pendapatan di Brazil setara dengan di Malaysia, maka tingkat pendidikan anak-anak keluarga miskin akan meningkat sebesar 40 persen. Menurut Ranis (2004), jika penduduk miskin memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau dengan kata lain terjadi pengurangan tingkat kemiskinan, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan pembangunan manusia melalui peningkatan bagian pengeluaran rumah tangga yang dibelanjakan untuk makanan yang lebih bergizi dan pendidikan yang lebih tinggi.

Studi Lee (2005) menunjukkan, faktor kesenjangan pendapatan mempengaruhi secara negatif terhadap pembangunan manusia. Keterbatasan pendapatan akan mengurangi kemampuan orang tua untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi karena anak-anak cenderung dipekerjakan pada usia dini untuk memperoleh upah dan sumber penghasilan bagi keluarga.

Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi pembangunan manusia juga ditentukan oleh sejauhmana kontrol perempuan dalam alokasi pengeluaran dalam rumah tangga. Perempuan memiliki andil yang besar dalam mengatur pengeluaran rumah tangga yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia. Andil perempuan ini ditentukan oleh tingkat pendidikan perempuan dan bagian pendapatan perempuan dalam rumah tangga.

Tingkat pendidikan perempuan terutama terkait dengan pengetahuan perempuan mengenai pemeliharaan kesehatan, gizi

dan pendidikan anggota keluarga. Semakin baik atau tinggi tingkat pendidikan perempuan, semakin baik atau tinggi pengetahuan kesehatan yang dimiliki dan diharapkan dapat diterapkan dalam mengelola rumah tangga. Sementara bagian pendapatan perempuan terkait dengan tambahan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga, dan terutama bagi rumah tangga miskin, tambahan pendapatan ini memiliki manfaat yang besar dalam meningkatkan kemampuan belanja rumah tangga untuk kebutuhan kesehatan dan pendidikan. Semakin tinggi kedua faktor ini, maka semakin besar peluang alokasi pengeluaran rumah tangga yang berkaitan langsung dengan pembangunan manusia. Bahkan sebuah studi di Pantai Gading menyebutkan, peningkatan proporsi pendapatan tunai yang diperoleh perempuan dari total pendapatan rumah tangga mengurangi secara signifikan konsumsi minuman keras dan rokok (Ramirez, 1998). Pernyataan ini didukung oleh studi Garcia (1990) di Philipina yang menunjukkan konsumsi kalori dan protein meningkat seiring dengan peningkatan bagian pendapatan perempuan dalam rumah tangga.

Sebagaimana telah disinggung di muka, keterkaitan pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia juga ditentukan oleh sejauhmana efektivitas kebijakan publik dalam mengalokasikan sumberdaya yang dimilikinya, seperti yang diwujudkan dalam alokasi pengeluaran Pemerintah.

Menurut Ramirez *et al.*, (1998), UNDP (1996) dan Ranis (2004), mekanisme alokasi sumberdaya dari pemerintah yang memiliki efek terhadap peningkatan pembangunan manusia dinyatakan dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu (1) rasio pengeluaran Pemerintah terhadap PDB total. Rasio ini menyatakan berapa persen proporsi belanja Pemerintah dari total PDB untuk berbagai pengeluaran; (2) rasio pengeluaran Pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia terhadap total pengeluaran Pemerintah. Rasio ini menyatakan proporsi pengeluaran Pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia dari total pengeluaran Pemerintah; (3) rasio pengeluaran prioritas yang langsung berkaitan dengan kebutuhan peningkatan pembangunan manusia terhadap total pengeluaran Pemerintah untuk peningkatan pembangunan manusia. Rasio ini menyatakan proporsi pengeluaran Pemerintah untuk pembangunan manusia

pada bidang-bidang prioritas atau yang cenderung memiliki efek lebih besar terhadap peningkatan pembangunan manusia dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Disebutkan misalnya, alokasi pengeluaran Pemerintah untuk pendidikan dasar memiliki sumbangan yang lebih besar terhadap pencapaian indikator pembangunan manusia pada negara-negara yang baru membangun (*early stage of development*) dibandingkan untuk pendidikan tinggi (Ramirez, 1998; UNDP, 1996). Salah satu contoh telah dikemukakan oleh studi Psacharopoulos (1972) yang memaparkan, bahwa di negara-negara sedang berkembang biaya rata-rata seorang mahasiswa setara dengan 88 kali biaya seorang siswa SD. Tingginya biaya pendidikan tinggi di negara-negara sedang berkembang tidak diikuti secara proporsional pendapatan yang diperoleh dari seseorang lulusan perguruan tinggi (PT) dibandingkan dengan di negara-negara maju.

Pandangan di atas sejajar dengan Fatah (1998) yang menyebutkan bahwa lebih menguntungkan menginvestasikan sumber modal pada tingkat pendidikan yang lebih rendah daripada memperluas pendidikan tinggi (Danim, 2006). Temuan-temuan ini memberikan pelajaran penting perlunya bidang-bidang prioritas untuk melihat mekanisme alokasi sumberdaya Pemerintah yang memiliki pengaruh lebih besar terhadap peningkatan indikator pembangunan manusia, khususnya alokasi sumberdaya untuk pendidikan.

Ketiga bentuk mekanisme di atas menunjukkan instrumen kebijakan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah dalam mendorong peningkatan indikator pembangunan manusia. Selanjutnya, beberapa argumentasi mengenai perlunya mempertimbangkan pengeluaran pemerintah dalam melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia, antara lain: Pertama, pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap pembangunan manusia terutama melalui jalur peningkatan taraf kesehatan dan tingkat pendidikan penduduk. Kedua jalur ini menurut Ranis dan Ramirez (2000) merupakan barang publik yang memerlukan investasi dari Pemerintah. Investasi untuk barang publik ini merupakan bagian yang berasal dari pengeluaran Pemerintah, sehingga besar kecilnya pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan turut

menentukan pencapaian indikator pembangunan manusia (Ranis dan Ramirez, 2000). Kedua, tidak ada jaminan dari mekanisme pasar dalam distribusi pendidikan dan fasilitas kesehatan secara merata bagi penduduk, terutama penduduk miskin atau di daerah perdesaan. Oleh karena itu, diperlukan mobilitas dana dari Pemerintah dalam menyediakan berbagai fasilitas pendidikan dan kesehatan yang dapat dinikmati oleh mayoritas penduduk. Dengan demikian, pengeluaran publik digunakan sebagai instrumen kebijakan pemerataan pendidikan dan kesehatan.

Hal yang sama juga dinyatakan oleh Chakraborty (2002), bahwa pengeluaran pemerintah diperlukan karena adanya kemungkinan dari kegagalan pasar di satu sisi serta di sisi lain mulai tumbuhnya perhatian terhadap aspek-aspek sosial dari pembangunan. Ketiga, tanpa kebijakan Pemerintah secara konkrit, pencapaian indikator pembangunan manusia sulit diwujudkan. Pengeluaran Pemerintah di satu sisi menjadi instrumen mobilitas sumberdaya publik sebagai komplemen dari sektor privat dalam menyediakan berbagai fasilitas yang mendorong peningkatan indikator pembangunan manusia (UNDP, 1996; Ramirez *et al*, 1998; Ranis, 2004).

Temuan empiris membuktikan, pengeluaran Pemerintah, terutama untuk bidang pendidikan dan kesehatan memiliki efek yang signifikan terhadap peningkatan angka harapan hidup dan mengurangi angka kematian bayi (UNDP, 1996). Sebagaimana yang dilaporkan dalam studi Chakraborty, peningkatan pengeluaran Pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan sebesar US\$ 1.000,00 akan menaikkan IPM sebesar 0,5 (Chakraborty, 2002).

BAB XXXII

PENDEKATAN DALAM PEMBANGUNAN MANUSIA

Menurut Stewart (2002), terdapat 2 (dua) pendekatan utama dalam melihat pembangunan manusia. Pendekatan pertama menekankan pada standar kelayakan kebutuhan dasar (*Basic Needs*), sehingga dikenal dengan nama *Basic Needs Approach* (BN). Sementara pendekatan kedua menekankan pada peningkatan kemampuan dan potensi manusia yang dipopulerkan melalui konsep Amartya Sen mengenai kapabilitas/kemampuan, sehingga dikenal dengan *Sen's Capabilities Approach* (SC). Pendekatan BN menyatakan, bahwa tujuan akhir pembangunan manusia adalah jaminan kebutuhan dasar yang layak bagi setiap orang. Melalui pemenuhan kebutuhan dasar secara layak, maka setiap orang memiliki kesempatan untuk hidup lebih panjang dengan lebih sehat serta memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dan menjadikannya lebih produktif. Dengan demikian, indikator yang digunakan dalam pendekatan ini adalah kebutuhan dasar secara layak, antara lain kecukupan pangan, taraf kesehatan yang baik, tingkat pendidikan yang memadai serta perumahan yang layak huni. Sementara di sisi lain, pendekatan kapabilitas menyatakan, tujuan akhir dari pembangunan manusia adalah kebebasan manusia yang semakin luas (Stewart, 2002).

Secara singkat, kebebasan menurut Sen (1999) memiliki elemen dasar yang disebut kapabilitas atau kemampuan seseorang, baik kemampuan dalam bentuk potensi menjadi seseorang (*beings*) maupun untuk melakukan suatu tindakan (*doings*). Kedua kapabilitas ini dipandang berharga untuk mencapai aneka bentuk pencapaian aktual dalam hidup seseorang, yang disebut sebagai *functionings*. Sehingga, pembangunan manusia ditujukan kepada peningkatan kapabilitas seseorang agar tercapai perluasan pilihan yang pada akhirnya memperluas kebebasan manusia. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan instrumen, yang diperkenalkan Sen dengan istilah kebebasan instrumental (*instrumental freedom*). Kebebasan instrumental terdiri dari kebebasan politik, fasilitas ekonomi,

436| Pembangunan Ekonomi

kesempatan sosial, jaminan keterbukaan serta jaminan perlindungan. Kebebasan politik mencakup semua hak-hak sipil yang dinyatakan dalam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers yang digunakan untuk menumbuhkan demokrasi. Fasilitas ekonomi menunjuk pada peluang yang memungkinkan individu dapat memanfaatkan sumberdaya ekonomi, baik untuk maksud-maksud produksi, konsumsi maupun pertukaran. Peluang tersebut dinyatakan dalam peningkatan pendapatan per kapita dan distribusi kekayaan nasional kepada penduduk. Sementara kesempatan sosial terkait dengan tatanan yang membuat masyarakat memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan memadai. Fasilitas pendidikan dan kesehatan ini tidak hanya ditujukan kepada kehidupan pribadi, tetapi kepada masyarakat secara keseluruhan yang dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam kegiatan ekonomi dan politik lebih efektif. Terakhir adalah sistem jaminan sosial yang dibutuhkan untuk melindungi masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dari kesengsaraan yang lebih parah. Sebagai contoh misalnya di Indonesia melalui pengadaan beras murah untuk rakyat miskin (Raskin).

Kelima kebebasan instrumental di atas secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perluasan kebebasan manusia untuk memilih kehidupan sesuai dengan yang mereka harapkan (Sen, 1999). Selanjutnya, pendekatan BN lebih tepat diterapkan kepada negara-negara miskin, karena fokusnya pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia sebagai tujuan dari pembangunan. Sementara pendekatan kapabilitas dapat diterapkan, baik terhadap negara-negara miskin maupun kaya (Stewart, 2002). Meskipun terdapat perbedaan, kedua pendekatan ini sama-sama memandang, bahwa peningkatan pendapatan per kapita dan distribusi kekayaan nasional melalui pertumbuhan ekonomi dipandang penting sebagai alat (*means*) dan bukan tujuan (*end*) dari pembangunan manusia maupun proses pembangunan secara umum. Pendekatan BN memandang, melalui peningkatan pendapatan per kapita, masyarakat dapat memiliki sarana untuk meningkatkan derajat kesehatan dan taraf pendidikannya dengan lebih baik, fasilitas perumahan yang layak serta ketersediaan pangan yang cukup. Di sisi lain, menurut pendekatan kapabilitas,

peningkatan pendapatan per kapita memberikan peluang bagi setiap individu untuk memanfaatkan sumberdaya secara luas karena memiliki kapabilitas di dalam (*being*) dan untuk melakukan aktivitas (*doings*) dalam berbagai kegiatan ekonomi maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menjadi pilihan hidupnya.

Dalam tataran kebijakan, pembangunan manusia memperoleh perhatian besar dari banyak negara. Menurut Streeten (1994), ada beberapa alasan yang melatarbelakangi perhatian ini, antara lain; *Pertama*, pembangunan manusia memberikan sumbangan yang relatif besar terhadap peningkatan produktivitas. Hal ini dilakukan melalui peningkatan derajat kesehatan dan tingkat pendidikan. *Kedua*, pembangunan manusia dapat mengurangi tingkat reproduksi yang tidak terkendali melalui penurunan hasrat keluarga untuk menambah atau memperbesar jumlah anggota keluarganya. Hasrat reproduksi yang tidak terkendali relatif berkurang akibat peningkatan pengetahuan keluarga mengenai sejauhmana kemampuan mereka dalam menyediakan fasilitas bagi kelangsungan pendidikan dan kesehatan anak-anak. *Ketiga*, pembangunan manusia mendukung lingkungan fisik. Penurunan populasi akan mempengaruhi juga kepadatan penduduk dan pada akhirnya mengurangi tekanan terhadap alam dan daya dukung lingkungan. Di samping itu, tak kalah penting adalah, bahwa pembangunan manusia dapat mendorong penentuan prioritas-prioritas pembangunan yang menempatkan manusia sebagai tujuan dan pusat dari aktivitas pembangunan secara luas (Chakraborty, 2002; Bagolin, 2004).

BAB XXXIII

INDIKATOR KEBERHASILAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Penggunaan indikator dan variabel pembangunan bisa berbeda untuk setiap negara. Di Negara-negara yang masih miskin, ukuran kemajuan dan pembangunan mungkin masih sekitar kebutuhan-kebutuhan dasar seperti listrik masuk desa, layanan kesehatan pedesaan, dan harga makanan pokok yang rendah. Sebaliknya, di negara-negara yang telah dapat memenuhi kebutuhan tersebut, indikator pembangunan akan bergeser kepada faktor-faktor sekunder dan tersier (Tikson, 2005).

Sejumlah indikator ekonomi yang dapat digunakan oleh lembaga-lembaga internasional antara lain pendapatan perkapita (GNP atau PDB), struktur perekonomian, urbanisasi, dan jumlah tabungan. Disamping itu terdapat pula dua indikator lainnya yang menunjukkan kemajuan pembangunan sosial ekonomi suatu bangsa atau daerah yaitu Indeks Kualitas Hidup (IKH atau PQLI) dan Indeks Pembangunan Manusia (HDI). Berikut ini, akan disajikan ringkasan Tikson (2005) terhadap kelima indikator tersebut:

1. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita, baik dalam ukuran GNP maupun PDB merupakan salah satu indikator makro-ekonomi yang telah lama digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Dalam perspektif makroekonomi, indikator ini merupakan bagian kesejahteraan manusia yang dapat diukur, sehingga dapat menggambarkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Tampaknya pendapatan per kapita telah menjadi indikator makroekonomi yang tidak bisa diabaikan, walaupun memiliki beberapa kelemahan. Sehingga pertumbuhan pendapatan nasional, selama ini, telah dijadikan tujuan pembangunan di negara-negara dunia ketiga. Seolah-olah ada asumsi bahwa kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara otomatis ditunjukkan oleh adanya peningkatan pendapatan nasional (pertumbuhan ekonomi). Walaupun demikian, beberapa ahli

menganggap penggunaan indikator ini mengabaikan pola distribusi pendapatan nasional. Indikator ini tidak mengukur distribusi pendapatan dan pemerataan kesejahteraan, termasuk pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi.

2. Struktur Ekonomi

Telah menjadi asumsi bahwa peningkatan pendapatan per kapita akan mencerminkan transformasi struktural dalam bidang ekonomi dan kelas-kelas sosial. Dengan adanya perkembangan ekonomi dan peningkatan per kapita, kontribusi sektor manufaktur/industri dan jasa terhadap pendapatan nasional akan meningkat terus. Perkembangan sektor industri dan perbaikan tingkat upah akan meningkatkan permintaan atas barang-barang industri, yang akan diikuti oleh perkembangan investasi dan perluasan tenaga kerja. Di lain pihak, kontribusi sektor pertanian terhadap pendapatan nasional akan semakin menurun.

3. Urbanisasi

Urbanisasi dapat diartikan sebagai meningkatnya proporsi penduduk yang bermukim di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di pedesaan. Urbanisasi dikatakan tidak terjadi apabila pertumbuhan penduduk di wilayah urban sama dengan nol. Sesuai dengan pengalaman industrialisasi di negara-negara eropa Barat dan Amerika Utara, proporsi penduduk di wilayah urban berbanding lurus dengan proporsi industrialisasi. Ini berarti bahwa kecepatan urbanisasi akan semakin tinggi sesuai dengan cepatnya proses industrialisasi. Di negara-negara industri, sebagian besar penduduk tinggal di wilayah perkotaan, sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang proporsi terbesar tinggal di wilayah pedesaan. Berdasarkan fenomena ini, urbanisasi digunakan sebagai salah satu indikator pembangunan.

4. Angka Tabungan

Perkembangan sektor manufaktur/industri selama tahap industrialisasi memerlukan investasi dan modal. *Financial capital* merupakan faktor utama dalam proses industrialisasi dalam sebuah masyarakat, sebagaimana terjadi di Inggris pada umumnya Eropa pada awal pertumbuhan kapitalisme yang

disusul oleh revolusi industri. Dalam masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi, modal usaha ini dapat dihimpun melalui tabungan, baik swasta maupun pemerintah.

5. Indeks Kualitas Hidup

IKH atau *Physical Quality of life Index* (PQLI) digunakan untuk mengukur kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Indeks ini dibuat indikator makroekonomi tidak dapat memberikan gambaran tentang kesejahteraan masyarakat dalam mengukur keberhasilan ekonomi. Misalnya, pendapatan nasional sebuah bangsa dapat tumbuh terus, tetapi tanpa diikuti oleh peningkatan kesejahteraan sosial. Indeks ini dihitung berdasarkan kepada (1) angka rata-rata harapan hidup pada umur satu tahun, (2) angka kematian bayi, dan (3) angka melek huruf. Dalam indeks ini, angka rata-rata harapan hidup dan kematian bayi akan dapat menggambarkan status gizi anak dan ibu, derajat kesehatan, dan lingkungan keluarga yang langsung berasosiasi dengan kesejahteraan keluarga. Pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf, dapat menggambarkan jumlah orang yang memperoleh akses pendidikan sebagai hasil pembangunan. Variabel ini menggambarkan kesejahteraan masyarakat, karena tingginya status ekonomi keluarga akan mempengaruhi status pendidikan para anggotanya. Oleh para pembuatnya, indeks ini dianggap sebagai yang paling baik untuk mengukur kualitas manusia sebagai hasil dari pembangunan, disamping pendapatan per kapita sebagai ukuran kuantitas manusia.

6. Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*)

The United Nations Development Program (UNDP) telah membuat indikator pembangunan yang lain, sebagai tambahan untuk beberapa indikator yang telah ada. Ide dasar yang melandasi dibuatnya indeks ini adalah pentingnya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Menurut UNDP, pembangunan hendaknya ditujukan kepada pengembangan sumberdaya manusia. Dalam pemahaman ini, pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah proses yang bertujuan mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa peningkatan kualitas sumberdaya

manusia akan diikuti oleh terbukanya berbagai pilihan dan peluang menentukan jalan hidup manusia secara bebas.

Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai faktor penting dalam kehidupan manusia, tetapi tidak secara otomatis akan mempengaruhi peningkatan martabat dan harkat manusia. Dalam hubungan ini, ada tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengkombinasikan tiga komponen, (1) rata-rata harapan hidup pada saat lahir, (2) rata-rata pencapaian pendidikan tingkat SD, SMP, dan SMU, (3) pendapatan per kapita yang dihitung berdasarkan *Purchasing Power Parity*. Pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia yang dapat dirangkum dalam peningkatan *knowledge, attitude* dan *skills*, disamping derajat kesehatan seluruh anggota keluarga dan lingkungannya.

Ukuran pembangunan yang digunakan selama ini, yaitu PDB dalam situasi nasional dan PDRB dalam situasi regional, hanya mampu menggambarkan pembangunan ekonomi saja. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu parameter yang lebih menyeluruh, yang mampu menggambarkan perkembangan aspek social dan kesejahteraan manusia tidak hanya sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Suryana, 2000). Kemajuan bidang ekonomi adalah factor paling penting dalam sebuah proses pembangunan namun unsur tersebut bukanlah satu-satunya factor yang dapat mendorong kemajuan sebuah perekonomian. Tapi, pembangunan manusia juga harus menjadi bagian penting dari adanya pembangunan yang biasanya hanya dipandang dari segi finansial dan material semata. Oleh karena itu suatu pembangunan harus dipandang sebagai suatu proses multi-dimensi yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari seluruh sistem social dan ekonomi yang ada (Todaro dan Smith, 2006).

Sen (1999) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi sudah seharusnya diterjemahkan sebagai suatu proses perluasan dari kebebasan positif yang dinikmati oleh masyarakat. Ia

mengamati bahwa masalah riil dari Negara yang sedang membangun adalah menurunnya kualitas kehidupan daripada rendahnya pendapatan. Pembangunan sebagai proses yang memperluas entitlement dan kapabilitas manusia untuk hidup sesuai dengan yang diinginkannya. Sumber daya manusia (*human resources*) dari suatu bangsa, tidak dinilai dari modal fisik ataupun sumber daya material yang dimilikinya tapi dilihat dari factor yang paling menentukan karakter dan kecepatan pembangunan social dan ekonomi bangsa tersebut (Todaro dan Smith, 2006).

Sejarah mencatat bahwa negara yang menerapkan patron pembangunan dengan perspektif bahwa manusia mampu berkembang meskipun tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Investasi manusia diyakini lebih berdampak dalam hal meningkatkan produktivitas factor produksi secara total dan menyeluruh. Karena tanah, tenaga kerja, modal fisik akan mengalami diminishing return tapi hal tersebut tidak berlaku pada ilmu pengetahuan (Kuncoro, 2000).

Menurut UNDP (1996), untuk mengetahui tingkat indeks pembangunan suatu daerah dapat dideskripsikan melalui beberapa faktor, yaitu umur panjang dan sehat yang ditinjau dari segi kesehatan; angka melek huruf, partisipasi sekolah, dan rata-rata lamanya bersekolah untuk mengukur kinerja pembangunan apabila dilihat dari segi pendidikan; dan kemampuan masyarakat untuk membeli sejumlah kebutuhan pokok dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari ditinjau dari segi rata-rata besarnya pengeluaran perkapita. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100. Pengertian IPM (Indeks Pembangunan Manusia) yang dirilis oleh UNDP menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia (Biro Pusat Statistik dan UNDP, 1997). HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Indeks tersebut pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel india Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics, sejak itu dipakai oleh Program pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya. Indeks ini lebih fokus pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

UNDP mengukur HDI dengan pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu (Arsyad, 1999):

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat kelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross enrollment ratio (bobot satu per tiga).
3. standard kehidupan yang layak diukur dengan *GDP per kapita gross domestic product*/produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli *purchasing power parity* dalam Dollar AS.

Menurut BKKBN, Indek Pembangunan Manusia (IPM) adalah merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian pembangunan manusia yang sudah dilakukan di suatu Negara (wilayah) (Soepono, 1999). IPM atau *Human Development Indeks* (HDI) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Program* (UNDP) ini digunakan untuk mengukur Keberhasilan Kinerja dalam hal pembangunan manusia.

Tolak ukur yang dapat dianggap sangat pokok untuk mengukur keberhasilan dalam pembangunan adalah semua yang terkait dengan kesejahteraan rakyat. Kata Kesejahteraan sendiri menurut terminology dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai

arti ketentraman, kesenangan hidup, kemakmuran dan keamanan. Dan jika ingin kondisi ini dapat tercapai maka prasyarat utama yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan mutu kehidupan individu/ perorangan melalui pembangunan manusia seutuhnya.

Kualitas pembangunan manusia yang telah dicapai oleh suatu wilayah dapat dilakukan dengan mengukur mutu pembangunan tersebut dengan menggunakan parameter dengan 3 (tiga) komponen antara lain; (1) keberhasilan dalam kesehatannya yaitu dilihat dari kemampuan hidup secara fisik yaitu dengan melihat angka harapan hidup; (2) kemampuan untuk merefleksikan keberhasilan pengembangan pendidikan dengan melihat angka melek huruf dan lama sekolah; (3) besarnya barang dan jasa yang dapat disediakan oleh masyarakat bagi warganya yaitu dengan melihat paritas daya beli masyarakat. Dengan kata lain indeks pembangunan manusia diukur dengan tiga dimensi, yaitu (1) indek kesehatan, (2) pendidikan dan (3) ekonomi. Indek kesehatan diukur dari angka harapan hidup, biasanya angka harapan hidup bayi yang lahir. Indek pendidikan salah satunya dapat diukur dari angka melek huruf. Kemudian dimensi ekonomi diukur dari indek daya beli masyarakat.

Setelah IPM diketahui, maka perlu ditentukan kreteria analisisnya, dimana ketentuan tersebut adalah (Suparman, 1986) :

1. Status Rendah: $IPM < 50$
2. Status Menengah Bawah :
 $50 < IPM < 66$
3. Status Menengah Atas: $66 < IPM < 80$
4. Status Tinggi: $IPM > 80$

Sejak tahun 1990 UNDP mulai melakukan penelitian pada IPM (Indeks Pembangunan Manusia) atau HDI (*Human development Index*) secara konsisten menerbitkan seri tahunan dalam publikasi yang berjudul *Human Development Report*, sebagai upaya untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia suatu Negara. Walaupun belum mampu mengukur semua aspek dari pembangunan, namun cukup mampu mengukur aspek pokok dari pembangunan manusia yang dinilai mampu menggambarkan status kemampuan dasar penduduk.

Tercapainya tujuan pembangunan manusia, empat hal penting yang harus diperhatikan adalah produktivitas, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan (UNDP, 1995). Empat hal pokok tersebut memuat pijakan-pijakan yang dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. Produktivitas, kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produktifitas dan berperan penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan memenuhi kebutuhan hidup. sehingga pebangunan ekonomi juga dapat digolongkan dalam bagian pembangunan manusia.
2. Pemerataan, dalam hal mendapatkan kesempatan dan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial, penduduk memiliki kesempatan yang sama dalam hal tersebut. Oleh karena itu kegiatan yang dapat meminimalisir 16 kesempatan untuk mendapatkan akses tersebut harus diperhatikan, sehingga mereka dapat memperoleh manfaat dan kesempatan yang ada dan ikut berperan dalam kegiatann produktif yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
3. Kesinambungan, akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang tapi juga disiapkan untuk generasi yang akan datang. Segala bentuk sumber daya baik fisik, manusia maupun lingkungan harus senantiasa diperbarui.
4. Pemberdayaan, dalam hal keputusan dan proses yang akan menentukan arah kehidupan mereka, penduduk harus turut berpartisipasi dan berperan penuh. Begitu pula dalam hal mengambil manfaat dari proses pembangunan penduduk juga harus dilibatkan.

Model pembangunan manusia sebenarnya tidak berhenti pada keempat hal tersebut diatas. Terdapat beberapa alternatif tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat seperti ekonomi dan sosial, politik sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan drajat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari model tersebut. Konsep pembangunan

446| Pembangunan Ekonomi

manusia pada dasarnya merupakan sebuah konsep yang menginginkan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya baik secara fisik, mental maupun secara spiritual. Ditegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan selama ini difokuskan kepada pembangunan sumber daya manusia yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi.

Diharapkan bahwa pembangunan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dasar penduduk yang dapat turut berperan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan pembangunan manusia, baik dalam konteks nasional maupun regional. Hal ini dianggap penting karena kebijakan sebuah pembangunan yang tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia maka akan berdampak pada proses pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia juga diharapkan dapat memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antardaerah yang merupakan persoalan sulit bagi kebanyakan Negara berkembang terutama Negara yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi (Brata, 2004).

Indeks pembangunan manusia ditujukan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan dasar tersebut, maka digunakanlah suatu indikator untuk mengetahui dampak sebagai komponen dasar penghitungan, yaitu angka harapan hidup ketika lahir pencapaian pendidikan dapat diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara maupun daerah menunjukkan sejauh mana suatu Negara atau daerah mampu mencapai sasaran yang ditentukan yaitu berupa angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, serta tingkat konsumsi dan pengeluaran yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang capaian yang harus dicapai untuk mencapai sasaran tersebut.

Pembentukan modal manusia merupakan suatu tahapan untuk mendapatkan dan meningkatkan kualitas orang-orang yang memiliki keahlian, pendidikan, spesialisasi dan pengalaman yang menentukan tingkat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karenanya pembentukan modal manusia dikaitkan

dengan investasi pada manusia yang diharapkan dapat membentuk sumber daya manusia yang produktif dan kreatif.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur ukuran HDI adalah sebagai berikut (UNDP, 1993).

1. Harapan Hidup (*Longevity*)

Indeks harapan hidup atau disebut juga lamanya hidup diartikan bahwa bertahan lebih lama dapat diukur dengan indeks harapan hidup saat lahir (*life expectancy of birth*) dan angka kematian bayi per seribu penduduk (*infant mortality rate*). Dengan menyertakan informasi tentang angka kelahiran dan kematian per tahunnya, dimana variabel tersebut diharapkan mampu mempresentasikan rata-rata lama hidup beserta hidup sehat masyarakat. Dikarenakan sulitnya untuk mendapatkan informasi orang yang meninggal pada periode waktu tertentu, maka digunakan metode tidak langsung untuk.

Perhitungan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan dua data dasar yaitu rata-rata jumlah lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup dari wanita yang pernah kawin. Untuk mendapatkan indeks harapan hidup dengan menetapkan standar angka harapan hidup berdasarkan nilai maksimum dan minimumnya.

2. Indeks Pendidikan

Untuk menghitung Indeks Pendidikan (IP) dalam perhitungan IPM, mencakup dua parameter yaitu angka melek huruf (Lit) dan rata-rata lama sekolah (MYS). Populasi yang digunakan adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bias membaca dan menulis dalam huruf latin atau huruf lainnya. Perlunya batasan tersebut agar angkanya dapat mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berumur di bawah 15 tahun masih dalam proses sekolah akan sekolah sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya. Kedua parameter tersebut disertakan agar mampu menggambarkan tingkat pengetahuan (gambaran angka LIT), dimana LIT merupakan rasio penduduk yang memiliki kemampuan baca tulis dalam suatu kelompok penduduk secara keseluruhan. Sedangkan gambaran angka MYS merupakan cerminan terhadap keterampilan yang dimiliki penduduk.

Menurut Todaro dan Smith (2006), pembangunan manusia terdapat tiga nilai inti pembangunan universal yang dijadikan tujuan utama yaitu: (1) kecukupan, maksudnya adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat pada umumnya seperti sandang, pangan dan papan, kesehatan dan keamanan. Apabila salah satu kebutuhan tersebut belum terpenuhi maka akan menyebabkan keterbelakangan obsolut; (2) jati diri, yaitu apabila masyarakat mampu menjadi manusia seutuhnya, maksudnya adalah adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, mampu menghargai diri sendiri, untuk merasa diri pantas dan layak melakukan atau mengejar sesuatu, dan seterusnya; dan (3) kebebasan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memilih sebagai mana yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan manusia. Kemerdekaan dan kebebasan disini diartikan sebagai kemampuan untuk berdiri tegak dan mandiri sehingga sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran perspektif-perspektif materil dalam kehidupan. Kebebasan disini juga diartikan sebagai kebebasan terhadap ajaran-ajaran yang dogmatis.

Sebenarnya paradigma pembangunan manusia tidak berhenti sampai disana. Pilihan-pilihan tambahan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat luas seperti kebebasan politik, ekonomi dan sosial, sampai kesempatan untuk menjadi kreatif dan produktif, dan menikmati kehidupan yang sesuai dengan harkat pribadi dan jasmani hak-hak azasi manusia merupakan bagian dari paradigma tersebut. Dengan demikian, paradigma pembangunan manusia memiliki dua sisi. Sisi pertama berupa informasi kapabilitas manusia seperti perbaikan taraf kesehatan, pendidikan dan keterampilan. Sisi lainnya adalah pemanfaatan kapabilitas mereka untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif, kultural, sosial dan politik. Jika kedua sisi itu tidak seimbang maka hasilnya adalah frustrasi masyarakat.

Untuk dapat membuat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) maka UNDP mensponsori sebuah proyek tahun 1989 yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dan pembangunan. Tim tersebut menciptakan kemampuan dasar. Kemampuan dasar itu adalah umur panjang, pengetahuan dan daya beli. Umur panjang yang dikuantifikasikan dalam umur harapan hidup saat lahir atau sering disebut Angka Harapan Hidup/AHH (eo). Pengetahuan

dikuantifikasikan dalam kemampuan baca tulis/angka melek huruf dan rata-rata lama bersekolah. Daya beli dikuantifikasikan terhadap kemampuan mengakses sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai standar hidup yang layak.

Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Semakin dekat nilai IPM suatu wilayah terhadap angka 100, semakin dekat jalan yang harus ditempuh untuk mencapai sasaran itu.

Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, pemerataan antar generasi.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan alat ukur yang peka untuk dapat memberikan gambaran perubahan yang terjadi, terutama pada komponen daya beli yang dalam kasus Indonesia sudah sangat merosot akibat krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997. Krisis ekonomi dan moneter tersebut berdampak pada tingkat pendapatan yang akibatnya banyak PHK dan menurunnya kesempatan kerja yang kemudian dipengaruhi tingkat inflasi yang tinggi selama tahun 1997-1998. Menurunnya tingkat kesempatan kerja dalam konteks pembangunan manusia merupakan terputusnya jembatan yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan upaya peningkatan kapasitas dasar penduduk.

Dampak dari krisis ekonomi pada pembangunan manusia adalah dengan menurunnya daya beli dan ini juga berarti terjadinya penundaan upaya peningkatan kapasitas fisik dan kapasitas intelektual penduduk. Penurunan beberapa komponen IPM sebagai akibat kepekaan IPM sebagai alat ukur yang dapat

menangkap perubahan nyata yang dialami penduduk dalam jangka pendek.

Dimensi IPM secara rinci ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut (Suparman, 1986):

1. Angka Harapan Hidup adalah indikator yang mengukur *longevity* (panjang umur) dari seseorang di suatu wilayah atau negara. Longevity ini bukan hanya upaya perorangan tetapi merupakan upaya masyarakat secara keseluruhan untuk menggunakan sumber daya yang ada sehingga dapat memperpanjang hidupnya. Dapat dikatakan seseorang akan bertahan hidup lebih panjang apabila selalu sehat, atau jika menderita sakit secepatnya dapat berobat untuk membantu mempercepat kesembuhannya.
2. Melek Huruf dan lama sekolah adalah indikator yang mengukur tingkat pendidikan penduduk dengan melihat seberapa jauh masyarakat di wilayah tersebut memanfaatkan sumber daya yang ada dalam upaya meningkatkan kecerdasan warganya. Indikator Melek Huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis dan Indikator Lama Sekolah dihitung dari partisipasi sekolah, tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani serta pendidikan tinggi yang ditamatkan.
3. Paritas daya beli adalah indikator yang mengukur tentang besarnya daya beli masyarakat di suatu wilayah atau negara. Dengan menggunakan indikator konsumsi riil yang disesuaikan. Sebagai catatan bahwa untuk UNDP dalam mengukur komponen digunakan indikator PDB per kapita.

Dalam melakukan pembangunan manusia tentunya tidak hanya memperhatikan pada tiga komponen yang menjadi tolok ukur dalam penentuan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) saja, disamping hal-hal tersebut tentunya masih banyak aspek lain yang juga mempengaruhi yaitu dari berbagai aspek pembangunan manusia yang tidak dapat diukur seperti; moral, mental, spiritual, tanggung jawab dan lain sebagainya. Untuk itu dalam upaya mencapai kesejahteraan secara utuh kita jangan hanya terjebak untuk memprioritaskan pada peningkatan di tiga aspek yang

menjadi tolok ukur IPM saja, tetapi juga perlu meningkatkan kualitas manusia dari aspek-aspek yang lainnya.

Angka harapan hidup adalah perkiraan jumlah tahun hidup di suatu wilayah dari sekelompok makhluk hidup tertentu. Angka harapan hidup merupakan cermin dari kondisi kesehatan penduduk yang memiliki kemampuan bertahan hidup atau umur lebih lama karena kesehatannya lebih baik.

Melek aksara atau melek huruf dalam arti sempit adalah kemampuan membaca dan menulis. Sedang dalam arti luas melek aksara adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, mengerti, menerjemahkan, membuat, mengkomunikasikan dan mengolah isi dari rangkaian teks yang terdapat pada bahan-bahan cetak dan tulisan yang berkaitan dengan berbagai situasi. Selain itu juga diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan bahasa dan menggunakannya untuk mengerti sebuah bacaan, mendengarkan perkataan, mengungkapkannya dalam bentuk tulisan, dan berbicara. Dalam perkembangan modern kata ini lalu diartikan sebagai kemampuan untuk membaca dan menulis pada tingkat yang baik untuk berkomunikasi dengan orang lain, atau dalam taraf bahwa seseorang dapat menyampaikan idenya dalam masyarakat yang mampu baca-tulis, sehingga dapat menjadi bagian dari masyarakat tersebut.

Baca-tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analisis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang berdalih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah daripada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analisis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca-tulis juga berarti peningkatan

peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pendidikan penduduk maka perlu adanya penyelenggaraan pendidikan yang merata dan berkualitas. Pendidikan adalah usaha yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Standar hidup menunjuk ke kualitas dan kuantitas barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia bagi orang. Biasanya diukur oleh pendapatan nyata per orang, meskipun beberapa pengukuran lain dapat digunakan; contohnya adalah ketersediaan barang (seperti jumlah kulkas per 1000 orang), atau pengukuran kesehatan seperti harapan hidup.

Ide standar ini dapat berlawanan dengan kualitas hidup, yang memperhitungkan tidak hanya standar hidup material, tetapi juga faktor subyektif lainnya yang menyumbang bagi kehidupan seseorang, seperti hiburan, keamanan, sumber budaya, kehidupan sosial, kesehatan mental, dan lain-lain. Cara yang lebih rumit untuk menghitung kesejahteraan harus digunakan untuk membuat keputusan semacam itu, dan seringkali hal ini bersangkutan dengan politik, dan oleh sebab itu kontroversial.

BAB XXXIV

PENDIDIKAN DAN BONUS DEMOGRAFI

Bonus demografi merupakan suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi, yaitu penurunan angka kelahiran dan angka kematian. Penurunan angka kelahiran akan menyebabkan penurunan jumlah penduduk umur kurang dari 15 tahun, yang diikuti dengan penambahan penduduk usia produktif 15-64 tahun sebagai akibat banyaknya kelahiran di masa lalu. Sementara karena perbaikan status kesehatan, umur harapan hidup semakin panjang, sehingga lansia akan semakin meningkat.

Adioetomo dan Moertiningsih (2005) mengatakan bahwa bonus demografi ini hanya akan terjadi satu kali saja bagi semua penduduk suatu negara yaitu yang disebut sebagai *window of opportunity*. Hauser dan Duncan (1959) mengusulkan definisi demografi sebagai *berikut "demography is the study of the size, territorial distribution and composition of population, changes there in and the components of such changes which maybe identified as natality, territorial movement (migration), and social (changes of states)"*. Menurut Hauser dan Duncan (1959), demografi mempelajari jumlah, persebaran, territorial dan komposisi penduduk serta perubahannya dan sebab sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Ilmu kependudukan biasanya diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang penduduk. Adapun demografi berasal dari bahasa Yunani yang merupakan gabungan dua kata, yaitu *demos* dan *grafein* yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau penduduk.

Ross (2004) mengatakan bahwa bonus demografi terjadi karena penurunan kelahiran yang dalam jangka panjang menurunkan proporsi penduduk muda sehingga investasi untuk pemenuhan kebutuhannya berkurang, dengan demikian sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Menurut Bogue (1973), demografi adalah suatu studi statistik dan matematik tentang jumlah komposisi dan persebaran penduduk, serta faktor-faktor setelah melewati kurun waktu yang disebabkan oleh lima proses yaitu : fertilitas, mortalitas, perkawinan, migrasi dan mobilitas sosial.

Menurut Cich (2007) mengartikan bahwa bonus demografi adalah keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh menurunnya rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan kelahiran jangka panjang, jendela kesempatan adalah titik perubahan rasio ketergantungan dari menurun dan berbalik menjadi meningkat kembali (yang merupakan titik terendah rasio ketergantungan). Menurut Adioetomo dan Moertiningsih (2005) bonus demografi didefinisikan sebagai keuntungan ekonomis yang disebabkan oleh penurunan rasio ketergantungan sebagai hasil proses penurunan fertilitas jangka panjang dan peningkatan usia harapan hidup. Penurunan proporsi penduduk muda mengurangi besarnya biaya investasi untuk pemenuhan kebutuhannya, sehingga sumber daya dapat dialihkan kegunaannya untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) (2008) bonus demografi sendiri dapat dibagi menjadi dua kalimat yaitu bonus dan demografi. Bonus adalah upah tambahan di luar gaji atau upah sebagai hadiah, gaji, upah ekstra yang dibayarkan kepada karyawan, gratifikasi, insentif. Demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah, dan perkembangan penduduk, ilmu yg memberikan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan. Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara sebagai akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif (rentang usia 15-64 tahun) dalam evolusi kependudukan yang dialaminya. Jadi kesimpulan bonus demografi merupakan suatu kondisi perubahan struktur umur penduduk sebagai akibat dari proses transisi demografi. Bonus demografi adalah kondisi dimana penduduk usia produktif jauh melebihi penduduk tidak produktif ini akan berpengaruh pada rasio ketergantungan, dimana beban ekonomi yang harus ditanggung

oleh penduduk yang produktif terhadap penduduk tidak produktif mencapai titik terendah. Bonus Demografi juga merupakan suatu wilayah atau negara yang memiliki jumlah penduduk usia produktif (rentang usia 15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan dengan usia nonproduktif (rentang usia 64+). Dikatakan sebagai bonus karena ini tidak terjadi secara terus menerus melainkan terjadinya hanya sekali dalam beratus-ratus tahun. Bonus Demografi ini hanya berlangsung sekali dan tidak bertahan lama.

Dari pengertian di atas kita bisa sedikit membayangkan bonus demografi yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia dan juga kita akan membayangkan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Dengan adanya bonus demografi yang 9 diperkirakan akan terjadi di Indonesia pada tahun 2035 di mana pada periode ini sangat menjanjikan potensi tenaga kerja yang berkualitas karena banyak tenaga kerja yang terlatih, dan untuk membuat itu berjalan dengan baik maka kita harus mengasumsikan untuk meningkatkan pendidikan di Indonesia agar nantinya juga akan dapat membuat generasi-generasi penerus bangsa memiliki kualitas dan mampu bersaing dengan negara-negara lain untuk mencapai kesejahteraan bersama.

BAB XXXV

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MODAL MANUSIA

Penelitian ini akan melihat pembangunan manusia untuk membentuk *human capital* dalam konteks pendidikan. Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investment*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh setiap negara bahwa pembangunan sektor pendidikan merupakan prasyarat kunci bagi pertumbuhan sektor-sektor pembangunan lainnya. Menurut Nurulfalik (2004), Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya telah mulai dipikirkan sejak zaman Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para teoritis klasik lainnya sebelum abad ke-19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia. Pemikiran ilmiah ini baru mengambil tonggak penting pada tahun 1960-an ketika Theodore Schultz, yang merupakan peletak dasar teori *human capital* modern, berpidato dengan judul "*Investment in Human Capital*" di hadapan *The American Economic Association*. Pesan utama dari pidato tersebut sederhananya adalah bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi semata-mata, akan tetapi juga merupakan suatu investasi. Schultz (1961) dan Deninson (1962) kemudian memperlihatkan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Alasan utama dari perubahan pandangan ini adalah adanya pertumbuhan minat dan *interest* selama tahun 1960-an mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Pada tahun 1962, Bowman, mengenalkan suatu konsep "Revolusi Investasi Manusia di dalam Pemikiran Ekonomis". Para peneliti lainnya

seperti Deninson (1962), Becker (1964) dan yang lainnya turut melakukan pengujian terhadap teori *human capital* ini.

Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (*human capital investment*) dan menjadi "*leading sector*" atau salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintahnya terhadap pembangunan sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya. Menurut Sumara (2005), pada tahun 1970-an penelitian-penelitian mengenai hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi sempat mandeg karena timbulnya kesangsian mengenai peranan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di beberapa negara, khususnya di Amerika Serikat dan negara berkembang yang menerima bantuan dari Bank Dunia pada waktu itu. Kesangsian ini timbul, antara lain karena kritik para sosiolog pendidikan diantaranya Becker (1964) yang mengatakan bahwa teori *human capital* lebih menekankan dimensi material manusia sehingga kurang memperhitungkan manusia dari dimensi sosio budaya. Kritik Becker justru membuka perspektif dari keyakinan filosofis bahwa pendidikan tidak pula semata-mata dihitung sebagai investasi ekonomis tetapi lebih dari itu dimensi sosial, budaya yang berorientasi pada dimensi kemanusiaan merupakan hal yang lebih penting dari sekedar investasi ekonomi. Karena pendidikan harus dilakukan oleh sebab itu terkait dengan kemanusiaan itu sendiri (*human dignity*). Penelitian Hick (1980), Wheeler (1980), dan beberapa peneliti neoklasik lain, telah dapat meyakinkan kembali secara ilmiah akan pentingnya manusia yang terdidik menunjang pertumbuhan ekonomi secara langsung bahkan seluruh sektor pembangunan makro lainnya. Atas dasar keyakinan ilmiah itulah akhirnya Bank Dunia kembali merealisasikan program bantuan internasionalnya ke berbagai negara. Kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ini menjadi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dan investasi fisik lainnya. Artinya, investasi modal fisik akan berlipat ganda nilai tambahnya di kemudian hari jika pada saat yang sama dilakukan juga investasi SDM, yang secara

langsung akan menjadi pelaku dan pengguna dalam investasi fisik tersebut. Sekarang diakui bahwa pengembangan SDM suatu negara adalah unsur pokok bagi kemakmuran dan pertumbuhan dan untuk penggunaan yang efektif atas sumber daya modal fisiknya. Investasi dalam bentuk modal manusia adalah suatu komponen integral dari semua upaya pembangunan. Pendidikan harus meliputi suatu spektrum yang luas dalam kehidupan masyarakat itu sendiri.

Tingkat pembangunan manusia yang relatif tinggi akan mempengaruhi kinerja pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas penduduk dan konsekuensinya adalah peningkatan produktivitas dan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya produktivitas dan kreativitas tersebut, penduduk dapat menyerap dan mengelola sumberdaya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi (Brata, 2004).

Pengaruh pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau dalam ilmu ekonomi lazim disebut mutu modal manusia (Ranis, 2004). Konsep mutu modal manusia sendiri mengacu pada suatu komoditi yang dapat dihasilkan dan diakumulasi, serta biaya untuk menghasilkan suatu mutu modal manusia baru dapat memberikan hasilnya pada masa yang akan datang (Ananta, 1986). Peningkatan kualitas modal manusia dapat tercapai apabila memperhatikan 2 faktor penentu yang seringkali disebutkan dalam beberapa literatur, yaitu pendidikan dan kesehatan.

Pendidikan dalam arti luas, baik pendidikan dalam arti formal maupun pelatihan-pelatihan mempengaruhi kualitas modal manusia, baik pada level mikro maupun level makro. Pada level mikro, peningkatan pendidikan seseorang dikaitkan dengan peningkatan pendapatan atau upah yang diperoleh. Apabila upah mencerminkan produktivitas, maka semakin banyak orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi maupun pengalaman pelatihan-pelatihan banyak, semakin tinggi produktivitasnya dan hasilnya ekonomi nasional akan tumbuh lebih tinggi.

Analisis tingkat pendidikan dan upah telah lama dilakukan oleh para ekonom, seperti Mincer (1958) dan Becker (1964) yang melihat pengaruh sekolah dan beberapa variabel lainnya terhadap upah yang diterima pekerja. Di sisi lain, pendidikan juga memiliki

pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan kualitas modal manusia. Heckman dan Klenow (1997) menyebutkan bahwa orang tua, terutama ibu yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi (*tertier education*) memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat kesehatan anak-anaknya, dan anak-anak yang lebih sehat memiliki peluang produktif lebih besar daripada anak-anak yang kurang sehat dalam menyelesaikan pendidikannya.

Di samping pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap produktivitas, pendidikan juga mempengaruhi kualitas modal manusia melalui kemampuan daya serap terhadap perkembangan metode atau teknologi. Analisis di Srilanka menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja serta pengusaha berhubungan secara positif terhadap rata-rata perubahan metode dan teknik-teknik yang lebih efektif dan efisien dalam menjalankan perusahaan (Ramirez, *et al.*, 1998; Ranis, 2004). Di sektor pertanian menunjukkan pengaruh positif tingkat pendidikan petani terhadap adopsi teknologi input-input modern, seperti pupuk dan peralatan mekanis, sehingga meningkatkan hasil pertanian. Studi di Thailand menyebutkan, petani yang bersekolah lebih lama akan mengadopsi metode bertani lebih baik untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Begitu juga di Nepal, petani yang memiliki pendidikan lebih lama memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan produksi beras (Ramirez, *et al.*, 1998). Sebagai tambahan, sebagaimana yang dilaporkan oleh Jamison dan Lau (1982) di Korea Selatan, pendidikan berpengaruh terhadap pemanfaatan teknologi pertanian dimana para petani dengan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kemampuan dalam memilih teknologi yang lebih baik daripada para petani yang berpendidikan lebih rendah.

Dalam perspektif yang lebih makro, pendidikan dikaitkan langsung dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh sejumlah ekonom, seperti Schultz, Komarov, Bouman, Harbison dan Myer pada akhir tahun 1950-an menunjukkan bahwa tingginya rata-rata pendidikan penduduk berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Danim, 2004). Hal yang sama juga ditunjukkan oleh Uzawa (1965) dan Lucas (1988) bahwa pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang hanya mungkin terjadi jika modal manusia (*human*

capital), yang diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, terus ditambah atau ditingkatkan (Temple, 1999).

Analisis lain mengenai pengaruh pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dari Romer (1991) dan Barro (1991). Penelitian tentang pertumbuhan ekonomi yang dilakukan Barro melihat pengaruh langsung tingkat pendidikan dan sejumlah variabel lain terhadap laju pertumbuhan PDB per kapita. Studi Romer mengenai stok pengetahuan dan keterampilan berproduksi seseorang menunjukkan, bahwa pendidikan adalah satu cara dimana individu meningkatkan modal manusianya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, diharapkan stok modal manusianya semakin tinggi. Romer menganalisis pengaruh modal manusia terhadap pertumbuhan ekonomi dalam perspektif peningkatan kemampuan suatu negara untuk mengadopsi serta meningkatkan kemampuan inovasi teknologi dan ilmu pengetahuan (Krueger, 2001). Pandangan ini sejajar dengan Dowrick (2003) bahwa ilmu pengetahuan merupakan dasar dari kemajuan ekonomi, karena semua aktivitas ekonomi berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang.

Perhatian terhadap pendidikan sebagai salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi telah dimulai sejak Tahun 1960-an. Pemanfaatan secara efektif modal fisik sudah barang tentu mensyaratkan adanya keterampilan dan pengetahuan. Sehingga modal manusia dan modal fisik memiliki peranan yang sama penting dalam menjelaskan pertumbuhan ekonomi. Hal itu telah dinyatakan oleh Pyo (1995) dan Lim (1996), bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cepat di Korea Selatan dan Jepang sebagai dampak dari peningkatan melek huruf pada awal pembangunan ekonomi.

Berkaitan dengan modal manusia, Graham dan Richardson (1997) juga telah mengemukakan adanya konsensus dalam teori ekonomi bahwa modal manusia merupakan faktor yang esensial dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan sebagai sarana peningkatan modal manusia memiliki peranan dalam meningkatkan mobilitas tenaga kerja produktif.

Apabila pendidikan menjadi salah satu faktor penentu laju pertumbuhan ekonomi, maka pengeluaran pemerintah untuk pendidikan juga memegang peranan penting. Temuan empiris

menunjukkan bahwa investasi dalam modal manusia, khususnya pendidikan memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Belanja Pemerintah untuk pendidikan memiliki dampak yang kuat dan positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, Lim (1996) menunjukkan peranan pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi dalam 6 cara, yaitu: (1) pendidikan secara umum meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui keterampilan dan pengetahuan; (2) pendidikan juga meningkatkan mobilitas spesifikasi tenaga kerja sehingga mendorong pembagian kerja secara efisien; (3) pendidikan memungkinkan informasi baru serta berbagai input dan proses-proses baru yang belum dikenal dapat diserap dengan lebih cepat dan efektif; (4) pendidikan meningkatkan keterampilan manajerial yang membuat alokasi sumberdaya lebih efisien; (5) pendidikan juga dapat menghapuskan berbagai hambatan yang sifatnya institusional; (6) pendidikan mendukung jiwa kewirausahaan dengan mempromosikan sikap yang bertanggung jawab, kemampuan organisasional, berani mengambil resiko serta mampu menciptakan konsep perencanaan yang berorientasi jangka panjang.

Di samping pendidikan, kesehatan juga memiliki peranan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Preston (1975) telah menunjukkan hubungan yang positif antara angka harapan hidup dengan pendapatan. Angka harapan hidup yang meningkat akan mendorong peningkatan pendapatan pada masa yang akan datang. Sementara Pritchett dan Summers (1996) menunjukkan efek dari pendapatan terhadap harapan hidup. Demikian juga Barro dan Barro (1996) menunjukkan status kesehatan yang diukur dengan harapan hidup sejak lahir mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kenaikan angka harapan hidup dari 50 tahun menjadi 70 tahun akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 14 persen. Studi lain dari Fogel (2004) menghasilkan temuan, bahwa 30 persen pertumbuhan ekonomi Inggris lebih dari dua ratus tahun dipengaruhi oleh peningkatan nutrisi penduduknya (Scheffler, 2004).

Studi Hicks (1980) dengan membuat perbandingan 12 negara yang dikategorikan cepat tumbuh dari 83 negara pada periode 1960 sampai 1977 memperoleh hasil, bahwa ke-12 negara tersebut memiliki angka harapan hidup yang lebih tinggi dari rata-rata keseluruhan negara (Currin, 1984). Begitu juga Bloom, *et al.*, (2001) menunjukkan tingkat kesehatan penduduk secara statistik signifikan dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kenaikan 1 tahun harapan hidup menyebabkan 4 persen kenaikan dalam output. Di samping itu, perbedaan yang lebar antar negara dalam angka harapan hidup dan rata-rata tahun sekolah menerangkan sebab utama dari kesenjangan tingkat pendapatan antar negara.

Pengaruh secara tidak langsung faktor kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi umumnya melalui beberapa cara, antara lain misalnya perbaikan kesehatan penduduk akan meningkatkan partisipasi angkatan kerja, perbaikan kesehatan dapat pula membawa perbaikan dalam tingkat pendidikan yang kemudian menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, ataupun perbaikan taraf kesehatan mendorong bertambahnya jumlah penduduk yang akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja. Penelitian yang dilakukan oleh Mushkin (1962) memperkirakan bahwa penurunan tingkat kematian pada Tahun 1900 di AS telah membawa peningkatan GNP sebesar US\$60 milyar pada Tahun 1960, yang disebabkan oleh penambahan tenaga kerja sebanyak 13 juta jiwa.

Pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi seringkali tidak bisa dilepaskan dari peran pendidikan. Jika pendidikan diakui dapat menuntun kepada pemahaman mengenai nutrisi lebih baik, maka pendidikan menjadi variabel penting dalam kebijakan yang membantu meningkatkan taraf kesehatan. Banyak temuan telah dihasilkan yang menunjukkan hubungan positif antara tingkat pendidikan orang tua dengan pemenuhan gizi pada anak-anak. Hal ini ditunjukkan misalnya dengan membandingkan antara tingkat melek huruf para ibu yang memiliki pengetahuan gizi baik dengan yang buruk. Hasilnya, tingkat melek huruf yang rendah lebih sering terjadi pada para ibu yang memiliki pengetahuan gizi yang buruk terhadap anak-anaknya.

Hasil studi lain, seperti Cochrane *et al.*, (1980) menunjukkan hubungan antara angka kematian bayi dan pendidikan ibu pada 17 negara. Melalui perhitungan regresi, dimana variabel terikat yang digunakan adalah kemungkinan seorang balita mencapai usia 2 tahun sedang variabel bebasnya adalah angka rata-rata usia sekolah diperoleh hasil, bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat kematian bayi dengan rata-rata lama sekolah yang berhasil ditamatkan para ibu. Setiap tambahan tingkat pendidikan yang berhasil ditamatkan akan menurunkan angka kematian bayi 9 per seribu balita. Hasil studi Cochrane *et al.*, (1980) menghasilkan kesimpulan, bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan negatif antara pendidikan orang tua pada kematian bayi dan balita. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat pendidikan orang tua, maka semakin rendah tingkat kematian bayi yang terjadi per seribu jiwa kelahiran.

Studi-studi lainnya misalnya dari Behrman dan Wolfe (1987) di Nicaragua dengan menggunakan data 1294 ibu-ibu menemukan hasil, bahwa angka kematian bayi berkurang 4 per seribu kelahiran oleh tambahan tahun sekolah yang ditempuh oleh para orang tuanya. Studi Schultz (1979) dengan sampel data 6692 para wanita di perkotaan dan 3421 wanita di perdesaan (usia 30 - 34 tahun) Kolombia menemukan hubungan yang negatif dan signifikan angka melek huruf suami dan isteri dengan tingkat kematian bayi. Studi selanjutnya dari Anker dan Knowles (1980) menyebutkan mengenai dampak dari tingkat melek huruf terhadap angka kematian bayi pada 41 distrik di Kenya Tahun 1969. Hasil studi menunjukkan adanya efek marjinal dari tingkat melek huruf terhadap pengurangan angka kematian bayi.

Beberapa temuan di atas memaparkan tingkat kesehatan yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pendidikan. Pendidikan, terutama pendidikan orang tua merupakan salah satu jalur yang menghubungkan pengaruh kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Cara lain menerangkan pengaruh tingkat kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi melalui produktivitas. Tingkat kesehatan yang baik akan mempengaruhi secara positif produktivitas pekerja yang pada akhirnya akan mempengaruhi

kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Hal ini sejalan dengan pandangan yang dinyatakan Bloom dan Canning (2003), bahwa kesehatan dapat menaikkan produktivitas pekerja melalui peningkatan kapasitas fisik mereka, seperti kekuatan dan daya tahan dalam kapasitas mental, fungsi kognisi serta kemampuan akal. Studi yang dilakukan oleh Easterlin (1999), Hamoudi dan Sachs, (1999), Bloom dan Canning (2000); *Commission Macroeconomics and Health* (2001), Bloom, Canning dan Sevilla (2002), Bloom, Canning dan Graham (2003), bahwa kesehatan yang meningkat akan mempengaruhi laju pertumbuhan pendapatan melalui partisipasi pada pasar tenaga kerja, produktivitas pekerja, investasi dalam modal manusia, tabungan, tingkat kelahiran dan struktur usia penduduk.

Selaras dengan pandangan di atas, baik Schultz (1961), Kuznets (1966), Denison (1967) serta Barro dan Sala-i Martin (1995) menjelaskan bahwa pertumbuhan yang berkesinambungan di tingkat nasional seringkali dikaitkan dengan meningkatnya pemenuhan gizi dan status kesehatan yang baik pada penduduk. Di level individu, hasil survey dan sensus menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan antara upah dan pendapatan dengan gizi baik, status kesehatan dan tingkat pendidikan pekerja (Strauss dan Thomas, 1998).

Pengaruh kesehatan terhadap produktivitas bisa berlangsung secara simultan, yakni produktivitas dapat menyumbang pada pendapatan melalui ketersediaan anggaran untuk meningkatkan belanja pada makanan dan nutrisi, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kesehatan sehingga memberikan produktivitas yang lebih tinggi. Dengan kata lain, nutrisi mendorong peningkatan produktivitas, dan produktivitas juga meningkatkan kemampuan untuk mengkonsumsi nutrisi (Schultz, 2002). Strauss dan Thomas (1998) di Sierra Leone juga menunjukkan pengaruh pendapatan terhadap kemampuan konsumsi nutrisi ini dengan meneliti hubungan antara pendapatan rumah tangga petani dengan kemampuan untuk menyediakan nutrisi. Semakin meningkat output per pekerja dalam rumah tangga petani, maka semakin meningkat pula konsumsi nutrisinya.

Munir *et al.*, (1984) dalam salah satu analisisnya juga melihat hubungan antara tingkat kesehatan dan produktivitas.

Salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas sumberdaya manusia terletak pada keadaan kesehatannya sendiri. Rendahnya tingkat gizi dan kalori bagi penduduk usia muda di perdesaan akan menghasilkan pekerja-pekerja yang kurang produktif dengan tingkat mental yang agak terbelakang. Studi Malenbaum (1970) sebagaimana dikutip oleh Tjiptoherijanto (1984) meneliti gejala rendahnya output di sektor pertanian melalui analisis ekonomi makro 22 negara miskin. Melalui perhitungan regresi, dimana output sektor pertanian dianggap sebagai variabel terikat, sedangkan ukuran-ukuran kesehatan, ekonomi dan sosial digunakan sebagai variabel bebas, diperoleh hasil yang menunjukkan pengaruh signifikan dari beberapa variabel bebas dalam mempengaruhi output pertanian.

Selanjutnya, terdapat beberapa jalur dimana tingkat kesehatan penduduk berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, antara lain: (1) produktivitas yang lebih efisien. Pekerja yang sehat cenderung lebih produktif, kreatif dan memiliki stamina yang lebih kuat daripada pekerja dengan riwayat kesehatan yang kurang baik. Hal ini berarti ketika kesehatan penduduk suatu negara meningkat, diharapkan akan menghasilkan output yang lebih besar melalui kombinasinya dengan tingkat keterampilan, modal fisik dan tingkat pengetahuan; (2) kapasitas Pembelajaran (*learning capacity*). Kesehatan menduduki peranan penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan. Anak-anak dengan gizi baik akan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari proses pembelajaran yang berlaku dalam pendidikan dan sekolah, karena memiliki kapasitas yang relatif lebih besar untuk menyerap ilmu pengetahuan dibandingkan anak-anak yang memiliki gizi buruk; (3) kreativitas. Salah satu manfaat yang diperoleh dari kondisi kesehatan yang baik, terutama bagi kesehatan bayi dan ibunya adalah cenderung menghasilkan seseorang yang memiliki kreativitas. Hanya seseorang yang memiliki tingkat kesehatan tinggi akan menjadi lebih efisien dalam menghasilkan barang dan jasa karena memiliki kemampuan dalam menghasilkan gagasan-gagasan baru yang lebih kreatif dan efektif. Dengan kata lain, salah satu efek yang diharapkan dari kenaikan tingkat kesehatan penduduk di suatu negara adalah kemampuan penduduk negara tersebut dalam

menghasilkan inovasi-inovasi baru dalam aktivitas perekonomian; (4) penguasaan keterampilan. Manfaat lainnya dari peningkatan kesehatan adalah menghasilkan orang-orang muda dengan kemampuan yang baik dalam mengatasi tekanan perubahan teknologi yang berlangsung cepat, dan memanfaatkannya untuk berbagai aktivitas ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan dalam kesehatan dalam suatu negara akan meningkatkan keterampilan pada penduduknya dan akan berpengaruh terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan intensitas inovasi dan penemuan-penemuan baru. Dengan demikian, tingkat kesehatan yang baik akan mempengaruhi penguasaan keterampilan dan kemampuan mengendalikan tekanan, sehingga mampu mengembangkan intensitas riset dan karenanya kemajuan teknologi akan tercapai. Kemajuan teknologi ini akan mempengaruhi kemampuan produksi barang dan jasa yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi;

Secara empiris, terdapat hubungan negatif yang kuat antara berbagai indikator tingkat kesehatan penduduk dengan kesenjangan pendapatan. Tingkat kesenjangan yang semakin sempit akan meningkatkan proporsi penduduk yang memiliki tingkat kesehatan baik. Semakin banyak jumlah penduduk yang memiliki kondisi kesehatan baik menunjukkan tingkat kesehatan yang relatif merata antar individu. Sehingga memberikan peluang yang relatif sama bagi penduduk untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatannya. Dengan mengurangi kesenjangan ini akan memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Howitt, 2005).

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo dan Moertiningsih, Sri. 2005. *Bonus Demografi : Hubungan antara Pertumbuhan Penduduk dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta : BKKBN.
- Affandi, Yoga. 2002. "The Optimal Monetary Policy Instruments: The Case of Indonesia", *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 5(3).
- Ahmed, Riazuddin. 1964. Cooperative Movement in South East Asia Obstacles to Development. Dalam Dr. Mauritz Bonow (Ed). *The Role of Cooperatives in Social and Economic Development*. London: International Cooperative Alliance.
- Alhumami, Amich. 2005. Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi. URL : <http://www.IMMUGM.org>. Diakses pada tanggal 02-02-2017.
- Aldrich, Howard dan Robert N. Stern. 1984. "Resource Mobilization and the Creation of US Producer Cooperatives", *Economic and Industrial Democracy*, 4:371-406
- Ali, Surya Dharma. 2007. *Komitmen Pemberdayaan UMKM dan Koperasi*. Disampaikan pada Seminar Prospek Usaha Kecil dan Menengah, Lembaga Usaha Pengembangan Masyarakat Jakarta.
- Alkadri, Muchdie dan Suhandoyo. 2001. *Tiga Pilar Pengembangan Wilayah: Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia dan Teknologi*. Jakarta: Pusat. Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah BPPT.
- Alkire, Sabina. 2002. *Valuing Freedoms*. Oxford: Oxford University Press.
- Amy M. Nagler, Dale J. Menkhaus dan Alan C. Schroeder. 2004. "Institutions and Agricultural Cooperatives in

Wyoming”, *UWCC Staff Paper No. 4, August*, University of Wisconsin Center for Cooperatives.

- Ananta. 1986. *Mutu Modal Manusia: Suatu Pemikiran. Kualitas Penduduk*. Jakarta: Lembaga Demografi Universitas Indonesia.
- Anderson, Bruce L. dan Brian M. Henahan. 2003. *“What Gives Cooperatives A Bad Nam,”* makalah dalam the NCR 194 Meeting, Oktober, Kansas City, Missouri.
- Anderson, Kym, Betina Dimaranan, Tom Hertel dan Will Martin. 1997. “Economic Growth and Policy Reform in the APEC Region: Trade and Welfare Implications by 2005”, *Asia Pacific Economic Review*, 3(1).
- Anonim. 2006. *Kumpulan hasil-hasil Workshop Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya Koperasi dan UMKM* (laporan sementara belum diterbitkan).
- Anonim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Anonim. 2014. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2014 - 2019*. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
- Anonim. 2017. *Makassar dalam Angka Tahun 2016*. Makassar: Badan Pusat Statistik Kota Makassar.
- Anoraga, Panji dan Widiyanti, Ninik. 1992. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anthony, Robert N. 1999. *Management Control in Nonprofit Organizations*. 6th edition. Boston, Massachusetts: Irwin/McGraw-Hill.
- Anker, R. and Knowles, J. 1980. An Empirical Analysis of Mortality Differentials in Kenya at The Macro and Micro Level,

Economic Development and Cultural Change, Vol. 29,
pp.165-85.

Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan
Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: BPFE.

APEC. 1997. "The Impact of Trade Liberalization in APEC",
Economic Committee of APEC. Singapore: APEC
Secretary

APEC. 1999. "The Impact of Trade Liberalization on Labor Markets
in the Asia Pacific Region", *Report by the Network for
Economic Development Management, Human Resource
Development Working Group*. Singapore: APEC
Secretary.

Arief, Sritua. 1997. *Koperasi Sebagai Organisasi Ekonomi Rakyat,
dalam Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia.
Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Jakarta:
CSPM dan Zaman.

Baarda, J.R. 1982. "State Incorporation Statutes for Farmer
Cooperatives". *Report 30, USDA-Agricultural
Cooperative Service*, Washington, D.C.

Bagolin, Izete. 2004. Human Development Index (HDI) - A poor
representation to Human Development Approach. *Revista
de Economia*, 34 (2), 1-20.

Baldwin, Robert E. dan P. Martin. 1999. "Two Waves of
Globalization: Superficial Similarities, Fundamental
Differences", *NBER Working Paper NO.W6904*, NBER,
Cambridge Mass.

Bank Dunia. 2000. *Development Indicators 2000*. Washington,
D.C.

Bank Dunia. 2000. *Global Economic Prospects and the Developing
Countries 2000*. Washington, D.C.

- Bank Dunia. 2001. *World Development Report 2000/2001*. Washington, D.C: Bank Dunia.
- Bank Dunia. 2003. *Development Indicators 2003*. Washington, D.C.
- Baraldi, Stefano. 1998. "Management Control Systems in NPOs: An Italian Survey." *Financial Accountability & Management*, 14(2).
- Barr, Terry N. 2005. "Trends in Global Market and Implications for Farm Policy and Cooperatives", makalah dalam The 8th Annual Farmer Cooperatives Conference, November 7-8, USA.
- Barro R. J. 1990. Government Spending in a Simple Model of Endogenous Growth. *Journal of Political Economy* 98: S103-S125.
- Barro, R. J. 1991. Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 16(2), 407-443.
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. 1995. *Economic Growth Cambridge*. MA: MIT Press.
- Barro, Robert J. and Jason R. Barro. 1996. *Three Models of Health and Economic Growth*. Unpublished, Harvard University, September.
- Barro, Robert J. 1999. Inequality, Growth and Investment, National Bureau Of Economic Research, *Working Paper* No. 73038, JEL No. 0413.
- Barro, R. J. 2001. Human Capital and Growth. *The American Economic Review*, 91(2), 12-17.
- Basri, Faisal. 2009. *Lanskap Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Kencana.

- Baswir, Revrison. 1993. Kemandirian Koperasi dan Kewirausahaan, dalam Revrison, *Ekonomika, Manusia, dan Etika*. Yogyakarta: BPFE.
- Baswir, Revrison. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. 2000. Ekonomi Politik Keterbelakang Koperasi, dalam Revrison, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Baswir, Revrison. 2003. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Becker, Gary S. 1964. *Human Capital*. New York: National Bureau of Economic Research.
- Becker, Gary S. 1993. *Human Capital*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Behrman, J. and Wolfe, B. 1987. How Does Mother's Schooling Affect The Family's Health Nutrition?, *Journal of Econometrics* 36: 185-204
- Benhabib, J., Spiegel, M. M. 1994. The Role of Human Capital in Economic Development Evidence from Aggregate Cross-Country Data, *Journal of Monetary Economics* 34 (1994), 143-173.
- Berger, Peter L. 1997. "Four Faces of Global Culture", *National Interest*, 49.
- Berger, Peter L. dan Samuel P. Huntington (ed.). 2002. *Many Globalizations: Cultural Diversity in the Contemporary World*. Oxford: Oxford University Press.
- Birchall, Johnston. 1997. *The International Co-operative Movement*. Manchester: Manchester University Press.

- Birdsall, Nancy, D. Ross and R. Sabot. 1994. *Virtuous Circle: Human Capital Growth and Equity in East Asia*. World Bank, Policy Research Department, Washington, D.C. Processed.
- Biro Pusat Statistik. 1962. *Statistical Pocketbook of Indonesia 1961*. Jakarta: BPS
- Blakely, E. J. 1989. *Planning Local Economic Development: Theory and Practice*. California: Sage Publication, Inc.
- Bloom D. E. And Freeman, B. R. 1988. Economic Development and the Timing and Components of Population Growth. *Journal of Policy Modeling*,10(1),57-81.
- Bloom, D. E., and D. Canning. 2000. The Health and Wealth of Nations. *Science* 287(5456): 1207-08.
- Bloom, D. E., Canning D., and Sevilla J. 2001. *The Effect of Health on Economic Growth: Theory and Evidence*, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
- Bloom, D. E., D. Canning, and J. Sevilla. 2002. *The Demographic Dividend: A New Perspective on The Economic Consequences of Population Change*, Santa Monica, Calif.: RAND, MR-1274.
- Bloom, D. E., D. Canning, and B. Graham. 2003. Longevity and Life Cycle Savings. *Scandinavian Journal of Economics* 105(3): 319-38.
- Bloom, D.E., Canning, D. and Sevilla, J. 2003. *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. *RAND Population Matters Monograph Series*. Santa Monica, California: RAND Corporation.
- Boediono. 1998. "Penggunaan Suku Bunga Sebagai sasaran Operasional Kebijakan Moneter di Indonesia". *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Juli.

- Bonin, John P., Derek C. Jones dan Louis Putterman. 1993. "Theoretical and Empirical Studies of Producer Cooperatives: Will Ever the Twain Meet?", *Journal of Economic Literature*, 31: 1290-1320.
- Book, Sven Ake. 1994. *Nilai-nilai Koperasi dalam Era Globalisasi*, diterjemahkan oleh Djabarudin Djohan. Jakarta: KJAN.
- Bongaarts, J. 1996. Population Pressure and the Food Supply System in the Developing World. *Population and Development Review*, 22(3), pp. 483-503.
- Bora, Bijit, Lucian Cernat, dan Alessandro Turrini. 2002. "Duty and Quota-Free Access for LDCs: Further Evidence from CGE Modelling", *Policy Issues in International Trade and Commodities Study Series No.14*, New York dan Geneva: UNCTAD.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2004. *Komposisi Penerimaan Sektor Publik dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Jakarta: Lembaga Penelitian Universitas Atmajaya.
- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Braverman, Avishay, J. Luis Guasch, Monika Huppi, dan Lorenz Pohlmeier. 1991. "Promoting Rural Cooperatives in Developing Countries. The Case of Sub-Saharan Africa", *World Bank Discussion Papers, No.121, April*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Budi W. Soetjipto. 1997. "Mengukur Kinerja Bisnis dengan Balanced Scorecard." *Manajemen Usahawan Indonesia*.
- Budiman, Arief. 1991. *Negara dan Pembangunan: Studi tentang Indonesia dan Korea Selatan*. Jakarta: Yayasan Padi dan Kapas.

- Burger, D.H. 1954. *Koperasi-koperasi Di Luar Indonesia*. Jakarta: Kementerian PP dan K.
- Cable, Vincent. 1999. *"Globalization and Global Governance"*, Chatham House Papers. London: Royal Institute of International Affairs.
- Campbell R, McConnell dan Stanley L. Brue. 1986. *Contemporary Labor Economics*. McGraw-Hill Book Company.
- Chakraborty, Shankha. 2002. Endogenous Lifetime and Economic Growth. *Working Papers*. Department of Economics. Portland: University of Oregon.
- Chamard, John dan Tom Webb. 2004. *"Learning to Manage the Cooperative Difference"*, makalah dalam the 12th IAFEP conference, Halifax, Nova Scotia, Juli 8-10.
- Chaniago, Arifinal. 1984. *Perkoperasian Indonesia*, cetakan kedua. Bandung: Angkasa.
- Chenery, H. dan Syrquin, M. 1975. *Patterns of Development, 1950-1970*. Oxford: Oxford University Press.
- Chowdhury, Anis, dan Hermanto Siregar. 2004. "Indonesia's Monetary Policy Dilemma-Constraints Of Inflation Targeting", *The Journal Of Developing Areas*, 37(2).
- Cochrane, S. H. 1980. The Effects of Education and Health. World Bank Staff *Working Paper*, No. 4051 Washington.
- Commission on Macroeconomics and Health. 2001. *Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development*. Geneva: World Health Organization.
- Conry, E.J., G.R. Ferrera dan K.H. Fox. 1986. *The Legal Environment of Business*, Dubuque, IA: Wm. C. Brown.

- Cooray, A. 2009. Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *Comparative Economic Studies*, Vol. 51, pp. 401-418.
- Crook, Clive. 2001. "Globalization and its Critics", *The Economist*, 29 September.
- Cropper, M. and C. Griffith. 1994. The Interaction of Population Growth and Environmental Quality. *The American Economic Review*, 84(2),250-254.
- Crouch, Harold. 1986. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Cummins, David E. 1993. "Corn Belt Grain Cooperatives Adjust to Challenges of 1980s, Poised for 1990s" *ACS Research Report Number 117*. August, Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, Agricultural Cooperative Service.
- Damanik, E.D. 1980. *"Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi"*. Jakarta: Harian Kompas.
- Danim, Sudarwan. 2004. *Motivasi, Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Danim, Sudarwan. 2006. *Agenda Pembaruan Sistem Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Danoewikarsa D. 1977. *Tanya-jawab Tentang Koperasi*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- De la Fuente, A. 2011. *Human Capital and Productivity: Barcelona Graduate School of Economics*. Available at <http://ideas.repec.org/p/bge/wpaper/530.html>.
- Denison, E., F. 1962 *The Sources of Economic Growth in the United States and the Alternatives Before Us*. Committee for Economic Development. New York: Hansen WL.

- Departemen Koperasi. 1988. *Pedoman dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Mandiri*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Depdagkop (tanpa tahun), *Kebijaksanaan dan Program Pembangunan Koperasi dalam Pembangunan Lima Tahun ke III 1979 - 1983*, Jakarta.
- Djamhari, Choirul dan Ahmad Dimiyati. 1986. *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional*, Jakarta: Balitbangkop.
- Djohan, Djabaruddin. 1986, Efisiensi Koperasi di Lingkungan ABRI, dalam Djamhari dan Dimiyati, *Koperasi dalam Era Efisiensi Nasional*. Jakarta: Balitbangkop.
- Djohan, Djabaruddin. 1997. *Setengah Abad Pasang Surut Gerakan Koperasi Indonesia 12 Juli 1917 - 12 Juli 1997*. Jakarta: Dekopin.
- Djojohadikoesoemo, Margono R.M. 1940. *Sepoeloeh Tahoen Koperasi*. Batavia Centrum: Balai Poestaka.
- Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar. Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dowrick, D. 2003. *Earthquake Risk Reduction*. Wiley, Chichester.
- Drucker, Peter F. 1988. *Inovasi dan Kewiraswastaan, Praktek dan Dasar-Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Durlauf, S. & Johnson, P. A. 1995. Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behaviour, *Journal of Applied Econometrics* 10(4), 365-384.
- Easterlin, R. 1999. How Beneficent Is the Market? A Look at the Modern History of Mortality. *European Review of Economic History* 3(3): 257-94.

- Easterly, W. 2001. The Lost Dekades: Developing Countries' Stagnation in Spite of Policy Reform, 1980-1998. *Journal of Economic Growth*, 6(2): 135-57.
- Eurostat. 2001. *"A Pilot Study on Co-operatives, Mutuals, Associations and Foundations"*. Luxembourg: Eurostat.
- Farrar, Donald. E, and Glauber, Robert. R. 1967. Multicolinierity in Regression Analysis, *Rewiew of Economics and Statistic*, Vol. XLIX No.1 February: 92-107.
- Fatah, Nanang. 1998. *Studi tentang pembiayaan Pendidikan Sekolah Dasar*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Fogel, R. W. Health, Nutrition, and Economic Growth. *Economic Development and Cultural Change* 52, No. 3 (April 2004): 643-58.
- Feridhanusetyawan, Tubagus. 1997. "Trade Liberalization in Asia Pacific: A Global CGE Approach", *The Indonesian Quarterly*, XXV(4).
- Feridhanusetyawan Tubagus dan Mari Pangestu. 2003. "Indonesian Trade Liberalization: Estimating The Gains", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 39(1).
- Feridhanusetyawan, Tubagus, Mari Pangestu, dan Erwidodo. 2002. "Effects of AFTA and APEC Trade Policy Reform on Indonesia Agriculture", dalam Randy Stringer, Erwidodo, Tubagus Feridhanusetyawan, dan Kym Anderson (ed.), *Indonesia in a Reforming World Economy: Effects on Agriculture, Trade and the Environment*, Center for International Economic Studies, University of Adelaide, Adelaide.
- Friedman, Thomas. 2000. *The Lexus and the Olive Tree*, London: Harper Collins.
- Friedman, Thomas. 2002. *Memahami Globalisasi; Lexus dan Pohon Zaitun*. Bandung: ITB.

- Furlough, Ellen dan Carl Strikwerda (ed.). 1999. *Consumers Against Capitalism? Consumer Cooperation in Europe, North America and Japan, 1840-1990*, Lanham, MI.: Rowman & Littlefield.
- Gallup, L.J., Sachs, D.J. and Mellinger, D.A. 1998. Geography and Economic Development, *NBER Working Paper Series*, 6849, 81 p.
- Gaspar, Des. 1997. Sen's Capabilities Approach and Nussbaum's Capabilities Ethics. *Journal of International Development* 9 (2): 281-302.
- Gaspar, Des. 2000. Development as Freedom: Moving Economics beyond Commodities: The Cautious Boldness of Amartya Sen. *Journal of International Development* 12 (7): 989-1001.
- Gaspar, Des. 2002. Is Sen's Approach an Adequate Basis for Considering Human Development? *Review of Political Economy* 14 (4): 435-461.
- Gaspar, Des. 2004. *The Ethics of Development*. Edinburg: Edinburg University Press.
- Gemmel, Norman. 1996. *Ilmu Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES.
- Gentil, Dominique. 1990. "Support of Informal Self-Help and Cooperative Groups", makalah dalam Seminar Bank Dunia mengenai "Donor Support for the Promotion of Rural Cooperatives in Developing Countries: Special Emphasis SubSaharan Africa", Januari 16-17, Washington, D.C.: The World Bank.
- Giddens, Anthony. 2001. Runaway World-Bagaimana Globalisasi Merombak Kehidupan Kita. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Gilbert, J. R. Scollay dan T. Wahl. 1999. *"An APEC Food System: Implications for Welfare and Income Distribution by 2005"*, mimeo, APEC Study Center, New Zealand.
- Gore, Charles. 1997. Irreducibly Social Goods and the Informational Basis of Sen's Capabilities Approach. *Journal of International Development* 9 (2): 235-250.
- Graham, E. D., and J. D. Richardson. 1997. *Global Competition Policy*. Washington, D.C.: Institute for International Economics.
- Greene, William H. 2000. *Econometric Analysis*. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometrics 4th Edition*. New York: McGraw-Hill.
- Hadinoto, Sutanto. 2004. *Kiat Sukses Kredit Mikro*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Hadiwidjaja, H., dan R.A. Rivai Wirasasmita. 1989. *Koperasi dan Akuntansi: Pendekatan Teoritis*. Bandung: Penerbit C.V. Pionir Jaya.
- Haeruman, H. 2000. *"Peningkatan Daya Saing Industri Kecil untuk Mendukung Program PEL"*. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing. Jakarta: Graha Sucofindo.
- Hakim, Abdul. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Cetakan kedua, September. Yogyakarta: Ekonisia.
- Halwani, R. Hendra. 2002. *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hamoudi, A., and J. Sachs. 1999. Economic Consequences of Health Status: A Review of the Evidence. *Working Paper* No. 30. Harvard Center for International Development, Cambridge, MA.

- Handerson & Quant. 1980. *Mccroeconomics Theory: A Mathematical Approach, Third Edition, International Student Edition*. Mcgraw Hill International.
- Hansmann, Henry. 1996. *The Ownership of Enterprise*. Cambridge, MA: Belknap Press.
- Hanson, J.M. 2001. "A New Cooperative Structure for the 21 Processing Cooperative Law", makalah dalam the Rocky Mountain Farmers Union Leadership Roundup, Cheyenne, WY., 22 September.
- Hanushek, Eric. 1995. *The Role of School Improvement In Economic Development*. Nber Working. Paper No. 12832.
2007. Hoitz- Eakin, D. & Schwartz, A.E. 1995.
- Hanushek, E.A. and D.D. Kimko. 2000. Schooling, Labour-Force Quality and the Growth of Nations. *The American Economic Review*. 90(5): 1184-1208.
- Hanushek, E.A. dan Woessmann, L. 2008. The Role of Cognitive Skills in Economic Development, *Journal of Economic Literature* 46 (3): 607-608.
- Hardjosoekarto, Sudarsono. 1994. *Nilai-nilai Koperasi: Antara Oportunisme dan Identitas Koperasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.
- Hariyono. 2003. Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, *Jurnal Ekonomi Rakyat*, II(4), Juli.
- Hartono. Sunarvati. 1991. *Politik Hukum Menuiu Satu Sistem Hukum Nasionai. Peranan Hukum dalam Pembangunan yang Berkeadilan Sosial*, Cetakan Pertama. Bandung: Alumni.
- Harun, Rochajat dan Elvinaro, Ardianto. 2010. *Komunikasi Pembangunan, Perubahan Sosial*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.

- Hatta, Mohammad. 1932. *Ke Arah Indonesia Merdeka*, diterbitkan kembali dalam bentuk edisi khusus tahun 1994. Jakarta: Dekopin
- Hatta, Mohammad. 1954. *Kumpulan Karangan*. Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Indonesia.
- Hatta, Mohammad. 1954. *Beberapa Fasal Ekonomi Menuju ke Ekonomi Koperasi*, cetakan kelima. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian PP dan K.
- Hatta, Mohammad. 1981. *Indonesian Patriot (Memoirs)*, disunting oleh CLM Penders, MA, PhD. Singapura: Gunung Agung.
- Hauser, Philip M., and Otis Dudley Duncan, eds. 1959. *The Study of Population: An Inventory and Appraisal*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Hayami, Y. and Y. Godo. 2005. *Development Economics: From the Poverty to the Wealth of Nations*. Oxford: Oxford University Press.
- Heckman, J. J., & Klenow, P. 1998. *Human Capital Policy dalam M. Boskin (Ed.). Policies to Promote Capital Formation*. Stanford, Calif: Hoover Institution.
- Herry, Hikmat. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Hendar dan Kusnadi, 1999. *Ekonomi Koperasi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hendrojogi. 1985. *Koperasi: Masalah Pengembangan dan Pembinaannya*. Jakarta: LM-FE UI.
- Hendrojogi. 1997. *Koperasi: Azas-azas, Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hicks, Norman. 1980. *Economic Growth and Human Resources*, World Bank Staff Working Paper No. 408. Washington, D.C. 482| Pembangunan Ekonomi

- Hill, Roderick. 2000. "The Case of Missing Organizations: Cooperatives and the Textbooks", *Journal of Economic Education*, 31(3): 281-95.
- Hirst, Paul dan Grahame Thompson. 1999. *Globalization in Question: The International Economy and The Possibilities of Governance*, edisi ke 2. Cambridge: Polity Press.
- Howitt, P. 2005. *Health, Human Capital and Economic Growth: A Schumpeterian Perspective*. In: López-Casanovas, G.; Rivera, B.; Currais, L. *Health and Economic Growth: Findings and Policy Implications*, The MIT Press, 19-40.
- Hoessein, Bhenyamin, Irfan Riawan Maksum, Muhammad Riduansyah, Puji Nur Hanafi. 2005. *Naskah Akademik Tata Hubungan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: Pusat Kajian Pembangunan Administrasi Daerah dan Kota, FISIP-Universitas Indonesia.
- Hudiyanto. 2002. *Sistem Koperasi, Ideologi dan Pengelolaan*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- ICA. 1998. "Statistics and Information on European Cooperatives", Geneva: ICA (<http://www.coop.org/statistics.html>).
- ICA. 1998. "Latest ICA Statistics of July 1, 1998", Geneva: ICA (<http://www.coop.org/statistics.html>).
- Ikatan Akuntan Indonesia. 1998. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan: Akuntansi Perkoperasian*. Jakarta: Divisi Publikasi Ikatan Akuntan Indonesia.
- ILO. 1965. *Cooperative Management And Administration*. Geneve: ILO.
- Infokop. 2004. *Koperasi dalam Perspektif Masa Depan*, No. 24. Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM.

- Ingco, Merlinda D. 1997. "Has Agricultural Trade Liberalization Improve Welfare in the Least-Developed Countries? Yes", *Policy Research Working Paper No.1748, April*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Irawan, Ferry dan Sugiharso Safuan. 2004. "*Kebijakan Moneter, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi: Pengujian Hipotesis Ekspektasi Rasional dengan Analisis VAR*", makalah dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Desember. Jakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FEUI dan ISEI.
- Ismangil, Wagiono. 1989. *Koperasi Menatap Masa Depan, Beberapa Permasalahan Managerial*. Pidato Ilmiah Disampaikan Pada Lustrum ke VII Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Palembang 8 Januari 1989.
- Jatnika, Firman dan Sugiharso Safuan. 2004. "*Pengaruh tingkat suku bunga domestik riil terhadap nilai tukar riil dan cadangan devisa di Indonesia periode 1992.1-2002.12*", makalah, Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Desember. Jakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FEUI dan ISEI.
- Jamison, D. T., & L. J. Lau. 1982. *Farmer Education and Farm Efficiency. A World Bank Research Publication*. The Johns Hopkins University Press Baltimore.
- Jhingan, M. L. 1994. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan Diterjemahkan oleh D. Guritno*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones, Derek C. 1979. "U.S. Producer Cooperatives: The Record to Date", *Industrial Relations*, 18:342-57.
- Johnston, J. 1984. *Econometric Methods, Third Edition*. New York: McGraw-Hill Book Company.
- Jossa, Bruno. 2005. "Marx, Marxism and the Cooperative Movement", *Cambridge Journal of Economics*, 29:3-18.

- Juwana, Hikmahanto. 2004. *Perubahan Hukum di Indonesia, Tantangan Reformasi Hukum di Indonesia*, Indonesia Australia, Universitas Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum UI.
- Kalmi, Panu. 2006. "The Disappearance of Co-operatives from Economics Textbooks", *Working Papers W-398*, February, Helsinki School of Economics.
- Kamaralsjah. 1954. *Tentang Pengertian Hal Perkumpulan Koperasi*, J.B. Wolters. Jakarta: Groningen.
- Kamaralsyah dkk. 1987. *Panca Windu Gerakan Koperasi Indonesia; 12 Juli 1947 - 12 Juli 1987*. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia.
- Kaplan, Robert S., and Anthony A. Atkinson. 1998. *Advanced Management Accounting*. 3rd edition. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Kaplan, Robert S and David P. Norton. 1996. *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Actions*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kaplan, Robert S and David P. Norton. 2000. *The Strategy Focused Organization: How Balanced Scorecard Companies Thrive in the New Business Environment*. Boston, MA: Harvard Business School Press.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan. Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: Cides.
- Keeling, Jennifer J. 2005. "Lessons in Cooperative Failure: The Rice Growers Association Experience", Working Paper, Department of Agricultural and Resource Economics University of California, Davis.

- Khor, Martin. 2002. *Globalisasi Perangkap Negara-negara Selatan*, Seri Kajian Global. Yogyakarta: Cindelas Pustaka Rakyat Cerdas.
- Khusaini, Mohammad. 2006. *Ekonomi Publik, Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah*. Malang: BPFE Unibraw.
- Klasen, S. and Nestmann, T. 2006. Population, Population Density and Technological Change. *Journal of Population Economics*, 19(3), pp. 611-626.
- Klinedinst, Mark dan Hitomi Sato. 1994. "The Japanese Cooperative Sector", *Journal of Economic Issues*, 28(2): 509-17.
- Korten, David C. 1984. *Pembangunan yang Memihak Rakyat: Kupasan Tentang Teori dan Metode Pembangunan, dialihbahasakan oleh Lembaga Studi Pembangunan (LSP)*. Jakarta: Yayasan Studi Pembangunan.
- Krueger, A.B. dan Lindahl, M. 2001. Education for Growth: Why and For Whom?. *Journal of Economic Literature*, Vol XXXIX Desember 2001 : 1101-1136.
- Krugman, P. 1995. "Growing World Trade: Causes and Consequences", *Brookings Paper on Economic Acticity*, 1.
- Kuncoro Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Yogyakarta: UPPAMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuznets, S. 1966. *Modern Economic Growth*. New Haven, CT: Yale University. Press.

- Kuznets, S. 1973. Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *The American Economic Review*, 63(3), 247-258.
- Larrain, J. 1994. *Ideology & Cultural Identity*. UK: Polity Press.
- Lawless, Greg dan Anne Reynolds. 2004. "Worker Cooperatives: Case Studies, Key Criteria & Best Practices", *UWCC Staff Paper No.3*, July, University of Wisconsin Center for Cooperatives, Madison.
- Lee, Jong-Wha. 2005. Economic Growth and Human Development in The Republic of Korea, 1945-1992, *Occasional Paper No. 24*.
- Leggerwood, Joanna. 1999. *Microfinance Handbook: An Institutional Perspective*. USA: The World Bank.
- Levine, Ross & David Renelt. 1992. A Sensitivity Analysis of Cross-Country. Growth Regressions. *The American Economic Review*, Vol. 82 (4). 942-963.
- Lewis, Artur. 1954. *Economic Development with Unlimited Supplies and Labour*. England: Manchester School.
- Liddle, R. William. 1992. *Pemilu-pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*, Jakarta: LP3ES.
- Lim Chong Yah (ed.) 1996. *Economic Policy Management in Singapore*. Singapore: Addison-Wesley.
- Lindstad, Olav. 1990. "Cooperatives as Tools for Development", makalah dalam makalah dalam Seminar Bank Dunia mengenai "Donor Support for the Promotion of Rural Cooperatives in Developing Countries: Special Emphasis SubSaharan Africa", Januari 16-17, Washington, D.C.: The World Bank.
- Lipsey, Richard G. 1980. *An Introduction to Positive Economics*. London: Weidenfeld and Nicolson.

- Llosa, Vargas. 2000. "Liberalism in the New Millennium", dalam Ian Vásquez (ed.), *Global Fortune: The Stumble and Rise of World Capitalism*, Washington, D.C.: Cato Institute.
- Loyd, Bernard. 2001. "Positioning for Performance: Reshaping Co-ops for Success in the 21st Century", makalah dalam Farmer Co-operative Conference, Oktober 29, Las Vegas, McKinsey & Company.
- Lucas, R. E. 1988. On the Mechanics of Economic Development. *Journal of Monetary Economics* 22, 3-42.
- Machima, Pradit. 1994. *Cooperative Principles, Basic Values and Operating Guidelines for Asian Consumer Cooperatives*. New Delhi: International Cooperative Alliance - Regional Office for Asia & the Pacific.
- Machima, Pradit. 1994. *ICA and the Development of Consumer Cooperatives in Asia and the Pacific*. New Delhi: International Cooperative Alliance-Regional Office for Asia and the Pacific.
- Maddala, G. S. 2001. *Introduction to Econometrics, third edition*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Mallarangeng, Rizal. 2000. *Intelektual Berperan Besar dalam Liberalisasi Ekonomi Orde Baru*. Jakarta: Kompas, 12 Juni 2000.
- Malenbaum, Wilfred. 1970. *Health and Productivity in Poor Areas, in Herbert Klarman (ed.), Empirical Studies in Health Economics*. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press.
- Mander, Jerry, Debi Barber, dan David Korten. 2003. "Globalisasi Membantu Kaum Miskin?", dalam International Forum on Globalization, "Globalisasi Kemiskinan & Ketimpangan, Seri Kajian Global. Yogyakarta: Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas.

- Mankiw, G., David R., and David W., 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth. *Quarterly Journal of Economics*: 407-437.
- Mankiw, N. Gregory. 2003. *Teori Makroekonomi* Edisi Kelima. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mankiw N, Gregory. 2006. *Makro Ekonomi* Edisi Keenam. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Manurung, 2000. "Perkoperasian Di Indonesia: Masalah, Peluang dan Tantangannya di Masa Depan". *Economics e-Journal*, 28 Januari 2000.
- Maryati, S. 2015. Dinamika Pengangguran Terdidik: Tanatangan Menuju Bonus Demografi di Indonesia. *Journal of Economic and Economic Education*, 3 (2), 124 - 136.
- Masngudi. 1989. *Peranan Koperasi Sebagai Lembaga Pengantar Keuangan*. Tidak diterbitkan. Disertasi Doktor pada Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- McKenna, Thomas. 2001. "What's the Value of Cooperatives?", makalah dalam Farmer Cooperatives Conference", Oktober 29-30, Las Vegas.
- McLeod, Ross H dan Andrew MacIntyre (eds.). 2007. *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*. Singapore: ISEAS.
- McMahon, Walter W, and Appiah, Elizabeth M. 2002. The Social Outcomes of Education and Feedbacks on Growth in Africa. *Journal of Development Studies*, Vol. 38, No. 4, April 2002.
- Merchant, Kenneth A. 1998. *Modern Management Control Systems: Text and Cases*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.

- Meredith. 1984. *Kewirausahaan, Teori dan Praktek*. Jakarta: Pustaka Binaman Pressindo.
- Mincer, J. 1958. Investment in Human capital and Personal Income Distribution, *Journal of Political Economy*, 66(4), 281-302
- Mincer, J., and S. Polachek. 1973. Family Investments in Human Capital: Earnings of Women, presented at Population Conference, Chicago, June 1973, *Journal of Political Economy*, April 1974.
- Mintorahardjo, Sukowaluyo. 2004. *Menuju Welfare State melalui Koperasi, Koperasi dalam Perspektif Masa Depan*. Infokop, Nomor 24, Tahun XX, 2004.
- Moeljarto, T. 1987. *Politik Pembangunan, Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Moene, Karl Ove dan Michael Wallerstein. 1993. "Unions versus Cooperatives", dalam Samuel Bowles, Herbert Gintis, dan Bo Gustafsson (eds.), *Markets and Democracy Participation, Accountability and Efficiency*, Cambridge University Press.
- Mooney, D. James. 1949. *The Principles of Organization*. Singapura: Harper Collins Publisher.
- Mubyarto dan Revrison Baswir. 1989. Editor. *Pelaku dan Politik Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Mubyarto. 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE.
- Muelgini, Yoke. 2004. "Respons komponen-komponen permintaan agregat terhadap kebijakan moneter Indoneia", makalah dalam Seminar Akademik Tahunan Ekonomi I, Desember. Jakarta: Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FEUI dan ISEI.

- Muhandri, Tjahja. "Strategi Penciptaan Wirausaha Kecil dan Menengah yang Tangguh", *Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM*, Vol 1(1), 2006.
- Mulyo, Jangkung Handoyo. 2004. "Revitalisasi Ekonomi Kerakyatan Melalui Pemberdayaan Gerakan Koperasi", *Inovasi*, 2(XVI), November.
- Munir, Rozy, Tjiptoherijanto, Priyono. 1986. *Penduduk dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Munkner, Hans H. 2001. *Penemuan Kembali Koperasi dalam Kebijakan Pembangunan*. Jakarta: Yakoma PGI.
- Mushkin, Selma J. 1962. Health as an Investment. *Journal of Political Economy* 70 (5): 129-57.
- Mutis, Thoby. 1992. *Pengembangan Koperasi*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Mutis, Thoby. 1999. *Ragam Koperasi di Mancanegara*. Jakarta: Media Ekonomi Publishing.
- Mutis, Thoby. 2001. "Satu Nuansa, Demokrasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan", Kompas, 29 September.
- Myrdal, G. 1968. *Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations*. New York: Pantheon.
- Nafziger, E. Wayne. 1997. *The Economics of Developing Countries*, International Edition, edisi ke 3, Prentice-Hall International, Inc.
- Nasution, Muslimin. 2001. *Koperasi, Konsepsi Pemikiran dan Peluang Pembangunan Masa Depan Bangsa*.
- Nasution, Muslimin. 1996. *Membangun Koperasi Sebagai Wahana Efektif Untuk Memberdayakan Perekonomian Rakyat*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Jakarta.

- Nayyar, D. 1997. *“Globalization: The Past in Our Future*. Penang: Third World Network.
- Nello, Susan Senior. 2000. “The Role of Agricultural Cooperatives in the European Union: A Strategy for Cypriot Accession?”, *EUI Working Paper RSC No.2000/42*, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University Institute, Florence.
- North, D.C. 1990. *Institutional Change, and Economic Performance*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Nugroho, Iwan dan Rochmin Dahuri. 2004. *Pembangunan Wilayah, Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*. Jakarta: Pustaka LP3ES.
- Nurulfalik, I. 2004. *Pendidikan dan Investasi*, Teropong Suplemen Pikiran Rakyat, Bandung, Edisi 05 April 2004.
- O’Rafferty, Simon dan Frank O’Connor, *The Role of Public Sector Intervention in Product Development Within SMEs: Managing the Sustainability Message*. Tersedia di: www.edcw.org/public/uploads/files/publications/GIN2006_public_sector_intervention.pdf.
- Partadiredja, Ace. 2000. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Bhratara.
- Partomo, Tiktik Sartika dan Abd. Rachman Soejoedono. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*, edisi kedua. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pascual, M. & Álvarez-García, S. 2006. *Government Spending and Economic Growth In The European Union Countries: An empirical Approach*. JEL, <http://ssrn.org>. Diakses tanggal 10 november 2017.
- Peterson, Chris. 2005. *“Searching for a Cooperative Competitive Advantage”*, mimeo, Michigan State University.

- Pitman, Lynn. 2005. *“Cooperatives in Wisconsin”*, mimeo, University of Wisconsin Center for Cooperatives. Madison.
- Pohlmeler, Lorenz. 1990. *“Recent Developments in the World Bank’s Approach to Cooperative Support in Africa”*, makalah dalam the World Bank Seminar on “Donor Support for the Promotion of Rural Cooperatives in Developing Countries: Special Emphasis SubSaharan Africa”, Januari 16-17, Washington, D.C.
- Portes, Alejandro. 1976. On the Sociology of National Development: Theories and Issues. *American Journal of Sociology*.
- Preston, S. 1975. The Changing Relation between Mortality and Level of Economic Development. *Population Studies* 29: 231-48.
- Pritchett, L., and L. Summers. 1996. Wealthier is Healthier. *Journal of Human Resources* 31: 841-68.
- Prijono, Onny S dan Pranaka (eds.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Puslatpenkop. 1989. *Buku Pelajaran Koperasi Tingkat Lanjutan*, cetakan keenam. Jakarta: Tanpa penerbit.
- Putong, Iskandar. 2007. *Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Pyo, H. K. 1995. *A Time-Series Test of The Endogenous Growth Model with Human Capital, Growth Theories in Light of The East Asian Experience*, University of Chicago Press.
- Qureshi, Asif H. *International Economic Law*. London: Sweet & Maxwell.
- Raghavan, Chakravarty. 1990. *“Recolonization: The Uruguay Round, GATT and The South*. Penang: Third World Network.

- Rahardjo, Adisasmita. 2013. *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahardjo, Dawam M. 2002. "Development Policies in Indonesia and the Growth of Cooperatives", *Prisma, The Indonesian Indicator*, No.23.
- Rahardjo, Dawam M. 2002. "Apa Kabar Koperasi Indonesia", *Kompas*, Jumat, 9 Agustus.
- Raka, I. G. Gede. 1983. *Pengantar Pengetahuan Koperasi*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Raka, I. G. Gede. 1983. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Ramires, Ranis, and Stewart. 1998. The Meaning of Development. *International Development Review Journal* Vol. XIX Number 2.
- Ranis, Gustav., Stewart, F., Ramirez, A. 2000. Economic Growth and Human Development. *World Development* Vol. 28, No. 2, pp. 197 - 219.
- Ranis, Gustav. 2004. *Human Development Index and Economic Growth*. Social Science Research Network Electronic Library.
- Ray, Debra. 1998. *Economics Development*. Princeton University Press.
- Redaksi Rineka Cipta. 1991. *Pedoman Pelaksanaan Pengembangan dan Pembinaan Koperasi (Koperasi Unit Desa)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Republik Indonesia. 1995, *Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia*. Jakarta, 16 Agustus.
- Robison, Richard. 1985. Class, Capital and the State in New Order Indonesia, dalam Richard Higgott dan Richard Robison,

Southeast Asia: Essays in the Political Economy of Structural Change. London: Routledge and Kegan Paul.

- Rodrik, D. 1999. *The Global Economy and Developing Countries: Making Openness Work*. Washington, D.C.: Overseas Development Council.
- Romer, P.M. 1990. Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, Vol. 98, pp.S71-S102.
- Ropke, Jochen. 1985. *The Economic Theory of Cooperative Enterprises in Developing Countries. With Special Reference of Indonesia*. Marburg: University of Marburg.
- Ross, J. 2004. *Understanding the Demographic Dividend, Mimeograph*. Washington: The Policy Project, Futures Group.
- Rosyidi, Suherman. 1996. *Pengantar Teori Ekonomi. Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro & Makro*, edisi revisi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rozi dan Hendri. 1997. *Kapan dan Bilamana Berkoperasi*. Riau: Unri Press.
- Rusidi dan Maman Suratman. 2002. *Bunga Rampai 20 Pokok Pemikiran Tentang Koperasi*. Bandung: Institut Manajemen Koperasi Indonesia.
- Rusli, S., Toersilaningsih, R., Meirida, D., Kurniawan, U. K., & Setiawan, K. D. 2015. *Potensi dan Implikasi Bonus Demografi di Provinsi Banten Tahun 2015-2035*. Jakarta: Direktorat Analisis Dampak Kependudukan BKKBN.
- Ruttan, Vernon, W. 2002. *"Social science knowledge and institutional innovation"*, Department of Applied Economics, College of Agriculture, Food, and Environmental Science, University of Minnesota, Staff Paper P02-07, May, (<http://agecon.lib.umn.edu/mn/p02-07.pdf>).

- Samuelson, Paul A. 1973. *Economics, An Introductory Analysis*, edisi ke 9. Tokyo: McGraw Hill KMGakusha, Ltd.
- Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 1992. *Economics*, edisi ke 14. Singapura: McGraw Hill, Ltd.
- Satriawan, Elan. 1997. "Prospek Sektor Pertanian Indonesia pada Era Pemanasan Global", *Media Ekonomi*, 4(2).
- Scollay, R. dan J. Gilbert. 1999. "Measuring the Gains from APEC Trade Liberalization: An Overview of CGE Assessments", mimeo, APEC Study Center, New Zealand.
- Scollay, R. dan J. Gilbert. 1999. "An APEC Food System: Trade and Welfare Implications by 2005", mimeo, APEC Study Center, New Zealand.
- Scollay, R. dan J. Gilbert. 2000. "Measuring the Gains from APEC Trade Liberalization: An Overview of CGE Assessments", mimeo, APEC Study Center, New Zealand.
- Scollay, R. dan J. Gilbert. "An Integrated Approach to Agricultural Trade and Development Issues: Exploring the Welfare and Distribution Issues", Policy Issues in International Trade and Commodities Series No.11, New York dan Geneva: UNCTAD.
- Setyari, Ni Putu Wiwin. *Dinamika Pengembangan UMKM di Indonesia*, 2007. Tersedia di: ejournal.unud.ac.id/abstrak/dinamika%20pengembangan%20umkm.pdf.
- Shankar, Ravi dan Garry Conan. 2002. *Second Critical Study on Cooperative Legislation and Policy Reform*. New Delhi: ICA, RAPA.
- Shavaeddin, S.M. 1994. "The Impact of Trade Liberalization on Export and GDP Growth in Least Developed Countries", Discussion Paper No.85. Geneva: UNCTAD.

- Simamora, Manaek. 2006. "Policy Approaches and Support Mechanisms to Develop, Nurture and Promote Innovation in Indonesia", *National Workshop on Sub-National Innovation Systems and Technology Capacity Building Policies to Enhance Competitiveness of SMEs*, Beijing, October 2006.
- Simons, Robert. 2000. *Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy*. New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
- Sitio, Arifin dan Tamba, Halomoan. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga.
- Soedjono, Ibnoe. 1983. *The Role of Cooperatives in The Indonesian Society*. Dalam H.J. Esdert (ED). *Can Cooperatives Become the Motive Force in the Economic of Indonesia?* Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- . 1985. Permasalahan Pengembangan Koperasi Sebagai Badan Usaha, dalam Hendrojogi, *Koperasi: Masalah Pengembangan dan Pembinaannya*. Jakarta: LM-FE UI.
- . 1996. *Koperasi di Tengah Arus Liberalisasi Ekonomi*. Jakarta: Formasi.
- . 2003. *International Co-operative Alliance, Jatidiri Koperasi*, Cetakan Keenam. Jakarta: Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I).
- Soekarnoputri, Megawati. 2000. "Koperasi akan Berhasil Kalau Setia pada Jati Dirinya." *Warta Kop*.
- Soetrisno, Loekman. 1995. *Substansi Permasalahan Kemiskinan dan Kesenjangan*. Yogyakarta: ICMI dan PSKK-UGM.
- Soetrisno, Noer. 2001. "Rekonstruksi Pemahaman Koperasi, Merajut Kekuatan Ekonomi Rakyat", Instrans, Jakarta

Stiglitz, Joseph (2006), *Making Globalization Work*, New York: W.W. Norton & Company.

Soetrisno, Noer. 2003. "Pasang Surut Perkembangan Koperasi di Dunia dan Indonesia", makalah, Jakarta.

Soetrisno, Noer. 2003. "Koperasi Indonesia: Potret dan Tantangan", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, II(5), Agustus.

Soetrisno, Noer. 2003. "Wajah Koperasi Tani dan Nelayan di Indonesia: Sebuah Tinjauan Kritis", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, II(5), Agustus.

Solikin. 2004. "*Fluktuasi Makroekonomi dan Respons Kebijakan yang Optimal di Indonesia*", Working Paper PPSK – Bank Indonesia.

Sritua Arief. 1998. *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*. Bandung: Penerbit Zaman.

Stiglitz, Joseph. 2003. *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton & Company.

Subyakto, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyono. 1990. *Ekonomi Koperasi II*. Jakarta: Karunika.

Sugiharto. 2007. *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Hari Ini dan Masa Depan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo dan BUMN Executive Club.

Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*. Jakarta: FE-UI.

Sukotjo, Wahyu. 1985, KUD Model: Semua Kita Berkepentingan Koperasi, dalam Hendrojogi, *Koperasi: Masalah Pengembangan dan Pembinaannya*. Jakarta: LM-FE UI.

Sularso dan E.D. Damanik. 1988. *Peraturan dan Undang Undang Koperasi di Indonesia*. Jakarta: Puslatpenkop.

- Sumarsono, Sonny. 2003. *Manajemen Koperasi. Teori dan Praktek*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Sumodiwirjo, Teko Ir. 1954. *Koperasi dan Artinya Bagi Masyarakat Indonesia*. Jakarta: GKBI.
- Sumual, D.E. 1998. "Ekonomi Politik Perkoperasian Indonesia." *Manajemen Usahawan Indonesia*.
- Suryadinata, Leo. 1995, *Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan. Problematika dan Pendekatan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suwandi, Ima. 1980. *Koperasi, Organisasi Ekonomi yang Benvatak Sosial*. Jakarta: Bhratara Karya Aksara.
- Syafradji, Saleh. 1988. *Pembangunan Koperasi Unit Desa: Tinjauan Studi Empiris*. Jakarta: Dewan Koperasi Indonesia.
- Tambunan, Tulus T.H. 2003. *Globalisasi Ekonomi dan Ekonomi Kerakyatan Suatu Peluang atau Ancaman*. Jakarta: LP3E, Kadin Indonesia.
- , 2004. *Globalisasi dan Perdagangan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2006. *Perekonomian Indonesia Sejak Orde Lama hingga Pasca Krisis*. Jakarta: PT. Quantum Pustaka.
- Team Universiitas Gajah Mada. 1985. *Koperasi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Departemen Koperasi.
- Tjager I. Nyoman dan Yudi Pramadi. 1997. "Pasar Modal dalam Menghadapi Persaingan Internasional Pada Era Globalisasi", dalam Marzuki Usman, Singgih Riphath dan Syahrir Ika (ed.), *Peluang dan Tantangan Pasar Modal Indonesia Menghadapi Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia bekerja sama dengan Jurnal Keuangan dan Moneter.

- Todaro, Michael P. *Economic Development*, semua edisi. Addison-Wesley Publishing Company.
- Toffler, Alvin. 1980. *Future Shock*. London: Pan Book Ltd.
- Trechter, David. 2005. *"A Neo-Institutional Assessment of Cooperative Evolution: Comparing the Australian Wheat Board and the Fonterra Dairy Group"*, University of Wisconsin at River Falls, Murray McGregor and Roy Murray-Prior, Muresk Institute of Agriculture, dan Curtin Institute of Technology, Western Australia.
- Triyatna, Stefanus Osa. 2009. "Koperasi. Dekopin Sudah Babak Belur", *Kompas*, Bisnis & Keuangan, Selasa, 7 Juli 2009, hal.21.
- Tugiman, Hiro. 1996. *Akuntansi untuk Badan Usaha Koperasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Tulus, Robby. 2005. *Koperasi Transnasional, Eksperimen Dinamis di Uni Eropa*, Majalah Pusat Informasi Perkoperasian. Jakarta: Dekopin, Lapenkop.
- Turtiainen, Turto dan J.D.Von Pischke. 1986. *"Investment and Finance in Agricultural Service Cooperatives"*, World Bank Technical Paper No.50, April, Washington, D.C.: The World Bank.
- UNCTAD. 1997. *Trade and Development Report 1997*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- , 1999. *Trade and Development Report 1999*. Geneva: United Nations Conference on Trade and Development.
- Undang-undang No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

- Undang-undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Vandeburg, Jennifer M, Joan R. Fulton, Susan Hine, dan Kevin T. McNamara. 2000. *“Driving Forces and Success Factors for Mergers, Acquisitions, Joint Ventures, and Strategic Alliances among Local Cooperatives”*, makalah dalam the NCR-194 Annual Meeting, December 13, Las Vegas, Nevada.
- Verhagen, K. 1984. *Cooperation for Survival*. Amsterdam.
- Warman, Marc. 1994. “Cooperative Grain Marketing: Changes, Issues, and Alternatives”, *ACS Research Report 123, April*. Washington, D.C.: United States Department of Agriculture, Agricultural Cooperative Service.
- Wattanapruttipaisan, Thitapha. “Four Proposals For Improved Financing of SMEs Development in ASEAN”, *Asian Development Review*, Vol.20, No.2, December 2003.
- Weinstein, Frank B. 1976. *Indonesia Foreign Policy and the Dilemma of Dependence*. Ithaca: Cornell University Press.
- Whyte, William Foote dan Kathryn King Whyte. 1991. *Making Mondragon: The Growth and Dynamics of the Worker Cooperative Complex*. Ithaca, NY: ILR Press.
- Wibisono, Christianto. 1995, Perkembangan Mutakhir Konglomerat Indonesia, dalam *Warta Ekonomi* No. 48 Th. VI.
- Widiyanti, Ninik. 1994. *Manajemen Koperasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widiyanto. 1996. *“Profil Keunggulan Bersaing KUD Jatinom”*, laporan penelitian. Semarang: BPMA-Undip.
- Widiyanto, Ibnu. 1998. *“Koperasi sebagai Pelaksana Distribusi Barang: Realita dan Tantangan (Sebuah Pendekatan*

Pragmatis”, makalah dalam NET Seminar, “Merancang dan Memelihara Jaringan Distribusi Barang Yang Tangguh Dan Efisien Di Indonesia, 1-5 September, Forum TI-ITS, Semarang.

Widjaja, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Cetakan Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Wolf, Martin. 2004. *Why Globalization Works*. New Haven dan London: Yale University Press.

Young, Linda M. dan Karen M. Huff. 1997. “Free Trade in the Pacific Rim: On What Basis?”, dalam Thomas W. Hertel (ed.), *Global Trade Analysis: Modelling and Applications*, Cambridge University Press.

Zeuli, Kimberly A dan Robert Cropp. 2005. *Cooperatives: Principles and Practices in the 21st Century*, A1457, edisi ke-4, University of Wisconsin, Madison.

Zuvekas, Clarence, Jr. 1979. *Economic Development: An Introduction*. New York: St. Martin's.

CURRICULUM VITAE



Muhammad Hasan, S.Pd., M.Pd. adalah Magister dalam bidang Pendidikan Ekonomi pada Universitas Negeri Makassar. Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 06 September 1985. Menyelesaikan program pendidikan S1 Program Studi Pendidikan Ekonomi Koperasi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2007 dengan predikat *cumlaude* dan Program S2 pada Program

Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Makassar pada tahun 2009 dengan predikat sangat memuaskan. Sejak tanggal 01 Desember 2010 tercatat sebagai dosen tetap Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Saat ini penulis menjabat sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Penulis telah menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah, baik yang berupa artikel penelitian yang dimuat pada jurnal ilmiah, maupun buku, baik pada tingkat nasional, maupun internasional.



Dr. H. Muhammad Azis, M.Si. Doktor dalam bidang Pendidikan Ekonomi pada Universitas Negeri Malang. Merupakan staf pengajar pada Program Studi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNM. Selain mengajar juga aktif dalam melakukan berbagai kegiatan ilmiah seperti penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam bidang ilmu sosial dan ilmu ekonomi, juga penulis dan

pemakalah pada jurnal-jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar.